



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2017 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah
Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp6.214.072.432.696,00 bertambah/berkurang sebesar Rp(70.647.145.357,00) sehingga menjadi Rp6.143.425.287.339,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula		Rp	5.727.769.666.875,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	(73.797.592.675,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp	5.653.972.074.200,00

2. Belanja Daerah

a. Semula		Rp	6.091.572.432.696,00
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	(65.647.145.357,00)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp	6.025.925.287.339,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula		Rp	486.302.765.821,00
2) Bertambah/(berkurang)		Rp	3.150.447.318,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp	489.453.213.139,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	122.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	117.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	371.953.213.139,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	1.849.837.899.685,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.182.662.728,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	1.840.655.236.957,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	3.870.355.267.190,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(64.614.929.947,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.805.740.337.243,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	7.576.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.576.500.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp	1.672.730.084.548,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(25.169.310.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	1.647.560.774.548,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	30.776.089.575,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.591.825.526,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	34.367.915.101,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp	86.558.389.843,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.364.951.601,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	93.923.341.444,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	59.773.335.719,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.029.870.145,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	64.803.205.864,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	3.869.575.248.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(64.639.956.067,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	3.804.935.291.933,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	780.019.190,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.026.120,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	805.045.310,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1) Semula	Rp	7.576.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	7.576.500.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp	4.006.005.048.373,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(43.515.640.593,00)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	3.962.489.407.780,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	772.603.879.305,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(49.277.440.509,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	723.326.438.796,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	69.073.641.335,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.178.258.245,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	90.251.899.580,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	1.243.889.863.683,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.967.677.500,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	1.249.857.541.183,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 1.740.762.611.496,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (62.463.349.746,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.678.299.261.750,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 1.250.827.726.617,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.359.508.090,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.261.187.234.707,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 73.414.802.510,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 73.414.802.510,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 914.269.697.750,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.987.201.063,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 920.256.898.813,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 26.730.210.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.601.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 29.331.210.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 240.782.452.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (44.954.996.313,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 195.827.455.687,00

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 148.429.608.008,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 38.320.822.662,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp 186.750.430.670,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 90.700.096.260,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (11.347.054.220,00)</u> |
| Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp 79.353.042.040,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 258.558.283.967,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (33.217.269.542,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp 225.341.014.425,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 34.133.439.070,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.921.056.904,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp 36.054.495.974,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Semula | Rp 69.073.641.335,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.178.258.245,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 90.251.899.580,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 684.276.997.183,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 14.194.195.942,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 698.471.193.125,00 |

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 559.612.866.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (8.226.518.442,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 551.386.348.058,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 486.302.765.821,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.150.447.318,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 489.453.213.139,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 122.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 117.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 481.302.765.821,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.150.447.318,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 484.453.213.139,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	112.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	112.500.000.000,00

b. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan

- Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam dalam berita daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7-179/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN**

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.849.837.899.685	1.840.655.236.957	(9.182.662.728)	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548	1.647.560.774.548	(25.169.310.000)	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	30.776.089.575	34.367.915.101	3.591.825.526	12 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.558.389.843	93.923.341.444	7.364.951.601	9 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.773.335.719	64.803.205.864	5.029.870.145	8 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190	3.805.740.337.243	(64.614.929.947)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000	3.804.935.291.933	(64.639.956.067)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190	805.045.310	25.026.120	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.576.500.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000	7.576.500.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	5.727.769.666.875	5.653.972.074.200	(73.797.592.675)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4.006.005.048.373	3.962.489.407.780	(43.515.640.593)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.762.611.496	1.678.299.261.750	(62.463.349.746)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.827.726.617	1.261.187.234.707	10.359.508.090	1 %
5.1.04	Belanja Subsidi	73.414.802.510	73.414.802.510	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	914.269.697.750	920.256.898.813	5.987.201.063	1 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.730.210.000	29.331.210.000	2.601.000.000	10 %
5.2	BELANJA MODAL	772.603.879.305	723.326.438.796	(49.277.440.509)	6 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.782.452.000	195.827.455.687	(44.954.996.313)	19 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.429.608.008	186.750.430.670	38.320.822.662	26 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.700.096.260	79.353.042.040	(11.347.054.220)	13 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.558.283.967	225.341.014.425	(33.217.269.542)	13 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.133.439.070	36.054.495.974	1.921.056.904	6 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.243.889.863.683	1.249.857.541.183	5.967.677.500	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)	1 %
	Jumlah Belanja	6.091.572.432.696	6.025.925.287.339	(65.647.145.357)	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(363.802.765.821)	(371.953.213.139)	(8.150.447.318)	-2 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	481.302.765.821	484.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318	1 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	4 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000	112.500.000.000	0	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	50 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	4 %
	Pembiayaan Netto	363.802.765.821	371.953.213.139	8.150.447.318	2 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN II

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI**

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	42.636.986.700	2.357.634.045.772	558.485.488.145	0	0	2.916.119.533.917	38.871.314.550	2.442.714.533.429	562.929.121.424	0	0	3.005.643.654.853
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.290.995.000	1.789.383.290.494	131.947.882.800	0	0	1.921.331.173.294	3.329.079.000	1.758.764.942.047	141.608.827.620	0	0	1.900.373.769.667
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.290.995.000	1.789.383.290.494	131.947.882.800	0	0	1.921.331.173.294	3.329.079.000	1.758.764.942.047	141.608.827.620	0	0	1.900.373.769.667
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	37.849.903.700	183.507.301.670	19.451.055.540	0	0	202.958.357.210	32.530.305.200	315.282.115.821	26.164.370.290	0	0	341.446.486.111
1 02	1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	37.849.903.700	183.507.301.670	19.451.055.540	0	0	202.958.357.210	32.530.305.200	315.282.115.821	26.164.370.290	0	0	341.446.486.111
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.107.888.000	170.953.710.539	395.501.383.039	0	0	566.455.093.578	2.579.986.350	148.009.049.908	387.044.247.397	0	0	535.053.297.305
1 03	1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1.107.888.000	145.839.501.750	390.478.383.039	0	0	536.317.884.789	2.579.986.350	127.245.211.497	376.634.715.932	0	0	503.879.927.429
1 03	1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0	21.785.312.789	260.947.000	0	0	22.046.259.789	0	17.439.889.903	246.697.000	0	0	17.686.586.903
1 03	2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	0	2.698.518.000	0	0	0	2.698.518.000	0	2.884.537.008	43.710.000	0	0	2.928.247.008
1 03	3.25.2.22.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	198.792.500	0	0	0	198.792.500
1 03	4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	0	179.378.000	4.762.053.000	0	0	4.941.431.000	0	120.619.000	10.119.124.465	0	0	10.239.743.465
1 03	9.02.4.01.1.03.01.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN	0	451.000.000	0	0	0	451.000.000	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	75.755.000.000	0	0	0	0	75.755.000.000	0	74.356.185.000	0	0	0	74.356.185.000
1 04	1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0	75.755.000.000	0	0	0	0	75.755.000.000	0	74.356.185.000	0	0	0	74.356.185.000
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	47.277.511.977	7.034.540.249	0	0	0	54.312.052.226	43.744.000	53.487.449.628	3.755.906.600	0	0	57.243.356.228
1 05	1.05.9.02.1.03.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	19.350.331.055	1.222.628.600	0	0	0	20.572.959.655	43.744.000	20.152.542.099	1.222.628.600	0	0	21.375.170.699
1 05	1.05.9.02.2.22.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	27.927.180.922	5.811.911.649	0	0	0	33.739.092.571	0	33.334.907.529	2.533.278.000	0	0	35.868.185.529
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	388.200.000	90.757.231.092	4.550.626.517	0	0	0	95.307.857.609	388.200.000	92.814.791.025	4.355.769.517	0	0	97.170.560.542
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL	388.200.000	90.757.231.092	4.550.626.517	0	0	0	95.307.857.609	388.200.000	92.814.791.025	4.355.769.517	0	0	97.170.560.542
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.653.508.100	845.993.008.627	178.319.731.160	0	0	0	1.024.312.739.787	20.063.749.550	805.123.675.139	124.886.108.554	0	0	930.009.783.693
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	48.815.923.351	1.217.910.000	0	0	0	50.033.833.351	0	44.434.898.869	1.248.386.000	0	0	45.683.284.869
2 07	3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	48.815.923.351	1.217.910.000	0	0	0	50.033.833.351	0	44.434.898.869	1.248.386.000	0	0	45.683.284.869

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	12.507.714.519	0	0	0	12.507.714.519	0	12.073.270.599	0	0	0	12.073.270.599
2 08	2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	0	12.507.714.519	0	0	0	12.507.714.519	0	12.073.270.599	0	0	0	12.073.270.599
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	2.017.196.000	0	0	0	2.017.196.000	0	1.671.134.250	0	0	0	1.671.134.250
2 09	3.27.2.09.2.22.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	2.017.196.000	0	0	0	2.017.196.000	0	1.671.134.250	0	0	0	1.671.134.250
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	6.944.425.000	75.526.000	0	0	7.019.951.000	0	5.479.778.466	75.526.000	0	0	5.555.304.466
2 10	1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0	6.544.425.000	75.526.000	0	0	6.619.951.000	0	5.126.616.466	75.526.000	0	0	5.202.142.466
2 10	4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	353.162.000	0	0	0	353.162.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17.152.905.900	60.618.787.838	9.521.709.500	0	0	70.140.497.338	18.334.140.250	56.312.400.880	9.430.542.000	0	0	65.742.942.880
2 11	2.11.3.28.2.22.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	17.152.905.900	60.618.787.838	9.521.709.500	0	0	70.140.497.338	18.334.140.250	56.312.400.880	9.430.542.000	0	0	65.742.942.880

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1.653.191.000	64.074.000	0	0	1.717.265.000	0	598.721.000	0	0	0	598.721.000
2 12	4.01.2.10.1.03.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	0	1.653.191.000	64.074.000	0	0	1.717.265.000	0	598.721.000	0	0	0	598.721.000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	846.817.000	0	0	0	846.817.000	0	621.677.500	0	0	0	621.677.500
2 14	2.08.2.14.2.22.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	0	846.817.000	0	0	0	846.817.000	0	621.677.500	0	0	0	621.677.500
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	926.532.200	110.213.145.817	3.864.990.000	0	0	114.078.135.817	889.306.800	107.922.954.988	3.821.715.000	0	0	111.744.669.988
2 15	2.15.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	926.532.200	110.213.145.817	3.864.990.000	0	0	114.078.135.817	889.306.800	107.922.954.988	3.821.715.000	0	0	111.744.669.988
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.800.000	15.576.373.205	362.042.000	0	0	15.938.415.205	1.800.000	14.347.858.376	337.745.000	0	0	14.685.603.376
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.800.000	15.576.373.205	362.042.000	0	0	15.938.415.205	1.800.000	14.347.858.376	337.745.000	0	0	14.685.603.376
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	803.200.000	25.442.388.731	957.369.000	0	0	26.399.757.731	129.500.000	24.470.186.959	919.124.000	0	0	25.389.310.959

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	803.200.000	25.442.388.731	957.369.000	0	0	26.399.757.731	129.500.000	24.470.186.959	919.124.000	0	0	25.389.310.959
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	390.070.000	12.214.814.883	246.456.600	0	0	12.461.271.483	388.210.000	11.495.192.955	246.456.600	0	0	11.741.649.555
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	390.070.000	12.214.814.883	246.456.600	0	0	12.461.271.483	388.210.000	11.495.192.955	246.456.600	0	0	11.741.649.555
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	55.432.719.880	118.856.000	0	0	55.551.575.880	0	63.014.219.575	79.709.000	0	0	63.093.928.575
2 19	1.01.2.19.2.22.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	55.432.719.880	118.856.000	0	0	55.551.575.880	0	63.014.219.575	79.709.000	0	0	63.093.928.575
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	2.284.275.997	113.121.000	0	0	2.397.396.997	0	2.058.186.591	96.657.000	0	0	2.154.843.591
2 20	5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	2.284.275.997	113.121.000	0	0	2.397.396.997	0	2.058.186.591	96.657.000	0	0	2.154.843.591
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	0	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000
2 21	2.16.9.02.2.22.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	0	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	241.400.000	457.158.968.438	154.419.187.060	0	0	611.578.155.498	183.192.500	428.144.395.600	102.075.575.954	0	0	530.219.971.554
2 22	1.01.2.19.2.22.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	9.256.304.000	6.962.696.000	0	0	16.219.000.000	0	5.201.463.500	6.534.696.000	0	0	11.736.159.500
2 22	1.02.2.22.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	1.035.261.800	0	0	0	1.035.261.800

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0	328.697.000	0	0	0	0	328.697.000	0	109.464.000	0	0	0	109.464.000
2 22 1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0	0	0	0	0	0	0	0	14.367.100	235.500.000	0	0	249.867.100
2 22 1.05.9.02.1.03.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	6.857.000.000	1.143.000.000	0	0	0	8.000.000.000	0	9.583.667.600	4.451.640.000	0	0	14.035.307.600
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	0	499.305.000	1.712.500.000	0	0	2.211.805.000
2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000	0	5.868.011.000	46.636.000	0	0	5.914.647.000
2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	0	3.674.911.000	164.539.000	0	0	0	3.839.450.000	0	2.686.004.000	285.517.000	0	0	2.971.521.000
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	862.427.000	3.089.633.000	0	0	0	3.952.060.000	0	1.080.601.000	2.599.166.000	0	0	3.679.767.000
2 22 2.16.9.02.2.22.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	13.830.373.000	2.169.627.000	0	0	0	16.000.000.000	0	13.568.964.800	4.765.437.100	0	0	18.334.401.900
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	9.004.810.750	56.267.189.250	0	0	0	65.272.000.000	0	26.273.064.800	5.716.929.641	0	0	31.989.994.441
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	241.400.000	347.796.555.688	17.870.124.810	0	0	0	365.666.680.498	183.192.500	309.505.142.387	27.858.607.188	0	0	337.363.749.575
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0	2.226.809.000	19.173.191.000	0	0	0	21.400.000.000	0	1.559.025.600	19.028.798.000	0	0	20.587.823.600
2 22 3.25.2.22.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	6.107.025.000	45.000.000.000	0	0	0	51.107.025.000	0	4.846.682.500	25.606.191.000	0	0	30.452.873.500
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	0	23.025.000.000	0	0	0	0	23.025.000.000	0	20.417.595.500	832.355.000	0	0	21.249.950.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	4.438.243.000	0	0	0	4.438.243.000	0	3.385.191.063	0	0	0	3.385.191.063
2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	15.632.000.000	2.368.000.000	0	0	18.000.000.000	0	13.091.647.400	2.057.044.025	0	0	15.148.691.425
2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	4.854.413.000	211.187.000	0	0	5.065.600.000	0	4.896.408.800	211.187.000	0	0	5.107.595.800
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0	864.000.000	0	0	0	864.000.000	0	1.178.408.750	0	0	0	1.178.408.750
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	2.100.000.000	0	0	0	2.100.000.000	0	2.112.928.000	133.372.000	0	0	2.246.300.000
2 22 8.01.9.02.2.22.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2.250.400.000	0	0	0	2.250.400.000	0	1.231.191.000	0	0	0	1.231.191.000
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	137.600.000	32.416.593.868	6.527.270.000	0	0	38.943.863.868	137.600.000	30.897.667.431	5.723.452.000	0	0	36.621.119.431
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	137.600.000	32.416.593.868	6.527.270.000	0	0	38.943.863.868	137.600.000	30.897.667.431	5.723.452.000	0	0	36.621.119.431
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	0	675.249.100	6.860.000	0	0	682.109.100
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	0	675.249.100	6.860.000	0	0	682.109.100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.751.686.100	194.847.438.260	5.807.422.000	0	0	200.654.860.260	4.895.590.026	180.350.752.826	5.221.153.900	0	0	185.571.906.726
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.608.919.100	36.135.950.109	3.836.172.100	0	0	39.972.122.209	1.608.919.100	32.818.206.562	3.292.478.000	0	0	36.110.684.562

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
															Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
																Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.608.919.100	36.135.950.109	3.836.172.100	0	0	39.972.122.209	1.608.919.100	32.818.206.562	3.292.478.000	0	0	36.110.684.562											
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	35.250.000	19.349.325.179	81.929.000	0	0	19.431.254.179	35.250.000	16.007.881.632	81.929.000	0	0	16.089.810.632											
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	35.250.000	19.349.325.179	81.929.000	0	0	19.431.254.179	35.250.000	16.007.881.632	81.929.000	0	0	16.089.810.632											
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.538.220.000	86.124.684.163	1.377.767.900	0	0	87.502.452.063	1.643.414.926	81.971.831.654	1.352.443.900	0	0	83.324.275.554											
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.538.220.000	86.124.684.163	1.377.767.900	0	0	87.502.452.063	1.643.414.926	81.971.831.654	1.352.443.900	0	0	83.324.275.554											
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	15.057.117.050	372.729.000	0	0	15.429.846.050	0	12.896.928.300	363.192.000	0	0	13.260.120.300											
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	15.057.117.050	372.729.000	0	0	15.429.846.050	0	12.896.928.300	363.192.000	0	0	13.260.120.300											
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	7.679.422.000	0	0	0	7.679.422.000	0	7.192.516.000	0	0	0	7.192.516.000											
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	0	7.679.422.000	0	0	0	7.679.422.000	0	7.192.516.000	0	0	0	7.192.516.000											
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	2.287.856.750	0	0	0	2.287.856.750	0	2.023.937.750	0	0	0	2.023.937.750											
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	2.287.856.750	0	0	0	2.287.856.750	0	2.023.937.750	0	0	0	2.023.937.750											

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	207.200.000	27.480.451.009	138.824.000	0	0	27.619.275.009	197.200.000	26.994.219.928	131.111.000	0	0	27.125.330.928
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	207.200.000	27.480.451.009	138.824.000	0	0	27.619.275.009	197.200.000	26.994.219.928	131.111.000	0	0	27.125.330.928
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.362.097.000	732.632.000	0	0	0	732.632.000	1.410.806.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.362.097.000	732.632.000	0	0	0	732.632.000	1.410.806.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	41.700.000	279.524.652.770	5.486.358.000	0	0	285.011.010.770	41.700.000	250.619.347.476	6.649.405.918	0	0	257.268.753.394
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	41.700.000	151.358.475.973	5.398.286.000	0	0	156.756.761.973	41.700.000	137.365.119.655	6.373.195.918	0	0	143.738.315.573
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	41.700.000	127.959.526.053	2.905.170.500	0	0	130.864.696.553	41.700.000	115.715.305.679	3.320.190.298	0	0	119.035.495.977
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	573.840.000	0	0	0	573.840.000	0	158.976.000	171.100.000	0	0	330.076.000
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.594.863.000	0	0	0	1.594.863.000	0	1.214.560.000	381.751.220	0	0	1.596.311.220
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000	PANIRADYA KAISTIMEWAN	0	21.230.246.920	2.493.115.500	0	0	23.723.362.420	0	20.276.277.976	2.500.154.400	0	0	22.776.432.376
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	128.166.176.797	88.072.000	0	0	128.254.248.797	0	113.254.227.821	276.210.000	0	0	113.530.437.821
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	128.166.176.797	88.072.000	0	0	128.254.248.797	0	113.254.227.821	276.210.000	0	0	113.530.437.821
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.660.685.785.975	288.274.373.020	5.025.950.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.606.263.828.038	5.590.099.720.074	246.496.444.549	4.161.719.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.590.767.604.312
5 01	PERENCANAAN	0	21.305.313.573	201.340.000	0	0	21.506.653.573	0	19.818.401.309	201.340.000	0	0	20.019.741.309
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	21.305.313.573	201.340.000	0	0	21.506.653.573	0	19.818.401.309	201.340.000	0	0	20.019.741.309

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02	KEUANGAN	5.654.983.865.975	207.422.176.043	3.577.431.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.523.963.112.061	5.583.726.192.074	169.452.512.330	2.680.144.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.512.242.097.093	
5 02	5.02.9.02.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	5.654.983.865.975	207.422.176.043	3.577.431.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.523.963.112.061	5.583.726.192.074	169.452.512.330	2.680.144.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.512.242.097.093
5 03	KEPEGAWAIAN	248.400.000	29.946.019.001	1.116.803.000	0	0	31.062.822.001	610.300.000	29.615.895.479	1.107.919.000	0	0	30.723.814.479	
5 03	5.03.4.01.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	248.400.000	29.946.019.001	1.116.803.000	0	0	31.062.822.001	610.300.000	29.615.895.479	1.107.919.000	0	0	30.723.814.479
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.182.500.000	21.779.850.068	105.376.000	0	0	21.885.226.068	5.492.208.000	20.717.070.414	147.316.000	0	0	20.864.386.414	
5 04	5.04.4.01.0.00.01.0000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.182.500.000	21.779.850.068	105.376.000	0	0	21.885.226.068	5.492.208.000	20.717.070.414	147.316.000	0	0	20.864.386.414
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	422.621.770	0	0	0	422.621.770	0	328.509.770	0	0	0	328.509.770	
5 05	5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	422.621.770	0	0	0	422.621.770	0	328.509.770	0	0	0	328.509.770
5 06	PENGLOLAAN PERBATASAN	271.020.000	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	271.020.000	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247	
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	271.020.000	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	271.020.000	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247
5 07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	0	401.080.000	0	0	0	401.080.000	
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	0	401.080.000	0	0	0	401.080.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	0	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	0	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	0	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	18.204.637.460	0	0	0	18.204.637.460	0	16.929.219.392	0	0	0	16.929.219.392	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	18.204.637.460	0	0	0	0	18.204.637.460	0	16.929.219.392	0	0	0	0	16.929.219.392
8 01	8.01.9.02.2.22.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	18.204.637.460	0	0	0	0	18.204.637.460	0	16.929.219.392	0	0	0	0	16.929.219.392
TOTAL		5.727.769.666.875	4.006.005.048.373	772.603.879.305	69.073.641.335	1.243.889.863.683	6.091.572.432.696	5.653.972.074.200	3.962.489.407.780	723.326.438.796	90.251.899.580	1.249.857.541.183	6.025.925.287.339		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.290.995.000	3.329.079.000	38.084.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.334.090.000	539.435.000	(794.655.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	1.956.905.000	2.789.644.000	832.739.000	
Jumlah Pendapatan									3.290.995.000	3.329.079.000	38.084.000	
0	00	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.921.331.173.294	1.900.373.769.667	(20.957.403.627)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	948.245.433.727	936.210.209.583	(12.035.224.144)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	624.320.304.663	613.627.672.568	(10.692.632.095)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	137.517.000	137.517.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	0	137.517.000	137.517.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	137.517.000	137.517.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	853.012.000	853.012.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	0	853.012.000	853.012.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	853.012.000	853.012.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	1.017.573.000	1.017.573.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.017.573.000	1.017.573.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04	5	1 05	Belanja Hibah	0	1.017.573.000	1.017.573.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	05			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	1.532.932.000	1.532.932.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.013.573.000	1.013.573.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	05	5	1 05	Belanja Hibah	0	1.013.573.000	1.013.573.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	0	519.359.000	519.359.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	05	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	519.359.000	519.359.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	06			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	519.359.000	519.359.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	06	5	2	BELANJA MODAL	0	519.359.000	519.359.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	06	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	519.359.000	519.359.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	08			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	0	1.254.532.000	1.254.532.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	0	320.240.000	320.240.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	08	5	1 05	Belanja Hibah	0	320.240.000	320.240.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	08	5	2	BELANJA MODAL	0	934.292.000	934.292.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	08	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	934.292.000	934.292.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	10			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	903.827.000	903.827.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	10	5	2	BELANJA MODAL	0	903.827.000	903.827.000		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	903.827.000	903.827.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.990.182.000	404.648.000	(12.585.534.000)		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	2.847.160.000	404.648.000	(2.442.512.000)		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.612.000	153.612.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14	5	1	05	Belanja Hibah	2.693.548.000	251.036.000	(2.442.512.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14	5	2	BELANJA MODAL	10.143.022.000	0	(10.143.022.000)		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.143.022.000	0	(10.143.022.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	19			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	1.337.503.000	1.337.503.000		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	19	5	2	BELANJA MODAL	0	1.337.503.000	1.337.503.000		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	19	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.337.503.000	1.337.503.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	20			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	1.738.564.000	1.738.564.000		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	20	5	2	BELANJA MODAL	0	1.738.564.000	1.738.564.000		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	20	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.738.564.000	1.738.564.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	22			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	460.124.000	460.124.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	22	5	2	BELANJA MODAL	0	460.124.000	460.124.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	22	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	460.124.000	460.124.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	24			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	0	142.654.000	142.654.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	24	5	2	BELANJA MODAL	0	142.654.000	142.654.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	24	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	142.654.000	142.654.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	25			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	141.607.000	141.607.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	25	5	2	BELANJA MODAL	0	141.607.000	141.607.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	25	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	141.607.000	141.607.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	28			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	376.693.000	376.693.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	28	5	2	BELANJA MODAL	0	376.693.000	376.693.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	28	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	376.693.000	376.693.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	31			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.854.637.000	1.854.637.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	31	5	2	BELANJA MODAL	0	1.854.637.000	1.854.637.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	31	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.854.637.000	1.854.637.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	36			Pengadaan Mebel Sekolah	0	315.000.000	315.000.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	36	5	1	BELANJA OPERASI	0	92.000.000	92.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	36	5	1 05	Belanja Hibah	0	92.000.000	92.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	36	5	2	BELANJA MODAL	0	223.000.000	223.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	36	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	223.000.000	223.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	41			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.205.000.000	2.205.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	41	5	1	BELANJA OPERASI	340.000.000	340.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	41	5	1 05	Belanja Hibah	340.000.000	340.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	41	5	2	BELANJA MODAL	1.865.000.000	1.865.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	41	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.865.000.000	1.865.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	45			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	42.538.940.000	43.507.310.000	968.370.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	45	5	1	BELANJA OPERASI	42.538.940.000	43.507.310.000	968.370.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	45	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.120.025.000	21.287.195.000	(832.830.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	45	5	1 05	Belanja Hibah	20.418.915.000	22.220.115.000	1.801.200.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.609.647.463	33.678.981.058	(6.930.666.405)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	1	BELANJA OPERASI	33.910.329.763	28.277.666.358	(5.632.663.405)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.910.329.763	28.277.666.358	(5.632.663.405)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	2	BELANJA MODAL	6.699.317.700	5.401.314.700	(1.298.003.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.397.275.000	5.175.406.000	(1.221.869.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.519.700	193.519.700	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.850.000	11.850.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	47	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	96.673.000	20.539.000	(76.134.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	49			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	364.129.000	303.788.000	(60.341.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	49	5	1	BELANJA OPERASI	364.129.000	303.788.000	(60.341.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	49	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	364.129.000	303.788.000	(60.341.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	50			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	61.598.000	40.130.000	(21.468.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	50	5	1	BELANJA OPERASI	61.598.000	40.130.000	(21.468.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	50	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.598.000	40.130.000	(21.468.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	52			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	733.108.500	519.939.500	(213.169.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	52	5	1	BELANJA OPERASI	733.108.500	519.939.500	(213.169.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	52	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	318.108.500	104.939.500	(213.169.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	52	5	1 05	Belanja Hibah	415.000.000	415.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	524.787.000.000	520.361.572.310	(4.425.427.690)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	1	BELANJA OPERASI	510.589.022.451	501.234.106.884	(9.354.915.567)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.897.022.451	48.760.769.884	1.863.747.433	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	1	05	Belanja Hibah	463.692.000.000	452.473.337.000	(11.218.663.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	2		BELANJA MODAL	14.197.977.549	19.127.465.426	4.929.487.877	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.890.459.000	12.194.426.937	4.303.967.937	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	53	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.307.518.549	6.933.038.489	625.519.940	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	54				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.699.700	20.769.700	(9.930.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	54	5	1		BELANJA OPERASI	30.699.700	20.769.700	(9.930.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.699.700	20.769.700	(9.930.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	284.430.755.264	275.460.284.176	(8.970.471.088)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	04				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	15.149.480.000	15.149.480.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.041.500.000	1.041.500.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	0	1.041.500.000	1.041.500.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	0	14.107.980.000	14.107.980.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	14.107.980.000	14.107.980.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	10				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	632.440.000	632.440.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	0	632.440.000	632.440.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	632.440.000	632.440.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	15				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	1.272.219.000	1.272.219.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	15	5	1		BELANJA OPERASI	0	724.745.000	724.745.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	15	5	1	05	Belanja Hibah	0	724.745.000	724.745.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	15	5	2		BELANJA MODAL	0	547.474.000	547.474.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	15	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	547.474.000	547.474.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	17				Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	0	324.000.000	324.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	17	5	1		BELANJA OPERASI	0	324.000.000	324.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	17	5	1	05	Belanja Hibah	0	324.000.000	324.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	18				Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0	234.084.000	234.084.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	18	5	1		BELANJA OPERASI	0	234.084.000	234.084.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	18	5	1	05	Belanja Hibah	0	234.084.000	234.084.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	19				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	93.413.000	93.413.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	19	5	2		BELANJA MODAL	0	93.413.000	93.413.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	19	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	93.413.000	93.413.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.020.580.000	564.944.000	(19.455.636.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23	5	1		BELANJA OPERASI	3.022.673.000	564.944.000	(2.457.729.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	203.520.000	203.520.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23	5	1	05	Belanja Hibah	2.819.153.000	361.424.000	(2.457.729.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23	5	2		BELANJA MODAL	16.997.907.000	0	(16.997.907.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	23	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.997.907.000	0	(16.997.907.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	28			Pengadaan Mebel Sekolah	0	1.750.000.000	1.750.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	28	5	1	BELANJA OPERASI	0	125.000.000	125.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	28	5	1 05	Belanja Hibah	0	125.000.000	125.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	28	5	2	BELANJA MODAL	0	1.625.000.000	1.625.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	28	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.625.000.000	1.625.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	33			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48.043.044.000	48.043.044.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	10.570.000.000	10.570.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	33	5	1 05	Belanja Hibah	10.570.000.000	10.570.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	33	5	2	BELANJA MODAL	37.473.044.000	37.473.044.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	33	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.473.044.000	37.473.044.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.230.248.014	56.582.588.764	(13.647.659.250)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	1	BELANJA OPERASI	47.984.625.189	38.191.651.939	(9.792.973.250)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	1 01	Belanja Pegawai	116.820.000	116.820.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.867.805.189	38.074.831.939	(9.792.973.250)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	2	BELANJA MODAL	22.245.622.825	18.390.936.825	(3.854.686.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.459.462.825	18.046.851.825	(3.412.611.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.463.000	219.463.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	39	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	566.697.000	124.622.000	(442.075.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	45			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	346.043.750	222.404.750	(123.639.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	45	5	1	BELANJA OPERASI	346.043.750	222.404.750	(123.639.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	45	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	346.043.750	222.404.750	(123.639.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	145.742.400.000	150.558.437.162	4.816.037.162	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	1	BELANJA OPERASI	128.618.275.324	123.654.965.143	(4.963.310.181)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.282.275.324	61.273.218.143	1.990.942.819	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	1 05	Belanja Hibah	69.336.000.000	62.381.747.000	(6.954.253.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	2	BELANJA MODAL	17.124.124.676	26.903.472.019	9.779.347.343	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.098.778.655	20.148.211.834	9.049.433.179	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	46	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.025.346.021	6.755.260.185	729.914.164	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	47			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	48.439.500	33.229.500	(15.210.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	47	5	1	BELANJA OPERASI	48.439.500	33.229.500	(15.210.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	47	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.439.500	33.229.500	(15.210.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	00			Pengelolaan Pendidikan Khusus	39.494.373.800	47.122.252.839	7.627.879.039	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	08			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.201.820.000	0	(2.201.820.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	08	5	1	BELANJA OPERASI	2.201.820.000	0	(2.201.820.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.091.000	0	(110.091.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	08	5	1 05	Belanja Hibah	2.091.729.000	0	(2.091.729.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	18			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	1.281.088.000	1.281.088.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	18	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.281.088.000	1.281.088.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	34.091.000	34.091.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	18	5	1 05	Belanja Hibah	0	1.246.997.000	1.246.997.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	19			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	19	5	1	BELANJA OPERASI	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	19	5	1 05	Belanja Hibah	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	24			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	24	5	1	BELANJA OPERASI	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	24	5	1 05	Belanja Hibah	0	460.366.000	460.366.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	44			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.998.243.000	4.993.243.000	(5.000.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	44	5	1	BELANJA OPERASI	4.998.243.000	4.993.243.000	(5.000.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	44	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.559.153.000	1.554.153.000	(5.000.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	44	5	1 05	Belanja Hibah	3.439.090.000	3.439.090.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.686.731.300	6.830.430.000	(1.856.301.300)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46	5	1	BELANJA OPERASI	6.640.700.700	5.555.142.400	(1.085.558.300)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.640.700.700	5.555.142.400	(1.085.558.300)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46	5	2	BELANJA MODAL	2.046.030.600	1.275.287.600	(770.743.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	921.043.000	619.847.000	(301.196.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	46	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.124.987.600	655.440.600	(469.547.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	48				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.159.761.000	1.015.299.000	(144.462.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	48	5	1		BELANJA OPERASI	1.159.761.000	1.015.299.000	(144.462.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.761.000	1.015.299.000	(144.462.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	49				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	9.059.774.000	8.993.174.000	(66.600.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	49	5	1		BELANJA OPERASI	9.059.774.000	8.993.174.000	(66.600.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.059.774.000	8.993.174.000	(66.600.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	51				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	667.867.500	719.267.500	51.400.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	51	5	1		BELANJA OPERASI	667.867.500	719.267.500	51.400.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	667.867.500	719.267.500	51.400.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.706.000.000	22.360.122.339	9.654.122.339	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	1		BELANJA OPERASI	12.123.301.300	20.790.524.039	8.667.222.739	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.225.301.300	4.171.959.039	1.946.657.739	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	1	05	Belanja Hibah	9.898.000.000	16.618.565.000	6.720.565.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	2		BELANJA MODAL	582.698.700	1.569.598.300	986.899.600	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.832.700	1.318.793.500	797.960.800	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	52	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.866.000	250.804.800	188.938.800	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	53				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.177.000	8.897.000	(5.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	53	5	1		BELANJA OPERASI	14.177.000	8.897.000	(5.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.03	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.177.000	8.897.000	(5.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.217.160.000	1.337.090.000	119.930.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	00				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.217.160.000	1.337.090.000	119.930.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	01				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	444.000.000	374.350.000	(69.650.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	444.000.000	374.350.000	(69.650.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000	374.350.000	(69.650.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	773.160.000	962.740.000	189.580.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	773.160.000	962.740.000	189.580.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	773.160.000	962.740.000	189.580.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	00				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	971.515.487.567	962.514.347.084	(9.001.140.483)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.734.097.900	1.509.042.700	(225.055.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.597.900	594.675.900	(205.922.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	800.597.900	594.675.900	(205.922.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.597.900	594.675.900	(205.922.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	933.500.000	914.366.800	(19.133.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	933.500.000	914.366.800	(19.133.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	933.500.000	914.366.800	(19.133.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	949.903.301.865	938.003.116.195	(11.900.185.670)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	949.039.409.865	937.369.509.195	(11.669.900.670)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	949.039.409.865	937.369.509.195	(11.669.900.670)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	949.039.409.865	937.369.509.195	(11.669.900.670)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	548.458.000	318.173.000	(230.285.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	548.458.000	318.173.000	(230.285.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	548.458.000	318.173.000	(230.285.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	218.595.000	218.595.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	218.595.000	218.595.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.595.000	218.595.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	88.344.000	88.344.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	88.344.000	88.344.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.344.000	88.344.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.495.000	8.495.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	08	5 1	BELANJA OPERASI	8.495.000	8.495.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.495.000	8.495.000	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.758.028.250	2.438.619.950	(319.408.300)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.988.100	56.629.000	(1.359.100)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	57.988.100	56.629.000	(1.359.100)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.988.100	56.629.000	(1.359.100)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.850.033.200	1.685.584.000	(164.449.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	344.519.200	313.954.000	(30.565.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	344.519.200	313.954.000	(30.565.200)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5 2	BELANJA MODAL	1.505.514.000	1.371.630.000	(133.884.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.505.514.000	1.371.630.000	(133.884.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.994.200	50.593.200	(2.401.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	52.994.200	50.593.200	(2.401.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.994.200	50.593.200	(2.401.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	315.879.750	276.379.750	(39.500.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	315.879.750	276.379.750	(39.500.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	315.879.750	276.379.750	(39.500.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.740.000	32.320.000	(420.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	32.740.000	32.320.000	(420.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.740.000	32.320.000	(420.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.393.000	337.114.000	(111.279.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	448.393.000	337.114.000	(111.279.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	448.393.000	337.114.000	(111.279.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.911.558.652	11.917.488.052	5.929.400	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.125.000	13.845.000	(1.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.125.000	13.845.000	(1.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000	13.845.000	(1.280.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.208.608.752	8.223.898.152	15.289.400	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.208.608.752	8.223.898.152	15.289.400	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.208.608.752	8.223.898.152	15.289.400	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.687.824.900	3.679.744.900	(8.080.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	3.687.824.900	3.679.744.900	(8.080.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	1.002.360.000	1.000.680.000	(1.680.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.464.900	2.679.064.900	(6.400.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.348.500.900	3.219.223.277	(129.277.623)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.221.600	444.769.200	(36.452.400)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	481.221.600	444.769.200	(36.452.400)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	481.221.600	444.769.200	(36.452.400)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.306.194.300	2.288.069.077	(18.125.223)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.238.570.550	1.220.445.327	(18.125.223)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.238.570.550	1.220.445.327	(18.125.223)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	1.067.623.750	1.067.623.750	0	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.067.623.750	1.067.623.750	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	561.085.000	486.385.000	(74.700.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	561.085.000	486.385.000	(74.700.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	561.085.000	486.385.000	(74.700.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	00			Peningkatan Pelayanan BLUD	1.860.000.000	5.426.856.910	3.566.856.910	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.860.000.000	5.426.856.910	3.566.856.910	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.860.000.000	5.411.856.910	3.551.856.910	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	5	1 01	Belanja Pegawai	1.444.044.400	2.032.654.800	588.610.400	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	415.955.600	3.379.202.110	2.963.246.510	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	5	2	BELANJA MODAL	0	15.000.000	15.000.000	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15.000.000	15.000.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	55.551.575.880	63.093.928.575	7.542.352.695	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.015.672.750	4.638.992.000	(376.680.750)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	00			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.765.672.750	3.388.992.000	(376.680.750)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.933.901.750	1.958.722.000	24.820.250	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.933.901.750	1.958.722.000	24.820.250	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	829.467.750	854.288.000	24.820.250	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.104.434.000	1.104.434.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.831.771.000	1.430.270.000	(401.501.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.831.771.000	1.430.270.000	(401.501.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.831.771.000	1.430.270.000	(401.501.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	00				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	02				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.266.090.000	49.310.758.000	8.044.668.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.03	00				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.266.090.000	12.310.758.000	7.044.668.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.03	03				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5.266.090.000	12.310.758.000	7.044.668.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.266.090.000	12.310.758.000	7.044.668.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.266.090.000	12.310.758.000	7.044.668.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.04	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.04	02			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	03	1.04	02	5	1 05	Belanja Hibah	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.269.813.130	9.144.178.575	(125.634.555)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.676.402.480	2.693.812.925	17.410.445	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.676.402.480	2.693.812.925	17.410.445	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.676.402.480	2.693.812.925	17.410.445	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.676.402.480	2.693.812.925	17.410.445	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.974.100	276.345.100	(39.629.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.000	29.962.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	29.962.000	29.962.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.000	29.962.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.530.300	119.383.300	(39.147.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	39.674.300	39.674.300	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.674.300	39.674.300	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	118.856.000	79.709.000	(39.147.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.856.000	79.709.000	(39.147.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.137.000	40.137.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	40.137.000	40.137.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.137.000	40.137.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.108.800	26.108.800	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	26.108.800	26.108.800	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.108.800	26.108.800	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.948.000	3.948.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.948.000	3.948.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.948.000	3.948.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.288.000	56.806.000	(482.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	57.288.000	56.806.000	(482.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.288.000	56.806.000	(482.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.931.561.050	4.931.561.050	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.000	430.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	430.000	430.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.000	430.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.862.450	635.862.450	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	635.862.450	635.862.450	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	635.862.450	635.862.450	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.295.268.600	4.295.268.600	0		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.295.268.600	4.295.268.600	0		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	46.740.000	46.740.000	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.248.528.600	4.248.528.600	0	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.875.500	1.242.459.500	(103.416.000)		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.950.000	49.606.000	(10.344.000)		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	59.950.000	49.606.000	(10.344.000)		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.950.000	49.606.000	(10.344.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.117.433.000	1.024.361.000	(93.072.000)		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.117.433.000	1.024.361.000	(93.072.000)		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.433.000	1.024.361.000	(93.072.000)	
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.492.500	168.492.500	0		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	168.492.500	168.492.500	0		
2	19	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.492.500	168.492.500	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.219.000.000	11.736.159.500	(4.482.840.500)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.219.000.000	11.736.159.500	(4.482.840.500)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	00		Pendidikan Berbasis Budaya	16.219.000.000	11.736.159.500	(4.482.840.500)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	01		Pembinaan Muatan Lokal	6.050.000.000	2.872.859.500	(3.177.140.500)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	01	5 1	BELANJA OPERASI	6.050.000.000	2.872.859.500	(3.177.140.500)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000.000	2.872.859.500	(3.177.140.500)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02		Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	6.369.000.000	5.941.000.000	(428.000.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02	5 1	BELANJA OPERASI	31.200.000	31.200.000	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000	31.200.000	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02	5 2	BELANJA MODAL	6.337.800.000	5.909.800.000	(428.000.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.318.000	442.318.000	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.895.482.000	5.467.482.000	(428.000.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04		Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.800.000.000	2.922.300.000	(877.700.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04	5 1	BELANJA OPERASI	3.175.104.000	2.297.404.000	(877.700.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.175.104.000	2.297.404.000	(877.700.000)	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04	5 2	BELANJA MODAL	624.896.000	624.896.000	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.626.000	187.626.000	0	
2	22	1.01.2.19.2.22.03.0000	08	1.10	04	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	437.270.000	437.270.000	0	
Jumlah Belanja								1.993.101.749.174	1.975.203.857.742	(17.897.891.432)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.03 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Total Surplus/(Defisit)	(1.989.810.754.174)	(1.971.874.778.742)	17.935.975.432	
0	00	1.01.2.19.2.22.03.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN				
							Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
							Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.849.903.700	32.530.305.200	(5.319.598.500)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	37.849.903.700	32.530.305.200	(5.319.598.500)	
Jumlah Pendapatan											37.849.903.700	32.530.305.200	(5.319.598.500)	
0	00	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	202.958.357.210	341.446.486.111	138.488.128.901	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.759.327.749	187.793.709.299	109.034.381.550	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	8.116.084.000	15.067.622.800	6.951.538.800	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	1.479.383.800	1.479.383.800	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2			BELANJA MODAL	0	1.479.383.800	1.479.383.800	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.479.383.800	1.479.383.800	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pengembangan Rumah Sakit	6.999.330.000	5.247.330.000	(1.752.000.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2			BELANJA MODAL	6.999.330.000	5.247.330.000	(1.752.000.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.752.000.000	0	(1.752.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.247.330.000	5.247.330.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	7.224.155.000	7.224.155.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	193.000.000	193.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	193.000.000	193.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2	BELANJA MODAL	0	7.031.155.000	7.031.155.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7.031.155.000	7.031.155.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	960.000.000	0	(960.000.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	11	5	2	BELANJA MODAL	960.000.000	0	(960.000.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	960.000.000	0	(960.000.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	0	960.000.000	960.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	12	5	2	BELANJA MODAL	0	960.000.000	960.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	12	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	960.000.000	960.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	21			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	156.754.000	156.754.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1	BELANJA OPERASI	154.230.000	154.230.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	154.230.000	154.230.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2	BELANJA MODAL	2.524.000	2.524.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.524.000	2.524.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	70.543.156.249	172.567.333.999	102.024.177.750	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.084.850.000	68.994.137.200	67.909.287.200	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.084.850.000	67.865.347.200	66.780.497.200	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	584.850.000	67.365.347.200	66.780.497.200	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	0	1.128.790.000	1.128.790.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.128.790.000	1.128.790.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	273.671.000	272.871.000	(800.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	273.671.000	272.871.000	(800.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	273.671.000	272.871.000	(800.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	450.000	450.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	450.000	450.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	450.000	450.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	11.160.000	11.160.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	11.160.000	11.160.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000	11.160.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.484.434.000	2.484.434.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.484.434.000	2.484.434.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.484.434.000	2.484.434.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.800.000	2.800.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.800.000	2.800.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000	2.800.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.310.000	38.310.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	38.310.000	38.310.000	0		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000	38.310.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	09			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.593.041.000	801.828.000	(791.213.000)		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.593.041.000	801.828.000	(791.213.000)		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.593.041.000	801.828.000	(791.213.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12.926.365.809	9.041.869.809	(3.884.496.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	7.800.674.809	7.349.513.809	(451.161.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1 01	Belanja Pegawai	46.380.000	46.380.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.254.294.809	6.803.133.809	(451.161.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1 05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2	BELANJA MODAL	5.125.691.000	1.692.356.000	(3.433.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.076.691.000	1.643.356.000	(3.433.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.000.000	49.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	16			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.041.525.500	76.348.572.250	39.307.046.750	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	37.041.525.500	76.348.572.250	39.307.046.750	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1 01	Belanja Pegawai	40.920.000	40.920.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.605.500	76.307.652.250	39.307.046.750	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	17			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	447.710.400	190.071.000	(257.639.400)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	447.710.400	190.071.000	(257.639.400)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	447.710.400	190.071.000	(257.639.400)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	19			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	323.823.000	217.296.000	(106.527.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	19	5	1	BELANJA OPERASI	323.823.000	217.296.000	(106.527.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	19	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.823.000	217.296.000	(106.527.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13.882.051.540	12.594.967.740	(1.287.083.800)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	1	BELANJA OPERASI	9.680.946.000	8.829.167.000	(851.779.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	1 01	Belanja Pegawai	73.860.000	74.160.000	300.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.607.086.000	8.755.007.000	(852.079.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	2	BELANJA MODAL	4.201.105.540	3.765.800.740	(435.304.800)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.721.721.740	2.721.721.740	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.479.383.800	0	(1.479.383.800)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	1.044.079.000	1.044.079.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	366.270.000	305.370.000	(60.900.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23	5	1	BELANJA OPERASI	360.270.000	299.370.000	(60.900.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.270.000	299.370.000	(60.900.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23	5	2	BELANJA MODAL	6.000.000	6.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	00			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	4.920.000	79.920.000	75.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4.500.000	4.500.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	420.000	75.420.000	75.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	420.000	420.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	420.000	420.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	0	75.000.000	75.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	75.000.000	75.000.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	00				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	95.167.500	78.832.500	(16.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	95.167.500	78.832.500	(16.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	95.167.500	78.832.500	(16.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.167.500	78.832.500	(16.335.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.426.519.684	3.741.347.184	1.314.827.500	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	00				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	0	1.662.500.000	1.662.500.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	1.662.500.000	1.662.500.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.662.500.000	1.662.500.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.662.500.000	1.662.500.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	00				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.426.519.684	2.078.847.184	(347.672.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.172.818.684	1.839.238.184	(333.580.500)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.840.885.684	1.621.935.184	(218.950.500)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	34.980.000	34.980.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.905.684	1.586.955.184	(218.950.500)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	331.933.000	217.303.000	(114.630.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.933.000	217.303.000	(114.630.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	02			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	253.701.000	239.609.000	(14.092.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	253.701.000	239.609.000	(14.092.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	253.701.000	239.609.000	(14.092.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	00			Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.762.862.777	149.907.677.628	28.144.814.851	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.650.000	78.050.000	(600.000)			
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.261.000	72.261.000	0			
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	BELANJA OPERASI	72.261.000	72.261.000	0			
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.261.000	72.261.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.389.000	5.789.000	(600.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.389.000	5.789.000	(600.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.389.000	5.789.000	(600.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.516.704.306	84.963.577.561	3.446.873.255			
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.511.512.306	84.958.385.561	3.446.873.255	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	81.511.512.306	84.958.385.561	3.446.873.255	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	81.511.512.306	84.958.385.561	3.446.873.255	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.192.000	5.192.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.192.000	5.192.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.192.000	5.192.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	0			
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.000.000	32.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1		BELANJA OPERASI	32.000.000	32.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	32.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.884.000	198.245.000	(40.639.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.224.000	2.224.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.224.000	2.224.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.224.000	2.224.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.473.000	68.473.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.303.000	26.303.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.303.000	26.303.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	42.170.000	42.170.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.170.000	42.170.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.525.000	7.525.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.525.000	7.525.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000	7.525.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.787.000	9.787.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	9.787.000	9.787.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.787.000	9.787.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.474.000	11.474.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	11.474.000	11.474.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.474.000	11.474.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.056.000	4.056.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.056.000	4.056.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.056.000	4.056.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.345.000	94.706.000	(40.639.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	135.345.000	94.706.000	(40.639.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.345.000	94.706.000	(40.639.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.937.771	1.633.441.771	52.504.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.700.000	1.700.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000	1.700.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.317.090	523.571.090	35.254.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	488.317.090	523.571.090	35.254.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	488.317.090	523.571.090	35.254.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.920.681	1.108.170.681	17.250.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.090.920.681	1.108.170.681	17.250.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	54.060.000	71.310.000	17.250.000	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.860.681	1.036.860.681	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.783.000	494.308.000	(14.475.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.198.000	241.198.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	241.198.000	241.198.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	241.198.000	241.198.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.585.000	95.110.000	(14.475.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	109.585.000	95.110.000	(14.475.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.585.000	95.110.000	(14.475.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.000.000	158.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	158.000.000	158.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000	158.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	00			Peningkatan Pelayanan BLUD	37.804.903.700	62.506.055.296	24.701.151.596	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.804.903.700	62.506.055.296	24.701.151.596	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.022.601.700	57.989.497.546	21.966.895.846	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1 01	Belanja Pegawai	13.551.665.632	12.868.722.826	(682.942.806)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.470.936.068	45.120.774.720	22.649.838.652	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	BELANJA MODAL	1.782.302.000	4.516.557.750	2.734.255.750	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.286.802.000	3.620.044.250	2.333.242.250	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	495.500.000	896.513.500	401.013.500	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	500.000.000	1.035.261.800	535.261.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	500.000.000	1.035.261.800	535.261.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	00			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	500.000.000	1.035.261.800	535.261.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	04			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	500.000.000	1.035.261.800	535.261.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	500.000.000	1.035.261.800	535.261.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	835.623.800	335.623.800	
2	22	1.02.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	04	5	1 05	Belanja Hibah	0	199.638.000	199.638.000	
Jumlah Belanja									203.458.357.210	342.481.747.911	139.023.390.701	
Total Surplus/(Defisit)									(165.608.453.510)	(309.951.442.711)	(144.342.989.201)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
0	00	1.02.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN					
								Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
								Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.107.888.000	2.579.986.350	1.472.098.350	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.103.688.000	2.511.931.350	1.408.243.350	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	4.200.000	68.055.000	63.855.000	
Jumlah Pendapatan									1.107.888.000	2.579.986.350	1.472.098.350	
0	00	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	536.317.884.789	503.879.927.429	(32.437.957.360)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	66.081.016.000	58.459.816.500	(7.621.199.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	00			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.703.904.500	13.325.577.500	(7.378.327.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	06			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000	292.990.000	92.990.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	200.000.000	292.990.000	92.990.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	92.990.000	92.990.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	06	5	1 05	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	07			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	15.825.000.000	8.325.000.000	(7.500.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	15.825.000.000	8.325.000.000	(7.500.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	07	5	1 05	Belanja Hibah	15.825.000.000	8.325.000.000	(7.500.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	21			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	21	5	1	BELANJA OPERASI	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	21	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	51			Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2.204.146.500	2.401.146.500	197.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	51	5	1	BELANJA OPERASI	2.204.146.500	2.401.146.500	197.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	51	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.204.146.500	2.401.146.500	197.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.573.674.500	1.494.904.500	(78.770.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	60	5	1	BELANJA OPERASI	1.573.674.500	1.494.904.500	(78.770.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	60	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.573.674.500	1.494.904.500	(78.770.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	811.083.500	721.536.500	(89.547.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	61	5	1	BELANJA OPERASI	811.083.500	721.536.500	(89.547.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	61	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	811.083.500	721.536.500	(89.547.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	00			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45.377.111.500	45.134.239.000	(242.872.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.989.493.000	12.035.988.000	46.495.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.258.918.000	1.313.263.000	54.345.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	658.918.000	713.263.000	54.345.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08	5	1	05	Belanja Hibah	600.000.000	600.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08	5	2		BELANJA MODAL	10.730.575.000	10.722.725.000	(7.850.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.730.575.000	10.722.725.000	(7.850.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.163.988.000	18.163.988.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	528.129.000	528.129.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	528.129.000	528.129.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	14	5	2		BELANJA MODAL	17.635.859.000	17.635.859.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	14	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.635.859.000	17.635.859.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	15.223.630.500	14.934.263.000	(289.367.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	14.893.162.000	14.934.263.000	41.101.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.893.162.000	14.934.263.000	41.101.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	21	5	2		BELANJA MODAL	330.468.500	0	(330.468.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	330.468.500	0	(330.468.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.115.000.000	4.169.270.000	(5.945.730.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	00			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	10.115.000.000	4.169.270.000	(5.945.730.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	04			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.200.000.000	1.219.770.000	19.770.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	1.219.770.000	19.770.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.770.000	19.770.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	04	5	1 05	Belanja Hibah	1.200.000.000	1.200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	09			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5.965.000.000	0	(5.965.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	5.965.000.000	0	(5.965.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.965.000.000	0	(5.965.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	10			Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	11			Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.700.000.000	2.699.500.000	(500.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	11	5	2	BELANJA MODAL	2.700.000.000	2.699.500.000	(500.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.01	11	5	2 01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000	2.699.500.000	(500.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	37.210.000.000	14.448.265.000	(22.761.735.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	00		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	37.210.000.000	14.448.265.000	(22.761.735.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	37.210.000.000	14.448.265.000	(22.761.735.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	3.350.000.000	3.350.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.350.000.000	3.350.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06	5 2	BELANJA MODAL	37.210.000.000	11.098.265.000	(26.111.735.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06	5 2 01	Belanja Modal Tanah	34.060.000.000	7.950.000.000	(26.110.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	04	1.01	06	5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.000.000	3.148.265.000	(1.735.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.085.438.460	7.084.260.460	(1.178.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.085.438.460	7.084.260.460	(1.178.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	05		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	250.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.835.438.460	6.834.260.460	(1.178.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	09	5 1	BELANJA OPERASI	6.834.260.460	6.834.260.460	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.834.260.460	6.834.260.460	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	09	5	2	BELANJA MODAL	1.178.000	0	(1.178.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.000	0	(1.178.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.600.000.000	951.598.500	(648.401.500)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	00			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.600.000.000	951.598.500	(648.401.500)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05			Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1.600.000.000	951.598.500	(648.401.500)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.561.649.000	913.247.500	(648.401.500)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.649.000	913.247.500	(548.401.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	100.000.000	0	(100.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	38.351.000	38.351.000	0		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.01	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.351.000	38.351.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	145.666.575.118	114.500.797.334	(31.165.777.784)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	00			Penyelenggaraan Jalan Provinsi	145.666.575.118	114.500.797.334	(31.165.777.784)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	02			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.010.000.000	887.350.000	(122.650.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	745.098.000	552.448.000	(192.650.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	745.098.000	552.448.000	(192.650.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	264.902.000	334.902.000	70.000.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	02	5	2	01	Belanja Modal Tanah	264.902.000	334.902.000	70.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	49.992.638.500	35.323.820.750	(14.668.817.750)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.999.834.000	259.900.000	(1.739.934.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.834.000	259.900.000	(1.739.934.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	47.992.804.500	35.063.920.750	(12.928.883.750)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.992.804.500	35.063.920.750	(12.928.883.750)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08				Rekonstruksi Jalan	36.278.900.000	35.456.552.000	(822.348.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	858.505.000	858.505.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	858.505.000	858.505.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08	5	2		BELANJA MODAL	35.420.395.000	34.598.047.000	(822.348.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.420.395.000	34.598.047.000	(822.348.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	18.310.533.250	18.082.187.000	(228.346.250)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	18.310.533.250	17.882.187.000	(428.346.250)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.310.533.250	17.882.187.000	(428.346.250)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11	5	2		BELANJA MODAL	0	200.000.000	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	200.000.000	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16				Penggantian Jembatan	38.039.999.818	23.193.258.034	(14.846.741.784)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	4.620.000.000	4.620.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16	5	1	05	Belanja Hibah	4.620.000.000	4.620.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16	5	2	BELANJA MODAL	33.419.999.818	18.573.258.034	(14.846.741.784)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.419.999.818	18.573.258.034	(14.846.741.784)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	19			Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.034.503.550	1.557.629.550	(476.874.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	19	5	1	BELANJA OPERASI	2.034.503.550	1.557.629.550	(476.874.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.034.503.550	1.557.629.550	(476.874.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.894.192.798	1.260.160.798	(634.032.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	00			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.695.513.798	1.061.481.798	(634.032.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	04			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	682.149.500	80.669.500	(601.480.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	682.149.500	80.669.500	(601.480.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	682.149.500	80.669.500	(601.480.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.013.364.298	980.812.298	(32.552.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	791.525.850	758.973.850	(32.552.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	791.525.850	758.973.850	(32.552.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07	5	2	BELANJA MODAL	221.838.448	221.838.448	0		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.838.448	221.838.448	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	00			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	198.679.000	198.679.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	01			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	23.682.000	23.682.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.682.000	23.682.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.682.000	23.682.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	05			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	174.997.000	174.997.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	174.997.000	174.997.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	174.997.000	174.997.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	207.795.764.000	249.230.662.577	41.434.898.577	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01	00			Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	150.000.000	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01	03			Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	150.000.000	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	150.000.000	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	150.000.000	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	00			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	207.795.764.000	248.980.662.577	41.184.898.577	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.654.072.000	1.373.098.880	(280.973.120)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.454.072.000	1.173.098.880	(280.973.120)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.454.072.000	1.173.098.880	(280.973.120)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2.500.000.000	2.815.577.500	315.577.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	696.597.000	941.097.000	244.500.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	696.597.000	941.097.000	244.500.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	1.803.403.000	1.874.480.500	71.077.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02	5	2 01	Belanja Modal Tanah	1.803.403.000	1.874.480.500	71.077.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	03			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	86.825.000.000	86.802.860.000	(22.140.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	350.000.000	514.179.000	164.179.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	514.179.000	164.179.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	03	5	2	BELANJA MODAL	86.475.000.000	86.288.681.000	(186.319.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	03	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.475.000.000	86.288.681.000	(186.319.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	04			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	500.000.000	467.700.610	(32.299.390)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	500.000.000	467.700.610	(32.299.390)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	467.700.610	(32.299.390)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	05			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	14.751.500.000	13.933.043.000	(818.457.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	05	5	2	BELANJA MODAL	14.751.500.000	13.933.043.000	(818.457.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.751.500.000	13.933.043.000	(818.457.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	06			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	750.000.000	635.089.160	(114.910.840)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	750.000.000	635.089.160	(114.910.840)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	635.089.160	(114.910.840)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	10			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	0	305.000.000	305.000.000		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	305.000.000	305.000.000		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	305.000.000	305.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	13			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	100.815.192.000	142.648.293.427	41.833.101.427		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	229.709.000	293.074.000	63.365.000		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	229.709.000	293.074.000	63.365.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	13	5	2	BELANJA MODAL	100.585.483.000	142.355.219.427	41.769.736.427		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	13	5	2	01	Belanja Modal Tanah	100.585.483.000	142.355.219.427	41.769.736.427	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.04	00			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	100.000.000	100.000.000		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.04	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	100.000.000	100.000.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.04	01	5	2	BELANJA MODAL	0	100.000.000	100.000.000		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.04	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100.000.000	100.000.000	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.869.898.413	53.775.096.260	(5.094.802.153)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000	454.378.000	(40.622.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	411.378.000	(38.622.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	450.000.000	411.378.000	(38.622.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	411.378.000	(38.622.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	13.000.000	(2.000.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	0		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.081.049.843	40.503.894.140	(4.577.155.703)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.994.976.403	37.421.882.450	(4.573.093.953)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	41.994.976.403	37.421.882.450	(4.573.093.953)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	41.994.976.403	37.421.882.450	(4.573.093.953)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.966.073.440	2.965.611.690	(461.750)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.966.073.440	2.965.611.690	(461.750)		
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	267.300.000	267.300.000	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.698.773.440	2.698.311.690	(461.750)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	120.000.000	116.400.000	(3.600.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	120.000.000	116.400.000	(3.600.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	116.400.000	(3.600.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	815.502.000	629.264.500	(186.237.500)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.901.000	201.019.500	1.118.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	481.500	1.600.000	1.118.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	481.500	1.600.000	1.118.500	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	199.419.500	199.419.500	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.419.500	199.419.500	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.601.000	428.245.000	(187.356.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	615.601.000	428.245.000	(187.356.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	615.601.000	428.245.000	(187.356.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.634.324.797	9.359.645.847	(274.678.950)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.634.324.797	9.359.645.847	(274.678.950)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.634.324.797	9.359.645.847	(274.678.950)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.634.324.797	9.359.645.847	(274.678.950)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.844.021.773	2.827.913.773	(16.108.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.089.012.000	1.073.004.000	(16.008.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.089.012.000	1.073.004.000	(16.008.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.012.000	1.073.004.000	(16.008.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.090.000	354.990.000	(100.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	355.090.000	354.990.000	(100.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	355.090.000	354.990.000	(100.000)	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.399.919.773	1.399.919.773	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	902.713.500	902.713.500	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	902.713.500	902.713.500	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	497.206.273	497.206.273	0	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.206.273	497.206.273	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.755.000.000	74.356.185.000	(1.398.815.000)			
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.415.000.000	21.516.185.000	101.185.000			
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	00		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)			
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	01		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)			
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.03	00			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.03	05			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	350.000.000	200.000.000	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.03	05	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	20.965.000.000	20.965.000.000	0	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	54.340.000.000	52.840.000.000	(1.500.000.000)		
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	00			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	54.340.000.000	52.840.000.000	(1.500.000.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	02			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	54.340.000.000	52.840.000.000	(1.500.000.000)	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	54.340.000.000	52.840.000.000	(1.500.000.000)	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	775.000.000	775.000.000	0	
1	04	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	53.565.000.000	52.065.000.000	(1.500.000.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	328.697.000	109.464.000	(219.233.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	328.697.000	109.464.000	(219.233.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.05	00			Pengelolaan Taman Budaya	0	100.000.000	100.000.000	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.05	01			Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	0	100.000.000	100.000.000	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	100.000.000	100.000.000	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	100.000.000	100.000.000	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.08	00			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	328.697.000	9.464.000	(319.233.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.08	01			Pengembangan Lumbung Mataraman	328.697.000	9.464.000	(319.233.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	328.697.000	9.464.000	(319.233.000)	
2	22	1.03.1.04.3.29.13.0000	08	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	328.697.000	9.464.000	(319.233.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.679.422.000	7.192.516.000	(486.906.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.508.112.000	1.364.019.000	(144.093.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	00		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	538.112.000	516.264.000	(21.848.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	538.112.000	516.264.000	(21.848.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	538.112.000	516.264.000	(21.848.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	538.112.000	516.264.000	(21.848.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	00		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	970.000.000	847.755.000	(122.245.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	03		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	970.000.000	847.755.000	(122.245.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	970.000.000	847.755.000	(122.245.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	02	1.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	970.000.000	847.755.000	(122.245.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.747.200.000	1.552.777.000	(194.423.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	00		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan	1.747.200.000	1.552.777.000	(194.423.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	03			Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	994.200.000	970.970.000	(23.230.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	994.200.000	970.970.000	(23.230.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	994.200.000	970.970.000	(23.230.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	753.000.000	581.807.000	(171.193.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	753.000.000	581.807.000	(171.193.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	03	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	753.000.000	581.807.000	(171.193.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	627.105.000	627.105.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.04	00			Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	627.105.000	627.105.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.04	04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	627.105.000	627.105.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	627.105.000	627.105.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	05	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.105.000	627.105.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.797.005.000	3.648.615.000	(148.390.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	00			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	439.000.000	290.610.000	(148.390.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000	39.360.000	(10.640.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	39.360.000	(10.640.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	39.360.000	(10.640.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	389.000.000	251.250.000	(137.750.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	389.000.000	251.250.000	(137.750.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.000.000	251.250.000	(137.750.000)	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.06	00			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	3.358.005.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.06	06			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	3.358.005.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Organisasi : 1.03.1.04.3.29.13 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.358.005.000	3.358.005.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	540.505.000	540.505.000	0	
3	29	1.03.1.04.3.29.13.0000	06	1.06	06	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	2.817.500.000	2.817.500.000	0	
Jumlah Belanja									620.081.003.789	585.538.092.429	(34.542.911.360)	
Total Surplus/(Defisit)									(618.973.115.789)	(582.958.106.079)	36.015.009.710	
0	00	1.03.1.04.3.29.13.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
Jumlah Pendapatan									0	0	0		
0	00	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA						
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.046.259.789	17.686.586.903	(4.359.672.886)			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.588.318.900	2.779.013.900	190.695.000			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12		03		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	192.500.000	0	(192.500.000)			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12		03	5	BELANJA OPERASI	192.500.000	0	(192.500.000)			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12		03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000	0	(192.500.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	48.900.000	2.700.000	(46.200.000)			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02	03		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	48.900.000	2.700.000	(46.200.000)			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	48.900.000	2.700.000	(46.200.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000	2.700.000	(46.200.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.769.605.400	1.864.388.400	94.783.000			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.669.605.400	1.764.388.400	94.783.000			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.669.605.400	1.764.388.400	94.783.000		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.669.605.400	1.764.388.400	94.783.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	02			Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000	100.000.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	577.313.500	911.925.500	334.612.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	437.582.500	838.034.500	400.452.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	437.582.500	838.034.500	400.452.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	437.582.500	838.034.500	400.452.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	139.731.000	73.891.000	(65.840.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	139.731.000	73.891.000	(65.840.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.731.000	73.891.000	(65.840.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	9.124.680.000	5.401.345.258	(3.723.334.742)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	00			Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	8.390.333.000	4.048.787.950	(4.341.545.050)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	03			Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	800.000.000	666.359.000	(133.641.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	800.000.000	666.359.000	(133.641.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000	666.359.000	(133.641.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	05			Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7.490.333.000	3.306.628.950	(4.183.704.050)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.490.333.000	3.306.628.950	(4.183.704.050)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.490.333.000	3.306.628.950	(4.183.704.050)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	06			Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	100.000.000	75.800.000	(24.200.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000	75.800.000	(24.200.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	75.800.000	(24.200.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.03	00			Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	734.347.000	1.352.557.308	618.210.308	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.03	01			Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	734.347.000	1.352.557.308	618.210.308	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	734.347.000	1.352.557.308	618.210.308	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	13	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	734.347.000	1.352.557.308	618.210.308	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.333.260.889	9.506.227.745	(827.033.144)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.672.500	59.372.500	(8.300.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.672.500	35.072.500	(2.600.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	37.672.500	35.072.500	(2.600.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.672.500	35.072.500	(2.600.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	12.300.000	(2.700.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	12.300.000	(2.700.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	12.300.000	(2.700.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	12.000.000	(3.000.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	12.000.000	(3.000.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	12.000.000	(3.000.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.326.698.439	7.783.435.295	(543.263.144)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.234.298.439	7.698.943.295	(535.355.144)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.234.298.439	7.698.943.295	(535.355.144)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.234.298.439	7.698.943.295	(535.355.144)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.400.000	60.792.000	(1.608.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	62.400.000	60.792.000	(1.608.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	49.500.000	49.500.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000	11.292.000	(1.608.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.648.000	3.148.000	(1.500.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.648.000	3.148.000	(1.500.000)		
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.648.000	3.148.000	(1.500.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	25.352.000	20.552.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	25.352.000	20.552.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.352.000	20.552.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.960.500	260.016.500	(183.944.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.775.000	15.775.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.325.000	15.775.000	450.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.325.000	15.775.000	450.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	2	BELANJA MODAL	450.000	0	(450.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000	0	(450.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.094.500	38.094.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	38.094.500	38.094.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.094.500	38.094.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	9.035.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.035.000	9.035.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.035.000	9.035.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.660.000	36.160.000	(2.500.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	38.660.000	36.160.000	(2.500.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.660.000	36.160.000	(2.500.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.800.000	25.800.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	25.800.000	25.800.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000	25.800.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.596.000	135.152.000	(181.444.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	316.596.000	135.152.000	(181.444.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	316.596.000	135.152.000	(181.444.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.697.000	246.697.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.697.000	246.697.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	246.697.000	246.697.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.697.000	246.697.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.190.900	432.190.900	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	12.200.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.200.000	12.200.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000	12.200.000	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.060.400	203.060.400	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	203.060.400	203.060.400	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.060.400	203.060.400	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.930.500	216.930.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	216.930.500	216.930.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.930.500	216.930.500	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.041.550	724.515.550	(91.526.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.077.300	209.351.300	(86.726.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	296.077.300	209.351.300	(86.726.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	296.077.300	209.351.300	(86.726.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.380.000	110.580.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	115.380.000	110.580.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.380.000	110.580.000	(4.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.584.250	404.584.250	0	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	390.784.250	404.584.250	13.800.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	390.784.250	404.584.250	13.800.000	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	13.800.000	0	(13.800.000)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.800.000	0	(13.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.619.951.000	5.202.142.466	(1.417.808.534)			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	34.400.000	34.400.000	0			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	03	1.01	00		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	34.400.000	34.400.000	0			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	03	1.01	01		Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	34.400.000	34.400.000	0			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.400.000	34.400.000	0		
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000	34.400.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.585.551.000	5.167.742.466	(1.417.808.534)			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	00		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	6.585.551.000	5.167.742.466	(1.417.808.534)			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	01		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	835.650.000	967.841.000	132.191.000			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	835.650.000	967.841.000	132.191.000		
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	835.650.000	967.841.000	132.191.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	02		Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1.200.000.000	514.039.000	(685.961.000)			
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000	514.039.000	(685.961.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000	514.039.000	(685.961.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	03				Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	300.000.000	300.000.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	300.000.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	300.000.000	300.000.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	04				Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	300.000.000	304.300.000	4.300.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	304.300.000	4.300.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	304.300.000	4.300.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	05				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	500.000.000	212.486.000	(287.514.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	212.486.000	(287.514.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	212.486.000	(287.514.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	06				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	580.000.000	204.933.000	(375.067.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	580.000.000	204.933.000	(375.067.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	580.000.000	204.933.000	(375.067.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	07				Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	1.114.250.000	928.288.466	(185.961.534)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.114.250.000	928.288.466	(185.961.534)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.250.000	928.288.466	(185.961.534)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	08				Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan	1.055.461.000	1.085.436.000	29.975.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Kadipaten				
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.055.461.000	1.085.436.000	29.975.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.461.000	1.085.436.000	29.975.000	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	09			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	620.190.000	570.419.000	(49.771.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	620.190.000	570.419.000	(49.771.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	620.190.000	570.419.000	(49.771.000)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	80.000.000	80.000.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	4.474.000	4.474.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.474.000	4.474.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	11	5	2	BELANJA MODAL	75.526.000	75.526.000	0	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.0000	11	1.01	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.526.000	75.526.000	0	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	249.867.100	249.867.100	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	249.867.100	249.867.100	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	00			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	249.867.100	249.867.100	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	03			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	0	249.867.100	249.867.100	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	0	14.367.100	14.367.100	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	14.367.100	14.367.100	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2			BELANJA MODAL	0	235.500.000	235.500.000	
2	22	1.03.2.10.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	235.500.000	235.500.000	
Jumlah Belanja											28.666.210.789	23.138.596.469	(5.527.614.320)	
Total Surplus/(Defisit)											(28.666.210.789)	(23.138.596.469)	5.527.614.320	
0	00	1.03.2.10.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	43.744.000	43.744.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	43.744.000	43.744.000	
Jumlah Pendapatan									0	43.744.000	43.744.000	
0	00	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.572.959.655	21.375.170.699	802.211.044	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.972.032.550	5.282.938.050	1.310.905.500	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	00			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.033.784.050	4.946.336.050	1.912.552.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.993.695.000	4.311.183.000	2.317.488.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.993.695.000	4.311.183.000	2.317.488.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.695.000	4.311.183.000	2.317.488.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	03			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	39.820.000	39.820.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	39.820.000	39.820.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.820.000	39.820.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	04			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.928.250	51.028.250	(5.900.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	56.928.250	51.028.250	(5.900.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.928.250	51.028.250	(5.900.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	05			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	753.711.800	311.205.800	(442.506.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	753.711.800	311.205.800	(442.506.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	753.711.800	311.205.800	(442.506.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	06			Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20.879.000	64.349.000	43.470.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	20.879.000	64.349.000	43.470.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.879.000	64.349.000	43.470.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	07			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.750.000	168.750.000	0		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	168.750.000	168.750.000	0		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	168.750.000	168.750.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	00			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	938.248.500	336.602.000	(601.646.500)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	01			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	264.182.500	42.945.000	(221.237.500)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	264.182.500	42.945.000	(221.237.500)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	264.182.500	42.945.000	(221.237.500)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	03			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	674.066.000	293.657.000	(380.409.000)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	674.066.000	293.657.000	(380.409.000)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	674.066.000	293.657.000	(380.409.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.600.927.105	16.092.232.649	(508.694.456)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	328.048.500	264.013.500	(64.035.000)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	299.328.500	235.293.500	(64.035.000)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	299.328.500	235.293.500	(64.035.000)		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	299.328.500	235.293.500	(64.035.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.720.000	28.720.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	28.720.000	28.720.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.720.000	28.720.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.692.014.305	12.579.638.849	(1.112.375.456)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.678.514.305	12.566.138.849	(1.112.375.456)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.678.514.305	12.566.138.849	(1.112.375.456)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	13.678.514.305	12.566.138.849	(1.112.375.456)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13.500.000	13.500.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	13.500.000	13.500.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000	13.500.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	670.060.000	670.060.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	670.060.000	670.060.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	670.060.000	670.060.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.05	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	670.060.000	670.060.000	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.917.150	139.898.150	(19.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	1.950.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.950.000	1.950.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000	1.950.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.636.000	14.636.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	14.636.000	14.636.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.636.000	14.636.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.623.150	15.623.150	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.623.150	15.623.150	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.623.150	15.623.150	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.580.000	2.580.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000	2.580.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.128.000	105.109.000	(19.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	105.128.000	105.109.000	(19.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.128.000	105.109.000	(19.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.015.000	146.015.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.015.000	140.015.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	140.015.000	140.015.000	0		
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.015.000	140.015.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.628.350	576.403.350	(225.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	760.000	760.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	760.000	760.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.950.000	142.725.000	(225.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	142.950.000	142.725.000	(225.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.950.000	142.725.000	(225.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.918.350	432.918.350	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	432.918.350	432.918.350	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	48.240.000	48.240.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	384.678.350	384.678.350	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.718.303.800	1.716.203.800	(2.100.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	611.125.200	611.125.200	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	611.125.200	611.125.200	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	611.125.200	611.125.200	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.005.000	27.905.000	(2.100.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.005.000	27.905.000	(2.100.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.005.000	27.905.000	(2.100.000)	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.173.600	1.077.173.600	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	560.000	560.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	560.000	560.000	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.076.613.600	1.076.613.600	0	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.076.613.600	1.076.613.600	0	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.000.000.000	14.035.307.600	6.035.307.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	8.000.000.000	14.035.307.600	6.035.307.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	00				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.000.000.000	14.035.307.600	6.035.307.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	17				Pembinaan Jagawarga	8.000.000.000	14.035.307.600	6.035.307.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	17	5	1		BELANJA OPERASI	6.857.000.000	9.583.667.600	2.726.667.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.857.000.000	9.583.667.600	2.726.667.600	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	17	5	2		BELANJA MODAL	1.143.000.000	4.451.640.000	3.308.640.000	
2	22	1.05.9.02.1.03.01.0000	08	1.09	17	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.143.000.000	4.451.640.000	3.308.640.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.1.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Belanja	28.572.959.655	35.410.478.299	6.837.518.644	
										Total Surplus/(Defisit)	(28.572.959.655)	(35.366.734.299)	(6.793.774.644)	
0	00	1.05.9.02.1.03.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.05.9.02.2.22.04.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.739.092.571	35.868.185.529	2.129.092.958	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	20.164.712.399	22.661.245.000	2.496.532.601	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	00		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.780.702.000	1.890.702.000	110.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	355.000.000	355.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	01	5	BELANJA OPERASI	355.000.000	355.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000	355.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.425.702.000	1.535.702.000	110.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	02	5	BELANJA OPERASI	1.425.702.000	1.535.702.000	110.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	1.425.702.000	1.535.702.000	110.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	00		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	15.862.083.499	11.460.277.100	(4.401.806.399)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	01		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	308.280.000	308.280.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	01	5	BELANJA OPERASI	308.280.000	308.280.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	01	5	Belanja Barang dan Jasa	308.280.000	308.280.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening				Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2.015.273.000	1.103.604.000	(911.669.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.015.273.000	1.103.604.000	(911.669.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.015.273.000	1.103.604.000	(911.669.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	669.474.000	669.474.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	180.000.000	180.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	180.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 03 5 2	BELANJA MODAL	489.474.000	489.474.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.474.000	489.474.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.147.440.350	1.985.680.350	(161.760.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.233.117.850	1.074.983.350	(158.134.500)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.117.850	1.074.983.350	(158.134.500)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 04 5 2	BELANJA MODAL	914.322.500	910.697.000	(3.625.500)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 04 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	914.322.500	910.697.000	(3.625.500)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.988.897.500	5.988.897.500	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.988.897.500	5.988.897.500	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.988.897.500	5.988.897.500	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	4.648.458.649	1.337.031.250	(3.311.427.399)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03 1.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.360.500.500	1.337.031.250	(23.469.250)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	207.790.500	184.321.250	(23.469.250)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	07	5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	1.152.710.000	1.152.710.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	07	5	2			BELANJA MODAL	3.287.958.149	0	(3.287.958.149)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	07	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.287.958.149	0	(3.287.958.149)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	08					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	84.260.000	67.310.000	(16.950.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	08	5	1			BELANJA OPERASI	84.260.000	67.310.000	(16.950.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	84.260.000	67.310.000	(16.950.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	00					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.054.288.900	9.063.022.900	7.008.734.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	02					Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.145.353.000	3.327.832.000	2.182.479.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.145.353.000	3.327.832.000	2.182.479.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.145.353.000	3.327.832.000	2.182.479.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	04					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	908.935.900	5.735.190.900	4.826.255.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	908.935.900	5.735.190.900	4.826.255.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	908.935.900	5.735.190.900	4.826.255.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	00					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	467.638.000	247.243.000	(220.395.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	01					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	142.338.000	59.128.000	(83.210.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	142.338.000	59.128.000	(83.210.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.338.000	59.128.000	(83.210.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	02			Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	111.300.000	87.915.000	(23.385.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	111.300.000	87.915.000	(23.385.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.300.000	87.915.000	(23.385.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	03			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	214.000.000	100.200.000	(113.800.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	214.000.000	100.200.000	(113.800.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000	100.200.000	(113.800.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.574.380.172	13.206.940.529	(367.439.643)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.045.000	80.729.000	6.684.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.500.000	54.184.000	6.684.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	47.500.000	54.184.000	6.684.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000	54.184.000	6.684.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.545.000	26.545.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	26.545.000	26.545.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.545.000	26.545.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.728.591.544	8.363.173.901	(365.417.643)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.371.544	8.294.953.901	(365.417.643)		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.660.371.544	8.294.953.901	(365.417.643)		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.660.371.544	8.294.953.901	(365.417.643)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.220.000	53.220.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	53.220.000	53.220.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	53.220.000	53.220.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.108.000	901.388.000	(22.720.000)		
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.321.000	11.321.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.321.000	11.321.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.321.000	11.321.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.055.000	88.055.000	30.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	58.055.000	88.055.000	30.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.055.000	88.055.000	30.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.936.000	41.936.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	41.936.000	41.936.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.936.000	41.936.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.160.000	8.160.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.160.000	8.160.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000	8.160.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.636.000	751.916.000	(52.720.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	804.636.000	751.916.000	(52.720.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	804.636.000	751.916.000	(52.720.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.083.379.000	1.097.401.000	14.022.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.083.379.000	1.097.401.000	14.022.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	21.408.000	21.408.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.408.000	21.408.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	1.061.971.000	1.075.993.000	14.022.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.061.971.000	1.075.993.000	14.022.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.510.328	1.484.510.328	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.604.600	574.604.600	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	574.604.600	574.604.600	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	574.604.600	574.604.600	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.905.728	900.905.728	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	900.905.728	900.905.728	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.905.728	900.905.728	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.746.300	1.279.738.300	(8.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.590.300	499.590.300	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	499.590.300	499.590.300	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.590.300	499.590.300	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	5.330.000	5.330.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.330.000	5.330.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000	5.330.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	382.006.000	381.998.000	(8.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	323.820.000	324.884.000	1.064.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.820.000	324.884.000	1.064.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06	5	2	BELANJA MODAL	58.186.000	57.114.000	(1.072.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.186.000	37.114.000	(21.072.000)	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	06	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	20.000.000	20.000.000	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.820.000	392.820.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	392.820.000	392.820.000	0	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	392.820.000	392.820.000	0	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	550.000.000	2.211.805.000	1.661.805.000	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	550.000.000	2.211.805.000	1.661.805.000	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.04	00			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.04	03			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.9.02.2.22.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000	499.305.000	(50.695.000)	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	1.712.500.000	1.712.500.000	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.09	23			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	1.712.500.000	1.712.500.000	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.09	23	5	2	BELANJA MODAL	0	1.712.500.000	1.712.500.000	
2	22	1.05.9.02.2.22.04.0000	08	1.09	23	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.712.500.000	1.712.500.000	
Jumlah Belanja								34.289.092.571	38.079.990.529	3.790.897.958		
Total Surplus/(Defisit)								(34.289.092.571)	(38.079.990.529)	(3.790.897.958)		
0	00	1.05.9.02.2.22.04.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	388.200.000	388.200.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	388.200.000	388.200.000	0	
Jumlah Pendapatan									388.200.000	388.200.000	0	
0	00	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	95.307.857.609	97.170.560.542	1.862.702.933	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.566.053.200	4.010.043.200	(556.010.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	00			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.566.053.200	4.010.043.200	(556.010.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.490.115.200	2.020.655.200	(469.460.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.490.115.200	2.020.655.200	(469.460.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.115.200	2.020.655.200	(469.460.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.332.240.000	1.351.770.000	19.530.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.332.240.000	1.351.770.000	19.530.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.240.000	1.351.770.000	19.530.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	743.698.000	637.618.000	(106.080.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	743.698.000	637.618.000	(106.080.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.098.000	129.018.000	(106.080.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	508.600.000	508.600.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.911.000	2.911.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	2.911.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	2.911.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.911.000	2.911.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.911.000	2.911.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.712.379.500	24.169.414.725	(542.964.775)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.908.747.700	3.852.549.700	(56.198.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	01				Penyediaan Permakanan	2.085.330.000	2.085.330.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.085.330.000	2.085.330.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.075.330.000	2.075.330.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000	10.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02			Penyediaan Sandang	244.610.000	244.610.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	244.610.000	244.610.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	235.610.000	235.610.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	9.000.000	9.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	259.063.000	259.063.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	259.063.000	259.063.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	259.063.000	259.063.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	287.917.500	287.917.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	287.917.500	287.917.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	276.917.500	276.917.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	11.000.000	11.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	919.512.200	902.914.200	(16.598.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	919.512.200	902.914.200	(16.598.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	911.512.200	894.914.200	(16.598.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	06	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000	8.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	08			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	37.200.000	1.200.000	(36.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	37.200.000	1.200.000	(36.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000	1.200.000	(36.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.915.000	37.315.000	(3.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	40.915.000	37.315.000	(3.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.915.000	25.315.000	(3.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	09	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	12.000.000	12.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.000.000	33.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	33.000.000	33.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000	33.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.200.000	1.200.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.000	1.200.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.206.819.600	3.111.416.600	(95.403.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01			Pengasuhan	270.030.000	270.030.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	270.030.000	270.030.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	270.030.000	270.030.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	02			Penyediaan Makanan	1.555.878.000	1.555.878.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.555.878.000	1.555.878.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.378.000	1.283.378.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	272.500.000	272.500.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	03			Penyediaan Sandang	345.688.500	345.478.500	(210.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	345.688.500	345.478.500	(210.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.438.500	209.228.500	(210.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	136.250.000	136.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	254.633.100	253.793.100	(840.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	254.633.100	253.793.100	(840.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	234.633.100	233.793.100	(840.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	05	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	284.332.000	238.157.000	(46.175.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	284.332.000	238.157.000	(46.175.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.582.000	176.407.000	(46.175.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	06	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	61.750.000	61.750.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	391.093.000	391.093.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	391.093.000	391.093.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	336.593.000	336.593.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	54.500.000	54.500.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.985.000	1.515.000	(20.470.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	21.985.000	1.515.000	(20.470.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.985.000	1.515.000	(20.470.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	11				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72.280.000	44.572.000	(27.708.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	72.280.000	44.572.000	(27.708.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.280.000	44.572.000	(27.708.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	12				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	10.900.000	10.900.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	10.900.000	10.900.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000	10.900.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	00				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.488.171.000	5.474.451.000	(13.720.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	01				Penyediaan Permakanan	3.772.000.000	3.772.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.772.000.000	3.772.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.572.000.000	2.572.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000	1.200.000.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	02				Penyediaan Sandang	201.850.000	201.850.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	201.850.000	201.850.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	201.850.000	201.850.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	05				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	172.906.500	172.906.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	172.906.500	172.906.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.906.500	172.906.500	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	552.067.000	546.747.000	(5.320.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	552.067.000	546.747.000	(5.320.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	552.067.000	546.747.000	(5.320.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	07			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	677.357.500	677.357.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	07	5	1	BELANJA OPERASI	677.357.500	677.357.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	677.357.500	677.357.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.780.000	27.780.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	10	5	1	BELANJA OPERASI	27.780.000	27.780.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.780.000	27.780.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.240.000	7.840.000	(8.400.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	11	5	1	BELANJA OPERASI	16.240.000	7.840.000	(8.400.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000	7.840.000	(8.400.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	12			Pemulasaraan	67.970.000	67.970.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	12	5	1	BELANJA OPERASI	67.970.000	67.970.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.970.000	67.970.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	5.054.441.000	4.998.421.000	(56.020.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	01			Penyediaan Permakanan	2.826.540.000	2.826.540.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.826.540.000	2.826.540.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.826.540.000	2.826.540.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	02				Penyediaan Sandang	1.053.199.000	1.053.199.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.053.199.000	1.053.199.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.199.000	1.053.199.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	04				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.369.500	9.369.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	9.369.500	9.369.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.369.500	9.369.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	327.905.000	297.885.000	(30.020.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	327.905.000	297.885.000	(30.020.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.905.000	297.885.000	(30.020.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	06				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	267.120.000	267.120.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	06	5	1		BELANJA OPERASI	267.120.000	267.120.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	267.120.000	267.120.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	07				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	414.757.500	414.757.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	414.757.500	414.757.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	414.757.500	414.757.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	132.150.000	112.150.000	(20.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09	5	1		BELANJA OPERASI	81.400.000	61.400.000	(20.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000	61.400.000	(20.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09	5	2		BELANJA MODAL	50.750.000	50.750.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.750.000	50.750.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	10				Pemulangan ke Daerah Asal	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	10	5	1		BELANJA OPERASI	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	00				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.054.200.200	6.732.576.425	(321.623.775)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	01				Penyediaan Permakanan	2.939.125.000	2.748.371.225	(190.753.775)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.939.125.000	2.748.371.225	(190.753.775)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.939.125.000	2.748.371.225	(190.753.775)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	02				Penyediaan Sandang	543.130.900	543.130.900	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	543.130.900	543.130.900	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	543.130.900	543.130.900	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03				Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	26.698.500	26.698.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	26.698.500	26.698.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.698.500	26.698.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	04				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	530.714.500	527.514.500	(3.200.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	530.714.500	527.514.500	(3.200.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	530.714.500	527.514.500	(3.200.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.263.183.000	1.175.838.000	(87.345.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.263.183.000	1.175.838.000	(87.345.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.183.000	1.175.838.000	(87.345.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	584.072.000	584.072.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	1		BELANJA OPERASI	584.072.000	584.072.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	584.072.000	584.072.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	07				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	962.687.050	954.182.050	(8.505.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	07	5	1		BELANJA OPERASI	962.687.050	954.182.050	(8.505.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	962.687.050	954.182.050	(8.505.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.290.000	14.290.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	14.290.000	14.290.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.290.000	14.290.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	10			Pemulangan ke Daerah Asal	178.299.250	148.779.250	(29.520.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	178.299.250	148.779.250	(29.520.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.299.250	148.779.250	(29.520.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	6.000.000	5.200.000	(800.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	6.000.000	5.200.000	(800.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	5.200.000	(800.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.549.202.000	10.435.636.000	6.886.434.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	333.946.000	201.472.000	(132.474.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01			Pengangkatan Anak antar WNI	316.930.000	184.456.000	(132.474.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	316.930.000	184.456.000	(132.474.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	316.930.000	184.456.000	(132.474.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.016.000	17.016.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.016.000	17.016.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.016.000	17.016.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	00			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.215.256.000	10.234.164.000	7.018.908.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	7.495.356.000	7.495.356.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	7.495.356.000	7.495.356.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.495.356.000	7.495.356.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	02			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.215.256.000	2.738.808.000	(476.448.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.215.256.000	2.738.808.000	(476.448.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.215.256.000	2.738.808.000	(476.448.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.522.585.000	1.867.038.000	(655.547.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	00			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.522.585.000	1.867.038.000	(655.547.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	01			Penyediaan Permakanan	131.250.000	131.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	131.250.000	131.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.250.000	131.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02			Penyediaan Sandang	32.250.000	32.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	32.250.000	32.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000	32.250.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	56.760.000	56.760.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	56.760.000	56.760.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.760.000	56.760.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	442.620.000	442.620.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	442.620.000	442.620.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	442.620.000	442.620.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05			Pelayanan Dukungan Psikososial	1.859.705.000	1.204.158.000	(655.547.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.854.919.000	1.204.158.000	(650.761.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.854.919.000	1.204.158.000	(650.761.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	4.786.000	0	(4.786.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.786.000	0	(4.786.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	366.450.000	381.450.000	15.000.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	00			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	381.450.000	15.000.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	381.450.000	15.000.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	366.450.000	381.450.000	15.000.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	366.450.000	381.450.000	15.000.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.588.276.909	56.304.067.617	(3.284.209.292)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.650.000	97.050.000	(18.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.780.000	49.780.000	(17.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	66.780.000	49.780.000	(17.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.780.000	49.780.000	(17.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.620.000	19.620.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	19.620.000	19.620.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000	19.620.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.250.000	27.650.000	(1.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	29.250.000	27.650.000	(1.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000	27.650.000	(1.600.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.738.419.151	38.086.858.009	(2.651.561.142)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.718.788.651	38.062.073.759	(2.656.714.892)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.718.788.651	38.062.073.759	(2.656.714.892)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	40.718.788.651	38.062.073.759	(2.656.714.892)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.643.500	4.643.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.643.500	4.643.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.643.500	4.643.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14.987.000	20.140.750	5.153.750	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	14.987.000	20.140.750	5.153.750	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.987.000	20.140.750	5.153.750	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.132.000	54.132.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.400.000	19.400.000	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	19.400.000	19.400.000	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000	19.400.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.732.000	34.732.000	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	34.732.000	34.732.000	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.732.000	34.732.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.486.608.740	2.400.197.740	(86.411.000)		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163.972.500	163.972.500	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	163.972.500	163.972.500	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.972.500	163.972.500	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.204.008.990	1.204.008.990	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.204.008.990	1.204.008.990	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.008.990	1.204.008.990	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	142.418.500	139.793.500	(2.625.000)		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	112.152.500	109.527.500	(2.625.000)		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.152.500	109.527.500	(2.625.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	2	BELANJA MODAL	30.266.000	30.266.000	0		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.266.000	30.266.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	430.542.500	421.542.500	(9.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	430.542.500	421.542.500	(9.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.542.500	421.542.500	(9.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.432.250	140.432.250	(3.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	143.432.250	140.432.250	(3.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.432.250	140.432.250	(3.000.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.124.000	27.919.000	(205.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	28.124.000	27.919.000	(205.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.124.000	27.919.000	(205.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	07		Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	2.350.000	(2.650.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	07	5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000	2.350.000	(2.650.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	2.350.000	(2.650.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.110.000	300.179.000	(68.931.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	369.110.000	300.179.000	(68.931.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	369.110.000	300.179.000	(68.931.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.220.640	609.298.640	(17.922.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	627.220.640	609.298.640	(17.922.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5 1	BELANJA OPERASI	44.293.000	44.293.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.293.000	44.293.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	582.927.640	565.005.640	(17.922.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.643.640	543.721.640	(17.922.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.284.000	21.284.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.700.223.242	7.709.933.242	9.710.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.910.000	8.910.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.910.000	8.910.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000	8.910.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.242.880.300	1.223.680.300	(19.200.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.242.880.300	1.223.680.300	(19.200.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.242.880.300	1.223.680.300	(19.200.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.029.395.000	2.029.395.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.029.395.000	2.029.395.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.029.395.000	2.029.395.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.419.037.942	4.447.947.942	28.910.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.419.037.942	4.447.947.942	28.910.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	249.010.000	277.920.000	28.910.000	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.170.027.942	4.170.027.942	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.866.023.136	7.346.597.986	(519.425.150)			
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	934.538.800	901.396.400	(33.142.400)			
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	BELANJA OPERASI	934.538.800	901.396.400	(33.142.400)			
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	934.538.800	901.396.400	(33.142.400)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.379.425.336	5.858.796.336	(520.629.000)			
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.497.528.459	2.149.048.459	(348.480.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.497.528.459	2.149.048.459	(348.480.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	3.881.896.877	3.709.747.877	(172.149.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.920.000	7.920.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.873.976.877	3.701.827.877	(172.149.000)	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	531.219.000	565.565.250	34.346.250			
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	531.219.000	565.565.250	34.346.250	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	531.219.000	565.565.250	34.346.250	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.840.000	20.840.000	0			

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.22.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	20.840.000	20.840.000	0	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.840.000	20.840.000	0	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.000.000.000	5.914.647.000	2.914.647.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.000.000.000	5.914.647.000	2.914.647.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	00			Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.000.000.000	5.914.647.000	2.914.647.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01			Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3.000.000.000	5.914.647.000	2.914.647.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	5.868.011.000	2.868.011.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000.000	2.947.011.000	267.011.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	320.000.000	320.000.000	0	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	0	2.601.000.000	2.601.000.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	0	46.636.000	46.636.000	
2	22	1.06.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	46.636.000	46.636.000	
Jumlah Belanja									98.307.857.609	103.085.207.542	4.777.349.933	
Total Surplus/(Defisit)									(97.919.657.609)	(102.697.007.542)	(4.777.349.933)	
0	00	1.06.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
								Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0	00	2.08.2.14.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA					
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.507.714.519	12.073.270.599	(434.443.920)		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.458.643.000	1.394.005.500	(64.637.500)		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	00			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	135.583.250	278.674.000	143.090.750		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	123.381.250	266.472.000	143.090.750		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	123.381.250	266.472.000	143.090.750		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.381.250	266.472.000	143.090.750	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	12.202.000	12.202.000	0		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	12.202.000	12.202.000	0		
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.202.000	12.202.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	00			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.037.929.750	913.667.500	(124.262.250)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	507.930.000	541.734.000	33.804.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	507.930.000	541.734.000	33.804.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	507.930.000	541.734.000	33.804.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	529.999.750	371.933.500	(158.066.250)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	529.999.750	371.933.500	(158.066.250)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	455.999.750	297.933.500	(158.066.250)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1 05	Belanja Hibah	74.000.000	74.000.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	285.130.000	201.664.000	(83.466.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	234.580.000	152.014.000	(82.566.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	234.580.000	152.014.000	(82.566.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	234.580.000	152.014.000	(82.566.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	02			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	50.550.000	49.650.000	(900.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Provinsi				
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.550.000	49.650.000	(900.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.550.000	49.650.000	(900.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.176.324.000	1.057.724.000	(118.600.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	00			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.272.000	91.435.000	(16.837.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	28.735.000	28.735.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	28.735.000	28.735.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	28.735.000	28.735.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	108.272.000	62.700.000	(45.572.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	108.272.000	62.700.000	(45.572.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.272.000	62.700.000	(45.572.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	00			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	866.522.000	822.227.000	(44.295.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	866.522.000	643.300.000	(223.222.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	866.522.000	643.300.000	(223.222.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.522.000	3.300.000	(223.222.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1 05	Belanja Hibah	640.000.000	640.000.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	178.927.000	178.927.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	178.927.000	178.927.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	178.927.000	178.927.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	201.530.000	144.062.000	(57.468.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.03	04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	201.530.000	144.062.000	(57.468.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	201.530.000	144.062.000	(57.468.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	201.530.000	144.062.000	(57.468.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	821.391.250	819.493.750	(1.897.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	00			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	628.523.000	626.625.500	(1.897.500)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	42.075.000	16.182.500	(25.892.500)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	42.075.000	16.182.500	(25.892.500)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.075.000	16.182.500	(25.892.500)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	02			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	586.448.000	610.443.000	23.995.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	586.448.000	610.443.000	23.995.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	586.448.000	610.443.000	23.995.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.03	00			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	192.868.250	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.03	01			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	192.868.250	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	192.868.250	192.868.250	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.868.250	192.868.250	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	247.942.500	154.198.500	(93.744.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	00				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	247.942.500	154.198.500	(93.744.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	01				Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	82.000.000	60.150.000	(21.850.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	82.000.000	60.150.000	(21.850.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000	60.150.000	(21.850.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	02				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	165.942.500	94.048.500	(71.894.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	165.942.500	94.048.500	(71.894.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	165.942.500	94.048.500	(71.894.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	326.276.000	296.048.000	(30.228.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	00				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	145.193.000	60.353.000	(84.840.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	33.050.000	20.250.000	(12.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	33.050.000	20.250.000	(12.800.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000	20.250.000	(12.800.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	112.143.000	40.103.000	(72.040.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	112.143.000	40.103.000	(72.040.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.143.000	40.103.000	(72.040.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	181.083.000	235.695.000	54.612.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	01			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	70.973.000	43.085.000	(27.888.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	70.973.000	43.085.000	(27.888.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.973.000	43.085.000	(27.888.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	73.955.000	163.955.000	90.000.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	73.955.000	163.955.000	90.000.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.955.000	163.955.000	90.000.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	04			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36.155.000	28.655.000	(7.500.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	36.155.000	28.655.000	(7.500.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	06	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.155.000	28.655.000	(7.500.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	67.790.000	67.790.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.01	00			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	23.495.000	23.495.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	23.495.000	23.495.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	23.495.000	23.495.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	23.495.000	23.495.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.02	00			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	0	44.295.000	44.295.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	44.295.000	44.295.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	44.295.000	44.295.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	07	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.295.000	44.295.000	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.477.137.769	8.284.010.849	(193.126.920)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.400.000	56.475.000	(3.925.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.400.000	42.100.000	(2.300.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	44.400.000	42.100.000	(2.300.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000	42.100.000	(2.300.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	14.375.000	(1.625.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000	14.375.000	(1.625.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	14.375.000	(1.625.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.142.569.069	6.229.119.149	86.550.080	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.119.126.069	6.205.676.149	86.550.080	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	6.119.126.069	6.205.676.149	86.550.080	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	6.119.126.069	6.205.676.149	86.550.080	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	23.443.000	23.443.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	23.443.000	23.443.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.443.000	23.443.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.948.500	124.990.500	(234.958.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.780.000	10.780.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	10.780.000	10.780.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000	10.780.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.446.000	17.446.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.446.000	17.446.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.446.000	17.446.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.151.500	26.151.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	26.151.500	26.151.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.151.500	26.151.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	6.600.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.600.000	6.600.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.971.000	64.013.000	(234.958.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	298.971.000	64.013.000	(234.958.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.971.000	64.013.000	(234.958.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.447.200	1.302.447.200	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	242.568.000	242.568.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	242.568.000	242.568.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.568.000	242.568.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.430.700	277.430.700	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	277.430.700	277.430.700	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	277.430.700	277.430.700	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.448.500	782.448.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	782.448.500	782.448.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	47.100.000	47.100.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	735.348.500	735.348.500	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.773.000	570.979.000	(40.794.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.819.000	248.025.000	(40.794.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	288.819.000	248.025.000	(40.794.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	288.819.000	248.025.000	(40.794.000)	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	27.250.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	27.250.000	27.250.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000	27.250.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.000.000	191.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	191.000.000	191.000.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.000.000	191.000.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.704.000	104.704.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	104.704.000	104.704.000	0	
2	08	2.08.2.14.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.704.000	104.704.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	846.817.000	621.677.500	(225.139.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.928.250	112.269.750	(11.658.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	00			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	123.928.250	112.269.750	(11.658.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	01			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	11.178.250	6.319.750	(4.858.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.178.250	6.319.750	(4.858.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.178.250	6.319.750	(4.858.500)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03			Advokasi dan Sosialisasi GDPK	112.750.000	105.950.000	(6.800.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	112.750.000	105.950.000	(6.800.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.750.000	105.950.000	(6.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	194.988.250	77.213.250	(117.775.000)			
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	00		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77.213.250	77.213.250	0			
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	04		Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	77.213.250	77.213.250	0			
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	77.213.250	77.213.250	0		
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.213.250	77.213.250	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.775.000	0	(117.775.000)		
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	117.775.000	0	(117.775.000)		
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.775.000	0	(117.775.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	527.900.500	432.194.500	(95.706.000)		
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	00			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	527.900.500	432.194.500	(95.706.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	03			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	312.888.750	217.182.750	(95.706.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	312.888.750	217.182.750	(95.706.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	312.888.750	217.182.750	(95.706.000)	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	04			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	98.000.000	98.000.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	98.000.000	98.000.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000	98.000.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	06			Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	66.725.000	66.725.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	66.725.000	66.725.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.725.000	66.725.000	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	07			Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	50.286.750	50.286.750	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	50.286.750	50.286.750	0	
2	14	2.08.2.14.2.22.02.0000	04	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.286.750	50.286.750	0	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.839.450.000	2.971.521.000	(867.929.000)	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	3.839.450.000	2.971.521.000	(867.929.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Organisasi : 2.08.2.14.2.22.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										KEBUDAYAAN				
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	00					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.839.450.000	2.971.521.000	(867.929.000)	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20					Pengembangan Ekonomi Perempuan	3.839.450.000	2.971.521.000	(867.929.000)	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	1			BELANJA OPERASI	3.674.911.000	2.686.004.000	(988.907.000)	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.479.911.000	2.491.004.000	(988.907.000)	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	1	05		Belanja Hibah	195.000.000	195.000.000	0	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	2			BELANJA MODAL	164.539.000	285.517.000	120.978.000	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.539.000	275.517.000	120.978.000	
2	22	2.08.2.14.2.22.02.0000	08	1.09	20	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	
Jumlah Belanja											17.193.981.519	15.666.469.099	(1.527.512.420)	
Total Surplus/(Defisit)											(17.193.981.519)	(15.666.469.099)	1.527.512.420	
0	00	2.08.2.14.2.22.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.152.905.900	18.334.140.250	1.181.234.350	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	15.008.123.800	17.401.295.650	2.393.171.850	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	2.144.782.100	932.844.600	(1.211.937.500)	
Jumlah Pendapatan									17.152.905.900	18.334.140.250	1.181.234.350	
0	00	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	70.140.497.338	65.742.942.880	(4.397.554.458)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	02	1.02	00			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	02	1.02	04			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.363.086.000	3.228.935.000	(134.151.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	00			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	254.271.000	2.565.266.000	2.310.995.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	254.271.000	151.866.000	(102.405.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	254.271.000	151.866.000	(102.405.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	254.271.000	151.866.000	(102.405.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0	2.413.400.000	2.413.400.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	0	2.413.400.000	2.413.400.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.413.400.000	2.413.400.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	00			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.108.815.000	663.669.000	(2.445.146.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	01			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3.108.815.000	663.669.000	(2.445.146.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	530.364.000	600.056.500	69.692.500	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	530.364.000	600.056.500	69.692.500	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	2.578.451.000	63.612.500	(2.514.838.500)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.578.451.000	63.612.500	(2.514.838.500)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.831.691.500	1.737.031.500	(94.660.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	00			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.831.691.500	1.737.031.500	(94.660.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	261.175.000	261.175.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	261.175.000	261.175.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.175.000	261.175.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	04				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.549.936.500	1.475.856.500	(74.080.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.549.936.500	1.475.856.500	(74.080.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.216.816.500	1.301.796.500	84.980.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	333.120.000	174.060.000	(159.060.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20.580.000	0	(20.580.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	20.580.000	0	(20.580.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.580.000	0	(20.580.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	319.846.000	196.818.000	(123.028.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	00				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	319.846.000	196.818.000	(123.028.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	01			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	129.206.000	104.288.000	(24.918.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	129.206.000	104.288.000	(24.918.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.206.000	104.288.000	(24.918.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	03			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	140.710.000	65.750.000	(74.960.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	140.710.000	65.750.000	(74.960.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.710.000	65.750.000	(74.960.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	49.930.000	26.780.000	(23.150.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	49.930.000	26.780.000	(23.150.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	06	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.930.000	26.780.000	(23.150.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	09	0.00	00			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	09	1.01	00			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	09	1.01	01			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	09	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	09	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.609.458.847	16.953.935.847	(655.523.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	00			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	17.609.458.847	16.953.935.847	(655.523.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	01			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1.298.853.000	327.253.000	(971.600.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.298.853.000	327.253.000	(971.600.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.853.000	327.253.000	(971.600.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.053.405.847	10.359.482.847	306.077.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.904.098.347	10.232.888.347	328.790.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.904.098.347	10.232.888.347	328.790.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	149.307.500	126.594.500	(22.713.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.594.500	126.594.500	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	03	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.713.000	0	(22.713.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.257.200.000	6.267.200.000	10.000.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	6.257.200.000	6.267.200.000	10.000.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	11	1.01	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.257.200.000	6.267.200.000	10.000.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.103.157.741	42.793.999.283	(3.309.158.458)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.991.000	274.691.000	(35.300.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.993.000	135.593.000	(25.400.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	160.993.000	135.593.000	(25.400.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.993.000	135.593.000	(25.400.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.998.000	139.098.000	(9.900.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	148.998.000	139.098.000	(9.900.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.998.000	139.098.000	(9.900.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.827.431.641	38.536.062.391	(2.291.369.250)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.936.253.641	37.644.884.391	(2.291.369.250)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.936.253.641	37.644.884.391	(2.291.369.250)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	39.936.253.641	37.644.884.391	(2.291.369.250)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.118.000	862.118.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	862.118.000	862.118.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	169.860.000	169.860.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	692.258.000	692.258.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	2.090.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.090.000	2.090.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000	2.090.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	26.970.000	26.970.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	26.970.000	26.970.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.970.000	26.970.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.297.000	419.669.000	(393.628.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.254.000	30.254.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.254.000	30.254.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.254.000	30.254.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.920.000	97.920.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	97.920.000	97.920.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.920.000	97.920.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.673.000	20.673.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	20.673.000	20.673.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.673.000	20.673.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.070.000	92.070.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	92.070.000	92.070.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.070.000	92.070.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.500.000	7.500.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.880.000	171.252.000	(393.628.000)		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	564.880.000	171.252.000	(393.628.000)		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	564.880.000	171.252.000	(393.628.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.735.000	559.735.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	559.735.000	559.735.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	22.984.000	0	(22.984.000)		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.984.000	0	(22.984.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	536.751.000	559.735.000	22.984.000		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	536.751.000	559.735.000	22.984.000	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.257.025	871.761.692	22.504.667		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	7.320.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.320.000	7.320.000	0		
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000	7.320.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.497.025	669.001.692	22.504.667		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	646.497.025	669.001.692	22.504.667	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	646.497.025	669.001.692	22.504.667	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	195.440.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	195.440.000	195.440.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.440.000	195.440.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.743.446.075	2.132.080.200	(611.365.875)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	17.239.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	17.239.000	17.239.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.239.000	17.239.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	801.627.200	774.138.200	(27.489.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	801.627.200	774.138.200	(27.489.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	801.627.200	774.138.200	(27.489.000)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.510.000	182.510.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	182.510.000	182.510.000	0	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.510.000	182.510.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.742.069.875	1.158.193.000	(583.876.875)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.742.069.875	1.158.193.000	(583.876.875)	
2	11	2.11.3.28.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.069.875	1.158.193.000	(583.876.875)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.952.060.000	3.679.767.000	(272.293.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.952.060.000	3.679.767.000	(272.293.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	00			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	3.952.060.000	3.305.141.000	(646.919.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02			Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	3.952.060.000	3.305.141.000	(646.919.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	862.427.000	732.365.000	(130.062.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	862.427.000	732.365.000	(130.062.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	2	BELANJA MODAL	3.089.633.000	2.572.776.000	(516.857.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.887.758.000	1.701.711.000	(186.047.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.000.000	165.000.000	0	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.875.000	560.905.000	(339.970.000)	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.08	02	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.000.000	145.160.000	9.160.000	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	374.626.000	374.626.000	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	23			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	374.626.000	374.626.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	1	BELANJA OPERASI	0	348.236.000	348.236.000	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	348.236.000	348.236.000	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	2	BELANJA MODAL	0	26.390.000	26.390.000	
2	22	2.11.3.28.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	26.390.000	26.390.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	15.429.846.050	13.260.120.300	(2.169.725.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.713.094.300	9.688.351.300	(2.024.743.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	00			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	862.515.500	779.315.500	(83.200.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	01			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	862.515.500	779.315.500	(83.200.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	845.523.500	762.323.500	(83.200.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	845.523.500	762.323.500	(83.200.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	2	BELANJA MODAL	16.992.000	16.992.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.992.000	16.992.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	00			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.718.642.250	785.819.000	(932.823.250)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	445.368.000	445.368.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	445.368.000	445.368.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	02	5	1 05	Belanja Hibah	0	445.368.000	445.368.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.718.642.250	0	(1.718.642.250)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.718.642.250	0	(1.718.642.250)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.274.250	0	(1.187.274.250)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	05	5	1 05	Belanja Hibah	531.368.000	0	(531.368.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	340.451.000	340.451.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	263.251.000	263.251.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	263.251.000	263.251.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06	5	2	BELANJA MODAL	0	77.200.000	77.200.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	22.700.000	22.700.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.04	06	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	54.500.000	54.500.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	00			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	753.116.500	744.395.500	(8.721.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	01			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	565.616.500	560.771.500	(4.845.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	565.616.500	560.771.500	(4.845.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	565.616.500	560.771.500	(4.845.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	02			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	187.500.000	183.624.000	(3.876.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	111.507.000	105.624.000	(5.883.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.507.000	105.624.000	(5.883.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	02	5	2	BELANJA MODAL	75.993.000	78.000.000	2.007.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.05	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.993.000	78.000.000	2.007.000	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	00				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7.328.915.800	6.714.960.050	(613.955.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	01				Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	4.159.531.500	4.155.982.500	(3.549.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.968.531.500	3.964.982.500	(3.549.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.968.531.500	3.964.982.500	(3.549.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	01	5	2		BELANJA MODAL	191.000.000	191.000.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.000.000	191.000.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	03				Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3.169.384.300	2.558.977.550	(610.406.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.169.384.300	2.558.977.550	(610.406.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.169.384.300	2.558.977.550	(610.406.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.07	00				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	237.380.000	209.838.000	(27.542.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.07	02				Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	237.380.000	209.838.000	(27.542.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	237.380.000	209.838.000	(27.542.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.380.000	209.838.000	(27.542.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	00				Perbenihan Tanaman Hutan	812.524.250	454.023.250	(358.501.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02			Sertifikasi Sumber Benih	357.061.000	14.410.000	(342.651.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	279.861.000	14.410.000	(265.451.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.861.000	14.410.000	(265.451.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02	5	2	BELANJA MODAL	77.200.000	0	(77.200.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.700.000	0	(22.700.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.500.000	0	(54.500.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	04			Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	6.831.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	04	5	1	BELANJA OPERASI	6.831.000	6.831.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.831.000	6.831.000	0	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	05			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	448.632.250	432.782.250	(15.850.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	448.632.250	432.782.250	(15.850.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	03	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	448.632.250	432.782.250	(15.850.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	420.480.000	367.615.000	(52.865.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	00			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	420.480.000	367.615.000	(52.865.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01			Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	258.717.000	223.017.000	(35.700.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	258.717.000	223.017.000	(35.700.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	258.717.000	223.017.000	(35.700.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	161.763.000	144.598.000	(17.165.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	161.763.000	144.598.000	(17.165.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	04	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.763.000	144.598.000	(17.165.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.296.271.750	3.204.154.000	(92.117.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.296.271.750	3.204.154.000	(92.117.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	01				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30.520.000	15.710.000	(14.810.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.520.000	15.710.000	(14.810.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.520.000	15.710.000	(14.810.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.265.751.750	3.188.444.000	(77.307.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.254.207.750	3.188.444.000	(65.763.750)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	566.781.000	804.993.750	238.212.750	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	2.687.426.750	2.383.450.250	(303.976.500)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	11.544.000	0	(11.544.000)	
3	28	2.11.3.28.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.544.000	0	(11.544.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.3.28.2.22.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Belanja	89.522.403.388	82.682.830.180	(6.839.573.208)	
										Total Surplus/(Defisit)	(72.369.497.488)	(64.348.689.930)	8.020.807.558	
0	00	2.11.3.28.2.22.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	926.532.200	889.306.800	(37.225.400)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	926.532.200	889.306.800	(37.225.400)	
Jumlah Pendapatan									926.532.200	889.306.800	(37.225.400)	
0	00	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.698.518.000	2.928.247.008	229.729.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.698.518.000	2.928.247.008	229.729.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	00			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.698.518.000	2.928.247.008	229.729.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	01			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.698.518.000	2.928.247.008	229.729.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.698.518.000	2.884.537.008	186.019.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.698.518.000	2.884.537.008	186.019.008	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	0	43.710.000	43.710.000	
1	03	2.15.1.03.0.00.01.0000	13	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	43.710.000	43.710.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	114.078.135.817	111.744.669.988	(2.333.465.829)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	92.232.352.260	91.640.517.260	(591.835.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.01	00		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	381.500.000	355.000.000	(26.500.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.01	02		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	381.500.000	355.000.000	(26.500.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	381.500.000	355.000.000	(26.500.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.500.000	355.000.000	(26.500.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	00		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.326.622.000	9.207.555.000	(119.067.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.933.256.000	6.988.854.000	55.598.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	3.833.667.000	3.830.540.000	(3.127.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 1 05	Belanja Hibah	3.833.667.000	3.830.540.000	(3.127.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 2	BELANJA MODAL	3.099.589.000	3.158.314.000	58.725.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.653.000	135.303.000	61.650.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.025.936.000	3.023.011.000	(2.925.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	03		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	420.964.000	420.964.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	420.964.000	420.964.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.964.000	420.964.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.972.402.000	1.797.737.000	(174.665.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	1.972.402.000	1.797.737.000	(174.665.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.402.000	1.797.737.000	(174.665.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	985.707.000	836.712.000	(148.995.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	01				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	354.467.000	205.472.000	(148.995.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	354.467.000	205.472.000	(148.995.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	354.467.000	205.472.000	(148.995.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	186.949.000	186.949.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	186.949.000	186.949.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.949.000	186.949.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	05				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	444.291.000	444.291.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	444.291.000	444.291.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	444.291.000	444.291.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	00				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.857.885.000	3.930.354.000	72.469.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.115.754.000	1.168.129.000	52.375.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.115.754.000	1.168.129.000	52.375.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.115.754.000	1.168.129.000	52.375.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	02			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.605.423.000	1.805.403.000	199.980.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.605.423.000	1.805.403.000	199.980.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.423.000	1.805.403.000	199.980.000	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	03			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	664.969.000	550.972.000	(113.997.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	BELANJA OPERASI	664.969.000	550.972.000	(113.997.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	664.969.000	550.972.000	(113.997.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	04			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	445.407.000	389.328.000	(56.079.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	445.407.000	389.328.000	(56.079.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	445.407.000	389.328.000	(56.079.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	05			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	26.332.000	16.522.000	(9.810.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1	BELANJA OPERASI	26.332.000	16.522.000	(9.810.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.332.000	16.522.000	(9.810.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.06	00			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	99.378.000	99.378.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.06	01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	99.378.000	99.378.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	99.378.000	99.378.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.378.000	99.378.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	00			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	711.026.250	518.544.250	(192.482.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	02			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	538.966.000	389.626.000	(149.340.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1	BELANJA OPERASI	238.966.000	191.626.000	(47.340.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.966.000	191.626.000	(47.340.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	2	BELANJA MODAL	300.000.000	198.000.000	(102.000.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	198.000.000	(102.000.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	142.642.750	106.192.750	(36.450.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	03	5	1	BELANJA OPERASI	142.642.750	106.192.750	(36.450.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.642.750	106.192.750	(36.450.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	04			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	29.417.500	22.725.500	(6.692.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	04	5	1	BELANJA OPERASI	29.417.500	22.725.500	(6.692.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.07	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.417.500	22.725.500	(6.692.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	00			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76.431.237.010	76.253.977.010	(177.260.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	01			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.504.714.010	74.479.154.010	(25.560.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	74.504.714.010	74.479.154.010	(25.560.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.911.500	1.064.351.500	(25.560.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1 04	Belanja Subsidi	73.414.802.510	73.414.802.510	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.926.523.000	1.774.823.000	(151.700.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.926.523.000	1.774.823.000	(151.700.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.926.523.000	1.774.823.000	(151.700.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.09	00			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	438.997.000	438.997.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.09	01			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	438.997.000	438.997.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	438.997.000	438.997.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	02	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	438.997.000	438.997.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	05	1.01	00			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	05	1.01	03			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.831.683.557	20.095.952.728	(1.735.730.829)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.516.000	192.111.300	(112.404.700)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.515.000	134.110.300	(112.404.700)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	246.515.000	134.110.300	(112.404.700)		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.515.000	134.110.300	(112.404.700)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.845.000	3.845.000	0		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.845.000	3.845.000	0		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000	3.845.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	3.500.000	0		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.500.000	3.500.000	0		
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	3.500.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000	8.880.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.880.000	8.880.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000	8.880.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.776.000	34.776.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	34.776.000	34.776.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.776.000	34.776.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.527.025.957	15.545.833.328	(981.192.629)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.920.188.957	12.941.546.328	(978.642.629)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.920.188.957	12.941.546.328	(978.642.629)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	13.920.188.957	12.941.546.328	(978.642.629)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.542.938.000	2.542.938.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.542.938.000	2.542.938.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	144.060.000	144.060.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.398.878.000	2.398.878.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.284.000	16.734.000	(2.550.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	19.284.000	16.734.000	(2.550.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.284.000	16.734.000	(2.550.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	44.615.000	44.615.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	44.615.000	44.615.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.615.000	44.615.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.102.490.500	693.949.000	(408.541.500)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.616.000	42.616.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	42.616.000	42.616.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.616.000	42.616.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	166.674.000	122.274.000	(44.400.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	166.674.000	122.274.000	(44.400.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	166.674.000	122.274.000	(44.400.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.768.500	96.557.000	(26.211.500)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	122.768.500	96.557.000	(26.211.500)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.768.500	96.557.000	(26.211.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	07			Penyediaan Bahan/Material	37.836.000	37.836.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	37.836.000	37.836.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.836.000	37.836.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.572.000	204.642.000	(337.930.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	542.572.000	204.642.000	(337.930.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	542.572.000	204.642.000	(337.930.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160.024.000	160.024.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	160.024.000	160.024.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.024.000	160.024.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	679.486.000	679.486.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	679.486.000	679.486.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	214.085.000	214.085.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.085.000	214.085.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	465.401.000	465.401.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.995.000	373.995.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.406.000	91.406.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.471.000	1.612.386.000	(117.085.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.545.000	11.545.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.545.000	11.545.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.545.000	11.545.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	711.971.000	618.024.000	(93.947.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	711.971.000	618.024.000	(93.947.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	711.971.000	618.024.000	(93.947.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.005.955.000	982.817.000	(23.138.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.005.955.000	982.817.000	(23.138.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.955.000	982.817.000	(23.138.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.694.100	1.372.187.100	(116.507.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	605.057.100	490.975.100	(114.082.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	605.057.100	490.975.100	(114.082.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	605.057.100	490.975.100	(114.082.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.1.03.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.527.000	369.102.000	(2.425.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	371.527.000	369.102.000	(2.425.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	371.527.000	369.102.000	(2.425.000)	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.110.000	512.110.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	512.110.000	512.110.000	0	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	512.110.000	512.110.000	0	
Jumlah Belanja											116.776.653.817	114.672.916.996	(2.103.736.821)	
Total Surplus/(Defisit)											(115.850.121.617)	(113.783.610.196)	2.066.511.421	
0	00	2.15.1.03.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000	1.800.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.800.000	1.800.000	0	
Jumlah Pendapatan									1.800.000	1.800.000	0	
0	00	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.938.415.205	14.685.603.376	(1.252.811.829)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.832.446.000	3.661.725.000	(170.721.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.832.446.000	3.661.725.000	(170.721.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	59.236.250	59.236.250	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	59.236.250	59.236.250	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.236.250	59.236.250	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	500.945.000	500.945.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	430.513.000	430.513.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.513.000	430.513.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	2	BELANJA MODAL	70.432.000	70.432.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.432.000	70.432.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	76.520.000	72.770.000	(3.750.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	76.520.000	72.770.000	(3.750.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.520.000	72.770.000	(3.750.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	06				Pelayanan Informasi Publik	241.864.750	219.034.750	(22.830.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	172.502.750	149.672.750	(22.830.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.502.750	149.672.750	(22.830.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	69.362.000	69.362.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.362.000	69.362.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.471.265.000	1.471.265.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	1.407.583.000	1.407.583.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	669.208.000	669.208.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08	5	1	05	Belanja Hibah	738.375.000	738.375.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08	5	2		BELANJA MODAL	63.682.000	63.682.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	08	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.682.000	63.682.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	10				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.422.615.000	1.318.440.000	(104.175.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.390.715.000	1.286.540.000	(104.175.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.390.715.000	1.286.540.000	(104.175.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	31.900.000	31.900.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.900.000	31.900.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60.000.000	20.034.000	(39.966.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	20.034.000	(39.966.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	20.034.000	(39.966.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.153.427.000	1.098.042.000	(55.385.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	00			Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	549.945.000	549.945.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	549.945.000	549.945.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	549.945.000	549.945.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	549.945.000	549.945.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	00			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	603.482.000	548.097.000	(55.385.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	01			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	78.534.000	77.334.000	(1.200.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	71.524.000	70.324.000	(1.200.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.524.000	70.324.000	(1.200.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	7.010.000	7.010.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.010.000	7.010.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	06			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	154.160.000	99.975.000	(54.185.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	139.466.000	85.281.000	(54.185.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.466.000	85.281.000	(54.185.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	06	5	2	BELANJA MODAL	14.694.000	14.694.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.694.000	14.694.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	61.969.000	61.969.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	61.969.000	61.969.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.969.000	61.969.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	308.819.000	308.819.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	297.285.000	297.285.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.285.000	297.285.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	10	5	2	BELANJA MODAL	11.534.000	11.534.000	0		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	03	1.02	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.534.000	11.534.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.952.542.205	9.925.836.376	(1.026.705.829)		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.900.000	77.903.000	(36.997.000)		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.700.000	59.303.000	(32.397.000)		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	67.403.000	59.303.000	(8.100.000)		
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.403.000	59.303.000	(8.100.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	24.297.000	0	(24.297.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.297.000	0	(24.297.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.200.000	18.600.000	(4.600.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	23.200.000	18.600.000	(4.600.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000	18.600.000	(4.600.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.113.053.705	8.347.627.876	(765.425.829)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.959.406.705	8.193.980.876	(765.425.829)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.959.406.705	8.193.980.876	(765.425.829)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.959.406.705	8.193.980.876	(765.425.829)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.981.000	123.981.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	123.981.000	123.981.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	41.040.000	41.040.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.941.000	82.941.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.680.000	6.680.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.680.000	6.680.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000	6.680.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11.493.000	11.493.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	11.493.000	11.493.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.493.000	11.493.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.493.000	11.493.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	11.493.000	11.493.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.493.000	11.493.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.385.000	246.099.000	(195.286.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.015.000	6.015.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.015.000	6.015.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.015.000	6.015.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.038.000	29.038.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	29.038.000	29.038.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.038.000	29.038.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.571.000	6.571.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	6.571.000	6.571.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.571.000	6.571.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.104.000	24.104.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	24.104.000	24.104.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.104.000	24.104.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.657.000	180.371.000	(195.286.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	375.657.000	180.371.000	(195.286.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.657.000	180.371.000	(195.286.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.131.000	69.131.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.981.000	30.981.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	30.981.000	30.981.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.981.000	30.981.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.150.000	38.150.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	38.150.000	38.150.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.150.000	38.150.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.815.500	836.815.500	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	5.310.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.310.000	5.310.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000	5.310.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.286.000	314.286.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	314.286.000	314.286.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	314.286.000	314.286.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.219.500	517.219.500	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	517.219.500	517.219.500	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	517.219.500	517.219.500	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.257.000	348.260.000	(28.997.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.342.000	163.345.000	(28.997.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	192.342.000	163.345.000	(28.997.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.342.000	163.345.000	(28.997.000)	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.220.000	119.220.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	119.220.000	119.220.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.220.000	119.220.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.695.000	65.695.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	65.695.000	65.695.000	0	
2	16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.695.000	65.695.000	0	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.847.495.000	1.730.242.000	(117.253.000)	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	1.847.495.000	1.730.242.000	(117.253.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								INFORMASI				
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	00			797.958.000	699.241.000	(98.717.000)		
								Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01			130.100.000	39.523.000	(90.577.000)		
								Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	130.100.000	39.523.000	(90.577.000)	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.100.000	39.523.000	(90.577.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	267.955.000	265.315.000	(2.640.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	267.955.000	265.315.000	(2.640.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	267.955.000	265.315.000	(2.640.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.550.000	7.550.000	0
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.550.000	7.550.000	0
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000	7.550.000	0
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	392.353.000	386.853.000	(5.500.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	330.093.000	324.593.000	(5.500.000)
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	330.093.000	324.593.000	(5.500.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	2	BELANJA MODAL	62.260.000	62.260.000	0		
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.260.000	62.260.000	0	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	00			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1.049.537.000	1.031.001.000	(18.536.000)		
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	01			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.049.537.000	1.031.001.000	(18.536.000)		
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	287.437.000	268.901.000	(18.536.000)		
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	287.437.000	268.901.000	(18.536.000)	
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	762.100.000	762.100.000	0		
2	21	2.16.9.02.2.22.01.0000	02	1.02	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	762.100.000	762.100.000	0	
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.000.000.000	18.334.401.900	2.334.401.900		
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.000.000.000	18.334.401.900	2.334.401.900		
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	00			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	16.000.000.000	18.334.401.900	2.334.401.900		
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	02			Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	16.000.000.000	18.334.401.900	2.334.401.900		
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	13.830.373.000	13.568.964.800	(261.408.200)		
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.373.000	13.568.964.800	(261.408.200)	
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	2.169.627.000	4.765.437.100	2.595.810.100		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.16.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.169.627.000	4.765.437.100	2.595.810.100	
Jumlah Belanja											33.785.910.205	34.750.247.276	964.337.071	
Total Surplus/(Defisit)											(33.784.110.205)	(34.748.447.276)	(964.337.071)	
0	00	2.16.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	803.200.000	129.500.000	(673.700.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	11.200.000	4.200.000	(7.000.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	792.000.000	125.300.000	(666.700.000)	
Jumlah Pendapatan									803.200.000	129.500.000	(673.700.000)	
0	00	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.399.757.731	25.389.310.959	(1.010.446.772)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	267.000.000	624.880.000	357.880.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	00			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	267.000.000	624.880.000	357.880.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	267.000.000	624.880.000	357.880.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	267.000.000	624.880.000	357.880.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000	624.880.000	357.880.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.182.000	19.182.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	00		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.182.000	19.182.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02		Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	19.182.000	19.182.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	19.182.000	19.182.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.182.000	19.182.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.721.195.000	3.723.300.000	2.002.105.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	00		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.721.195.000	1.721.195.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.721.195.000	1.721.195.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.721.195.000	1.721.195.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.721.195.000	1.721.195.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	00		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	2.002.105.000	2.002.105.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan	0	2.002.105.000	2.002.105.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Kompetensi SDM UKM				
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.001.850.000	2.001.850.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.001.850.000	2.001.850.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	0	255.000	255.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	255.000	255.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	00			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.151.888.900	3.137.558.400	(1.014.330.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	00			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan	4.151.888.900	3.137.558.400	(1.014.330.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
								Para Pemangku Kepentingan					
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.151.888.900	3.137.558.400	(1.014.330.500)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.151.888.900	3.137.558.400	(1.014.330.500)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.971.923.900	2.957.593.400	(1.014.330.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	179.965.000	179.965.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.597.310.800	8.305.743.800	(1.291.567.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	00			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	9.597.310.800	8.305.743.800	(1.291.567.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	9.597.310.800	8.305.743.800	(1.291.567.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.506.330.800	8.229.763.800	(1.276.567.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.506.330.800	8.229.763.800	(1.276.567.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	90.980.000	75.980.000	(15.000.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.980.000	75.980.000	(15.000.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.591.791.031	8.724.527.759	(867.263.272)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.695.000	343.835.000	147.140.000			
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.590.000	317.030.000	151.440.000			
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	BELANJA OPERASI	165.590.000	317.030.000	151.440.000			
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	02	Belanja Barang dan Jasa	165.590.000	317.030.000	151.440.000		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.105.000	21.805.000	(4.300.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	26.105.000	21.805.000	(4.300.000)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.105.000	21.805.000	(4.300.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.900.041.375	6.262.089.603	(637.951.772)			
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.835.921.375	6.199.499.603	(636.421.772)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.835.921.375	6.199.499.603	(636.421.772)		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	6.835.921.375	6.199.499.603	(636.421.772)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.220.000	53.220.000	0		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	53.220.000	53.220.000	0		
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	53.220.000	53.220.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10.900.000	9.370.000	(1.530.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	10.900.000	9.370.000	(1.530.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000	9.370.000	(1.530.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.826.500	208.541.000	(307.285.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.400.500	32.097.000	(11.303.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	43.400.500	32.097.000	(11.303.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.400.500	32.097.000	(11.303.500)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.994.000	8.994.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.994.000	8.994.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.994.000	8.994.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.832.000	102.850.000	(295.982.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	398.832.000	102.850.000	(295.982.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	398.832.000	102.850.000	(295.982.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.000.000	18.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	18.000.000	18.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	18.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.600.000	21.600.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	596.948.000	574.448.000	(22.500.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	200.071.000	200.071.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	200.071.000	200.071.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.071.000	200.071.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.959.000	175.459.000	(23.500.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	559.000	559.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	559.000	559.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	198.400.000	174.900.000	(23.500.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.400.000	174.900.000	(23.500.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.918.000	198.918.000	1.000.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.000.000	1.000.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.000.000	1.000.000	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	197.918.000	197.918.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.918.000	197.918.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.286.981	760.170.981	(34.116.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.043.000	44.412.000	(2.631.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	47.043.000	44.412.000	(2.631.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.043.000	44.412.000	(2.631.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.999.981	183.514.981	(31.485.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	214.999.981	183.514.981	(31.485.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.999.981	183.514.981	(31.485.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.244.000	532.244.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	532.244.000	532.244.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	532.244.000	532.244.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.993.175	575.443.175	(12.550.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.800	36.999.800	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.999.800	36.999.800	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.999.800	36.999.800	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.635.000	144.085.000	(12.550.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	156.635.000	144.085.000	(12.550.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.635.000	144.085.000	(12.550.000)	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.560.000	21.560.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	21.560.000	21.560.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.560.000	21.560.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.813.375	343.813.375	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	73.813.375	73.813.375	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.813.375	73.813.375	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	270.000.000	270.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.000.000	270.000.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.985.000	28.985.000	0	
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	28.985.000	28.985.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.985.000	28.985.000	0	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	65.272.000.000	31.989.994.441	(33.282.005.559)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	65.272.000.000	31.989.994.441	(33.282.005.559)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	00				Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	57.430.000.000	7.750.238.641	(49.679.761.359)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	57.430.000.000	7.750.238.641	(49.679.761.359)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.332.000.000	2.483.814.000	151.814.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.332.000.000	2.483.814.000	151.814.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2		BELANJA MODAL	55.098.000.000	5.266.424.641	(49.831.575.359)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	55.098.000.000	0	(55.098.000.000)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4.992.325.000	4.992.325.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	75.000.000	75.000.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	199.099.641	199.099.641	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	00				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	7.842.000.000	24.239.755.800	16.397.755.800	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18				Pengembangan Kewirausahaan Desa	7.842.000.000	24.239.755.800	16.397.755.800	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	1		BELANJA OPERASI	6.672.810.750	23.789.250.800	17.116.440.050	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.672.810.750	15.692.271.800	9.019.461.050	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.2.22.0.00.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	1	05	Belanja Hibah	0	8.096.979.000	8.096.979.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	2		BELANJA MODAL	1.169.189.250	450.505.000	(718.684.250)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.250.000	437.235.000	345.985.000	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.064.669.250	0	(1.064.669.250)	
2	22	2.17.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	18	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.270.000	13.270.000	0	
Jumlah Belanja									91.671.757.731	57.379.305.400	(34.292.452.331)		
Total Surplus/(Defisit)									(90.868.557.731)	(57.249.805.400)	33.618.752.331		
0	00	2.17.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	390.070.000	388.210.000	(1.860.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	387.670.000	387.670.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	2.400.000	540.000	(1.860.000)	
Jumlah Pendapatan									390.070.000	388.210.000	(1.860.000)	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.461.271.483	11.741.649.555	(719.621.928)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	472.863.000	472.863.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	472.863.000	472.863.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	472.863.000	472.863.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	472.863.000	472.863.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	472.863.000	472.863.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	784.655.000	697.365.000	(87.290.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00			Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	160.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	160.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	160.000.000	160.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	160.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	624.655.000	537.365.000	(87.290.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	159.999.000	159.999.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	159.999.000	159.999.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.999.000	159.999.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	464.656.000	377.366.000	(87.290.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	464.656.000	377.366.000	(87.290.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	464.656.000	377.366.000	(87.290.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	500.021.000	500.021.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	500.021.000	500.021.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	127.200.000	46.024.000	(81.176.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	127.200.000	46.024.000	(81.176.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000	46.024.000	(81.176.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.821.000	408.646.000	35.825.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	372.821.000	408.646.000	35.825.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	372.821.000	408.646.000	35.825.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	45.351.000	45.351.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	45.351.000	45.351.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	45.351.000	45.351.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	228.685.000	321.805.000	93.120.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	228.685.000	321.805.000	93.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	228.685.000	321.805.000	93.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	228.685.000	321.805.000	93.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.685.000	321.805.000	93.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.698.367.483	8.991.022.555	(707.344.928)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.448.000	46.448.000	(9.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.168.000	40.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.168.000	40.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.168.000	40.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.280.000	6.280.000	(9.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	15.280.000	6.280.000	(9.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000	6.280.000	(9.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.463.066.983	7.282.752.055	(180.314.928)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.394.212.983	7.213.898.055	(180.314.928)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.394.212.983	7.213.898.055	(180.314.928)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.394.212.983	7.213.898.055	(180.314.928)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.854.000	48.854.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	48.854.000	48.854.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	47.760.000	47.760.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.000	1.094.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.590.000	525.420.000	(510.170.000)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.131.000	14.131.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	14.131.000	14.131.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.131.000	14.131.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.576.000	39.416.000	3.840.000		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	35.576.000	39.416.000	3.840.000		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.576.000	39.416.000	3.840.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.640.000	90.640.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	90.640.000	90.640.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.640.000	90.640.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.168.000	12.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	12.168.000	12.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.168.000	12.168.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08			Fasilitas Kunjungan Tamu	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	2.500.000	(6.500.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778.922.000	267.412.000	(511.510.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	778.922.000	267.412.000	(511.510.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	778.922.000	267.412.000	(511.510.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.384.000	36.384.000	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	32.384.000	36.384.000	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.384.000	36.384.000	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	62.769.000	62.769.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	62.769.000	62.769.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.769.000	62.769.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.265.600	134.265.600	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.265.600	134.265.600	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	134.265.600	134.265.600	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.265.600	134.265.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.294.000	656.434.000	(7.860.000)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.632.000	75.632.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	73.441.000	73.441.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.441.000	73.441.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	2	BELANJA MODAL	2.191.000	2.191.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.191.000	2.191.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.320.000	101.460.000	(7.860.000)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	109.320.000	101.460.000	(7.860.000)		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.320.000	101.460.000	(7.860.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.342.000	479.342.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	479.342.000	479.342.000	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	479.342.000	479.342.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.702.900	345.702.900	0		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	23.691.500	23.691.500	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.691.500	23.691.500	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.691.500	23.691.500	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.010.400	126.010.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	126.010.400	126.010.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.010.400	126.010.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	9.500.000	9.500.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	9.500.000	9.500.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000	9.500.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.401.000	31.401.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	31.401.000	31.401.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.401.000	31.401.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	110.000.000	110.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000	110.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.100.000	5.100.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	5.100.000	5.100.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000	5.100.000	0	
Jumlah Belanja										12.461.271.483	11.741.649.555	(719.621.928)	
Total Surplus/(Defisit)										(12.071.201.483)	(11.353.439.555)	717.761.928	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	241.400.000	183.192.500	(58.207.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	241.400.000	170.292.500	(71.107.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	12.900.000	12.900.000	
Jumlah Pendapatan									241.400.000	183.192.500	(58.207.500)	
0	00	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	365.666.680.498	337.363.749.575	(28.302.930.923)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	337.143.103.000	310.487.318.669	(26.655.784.331)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	00			Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	25.800.000.000	30.394.331.341	4.594.331.341	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	01			Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5.000.000.000	3.484.000.000	(1.516.000.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000.000	3.484.000.000	(1.516.000.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000	3.484.000.000	(1.516.000.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	02			Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	8.000.000.000	7.214.490.000	(785.510.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	7.992.740.000	7.210.860.000	(781.880.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.992.740.000	7.210.860.000	(781.880.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	7.260.000	3.630.000	(3.630.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.260.000	3.630.000	(3.630.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03				Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	12.800.000.000	19.695.841.341	6.895.841.341	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.035.504.000	9.047.347.341	(988.156.659)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.695.504.000	8.707.347.341	(988.156.659)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	340.000.000	340.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	2.764.496.000	10.648.494.000	7.883.998.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	1.270.664.000	8.960.362.000	7.689.698.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.832.000	191.132.000	(2.700.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.300.000.000	1.497.000.000	197.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	00				Penguatan Museum Sonobudoyo	29.000.000.000	26.894.622.365	(2.105.377.635)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01				Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.000.000.000	5.220.660.800	220.660.800	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000.000	5.046.849.800	46.849.800	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000	5.046.849.800	46.849.800	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	2		BELANJA MODAL	0	173.811.000	173.811.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	20.000.000	20.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	137.800.000	137.800.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	16.011.000	16.011.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02				Pengembangan Museum Sonobudoyo	24.000.000.000	21.673.961.565	(2.326.038.435)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.662.822.000	11.363.122.187	(4.299.699.813)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.662.822.000	11.363.122.187	(4.299.699.813)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	8.337.178.000	10.310.839.378	1.973.661.378	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.610.318.000	9.753.295.378	2.142.977.378	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.860.000	94.860.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.03	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	632.000.000	462.684.000	(169.316.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	00				Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	55.045.000.000	14.692.110.763	(40.352.889.237)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	01				Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.000.000.000	3.364.122.000	(1.635.878.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000.000	3.357.122.000	(1.642.878.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000	3.357.122.000	(1.642.878.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	01	5	2		BELANJA MODAL	0	7.000.000	7.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	7.000.000	7.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02				Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	45.545.000.000	6.878.360.763	(38.666.639.237)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.425.000.000	6.788.360.763	(38.636.639.237)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.586.550.000	6.675.090.763	(20.911.459.237)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02	5	1	05	Belanja Hibah	17.838.450.000	113.270.000	(17.725.180.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02	5	2		BELANJA MODAL	120.000.000	90.000.000	(30.000.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000	90.000.000	(30.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	03			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	4.500.000.000	4.449.628.000	(50.372.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.500.000.000	4.449.628.000	(50.372.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000	4.449.628.000	(50.372.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	00			Pengelolaan Taman Budaya	12.000.000.000	10.118.856.000	(1.881.144.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01			Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	12.000.000.000	10.118.856.000	(1.881.144.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.431.666.190	9.550.522.190	(1.881.144.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.431.666.190	9.550.522.190	(1.881.144.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01	5	2	BELANJA MODAL	568.333.810	568.333.810	0		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.178.000	77.178.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.05	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491.155.810	491.155.810	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	00			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	16.300.000.000	19.981.628.400	3.681.628.400		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	7.000.000.000	8.768.805.000	1.768.805.000		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	935.462.000	2.722.806.000	1.787.344.000		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	935.462.000	2.722.806.000	1.787.344.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01	5	2	BELANJA MODAL	6.064.538.000	6.045.999.000	(18.539.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.839.538.000	4.945.999.000	106.461.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.225.000.000	1.100.000.000	(125.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	04			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	9.300.000.000	11.212.823.400	1.912.823.400	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	9.300.000.000	11.212.823.400	1.912.823.400	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000	394.000.000	280.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.06	04	5	1 05	Belanja Hibah	9.186.000.000	10.818.823.400	1.632.823.400	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	00			Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	5.350.000.000	4.816.563.500	(533.436.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	01			Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	750.000.000	744.376.500	(5.623.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	01	5	1	BELANJA OPERASI	750.000.000	744.376.500	(5.623.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	744.376.500	(5.623.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	02			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	600.000.000	556.079.000	(43.921.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	02	5	1	BELANJA OPERASI	600.000.000	556.079.000	(43.921.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	556.079.000	(43.921.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	03			Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4.000.000.000	3.516.108.000	(483.892.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000	3.516.108.000	(483.892.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.07	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	3.516.108.000	(483.892.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	193.648.103.000	203.589.206.300	9.941.103.300	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	01			Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	20.364.400.000	15.894.478.600	(4.469.921.400)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	20.364.400.000	15.894.478.600	(4.469.921.400)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.914.400.000	11.549.185.000	(3.365.215.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	01	5	1	05	Belanja Hibah	5.450.000.000	4.345.293.600	(1.104.706.400)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	03				Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	10.000.000.000	8.341.700.000	(1.658.300.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000.000	8.341.700.000	(1.658.300.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000	8.341.700.000	(1.658.300.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	04				Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	7.500.000.000	3.441.846.400	(4.058.153.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.500.000.000	3.441.846.400	(4.058.153.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000.000	3.441.846.400	(4.058.153.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	05				Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.000.000.000	1.760.148.000	(239.852.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000.000	1.760.148.000	(239.852.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	1.760.148.000	(239.852.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	06				Festival Kebudayaan Yogyakarta	3.500.000.000	2.750.366.000	(749.634.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.500.000.000	2.750.366.000	(749.634.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000.000	2.750.366.000	(749.634.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	07				Gelar Budaya Yogyakarta	5.000.000.000	4.506.309.000	(493.691.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000.000	4.506.309.000	(493.691.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000	4.506.309.000	(493.691.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	08				Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.252.303.000	5.946.857.800	694.554.800	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	08	5	1		BELANJA OPERASI	5.252.303.000	5.946.857.800	694.554.800	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.252.303.000	5.946.857.800	694.554.800	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	09			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	3.000.000.000	1.751.243.000	(1.248.757.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000	1.751.243.000	(1.248.757.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	1.751.243.000	(1.248.757.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	10			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	8.500.000.000	5.955.454.500	(2.544.545.500)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	8.500.000.000	5.955.454.500	(2.544.545.500)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000.000	5.955.454.500	(2.544.545.500)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	11			Selendang Sutera	2.000.000.000	1.362.078.000	(637.922.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	1.362.078.000	(637.922.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	1.362.078.000	(637.922.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	12			Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	5.431.400.000	3.947.220.000	(1.484.180.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	12	5	1	BELANJA OPERASI	5.431.400.000	3.947.220.000	(1.484.180.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.431.400.000	3.947.220.000	(1.484.180.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	15			Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	117.500.000.000	146.601.200.000	29.101.200.000		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	15	5	1	BELANJA OPERASI	117.500.000.000	146.601.200.000	29.101.200.000		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	15	5	1	05	Belanja Hibah	117.500.000.000	146.601.200.000	29.101.200.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	16			Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3.600.000.000	1.330.305.000	(2.269.695.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	16	5	1	BELANJA OPERASI	3.592.500.000	1.319.805.000	(2.272.695.000)		
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.592.500.000	1.319.805.000	(2.272.695.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	16	5	2	BELANJA MODAL	7.500.000	10.500.000	3.000.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	08	1.09	16	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.500.000	10.500.000	3.000.000	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.523.577.498	26.876.430.906	(1.647.146.592)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.596.000	26.596.000	(6.000.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.825.000	2.825.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.825.000	2.825.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000	2.825.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.944.000	4.194.000	(750.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.944.000	4.194.000	(750.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000	4.194.000	(750.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000	3.819.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.944.000	4.194.000	(750.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.944.000	4.194.000	(750.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000	4.194.000	(750.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.995.000	3.870.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.995.000	3.870.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000	3.870.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.875.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	3.875.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.875.000	(1.125.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.776.128.094	19.341.511.802	(1.434.616.292)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.581.768.094	19.150.591.802	(1.431.176.292)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.581.768.094	19.150.591.802	(1.431.176.292)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.581.768.094	19.150.591.802	(1.431.176.292)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.360.000	153.360.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	153.360.000	153.360.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	153.360.000	153.360.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	9.296.000	(704.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	9.296.000	(704.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.296.000	(704.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	7.716.000	(2.284.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	7.716.000	(2.284.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	7.716.000	(2.284.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	2.800.000	(200.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000	2.800.000	(200.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	2.800.000	(200.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	3.748.000	(252.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	3.748.000	(252.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.748.000	(252.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.03	00			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.100.000	56.100.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.100.000	56.100.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	56.100.000	56.100.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.03	06	5	1 01	Belanja Pegawai	56.100.000	56.100.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.628.600	343.389.000	(33.239.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.009.000	50.009.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.009.000	50.009.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.000	50.009.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.788.100	39.651.500	(2.136.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	40.969.100	39.651.500	(1.317.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.969.100	39.651.500	(1.317.600)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	819.000	0	(819.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.000	0	(819.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.676.750	50.630.750	(2.046.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	52.676.750	50.630.750	(2.046.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.676.750	50.630.750	(2.046.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	07			Penyediaan Bahan/Material	50.014.750	45.797.750	(4.217.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	50.014.750	45.797.750	(4.217.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.014.750	45.797.750	(4.217.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.360.000	76.611.000	(11.749.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	88.360.000	76.611.000	(11.749.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.360.000	76.611.000	(11.749.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.435.000	66.360.000	(3.075.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	69.435.000	66.360.000	(3.075.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.435.000	66.360.000	(3.075.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.345.000	14.329.000	(10.016.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	24.345.000	14.329.000	(10.016.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.345.000	14.329.000	(10.016.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.749.935.804	6.608.427.104	(141.508.700)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	7.250.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.250.000	7.250.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000	7.250.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.507.169.400	2.370.554.700	(136.614.700)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.507.169.400	2.370.554.700	(136.614.700)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.507.169.400	2.370.554.700	(136.614.700)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.235.516.404	4.230.622.404	(4.894.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.235.516.404	4.230.622.404	(4.894.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.235.516.404	4.230.622.404	(4.894.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.189.000	500.407.000	(31.782.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.311.000	23.311.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.311.000	23.311.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.311.000	23.311.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.788.000	281.919.000	(30.869.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	312.788.000	281.919.000	(30.869.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	312.788.000	281.919.000	(30.869.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.295.000	79.382.000	(913.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	80.295.000	79.382.000	(913.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.295.000	79.382.000	(913.000)	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.795.000	115.795.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	115.795.000	115.795.000	0	
2	22	2.22.9.02.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.795.000	115.795.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.22.9.02.0.00.01 DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Belanja	365.666.680.498	337.363.749.575	(28.302.930.923)	
										Total Surplus/(Defisit)	(365.425.280.498)	(337.180.557.075)	28.244.723.423	
0	00	2.22.9.02.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.600.000	137.600.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	137.600.000	137.600.000	0	
Jumlah Pendapatan									137.600.000	137.600.000	0	
0	00	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	21.400.000.000	20.587.823.600	(812.176.400)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	21.400.000.000	20.587.823.600	(812.176.400)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	00			Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	21.400.000.000	20.587.823.600	(812.176.400)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02			Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	20.000.000.000	19.758.572.000	(241.428.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	942.575.000	836.199.000	(106.376.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	942.575.000	836.199.000	(106.376.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	19.057.425.000	18.922.373.000	(135.052.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.692.000	329.681.000	(69.011.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	02	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.658.733.000	18.592.692.000	(66.041.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03			Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.400.000.000	829.251.600	(570.748.400)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.284.234.000	722.826.600	(561.407.400)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.024.000	722.826.600	(552.197.400)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	9.210.000	0	(9.210.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03	5	2		BELANJA MODAL	115.766.000	106.425.000	(9.341.000)	
2	22	2.23.2.24.2.22.02.0000	08	1.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.766.000	106.425.000	(9.341.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	38.943.863.868	36.621.119.431	(2.322.744.437)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.045.717.000	5.941.469.250	(104.247.750)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	00				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.645.857.000	4.472.521.250	(173.335.750)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	434.611.000	407.821.000	(26.790.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	134.611.000	107.821.000	(26.790.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	134.611.000	107.821.000	(26.790.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	300.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	300.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	263.530.500	195.229.500	(68.301.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	263.530.500	195.229.500	(68.301.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	263.530.500	195.229.500	(68.301.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	05			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	58.429.500	34.954.750	(23.474.750)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	56.579.500	33.104.750	(23.474.750)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.579.500	33.104.750	(23.474.750)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	1.850.000	1.850.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.850.000	1.850.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	07			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.401.061.000	3.347.191.000	(53.870.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	3.401.061.000	3.347.191.000	(53.870.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.401.061.000	3.347.191.000	(53.870.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	08			Pengembangan Perpustakaan Deposit	6.525.000	5.625.000	(900.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	6.525.000	5.625.000	(900.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000	5.625.000	(900.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	481.700.000	481.700.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	372.105.500	372.105.500	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	372.105.500	372.105.500	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	09	5	2	BELANJA MODAL	109.594.500	109.594.500	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	09	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.594.500	109.594.500	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	00			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1.399.860.000	1.468.948.000	69.088.000	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	01			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah	1.352.628.000	1.468.948.000	116.320.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.352.628.000	1.468.948.000	116.320.000	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.352.628.000	1.468.948.000	116.320.000	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	03			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	47.232.000	0	(47.232.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	47.232.000	0	(47.232.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.232.000	0	(47.232.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	424.693.750	407.223.750	(17.470.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	00			Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	22.900.000	14.710.000	(8.190.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	01			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	22.900.000	14.710.000	(8.190.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	21.710.000	14.710.000	(7.000.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.710.000	14.710.000	(7.000.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	1.190.000	0	(1.190.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.190.000	0	(1.190.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	00			Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	69.600.000	61.100.000	(8.500.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	01			Penerbitan Katalog Induk Daerah	33.600.000	25.100.000	(8.500.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	33.600.000	25.100.000	(8.500.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000	25.100.000	(8.500.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	02			Penerbitan Bibliografi Daerah	36.000.000	36.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.000.000	36.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	36.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	00			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	223.493.750	223.493.750	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	01			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	32.260.000	32.260.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	32.260.000	32.260.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.260.000	32.260.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	02			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	191.233.750	191.233.750	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	191.233.750	191.233.750	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.233.750	191.233.750	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.04	00			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	108.700.000	107.920.000	(780.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.04	01			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	108.700.000	107.920.000	(780.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	108.700.000	107.920.000	(780.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	03	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000	107.920.000	(780.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.473.453.118	30.272.426.431	(2.201.026.687)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.381.000	147.976.000	(24.405.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.537.000	62.537.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	62.537.000	62.537.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.537.000	62.537.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.393.000	35.393.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	35.393.000	35.393.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.393.000	35.393.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.136.000	22.641.000	(9.495.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	32.136.000	22.641.000	(9.495.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.136.000	22.641.000	(9.495.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.410.000	17.410.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	17.410.000	17.410.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.410.000	17.410.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.905.000	9.995.000	(14.910.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	24.905.000	9.995.000	(14.910.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.905.000	9.995.000	(14.910.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.881.983.218	14.405.369.731	(476.613.487)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.765.169.718	14.334.818.231	(430.351.487)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	14.765.169.718	14.334.818.231	(430.351.487)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	14.765.169.718	14.334.818.231	(430.351.487)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.021.000	52.759.000	(46.262.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	99.021.000	52.759.000	(46.262.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.021.000	52.759.000	(46.262.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.648.000	7.648.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.648.000	7.648.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.000	7.648.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4.862.000	4.862.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.862.000	4.862.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.862.000	4.862.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.282.500	5.282.500	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	5.282.500	5.282.500	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.282.500	5.282.500	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.005.000	21.555.000	(21.450.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.005.000	21.555.000	(21.450.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	43.005.000	21.555.000	(21.450.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.005.000	21.555.000	(21.450.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.271.000	500.801.000	(610.470.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.970.000	59.970.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	59.970.000	59.970.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.970.000	59.970.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.556.000	49.556.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.556.000	49.556.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.556.000	49.556.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.184.000	24.152.000	(5.032.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	29.184.000	24.152.000	(5.032.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.184.000	24.152.000	(5.032.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.632.000	34.632.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	34.632.000	34.632.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.632.000	34.632.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.856.000	2.856.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.856.000	2.856.000	0		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.856.000	2.856.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	935.073.000	329.635.000	(605.438.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	935.073.000	329.635.000	(605.438.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	935.073.000	329.635.000	(605.438.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.114.635.500	5.312.007.500	(802.628.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.114.635.500	5.312.007.500	(802.628.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	6.114.635.500	5.312.007.500	(802.628.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.488.000	5.177.007.500	5.038.519.500	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.976.147.500	135.000.000	(5.841.147.500)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.505.876.000	6.491.466.000	(14.410.000)		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	7.880.000	560.000		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.320.000	7.880.000	560.000		
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000	7.880.000	560.000	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.498.556.000	6.483.586.000	(14.970.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	6.498.556.000	6.483.586.000	(14.970.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	113.640.000	102.360.000	(11.280.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.384.916.000	6.381.226.000	(3.690.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.644.301.400	3.393.251.200	(251.050.200)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.245.600	417.081.600	(129.164.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	546.245.600	417.081.600	(129.164.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	546.245.600	417.081.600	(129.164.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	13.250.000	13.250.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	13.250.000	13.250.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000	13.250.000	0	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.592.018.000	2.521.404.000	(70.614.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.592.018.000	2.521.404.000	(70.614.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.592.018.000	2.521.404.000	(70.614.000)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	492.787.800	441.515.600	(51.272.200)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	492.787.800	441.515.600	(51.272.200)	
2	23	2.23.2.24.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	492.787.800	441.515.600	(51.272.200)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	833.398.100	682.109.100	(151.289.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	833.398.100	682.109.100	(151.289.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	333.957.000	315.307.000	(18.650.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.000.000	118.600.000	(16.400.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	135.000.000	118.600.000	(16.400.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	118.600.000	(16.400.000)	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	198.957.000	196.707.000	(2.250.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	198.957.000	196.707.000	(2.250.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.957.000	196.707.000	(2.250.000)	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	00			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	249.441.100	190.206.100	(59.235.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	249.441.100	190.206.100	(59.235.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	242.581.100	183.346.100	(59.235.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.581.100	183.346.100	(59.235.000)	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	6.860.000	6.860.000	0		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.860.000	6.860.000	0	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	00			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	250.000.000	176.596.000	(73.404.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.2.22.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	01			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	200.000.000	146.455.000	(53.545.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	200.000.000	146.455.000	(53.545.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	146.455.000	(53.545.000)	
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	50.000.000	30.141.000	(19.859.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	30.141.000	(19.859.000)		
2	24	2.23.2.24.2.22.02.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	30.141.000	(19.859.000)	
Jumlah Belanja									61.177.261.968	57.891.052.131	(3.286.209.837)		
Total Surplus/(Defisit)									(61.039.661.968)	(57.753.452.131)	3.286.209.837		
0	00	2.23.2.24.2.22.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.608.919.100	1.608.919.100	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.603.919.100	1.603.919.100	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000	5.000.000	0	
Jumlah Pendapatan									1.608.919.100	1.608.919.100	0	
0	00	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	198.792.500	198.792.500	
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	13	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0	198.792.500	198.792.500	
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	13	1.01	00			Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	198.792.500	198.792.500	
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	13	1.01	01			Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	198.792.500	198.792.500	
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	13	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	198.792.500	198.792.500	
1	03	3.25.2.22.0.00.01.0000	13	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	198.792.500	198.792.500	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	00		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05		Pengembangan Budaya Bahari	51.107.025.000	30.452.873.500	(20.654.151.500)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05	5 1	BELANJA OPERASI	6.107.025.000	4.846.682.500	(1.260.342.500)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.107.025.000	4.031.057.500	(2.075.967.500)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05	5 1 05	Belanja Hibah	0	815.625.000	815.625.000	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05	5 2	BELANJA MODAL	45.000.000.000	25.606.191.000	(19.393.809.000)	
2	22	3.25.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	05	5 2 01	Belanja Modal Tanah	45.000.000.000	25.606.191.000	(19.393.809.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.972.122.209	36.110.684.562	(3.861.437.647)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.138.205.500	1.218.353.500	80.148.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.138.205.500	1.218.353.500	80.148.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	243.907.500	242.307.500	(1.600.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	243.907.500	242.307.500	(1.600.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	243.907.500	242.307.500	(1.600.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	710.060.000	859.585.000	149.525.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	710.060.000	859.585.000	149.525.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	710.060.000	859.585.000	149.525.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	184.238.000	116.461.000	(67.777.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	184.238.000	116.461.000	(67.777.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.238.000	116.461.000	(67.777.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.816.307.600	3.459.669.500	(356.638.100)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	488.308.500	349.246.500	(139.062.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	120.609.500	110.929.500	(9.680.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	120.609.500	110.929.500	(9.680.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.609.500	110.929.500	(9.680.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	367.699.000	238.317.000	(129.382.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	367.699.000	238.317.000	(129.382.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	367.699.000	238.317.000	(129.382.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	00				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.232.661.000	1.073.193.000	(159.468.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.232.661.000	1.073.193.000	(159.468.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.232.661.000	1.073.193.000	(159.468.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	580.661.000	421.193.000	(159.468.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1 05	Belanja Hibah	652.000.000	652.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.03	00			Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.03	02			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.972.000	48.684.000	(12.288.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	00			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.932.871.100	1.924.201.000	(8.670.100)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.762.332.100	1.762.332.000	(100)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.430.000	5.430.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000	5.430.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	1.756.902.100	1.756.902.000	(100)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.556.912.100	1.556.912.000	(100)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.990.000	199.990.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	170.539.000	161.869.000	(8.670.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	170.539.000	161.869.000	(8.670.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.539.000	161.869.000	(8.670.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.09	00			Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.09	01			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.495.000	64.345.000	(37.150.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.698.153.000	7.773.944.000	(924.209.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	00			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8.698.153.000	7.773.944.000	(924.209.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	710.000.000	560.000.000	(150.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1	BELANJA OPERASI	182.000.000	32.000.000	(150.000.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000	32.000.000	(150.000.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	2	BELANJA MODAL	528.000.000	528.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.000.000	528.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.368.640.000	3.518.640.000	150.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.233.636.000	3.383.636.000	150.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.233.636.000	3.383.636.000	150.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	2	BELANJA MODAL	135.004.000	135.004.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.004.000	135.004.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	278.747.000	278.747.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	1	BELANJA OPERASI	249.546.000	249.546.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.546.000	249.546.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	2	BELANJA MODAL	29.201.000	29.201.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.201.000	29.201.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08			Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.626.566.000	3.022.450.000	(604.116.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08	5	1	BELANJA OPERASI	3.626.566.000	3.022.450.000	(604.116.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.566.000	605.450.000	(604.116.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	08	5	1 05	Belanja Hibah	2.417.000.000	2.417.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09			Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	714.200.000	394.107.000	(320.093.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	714.200.000	394.107.000	(320.093.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	714.200.000	394.107.000	(320.093.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	390.910.000	265.614.000	(125.296.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	117.469.500	117.469.500	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.469.500	117.469.500	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	00			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	273.440.500	148.144.500	(125.296.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	246.289.000	125.918.000	(120.371.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	246.289.000	125.918.000	(120.371.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	246.289.000	125.918.000	(120.371.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.151.500	22.226.500	(4.925.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	27.151.500	22.226.500	(4.925.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	05	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.151.500	22.226.500	(4.925.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.759.009.000	2.151.373.000	(607.636.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	00			Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	885.268.000	726.670.000	(158.598.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	885.268.000	726.670.000	(158.598.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	882.838.000	724.240.000	(158.598.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	882.838.000	724.240.000	(158.598.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	2.430.000	2.430.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.430.000	2.430.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	00			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.408.705.000	1.237.345.000	(171.360.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	666.250.000	504.486.000	(161.764.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	656.082.000	494.318.000	(161.764.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	512.082.000	350.318.000	(161.764.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1 05	Belanja Hibah	144.000.000	144.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	10.168.000	10.168.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.168.000	10.168.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	02			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	742.455.000	732.859.000	(9.596.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	742.455.000	732.859.000	(9.596.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	742.455.000	732.859.000	(9.596.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.03	00			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.03	02			Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	06	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	465.036.000	187.358.000	(277.678.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.169.537.109	21.241.730.562	(1.927.806.547)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.434.500	124.084.500	(13.350.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.594.500	76.244.500	(10.350.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	86.594.500	76.244.500	(10.350.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.594.500	76.244.500	(10.350.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.840.000	47.840.000	(3.000.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	50.840.000	47.840.000	(3.000.000)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.840.000	47.840.000	(3.000.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.011.131.699	15.245.574.152	(765.557.547)		
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.828.831.699	15.063.274.152	(765.557.547)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.828.831.699	15.063.274.152	(765.557.547)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	15.828.831.699	15.063.274.152	(765.557.547)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.300.000	150.300.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	150.300.000	150.300.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	150.300.000	150.300.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	32.000.000	32.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	32.000.000	32.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	32.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.698.800	701.262.800	(585.436.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.609.800	25.609.800	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	25.609.800	25.609.800	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.609.800	25.609.800	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.080.000	79.080.000	3.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	76.080.000	79.080.000	3.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.080.000	79.080.000	3.000.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.462.000	82.462.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	82.462.000	82.462.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.462.000	82.462.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.260.000	16.260.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	16.260.000	16.260.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000	16.260.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.086.287.000	497.851.000	(588.436.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.086.287.000	497.851.000	(588.436.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.287.000	497.851.000	(588.436.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.828.000	282.428.000	6.600.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.828.000	265.428.000	6.600.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	258.828.000	265.428.000	6.600.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.828.000	265.428.000	6.600.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	17.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.600.000	2.600.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000	2.600.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	14.400.000	14.400.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.400.000	14.400.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.227.320.510	3.176.570.510	(50.750.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.131.000	100.131.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	100.131.000	100.131.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.131.000	100.131.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.135.190.110	1.084.440.110	(50.750.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.135.190.110	1.084.440.110	(50.750.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.135.190.110	1.084.440.110	(50.750.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.991.999.400	1.991.999.400	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.991.999.400	1.991.999.400	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.999.400	1.991.999.400	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.231.123.600	1.711.810.600	(519.313.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	636.916.700	618.850.700	(18.066.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	636.916.700	618.850.700	(18.066.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	636.916.700	618.850.700	(18.066.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.330.000	64.330.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	64.330.000	64.330.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.330.000	64.330.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.401.891.900	900.644.900	(501.247.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi : 3.25.2.22.0.00.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	300.652.900	349.699.900	49.047.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.652.900	349.699.900	49.047.000	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.101.239.000	550.945.000	(550.294.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.101.239.000	550.945.000	(550.294.000)	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.985.000	87.985.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	87.985.000	87.985.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.985.000	87.985.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
Jumlah Belanja									91.079.147.209	66.762.350.562	(24.316.796.647)		
Total Surplus/(Defisit)									(89.470.228.109)	(65.153.431.462)	24.316.796.647		
0	00	3.25.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.250.000	35.250.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	35.250.000	35.250.000	0	
Jumlah Pendapatan									35.250.000	35.250.000	0	
0	00	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	23.025.000.000	21.249.950.500	(1.775.049.500)	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.025.000.000	21.249.950.500	(1.775.049.500)	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	00			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	500.000.000	2.376.810.000	1.876.810.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	500.000.000	2.376.810.000	1.876.810.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	500.000.000	1.876.810.000	1.376.810.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	1.876.810.000	1.376.810.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2	BELANJA MODAL	0	500.000.000	500.000.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.04	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	500.000.000	500.000.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	00			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	20.525.000.000	10.213.378.000	(10.311.622.000)	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	02			Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	20.525.000.000	10.213.378.000	(10.311.622.000)	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	20.525.000.000	10.063.378.000	(10.461.622.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.525.000.000	10.063.378.000	(10.461.622.000)	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	02	5	2		BELANJA MODAL	0	150.000.000	150.000.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.08	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	150.000.000	150.000.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	00				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.000.000.000	8.659.762.500	6.659.762.500	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19				Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	2.000.000.000	8.659.762.500	6.659.762.500	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000.000	8.477.407.500	6.477.407.500	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	3.402.407.500	1.402.407.500	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19	5	1	05	Belanja Hibah	0	5.075.000.000	5.075.000.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19	5	2		BELANJA MODAL	0	182.355.000	182.355.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	08	1.09	19	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	182.355.000	182.355.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.431.254.179	16.089.810.632	(3.341.443.547)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.947.825.000	2.664.845.000	(1.282.980.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.212.225.000	186.000.000	(1.026.225.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.212.225.000	186.000.000	(1.026.225.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.212.225.000	186.000.000	(1.026.225.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.225.000	186.000.000	(1.026.225.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.963.200.000	1.799.445.000	(163.755.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.885.290.000	1.785.775.000	(99.515.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.885.290.000	1.785.775.000	(99.515.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.885.290.000	1.785.775.000	(99.515.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	05			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	77.910.000	13.670.000	(64.240.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	77.910.000	13.670.000	(64.240.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.910.000	13.670.000	(64.240.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	00			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	772.400.000	679.400.000	(93.000.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	04			Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	443.810.000	350.810.000	(93.000.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	443.810.000	350.810.000	(93.000.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	443.810.000	350.810.000	(93.000.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	05			Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	328.590.000	328.590.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	328.590.000	328.590.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	328.590.000	328.590.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.140.301.000	1.674.843.000	(465.458.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	00			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.140.301.000	1.674.843.000	(465.458.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik	601.400.000	507.600.000	(93.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Dalam dan Luar Negeri				
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	601.400.000	507.600.000	(93.800.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	601.400.000	507.600.000	(93.800.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	491.100.000	347.742.000	(143.358.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	491.100.000	347.742.000	(143.358.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	491.100.000	347.742.000	(143.358.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	925.141.000	696.841.000	(228.300.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	925.141.000	696.841.000	(228.300.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	925.141.000	696.841.000	(228.300.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	04			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	122.660.000	122.660.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	122.660.000	122.660.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.660.000	122.660.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.872.520.500	2.483.910.000	(388.610.500)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.872.520.500	2.483.910.000	(388.610.500)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.362.005.000	920.584.500	(441.420.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.362.005.000	920.584.500	(441.420.500)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.005.000	920.584.500	(441.420.500)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	783.500.000	827.080.000	43.580.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	783.500.000	827.080.000	43.580.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	783.500.000	827.080.000	43.580.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	04			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	727.015.500	736.245.500	9.230.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	727.015.500	736.245.500	9.230.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	727.015.500	736.245.500	9.230.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.470.607.679	9.266.212.632	(1.204.395.047)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.340.000	103.565.000	(30.775.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.340.000	76.140.000	(3.200.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	79.340.000	76.140.000	(3.200.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.340.000	76.140.000	(3.200.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	27.425.000	(27.575.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	55.000.000	27.425.000	(27.575.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	27.425.000	(27.575.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.253.130.029	7.682.138.882	(570.991.147)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.188.410.029	7.617.418.882	(570.991.147)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.188.410.029	7.617.418.882	(570.991.147)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	8.188.410.029	7.617.418.882	(570.991.147)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.720.000	54.720.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	54.720.000	54.720.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	54.720.000	54.720.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.216.000	386.590.000	(479.626.000)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	9.500.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.500.000	9.500.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000	9.500.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.743.000	6.743.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	6.743.000	6.743.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.743.000	6.743.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.800.000	31.800.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	31.800.000	31.800.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000	31.800.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000	4.380.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.380.000	4.380.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000	4.380.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	707.328.000	227.702.000	(479.626.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	707.328.000	227.702.000	(479.626.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	707.328.000	227.702.000	(479.626.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.265.000	35.265.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	35.265.000	35.265.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.265.000	35.265.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.200.000	71.200.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	71.200.000	71.200.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.200.000	71.200.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.929.000	81.929.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.929.000	81.929.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	81.929.000	81.929.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.929.000	81.929.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.799.950	484.867.050	(60.932.900)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.800.000	51.200.000	(3.600.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	54.800.000	51.200.000	(3.600.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000	51.200.000	(3.600.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.999.950	124.667.050	(57.332.900)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	181.999.950	124.667.050	(57.332.900)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	181.999.950	124.667.050	(57.332.900)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.000.000	309.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	309.000.000	309.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	309.000.000	309.000.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.192.700	527.122.700	(62.070.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.380.000	27.380.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.380.000	27.380.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.380.000	27.380.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.372.700	142.302.700	(12.070.000)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	154.372.700	142.302.700	(12.070.000)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.372.700	142.302.700	(12.070.000)	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	9.400.000	9.400.000	0		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	9.400.000	9.400.000	0		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000	9.400.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.040.000	103.040.000	0		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	103.040.000	103.040.000	0		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.040.000	103.040.000	0	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.000.000	245.000.000	(50.000.000)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	295.000.000	245.000.000	(50.000.000)		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000	245.000.000	(50.000.000)	
Jumlah Belanja									42.456.254.179	37.339.761.132	(5.116.493.047)		
Total Surplus/(Defisit)									(42.421.004.179)	(37.304.511.132)	5.116.493.047		
0	00	3.26.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.538.220.000	1.643.414.926	105.194.926	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.425.495.000	1.530.689.926	105.194.926	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	112.725.000	112.725.000	0	
Jumlah Pendapatan									1.538.220.000	1.643.414.926	105.194.926	
0	00	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.017.196.000	1.671.134.250	(346.061.750)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	00			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	05			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.014.669.000	726.138.000	(288.531.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	00			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	421.976.000	399.716.000	(22.260.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	197.780.000	189.220.000	(8.560.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	197.780.000	189.220.000	(8.560.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	197.780.000	189.220.000	(8.560.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	114.899.000	101.649.000	(13.250.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	114.899.000	101.649.000	(13.250.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.899.000	101.649.000	(13.250.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	05			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	109.297.000	108.847.000	(450.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	109.297.000	108.847.000	(450.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.297.000	18.847.000	(450.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	05	5	1 05	Belanja Hibah	90.000.000	90.000.000	0	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.04	00			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.04	01			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	592.693.000	326.422.000	(266.271.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	506.483.000	497.747.500	(8.735.500)			
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	00		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)			
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)			
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.973.000	77.737.500	(8.235.500)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	00			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	420.510.000	420.010.000	(500.000)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	420.510.000	420.010.000	(500.000)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	420.510.000	420.010.000	(500.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.510.000	180.010.000	(500.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	240.000.000	240.000.000	0	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	156.044.000	137.633.250	(18.410.750)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	00			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.044.000	137.633.250	(18.410.750)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.940.000	35.940.000	(1.000.000)		
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.940.000	35.940.000	(1.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.940.000	35.940.000	(1.000.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.585.250	67.955.250	(9.630.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	77.585.250	67.955.250	(9.630.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.585.250	67.955.250	(9.630.000)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	04				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.518.750	33.738.000	(7.780.750)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	41.518.750	33.738.000	(7.780.750)	
2	09	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.518.750	33.738.000	(7.780.750)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.438.243.000	3.385.191.063	(1.053.051.937)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.438.243.000	3.385.191.063	(1.053.051.937)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	1.08	00				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	4.438.243.000	3.385.191.063	(1.053.051.937)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	1.08	01				Pengembangan Lumbung Mataraman	4.438.243.000	3.385.191.063	(1.053.051.937)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.438.243.000	3.385.191.063	(1.053.051.937)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.993.000	1.791.468.500	(753.524.500)	
2	22	3.27.2.09.2.22.02.0000	08	1.08	01	5	1	05	Belanja Hibah	1.893.250.000	1.593.722.563	(299.527.437)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	87.502.452.063	83.324.275.554	(4.178.176.509)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.360.856.000	21.631.140.000	(729.716.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	00			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.066.075.000	3.688.545.000	(377.530.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.066.075.000	3.688.545.000	(377.530.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.066.075.000	3.688.545.000	(377.530.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.475.000	146.945.000	(62.530.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	3.856.600.000	3.541.600.000	(315.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	00			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.662.442.000	1.577.723.000	(84.719.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	120.620.000	105.921.000	(14.699.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	120.620.000	102.121.000	(18.499.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.620.000	102.121.000	(18.499.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	0	3.800.000	3.800.000		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.800.000	3.800.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	618.730.000	590.330.000	(28.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	527.734.000	519.334.000	(8.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	527.734.000	519.334.000	(8.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	90.996.000	70.996.000	(20.000.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.996.000	5.996.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000	65.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000	0	(20.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	789.964.000	754.829.000	(35.135.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	789.964.000	754.829.000	(35.135.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	789.964.000	754.829.000	(35.135.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	133.128.000	126.643.000	(6.485.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	125.229.000	118.744.000	(6.485.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.229.000	118.744.000	(6.485.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	7.899.000	7.899.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.899.000	7.899.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	00				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.632.339.000	16.364.872.000	(267.467.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	01				Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	13.063.488.000	12.848.288.000	(215.200.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.063.488.000	12.848.288.000	(215.200.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	572.488.000	564.288.000	(8.200.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	01	5	1	05	Belanja Hibah	12.491.000.000	12.284.000.000	(207.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.568.851.000	3.516.584.000	(52.267.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.454.796.000	3.422.529.000	(32.267.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.454.796.000	3.422.529.000	(32.267.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02	5	2		BELANJA MODAL	114.055.000	94.055.000	(20.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.055.000	34.055.000	(20.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	02	1.04	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000	60.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.733.024.000	6.461.338.750	(1.271.685.250)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	00				Penataan Prasarana Pertanian	7.733.024.000	6.461.338.750	(1.271.685.250)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01				Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.071.000.000	1.004.110.000	(66.890.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.071.000.000	1.004.110.000	(66.890.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.071.000.000	1.004.110.000	(66.890.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	02				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.776.367.000	2.987.548.750	(788.818.250)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.776.367.000	2.987.548.750	(788.818.250)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.639.173.000	1.950.604.750	(688.568.250)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.137.194.000	1.036.944.000	(100.250.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.896.750.000	1.632.150.000	(264.600.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.896.750.000	1.632.150.000	(264.600.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	546.750.000	526.500.000	(20.250.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	1.350.000.000	1.105.650.000	(244.350.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	04				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	988.907.000	837.530.000	(151.377.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	988.907.000	837.530.000	(151.377.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	390.782.000	359.405.000	(31.377.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	598.125.000	478.125.000	(120.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.866.211.000	1.760.307.000	(105.904.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	00				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	333.088.500	278.688.500	(54.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	00			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	576.035.000	545.311.000	(30.724.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01			Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	32.140.000	3.216.000	(28.924.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	32.140.000	3.216.000	(28.924.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.140.000	3.216.000	(28.924.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	03			Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	543.895.000	542.095.000	(1.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	543.895.000	542.095.000	(1.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	543.895.000	542.095.000	(1.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	00			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	913.860.000	916.744.000	2.884.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	03			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	913.860.000	916.744.000	2.884.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	611.244.000	618.744.000	7.500.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	611.244.000	618.744.000	7.500.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	2	BELANJA MODAL	302.616.000	298.000.000	(4.616.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.616.000	298.000.000	(4.616.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.05	00			Kesejahteraan Hewan	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.05	01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	04	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.227.500	19.563.500	(23.664.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	00			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	729.699.000	681.299.000	(48.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	729.699.000	681.299.000	(48.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	14.729.000	14.729.000	0		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.729.000	14.729.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.884.681.200	3.521.849.700	(362.831.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.01	00			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.01	01			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	402.940.000	102.713.500	(300.226.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	00			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.481.741.200	3.419.136.200	(62.605.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.197.203.200	3.180.168.200	(17.035.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.509.044.300	2.492.009.300	(17.035.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.044.300	2.492.009.300	(17.035.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	688.158.900	688.158.900	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.528.900	373.528.900	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.730.000	208.730.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.900.000	105.900.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	02				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	284.538.000	238.968.000	(45.570.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	284.538.000	238.968.000	(45.570.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	284.538.000	238.968.000	(45.570.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.913.251.863	49.253.612.104	(1.659.639.759)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.527.500	111.739.000	(10.788.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.218.500	89.230.000	(2.988.500)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	92.218.500	89.230.000	(2.988.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.218.500	89.230.000	(2.988.500)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.309.000	22.509.000	(7.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	30.309.000	22.509.000	(7.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.309.000	22.509.000	(7.800.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.575.701.138	44.623.774.054	(951.927.084)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.377.761.138	44.425.834.054	(951.927.084)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.377.761.138	44.425.834.054	(951.927.084)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	45.377.761.138	44.425.834.054	(951.927.084)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.940.000	185.940.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	185.940.000	185.940.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	185.940.000	185.940.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.05	11	5	1		BELANJA OPERASI	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.200.000	16.454.500	(13.745.500)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.284.500	283.649.500	(473.635.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.659.000	18.134.000	(525.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.659.000	18.134.000	(525.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.659.000	18.134.000	(525.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.426.500	44.701.500	32.275.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.426.500	18.301.500	5.875.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.426.500	18.301.500	5.875.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2		BELANJA MODAL	0	26.400.000	26.400.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	26.400.000	26.400.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.223.500	53.948.500	(3.275.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	57.223.500	53.948.500	(3.275.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.223.500	53.948.500	(3.275.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.776.000	17.832.000	(1.944.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.776.000	17.832.000	(1.944.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.776.000	17.832.000	(1.944.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.390.000	134.349.000	(499.041.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	633.390.000	134.349.000	(499.041.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	633.390.000	134.349.000	(499.041.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.809.500	14.684.500	(1.125.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	11	5	1		BELANJA OPERASI	15.809.500	14.684.500	(1.125.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.06	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.809.500	14.684.500	(1.125.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.159.000	116.251.000	(10.908.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.803.000	81.363.000	11.560.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.845.000	17.845.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.845.000	17.845.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	51.958.000	63.518.000	11.560.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.098.000	53.658.000	11.560.000	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.860.000	9.860.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.356.000	34.888.000	(22.468.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	57.356.000	34.888.000	(22.468.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.356.000	34.888.000	(22.468.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.034.009.925	2.927.329.250	(106.680.675)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.268.000	81.668.000	(3.600.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	85.268.000	81.668.000	(3.600.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.268.000	81.668.000	(3.600.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.103.298.125	1.000.217.450	(103.080.675)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.103.298.125	1.000.217.450	(103.080.675)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.103.298.125	1.000.217.450	(103.080.675)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.443.800	1.845.443.800	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.845.443.800	1.845.443.800	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.443.800	1.845.443.800	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.266.369.800	1.174.414.800	(91.955.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.046.000	28.898.000	(5.148.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.046.000	28.898.000	(5.148.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.046.000	28.898.000	(5.148.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.779.400	722.197.400	(39.582.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	761.779.400	722.197.400	(39.582.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	761.779.400	722.197.400	(39.582.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
 Organisasi : 3.27.2.09.2.22.02 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.660.000	19.260.000	(3.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	22.660.000	19.260.000	(3.400.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.660.000	19.260.000	(3.400.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.638.800	351.638.800	(37.000.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	338.638.800	301.638.800	(37.000.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	338.638.800	301.638.800	(37.000.000)	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	0		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000	50.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.245.600	52.420.600	(6.825.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	59.245.600	52.420.600	(6.825.000)		
3	27	3.27.2.09.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.245.600	52.420.600	(6.825.000)	
Jumlah Belanja									93.957.891.063	88.380.600.867	(5.577.290.196)		
Total Surplus/(Defisit)									(92.419.671.063)	(86.737.185.941)	5.682.485.122		
0	00	3.27.2.09.2.22.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	207.200.000	197.200.000	(10.000.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	207.200.000	177.200.000	(30.000.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	20.000.000	20.000.000	
Jumlah Pendapatan									207.200.000	197.200.000	(10.000.000)	
0	00	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	18.000.000.000	15.148.691.425	(2.851.308.575)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.000.000.000	15.148.691.425	(2.851.308.575)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	00			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	18.000.000.000	15.148.691.425	(2.851.308.575)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03			Pengembangan Industri Kreatif	18.000.000.000	15.148.691.425	(2.851.308.575)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	15.632.000.000	13.091.647.400	(2.540.352.600)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.383.250.000	12.842.897.400	(2.540.352.600)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03	5	1 05	Belanja Hibah	248.750.000	248.750.000	0	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03	5	2	BELANJA MODAL	2.368.000.000	2.057.044.025	(310.955.975)	
2	22	3.31.3.30.2.22.02.0000	08	1.08	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.368.000.000	2.057.044.025	(310.955.975)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.287.856.750	2.023.937.750	(263.919.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	24.429.000	124.259.000	99.830.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.04	00			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	24.429.000	124.259.000	99.830.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.04	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	24.429.000	124.259.000	99.830.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	24.429.000	124.259.000	99.830.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.429.000	124.259.000	99.830.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	127.848.000	120.538.000	(7.310.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	00			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	127.848.000	120.538.000	(7.310.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	01			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	63.894.000	63.894.000	0	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	63.894.000	63.894.000	0	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.894.000	63.894.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	02			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.954.000	56.644.000	(7.310.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	63.954.000	56.644.000	(7.310.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.954.000	56.644.000	(7.310.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	678.217.500	658.091.500	(20.126.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	00			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	678.217.500	658.091.500	(20.126.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	01			Pameran Dagang Internasional/Nasional	572.282.000	462.383.000	(109.899.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	572.282.000	462.383.000	(109.899.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	572.282.000	462.383.000	(109.899.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	03			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20.941.000	0	(20.941.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	20.941.000	0	(20.941.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.941.000	0	(20.941.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	05			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	84.994.500	195.708.500	110.714.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	84.994.500	195.708.500	110.714.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.994.500	195.708.500	110.714.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	0.00	00			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	177.476.000	249.776.000	72.300.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.01	00			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	170.672.000	242.972.000	72.300.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.01	03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	170.672.000	242.972.000	72.300.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	170.672.000	242.972.000	72.300.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.672.000	242.972.000	72.300.000	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.03	00			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	6.804.000	6.804.000	0		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.03	01			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	6.804.000	6.804.000	0		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.804.000	6.804.000	0		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	06	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.804.000	6.804.000	0	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.279.886.250	871.273.250	(408.613.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.02	00			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.226.886.250	747.123.250	(479.763.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.02	01			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.226.886.250	747.123.250	(479.763.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.226.886.250	747.123.250	(479.763.000)		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	686.886.250	207.123.250	(479.763.000)	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	540.000.000	540.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.03	00			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	53.000.000	124.150.000	71.150.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.03	03			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	53.000.000	124.150.000	71.150.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	53.000.000	124.150.000	71.150.000		
3	30	3.31.3.30.2.22.02.0000	07	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	124.150.000	71.150.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	27.619.275.009	27.125.330.928	(493.944.081)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.028.049.075	8.551.519.075	(476.530.000)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	00			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.028.049.075	8.551.519.075	(476.530.000)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7.694.583.325	7.360.016.325	(334.567.000)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.694.583.325	7.360.016.325	(334.567.000)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.413.533.325	4.078.966.325	(334.567.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	3.281.050.000	3.281.050.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	310.414.750	666.914.750	356.500.000		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	310.184.750	666.684.750	356.500.000		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	310.184.750	666.684.750	356.500.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	2	BELANJA MODAL	230.000	230.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.000	230.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.023.051.000	524.588.000	(498.463.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.023.051.000	524.588.000	(498.463.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.023.051.000	524.588.000	(498.463.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01	00				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.404.811.934	18.393.462.853	(11.349.081)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.484.000	370.354.000	29.870.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.984.000	347.554.000	37.570.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	309.984.000	347.554.000	37.570.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	309.984.000	347.554.000	37.570.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	4.750.000	(750.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.500.000	4.750.000	(750.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	4.750.000	(750.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	18.050.000	(6.950.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	25.000.000	18.050.000	(6.950.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	18.050.000	(6.950.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.132.754.034	14.522.905.953	(609.848.081)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.012.574.034	14.402.725.953	(609.848.081)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.012.574.034	14.402.725.953	(609.848.081)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	15.012.574.034	14.402.725.953	(609.848.081)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.280.000	110.280.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	110.280.000	110.280.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	106.260.000	106.260.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000	4.020.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	9.900.000	9.900.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	9.900.000	9.900.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000	9.900.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	00			Administarsi Umum Perangkat Daerah	860.122.600	487.261.600	(372.861.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.520.600	5.520.600	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.520.600	5.520.600	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.600	5.520.600	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.470.000	5.470.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.470.000	5.470.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000	5.470.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.979.000	52.979.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	52.579.000	52.579.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.579.000	52.579.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2	BELANJA MODAL	400.000	400.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000	400.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.068.000	68.068.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	68.068.000	68.068.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.068.000	68.068.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.980.000	13.980.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	13.980.000	13.980.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000	13.980.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.038.000	259.177.000	(372.861.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	632.038.000	259.177.000	(372.861.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	632.038.000	259.177.000	(372.861.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.067.000	82.067.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	82.067.000	82.067.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.067.000	82.067.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.796.000	123.083.000	(7.713.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	12.500.000	12.500.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	12.500.000	12.500.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	12.500.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.349.000	99.349.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	99.349.000	99.349.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.349.000	99.349.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.947.000	11.234.000	(7.713.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	18.947.000	11.234.000	(7.713.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.947.000	11.234.000	(7.713.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.485.058.750	2.455.808.750	970.750.000		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.685.000	64.685.000	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	64.685.000	64.685.000	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.685.000	64.685.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.600.000	1.400.350.000	970.750.000		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	429.600.000	1.400.350.000	970.750.000		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	429.600.000	1.400.350.000	970.750.000	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.773.750	990.773.750	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	990.773.750	990.773.750	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	990.773.750	990.773.750	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.596.550	434.049.550	(21.547.000)		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.523.500	17.523.500	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	17.523.500	17.523.500	0		
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.523.500	17.523.500	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	226.468.050	224.076.050	(2.392.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Lapangan				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	226.468.050	224.076.050	(2.392.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.468.050	224.076.050	(2.392.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	1.800.000	1.800.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.648.000	41.993.000	(2.655.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	37.250.000	34.595.000	(2.655.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000	34.595.000	(2.655.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	2	BELANJA MODAL	7.398.000	7.398.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.398.000	7.398.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.960.000	98.460.000	(16.500.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	114.960.000	98.460.000	(16.500.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.960.000	98.460.000	(16.500.000)	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.197.000	50.197.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	50.197.000	50.197.000	0	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.197.000	50.197.000	0	
Jumlah Belanja								47.907.131.759	44.297.960.103	(3.609.171.656)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 Organisasi : 3.31.3.30.2.22.02 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Total Surplus/(Defisit)	(47.699.931.759)	(44.100.760.103)	3.599.171.656	
0	00	3.31.3.30.2.22.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.362.097.000	1.410.806.000	48.709.000	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.362.097.000	1.410.806.000	48.709.000	
Jumlah Pendapatan								1.362.097.000	1.410.806.000	48.709.000		
0	00	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	50.033.833.351	45.683.284.869	(4.350.548.482)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	348.830.000	506.447.000	157.617.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	02	1.01	00			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	348.830.000	506.447.000	157.617.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	02	1.01	01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	348.830.000	506.447.000	157.617.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	348.830.000	506.447.000	157.617.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.830.000	506.447.000	157.617.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9.334.304.000	7.868.780.000	(1.465.524.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	00			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	9.284.304.000	7.837.150.000	(1.447.154.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	9.284.304.000	7.837.150.000	(1.447.154.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.284.304.000	7.837.150.000	(1.447.154.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.399.204.000	5.952.050.000	(1.447.154.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	1.885.100.000	1.885.100.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.02	00				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	31.630.000	(18.370.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.02	01				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	31.630.000	(18.370.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	31.630.000	(18.370.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	31.630.000	(18.370.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.857.019.000	3.940.041.000	(916.978.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.01	00				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.326.800.000	3.694.640.000	(632.160.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.01	05				Perluasan Kesempatan Kerja	4.326.800.000	3.694.640.000	(632.160.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.326.800.000	3.694.640.000	(632.160.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.800.000	919.640.000	(107.160.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	3.300.000.000	2.775.000.000	(525.000.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.02	00				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.055.000	28.663.000	(5.392.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.02	02				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	34.055.000	28.663.000	(5.392.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	34.055.000	28.663.000	(5.392.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.055.000	28.663.000	(5.392.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	00				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	445.764.000	166.338.000	(279.426.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	02				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	112.200.000	91.468.000	(20.732.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	112.200.000	91.468.000	(20.732.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.200.000	91.468.000	(20.732.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	03			Job Fair/Bursa Kerja	333.564.000	74.870.000	(258.694.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	333.564.000	74.870.000	(258.694.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	333.564.000	74.870.000	(258.694.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.04	00			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	50.400.000	50.400.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.04	01			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.400.000	50.400.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.400.000	50.400.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	04	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000	50.400.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	680.300.000	693.048.000	12.748.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	00			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	390.300.000	391.614.000	1.314.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	285.660.000	294.665.000	9.005.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	285.660.000	294.665.000	9.005.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.660.000	294.665.000	9.005.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	04			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	104.640.000	96.949.000	(7.691.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	104.640.000	96.949.000	(7.691.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.640.000	96.949.000	(7.691.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	00			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	290.000.000	301.434.000	11.434.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	01			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	189.268.000	154.518.000	(34.750.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	189.268.000	154.518.000	(34.750.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.268.000	154.518.000	(34.750.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100.732.000	146.916.000	46.184.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	100.732.000	146.916.000	46.184.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	05	1.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.732.000	146.916.000	46.184.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.345.855.000	1.216.477.500	(129.377.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	00			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.345.855.000	1.216.477.500	(129.377.500)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	01			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	710.000.000	625.187.000	(84.813.000)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	710.000.000	625.187.000	(84.813.000)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	710.000.000	625.187.000	(84.813.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	03				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	635.855.000	591.290.500	(44.564.500)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	625.855.000	581.290.500	(44.564.500)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	625.855.000	581.290.500	(44.564.500)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	06	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.467.525.351	31.458.491.369	(2.009.033.982)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.000.000	156.161.000	(126.839.000)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	88.555.000	(111.445.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	88.555.000	(111.445.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	88.555.000	(111.445.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.000.000	67.606.000	(15.394.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	83.000.000	67.606.000	(15.394.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000	67.606.000	(15.394.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.161.210.201	25.031.787.519	(1.129.422.682)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.996.270.201	24.869.937.519	(1.126.332.682)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	25.996.270.201	24.869.937.519	(1.126.332.682)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	25.996.270.201	24.869.937.519	(1.126.332.682)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.940.000	134.940.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	134.940.000	134.940.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	02	5 1 01	Belanja Pegawai	134.400.000	134.400.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	540.000	540.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	30.000.000	26.910.000	(3.090.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000	26.910.000	(3.090.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	26.910.000	(3.090.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.256.000	14.256.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.256.000	14.256.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05	05	5 1	BELANJA OPERASI	14.256.000	14.256.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.256.000	14.256.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.893.552.400	1.561.839.400	(331.713.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.735.900	44.735.900	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	44.735.900	44.735.900	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.735.900	44.735.900	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.140.841.000	1.168.780.000	27.939.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.394.000	7.914.000	(480.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.394.000	7.914.000	(480.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	1.132.447.000	1.160.866.000	28.419.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.132.447.000	1.160.866.000	28.419.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.785.000	24.785.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	23.183.000	23.183.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.183.000	23.183.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2	BELANJA MODAL	1.602.000	1.602.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.602.000	1.602.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.736.500	47.236.500	(2.500.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	49.736.500	47.236.500	(2.500.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.736.500	47.236.500	(2.500.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.753.000	27.753.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	27.528.000	27.528.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.528.000	27.528.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	2		BELANJA MODAL	225.000	225.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000	225.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.894.000	189.742.000	(357.152.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	546.894.000	189.742.000	(357.152.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	546.894.000	189.742.000	(357.152.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	10				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.807.000	58.807.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	10	5	1		BELANJA OPERASI	58.807.000	58.807.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.06	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.807.000	58.807.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.636.000	75.693.000	2.057.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.636.000	75.693.000	2.057.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	73.636.000	75.693.000	2.057.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.636.000	75.693.000	2.057.000	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.550.050	3.267.785.550	(260.764.500)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.132.000	67.132.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	67.132.000	67.132.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.132.000	67.132.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	860.313.050	705.116.550	(155.196.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	860.313.050	705.116.550	(155.196.500)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	860.313.050	705.116.550	(155.196.500)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.601.105.000	2.495.537.000	(105.568.000)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.601.105.000	2.495.537.000	(105.568.000)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.105.000	2.495.537.000	(105.568.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.513.320.700	1.350.968.900	(162.351.800)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.111.000	27.111.000	0		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.111.000	27.111.000	0		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.111.000	27.111.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	833.537.700	697.435.900	(136.101.800)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	833.537.700	697.435.900	(136.101.800)		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	833.537.700	697.435.900	(136.101.800)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	33.850.000	33.850.000	0		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	33.850.000	33.850.000	0		
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000	33.850.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.740.000	187.740.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	187.740.000	187.740.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.740.000	187.740.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.200.000	323.950.000	(26.250.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	350.200.000	323.950.000	(26.250.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.200.000	323.950.000	(26.250.000)	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.442.000	18.442.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	18.442.000	18.442.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.442.000	18.442.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.440.000	62.440.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	62.440.000	62.440.000	0	
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.440.000	62.440.000	0	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.065.600.000	5.107.595.800	41.995.800	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.065.600.000	5.107.595.800	41.995.800	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5.065.600.000	5.107.595.800	41.995.800	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23			Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5.065.600.000	5.107.595.800	41.995.800	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	1	BELANJA OPERASI	4.854.413.000	4.896.408.800	41.995.800	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.692.373.000	4.783.368.800	90.995.800	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	1 05	Belanja Hibah	162.040.000	113.040.000	(49.000.000)	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	2	BELANJA MODAL	211.187.000	211.187.000	0	
2	22	3.32.2.07.2.22.02.0000	08	1.09	23	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.187.000	211.187.000	0	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	00			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	04			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000	03	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	
Jumlah Belanja								55.832.065.351	51.236.111.669	(4.595.953.682)		
Total Surplus/(Defisit)								(54.469.968.351)	(49.825.305.669)	4.644.662.682		
0	00	3.32.2.07.2.22.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
 Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.700.000	41.700.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	41.700.000	41.700.000	0	
Jumlah Pendapatan									41.700.000	41.700.000	0	
0	00	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.941.431.000	10.239.743.465	5.298.312.465	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4.941.431.000	10.239.743.465	5.298.312.465	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	00			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.941.431.000	10.239.743.465	5.298.312.465	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	4.941.431.000	10.239.743.465	5.298.312.465	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	179.378.000	120.619.000	(58.759.000)	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.378.000	120.619.000	(58.759.000)	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	4.762.053.000	10.119.124.465	5.357.071.465	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	2 01	Belanja Modal Tanah	0	6.046.800.760	6.046.800.760	
1	03	4.01.2.10.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.762.053.000	4.072.323.705	(689.729.295)	
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	11	1.01	00			Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	11	1.01	09			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	11	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	
2	10	4.01.2.10.1.03.01.0000	11	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000	353.162.000	(46.838.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.717.265.000	598.721.000	(1.118.544.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	52.950.000	49.518.000	(3.432.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	00			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	52.950.000	49.518.000	(3.432.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	02			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	25.450.000	24.868.000	(582.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	25.450.000	24.868.000	(582.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000	24.868.000	(582.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	04			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	27.500.000	24.650.000	(2.850.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	27.500.000	24.650.000	(2.850.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000	24.650.000	(2.850.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	00				Pelayanan Pencatatan Sipil	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	04				Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.291.577.000	236.161.000	(1.055.416.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	00				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	227.872.000	227.636.000	(236.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.000.000	163.890.000	890.000	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	163.000.000	163.890.000	890.000	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000	163.890.000	890.000	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	05				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15.220.000	14.754.000	(466.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.220.000	14.754.000	(466.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000	14.754.000	(466.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	07				Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.652.000	48.992.000	(660.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	49.652.000	48.992.000	(660.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.652.000	48.992.000	(660.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	00				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	1.063.705.000	8.525.000	(1.055.180.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	8.525.000	(1.475.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	8.525.000	(1.475.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	8.525.000	(1.475.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	02				Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1.053.705.000	0	(1.053.705.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	989.631.000	0	(989.631.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	989.631.000	0	(989.631.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	64.074.000	0	(64.074.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.074.000	0	(64.074.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	180.000.000	173.900.000	(6.100.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	00				Penyediaan Profil Kependudukan	180.000.000	173.900.000	(6.100.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01				Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	120.000.000	115.550.000	(4.450.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	120.000.000	115.550.000	(4.450.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000	115.550.000	(4.450.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.000.000	58.350.000	(1.650.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000	58.350.000	(1.650.000)	
2	12	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	58.350.000	(1.650.000)	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	864.000.000	1.178.408.750	314.408.750	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	864.000.000	1.178.408.750	314.408.750	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.04	00			Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	500.000.000	534.818.250	34.818.250	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.04	03			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	500.000.000	534.818.250	34.818.250	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	500.000.000	534.818.250	34.818.250	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	534.818.250	34.818.250	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.06	00			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0	364.827.500	364.827.500	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.06	03			Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	0	364.827.500	364.827.500	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	364.827.500	364.827.500	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	364.827.500	364.827.500	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	364.000.000	278.763.000	(85.237.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	01			Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	0	53.710.000	53.710.000		
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	53.710.000	53.710.000		
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	53.710.000	53.710.000	
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	18			Pengembangan Kewirausahaan Desa	364.000.000	225.053.000	(138.947.000)		
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	18	5	1	BELANJA OPERASI	364.000.000	225.053.000	(138.947.000)		
2	22	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.09	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	364.000.000	225.053.000	(138.947.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DAERAH	130.864.696.553	119.035.495.977	(11.829.200.576)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.204.999.000	799.739.000	(405.260.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	00			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.204.999.000	799.739.000	(405.260.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	149.035.000	90.029.000	(59.006.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	149.035.000	90.029.000	(59.006.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.035.000	90.029.000	(59.006.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	02			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	57.524.000	29.999.000	(27.525.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	57.524.000	29.999.000	(27.525.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.524.000	29.999.000	(27.525.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	04			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	586.056.000	509.891.000	(76.165.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	586.056.000	509.891.000	(76.165.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	586.056.000	509.891.000	(76.165.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	05			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	412.384.000	169.820.000	(242.564.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	412.384.000	169.820.000	(242.564.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	412.384.000	169.820.000	(242.564.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.090.852.500	1.810.168.500	(280.684.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	00			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	173.594.000	151.444.000	(22.150.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	03			Fasilitasi Penataan Wilayah	173.594.000	151.444.000	(22.150.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	173.594.000	151.444.000	(22.150.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.594.000	151.444.000	(22.150.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	00			Pelaksanaan Otonomi Daerah	809.568.500	560.664.500	(248.904.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	02			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	320.217.000	166.895.000	(153.322.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	320.217.000	166.895.000	(153.322.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	320.217.000	166.895.000	(153.322.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	03			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	489.351.500	393.769.500	(95.582.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	489.351.500	393.769.500	(95.582.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	489.351.500	393.769.500	(95.582.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	00			Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.107.690.000	1.098.060.000	(9.630.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	01			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.107.000.000	1.098.060.000	(8.940.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.107.000.000	1.098.060.000	(8.940.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.000.000	1.098.060.000	(8.940.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	02			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	690.000	0	(690.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	690.000	0	(690.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	690.000	0	(690.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.907.228.000	21.108.506.500	(6.798.721.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.01	00			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	22.970.511.000	17.098.466.000	(5.872.045.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.01	02			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	22.970.511.000	17.098.466.000	(5.872.045.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	22.970.511.000	17.098.466.000	(5.872.045.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.520.511.000	3.648.466.000	(5.872.045.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	13.450.000.000	13.450.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	00			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.564.527.500	3.869.275.000	(695.252.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	01			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	148.522.500	88.478.000	(60.044.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	148.522.500	88.478.000	(60.044.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.522.500	88.478.000	(60.044.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	473.814.000	349.710.000	(124.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	468.698.000	344.594.000	(124.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	468.698.000	344.594.000	(124.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	5.116.000	5.116.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.116.000	5.116.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	03			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3.942.191.000	3.431.087.000	(511.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.942.191.000	3.431.087.000	(511.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.807.191.000	1.296.087.000	(511.104.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.02	03	5	1 05	Belanja Hibah	2.135.000.000	2.135.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	00			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	372.189.500	140.765.500	(231.424.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	372.189.500	140.765.500	(231.424.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	372.189.500	140.765.500	(231.424.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	04	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	372.189.500	140.765.500	(231.424.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.885.858.400	3.677.603.400	(208.255.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	00			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.516.867.600	1.322.512.600	(194.355.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	474.645.000	361.740.000	(112.905.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	474.645.000	361.740.000	(112.905.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	474.645.000	361.740.000	(112.905.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	130.806.000	113.076.000	(17.730.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	130.806.000	113.076.000	(17.730.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.806.000	113.076.000	(17.730.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	548.216.600	498.491.600	(49.725.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	548.216.600	498.491.600	(49.725.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	548.216.600	498.491.600	(49.725.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	04			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	363.200.000	349.205.000	(13.995.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	363.200.000	349.205.000	(13.995.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	363.200.000	349.205.000	(13.995.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	00			Fasilitasi Bantuan Hukum	2.368.990.800	2.355.090.800	(13.900.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	01			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	494.225.000	487.625.000	(6.600.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	494.225.000	487.625.000	(6.600.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	494.225.000	487.625.000	(6.600.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	02			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.874.765.800	1.867.465.800	(7.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.874.765.800	1.867.465.800	(7.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	05	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.874.765.800	1.867.465.800	(7.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.216.775.000	3.131.425.000	(85.350.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.790.338.000	1.691.238.000	(99.100.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.546.947.500	1.454.247.500	(92.700.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.546.947.500	1.454.247.500	(92.700.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.546.947.500	1.454.247.500	(92.700.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	243.390.500	236.990.500	(6.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	243.390.500	236.990.500	(6.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	243.390.500	236.990.500	(6.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.02	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.02	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.03	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.03	01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	06	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	536.380.000	346.179.500	(190.200.500)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	00			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	347.840.000	174.254.000	(173.586.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	02			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	329.764.000	168.478.000	(161.286.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	329.764.000	168.478.000	(161.286.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	329.764.000	168.478.000	(161.286.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	03				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	18.076.000	5.776.000	(12.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.076.000	5.776.000	(12.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.076.000	5.776.000	(12.300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	00			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	93.862.000	92.662.000	(1.200.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	01				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	8.862.000	7.662.000	(1.200.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.862.000	7.662.000	(1.200.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.862.000	7.662.000	(1.200.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	02				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.000.000	85.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	85.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	85.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	00			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	94.678.000	79.263.500	(15.414.500)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	02			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	59.350.000	59.350.000	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	59.350.000	59.350.000	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.350.000	59.350.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	03			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	35.328.000	19.913.500	(15.414.500)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	35.328.000	19.913.500	(15.414.500)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	07	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.328.000	19.913.500	(15.414.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.299.692.500	1.795.452.500	(504.240.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.01	00			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.187.101.000	781.930.000	(405.171.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.01	03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1.187.101.000	781.930.000	(405.171.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.187.101.000	781.930.000	(405.171.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.101.000	781.930.000	(405.171.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.02	00			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.112.591.500	1.013.522.500	(99.069.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.02	03			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.112.591.500	1.013.522.500	(99.069.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.112.591.500	1.013.522.500	(99.069.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	08	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.591.500	1.013.522.500	(99.069.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	5.811.277.000	8.264.225.400	2.452.948.400	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	00		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan	4.861.277.000	7.504.731.400	2.643.454.400	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	01		Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.100.000.000	540.499.000	(559.501.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000	540.499.000	(559.501.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000	540.499.000	(559.501.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	09		Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000	102.250.000	(397.750.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	09	5 1	BELANJA OPERASI	500.000.000	102.250.000	(397.750.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	102.250.000	(397.750.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	10		Pelaksanaan Kelembagaan Asli	750.000.000	4.692.406.000	3.942.406.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	10	5 1	BELANJA OPERASI	750.000.000	4.671.406.000	3.921.406.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000	4.671.406.000	3.921.406.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	10	5 2	BELANJA MODAL	0	21.000.000	21.000.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.000.000	21.000.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	11		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1.000.000.000	760.133.400	(239.866.600)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	11	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000	760.133.400	(239.866.600)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000	760.133.400	(239.866.600)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	12			Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	540.277.000	465.767.000	(74.510.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	540.277.000	465.767.000	(74.510.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	540.277.000	465.767.000	(74.510.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	13			Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	971.000.000	943.676.000	(27.324.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	971.000.000	943.676.000	(27.324.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	971.000.000	943.676.000	(27.324.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.02	00			Peningkatan Budaya Pemerintahan	950.000.000	336.789.000	(613.211.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.02	01			Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	950.000.000	336.789.000	(613.211.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	950.000.000	336.789.000	(613.211.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000	336.789.000	(613.211.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	00			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	422.705.000	422.705.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	422.705.000	422.705.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	165.815.000	165.815.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	165.815.000	165.815.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	2	BELANJA MODAL	0	256.890.000	256.890.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	256.890.000	256.890.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.911.634.153	78.102.196.177	(5.809.437.976)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.191.250	496.546.750	185.355.500		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.274.750	197.614.750	(20.660.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	218.274.750	197.614.750	(20.660.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.274.750	197.614.750	(20.660.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.553.000	209.806.000	207.253.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.553.000	209.806.000	207.253.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.553.000	209.806.000	207.253.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.922.000	677.000	(1.245.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.922.000	677.000	(1.245.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.000	677.000	(1.245.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.292.000	2.507.000	(1.785.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.292.000	2.507.000	(1.785.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.000	2.507.000	(1.785.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.585.500	4.908.000	(1.677.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.585.500	4.908.000	(1.677.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.585.500	4.908.000	(1.677.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	21.905.000	13.505.000		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.400.000	21.905.000	13.505.000		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000	21.905.000	13.505.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.164.000	59.129.000	(10.035.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	69.164.000	59.129.000	(10.035.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.164.000	59.129.000	(10.035.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.075.508.110	53.948.661.736	(2.126.846.374)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.721.000.860	53.603.049.486	(2.117.951.374)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	55.721.000.860	53.603.049.486	(2.117.951.374)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	55.721.000.860	53.603.049.486	(2.117.951.374)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.401.250	269.401.250	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	269.401.250	269.401.250	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	168.240.000	168.240.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.161.250	101.161.250	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.978.000	11.093.000	(885.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	11.978.000	11.093.000	(885.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.978.000	11.093.000	(885.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	64.062.000	56.352.000	(7.710.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	64.062.000	56.352.000	(7.710.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	20.280.000	15.915.000	(4.365.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.782.000	40.437.000	(3.345.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.066.000	8.766.000	(300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	9.066.000	8.766.000	(300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.066.000	8.766.000	(300.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	00				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	960.000	960.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	01				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	192.000	192.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	192.000	192.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.000	192.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	768.000	768.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	768.000	768.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	768.000	768.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	576.398.000	576.398.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	409.846.000	409.846.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	409.846.000	409.846.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	409.846.000	409.846.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	166.552.000	166.552.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	166.552.000	166.552.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.05	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	166.552.000	166.552.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.018.012.100	5.001.638.100	(4.016.374.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.135.600	57.079.600	(56.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	57.135.600	57.079.600	(56.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.135.600	57.079.600	(56.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.637.000	267.749.000	3.112.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	235.167.000	238.279.000	3.112.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	235.167.000	238.279.000	3.112.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	29.470.000	29.470.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.470.000	29.470.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.859.000	51.879.000	7.020.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	44.859.000	51.879.000	7.020.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.859.000	51.879.000	7.020.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	511.669.000	511.669.000	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	511.669.000	511.669.000	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	511.669.000	511.669.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.410.000	68.630.000	(780.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	65.760.000	64.980.000	(780.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.760.000	64.980.000	(780.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	2	BELANJA MODAL	3.650.000	3.650.000	0		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.650.000	3.650.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.818.480.000	1.334.463.000	(484.017.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.818.480.000	1.334.463.000	(484.017.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.818.480.000	1.334.463.000	(484.017.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.010.731.500	2.469.978.500	(3.540.753.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	6.010.731.500	2.469.978.500	(3.540.753.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.731.500	2.469.978.500	(3.540.753.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	154.740.000	153.840.000	(900.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	154.740.000	153.840.000	(900.000)		
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.740.000	153.840.000	(900.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	86.350.000	86.350.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	86.350.000	86.350.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000	86.350.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.454.089.000	2.591.218.798	137.129.798	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.650.000.000	1.650.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	01	5	2	BELANJA MODAL	1.650.000.000	1.650.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.650.000.000	1.650.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	4.000.000	4.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.666.000	281.330.000	34.664.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.320.000	1.320.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000	1.320.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	245.346.000	280.010.000	34.664.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.346.000	280.010.000	34.664.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	302.880.000	381.902.000	79.022.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	1.324.000	1.324.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.000	1.324.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	301.556.000	380.578.000	79.022.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.556.000	290.578.000	79.022.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000	90.000.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.543.000	273.986.798	23.443.798	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	250.543.000	273.986.798	23.443.798	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.543.000	273.986.798	23.443.798	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.226.196.600	5.305.915.600	79.719.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.045.000	152.115.000	89.070.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	63.045.000	152.115.000	89.070.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.045.000	152.115.000	89.070.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.493.600.000	2.493.600.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.493.600.000	2.493.600.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.493.600.000	2.493.600.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.118.500	271.167.500	(3.951.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	146.073.000	142.122.000	(3.951.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.073.000	142.122.000	(3.951.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03	5	2	BELANJA MODAL	129.045.500	129.045.500	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.045.500	129.045.500	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.394.433.100	2.389.033.100	(5.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.394.433.100	2.389.033.100	(5.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	208.140.000	202.740.000	(5.400.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.186.293.100	2.186.293.100	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.055.682.300	4.005.115.400	(50.566.900)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	682.204.400	661.483.900	(20.720.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	682.204.400	661.483.900	(20.720.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	682.204.400	661.483.900	(20.720.500)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.306.645.200	1.277.105.200	(29.540.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.306.645.200	1.277.105.200	(29.540.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.645.200	1.277.105.200	(29.540.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	13.050.000	13.050.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	13.050.000	13.050.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000	13.050.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.270.000	130.670.000	(8.600.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	139.270.000	130.670.000	(8.600.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.270.000	130.670.000	(8.600.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	67.365.000	56.505.000	(10.860.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	07	5	1	BELANJA OPERASI	67.365.000	56.505.000	(10.860.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.365.000	56.505.000	(10.860.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.324.462.000	1.324.462.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.039.518.000	1.039.518.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.518.000	1.039.518.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	284.944.000	284.944.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284.944.000	284.944.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.735.000	234.498.600	9.763.600	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	224.735.000	234.498.600	9.763.600	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	224.735.000	234.498.600	9.763.600	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.950.700	307.340.700	9.390.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	297.950.700	307.340.700	9.390.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	297.950.700	307.340.700	9.390.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	00		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.017.020.793	3.003.020.793	(14.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	243.020.793	243.020.793	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	01	5 1	BELANJA OPERASI	243.020.793	243.020.793	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	01	5 1 01	Belanja Pegawai	243.020.793	243.020.793	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.774.000.000	2.760.000.000	(14.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	04	5 1	BELANJA OPERASI	2.774.000.000	2.760.000.000	(14.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.11	04	5 1 01	Belanja Pegawai	2.774.000.000	2.760.000.000	(14.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	00		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	464.027.000	441.452.000	(22.575.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	247.605.000	225.030.000	(22.575.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	01	5 1	BELANJA OPERASI	247.605.000	225.030.000	(22.575.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	247.605.000	225.030.000	(22.575.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	191.910.000	191.910.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	02	5 1	BELANJA OPERASI	191.910.000	191.910.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.910.000	191.910.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	24.512.000	24.512.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	03	5 1	BELANJA OPERASI	24.512.000	24.512.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.12	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.512.000	24.512.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	00					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.117.287.000	1.221.590.000	104.303.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	02					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	291.770.000	241.155.000	(50.615.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	02	5	1			BELANJA OPERASI	291.770.000	241.155.000	(50.615.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	291.770.000	241.155.000	(50.615.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	825.517.000	980.435.000	154.918.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03	5	1			BELANJA OPERASI	824.017.000	978.935.000	154.918.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	824.017.000	978.935.000	154.918.000	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03	5	2			BELANJA MODAL	1.500.000	1.500.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	0	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	00					Fasilitasi Keprotokolan	2.171.660.000	1.509.679.000	(661.981.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	01					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.764.560.000	1.210.579.000	(553.981.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.764.560.000	1.210.579.000	(553.981.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.764.560.000	1.210.579.000	(553.981.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	03					Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	407.100.000	299.100.000	(108.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	03	5	1			BELANJA OPERASI	407.100.000	299.100.000	(108.000.000)	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	407.100.000	299.100.000	(108.000.000)	
Jumlah Belanja											138.787.392.553	131.405.531.192	(7.381.861.361)	
Total Surplus/(Defisit)											(138.745.692.553)	(131.363.831.192)	7.381.861.361	
0	00	4.01.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.2.10.1.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		SEKRETARIAT DPRD	128.254.248.797	113.530.437.821	(14.723.810.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.954.606.000	50.180.469.000	(12.774.137.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15.074.563.000	13.632.230.000	(1.442.333.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.255.314.000	2.514.652.000	(740.662.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.255.314.000	2.514.652.000	(740.662.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.255.314.000	2.514.652.000	(740.662.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02		Pembahasan Rancangan Perda	7.294.035.000	7.080.019.000	(214.016.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	7.294.035.000	7.080.019.000	(214.016.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.294.035.000	7.080.019.000	(214.016.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	852.388.000	821.063.000	(31.325.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	852.388.000	821.063.000	(31.325.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	852.388.000	821.063.000	(31.325.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3.672.826.000	3.216.496.000	(456.330.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	3.672.826.000	3.216.496.000	(456.330.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.672.826.000	3.216.496.000	(456.330.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00		Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.321.771.000	2.180.098.000	(1.141.673.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	511.752.000	333.668.000	(178.084.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	511.752.000	333.668.000	(178.084.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	511.752.000	333.668.000	(178.084.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.444.000	121.444.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	121.444.000	121.444.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.444.000	121.444.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03		Pembahasan APBD	766.736.000	458.367.000	(308.369.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	766.736.000	458.367.000	(308.369.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	766.736.000	458.367.000	(308.369.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04		Pembahasan Perubahan APBD	525.654.000	343.260.000	(182.394.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	525.654.000	343.260.000	(182.394.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	525.654.000	343.260.000	(182.394.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	05		Pembahasan Laporan Semester	744.429.000	521.407.000	(223.022.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	744.429.000	521.407.000	(223.022.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	744.429.000	521.407.000	(223.022.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	651.756.000	401.952.000	(249.804.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5 1	BELANJA OPERASI	651.756.000	401.952.000	(249.804.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	651.756.000	401.952.000	(249.804.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.099.112.000	3.108.948.000	9.836.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	751.612.000	716.018.000	(35.594.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	751.612.000	716.018.000	(35.594.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	751.612.000	716.018.000	(35.594.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	782.500.000	780.350.000	(2.150.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	782.500.000	780.350.000	(2.150.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.500.000	780.350.000	(2.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	782.500.000	928.948.000	146.448.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	782.500.000	928.948.000	146.448.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.500.000	928.948.000	146.448.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	782.500.000	683.632.000	(98.868.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	782.500.000	683.632.000	(98.868.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.500.000	683.632.000	(98.868.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00			Peningkatan Kapasitas DPRD	15.780.609.000	17.542.710.000	1.762.101.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02			Bimbingan Teknis DPRD	2.654.156.000	3.562.108.000	907.952.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.654.156.000	3.562.108.000	907.952.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.654.156.000	3.562.108.000	907.952.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.224.363.000	5.968.643.000	1.744.280.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.224.363.000	5.968.643.000	1.744.280.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.224.363.000	5.968.643.000	1.744.280.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.446.300.000	1.374.300.000	(72.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.446.300.000	1.374.300.000	(72.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.446.300.000	1.374.300.000	(72.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	648.315.000	648.315.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	648.315.000	648.315.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	648.315.000	648.315.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	06				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.805.654.000	4.593.314.000	(212.340.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.805.654.000	4.593.314.000	(212.340.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.805.654.000	4.593.314.000	(212.340.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07				Penyusunan Program Kerja DPRD	2.001.821.000	1.396.030.000	(605.791.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.001.821.000	1.396.030.000	(605.791.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.001.821.000	1.396.030.000	(605.791.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	00				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.896.239.000	4.211.839.000	315.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	244.942.000	244.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	244.942.000	244.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	244.942.000	244.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03				Pelaksanaan Reses	3.651.297.000	3.966.897.000	315.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.651.297.000	3.966.897.000	315.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.651.297.000	3.966.897.000	315.600.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	00		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	591.281.000	457.131.000	(134.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02		Pengawasan Kode Etik DPRD	591.281.000	457.131.000	(134.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	591.281.000	457.131.000	(134.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	591.281.000	457.131.000	(134.150.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	00		Fasilitas Tugas DPRD	21.191.031.000	9.047.513.000	(12.143.518.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.036.774.000	4.926.563.000	(12.110.211.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	17.036.774.000	4.926.563.000	(12.110.211.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.036.774.000	4.926.563.000	(12.110.211.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	29.591.000	29.591.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	29.591.000	29.591.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.591.000	29.591.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	04		Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	4.124.666.000	4.091.359.000	(33.307.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	4.124.666.000	4.091.359.000	(33.307.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.124.666.000	4.091.359.000	(33.307.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.299.642.797	63.349.968.821	(1.949.673.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.325.000	111.640.000	(12.685.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.116.000	65.116.000	(3.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	68.116.000	65.116.000	(3.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.116.000	65.116.000	(3.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.209.000	46.524.000	(9.685.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	56.209.000	46.524.000	(9.685.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.209.000	46.524.000	(9.685.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.123.389.157	9.476.532.181	(646.856.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.984.299.407	9.337.442.431	(646.856.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.984.299.407	9.337.442.431	(646.856.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.984.299.407	9.337.442.431	(646.856.976)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000	79.320.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	79.320.000	79.320.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	79.320.000	79.320.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.400.000	25.400.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.400.000	25.400.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000	25.400.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	34.369.750	34.369.750	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	34.369.750	34.369.750	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.369.750	34.369.750	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.002.424.000	3.123.040.000	120.616.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.619.000	42.469.000	24.850.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	17.619.000	42.469.000	24.850.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.619.000	42.469.000	24.850.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.052.000	488.512.000	181.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	296.552.000	478.012.000	181.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	296.552.000	478.012.000	181.460.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 2	BELANJA MODAL	10.500.000	10.500.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000	10.500.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	498.486.000	498.486.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	498.486.000	498.486.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	498.486.000	498.486.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.179.267.000	2.093.573.000	(85.694.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	2.179.267.000	2.093.573.000	(85.694.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.179.267.000	2.093.573.000	(85.694.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.538.788.000	266.210.000	(1.272.578.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.788.000	266.210.000	227.422.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	500.000	500.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	500.000	500.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	38.788.000	265.710.000	226.922.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.788.000	265.710.000	226.922.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.814.000	961.400.000	(102.414.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.063.814.000	961.400.000	(102.414.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.063.814.000	961.400.000	(102.414.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.063.814.000	961.400.000	(102.414.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.398.798.200	4.454.302.200	55.504.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.355.600	351.773.600	(4.582.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	356.355.600	351.773.600	(4.582.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	356.355.600	351.773.600	(4.582.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	967.932.600	876.802.600	(91.130.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	967.932.600	876.802.600	(91.130.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	967.932.600	876.802.600	(91.130.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.734.000	290.950.000	(38.784.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	290.950.000	290.950.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	290.950.000	290.950.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	BELANJA MODAL	38.784.000	0	(38.784.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.784.000	0	(38.784.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.744.776.000	2.934.776.000	190.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.744.776.000	2.934.776.000	190.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.744.776.000	2.934.776.000	190.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	00			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.827.023.440	41.769.023.440	(58.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.895.548.440	40.895.548.440	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.895.548.440	40.895.548.440	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1 01	Belanja Pegawai	40.895.548.440	40.895.548.440	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	688.475.000	630.475.000	(58.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1	BELANJA OPERASI	688.475.000	630.475.000	(58.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	688.475.000	630.475.000	(58.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	243.000.000	243.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1			BELANJA OPERASI	243.000.000	243.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	243.000.000	243.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	00					Layanan Adminstrasi DPRD	3.221.081.000	3.187.821.000	(33.260.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02					Fasilitasi Fraksi DPRD	1.666.942.000	1.666.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.666.942.000	1.666.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.666.942.000	1.666.942.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.554.139.000	1.520.879.000	(33.260.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.554.139.000	1.520.879.000	(33.260.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.554.139.000	1.520.879.000	(33.260.000)	
Jumlah Belanja											128.254.248.797	113.530.437.821	(14.723.810.976)	
Total Surplus/(Defisit)											(128.254.248.797)	(113.530.437.821)	14.723.810.976	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	5.01.2.20.5.05.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.397.396.997	2.154.843.591	(242.553.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.949.734.997	1.712.461.591	(237.273.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.737.997	1.390.389.591	(188.348.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.555.512.997	1.371.364.591	(184.148.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.555.512.997	1.371.364.591	(184.148.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	1.555.512.997	1.371.364.591	(184.148.406)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.225.000	19.025.000	(4.200.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	23.225.000	19.025.000	(4.200.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5 1 01	Belanja Pegawai	23.100.000	18.900.000	(4.200.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.000	125.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.287.000	168.162.000	(50.125.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.400.000	96.936.000	(16.464.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	279.000	279.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.000	279.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	113.121.000	96.657.000	(16.464.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.121.000	96.657.000	(16.464.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.887.000	71.226.000	(33.661.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	104.887.000	71.226.000	(33.661.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.887.000	71.226.000	(33.661.000)	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.280.000	96.480.000	1.200.000	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.280.000	96.480.000	1.200.000	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	95.280.000	96.480.000	1.200.000	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.280.000	96.480.000	1.200.000	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.430.000	57.430.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.155.000	22.155.000	0		
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	22.155.000	22.155.000	0		
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.155.000	22.155.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.275.000	15.275.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.275.000	15.275.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.275.000	15.275.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
2	20	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	00	0.00	00				PERENCANAAN	21.506.653.573	20.019.741.309	(1.486.912.264)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.404.240.350	3.813.840.500	(590.399.850)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	00				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.387.235.000	2.076.820.000	(310.415.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	04				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	133.606.000	121.156.000	(12.450.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	133.606.000	121.156.000	(12.450.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.606.000	121.156.000	(12.450.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	06		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.253.629.000	1.955.664.000	(297.965.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.253.629.000	1.955.664.000	(297.965.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.253.629.000	1.955.664.000	(297.965.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	00		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.017.005.350	1.737.020.500	(279.984.850)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	73.390.000	44.672.000	(28.718.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	73.390.000	44.672.000	(28.718.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.390.000	44.672.000	(28.718.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.857.265.350	1.615.823.500	(241.441.850)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	1.857.265.350	1.615.823.500	(241.441.850)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.265.350	1.615.823.500	(241.441.850)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	04		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	86.350.000	76.525.000	(9.825.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	04	5 1	BELANJA OPERASI	86.350.000	76.525.000	(9.825.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.03	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000	76.525.000	(9.825.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	1.277.998.950	1.155.571.700	(122.427.250)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	00			794.103.950	756.572.700	(37.531.250)		
								Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	01			184.564.500	184.564.500	0		
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	01	5	1	184.564.500	184.564.500	0		
								BELANJA OPERASI				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	01	5	1	184.564.500	184.564.500	0		
								Belanja Barang dan Jasa				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	03			65.613.500	52.262.250	(13.351.250)		
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	03	5	1	65.613.500	52.262.250	(13.351.250)		
								BELANJA OPERASI				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	03	5	1	65.613.500	52.262.250	(13.351.250)		
								Belanja Barang dan Jasa				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	05			158.535.000	143.385.000	(15.150.000)		
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	05	5	1	158.535.000	143.385.000	(15.150.000)		
								BELANJA OPERASI				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	05	5	1	158.535.000	143.385.000	(15.150.000)		
								Belanja Barang dan Jasa				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	07			385.390.950	376.360.950	(9.030.000)		
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang				

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Pembangunan Manusia				
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	385.390.950	376.360.950	(9.030.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	385.390.950	376.360.950	(9.030.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	345.575.000	290.987.000	(54.588.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.984.000	242.572.000	(37.412.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	279.984.000	242.572.000	(37.412.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.984.000	242.572.000	(37.412.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	65.591.000	48.415.000	(17.176.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	65.591.000	48.415.000	(17.176.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.591.000	48.415.000	(17.176.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	138.320.000	108.012.000	(30.308.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.607.000	42.663.000	(8.944.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	51.607.000	42.663.000	(8.944.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.607.000	42.663.000	(8.944.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.193.000	14.169.000	(6.024.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.193.000	14.169.000	(6.024.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.193.000	14.169.000	(6.024.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.327.000	42.587.000	(11.740.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	54.327.000	42.587.000	(11.740.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.327.000	42.587.000	(11.740.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.193.000	8.593.000	(3.600.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	12.193.000	8.593.000	(3.600.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	03	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.193.000	8.593.000	(3.600.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.824.414.273	15.050.329.109	(774.085.164)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.777.000	147.984.500	(81.792.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.380.000	123.587.500	(81.792.500)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	205.380.000	123.587.500	(81.792.500)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.380.000	123.587.500	(81.792.500)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.365.000	12.365.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	12.365.000	12.365.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.365.000	12.365.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.032.000	12.032.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	12.032.000	12.032.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.032.000	12.032.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.649.048.573	13.494.839.259	(154.209.314)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.574.758.573	13.422.844.259	(151.914.314)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.574.758.573	13.422.844.259	(151.914.314)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.574.758.573	13.422.844.259	(151.914.314)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.990.000	44.695.000	(2.295.000)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	46.990.000	44.695.000	(2.295.000)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	46.740.000	44.445.000	(2.295.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	27.300.000	27.300.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	27.300.000	27.300.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000	27.300.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.045.810.250	556.327.250	(489.483.000)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.340.000	201.340.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	201.340.000	201.340.000	0		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.340.000	201.340.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.470.250	354.987.250	(489.483.000)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	844.470.250	354.987.250	(489.483.000)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	844.470.250	354.987.250	(489.483.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.984.450	491.294.100	(42.690.350)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.984.450	491.294.100	(42.690.350)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	533.984.450	491.294.100	(42.690.350)		
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	533.984.450	491.294.100	(42.690.350)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.794.000	359.884.000	(5.910.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.711.000	154.735.000	(55.976.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	210.711.000	154.735.000	(55.976.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.711.000	154.735.000	(55.976.000)	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.195.000	85.195.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	85.195.000	85.195.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.195.000	85.195.000	0	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.888.000	119.954.000	50.066.000	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	69.888.000	119.954.000	50.066.000	
5	01	5.01.2.20.5.05.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.888.000	119.954.000	50.066.000	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	00	0.00	00			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	422.621.770	328.509.770	(94.112.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	422.621.770	328.509.770	(94.112.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	00			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.900.000	103.900.000	0	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	13			Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	103.900.000	103.900.000	0	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	103.900.000	103.900.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.2.20.5.05.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	103.900.000	103.900.000	0	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	00					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	97.049.000	88.649.000	(8.400.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	47.819.000	43.619.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	47.819.000	43.619.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.819.000	43.619.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	05					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	49.230.000	45.030.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	49.230.000	45.030.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	49.230.000	45.030.000	(4.200.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.04	00					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.04	04					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)	
5	05	5.01.2.20.5.05.01.0000	02	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)	
Jumlah Belanja											24.326.672.340	22.503.094.670	(1.823.577.670)	
Total Surplus/(Defisit)											(24.326.672.340)	(22.503.094.670)	1.823.577.670	
0	00	5.01.2.20.5.05.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.777.052.098.785	1.770.409.354.831	(6.642.743.954)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1 01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548	1.647.560.774.548	(25.169.310.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	893.454.475	805.090.775	(88.363.700)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.558.389.843	93.923.341.444	7.364.951.601	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	16.870.169.919	28.120.148.064	11.249.978.145	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	2	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190	3.805.740.337.243	(64.614.929.947)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000	3.804.935.291.933	(64.639.956.067)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190	805.045.310	25.026.120	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.576.500.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	4	3 01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000	7.576.500.000	0	
Jumlah Pendapatan								5.654.983.865.975	5.583.726.192.074	(71.257.673.901)		
0	00	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00			KEUANGAN	1.523.963.112.061	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.318.412.765.950	1.345.334.212.445	26.921.446.495	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	00			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.761.257.750	3.686.576.750	(74.681.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	313.163.000	332.045.000	18.882.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	313.163.000	332.045.000	18.882.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	313.163.000	332.045.000	18.882.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	305.935.000	341.185.000	35.250.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	305.935.000	341.185.000	35.250.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	305.935.000	341.185.000	35.250.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	74.659.000	65.983.000	(8.676.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	74.659.000	65.983.000	(8.676.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.659.000	65.983.000	(8.676.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	641.754.000	669.837.000	28.083.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	641.754.000	669.837.000	28.083.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	641.754.000	669.837.000	28.083.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	914.355.000	874.905.000	(39.450.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	914.355.000	874.905.000	(39.450.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	914.355.000	874.905.000	(39.450.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.381.018.750	1.282.338.750	(98.680.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.381.018.750	1.282.338.750	(98.680.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.381.018.750	1.282.338.750	(98.680.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	130.373.000	120.283.000	(10.090.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	130.373.000	120.283.000	(10.090.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.373.000	120.283.000	(10.090.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	00			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	404.442.000	366.792.000	(37.650.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	02			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	126.916.000	116.341.000	(10.575.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	126.916.000	116.341.000	(10.575.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.916.000	116.341.000	(10.575.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	126.893.000	117.818.000	(9.075.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	126.893.000	117.818.000	(9.075.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.893.000	117.818.000	(9.075.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	04			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.761.000	125.761.000	(18.000.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	143.761.000	125.761.000	(18.000.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.761.000	125.761.000	(18.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	12				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	6.872.000	6.872.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	6.872.000	6.872.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.872.000	6.872.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	00				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	321.140.000	306.510.000	(14.630.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.250.000	112.750.000	(4.500.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	117.250.000	112.750.000	(4.500.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.250.000	112.750.000	(4.500.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	203.890.000	193.760.000	(10.130.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	09	5	1	BELANJA OPERASI	203.890.000	193.760.000	(10.130.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.03	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.890.000	193.760.000	(10.130.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	00			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	962.421.182	864.892.932	(97.528.250)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	114.620.000	114.620.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	114.620.000	114.620.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.620.000	114.620.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14.752.000	14.752.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	14.752.000	14.752.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.752.000	14.752.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	557.944.000	527.965.250	(29.978.750)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	557.944.000	527.965.250	(29.978.750)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	557.944.000	527.965.250	(29.978.750)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	06			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.411.000	6.411.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.411.000	6.411.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.411.000	6.411.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	10			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	147.076.182	134.702.682	(12.373.500)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	10	5	1	BELANJA OPERASI	143.564.182	131.190.682	(12.373.500)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.564.182	131.190.682	(12.373.500)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	10	5	2	BELANJA MODAL	3.512.000	3.512.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.512.000	3.512.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	121.618.000	66.442.000	(55.176.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	11	5	1	BELANJA OPERASI	121.618.000	66.442.000	(55.176.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.04	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.618.000	66.442.000	(55.176.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	00			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.312.963.505.018	1.340.109.440.763	27.145.935.745	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	08	5	4	BELANJA TRANSFER	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	09			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	09	5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	10			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	10	5	4	BELANJA TRANSFER	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	02	1.05	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.716.934.000	1.762.672.000	45.738.000		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	00			Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.716.934.000	1.762.672.000	45.738.000		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	03			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	285.114.000	335.114.000	50.000.000		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	235.114.000	285.114.000	50.000.000		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.114.000	285.114.000	50.000.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	03	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	08			Penilaian Barang Milik Daerah	800.000.000	827.500.000	27.500.000		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	21.150.000	21.150.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000	21.150.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	08	5	2	BELANJA MODAL	778.850.000	806.350.000	27.500.000		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	08	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	778.850.000	806.350.000	27.500.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	408.190.000	476.428.000	68.238.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	408.190.000	476.428.000	68.238.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	408.190.000	476.428.000	68.238.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	223.630.000	123.630.000	(100.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	123.630.000	23.630.000	(100.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.630.000	23.630.000	(100.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	11	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	100.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	03	1.01	11	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.250.038.000	10.725.033.000	(525.005.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	00				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.250.038.000	10.725.033.000	(525.005.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	01				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.209.283.000	1.151.016.000	(58.267.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.011.283.000	953.016.000	(58.267.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.283.000	953.016.000	(58.267.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	198.000.000	198.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.000.000	198.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	02				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	97.690.000	123.190.000	25.500.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Pajak Daerah.				
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	97.690.000	123.190.000	25.500.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.690.000	123.190.000	25.500.000	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.020.783.000	944.319.000	(76.464.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.020.783.000	944.319.000	(76.464.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.783.000	944.319.000	(76.464.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.205.966.250	2.078.536.250	(127.430.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.170.495.250	2.043.065.250	(127.430.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.170.495.250	2.043.065.250	(127.430.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	05	5	2	BELANJA MODAL	35.471.000	35.471.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.471.000	35.471.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6.337.615.750	6.143.071.750	(194.544.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	6.240.675.750	6.070.918.750	(169.757.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.675.750	6.070.918.750	(169.757.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	08	5	2	BELANJA MODAL	96.940.000	72.153.000	(24.787.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	08	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.940.000	72.153.000	(24.787.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	378.700.000	284.900.000	(93.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	378.700.000	284.900.000	(93.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	04	1.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.700.000	284.900.000	(93.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.583.374.111	154.420.179.648	(38.163.194.463)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.173.000	102.843.000	(15.330.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.406.000	40.076.000	(6.330.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	46.406.000	40.076.000	(6.330.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.406.000	40.076.000	(6.330.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.758.000	18.358.000	(2.400.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	20.758.000	18.358.000	(2.400.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.758.000	18.358.000	(2.400.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.747.000	19.947.000	(1.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	21.747.000	19.947.000	(1.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.747.000	19.947.000	(1.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.262.000	24.462.000	(4.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	29.262.000	24.462.000	(4.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.262.000	24.462.000	(4.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.887.853.183	136.678.880.770	(33.208.972.413)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	169.472.863.183	136.280.690.770	(33.192.172.413)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	169.472.863.183	136.280.690.770	(33.192.172.413)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	169.472.863.183	136.280.690.770	(33.192.172.413)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.620.000	320.820.000	(16.800.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	337.620.000	320.820.000	(16.800.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	337.620.000	320.820.000	(16.800.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.490.000	53.490.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	53.490.000	53.490.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.490.000	53.490.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.477.000	14.477.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	14.477.000	14.477.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.477.000	14.477.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.780.000	6.780.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	6.780.000	6.780.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000	6.780.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.623.000	2.623.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	2.623.000	2.623.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.623.000	2.623.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	00			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.457.462.500	3.089.242.500	(1.368.220.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.342.462.500	2.974.242.500	(1.368.220.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.142.462.500	2.974.242.500	(1.168.220.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.142.462.500	2.974.242.500	(1.168.220.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	02	5	2	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.000.000	115.000.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	115.000.000	115.000.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	115.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.875.022.700	1.284.594.700	(590.428.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.814.450	99.814.450	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	97.414.450	97.414.450	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.414.450	97.414.450	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2	BELANJA MODAL	2.400.000	2.400.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000	2.400.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.605.000	46.605.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	46.605.000	46.605.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.605.000	46.605.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	247.868.000	247.868.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	247.868.000	247.868.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	247.868.000	247.868.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.565.000	32.365.000	(1.200.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	29.565.000	28.365.000	(1.200.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.565.000	28.365.000	(1.200.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	2	BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	398.154.250	389.254.250	(8.900.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	398.154.250	389.254.250	(8.900.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	398.154.250	389.254.250	(8.900.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.068.000	47.068.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	46.493.000	46.493.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.493.000	46.493.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	06	5	2	BELANJA MODAL	575.000	575.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	06	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	575.000	575.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000	39.960.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	39.960.000	39.960.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000	39.960.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	941.058.000	360.730.000	(580.328.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	941.058.000	360.730.000	(580.328.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	941.058.000	360.730.000	(580.328.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.930.000	20.930.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	20.930.000	20.930.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.000	20.930.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.212.114.000	1.366.154.000	(1.845.960.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	86.100.000	86.100.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	86.100.000	86.100.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.100.000	86.100.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	790.952.000	790.952.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.200.000	19.200.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000	19.200.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	771.752.000	771.752.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.752.000	771.752.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.908.747.000	62.787.000	(1.845.960.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.848.747.000	2.787.000	(1.845.960.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.848.747.000	2.787.000	(1.845.960.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	09	5	2	BELANJA MODAL	60.000.000	60.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000	60.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.315.000	426.315.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	21.320.000	21.320.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.320.000	21.320.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	404.995.000	404.995.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.995.000	404.995.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.941.219.800	8.603.480.750	(337.739.050)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	536.410.300	536.410.300	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	535.174.300	535.174.300	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	535.174.300	535.174.300	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	2	BELANJA MODAL	1.236.000	1.236.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.236.000	1.236.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.486.355.100	3.148.616.050	(337.739.050)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.486.355.100	3.148.616.050	(337.739.050)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.355.100	3.148.616.050	(337.739.050)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.100.000	762.100.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	762.100.000	762.100.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	762.100.000	762.100.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.156.354.400	4.156.354.400	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.156.354.400	4.156.354.400	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.156.354.400	4.156.354.400	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.091.528.928	3.294.983.928	(796.545.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.824.300	28.908.300	(2.916.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	31.824.300	28.908.300	(2.916.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.824.300	28.908.300	(2.916.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	753.797.600	686.366.600	(67.431.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	753.797.600	686.366.600	(67.431.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	753.797.600	686.366.600	(67.431.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	14.320.000	14.320.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	14.320.000	14.320.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.320.000	14.320.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	952.720.000	952.720.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	952.720.000	952.720.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	952.720.000	952.720.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.681.953.028	981.953.028	(700.000.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	981.953.028	981.953.028	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	981.953.028	981.953.028	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	700.000.000	0	(700.000.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000	0	(700.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.914.000	630.716.000	(26.198.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	573.314.000	547.116.000	(26.198.000)		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	573.314.000	547.116.000	(26.198.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	10	5	2	BELANJA MODAL	83.600.000	83.600.000	0		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.600.000	83.600.000	0	
Jumlah Belanja									1.523.963.112.061	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)		
Total Surplus/(Defisit)									4.131.020.753.914	4.071.484.094.981	(59.536.658.933)		
0	00	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318		
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	481.302.765.821	484.453.213.139	3.150.447.318	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000	112.500.000.000	0	
5	02	5.02.9.02.0.00.04.0000	00	0.00	00	6	2	04		Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	122.500.000.000	117.500.000.000	(5.000.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
 Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.400.000	610.300.000	361.900.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	248.400.000	610.300.000	361.900.000	
Jumlah Pendapatan									248.400.000	610.300.000	361.900.000	
0	00	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DAERAH	573.840.000	330.076.000	(243.764.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	573.840.000	330.076.000	(243.764.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.02	00			Peningkatan Budaya Pemerintahan	573.840.000	158.976.000	(414.864.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.02	07			Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	573.840.000	158.976.000	(414.864.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	573.840.000	158.976.000	(414.864.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	573.840.000	158.976.000	(414.864.000)	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	00			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	171.100.000	171.100.000	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	171.100.000	171.100.000	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	2	BELANJA MODAL	0	171.100.000	171.100.000	
4	01	5.03.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	171.100.000	171.100.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00			KEPEGAWAIAN	31.062.822.001	30.723.814.479	(339.007.522)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.154.278.750	11.012.325.250	(2.141.953.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	00		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.019.739.000	2.730.597.000	(289.142.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	141.623.000	68.146.000	(73.477.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	141.623.000	68.146.000	(73.477.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.623.000	68.146.000	(73.477.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.683.090.000	1.435.130.000	(247.960.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	1.683.090.000	1.435.130.000	(247.960.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.683.090.000	1.435.130.000	(247.960.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	395.044.000	312.594.000	(82.450.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	395.044.000	312.594.000	(82.450.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	395.044.000	312.594.000	(82.450.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	414.950.000	584.950.000	170.000.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	10	5 1	BELANJA OPERASI	394.000.000	394.000.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000	394.000.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	10	5 2	BELANJA MODAL	20.950.000	190.950.000	170.000.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.950.000	190.950.000	170.000.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	385.032.000	329.777.000	(55.255.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	385.032.000	329.777.000	(55.255.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	385.032.000	329.777.000	(55.255.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	00			Mutasi dan Promosi ASN	1.350.952.000	1.228.225.000	(122.727.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01			Pengelolaan Mutasi ASN	204.904.000	200.279.000	(4.625.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	204.904.000	200.279.000	(4.625.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	204.904.000	200.279.000	(4.625.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	281.092.000	211.910.000	(69.182.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	281.092.000	211.910.000	(69.182.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	281.092.000	211.910.000	(69.182.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	03			Pengelolaan Promosi ASN	864.956.000	816.036.000	(48.920.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	864.956.000	816.036.000	(48.920.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	864.956.000	816.036.000	(48.920.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	00			Pengembangan Kompetensi ASN	7.618.474.750	6.757.065.250	(861.409.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	02			Pengelolaan Assessment Center	1.056.153.000	1.032.604.000	(23.549.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	829.007.000	954.942.000	125.935.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	829.007.000	954.942.000	125.935.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	BELANJA MODAL	227.146.000	77.662.000	(149.484.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.146.000	77.662.000	(149.484.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	03			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	183.943.000	181.813.000	(2.130.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	183.943.000	181.813.000	(2.130.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	183.943.000	181.813.000	(2.130.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.892.955.000	3.511.080.000	(381.875.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.892.955.000	3.511.080.000	(381.875.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.892.955.000	3.511.080.000	(381.875.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	05				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.210.087.750	1.818.062.250	(392.025.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.210.087.750	1.818.062.250	(392.025.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.087.750	1.818.062.250	(392.025.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	10				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	112.036.000	87.706.000	(24.330.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	112.036.000	87.706.000	(24.330.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.036.000	87.706.000	(24.330.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	13				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	163.300.000	125.800.000	(37.500.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	13	5	1		BELANJA OPERASI	163.300.000	125.800.000	(37.500.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.03	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.300.000	125.800.000	(37.500.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	00				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.165.113.000	296.438.000	(868.675.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	261.012.000	149.742.000	(111.270.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	261.012.000	149.742.000	(111.270.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	261.012.000	149.742.000	(111.270.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	734.185.000	0	(734.185.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	734.185.000	0	(734.185.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	734.185.000	0	(734.185.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	05				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	13.872.000	6.622.000	(7.250.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	13.872.000	6.622.000	(7.250.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.872.000	6.622.000	(7.250.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	07				Pembinaan Disiplin ASN	146.965.000	132.795.000	(14.170.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	146.965.000	132.795.000	(14.170.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.965.000	132.795.000	(14.170.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.079.000	7.279.000	(1.800.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	9.079.000	7.279.000	(1.800.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	02	1.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.079.000	7.279.000	(1.800.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.908.543.251	19.711.489.229	1.802.945.978	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.091.000	102.774.000	(53.317.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.093.000	73.906.000	(47.187.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	121.093.000	73.906.000	(47.187.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.093.000	73.906.000	(47.187.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.998.000	28.868.000	(6.130.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	34.998.000	28.868.000	(6.130.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.998.000	28.868.000	(6.130.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.363.443.773	14.663.464.651	3.300.020.878	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.294.488.773	14.585.809.651	3.291.320.878	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	11.294.488.773	14.585.809.651	3.291.320.878	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	11.294.488.773	14.585.809.651	3.291.320.878	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.011.000	57.711.000	8.700.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	49.011.000	57.711.000	8.700.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	44.640.000	53.340.000	8.700.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.371.000	4.371.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000	3.180.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	3.180.000	3.180.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000	3.180.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	16.764.000	16.764.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	16.764.000	16.764.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.764.000	16.764.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.711.591.500	1.703.506.500	(1.008.085.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.429.000	32.429.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	32.429.000	32.429.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.429.000	32.429.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	771.119.500	841.602.000	70.482.500	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.412.500	2.295.000	(117.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.500	2.295.000	(117.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	768.707.000	839.307.000	70.600.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	768.707.000	839.307.000	70.600.000	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.860.000	71.860.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	71.860.000	71.860.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.860.000	71.860.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.275.000	101.275.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	101.275.000	101.275.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.275.000	101.275.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000	2.820.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.820.000	2.820.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000	2.820.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	07				Penyediaan Bahan/Material	91.776.000	91.776.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1		BELANJA OPERASI	91.776.000	91.776.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.776.000	91.776.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.640.312.000	561.744.500	(1.078.567.500)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.640.312.000	561.744.500	(1.078.567.500)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.312.000	561.744.500	(1.078.567.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.872.650	397.860.150	(12.500)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.352.750	41.352.750	0		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	41.352.750	41.352.750	0		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.352.750	41.352.750	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.519.900	356.507.400	(12.500)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	356.519.900	356.507.400	(12.500)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	356.519.900	356.507.400	(12.500)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.279.544.328	2.843.883.928	(435.660.400)		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.908.000	159.908.000	0		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	159.908.000	159.908.000	0		
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.908.000	159.908.000	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	8.924.500	8.924.500	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Lapangan				
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.924.500	8.924.500	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.924.500	8.924.500	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	8.160.000	0	(8.160.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	8.160.000	0	(8.160.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000	0	(8.160.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.769.900	330.769.900	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	330.769.900	330.769.900	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	330.769.900	330.769.900	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.972.932.900	1.545.432.500	(427.500.400)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.872.932.900	1.545.432.500	(327.500.400)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.872.932.900	1.545.432.500	(327.500.400)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	100.000.000	0	(100.000.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	0	(100.000.000)	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	798.849.028	798.849.028	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	798.849.028	798.849.028	0	
5	03	5.03.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	798.849.028	798.849.028	0	
Jumlah Belanja									31.636.662.001	31.053.890.479	(582.771.522)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.4.01.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Total Surplus/(Defisit)	(31.388.262.001)	(30.443.590.479)	944.671.522	
0	00	5.03.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.182.500.000	5.492.208.000	309.708.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	5.182.500.000	5.485.458.000	302.958.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	6.750.000	6.750.000	
Jumlah Pendapatan									5.182.500.000	5.492.208.000	309.708.000	
0	00	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DAERAH	1.594.863.000	1.596.311.220	1.448.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.594.863.000	1.596.311.220	1.448.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	00			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	567.420.220	567.420.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	567.420.220	567.420.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	185.669.000	185.669.000	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	185.669.000	185.669.000	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	2	BELANJA MODAL	0	381.751.220	381.751.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.07	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	381.751.220	381.751.220	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.09	00			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	1.594.863.000	1.028.891.000	(565.972.000)	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.09	01			Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur	1.594.863.000	1.028.891.000	(565.972.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.594.863.000	1.028.891.000	(565.972.000)	
4	01	5.04.4.01.0.00.01.0000	10	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.594.863.000	1.028.891.000	(565.972.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21.885.226.068	20.864.386.414	(1.020.839.654)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.339.748.000	8.003.731.000	(336.017.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	00			Pengembangan Kompetensi Teknis	485.424.000	357.576.000	(127.848.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	145.100.000	145.100.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	145.100.000	145.100.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	145.100.000	145.100.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	340.324.000	212.476.000	(127.848.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	340.324.000	212.476.000	(127.848.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	340.324.000	212.476.000	(127.848.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	00			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	7.854.324.000	7.646.155.000	(208.169.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
								dan Fungsional					
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	553.660.000	539.955.000	(13.705.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	553.660.000	539.955.000	(13.705.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	553.660.000	539.955.000	(13.705.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	04			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	51.912.000	51.912.000	0		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	51.912.000	51.912.000	0		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.912.000	51.912.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	05			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	93.686.000	88.274.000	(5.412.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	93.686.000	88.274.000	(5.412.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.686.000	88.274.000	(5.412.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.155.066.000	6.966.014.000	(189.052.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	7.155.066.000	6.966.014.000	(189.052.000)		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.155.066.000	6.966.014.000	(189.052.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.545.478.068	12.860.655.414	(684.822.654)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.630.000	102.360.000	(17.270.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.630.000	78.705.000	(5.925.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	84.630.000	78.705.000	(5.925.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.630.000	78.705.000	(5.925.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	23.655.000	(11.345.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	23.655.000	(11.345.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	23.655.000	(11.345.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.762.723.118	9.225.236.814	(537.486.304)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.739.723.118	9.204.125.314	(535.597.804)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.739.723.118	9.204.125.314	(535.597.804)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.739.723.118	9.204.125.314	(535.597.804)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.973.600	6.407.000	(566.600)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.973.600	6.407.000	(566.600)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.973.600	6.407.000	(566.600)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	10.843.200	9.936.000	(907.200)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								/Semesteran SKPD				
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	10.843.200	9.936.000	(907.200)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.843.200	9.936.000	(907.200)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.183.200	4.768.500	(414.700)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	5.183.200	4.768.500	(414.700)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.183.200	4.768.500	(414.700)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.105.765.350	763.821.350	(341.944.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.582.400	38.440.400	(142.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	38.582.400	38.440.400	(142.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.582.400	38.440.400	(142.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.466.000	192.406.000	41.940.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	45.090.000	45.090.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.090.000	45.090.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	105.376.000	147.316.000	41.940.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.376.000	147.316.000	41.940.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.906.000	13.906.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	13.906.000	13.906.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.906.000	13.906.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.020.000	31.020.000	0		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	31.020.000	31.020.000	0		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.020.000	31.020.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.790.950	488.048.950	(383.742.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	871.790.950	488.048.950	(383.742.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	871.790.950	488.048.950	(383.742.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.696.459.600	1.581.087.250	(115.372.350)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.280.000	7.100.000	(2.180.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.280.000	7.100.000	(2.180.000)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000	7.100.000	(2.180.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	603.999.600	490.207.250	(113.792.350)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	603.999.600	490.207.250	(113.792.350)		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	603.999.600	490.207.250	(113.792.350)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.180.000	1.083.780.000	600.000		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.083.180.000	1.083.780.000	600.000		
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	62.340.000	62.340.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.840.000	1.021.440.000	600.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Organisasi : 5.04.4.01.0.00.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.900.000	1.188.150.000	327.250.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.990.000	149.990.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	149.990.000	149.990.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	149.990.000	149.990.000	0	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	533.910.000	867.160.000	333.250.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	533.910.000	867.160.000	333.250.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	533.910.000	867.160.000	333.250.000	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.000.000	171.000.000	(6.000.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	177.000.000	171.000.000	(6.000.000)	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	177.000.000	171.000.000	(6.000.000)	
Jumlah Belanja											23.480.089.068	22.460.697.634	(1.019.391.434)	
Total Surplus/(Defisit)											(18.297.589.068)	(16.968.489.634)	1.329.099.434	
0	00	5.04.4.01.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
 Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.020.000	271.020.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	271.020.000	271.020.000	0	
Jumlah Pendapatan									271.020.000	271.020.000	0	
0	00	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.100.000.000	2.246.300.000	146.300.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.100.000.000	2.246.300.000	146.300.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	00			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	200.000.000	440.000.000	240.000.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	200.000.000	440.000.000	240.000.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	200.000.000	440.000.000	240.000.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	440.000.000	240.000.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	00			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.900.000.000	1.806.300.000	(93.700.000)	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13			Gelar Seni Budaya Daerah	1.900.000.000	1.806.300.000	(93.700.000)	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13	5	1	BELANJA OPERASI	1.900.000.000	1.672.928.000	(227.072.000)	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000	1.672.928.000	(227.072.000)	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13	5	2	BELANJA MODAL	0	133.372.000	133.372.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	122.872.000	122.872.000	
2	22	5.06.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	13	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	10.500.000	10.500.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00		PENGELOLAAN PERBATASAN	6.309.487.565	6.187.975.247	(121.512.318)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.309.487.565	6.187.975.247	(121.512.318)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.500.000	13.847.000	(4.653.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.212.000	7.366.000	(846.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	8.212.000	7.366.000	(846.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.212.000	7.366.000	(846.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.236.000	1.236.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	1.236.000	1.236.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000	1.236.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	1.236.000	766.000	(470.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000	766.000	(470.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.344.000	2.947.000	(2.397.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.344.000	2.947.000	(2.397.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.344.000	2.947.000	(2.397.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.888.813.565	4.779.785.747	(109.027.818)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.885.387.565	4.777.628.747	(107.758.818)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.885.387.565	4.777.628.747	(107.758.818)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.885.387.565	4.777.628.747	(107.758.818)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.000	719.000	(423.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.080.000	246.209.000	(101.871.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.698.000	3.698.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.698.000	3.698.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.698.000	3.698.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.021.000	5.021.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.021.000	5.021.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.021.000	5.021.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.305.000	9.305.000	4.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.305.000	9.305.000	4.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000	9.305.000	4.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.256.000	2.256.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.256.000	2.256.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.256.000	2.256.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.800.000	225.929.000	(105.871.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	331.800.000	225.929.000	(105.871.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	331.800.000	225.929.000	(105.871.000)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	25.000.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	25.000.000	25.000.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.739.000	668.114.700	(50.624.300)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	11.000.000	1.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	11.000.000	1.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	11.000.000	1.000.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.605.000	269.277.700	(66.327.300)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	335.605.000	269.277.700	(66.327.300)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	335.605.000	269.277.700	(66.327.300)	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.890.000	20.353.000	14.463.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	5.890.000	20.353.000	14.463.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000	20.353.000	14.463.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.244.000	367.484.000	240.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	367.244.000	367.484.000	240.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1 01	Belanja Pegawai	49.680.000	49.680.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	317.564.000	317.804.000	240.000	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.355.000	455.018.800	144.663.800	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.816.000	103.816.000	0		
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	103.816.000	103.816.000	0		
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.816.000	103.816.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.419.000	343.082.800	144.663.800	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	198.419.000	343.082.800	144.663.800	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.419.000	343.082.800	144.663.800	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.120.000	8.120.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	8.120.000	8.120.000	0	
5	06	5.06.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000	8.120.000	0	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	1.113.905.000	401.080.000	(712.825.000)	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.113.905.000	401.080.000	(712.825.000)	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	00				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.113.905.000	401.080.000	(712.825.000)	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	119.471.000	139.786.000	20.315.000	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	119.471.000	139.786.000	20.315.000	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.471.000	139.786.000	20.315.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
 Organisasi : 5.06.9.02.2.22.01 BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02			Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	142.550.000	57.160.000	(85.390.000)		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	142.550.000	57.160.000	(85.390.000)		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.550.000	57.160.000	(85.390.000)	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17.800.000	17.800.000	0		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	17.800.000	17.800.000	0		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000	17.800.000	0	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04			Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	805.334.000	157.584.000	(647.750.000)		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	805.334.000	157.584.000	(647.750.000)		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	805.334.000	157.584.000	(647.750.000)	
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	28.750.000	28.750.000	0		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	28.750.000	28.750.000	0		
5	07	5.06.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000	28.750.000	0	
Jumlah Belanja									9.523.392.565	8.835.355.247	(688.037.318)		
Total Surplus/(Defisit)									(9.252.372.565)	(8.564.335.247)	688.037.318		
0	00	5.06.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					INSPEKTORAT DAERAH	41.005.822.464	39.734.364.969	(1.271.457.495)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.957.169.500	5.450.729.000	(506.440.500)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.202.941.500	4.457.161.500	(745.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	636.223.000	427.623.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	636.223.000	427.623.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	636.223.000	427.623.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.905.277.500	2.576.697.500	(328.580.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.905.277.500	2.576.697.500	(328.580.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.905.277.500	2.576.697.500	(328.580.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Reviu Laporan Kinerja	853.771.000	645.171.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	853.771.000	645.171.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	853.771.000	645.171.000	(208.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Reviu Laporan Keuangan	427.404.000	427.404.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	427.404.000	427.404.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	427.404.000	427.404.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	359.193.000	359.193.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	359.193.000	359.193.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	359.193.000	359.193.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06				Kerjasama Pengawasan Internal	5.827.000	5.827.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.827.000	5.827.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.827.000	5.827.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.246.000	15.246.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	15.246.000	15.246.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.246.000	15.246.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	754.228.000	993.567.500	239.339.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.954.000	34.954.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.954.000	34.954.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.954.000	34.954.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	719.274.000	958.613.500	239.339.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	719.274.000	958.613.500	239.339.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	719.274.000	958.613.500	239.339.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	494.363.000	267.189.000	(227.174.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	115.576.000	57.044.000	(58.532.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.386.000	6.180.000	(34.206.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.386.000	6.180.000	(34.206.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.386.000	6.180.000	(34.206.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	75.190.000	50.864.000	(24.326.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	75.190.000	50.864.000	(24.326.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.190.000	50.864.000	(24.326.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00			Pendampingan dan Asistensi	378.787.000	210.145.000	(168.642.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.657.000	6.657.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.657.000	6.657.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.657.000	6.657.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26.866.000	11.210.000	(15.656.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	26.866.000	11.210.000	(15.656.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.866.000	11.210.000	(15.656.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	192.278.000	192.278.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	192.278.000	192.278.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.278.000	192.278.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	152.986.000	0	(152.986.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	152.986.000	0	(152.986.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.986.000	0	(152.986.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.554.289.964	34.016.446.969	(537.842.995)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.894.000	17.894.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.328.000	4.328.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.328.000	4.328.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.328.000	4.328.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.086.000	1.086.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.086.000	1.086.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.000	1.086.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.111.000	1.111.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.111.000	1.111.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.000	1.111.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.808.000	1.808.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.808.000	1.808.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.000	1.808.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.838.000	1.838.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.838.000	1.838.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.000	1.838.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.000	3.293.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.293.000	3.293.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.293.000	3.293.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.430.000	4.430.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.430.000	4.430.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000	4.430.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.882.297.189	12.676.294.294	(206.002.895)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.876.961.189	12.670.958.294	(206.002.895)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.876.961.189	12.670.958.294	(206.002.895)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	12.876.961.189	12.670.958.294	(206.002.895)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.107.000	1.107.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.107.000	1.107.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.107.000	1.107.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	3.782.000	3.782.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								/Semesteran SKPD				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	3.782.000	3.782.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.782.000	3.782.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	447.000	447.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	447.000	447.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	447.000	447.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	345.257.000	313.185.000	(32.072.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288.694.000	256.622.000	(32.072.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	288.694.000	256.622.000	(32.072.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	288.694.000	256.622.000	(32.072.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.563.000	56.563.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	56.563.000	56.563.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.05	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.563.000	56.563.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.119.000	389.711.000	(240.408.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.711.000	2.711.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.711.000	2.711.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.711.000	2.711.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.000	1.575.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.575.000	1.575.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000	1.575.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.920.000	19.920.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.920.000	19.920.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000	19.920.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	07			Penyediaan Bahan/Material	11.285.000	11.285.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	11.285.000	11.285.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.285.000	11.285.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.458.000	222.050.000	(165.408.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	387.458.000	222.050.000	(165.408.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	387.458.000	222.050.000	(165.408.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.170.000	22.170.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1	BELANJA OPERASI	22.170.000	22.170.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.170.000	22.170.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.000.000	85.000.000	(75.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	160.000.000	85.000.000	(75.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	85.000.000	(75.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.478.930.000	19.478.930.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.266.000	10.266.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	10.266.000	10.266.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.266.000	10.266.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.468.664.000	19.468.664.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	2	BELANJA MODAL	19.468.664.000	19.468.664.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.468.664.000	19.468.664.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813.253.275	799.085.175	(14.168.100)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	4.710.000	(600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.310.000	4.710.000	(600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000	4.710.000	(600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.390.100	53.532.000	(11.858.100)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	65.390.100	53.532.000	(11.858.100)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	65.390.100	53.532.000	(11.858.100)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.553.175	740.843.175	(1.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	742.553.175	740.843.175	(1.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	01		Belanja Pegawai	61.320.000	59.610.000	(1.710.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	681.233.175	681.233.175	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.539.500	341.347.500	(45.192.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.743.500	285.551.500	(45.192.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	330.743.500	285.551.500	(45.192.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	330.743.500	285.551.500	(45.192.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.796.000	55.796.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	55.796.000	55.796.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.796.000	55.796.000	0	
Jumlah Belanja											41.005.822.464	39.734.364.969	(1.271.457.495)	
Total Surplus/(Defisit)											(41.005.822.464)	(39.734.364.969)	1.271.457.495	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	8.01.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	08	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	00		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	23		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	23	5	BELANJA OPERASI	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
2	22	8.01.9.02.2.22.01.0000	08	1.09	23	5	Belanja Barang dan Jasa	2.250.400.000	1.231.191.000	(1.019.209.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.204.637.460	16.929.219.392	(1.275.418.068)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.628.685.500	2.491.005.500	(137.680.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.628.685.500	2.491.005.500	(137.680.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.342.634.000	2.286.024.000	(56.610.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	BELANJA OPERASI	2.342.634.000	2.286.024.000	(56.610.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.342.634.000	2.286.024.000	(56.610.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	286.051.500	204.981.500	(81.070.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	286.051.500	204.981.500	(81.070.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	286.051.500	204.981.500	(81.070.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.968.750.000	2.846.450.000	(122.300.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.968.750.000	2.846.450.000	(122.300.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	2.840.630.000	2.729.830.000	(110.800.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.840.630.000	2.729.830.000	(110.800.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.092.000	249.292.000	(110.800.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	03	5	1 05	Belanja Hibah	2.480.538.000	2.480.538.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	128.120.000	116.620.000	(11.500.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	128.120.000	116.620.000	(11.500.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	03	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.120.000	116.620.000	(11.500.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	339.250.000	313.695.000	(25.555.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	1.01	00			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	339.250.000	313.695.000	(25.555.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	1.01	05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	339.250.000	313.695.000	(25.555.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	339.250.000	313.695.000	(25.555.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	264.250.000	238.695.000	(25.555.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	04	1.01	05	5	1 05	Belanja Hibah	75.000.000	75.000.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.539.808.000	798.938.500	(740.869.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	00			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.539.808.000	798.938.500	(740.869.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	318.902.500	226.048.000	(92.854.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	318.902.500	226.048.000	(92.854.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	318.902.500	226.048.000	(92.854.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	992.802.000	406.542.500	(586.259.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	992.802.000	406.542.500	(586.259.500)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	992.802.000	406.542.500	(586.259.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	228.103.500	166.348.000	(61.755.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	228.103.500	166.348.000	(61.755.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.103.500	166.348.000	(61.755.500)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.845.228.000	2.765.803.000	(79.425.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.845.228.000	2.765.803.000	(79.425.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.308.039.000	2.308.039.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.308.039.000	2.308.039.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.308.039.000	2.308.039.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.189.000	457.764.000	(79.425.000)		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	537.189.000	457.764.000	(79.425.000)		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	06	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	537.189.000	457.764.000	(79.425.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.882.915.960	7.713.327.392	(169.588.568)		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.200.000	147.200.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.772.000	34.772.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.772.000	34.772.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.772.000	34.772.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62.428.000	62.428.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	62.428.000	62.428.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.428.000	62.428.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0		
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.292.582.510	6.218.691.942	(73.890.568)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.133.312.510	6.059.421.942	(73.890.568)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.133.312.510	6.059.421.942	(73.890.568)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	6.133.312.510	6.059.421.942	(73.890.568)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000	116.550.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	116.550.000	116.550.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	51.540.000	51.540.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	65.010.000	65.010.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.471.000	14.471.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	14.471.000	14.471.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.471.000	14.471.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13.706.000	13.706.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	13.706.000	13.706.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.706.000	13.706.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.543.000	14.543.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1			BELANJA OPERASI	14.543.000	14.543.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.543.000	14.543.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.993.150	226.295.150	(95.698.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.231.400	5.231.400	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.231.400	5.231.400	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.231.400	5.231.400	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.254.000	17.254.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.254.000	17.254.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.254.000	17.254.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.968.000	42.968.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.968.000	42.968.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.968.000	42.968.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.227.750	7.227.750	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.227.750	7.227.750	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.227.750	7.227.750	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.808.000	11.808.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	11.808.000	11.808.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.808.000	11.808.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.504.000	141.806.000	(95.698.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	237.504.000	141.806.000	(95.698.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.504.000	141.806.000	(95.698.000)	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.732.300	621.732.300	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.212.300	179.212.300	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	179.212.300	179.212.300	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.212.300	179.212.300	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.520.000	442.520.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	442.520.000	442.520.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	442.520.000	442.520.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.408.000	499.408.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.833.000	209.833.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	209.833.000	209.833.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.833.000	209.833.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.900.000	174.900.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	174.900.000	174.900.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.9.02.2.22.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	174.900.000	174.900.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.050.000	65.050.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	65.050.000	65.050.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	65.050.000	65.050.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.625.000	49.625.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	49.625.000	49.625.000	0	
8	01	8.01.9.02.2.22.01.0000	01	1.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	49.625.000	49.625.000	0	
Jumlah Belanja											20.455.037.460	18.160.410.392	(2.294.627.068)	
Total Surplus/(Defisit)											(20.455.037.460)	(18.160.410.392)	2.294.627.068	
0	00	8.01.9.02.2.22.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
							Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0	00	9.02.4.01.1.03.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA					
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)		
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	13	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)		
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	13	1.02	00		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)		
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	13	1.02	01		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)		
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)	
1	03	9.02.4.01.1.03.01.0000	13	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	451.000.000	120.000.000	(331.000.000)
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	00	0.00	00		SEKRETARIAT DAERAH	23.723.362.420	22.776.432.376	(946.930.044)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	16.580.631.500	16.014.803.400	(565.828.100)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	00		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	543.627.000	421.811.000	(121.816.000)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	01		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	326.381.000	300.158.000	(26.223.000)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	326.381.000	300.158.000	(26.223.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	326.381.000	300.158.000	(26.223.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	02				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	217.246.000	121.653.000	(95.593.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	217.246.000	121.653.000	(95.593.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.246.000	121.653.000	(95.593.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	00				Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	772.565.000	920.787.500	148.222.500	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	01				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	462.000.000	746.008.500	284.008.500	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	462.000.000	746.008.500	284.008.500	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	462.000.000	746.008.500	284.008.500	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	02				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	310.565.000	174.779.000	(135.786.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	310.565.000	174.779.000	(135.786.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	310.565.000	174.779.000	(135.786.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	00				Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	1.502.245.000	825.366.000	(676.879.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	01				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	845.771.000	634.135.000	(211.636.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	845.771.000	634.135.000	(211.636.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	845.771.000	634.135.000	(211.636.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	02			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	656.474.000	191.231.000	(465.243.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	656.474.000	191.231.000	(465.243.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	656.474.000	191.231.000	(465.243.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	00			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	4.388.843.000	3.850.079.000	(538.764.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	01			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.540.299.000	2.017.083.000	(523.216.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.540.299.000	2.017.083.000	(523.216.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.299.000	2.017.083.000	(523.216.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	02			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.848.544.000	1.832.996.000	(15.548.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.848.544.000	1.832.996.000	(15.548.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.848.544.000	1.832.996.000	(15.548.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	00			Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	2.245.501.500	2.241.972.400	(3.529.100)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	2.245.501.500	2.241.972.400	(3.529.100)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	35.000.000	35.000.000	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.000.000	35.000.000	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	2	BELANJA MODAL	2.245.501.500	2.206.972.400	(38.529.100)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.245.501.500	2.115.374.000	(130.127.500)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.07	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	91.598.400	91.598.400	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.08	00			Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.08	01			Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.526.000.000	900.213.000	(625.787.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	00			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	5.601.850.000	6.854.574.500	1.252.724.500		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02			Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	5.601.850.000	6.854.574.500	1.252.724.500		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.543.197.000	6.750.353.500	1.207.156.500		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.543.197.000	6.750.353.500	1.207.156.500	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02	5	2	BELANJA MODAL	58.653.000	104.221.000	45.568.000		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.866.000	97.434.000	45.568.000	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	10	1.09	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.787.000	6.787.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.142.730.920	6.761.628.976	(381.101.944)		
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	17.200.000	0		

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.500.000	5.500.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	5.500.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	11.700.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	11.700.000	11.700.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000	11.700.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.502.005.420	6.164.913.476	(337.091.944)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.445.305.420	6.108.213.476	(337.091.944)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.445.305.420	6.108.213.476	(337.091.944)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	6.445.305.420	6.108.213.476	(337.091.944)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.600.000	52.600.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	52.600.000	52.600.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	46.440.000	46.440.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000	6.160.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.300.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.300.000	1.300.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000	1.300.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	1.400.000	1.400.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								/Semesteran SKPD				
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.400.000	1.400.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000	1.400.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.400.000	1.400.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.400.000	1.400.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000	1.400.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.484.000	189.474.000	(44.010.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.000	1.028.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.028.000	1.028.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.000	1.028.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.146.000	3.146.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.146.000	3.146.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.146.000	3.146.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.948.000	16.948.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	16.948.000	16.948.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.948.000	16.948.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.282.000	9.282.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.682.000	8.682.000	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.682.000	8.682.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	2	BELANJA MODAL	600.000	600.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	06	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	600.000	600.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.080.000	159.070.000	(44.010.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	203.080.000	159.070.000	(44.010.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.080.000	159.070.000	(44.010.000)	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.361.000	188.361.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.361.000	188.361.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	188.361.000	188.361.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.361.000	188.361.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.000	12.562.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.562.000	12.562.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	12.562.000	12.562.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.562.000	12.562.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.118.500	189.118.500	0	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 9.02 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
 Organisasi : 9.02.4.01.1.03.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.918.500	175.918.500	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	175.918.500	175.918.500	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.918.500	175.918.500	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.200.000	13.200.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	13.200.000	13.200.000	0	
4	01	9.02.4.01.1.03.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000	13.200.000	0	
Jumlah Belanja									24.174.362.420	22.896.432.376	(1.277.930.044)	
Total Surplus/(Defisit)									(24.174.362.420)	(22.896.432.376)	1.277.930.044	
0	00	9.02.4.01.1.03.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN IV

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA
KELUARAN**

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.357.634.045.772	558.485.488.145	0	0	2.916.119.533.917	2.442.714.533.429	562.929.121.424	0	0	3.005.643.654.853	89.524.120.936
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.789.383.290.494	131.947.882.800	0	0	1.921.331.173.294	1.758.764.942.047	141.608.827.620	0	0	1.900.373.769.667	(20.957.403.627)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000	1.789.383.290.494	131.947.882.800	0	0	1.921.331.173.294	1.758.764.942.047	141.608.827.620	0	0	1.900.373.769.667	(20.957.403.627)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01	968.942.349.817	2.573.137.750	0	0	971.515.487.567	960.060.093.334	2.454.253.750	0	0	962.514.347.084	(9.001.140.483)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01	1.734.097.900	0	0	0	1.734.097.900	1.509.042.700	0	0	0	1.509.042.700	(225.055.200)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 01	800.597.900	0	0	0	800.597.900	594.675.900	0	0	0	594.675.900	(205.922.000)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.01 07	933.500.000	0	0	0	933.500.000	914.366.800	0	0	0	914.366.800	(19.133.200)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02	949.903.301.865	0	0	0	949.903.301.865	938.003.116.195	0	0	0	938.003.116.195	(11.900.185.670)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01	949.039.409.865	0	0	0	949.039.409.865	937.369.509.195	0	0	0	937.369.509.195	(11.669.900.670)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 03	548.458.000	0	0	0	548.458.000	318.173.000	0	0	0	318.173.000	(230.285.000)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 05	218.595.000	0	0	0	218.595.000	218.595.000	0	0	0	218.595.000	0
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 07	88.344.000	0	0	0	88.344.000	88.344.000	0	0	0	88.344.000	0
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 08	8.495.000	0	0	0	8.495.000	8.495.000	0	0	0	8.495.000	0
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06	1.252.514.250	1.505.514.000	0	0	2.758.028.250	1.066.989.950	1.371.630.000	0	0	2.438.619.950	(319.408.300)
1 01	1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01	57.988.100	0	0	0	57.988.100	56.629.000	0	0	0	56.629.000	(1.359.100)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.519.200	1.505.514.000	0	0	1.850.033.200	313.954.000	1.371.630.000	0	0	1.685.584.000	(164.449.200)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.994.200	0	0	0	52.994.200	50.593.200	0	0	0	50.593.200	(2.401.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	315.879.750	0	0	0	315.879.750	276.379.750	0	0	0	276.379.750	(39.500.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.740.000	0	0	0	32.740.000	32.320.000	0	0	0	32.320.000	(420.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448.393.000	0	0	0	448.393.000	337.114.000	0	0	0	337.114.000	(111.279.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.911.558.652	0	0	0	11.911.558.652	11.917.488.052	0	0	0	11.917.488.052	5.929.400
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.125.000	0	0	0	15.125.000	13.845.000	0	0	0	13.845.000	(1.280.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.208.608.752	0	0	0	8.208.608.752	8.223.898.152	0	0	0	8.223.898.152	15.289.400
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.687.824.900	0	0	0	3.687.824.900	3.679.744.900	0	0	0	3.679.744.900	(8.080.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.280.877.150	1.067.623.750	0	0	3.348.500.900	2.151.599.527	1.067.623.750	0	0	3.219.223.277	(129.277.623)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.221.600	0	0	0	481.221.600	444.769.200	0	0	0	444.769.200	(36.452.400)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.238.570.550	1.067.623.750	0	0	2.306.194.300	1.220.445.327	1.067.623.750	0	0	2.288.069.077	(18.125.223)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	561.085.000	0	0	0	561.085.000	486.385.000	0	0	0	486.385.000	(74.700.000)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.860.000.000	0	0	0	1.860.000.000	5.411.856.910	15.000.000	0	0	5.426.856.910	3.566.856.910
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.860.000.000	0	0	0	1.860.000.000	5.411.856.910	15.000.000	0	0	5.426.856.910	3.566.856.910
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	818.870.688.677	129.374.745.050	0	0	948.245.433.727	797.055.635.713	139.154.573.870	0	0	936.210.209.583	(12.035.224.144)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	591.414.987.414	32.905.317.249	0	0	624.320.304.663	577.091.744.442	36.535.928.126	0	0	613.627.672.568	(10.692.632.095)
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0	0	0	0	137.517.000	0	0	137.517.000	137.517.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	0	0	0	853.012.000	0	0	853.012.000	853.012.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	0	0	0	0	1.017.573.000	0	0	0	1.017.573.000	1.017.573.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	0	0	0	0	1.013.573.000	519.359.000	0	0	1.532.932.000	1.532.932.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	0	0	0	0	0	519.359.000	0	0	519.359.000	519.359.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	0	0	0	320.240.000	934.292.000	0	0	1.254.532.000	1.254.532.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	0	0	0	903.827.000	0	0	903.827.000	903.827.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.847.160.000	10.143.022.000	0	0	12.990.182.000	404.648.000	0	0	0	404.648.000	(12.585.534.000)	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	0	0	0	0	1.337.503.000	0	0	1.337.503.000	1.337.503.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	0	0	0	1.738.564.000	0	0	1.738.564.000	1.738.564.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	0	0	0	0	0	460.124.000	0	0	460.124.000	460.124.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	0	0	0	0	0	0	142.654.000	0	0	142.654.000	142.654.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	0	0	0	0	141.607.000	0	0	141.607.000	141.607.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0	0	0	0	376.693.000	0	0	376.693.000	376.693.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0	0	0	0	1.854.637.000	0	0	1.854.637.000	1.854.637.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0	0	0	0	92.000.000	223.000.000	0	0	315.000.000	315.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	340.000.000	1.865.000.000	0	0	2.205.000.000	340.000.000	1.865.000.000	0	0	2.205.000.000	0	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	42.538.940.000	0	0	0	42.538.940.000	43.507.310.000	0	0	0	43.507.310.000	968.370.000	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	33.910.329.763	6.699.317.700	0	0	40.609.647.463	28.277.666.358	5.401.314.700	0	0	33.678.981.058	(6.930.666.405)	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	364.129.000	0	0	0	364.129.000	303.788.000	0	0	0	303.788.000	(60.341.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	61.598.000	0	0	0	61.598.000	40.130.000	0	0	0	40.130.000	(21.468.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	733.108.500	0	0	0	733.108.500	519.939.500	0	0	0	519.939.500	(213.169.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	510.589.022.451	14.197.977.549	0	0	524.787.000.000	501.234.106.884	19.127.465.426	0	0	520.361.572.310	(4.425.427.690)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.699.700	0	0	0	30.699.700	20.769.700	0	0	0	20.769.700	(9.930.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	190.590.056.763	93.840.698.501	0	0	284.430.755.264	175.686.524.332	99.773.759.844	0	0	275.460.284.176	(8.970.471.088)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	0	0	0	0	1.041.500.000	14.107.980.000	0	0	15.149.480.000	15.149.480.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0	0	0	0	632.440.000	0	0	632.440.000	632.440.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	0	0	0	0	724.745.000	547.474.000	0	0	1.272.219.000	1.272.219.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	0	0	0	0	0	324.000.000	0	0	0	324.000.000	324.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0	0	0	0	0	234.084.000	0	0	0	234.084.000	234.084.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	0	0	0	93.413.000	0	0	93.413.000	93.413.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.022.673.000	16.997.907.000	0	0	20.020.580.000	564.944.000	0	0	0	564.944.000	(19.455.636.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	0	0	0	125.000.000	1.625.000.000	0	0	1.750.000.000	1.750.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	10.570.000.000	37.473.044.000	0	0	48.043.044.000	10.570.000.000	37.473.044.000	0	0	48.043.044.000	0
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	47.984.625.189	22.245.622.825	0	0	70.230.248.014	38.191.651.939	18.390.936.825	0	0	56.582.588.764	(13.647.659.250)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	346.043.750	0	0	0	346.043.750	222.404.750	0	0	0	222.404.750	(123.639.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	128.618.275.324	17.124.124.676	0	0	145.742.400.000	123.654.965.143	26.903.472.019	0	0	150.558.437.162	4.816.037.162

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	48.439.500	0	0	0	48.439.500	33.229.500	0	0	0	33.229.500	(15.210.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	36.865.644.500	2.628.729.300	0	0	39.494.373.800	44.277.366.939	2.844.885.900	0	0	47.122.252.839	7.627.879.039
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.201.820.000	0	0	0	2.201.820.000	0	0	0	0	0	(2.201.820.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	0	0	0	0	1.281.088.000	0	0	0	1.281.088.000	1.281.088.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	0	0	460.366.000	0	0	0	460.366.000	460.366.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0	0	0	460.366.000	0	0	0	460.366.000	460.366.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.998.243.000	0	0	0	4.998.243.000	4.993.243.000	0	0	0	4.993.243.000	(5.000.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6.640.700.700	2.046.030.600	0	0	8.686.731.300	5.555.142.400	1.275.287.600	0	0	6.830.430.000	(1.856.301.300)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.159.761.000	0	0	0	1.159.761.000	1.015.299.000	0	0	0	1.015.299.000	(144.462.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	9.059.774.000	0	0	0	9.059.774.000	8.993.174.000	0	0	0	8.993.174.000	(66.600.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	667.867.500	0	0	0	667.867.500	719.267.500	0	0	0	719.267.500	51.400.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.123.301.300	582.698.700	0	0	12.706.000.000	20.790.524.039	1.569.598.300	0	0	22.360.122.339	9.654.122.339
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.177.000	0	0	0	14.177.000	8.897.000	0	0	0	8.897.000	(5.280.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.217.160.000	0	0	0	1.217.160.000	1.337.090.000	0	0	0	1.337.090.000	119.930.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.217.160.000	0	0	0	1.217.160.000	1.337.090.000	0	0	0	1.337.090.000	119.930.000
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	444.000.000	0	0	0	444.000.000	374.350.000	0	0	0	374.350.000	(69.650.000)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	773.160.000	0	0	0	773.160.000	962.740.000	0	0	0	962.740.000	189.580.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	353.092.000	0	0	0	353.092.000	312.123.000	0	0	0	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	353.092.000	0	0	0	353.092.000	312.123.000	0	0	0	312.123.000	(40.969.000)	
1	01	1.01.2.19.2.22.03.0000	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	353.092.000	0	0	0	353.092.000	312.123.000	0	0	0	312.123.000	(40.969.000)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	183.507.301.670	19.451.055.540	0	0	202.958.357.210	315.282.115.821	26.164.370.290	0	0	341.446.486.111	138.488.128.901	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000			DINAS KESEHATAN	183.507.301.670	19.451.055.540	0	0	202.958.357.210	315.282.115.821	26.164.370.290	0	0	341.446.486.111	138.488.128.901	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.938.390.777	1.824.472.000	0	0	121.762.862.777	145.348.949.878	4.558.727.750	0	0	149.907.677.628	28.144.814.851	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.650.000	0	0	0	78.650.000	78.050.000	0	0	0	78.050.000	(600.000)	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.261.000	0	0	0	72.261.000	72.261.000	0	0	0	72.261.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.389.000	0	0	0	6.389.000	5.789.000	0	0	0	5.789.000	(600.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.516.704.306	0	0	0	81.516.704.306	84.963.577.561	0	0	0	84.963.577.561	3.446.873.255	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.511.512.306	0	0	0	81.511.512.306	84.958.385.561	0	0	0	84.958.385.561	3.446.873.255
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.192.000	0	0	0	5.192.000	5.192.000	0	0	0	5.192.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.714.000	42.170.000	0	0	238.884.000	156.075.000	42.170.000	0	0	198.245.000	(40.639.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.224.000	0	0	0	2.224.000	2.224.000	0	0	0	2.224.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.303.000	42.170.000	0	0	68.473.000	26.303.000	42.170.000	0	0	68.473.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.525.000	0	0	0	7.525.000	7.525.000	0	0	0	7.525.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.787.000	0	0	0	9.787.000	9.787.000	0	0	0	9.787.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.474.000	0	0	0	11.474.000	11.474.000	0	0	0	11.474.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.056.000	0	0	0	4.056.000	4.056.000	0	0	0	4.056.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.345.000	0	0	0	135.345.000	94.706.000	0	0	0	94.706.000	(40.639.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.580.937.771	0	0	0	1.580.937.771	1.633.441.771	0	0	0	1.633.441.771	52.504.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.317.090	0	0	0	488.317.090	523.571.090	0	0	0	523.571.090	35.254.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.920.681	0	0	0	1.090.920.681	1.108.170.681	0	0	0	1.108.170.681	17.250.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.783.000	0	0	0	508.783.000	494.308.000	0	0	0	494.308.000	(14.475.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.198.000	0	0	0	241.198.000	241.198.000	0	0	0	241.198.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.585.000	0	0	0	109.585.000	95.110.000	0	0	0	95.110.000	(14.475.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.000.000	0	0	0	158.000.000	158.000.000	0	0	0	158.000.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	36.022.601.700	1.782.302.000	0	0	37.804.903.700	57.989.497.546	4.516.557.750	0	0	62.506.055.296	24.701.151.596
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	36.022.601.700	1.782.302.000	0	0	37.804.903.700	57.989.497.546	4.516.557.750	0	0	62.506.055.296	24.701.151.596

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.464.677.209	17.294.650.540	0	0	78.759.327.749	166.405.369.759	21.388.339.540	0	0	187.793.709.299	109.034.381.550
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	154.230.000	7.961.854.000	0	0	8.116.084.000	347.230.000	14.720.392.800	0	0	15.067.622.800	6.951.538.800
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	1.479.383.800	0	0	1.479.383.800	1.479.383.800
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	0	6.999.330.000	0	0	6.999.330.000	0	5.247.330.000	0	0	5.247.330.000	(1.752.000.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	0	0	0	193.000.000	7.031.155.000	0	0	7.224.155.000	7.224.155.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	0	960.000.000	0	0	960.000.000	0	0	0	0	0	(960.000.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	960.000.000	0	0	960.000.000	960.000.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.230.000	2.524.000	0	0	156.754.000	154.230.000	2.524.000	0	0	156.754.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	61.210.359.709	9.332.796.540	0	0	70.543.156.249	165.974.387.259	6.592.946.740	0	0	172.567.333.999	102.024.177.750
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.084.850.000	0	0	0	1.084.850.000	67.865.347.200	1.128.790.000	0	0	68.994.137.200	67.909.287.200
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	66.694.000	0	0	0	66.694.000	1.263.197.000	0	0	0	1.263.197.000	1.196.503.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	273.671.000	0	0	0	273.671.000	272.871.000	0	0	0	272.871.000	(800.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	450.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000	0
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	11.160.000	0	0	0	11.160.000	11.160.000	0	0	0	11.160.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.484.434.000	0	0	0	2.484.434.000	2.484.434.000	0	0	0	2.484.434.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.310.000	0	0	0	38.310.000	38.310.000	0	0	0	38.310.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.593.041.000	0	0	0	1.593.041.000	801.828.000	0	0	0	801.828.000	(791.213.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.800.674.809	5.125.691.000	0	0	12.926.365.809	7.349.513.809	1.692.356.000	0	0	9.041.869.809	(3.884.496.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.041.525.500	0	0	0	37.041.525.500	76.348.572.250	0	0	0	76.348.572.250	39.307.046.750
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	447.710.400	0	0	0	447.710.400	190.071.000	0	0	0	190.071.000	(257.639.400)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	323.823.000	0	0	0	323.823.000	217.296.000	0	0	0	217.296.000	(106.527.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9.680.946.000	4.201.105.540	0	0	13.882.051.540	8.829.167.000	3.765.800.740	0	0	12.594.967.740	(1.287.083.800)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	360.270.000	6.000.000	0	0	366.270.000	299.370.000	6.000.000	0	0	305.370.000	(60.900.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	4.920.000	0	0	0	4.920.000	4.920.000	75.000.000	0	0	79.920.000	75.000.000
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	420.000	0	0	0	420.000	420.000	75.000.000	0	0	75.420.000	75.000.000
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	95.167.500	0	0	0	95.167.500	78.832.500	0	0	0	78.832.500	(16.335.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	95.167.500	0	0	0	95.167.500	78.832.500	0	0	0	78.832.500	(16.335.000)
1	02	1.02.2.22.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.094.586.684	331.933.000	0	0	2.426.519.684	3.524.044.184	217.303.000	0	0	3.741.347.184	1.314.827.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	0	0	0	0	0	1.662.500.000	0	0	0	1.662.500.000	1.662.500.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0	0	0	1.662.500.000	0	0	0	1.662.500.000	1.662.500.000
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.094.586.684	331.933.000	0	0	2.426.519.684	1.861.544.184	217.303.000	0	0	2.078.847.184	(347.672.500)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.840.885.684	331.933.000	0	0	2.172.818.684	1.621.935.184	217.303.000	0	0	1.839.238.184	(333.580.500)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	253.701.000	0	0	0	253.701.000	239.609.000	0	0	0	239.609.000	(14.092.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	9.647.000	0	0	0	9.647.000	3.752.000	0	0	0	3.752.000	(5.895.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	9.647.000	0	0	0	9.647.000	3.752.000	0	0	0	3.752.000	(5.895.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	9.647.000	0	0	0	9.647.000	3.752.000	0	0	0	3.752.000	(5.895.000)
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170.953.710.539	395.501.383.039	0	0	566.455.093.578	148.009.049.908	387.044.247.397	0	0	535.053.297.305	(31.401.796.273)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	145.839.501.750	390.478.383.039	0	0	536.317.884.789	127.245.211.497	376.634.715.932	0	0	503.879.927.429	(32.437.957.360)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.173.272.640	696.625.773	0	0	58.869.898.413	53.078.470.487	696.625.773	0	0	53.775.096.260	(5.094.802.153)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000	0	0	0	495.000.000	454.378.000	0	0	0	454.378.000	(40.622.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	0	0	0	450.000.000	411.378.000	0	0	0	411.378.000	(38.622.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	(2.000.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.081.049.843	0	0	0	45.081.049.843	40.503.894.140	0	0	0	40.503.894.140	(4.577.155.703)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.994.976.403	0	0	0	41.994.976.403	37.421.882.450	0	0	0	37.421.882.450	(4.573.093.953)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.966.073.440	0	0	0	2.966.073.440	2.965.611.690	0	0	0	2.965.611.690	(461.750)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120.000.000	0	0	0	120.000.000	116.400.000	0	0	0	116.400.000	(3.600.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.082.500	199.419.500	0	0	815.502.000	429.845.000	199.419.500	0	0	629.264.500	(186.237.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	481.500	199.419.500	0	0	199.901.000	1.600.000	199.419.500	0	0	201.019.500	1.118.500
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.601.000	0	0	0	615.601.000	428.245.000	0	0	0	428.245.000	(187.356.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.634.324.797	0	0	0	9.634.324.797	9.359.645.847	0	0	0	9.359.645.847	(274.678.950)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.634.324.797	0	0	0	9.634.324.797	9.359.645.847	0	0	0	9.359.645.847	(274.678.950)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.346.815.500	497.206.273	0	0	2.844.021.773	2.330.707.500	497.206.273	0	0	2.827.913.773	(16.108.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.089.012.000	0	0	0	1.089.012.000	1.073.004.000	0	0	0	1.073.004.000	(16.008.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.090.000	0	0	0	355.090.000	354.990.000	0	0	0	354.990.000	(100.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	902.713.500	497.206.273	0	0	1.399.919.773	902.713.500	497.206.273	0	0	1.399.919.773	0
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	37.384.113.500	28.696.902.500	0	0	66.081.016.000	30.101.232.500	28.358.584.000	0	0	58.459.816.500	(7.621.199.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.703.904.500	0	0	0	20.703.904.500	13.325.577.500	0	0	0	13.325.577.500	(7.378.327.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000	0	0	0	200.000.000	292.990.000	0	0	0	292.990.000	92.990.000
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	15.825.000.000	0	0	0	15.825.000.000	8.325.000.000	0	0	0	8.325.000.000	(7.500.000.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2.204.146.500	0	0	0	2.204.146.500	2.401.146.500	0	0	0	2.401.146.500	197.000.000
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.573.674.500	0	0	0	1.573.674.500	1.494.904.500	0	0	0	1.494.904.500	(78.770.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	811.083.500	0	0	0	811.083.500	721.536.500	0	0	0	721.536.500	(89.547.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.680.209.000	28.696.902.500	0	0	45.377.111.500	16.775.655.000	28.358.584.000	0	0	45.134.239.000	(242.872.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.258.918.000	10.730.575.000	0	0	11.989.493.000	1.313.263.000	10.722.725.000	0	0	12.035.988.000	46.495.000
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	528.129.000	17.635.859.000	0	0	18.163.988.000	528.129.000	17.635.859.000	0	0	18.163.988.000	0
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	14.893.162.000	330.468.500	0	0	15.223.630.500	14.934.263.000	0	0	0	14.934.263.000	(289.367.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.415.000.000	2.700.000.000	0	0	10.115.000.000	1.469.770.000	2.699.500.000	0	0	4.169.270.000	(5.945.730.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	7.415.000.000	2.700.000.000	0	0	10.115.000.000	1.469.770.000	2.699.500.000	0	0	4.169.270.000	(5.945.730.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	1.219.770.000	0	0	0	1.219.770.000	19.770.000
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5.965.000.000	0	0	0	5.965.000.000	0	0	0	0	0	(5.965.000.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	0	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.01 11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	0	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	0	2.699.500.000	0	0	2.699.500.000	(500.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	37.210.000.000	0	0	37.210.000.000	3.350.000.000	11.098.265.000	0	0	14.448.265.000	(22.761.735.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0	37.210.000.000	0	0	37.210.000.000	3.350.000.000	11.098.265.000	0	0	14.448.265.000	(22.761.735.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 04 1.01 06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	0	37.210.000.000	0	0	37.210.000.000	3.350.000.000	11.098.265.000	0	0	14.448.265.000	(22.761.735.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.084.260.460	1.178.000	0	0	7.085.438.460	7.084.260.460	0	0	0	7.084.260.460	(1.178.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.084.260.460	1.178.000	0	0	7.085.438.460	7.084.260.460	0	0	0	7.084.260.460	(1.178.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250.000.000	0	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.834.260.460	1.178.000	0	0	6.835.438.460	6.834.260.460	0	0	0	6.834.260.460	(1.178.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.561.649.000	38.351.000	0	0	1.600.000.000	913.247.500	38.351.000	0	0	951.598.500	(648.401.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.561.649.000	38.351.000	0	0	1.600.000.000	913.247.500	38.351.000	0	0	951.598.500	(648.401.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1.561.649.000	38.351.000	0	0	1.600.000.000	913.247.500	38.351.000	0	0	951.598.500	(648.401.500)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28.568.473.800	117.098.101.318	0	0	145.666.575.118	25.730.669.550	88.770.127.784	0	0	114.500.797.334	(31.165.777.784)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	28.568.473.800	117.098.101.318	0	0	145.666.575.118	25.730.669.550	88.770.127.784	0	0	114.500.797.334	(31.165.777.784)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 10 1.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	745.098.000	264.902.000	0	0	1.010.000.000	552.448.000	334.902.000	0	0	887.350.000	(122.650.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
											Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.834.000	47.992.804.500	0	0	49.992.638.500	259.900.000	35.063.920.750	0	0	35.323.820.750	(14.668.817.750)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	858.505.000	35.420.395.000	0	0	36.278.900.000	858.505.000	34.598.047.000	0	0	35.456.552.000	(822.348.000)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.310.533.250	0	0	0	18.310.533.250	17.882.187.000	200.000.000	0	0	18.082.187.000	(228.346.250)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	4.620.000.000	33.419.999.818	0	0	38.039.999.818	4.620.000.000	18.573.258.034	0	0	23.193.258.034	(14.846.741.784)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.034.503.550	0	0	0	2.034.503.550	1.557.629.550	0	0	1.557.629.550	(476.874.000)					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.672.354.350	221.838.448	0	0	1.894.192.798	1.038.322.350	221.838.448	0	0	1.260.160.798	(634.032.000)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.473.675.350	221.838.448	0	0	1.695.513.798	839.643.350	221.838.448	0	0	1.061.481.798	(634.032.000)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	682.149.500	0	0	0	682.149.500	80.669.500	0	0	80.669.500	(601.480.000)					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	791.525.850	221.838.448	0	0	1.013.364.298	758.973.850	221.838.448	0	0	980.812.298	(32.552.000)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	198.679.000	0	0	0	198.679.000	198.679.000	0	0	198.679.000	0					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	23.682.000	0	0	0	23.682.000	23.682.000	0	0	23.682.000	0					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	174.997.000	0	0	0	174.997.000	174.997.000	0	0	174.997.000	0					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	3.980.378.000	203.815.386.000	0	0	207.795.764.000	4.479.238.650	244.751.423.927	0	0	249.230.662.577	41.434.898.577				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.01	03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000					
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3.980.378.000	203.815.386.000	0	0	207.795.764.000	4.329.238.650	244.651.423.927	0	0	248.980.662.577	41.184.898.577				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.454.072.000	200.000.000	0	0	1.654.072.000	1.173.098.880	200.000.000	0	0	1.373.098.880	(280.973.120)				
1	03	1.03.1.04.3.29.13.0000	13	1.02	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	696.597.000	1.803.403.000	0	0	2.500.000.000	941.097.000	1.874.480.500	0	0	2.815.577.500	315.577.500				

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	350.000.000	86.475.000.000	0	0	86.825.000.000	514.179.000	86.288.681.000	0	0	86.802.860.000	(22.140.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	500.000.000	0	0	0	500.000.000	467.700.610	0	0	467.700.610	(32.299.390)	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	0	14.751.500.000	0	0	14.751.500.000	0	13.933.043.000	0	0	13.933.043.000	(818.457.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	750.000.000	0	0	0	750.000.000	635.089.160	0	0	635.089.160	(114.910.840)	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	0	0	0	0	0	305.000.000	0	0	305.000.000	305.000.000	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.02 13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	229.709.000	100.585.483.000	0	0	100.815.192.000	293.074.000	142.355.219.427	0	0	142.648.293.427	41.833.101.427
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000 13 1.04 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	21.785.312.789	260.947.000	0	0	22.046.259.789	17.439.889.903	246.697.000	0	0	17.686.586.903	(4.359.672.886)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.072.313.889	260.947.000	0	0	10.333.260.889	9.259.530.745	246.697.000	0	0	9.506.227.745	(827.033.144)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.672.500	0	0	0	67.672.500	59.372.500	0	0	59.372.500	(8.300.000)	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.672.500	0	0	0	37.672.500	35.072.500	0	0	35.072.500	(2.600.000)	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.300.000	0	0	12.300.000	(2.700.000)	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	(3.000.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.326.698.439	0	0	0	8.326.698.439	7.783.435.295	0	0	0	7.783.435.295	(543.263.144)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.234.298.439	0	0	0	8.234.298.439	7.698.943.295	0	0	0	7.698.943.295	(535.355.144)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.400.000	0	0	0	62.400.000	60.792.000	0	0	0	60.792.000	(1.608.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.648.000	0	0	0	4.648.000	3.148.000	0	0	0	3.148.000	(1.500.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.352.000	0	0	0	25.352.000	20.552.000	0	0	0	20.552.000	(4.800.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.510.500	450.000	0	0	443.960.500	260.016.500	0	0	0	260.016.500	(183.944.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.325.000	450.000	0	0	15.775.000	15.775.000	0	0	0	15.775.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.094.500	0	0	0	38.094.500	38.094.500	0	0	0	38.094.500	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	0	0	0	9.035.000	9.035.000	0	0	0	9.035.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.660.000	0	0	0	38.660.000	36.160.000	0	0	0	36.160.000	(2.500.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.800.000	0	0	0	25.800.000	25.800.000	0	0	0	25.800.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.596.000	0	0	0	316.596.000	135.152.000	0	0	0	135.152.000	(181.444.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	246.697.000	0	0	246.697.000	0	246.697.000	0	0	246.697.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	246.697.000	0	0	246.697.000	0	246.697.000	0	0	246.697.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.190.900	0	0	0	432.190.900	432.190.900	0	0	0	432.190.900	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	0	0	0	12.200.000	12.200.000	0	0	0	12.200.000	0
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.060.400	0	0	0	203.060.400	203.060.400	0	0	0	203.060.400	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.930.500	0	0	0	216.930.500	216.930.500	0	0	0	216.930.500	0
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.241.550	13.800.000	0	0	816.041.550	724.515.550	0	0	0	724.515.550	(91.526.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.077.300	0	0	0	296.077.300	209.351.300	0	0	0	209.351.300	(86.726.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.380.000	0	0	0	115.380.000	110.580.000	0	0	0	110.580.000	(4.800.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.784.250	13.800.000	0	0	404.584.250	404.584.250	0	0	0	404.584.250	0
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.588.318.900	0	0	0	2.588.318.900	2.779.013.900	0	0	0	2.779.013.900	190.695.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	192.500.000	0	0	0	192.500.000	0	0	0	0	0	(192.500.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	192.500.000	0	0	0	192.500.000	0	0	0	0	0	(192.500.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	48.900.000	0	0	0	48.900.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	(46.200.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	48.900.000	0	0	0	48.900.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	(46.200.000)
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.769.605.400	0	0	0	1.769.605.400	1.864.388.400	0	0	0	1.864.388.400	94.783.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.669.605.400	0	0	0	1.669.605.400	1.764.388.400	0	0	0	1.764.388.400	94.783.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
1	03	1.03.2.10.0.00.01.0000	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	577.313.500	0	0	0	577.313.500	911.925.500	0	0	0	911.925.500	334.612.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	437.582.500	0	0	0	437.582.500	838.034.500	0	0	0	838.034.500	400.452.000
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 1.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	139.731.000	0	0	0	139.731.000	73.891.000	0	0	0	73.891.000	(65.840.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	9.124.680.000	0	0	0	9.124.680.000	5.401.345.258	0	0	0	5.401.345.258	(3.723.334.742)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	8.390.333.000	0	0	0	8.390.333.000	4.048.787.950	0	0	0	4.048.787.950	(4.341.545.050)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	800.000.000	0	0	0	800.000.000	666.359.000	0	0	0	666.359.000	(133.641.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7.490.333.000	0	0	0	7.490.333.000	3.306.628.950	0	0	0	3.306.628.950	(4.183.704.050)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.01 06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	100.000.000	0	0	0	100.000.000	75.800.000	0	0	0	75.800.000	(24.200.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	734.347.000	0	0	0	734.347.000	1.352.557.308	0	0	0	1.352.557.308	618.210.308
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 13 1.03 01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	734.347.000	0	0	0	734.347.000	1.352.557.308	0	0	0	1.352.557.308	618.210.308
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	2.698.518.000	0	0	0	2.698.518.000	2.884.537.008	43.710.000	0	0	2.928.247.008	229.729.008
1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.698.518.000	0	0	0	2.698.518.000	2.884.537.008	43.710.000	0	0	2.928.247.008	229.729.008
1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.698.518.000	0	0	0	2.698.518.000	2.884.537.008	43.710.000	0	0	2.928.247.008	229.729.008
1 03 2.15.1.03.0.00.01.0000 13 1.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.698.518.000	0	0	0	2.698.518.000	2.884.537.008	43.710.000	0	0	2.928.247.008	229.729.008
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	198.792.500	0	0	0	198.792.500	198.792.500
1 03 3.25.2.22.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0	0	0	0	0	198.792.500	0	0	0	198.792.500	198.792.500
1 03 3.25.2.22.0.00.01.0000 13 1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	0	0	0	0	198.792.500	0	0	0	198.792.500	198.792.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 3.25.2.22.0.00.01.0000 13 1.01 01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	0	0	0	0	198.792.500	0	0	0	198.792.500	198.792.500
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	179.378.000	4.762.053.000	0	0	4.941.431.000	120.619.000	10.119.124.465	0	0	10.239.743.465	5.298.312.465
1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	179.378.000	4.762.053.000	0	0	4.941.431.000	120.619.000	10.119.124.465	0	0	10.239.743.465	5.298.312.465
1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	179.378.000	4.762.053.000	0	0	4.941.431.000	120.619.000	10.119.124.465	0	0	10.239.743.465	5.298.312.465
1 03 4.01.2.10.1.03.01.0000 13 1.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	179.378.000	4.762.053.000	0	0	4.941.431.000	120.619.000	10.119.124.465	0	0	10.239.743.465	5.298.312.465
9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000	PANIRADYA KAISTIMEWAN	451.000.000	0	0	0	451.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	(331.000.000)
1 03 9.02.4.01.1.03.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	451.000.000	0	0	0	451.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	(331.000.000)
1 03 9.02.4.01.1.03.01.0000 13 1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	451.000.000	0	0	0	451.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	(331.000.000)
1 03 9.02.4.01.1.03.01.0000 13 1.02 01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	451.000.000	0	0	0	451.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	(331.000.000)
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.755.000.000	0	0	0	75.755.000.000	74.356.185.000	0	0	0	74.356.185.000	(1.398.815.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	75.755.000.000	0	0	0	75.755.000.000	74.356.185.000	0	0	0	74.356.185.000	(1.398.815.000)
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.415.000.000	0	0	0	21.415.000.000	21.516.185.000	0	0	0	21.516.185.000	101.185.000
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	0	0	0	300.000.000	201.185.000	0	0	0	201.185.000	(98.815.000)
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	300.000.000	0	0	0	300.000.000	201.185.000	0	0	0	201.185.000	(98.815.000)
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	0	0	0	21.115.000.000	21.315.000.000	0	0	0	21.315.000.000	200.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	0	0	0	21.115.000.000	21.315.000.000	0	0	0	21.315.000.000	200.000.000
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	54.340.000.000	0	0	0	54.340.000.000	52.840.000.000	0	0	0	52.840.000.000	(1.500.000.000)
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	54.340.000.000	0	0	0	54.340.000.000	52.840.000.000	0	0	0	52.840.000.000	(1.500.000.000)
1 04 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	54.340.000.000	0	0	0	54.340.000.000	52.840.000.000	0	0	0	52.840.000.000	(1.500.000.000)
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47.277.511.977	7.034.540.249	0	0	54.312.052.226	53.487.449.628	3.755.906.600	0	0	57.243.356.228	2.931.304.002
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.350.331.055	1.222.628.600	0	0	20.572.959.655	20.152.542.099	1.222.628.600	0	0	21.375.170.699	802.211.044
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.378.298.505	1.222.628.600	0	0	16.600.927.105	14.869.604.049	1.222.628.600	0	0	16.092.232.649	(508.694.456)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	328.048.500	0	0	0	328.048.500	264.013.500	0	0	0	264.013.500	(64.035.000)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	299.328.500	0	0	0	299.328.500	235.293.500	0	0	0	235.293.500	(64.035.000)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.720.000	0	0	0	28.720.000	28.720.000	0	0	0	28.720.000	0
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.692.014.305	0	0	0	13.692.014.305	12.579.638.849	0	0	0	12.579.638.849	(1.112.375.456)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.678.514.305	0	0	0	13.678.514.305	12.566.138.849	0	0	0	12.566.138.849	(1.112.375.456)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	670.060.000	0	0	0	670.060.000	670.060.000
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	670.060.000	0	0	0	670.060.000	670.060.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.917.150	0	0	0	139.917.150	139.898.150	0	0	0	139.898.150	(19.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0	1.950.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.636.000	0	0	0	14.636.000	14.636.000	0	0	0	14.636.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.623.150	0	0	0	15.623.150	15.623.150	0	0	0	15.623.150	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	0	0	0	2.580.000	2.580.000	0	0	0	2.580.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.128.000	0	0	0	105.128.000	105.109.000	0	0	0	105.109.000	(19.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	146.015.000	0	0	146.015.000	0	146.015.000	0	0	146.015.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	140.015.000	0	0	140.015.000	0	140.015.000	0	0	140.015.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.628.350	0	0	0	576.628.350	576.403.350	0	0	0	576.403.350	(225.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	0	0	0	760.000	760.000	0	0	0	760.000	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.950.000	0	0	0	142.950.000	142.725.000	0	0	0	142.725.000	(225.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.918.350	0	0	0	432.918.350	432.918.350	0	0	0	432.918.350	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.690.200	1.076.613.600	0	0	1.718.303.800	639.590.200	1.076.613.600	0	0	1.716.203.800	(2.100.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	611.125.200	0	0	0	611.125.200	611.125.200	0	0	0	611.125.200	0
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.005.000	0	0	0	30.005.000	27.905.000	0	0	0	27.905.000	(2.100.000)
1	05	1.05.9.02.1.03.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.000	1.076.613.600	0	0	1.077.173.600	560.000	1.076.613.600	0	0	1.077.173.600	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.972.032.550	0	0	0	3.972.032.550	5.282.938.050	0	0	0	5.282.938.050	1.310.905.500
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.033.784.050	0	0	0	3.033.784.050	4.946.336.050	0	0	0	4.946.336.050	1.912.552.000
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.993.695.000	0	0	0	1.993.695.000	4.311.183.000	0	0	0	4.311.183.000	2.317.488.000
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	39.820.000	0	0	0	39.820.000	39.820.000	0	0	0	39.820.000	0
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.928.250	0	0	0	56.928.250	51.028.250	0	0	0	51.028.250	(5.900.000)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	753.711.800	0	0	0	753.711.800	311.205.800	0	0	0	311.205.800	(442.506.000)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20.879.000	0	0	0	20.879.000	64.349.000	0	0	0	64.349.000	43.470.000
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.750.000	0	0	0	168.750.000	168.750.000	0	0	0	168.750.000	0
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	938.248.500	0	0	0	938.248.500	336.602.000	0	0	0	336.602.000	(601.646.500)
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	264.182.500	0	0	0	264.182.500	42.945.000	0	0	0	42.945.000	(221.237.500)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	674.066.000	0	0	0	674.066.000	293.657.000	0	0	0	293.657.000	(380.409.000)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.927.180.922	5.811.911.649	0	0	33.739.092.571	33.334.907.529	2.533.278.000	0	0	35.868.185.529	2.129.092.958
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.454.223.172	1.120.157.000	0	0	13.574.380.172	12.073.833.529	1.133.107.000	0	0	13.206.940.529	(367.439.643)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.045.000	0	0	0	74.045.000	80.729.000	0	0	0	80.729.000	6.684.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.500.000	0	0	0	47.500.000	54.184.000	0	0	0	54.184.000	6.684.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.545.000	0	0	0	26.545.000	26.545.000	0	0	0	26.545.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.728.591.544	0	0	0	8.728.591.544	8.363.173.901	0	0	0	8.363.173.901	(365.417.643)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.660.371.544	0	0	0	8.660.371.544	8.294.953.901	0	0	0	8.294.953.901	(365.417.643)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.220.000	0	0	0	53.220.000	53.220.000	0	0	0	53.220.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.108.000	0	0	0	924.108.000	901.388.000	0	0	0	901.388.000	(22.720.000)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.321.000	0	0	0	11.321.000	11.321.000	0	0	0	11.321.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.055.000	0	0	0	58.055.000	88.055.000	0	0	0	88.055.000	30.000.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.936.000	0	0	0	41.936.000	41.936.000	0	0	0	41.936.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.160.000	0	0	0	8.160.000	8.160.000	0	0	0	8.160.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.636.000	0	0	0	804.636.000	751.916.000	0	0	0	751.916.000	(52.720.000)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.408.000	1.061.971.000	0	0	1.083.379.000	21.408.000	1.075.993.000	0	0	1.097.401.000	14.022.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.408.000	1.061.971.000	0	0	1.083.379.000	21.408.000	1.075.993.000	0	0	1.097.401.000	14.022.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.510.328	0	0	0	1.484.510.328	1.484.510.328	0	0	0	1.484.510.328	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.604.600	0	0	0	574.604.600	574.604.600	0	0	0	574.604.600	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.905.728	0	0	0	900.905.728	900.905.728	0	0	0	900.905.728	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.560.300	58.186.000	0	0	1.279.746.300	1.222.624.300	57.114.000	0	0	1.279.738.300	(8.000)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.590.300	0	0	0	499.590.300	499.590.300	0	0	0	499.590.300	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	5.330.000	0	0	0	5.330.000	5.330.000	0	0	0	5.330.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	323.820.000	58.186.000	0	0	382.006.000	324.884.000	57.114.000	0	0	381.998.000	(8.000)
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.820.000	0	0	0	392.820.000	392.820.000	0	0	0	392.820.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.472.957.750	4.691.754.649	0	0	20.164.712.399	21.261.074.000	1.400.171.000	0	0	22.661.245.000	2.496.532.601
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.780.702.000	0	0	0	1.780.702.000	1.890.702.000	0	0	0	1.890.702.000	110.000.000
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	355.000.000	0	0	0	355.000.000	355.000.000	0	0	0	355.000.000	0
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.425.702.000	0	0	0	1.425.702.000	1.535.702.000	0	0	0	1.535.702.000	110.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	11.170.328.850	4.691.754.649	0	0	15.862.083.499	10.060.106.100	1.400.171.000	0	0	11.460.277.100	(4.401.806.399)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	308.280.000	0	0	0	308.280.000	308.280.000	0	0	0	308.280.000	0
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2.015.273.000	0	0	0	2.015.273.000	1.103.604.000	0	0	0	1.103.604.000	(911.669.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	180.000.000	489.474.000	0	0	669.474.000	180.000.000	489.474.000	0	0	669.474.000	0
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.233.117.850	914.322.500	0	0	2.147.440.350	1.074.983.350	910.697.000	0	0	1.985.680.350	(161.760.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.988.897.500	0	0	0	5.988.897.500	5.988.897.500	0	0	0	5.988.897.500	0
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	1.360.500.500	3.287.958.149	0	0	4.648.458.649	1.337.031.250	0	0	0	1.337.031.250	(3.311.427.399)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	84.260.000	0	0	0	84.260.000	67.310.000	0	0	0	67.310.000	(16.950.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.054.288.900	0	0	0	2.054.288.900	9.063.022.900	0	0	0	9.063.022.900	7.008.734.000
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.145.353.000	0	0	0	1.145.353.000	3.327.832.000	0	0	0	3.327.832.000	2.182.479.000
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	908.935.900	0	0	0	908.935.900	5.735.190.900	0	0	0	5.735.190.900	4.826.255.000
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	467.638.000	0	0	0	467.638.000	247.243.000	0	0	0	247.243.000	(220.395.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	142.338.000	0	0	0	142.338.000	59.128.000	0	0	0	59.128.000	(83.210.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	111.300.000	0	0	0	111.300.000	87.915.000	0	0	0	87.915.000	(23.385.000)
1	05	1.05.9.02.2.22.04.0000	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	214.000.000	0	0	0	214.000.000	100.200.000	0	0	0	100.200.000	(113.800.000)
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	90.757.231.092	4.550.626.517	0	0	95.307.857.609	92.814.791.025	4.355.769.517	0	0	97.170.560.542	1.862.702.933
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000				DINAS SOSIAL	90.757.231.092	4.550.626.517	0	0	95.307.857.609	92.814.791.025	4.355.769.517	0	0	97.170.560.542	1.862.702.933

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.093.186.392	4.495.090.517	0	0	59.588.276.909	51.999.048.100	4.305.019.517	0	0	56.304.067.617	(3.284.209.292)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.650.000	0	0	0	115.650.000	97.050.000	0	0	0	97.050.000	(18.600.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.780.000	0	0	0	66.780.000	49.780.000	0	0	0	49.780.000	(17.000.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.620.000	0	0	0	19.620.000	19.620.000	0	0	0	19.620.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.250.000	0	0	0	29.250.000	27.650.000	0	0	0	27.650.000	(1.600.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.738.419.151	0	0	0	40.738.419.151	38.086.858.009	0	0	0	38.086.858.009	(2.651.561.142)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.718.788.651	0	0	0	40.718.788.651	38.062.073.759	0	0	0	38.062.073.759	(2.656.714.892)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.643.500	0	0	0	4.643.500	4.643.500	0	0	0	4.643.500	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.987.000	0	0	0	14.987.000	20.140.750	0	0	0	20.140.750	5.153.750
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.132.000	0	0	0	54.132.000	54.132.000	0	0	0	54.132.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.400.000	0	0	0	19.400.000	19.400.000	0	0	0	19.400.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.732.000	0	0	0	34.732.000	34.732.000	0	0	0	34.732.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.456.342.740	30.266.000	0	0	2.486.608.740	2.369.931.740	30.266.000	0	0	2.400.197.740	(86.411.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163.972.500	0	0	0	163.972.500	163.972.500	0	0	0	163.972.500	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.204.008.990	0	0	0	1.204.008.990	1.204.008.990	0	0	0	1.204.008.990	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.152.500	30.266.000	0	0	142.418.500	109.527.500	30.266.000	0	0	139.793.500	(2.625.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	430.542.500	0	0	0	430.542.500	421.542.500	0	0	0	421.542.500	(9.000.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.432.250	0	0	0	143.432.250	140.432.250	0	0	0	140.432.250	(3.000.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.124.000	0	0	0	28.124.000	27.919.000	0	0	0	27.919.000	(205.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000	(2.650.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.110.000	0	0	0	369.110.000	300.179.000	0	0	0	300.179.000	(68.931.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.293.000	582.927.640	0	0	627.220.640	44.293.000	565.005.640	0	0	609.298.640	(17.922.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.293.000	582.927.640	0	0	627.220.640	44.293.000	565.005.640	0	0	609.298.640	(17.922.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.700.223.242	0	0	0	7.700.223.242	7.709.933.242	0	0	0	7.709.933.242	9.710.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.910.000	0	0	0	8.910.000	8.910.000	0	0	0	8.910.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.242.880.300	0	0	0	1.242.880.300	1.223.680.300	0	0	0	1.223.680.300	(19.200.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.029.395.000	0	0	0	2.029.395.000	2.029.395.000	0	0	0	2.029.395.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.419.037.942	0	0	0	4.419.037.942	4.447.947.942	0	0	0	4.447.947.942	28.910.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.984.126.259	3.881.896.877	0	0	7.866.023.136	3.636.850.109	3.709.747.877	0	0	7.346.597.986	(519.425.150)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	934.538.800	0	0	0	934.538.800	901.396.400	0	0	0	901.396.400	(33.142.400)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.497.528.459	3.881.896.877	0	0	6.379.425.336	2.149.048.459	3.709.747.877	0	0	5.858.796.336	(520.629.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	531.219.000	0	0	0	531.219.000	565.565.250	0	0	0	565.565.250	34.346.250
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.840.000	0	0	0	20.840.000	20.840.000	0	0	0	20.840.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)					
		Belanja					Belanja										
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.566.053.200	0	0	0	4.566.053.200	4.010.043.200	0	0	0	4.010.043.200	(556.010.000)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.566.053.200	0	0	0	4.566.053.200	4.010.043.200	0	0	0	4.010.043.200	(556.010.000)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.490.115.200	0	0	0	2.490.115.200	2.020.655.200	0	0	0	2.020.655.200	(469.460.000)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.332.240.000	0	0	0	1.332.240.000	1.351.770.000	0	0	0	1.351.770.000	19.530.000
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	02	1.02	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	743.698.000	0	0	0	743.698.000	637.618.000	0	0	0	637.618.000	(106.080.000)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.911.000	0	0	0	2.911.000	2.911.000	0	0	0	2.911.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	0	0	0	2.911.000	2.911.000	0	0	0	2.911.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	0	0	0	2.911.000	2.911.000	0	0	0	2.911.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.661.629.500	50.750.000	0	0	24.712.379.500	24.118.664.725	50.750.000	0	0	24.169.414.725	(542.964.775)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.908.747.700	0	0	0	3.908.747.700	3.852.549.700	0	0	0	3.852.549.700	(56.198.000)
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	01		Penyediaan Permakanan	2.085.330.000	0	0	0	2.085.330.000	2.085.330.000	0	0	0	2.085.330.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	02		Penyediaan Sandang	244.610.000	0	0	0	244.610.000	244.610.000	0	0	0	244.610.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	03		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	259.063.000	0	0	0	259.063.000	259.063.000	0	0	0	259.063.000	0
1 06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	05		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	287.917.500	0	0	0	287.917.500	287.917.500	0	0	0	287.917.500	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	919.512.200	0	0	0	919.512.200	902.914.200	0	0	0	902.914.200	(16.598.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	37.200.000	0	0	0	37.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(36.000.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.915.000	0	0	0	40.915.000	37.315.000	0	0	0	37.315.000	(3.600.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.000.000	0	0	0	33.000.000	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.206.819.600	0	0	0	3.206.819.600	3.111.416.600	0	0	0	3.111.416.600	(95.403.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	01	Pengasuhan	270.030.000	0	0	0	270.030.000	270.030.000	0	0	0	270.030.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	1.555.878.000	0	0	0	1.555.878.000	1.555.878.000	0	0	0	1.555.878.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	345.688.500	0	0	0	345.688.500	345.478.500	0	0	0	345.478.500	(210.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	254.633.100	0	0	0	254.633.100	253.793.100	0	0	0	253.793.100	(840.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	284.332.000	0	0	0	284.332.000	238.157.000	0	0	0	238.157.000	(46.175.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	391.093.000	0	0	0	391.093.000	391.093.000	0	0	0	391.093.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.985.000	0	0	0	21.985.000	1.515.000	0	0	0	1.515.000	(20.470.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72.280.000	0	0	0	72.280.000	44.572.000	0	0	0	44.572.000	(27.708.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	10.900.000	0	0	0	10.900.000	10.900.000	0	0	0	10.900.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.488.171.000	0	0	0	5.488.171.000	5.474.451.000	0	0	0	5.474.451.000	(13.720.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	3.772.000.000	0	0	0	3.772.000.000	3.772.000.000	0	0	0	3.772.000.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	201.850.000	0	0	0	201.850.000	201.850.000	0	0	0	201.850.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	172.906.500	0	0	0	172.906.500	172.906.500	0	0	0	172.906.500	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	552.067.000	0	0	0	552.067.000	546.747.000	0	0	0	546.747.000	(5.320.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	677.357.500	0	0	0	677.357.500	677.357.500	0	0	0	677.357.500	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.780.000	0	0	0	27.780.000	27.780.000	0	0	0	27.780.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.240.000	0	0	0	16.240.000	7.840.000	0	0	0	7.840.000	(8.400.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.03	12	Pemulasaraan	67.970.000	0	0	0	67.970.000	67.970.000	0	0	0	67.970.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	5.003.691.000	50.750.000	0	0	5.054.441.000	4.947.671.000	50.750.000	0	0	4.998.421.000	(56.020.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	2.826.540.000	0	0	0	2.826.540.000	2.826.540.000	0	0	0	2.826.540.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	1.053.199.000	0	0	0	1.053.199.000	1.053.199.000	0	0	0	1.053.199.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.369.500	0	0	0	9.369.500	9.369.500	0	0	0	9.369.500	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	327.905.000	0	0	0	327.905.000	297.885.000	0	0	0	297.885.000	(30.020.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	267.120.000	0	0	0	267.120.000	267.120.000	0	0	0	267.120.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	414.757.500	0	0	0	414.757.500	414.757.500	0	0	0	414.757.500	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	81.400.000	50.750.000	0	0	132.150.000	61.400.000	50.750.000	0	0	112.150.000	(20.000.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	23.400.000	0	0	0	23.400.000	17.400.000	0	0	0	17.400.000	(6.000.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.054.200.200	0	0	0	7.054.200.200	6.732.576.425	0	0	0	6.732.576.425	(321.623.775)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	2.939.125.000	0	0	0	2.939.125.000	2.748.371.225	0	0	0	2.748.371.225	(190.753.775)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	543.130.900	0	0	0	543.130.900	543.130.900	0	0	0	543.130.900	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	26.698.500	0	0	0	26.698.500	26.698.500	0	0	0	26.698.500	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	530.714.500	0	0	0	530.714.500	527.514.500	0	0	0	527.514.500	(3.200.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.263.183.000	0	0	0	1.263.183.000	1.175.838.000	0	0	0	1.175.838.000	(87.345.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	584.072.000	0	0	0	584.072.000	584.072.000	0	0	0	584.072.000	0
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	962.687.050	0	0	0	962.687.050	954.182.050	0	0	0	954.182.050	(8.505.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	6.000.000	0	0	0	6.000.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	(1.500.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.290.000	0	0	0	14.290.000	14.290.000	0	0	0	14.290.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	178.299.250	0	0	0	178.299.250	148.779.250	0	0	0	148.779.250	(29.520.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	6.000.000	0	0	0	6.000.000	5.200.000	0	0	0	5.200.000	(800.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.549.202.000	0	0	0	3.549.202.000	10.435.636.000	0	0	0	10.435.636.000	6.886.434.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	333.946.000	0	0	0	333.946.000	201.472.000	0	0	0	201.472.000	(132.474.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	316.930.000	0	0	0	316.930.000	184.456.000	0	0	0	184.456.000	(132.474.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.016.000	0	0	0	17.016.000	17.016.000	0	0	0	17.016.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.215.256.000	0	0	0	3.215.256.000	10.234.164.000	0	0	0	10.234.164.000	7.018.908.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	0	0	7.495.356.000	0	0	0	7.495.356.000	7.495.356.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.215.256.000	0	0	0	3.215.256.000	2.738.808.000	0	0	0	2.738.808.000	(476.448.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.517.799.000	4.786.000	0	0	2.522.585.000	1.867.038.000	0	0	0	1.867.038.000	(655.547.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.517.799.000	4.786.000	0	0	2.522.585.000	1.867.038.000	0	0	0	1.867.038.000	(655.547.000)
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	131.250.000	0	0	0	131.250.000	131.250.000	0	0	0	131.250.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	32.250.000	0	0	0	32.250.000	32.250.000	0	0	0	32.250.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	56.760.000	0	0	0	56.760.000	56.760.000	0	0	0	56.760.000	0
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	442.620.000	0	0	0	442.620.000	442.620.000	0	0	0	442.620.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.854.919.000	4.786.000	0	0	1.859.705.000	1.204.158.000	0	0	0	1.204.158.000	(655.547.000)
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	366.450.000	0	0	0	366.450.000	381.450.000	0	0	0	381.450.000	15.000.000
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	0	0	0	366.450.000	381.450.000	0	0	0	381.450.000	15.000.000
1	06	1.06.2.22.0.00.01.0000	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	0	0	0	366.450.000	381.450.000	0	0	0	381.450.000	15.000.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	845.993.008.627	178.319.731.160	0	0	1.024.312.739.787	805.123.675.139	124.886.108.554	0	0	930.009.783.693	(94.302.956.094)
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	48.815.923.351	1.217.910.000	0	0	50.033.833.351	44.434.898.869	1.248.386.000	0	0	45.683.284.869	(4.350.548.482)
3	32	3.32.2.07.2.22.02.0000				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.815.923.351	1.217.910.000	0	0	50.033.833.351	44.434.898.869	1.248.386.000	0	0	45.683.284.869	(4.350.548.482)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.259.615.351	1.207.910.000	0	0	33.467.525.351	30.220.105.369	1.238.386.000	0	0	31.458.491.369	(2.009.033.982)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.000.000	0	0	0	283.000.000	156.161.000	0	0	0	156.161.000	(126.839.000)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	0	0	0	200.000.000	88.555.000	0	0	0	88.555.000	(111.445.000)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.000.000	0	0	0	83.000.000	67.606.000	0	0	0	67.606.000	(15.394.000)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.161.210.201	0	0	0	26.161.210.201	25.031.787.519	0	0	0	25.031.787.519	(1.129.422.682)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.996.270.201	0	0	0	25.996.270.201	24.869.937.519	0	0	0	24.869.937.519	(1.126.332.682)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.940.000	0	0	0	134.940.000	134.940.000	0	0	0	134.940.000	0
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	0	0	0	30.000.000	26.910.000	0	0	0	26.910.000	(3.090.000)
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.256.000	0	0	0	14.256.000	14.256.000	0	0	0	14.256.000	0
2	07	3.32.2.07.2.22.02.0000	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.256.000	0	0	0	14.256.000	14.256.000	0	0	0	14.256.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.278.400	1.134.274.000	0	0	1.893.552.400	399.146.400	1.162.693.000	0	0	1.561.839.400	(331.713.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.735.900	0	0	0	44.735.900	44.735.900	0	0	0	44.735.900	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.394.000	1.132.447.000	0	0	1.140.841.000	7.914.000	1.160.866.000	0	0	1.168.780.000	27.939.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.183.000	1.602.000	0	0	24.785.000	23.183.000	1.602.000	0	0	24.785.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.736.500	0	0	0	49.736.500	47.236.500	0	0	0	47.236.500	(2.500.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.528.000	225.000	0	0	27.753.000	27.528.000	225.000	0	0	27.753.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.894.000	0	0	0	546.894.000	189.742.000	0	0	0	189.742.000	(357.152.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.807.000	0	0	0	58.807.000	58.807.000	0	0	0	58.807.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	73.636.000	0	0	73.636.000	0	75.693.000	0	0	75.693.000	2.057.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	73.636.000	0	0	73.636.000	0	75.693.000	0	0	75.693.000	2.057.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.550.050	0	0	0	3.528.550.050	3.267.785.550	0	0	0	3.267.785.550	(260.764.500)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.132.000	0	0	0	67.132.000	67.132.000	0	0	0	67.132.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	860.313.050	0	0	0	860.313.050	705.116.550	0	0	0	705.116.550	(155.196.500)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.601.105.000	0	0	0	2.601.105.000	2.495.537.000	0	0	0	2.495.537.000	(105.568.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.513.320.700	0	0	0	1.513.320.700	1.350.968.900	0	0	0	1.350.968.900	(162.351.800)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.111.000	0	0	0	27.111.000	27.111.000	0	0	0	27.111.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	833.537.700	0	0	0	833.537.700	697.435.900	0	0	0	697.435.900	(136.101.800)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	33.850.000	0	0	0	33.850.000	33.850.000	0	0	0	33.850.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.740.000	0	0	0	187.740.000	187.740.000	0	0	0	187.740.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.200.000	0	0	0	350.200.000	323.950.000	0	0	0	323.950.000	(26.250.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.442.000	0	0	0	18.442.000	18.442.000	0	0	0	18.442.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.440.000	0	0	0	62.440.000	62.440.000	0	0	0	62.440.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	348.830.000	0	0	0	348.830.000	506.447.000	0	0	0	506.447.000	157.617.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	348.830.000	0	0	0	348.830.000	506.447.000	0	0	0	506.447.000	157.617.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	348.830.000	0	0	0	348.830.000	506.447.000	0	0	0	506.447.000	157.617.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9.334.304.000	0	0	0	9.334.304.000	7.868.780.000	0	0	0	7.868.780.000	(1.465.524.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	9.284.304.000	0	0	0	9.284.304.000	7.837.150.000	0	0	0	7.837.150.000	(1.447.154.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	9.284.304.000	0	0	0	9.284.304.000	7.837.150.000	0	0	0	7.837.150.000	(1.447.154.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	0	0	0	50.000.000	31.630.000	0	0	0	31.630.000	(18.370.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	0	0	0	50.000.000	31.630.000	0	0	0	31.630.000	(18.370.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.857.019.000	0	0	0	4.857.019.000	3.940.041.000	0	0	0	3.940.041.000	(916.978.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.326.800.000	0	0	0	4.326.800.000	3.694.640.000	0	0	0	3.694.640.000	(632.160.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	4.326.800.000	0	0	0	4.326.800.000	3.694.640.000	0	0	0	3.694.640.000	(632.160.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.055.000	0	0	0	34.055.000	28.663.000	0	0	0	28.663.000	(5.392.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	34.055.000	0	0	0	34.055.000	28.663.000	0	0	0	28.663.000	(5.392.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	445.764.000	0	0	0	445.764.000	166.338.000	0	0	0	166.338.000	(279.426.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	112.200.000	0	0	0	112.200.000	91.468.000	0	0	0	91.468.000	(20.732.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	333.564.000	0	0	0	333.564.000	74.870.000	0	0	0	74.870.000	(258.694.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	50.400.000	0	0	0	50.400.000	50.400.000	0	0	0	50.400.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.400.000	0	0	0	50.400.000	50.400.000	0	0	0	50.400.000	0
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	680.300.000	0	0	0	680.300.000	693.048.000	0	0	0	693.048.000	12.748.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	390.300.000	0	0	0	390.300.000	391.614.000	0	0	0	391.614.000	1.314.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	285.660.000	0	0	0	285.660.000	294.665.000	0	0	0	294.665.000	9.005.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	104.640.000	0	0	0	104.640.000	96.949.000	0	0	0	96.949.000	(7.691.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	290.000.000	0	0	0	290.000.000	301.434.000	0	0	0	301.434.000	11.434.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	189.268.000	0	0	0	189.268.000	154.518.000	0	0	0	154.518.000	(34.750.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 05 1.03 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100.732.000	0	0	0	100.732.000	146.916.000	0	0	0	146.916.000	46.184.000
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.335.855.000	10.000.000	0	0	1.345.855.000	1.206.477.500	10.000.000	0	0	1.216.477.500	(129.377.500)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.335.855.000	10.000.000	0	0	1.345.855.000	1.206.477.500	10.000.000	0	0	1.216.477.500	(129.377.500)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	710.000.000	0	0	0	710.000.000	625.187.000	0	0	0	625.187.000	(84.813.000)
2 07 3.32.2.07.2.22.02.0000 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	625.855.000	10.000.000	0	0	635.855.000	581.290.500	10.000.000	0	0	591.290.500	(44.564.500)
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.507.714.519	0	0	0	12.507.714.519	12.073.270.599	0	0	0	12.073.270.599	(434.443.920)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	12.507.714.519	0	0	0	12.507.714.519	12.073.270.599	0	0	0	12.073.270.599	(434.443.920)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.477.137.769	0	0	0	8.477.137.769	8.284.010.849	0	0	0	8.284.010.849	(193.126.920)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.400.000	0	0	0	60.400.000	56.475.000	0	0	0	56.475.000	(3.925.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.400.000	0	0	0	44.400.000	42.100.000	0	0	0	42.100.000	(2.300.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	0	0	0	16.000.000	14.375.000	0	0	0	14.375.000	(1.625.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.142.569.069	0	0	0	6.142.569.069	6.229.119.149	0	0	0	6.229.119.149	86.550.080
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.119.126.069	0	0	0	6.119.126.069	6.205.676.149	0	0	0	6.205.676.149	86.550.080

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.443.000	0	0	0	23.443.000	23.443.000	0	0	0	23.443.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.948.500	0	0	0	359.948.500	124.990.500	0	0	0	124.990.500	(234.958.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.780.000	0	0	0	10.780.000	10.780.000	0	0	0	10.780.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.446.000	0	0	0	17.446.000	17.446.000	0	0	0	17.446.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.151.500	0	0	0	26.151.500	26.151.500	0	0	0	26.151.500	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.971.000	0	0	0	298.971.000	64.013.000	0	0	0	64.013.000	(234.958.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.447.200	0	0	0	1.302.447.200	1.302.447.200	0	0	0	1.302.447.200	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	242.568.000	0	0	0	242.568.000	242.568.000	0	0	0	242.568.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.430.700	0	0	0	277.430.700	277.430.700	0	0	0	277.430.700	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.448.500	0	0	0	782.448.500	782.448.500	0	0	0	782.448.500	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.773.000	0	0	0	611.773.000	570.979.000	0	0	0	570.979.000	(40.794.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288.819.000	0	0	0	288.819.000	248.025.000	0	0	0	248.025.000	(40.794.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	0	0	0	27.250.000	27.250.000	0	0	0	27.250.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.000.000	0	0	0	191.000.000	191.000.000	0	0	0	191.000.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.704.000	0	0	0	104.704.000	104.704.000	0	0	0	104.704.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.458.643.000	0	0	0	1.458.643.000	1.394.005.500	0	0	0	1.394.005.500	(64.637.500)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	135.583.250	0	0	0	135.583.250	278.674.000	0	0	0	278.674.000	143.090.750
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	123.381.250	0	0	0	123.381.250	266.472.000	0	0	0	266.472.000	143.090.750
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	12.202.000	0	0	0	12.202.000	12.202.000	0	0	0	12.202.000	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.037.929.750	0	0	0	1.037.929.750	913.667.500	0	0	0	913.667.500	(124.262.250)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	507.930.000	0	0	0	507.930.000	541.734.000	0	0	0	541.734.000	33.804.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	529.999.750	0	0	0	529.999.750	371.933.500	0	0	0	371.933.500	(158.066.250)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	285.130.000	0	0	0	285.130.000	201.664.000	0	0	0	201.664.000	(83.466.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	234.580.000	0	0	0	234.580.000	152.014.000	0	0	0	152.014.000	(82.566.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.550.000	0	0	0	50.550.000	49.650.000	0	0	0	49.650.000	(900.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.176.324.000	0	0	0	1.176.324.000	1.057.724.000	0	0	0	1.057.724.000	(118.600.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.272.000	0	0	0	108.272.000	91.435.000	0	0	0	91.435.000	(16.837.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	28.735.000	0	0	0	28.735.000	28.735.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	108.272.000	0	0	0	108.272.000	62.700.000	0	0	0	62.700.000	(45.572.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	866.522.000	0	0	0	866.522.000	822.227.000	0	0	0	822.227.000	(44.295.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	866.522.000	0	0	0	866.522.000	643.300.000	0	0	0	643.300.000	(223.222.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	178.927.000	0	0	0	178.927.000	178.927.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	201.530.000	0	0	0	201.530.000	144.062.000	0	0	0	144.062.000	(57.468.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	201.530.000	0	0	0	201.530.000	144.062.000	0	0	0	144.062.000	(57.468.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	821.391.250	0	0	0	821.391.250	819.493.750	0	0	0	819.493.750	(1.897.500)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	628.523.000	0	0	0	628.523.000	626.625.500	0	0	0	626.625.500	(1.897.500)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	42.075.000	0	0	0	42.075.000	16.182.500	0	0	0	16.182.500	(25.892.500)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	586.448.000	0	0	0	586.448.000	610.443.000	0	0	0	610.443.000	23.995.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	0	0	0	192.868.250	192.868.250	0	0	0	192.868.250	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	0	0	0	192.868.250	192.868.250	0	0	0	192.868.250	0
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	247.942.500	0	0	0	247.942.500	154.198.500	0	0	0	154.198.500	(93.744.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	247.942.500	0	0	0	247.942.500	154.198.500	0	0	0	154.198.500	(93.744.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	82.000.000	0	0	0	82.000.000	60.150.000	0	0	0	60.150.000	(21.850.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 05 1.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	165.942.500	0	0	0	165.942.500	94.048.500	0	0	0	94.048.500	(71.894.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	326.276.000	0	0	0	326.276.000	296.048.000	0	0	0	296.048.000	(30.228.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	145.193.000	0	0	0	145.193.000	60.353.000	0	0	0	60.353.000	(84.840.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	33.050.000	0	0	0	33.050.000	20.250.000	0	0	0	20.250.000	(12.800.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	112.143.000	0	0	0	112.143.000	40.103.000	0	0	0	40.103.000	(72.040.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	181.083.000	0	0	0	181.083.000	235.695.000	0	0	0	235.695.000	54.612.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	70.973.000	0	0	0	70.973.000	43.085.000	0	0	0	43.085.000	(27.888.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	73.955.000	0	0	0	73.955.000	163.955.000	0	0	0	163.955.000	90.000.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 06 1.02 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36.155.000	0	0	0	36.155.000	28.655.000	0	0	0	28.655.000	(7.500.000)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	0	0	0	0	67.790.000	0	0	0	67.790.000	67.790.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	23.495.000	0	0	0	23.495.000	23.495.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	23.495.000	0	0	0	23.495.000	23.495.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	44.295.000	0	0	0	44.295.000	44.295.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000 07 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	44.295.000	0	0	0	44.295.000	44.295.000
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.017.196.000	0	0	0	2.017.196.000	1.671.134.250	0	0	0	1.671.134.250	(346.061.750)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.017.196.000	0	0	0	2.017.196.000	1.671.134.250	0	0	0	1.671.134.250	(346.061.750)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	340.000.000	0	0	0	340.000.000	309.615.500	0	0	0	309.615.500	(30.384.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	340.000.000	0	0	0	340.000.000	309.615.500	0	0	0	309.615.500	(30.384.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	340.000.000	0	0	0	340.000.000	309.615.500	0	0	0	309.615.500	(30.384.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.014.669.000	0	0	0	1.014.669.000	726.138.000	0	0	0	726.138.000	(288.531.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	421.976.000	0	0	0	421.976.000	399.716.000	0	0	0	399.716.000	(22.260.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	197.780.000	0	0	0	197.780.000	189.220.000	0	0	0	189.220.000	(8.560.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	114.899.000	0	0	0	114.899.000	101.649.000	0	0	0	101.649.000	(13.250.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	109.297.000	0	0	0	109.297.000	108.847.000	0	0	0	108.847.000	(450.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	592.693.000	0	0	0	592.693.000	326.422.000	0	0	0	326.422.000	(266.271.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	592.693.000	0	0	0	592.693.000	326.422.000	0	0	0	326.422.000	(266.271.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	506.483.000	0	0	0	506.483.000	497.747.500	0	0	0	497.747.500	(8.735.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	85.973.000	0	0	0	85.973.000	77.737.500	0	0	0	77.737.500	(8.235.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	85.973.000	0	0	0	85.973.000	77.737.500	0	0	0	77.737.500	(8.235.500)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	420.510.000	0	0	0	420.510.000	420.010.000	0	0	0	420.010.000	(500.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	420.510.000	0	0	0	420.510.000	420.010.000	0	0	0	420.010.000	(500.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	156.044.000	0	0	0	156.044.000	137.633.250	0	0	0	137.633.250	(18.410.750)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.044.000	0	0	0	156.044.000	137.633.250	0	0	0	137.633.250	(18.410.750)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36.940.000	0	0	0	36.940.000	35.940.000	0	0	0	35.940.000	(1.000.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.585.250	0	0	0	77.585.250	67.955.250	0	0	0	67.955.250	(9.630.000)
2 09 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.518.750	0	0	0	41.518.750	33.738.000	0	0	0	33.738.000	(7.780.750)
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.944.425.000	75.526.000	0	0	7.019.951.000	5.479.778.466	75.526.000	0	0	5.555.304.466	(1.464.646.534)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	6.544.425.000	75.526.000	0	0	6.619.951.000	5.126.616.466	75.526.000	0	0	5.202.142.466	(1.417.808.534)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	34.400.000	0	0	0	34.400.000	34.400.000	0	0	0	34.400.000	0
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	34.400.000	0	0	0	34.400.000	34.400.000	0	0	0	34.400.000	0
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 1.01 01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	34.400.000	0	0	0	34.400.000	34.400.000	0	0	0	34.400.000	0
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.510.025.000	75.526.000	0	0	6.585.551.000	5.092.216.466	75.526.000	0	0	5.167.742.466	(1.417.808.534)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	6.510.025.000	75.526.000	0	0	6.585.551.000	5.092.216.466	75.526.000	0	0	5.167.742.466	(1.417.808.534)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	835.650.000	0	0	0	835.650.000	967.841.000	0	0	0	967.841.000	132.191.000
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	514.039.000	0	0	0	514.039.000	(685.961.000)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	300.000.000	0	0	0	300.000.000	304.300.000	0	0	0	304.300.000	4.300.000
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	212.486.000	0	0	0	212.486.000	(287.514.000)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	580.000.000	0	0	0	580.000.000	204.933.000	0	0	0	204.933.000	(375.067.000)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	1.114.250.000	0	0	0	1.114.250.000	928.288.466	0	0	0	928.288.466	(185.961.534)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.055.461.000	0	0	0	1.055.461.000	1.085.436.000	0	0	0	1.085.436.000	29.975.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	620.190.000	0	0	0	620.190.000	570.419.000	0	0	0	570.419.000	(49.771.000)
2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 1.01 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	4.474.000	75.526.000	0	0	80.000.000	4.474.000	75.526.000	0	0	80.000.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	400.000.000	0	0	0	400.000.000	353.162.000	0	0	0	353.162.000	(46.838.000)
2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	400.000.000	0	0	0	400.000.000	353.162.000	0	0	0	353.162.000	(46.838.000)
2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 1.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	400.000.000	0	0	0	400.000.000	353.162.000	0	0	0	353.162.000	(46.838.000)
2 10 4.01.2.10.1.03.01.0000 11 1.01 09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	400.000.000	0	0	0	400.000.000	353.162.000	0	0	0	353.162.000	(46.838.000)
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	60.618.787.838	9.521.709.500	0	0	70.140.497.338	56.312.400.880	9.430.542.000	0	0	65.742.942.880	(4.397.554.458)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	60.618.787.838	9.521.709.500	0	0	70.140.497.338	56.312.400.880	9.430.542.000	0	0	65.742.942.880	(4.397.554.458)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.566.406.741	536.751.000	0	0	46.103.157.741	42.234.264.283	559.735.000	0	0	42.793.999.283	(3.309.158.458)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	309.991.000	0	0	0	309.991.000	274.691.000	0	0	0	274.691.000	(35.300.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.993.000	0	0	0	160.993.000	135.593.000	0	0	0	135.593.000	(25.400.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.998.000	0	0	0	148.998.000	139.098.000	0	0	0	139.098.000	(9.900.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.827.431.641	0	0	0	40.827.431.641	38.536.062.391	0	0	0	38.536.062.391	(2.291.369.250)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.936.253.641	0	0	0	39.936.253.641	37.644.884.391	0	0	0	37.644.884.391	(2.291.369.250)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.118.000	0	0	0	862.118.000	862.118.000	0	0	0	862.118.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	0	0	0	2.090.000	2.090.000	0	0	0	2.090.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.970.000	0	0	0	26.970.000	26.970.000	0	0	0	26.970.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.297.000	0	0	0	813.297.000	419.669.000	0	0	0	419.669.000	(393.628.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.254.000	0	0	0	30.254.000	30.254.000	0	0	0	30.254.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.920.000	0	0	0	97.920.000	97.920.000	0	0	0	97.920.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.673.000	0	0	0	20.673.000	20.673.000	0	0	0	20.673.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.070.000	0	0	0	92.070.000	92.070.000	0	0	0	92.070.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.880.000	0	0	0	564.880.000	171.252.000	0	0	0	171.252.000	(393.628.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.984.000	536.751.000	0	0	559.735.000	0	559.735.000	0	0	559.735.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.984.000	536.751.000	0	0	559.735.000	0	559.735.000	0	0	559.735.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.257.025	0	0	0	849.257.025	871.761.692	0	0	0	871.761.692	22.504.667
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	0	0	0	7.320.000	7.320.000	0	0	0	7.320.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.497.025	0	0	0	646.497.025	669.001.692	0	0	0	669.001.692	22.504.667
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	0	0	0	195.440.000	195.440.000	0	0	0	195.440.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.743.446.075	0	0	0	2.743.446.075	2.132.080.200	0	0	0	2.132.080.200	(611.365.875)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	0	0	0	17.239.000	17.239.000	0	0	0	17.239.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	801.627.200	0	0	0	801.627.200	774.138.200	0	0	0	774.138.200	(27.489.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.510.000	0	0	0	182.510.000	182.510.000	0	0	0	182.510.000	0
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.742.069.875	0	0	0	1.742.069.875	1.158.193.000	0	0	0	1.158.193.000	(583.876.875)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	447.699.250	0	0	0	447.699.250	411.944.250	0	0	0	411.944.250	(35.755.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	447.699.250	0	0	0	447.699.250	411.944.250	0	0	0	411.944.250	(35.755.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	447.699.250	0	0	0	447.699.250	411.944.250	0	0	0	411.944.250	(35.755.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	784.635.000	2.578.451.000	0	0	3.363.086.000	751.922.500	2.477.012.500	0	0	3.228.935.000	(134.151.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	254.271.000	0	0	0	254.271.000	151.866.000	2.413.400.000	0	0	2.565.266.000	2.310.995.000
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	254.271.000	0	0	0	254.271.000	151.866.000	0	0	0	151.866.000	(102.405.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0	0	0	0	0	0	2.413.400.000	0	0	2.413.400.000	2.413.400.000
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	530.364.000	2.578.451.000	0	0	3.108.815.000	600.056.500	63.612.500	0	0	663.669.000	(2.445.146.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	530.364.000	2.578.451.000	0	0	3.108.815.000	600.056.500	63.612.500	0	0	663.669.000	(2.445.146.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.831.691.500	0	0	0	1.831.691.500	1.737.031.500	0	0	1.737.031.500	(94.660.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.831.691.500	0	0	0	1.831.691.500	1.737.031.500	0	0	1.737.031.500	(94.660.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	261.175.000	0	0	0	261.175.000	261.175.000	0	0	261.175.000	0	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.549.936.500	0	0	0	1.549.936.500	1.475.856.500	0	0	1.475.856.500	(74.080.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20.580.000	0	0	0	20.580.000	0	0	0	0	(20.580.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	319.846.000	0	0	0	319.846.000	196.818.000	0	0	196.818.000	(123.028.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	319.846.000	0	0	0	319.846.000	196.818.000	0	0	196.818.000	(123.028.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	129.206.000	0	0	0	129.206.000	104.288.000	0	0	104.288.000	(24.918.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	140.710.000	0	0	0	140.710.000	65.750.000	0	0	65.750.000	(74.960.000)	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	49.930.000	0	0	0	49.930.000	26.780.000	0	0	26.780.000	(23.150.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	465.558.000	0	0	0	465.558.000	420.279.000	0	0	0	420.279.000	(45.279.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	465.558.000	0	0	0	465.558.000	420.279.000	0	0	0	420.279.000	(45.279.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	465.558.000	0	0	0	465.558.000	420.279.000	0	0	0	420.279.000	(45.279.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.202.951.347	6.406.507.500	0	0	17.609.458.847	10.560.141.347	6.393.794.500	0	0	16.953.935.847	(655.523.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	11.202.951.347	6.406.507.500	0	0	17.609.458.847	10.560.141.347	6.393.794.500	0	0	16.953.935.847	(655.523.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1.298.853.000	0	0	0	1.298.853.000	327.253.000	0	0	0	327.253.000	(971.600.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	9.904.098.347	149.307.500	0	0	10.053.405.847	10.232.888.347	126.594.500	0	0	10.359.482.847	306.077.000
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000 11 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	0	6.257.200.000	0	0	6.257.200.000	0	6.267.200.000	0	0	6.267.200.000	10.000.000
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.653.191.000	64.074.000	0	0	1.717.265.000	598.721.000	0	0	0	598.721.000	(1.118.544.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	1.653.191.000	64.074.000	0	0	1.717.265.000	598.721.000	0	0	0	598.721.000	(1.118.544.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	52.950.000	0	0	0	52.950.000	49.518.000	0	0	0	49.518.000	(3.432.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	52.950.000	0	0	0	52.950.000	49.518.000	0	0	0	49.518.000	(3.432.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	25.450.000	0	0	0	25.450.000	24.868.000	0	0	0	24.868.000	(582.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 02 1.01 04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	27.500.000	0	0	0	27.500.000	24.650.000	0	0	0	24.650.000	(2.850.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	192.738.000	0	0	0	192.738.000	139.142.000	0	0	0	139.142.000	(53.596.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	192.738.000	0	0	0	192.738.000	139.142.000	0	0	0	139.142.000	(53.596.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	192.738.000	0	0	0	192.738.000	139.142.000	0	0	0	139.142.000	(53.596.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.227.503.000	64.074.000	0	0	1.291.577.000	236.161.000	0	0	0	236.161.000	(1.055.416.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	227.872.000	0	0	0	227.872.000	227.636.000	0	0	0	227.636.000	(236.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.000.000	0	0	0	163.000.000	163.890.000	0	0	0	163.890.000	890.000
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15.220.000	0	0	0	15.220.000	14.754.000	0	0	0	14.754.000	(466.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.652.000	0	0	0	49.652.000	48.992.000	0	0	0	48.992.000	(660.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	999.631.000	64.074.000	0	0	1.063.705.000	8.525.000	0	0	0	8.525.000	(1.055.180.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.525.000	0	0	0	8.525.000	(1.475.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	989.631.000	64.074.000	0	0	1.053.705.000	0	0	0	0	0	(1.053.705.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	180.000.000	0	0	0	180.000.000	173.900.000	0	0	0	173.900.000	(6.100.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	180.000.000	0	0	0	180.000.000	173.900.000	0	0	0	173.900.000	(6.100.000)
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	120.000.000	0	0	0	120.000.000	115.550.000	0	0	0	115.550.000	(4.450.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 12 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.000.000	0	0	0	60.000.000	58.350.000	0	0	0	58.350.000	(1.650.000)
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	846.817.000	0	0	0	846.817.000	621.677.500	0	0	0	621.677.500	(225.139.500)
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	846.817.000	0	0	0	846.817.000	621.677.500	0	0	0	621.677.500	(225.139.500)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.928.250	0	0	0	123.928.250	112.269.750	0	0	0	112.269.750	(11.658.500)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	123.928.250	0	0	0	123.928.250	112.269.750	0	0	0	112.269.750	(11.658.500)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	11.178.250	0	0	0	11.178.250	6.319.750	0	0	0	6.319.750	(4.858.500)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GPK	112.750.000	0	0	0	112.750.000	105.950.000	0	0	0	105.950.000	(6.800.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	194.988.250	0	0	0	194.988.250	77.213.250	0	0	0	77.213.250	(117.775.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77.213.250	0	0	0	77.213.250	77.213.250	0	0	0	77.213.250	0
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.01 04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	77.213.250	0	0	0	77.213.250	77.213.250	0	0	0	77.213.250	0
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.775.000	0	0	0	117.775.000	0	0	0	0	0	(117.775.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.775.000	0	0	0	117.775.000	0	0	0	0	0	(117.775.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	527.900.500	0	0	0	527.900.500	432.194.500	0	0	0	432.194.500	(95.706.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	527.900.500	0	0	0	527.900.500	432.194.500	0	0	0	432.194.500	(95.706.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	312.888.750	0	0	0	312.888.750	217.182.750	0	0	0	217.182.750	(95.706.000)
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	98.000.000	0	0	0	98.000.000	98.000.000	0	0	0	98.000.000	0
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	66.725.000	0	0	0	66.725.000	66.725.000	0	0	0	66.725.000	0
2 14 2.08.2.14.2.22.02.0000 04 1.01 07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	50.286.750	0	0	0	50.286.750	50.286.750	0	0	0	50.286.750	0
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	110.213.145.817	3.864.990.000	0	0	114.078.135.817	107.922.954.988	3.821.715.000	0	0	111.744.669.988	(2.333.465.829)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	110.213.145.817	3.864.990.000	0	0	114.078.135.817	107.922.954.988	3.821.715.000	0	0	111.744.669.988	(2.333.465.829)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.366.282.557	465.401.000	0	0	21.831.683.557	19.630.551.728	465.401.000	0	0	20.095.952.728	(1.735.730.829)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.516.000	0	0	0	304.516.000	192.111.300	0	0	0	192.111.300	(112.404.700)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.515.000	0	0	0	246.515.000	134.110.300	0	0	0	134.110.300	(112.404.700)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.845.000	0	0	0	3.845.000	3.845.000	0	0	0	3.845.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000	0	0	0	8.880.000	8.880.000	0	0	0	8.880.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.776.000	0	0	0	34.776.000	34.776.000	0	0	0	34.776.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.527.025.957	0	0	0	16.527.025.957	15.545.833.328	0	0	0	15.545.833.328	(981.192.629)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.920.188.957	0	0	0	13.920.188.957	12.941.546.328	0	0	0	12.941.546.328	(978.642.629)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.542.938.000	0	0	0	2.542.938.000	2.542.938.000	0	0	0	2.542.938.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.284.000	0	0	0	19.284.000	16.734.000	0	0	0	16.734.000	(2.550.000)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.615.000	0	0	0	44.615.000	44.615.000	0	0	0	44.615.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.102.490.500	0	0	0	1.102.490.500	693.949.000	0	0	0	693.949.000	(408.541.500)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.616.000	0	0	0	42.616.000	42.616.000	0	0	0	42.616.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	166.674.000	0	0	0	166.674.000	122.274.000	0	0	0	122.274.000	(44.400.000)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.768.500	0	0	0	122.768.500	96.557.000	0	0	0	96.557.000	(26.211.500)
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	37.836.000	0	0	0	37.836.000	37.836.000	0	0	0	37.836.000	0
2	15	2.15.1.03.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.572.000	0	0	0	542.572.000	204.642.000	0	0	0	204.642.000	(337.930.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160.024.000	0	0	0	160.024.000	160.024.000	0	0	0	160.024.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.085.000	465.401.000	0	0	679.486.000	214.085.000	465.401.000	0	0	679.486.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.085.000	465.401.000	0	0	679.486.000	214.085.000	465.401.000	0	0	679.486.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.471.000	0	0	0	1.729.471.000	1.612.386.000	0	0	0	1.612.386.000	(117.085.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.545.000	0	0	0	11.545.000	11.545.000	0	0	0	11.545.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	711.971.000	0	0	0	711.971.000	618.024.000	0	0	0	618.024.000	(93.947.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.005.955.000	0	0	0	1.005.955.000	982.817.000	0	0	0	982.817.000	(23.138.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.694.100	0	0	0	1.488.694.100	1.372.187.100	0	0	0	1.372.187.100	(116.507.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	605.057.100	0	0	0	605.057.100	490.975.100	0	0	0	490.975.100	(114.082.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371.527.000	0	0	0	371.527.000	369.102.000	0	0	0	369.102.000	(2.425.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.110.000	0	0	0	512.110.000	512.110.000	0	0	0	512.110.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	88.832.763.260	3.399.589.000	0	0	92.232.352.260	88.284.203.260	3.356.314.000	0	0	91.640.517.260	(591.835.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	381.500.000	0	0	0	381.500.000	355.000.000	0	0	0	355.000.000	(26.500.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	381.500.000	0	0	0	381.500.000	355.000.000	0	0	0	355.000.000	(26.500.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.227.033.000	3.099.589.000	0	0	9.326.622.000	6.049.241.000	3.158.314.000	0	0	9.207.555.000	(119.067.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.833.667.000	3.099.589.000	0	0	6.933.256.000	3.830.540.000	3.158.314.000	0	0	6.988.854.000	55.598.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	420.964.000	0	0	0	420.964.000	420.964.000	0	0	0	420.964.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.972.402.000	0	0	0	1.972.402.000	1.797.737.000	0	0	0	1.797.737.000	(174.665.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	985.707.000	0	0	0	985.707.000	836.712.000	0	0	0	836.712.000	(148.995.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	354.467.000	0	0	0	354.467.000	205.472.000	0	0	0	205.472.000	(148.995.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	186.949.000	0	0	0	186.949.000	186.949.000	0	0	0	186.949.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	444.291.000	0	0	0	444.291.000	444.291.000	0	0	0	444.291.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.857.885.000	0	0	0	3.857.885.000	3.930.354.000	0	0	0	3.930.354.000	72.469.000
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.115.754.000	0	0	0	1.115.754.000	1.168.129.000	0	0	0	1.168.129.000	52.375.000
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.605.423.000	0	0	0	1.605.423.000	1.805.403.000	0	0	0	1.805.403.000	199.980.000
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	664.969.000	0	0	0	664.969.000	550.972.000	0	0	0	550.972.000	(113.997.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	445.407.000	0	0	0	445.407.000	389.328.000	0	0	0	389.328.000	(56.079.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	26.332.000	0	0	0	26.332.000	16.522.000	0	0	0	16.522.000	(9.810.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	99.378.000	0	0	0	99.378.000	99.378.000	0	0	0	99.378.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.06 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	99.378.000	0	0	0	99.378.000	99.378.000	0	0	0	99.378.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	411.026.250	300.000.000	0	0	711.026.250	320.544.250	198.000.000	0	0	518.544.250	(192.482.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	238.966.000	300.000.000	0	0	538.966.000	191.626.000	198.000.000	0	0	389.626.000	(149.340.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	142.642.750	0	0	0	142.642.750	106.192.750	0	0	0	106.192.750	(36.450.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	29.417.500	0	0	0	29.417.500	22.725.500	0	0	0	22.725.500	(6.692.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76.431.237.010	0	0	0	76.431.237.010	76.253.977.010	0	0	0	76.253.977.010	(177.260.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.504.714.010	0	0	0	74.504.714.010	74.479.154.010	0	0	0	74.479.154.010	(25.560.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.926.523.000	0	0	0	1.926.523.000	1.774.823.000	0	0	0	1.774.823.000	(151.700.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	438.997.000	0	0	0	438.997.000	438.997.000	0	0	0	438.997.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 02 1.09 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	438.997.000	0	0	0	438.997.000	438.997.000	0	0	0	438.997.000	0
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	14.100.000	0	0	0	14.100.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	(5.900.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	14.100.000	0	0	0	14.100.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	(5.900.000)
2 15 2.15.1.03.0.00.01.0000 05 1.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	14.100.000	0	0	0	14.100.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	(5.900.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.576.373.205	362.042.000	0	0	15.938.415.205	14.347.858.376	337.745.000	0	0	14.685.603.376	(1.252.811.829)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000											
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.576.373.205	362.042.000	0	0	15.938.415.205	14.347.858.376	337.745.000	0	0	14.685.603.376	(1.252.811.829)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.859.114.205	93.428.000	0	0	10.952.542.205	9.856.705.376	69.131.000	0	0	9.925.836.376	(1.026.705.829)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.603.000	24.297.000	0	0	114.900.000	77.903.000	0	0	0	77.903.000	(36.997.000)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	01								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.403.000	24.297.000	0	0	91.700.000	59.303.000	0	0	0	59.303.000	(32.397.000)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.01	07								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.200.000	0	0	0	23.200.000	18.600.000	0	0	0	18.600.000	(4.600.000)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.113.053.705	0	0	0	9.113.053.705	8.347.627.876	0	0	0	8.347.627.876	(765.425.829)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	01								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.959.406.705	0	0	0	8.959.406.705	8.193.980.876	0	0	0	8.193.980.876	(765.425.829)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	02								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.981.000	0	0	0	123.981.000	123.981.000	0	0	0	123.981.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	05								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.680.000	0	0	0	6.680.000	6.680.000	0	0	0	6.680.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	07								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.493.000	0	0	0	11.493.000	11.493.000	0	0	0	11.493.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.02	08								
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.493.000	0	0	0	11.493.000	11.493.000	0	0	0	11.493.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.385.000	0	0	0	441.385.000	246.099.000	0	0	0	246.099.000	(195.286.000)
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	01								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.015.000	0	0	0	6.015.000	6.015.000	0	0	0	6.015.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	02								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.038.000	0	0	0	29.038.000	29.038.000	0	0	0	29.038.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	03								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.571.000	0	0	0	6.571.000	6.571.000	0	0	0	6.571.000	0
2 16	2.16.9.02.2.22.01.0000	01	1.06	05								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.104.000	0	0	0	24.104.000	24.104.000	0	0	0	24.104.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.657.000	0	0	0	375.657.000	180.371.000	0	0	0	180.371.000	(195.286.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	69.131.000	0	0	69.131.000	0	69.131.000	0	0	69.131.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	30.981.000	0	0	30.981.000	0	30.981.000	0	0	30.981.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	38.150.000	0	0	38.150.000	0	38.150.000	0	0	38.150.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.815.500	0	0	0	836.815.500	836.815.500	0	0	0	836.815.500	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	0	0	0	5.310.000	5.310.000	0	0	0	5.310.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.286.000	0	0	0	314.286.000	314.286.000	0	0	0	314.286.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.219.500	0	0	0	517.219.500	517.219.500	0	0	0	517.219.500	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.257.000	0	0	0	377.257.000	348.260.000	0	0	0	348.260.000	(28.997.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.342.000	0	0	0	192.342.000	163.345.000	0	0	0	163.345.000	(28.997.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.220.000	0	0	0	119.220.000	119.220.000	0	0	0	119.220.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.695.000	0	0	0	65.695.000	65.695.000	0	0	0	65.695.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.597.070.000	235.376.000	0	0	3.832.446.000	3.426.349.000	235.376.000	0	0	3.661.725.000	(170.721.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.597.070.000	235.376.000	0	0	3.832.446.000	3.426.349.000	235.376.000	0	0	3.661.725.000	(170.721.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	59.236.250	0	0	0	59.236.250	59.236.250	0	0	0	59.236.250	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	430.513.000	70.432.000	0	0	500.945.000	430.513.000	70.432.000	0	0	500.945.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	76.520.000	0	0	0	76.520.000	72.770.000	0	0	0	72.770.000	(3.750.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	172.502.750	69.362.000	0	0	241.864.750	149.672.750	69.362.000	0	0	219.034.750	(22.830.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.407.583.000	63.682.000	0	0	1.471.265.000	1.407.583.000	63.682.000	0	0	1.471.265.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.390.715.000	31.900.000	0	0	1.422.615.000	1.286.540.000	31.900.000	0	0	1.318.440.000	(104.175.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60.000.000	0	0	0	60.000.000	20.034.000	0	0	0	20.034.000	(39.966.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.120.189.000	33.238.000	0	0	1.153.427.000	1.064.804.000	33.238.000	0	0	1.098.042.000	(55.385.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	549.945.000	0	0	0	549.945.000	549.945.000	0	0	0	549.945.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	549.945.000	0	0	0	549.945.000	549.945.000	0	0	0	549.945.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	570.244.000	33.238.000	0	0	603.482.000	514.859.000	33.238.000	0	0	548.097.000	(55.385.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	71.524.000	7.010.000	0	0	78.534.000	70.324.000	7.010.000	0	0	77.334.000	(1.200.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	139.466.000	14.694.000	0	0	154.160.000	85.281.000	14.694.000	0	0	99.975.000	(54.185.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	61.969.000	0	0	0	61.969.000	61.969.000	0	0	0	61.969.000	0
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	297.285.000	11.534.000	0	0	308.819.000	297.285.000	11.534.000	0	0	308.819.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.442.388.731	957.369.000	0	0	26.399.757.731	24.470.186.959	919.124.000	0	0	25.389.310.959	(1.010.446.772)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000	25.442.388.731	957.369.000	0	0	26.399.757.731	24.470.186.959	919.124.000	0	0	25.389.310.959	(1.010.446.772)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01	8.725.402.031	866.389.000	0	0	9.591.791.031	7.881.638.759	842.889.000	0	0	8.724.527.759	(867.263.272)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01	196.695.000	0	0	0	196.695.000	343.835.000	0	0	0	343.835.000	147.140.000
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01	165.590.000	0	0	0	165.590.000	317.030.000	0	0	0	317.030.000	151.440.000
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 06	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07	26.105.000	0	0	0	26.105.000	21.805.000	0	0	0	21.805.000	(4.300.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02	6.900.041.375	0	0	0	6.900.041.375	6.262.089.603	0	0	0	6.262.089.603	(637.951.772)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01	6.835.921.375	0	0	0	6.835.921.375	6.199.499.603	0	0	0	6.199.499.603	(636.421.772)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 02	53.220.000	0	0	0	53.220.000	53.220.000	0	0	0	53.220.000	0
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07	10.900.000	0	0	0	10.900.000	9.370.000	0	0	0	9.370.000	(1.530.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06	515.826.500	0	0	0	515.826.500	208.541.000	0	0	0	208.541.000	(307.285.500)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05	43.400.500	0	0	0	43.400.500	32.097.000	0	0	0	32.097.000	(11.303.500)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06	8.994.000	0	0	0	8.994.000	8.994.000	0	0	0	8.994.000	0
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09	398.832.000	0	0	0	398.832.000	102.850.000	0	0	0	102.850.000	(295.982.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.000	596.389.000	0	0	596.948.000	1.559.000	572.889.000	0	0	574.448.000	(22.500.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0	200.071.000	0	0	200.071.000	0	200.071.000	0	0	200.071.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.000	198.400.000	0	0	198.959.000	559.000	174.900.000	0	0	175.459.000	(23.500.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	197.918.000	0	0	197.918.000	1.000.000	197.918.000	0	0	198.918.000	1.000.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.286.981	0	0	0	794.286.981	760.170.981	0	0	0	760.170.981	(34.116.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.043.000	0	0	0	47.043.000	44.412.000	0	0	0	44.412.000	(2.631.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.999.981	0	0	0	214.999.981	183.514.981	0	0	0	183.514.981	(31.485.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.244.000	0	0	0	532.244.000	532.244.000	0	0	0	532.244.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.993.175	270.000.000	0	0	587.993.175	305.443.175	270.000.000	0	0	575.443.175	(12.550.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.800	0	0	0	36.999.800	36.999.800	0	0	0	36.999.800	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.635.000	0	0	0	156.635.000	144.085.000	0	0	0	144.085.000	(12.550.000)
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.560.000	0	0	0	21.560.000	21.560.000	0	0	0	21.560.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.813.375	270.000.000	0	0	343.813.375	73.813.375	270.000.000	0	0	343.813.375	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.985.000	0	0	0	28.985.000	28.985.000	0	0	0	28.985.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	267.000.000	0	0	0	267.000.000	624.880.000	0	0	0	624.880.000	357.880.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	267.000.000	0	0	0	267.000.000	624.880.000	0	0	0	624.880.000	357.880.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	267.000.000	0	0	0	267.000.000	624.880.000	0	0	0	624.880.000	357.880.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.182.000	0	0	0	19.182.000	19.182.000	0	0	0	19.182.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.182.000	0	0	0	19.182.000	19.182.000	0	0	0	19.182.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	19.182.000	0	0	0	19.182.000	19.182.000	0	0	0	19.182.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.721.195.000	0	0	0	1.721.195.000	3.723.045.000	255.000	0	0	3.723.300.000	2.002.105.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.721.195.000	0	0	0	1.721.195.000	1.721.195.000	0	0	0	1.721.195.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.721.195.000	0	0	0	1.721.195.000	1.721.195.000	0	0	0	1.721.195.000	0
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	2.001.850.000	255.000	0	0	2.002.105.000	2.002.105.000
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	0	0	0	0	0	2.001.850.000	255.000	0	0	2.002.105.000	2.002.105.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)								
		Belanja					Belanja													
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja									
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 06						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.051.390.000	0	0	0	0	1.051.390.000	854.119.000	0	0	0	0	854.119.000	(197.271.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.051.390.000	0	0	0	0	1.051.390.000	854.119.000	0	0	0	0	854.119.000	(197.271.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 02						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.051.390.000	0	0	0	0	1.051.390.000	854.119.000	0	0	0	0	854.119.000	(197.271.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 07						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.151.888.900	0	0	0	0	4.151.888.900	3.137.558.400	0	0	0	0	3.137.558.400	(1.014.330.500)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01						Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	4.151.888.900	0	0	0	0	4.151.888.900	3.137.558.400	0	0	0	0	3.137.558.400	(1.014.330.500)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 07 1.01 01						Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.151.888.900	0	0	0	0	4.151.888.900	3.137.558.400	0	0	0	0	3.137.558.400	(1.014.330.500)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 08						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.506.330.800	90.980.000	0	0	0	9.597.310.800	8.229.763.800	75.980.000	0	0	0	8.305.743.800	(1.291.567.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01						Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	9.506.330.800	90.980.000	0	0	0	9.597.310.800	8.229.763.800	75.980.000	0	0	0	8.305.743.800	(1.291.567.000)
2 17	2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	9.506.330.800	90.980.000	0	0	0	9.597.310.800	8.229.763.800	75.980.000	0	0	0	8.305.743.800	(1.291.567.000)
2 18							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.214.814.883	246.456.600	0	0	0	12.461.271.483	11.495.192.955	246.456.600	0	0	0	11.741.649.555	(719.621.928)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	12.214.814.883	246.456.600	0	0	12.461.271.483	11.495.192.955	246.456.600	0	0	11.741.649.555	(719.621.928)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.451.910.883	246.456.600	0	0	9.698.367.483	8.744.565.955	246.456.600	0	0	8.991.022.555	(707.344.928)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.448.000	0	0	0	55.448.000	46.448.000	0	0	0	46.448.000	(9.000.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.168.000	0	0	0	40.168.000	40.168.000	0	0	0	40.168.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.280.000	0	0	0	15.280.000	6.280.000	0	0	0	6.280.000	(9.000.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.463.066.983	0	0	0	7.463.066.983	7.282.752.055	0	0	0	7.282.752.055	(180.314.928)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.394.212.983	0	0	0	7.394.212.983	7.213.898.055	0	0	0	7.213.898.055	(180.314.928)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.854.000	0	0	0	48.854.000	48.854.000	0	0	0	48.854.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.590.000	0	0	0	1.035.590.000	525.420.000	0	0	0	525.420.000	(510.170.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.131.000	0	0	0	14.131.000	14.131.000	0	0	0	14.131.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.576.000	0	0	0	35.576.000	39.416.000	0	0	0	39.416.000	3.840.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.640.000	0	0	0	90.640.000	90.640.000	0	0	0	90.640.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.168.000	0	0	0	12.168.000	12.168.000	0	0	0	12.168.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	0	0	0	9.000.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(6.500.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778.922.000	0	0	0	778.922.000	267.412.000	0	0	0	267.412.000	(511.510.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.384.000	0	0	0	32.384.000	36.384.000	0	0	0	36.384.000	4.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	62.769.000	0	0	0	62.769.000	62.769.000	0	0	0	62.769.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	134.265.600	0	0	134.265.600	0	134.265.600	0	0	134.265.600	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	134.265.600	0	0	134.265.600	0	134.265.600	0	0	134.265.600	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.103.000	2.191.000	0	0	664.294.000	654.243.000	2.191.000	0	0	656.434.000	(7.860.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.441.000	2.191.000	0	0	75.632.000	73.441.000	2.191.000	0	0	75.632.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.320.000	0	0	0	109.320.000	101.460.000	0	0	0	101.460.000	(7.860.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.342.000	0	0	0	479.342.000	479.342.000	0	0	0	479.342.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.702.900	110.000.000	0	0	345.702.900	235.702.900	110.000.000	0	0	345.702.900	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.691.500	0	0	0	23.691.500	23.691.500	0	0	0	23.691.500	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.010.400	0	0	0	126.010.400	126.010.400	0	0	0	126.010.400	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	9.500.000	0	0	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.401.000	0	0	0	31.401.000	31.401.000	0	0	0	31.401.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	110.000.000	0	0	150.000.000	40.000.000	110.000.000	0	0	150.000.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.100.000	0	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	472.863.000	0	0	0	472.863.000	472.863.000	0	0	0	472.863.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	472.863.000	0	0	0	472.863.000	472.863.000	0	0	0	472.863.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	472.863.000	0	0	0	472.863.000	472.863.000	0	0	0	472.863.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	776.680.000	0	0	0	776.680.000	758.573.000	0	0	0	758.573.000	(18.107.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	776.680.000	0	0	0	776.680.000	758.573.000	0	0	0	758.573.000	(18.107.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	776.680.000	0	0	0	776.680.000	758.573.000	0	0	0	758.573.000	(18.107.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	784.655.000	0	0	0	784.655.000	697.365.000	0	0	0	697.365.000	(87.290.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	624.655.000	0	0	0	624.655.000	537.365.000	0	0	0	537.365.000	(87.290.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	159.999.000	0	0	0	159.999.000	159.999.000	0	0	0	159.999.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	464.656.000	0	0	0	464.656.000	377.366.000	0	0	0	377.366.000	(87.290.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	500.021.000	0	0	0	500.021.000	500.021.000	0	0	0	500.021.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	500.021.000	0	0	0	500.021.000	500.021.000	0	0	0	500.021.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	127.200.000	0	0	0	127.200.000	46.024.000	0	0	0	46.024.000	(81.176.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.821.000	0	0	0	372.821.000	408.646.000	0	0	0	408.646.000	35.825.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	45.351.000	0	0	0	45.351.000	45.351.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	228.685.000	0	0	0	228.685.000	321.805.000	0	0	0	321.805.000	93.120.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	228.685.000	0	0	0	228.685.000	321.805.000	0	0	0	321.805.000	93.120.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	228.685.000	0	0	0	228.685.000	321.805.000	0	0	0	321.805.000	93.120.000
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	55.432.719.880	118.856.000	0	0	55.551.575.880	63.014.219.575	79.709.000	0	0	63.093.928.575	7.542.352.695
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	55.432.719.880	118.856.000	0	0	55.551.575.880	63.014.219.575	79.709.000	0	0	63.093.928.575	7.542.352.695
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.150.957.130	118.856.000	0	0	9.269.813.130	9.064.469.575	79.709.000	0	0	9.144.178.575	(125.634.555)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.676.402.480	0	0	0	2.676.402.480	2.693.812.925	0	0	0	2.693.812.925	17.410.445
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.676.402.480	0	0	0	2.676.402.480	2.693.812.925	0	0	0	2.693.812.925	17.410.445
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.118.100	118.856.000	0	0	315.974.100	196.636.100	79.709.000	0	0	276.345.100	(39.629.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.000	0	0	0	29.962.000	29.962.000	0	0	0	29.962.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.674.300	118.856.000	0	0	158.530.300	39.674.300	79.709.000	0	0	119.383.300	(39.147.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.137.000	0	0	0	40.137.000	40.137.000	0	0	0	40.137.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.108.800	0	0	0	26.108.800	26.108.800	0	0	0	26.108.800	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.948.000	0	0	0	3.948.000	3.948.000	0	0	0	3.948.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.288.000	0	0	0	57.288.000	56.806.000	0	0	0	56.806.000	(482.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.931.561.050	0	0	0	4.931.561.050	4.931.561.050	0	0	0	4.931.561.050	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.000	0	0	0	430.000	430.000	0	0	0	430.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.862.450	0	0	0	635.862.450	635.862.450	0	0	0	635.862.450	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.295.268.600	0	0	0	4.295.268.600	4.295.268.600	0	0	0	4.295.268.600	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.875.500	0	0	0	1.345.875.500	1.242.459.500	0	0	0	1.242.459.500	(103.416.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.950.000	0	0	0	59.950.000	49.606.000	0	0	0	49.606.000	(10.344.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.117.433.000	0	0	0	1.117.433.000	1.024.361.000	0	0	0	1.024.361.000	(93.072.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.492.500	0	0	0	168.492.500	168.492.500	0	0	0	168.492.500	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.015.672.750	0	0	0	5.015.672.750	4.638.992.000	0	0	0	4.638.992.000	(376.680.750)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.765.672.750	0	0	0	3.765.672.750	3.388.992.000	0	0	0	3.388.992.000	(376.680.750)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.933.901.750	0	0	0	1.933.901.750	1.958.722.000	0	0	0	1.958.722.000	24.820.250

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.831.771.000	0	0	0	1.831.771.000	1.430.270.000	0	0	0	1.430.270.000	(401.501.000)
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	0
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.266.090.000	0	0	0	41.266.090.000	49.310.758.000	0	0	0	49.310.758.000	8.044.668.000
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.266.090.000	0	0	0	5.266.090.000	12.310.758.000	0	0	0	12.310.758.000	7.044.668.000
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5.266.090.000	0	0	0	5.266.090.000	12.310.758.000	0	0	0	12.310.758.000	7.044.668.000
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	36.000.000.000	0	0	0	36.000.000.000	37.000.000.000	0	0	0	37.000.000.000	1.000.000.000
2 19 1.01.2.19.2.22.03.0000 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36.000.000.000	0	0	0	36.000.000.000	37.000.000.000	0	0	0	37.000.000.000	1.000.000.000
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.284.275.997	113.121.000	0	0	2.397.396.997	2.058.186.591	96.657.000	0	0	2.154.843.591	(242.553.406)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.284.275.997	113.121.000	0	0	2.397.396.997	2.058.186.591	96.657.000	0	0	2.154.843.591	(242.553.406)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.836.613.997	113.121.000	0	0	1.949.734.997	1.615.804.591	96.657.000	0	0	1.712.461.591	(237.273.406)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.737.997	0	0	0	1.578.737.997	1.390.389.591	0	0	0	1.390.389.591	(188.348.406)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.555.512.997	0	0	0	1.555.512.997	1.371.364.591	0	0	0	1.371.364.591	(184.148.406)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.225.000	0	0	0	23.225.000	19.025.000	0	0	0	19.025.000	(4.200.000)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.166.000	113.121.000	0	0	218.287.000	71.505.000	96.657.000	0	0	168.162.000	(50.125.000)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.000	113.121.000	0	0	113.400.000	279.000	96.657.000	0	0	96.936.000	(16.464.000)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.887.000	0	0	0	104.887.000	71.226.000	0	0	0	71.226.000	(33.661.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.280.000	0	0	0	95.280.000	96.480.000	0	0	0	96.480.000	1.200.000
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.280.000	0	0	0	95.280.000	96.480.000	0	0	0	96.480.000	1.200.000
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.430.000	0	0	0	57.430.000	57.430.000	0	0	0	57.430.000	0
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.155.000	0	0	0	22.155.000	22.155.000	0	0	0	22.155.000	0
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.275.000	0	0	0	15.275.000	15.275.000	0	0	0	15.275.000	0
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	447.662.000	0	0	0	447.662.000	442.382.000	0	0	0	442.382.000	(5.280.000)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	447.662.000	0	0	0	447.662.000	442.382.000	0	0	0	442.382.000	(5.280.000)
2 20 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	447.662.000	0	0	0	447.662.000	442.382.000	0	0	0	442.382.000	(5.280.000)
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000	(117.253.000)
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000	(117.253.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000	(117.253.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	735.698.000	62.260.000	0	0	797.958.000	636.981.000	62.260.000	0	0	699.241.000	(98.717.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	130.100.000	0	0	0	130.100.000	39.523.000	0	0	0	39.523.000	(90.577.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	267.955.000	0	0	0	267.955.000	265.315.000	0	0	0	265.315.000	(2.640.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.550.000	0	0	0	7.550.000	7.550.000	0	0	0	7.550.000	0
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	330.093.000	62.260.000	0	0	392.353.000	324.593.000	62.260.000	0	0	386.853.000	(5.500.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	287.437.000	762.100.000	0	0	1.049.537.000	268.901.000	762.100.000	0	0	1.031.001.000	(18.536.000)
2 21 2.16.9.02.2.22.01.0000 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	287.437.000	762.100.000	0	0	1.049.537.000	268.901.000	762.100.000	0	0	1.031.001.000	(18.536.000)
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	457.158.968.438	154.419.187.060	0	0	611.578.155.498	428.144.395.600	102.075.575.954	0	0	530.219.971.554	(81.358.183.944)
1 01 1.01.2.19.2.22.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.256.304.000	6.962.696.000	0	0	16.219.000.000	5.201.463.500	6.534.696.000	0	0	11.736.159.500	(4.482.840.500)
2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.256.304.000	6.962.696.000	0	0	16.219.000.000	5.201.463.500	6.534.696.000	0	0	11.736.159.500	(4.482.840.500)
2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10	Pendidikan Berbasis Budaya	9.256.304.000	6.962.696.000	0	0	16.219.000.000	5.201.463.500	6.534.696.000	0	0	11.736.159.500	(4.482.840.500)
2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 01	Pembinaan Muatan Lokal	6.050.000.000	0	0	0	6.050.000.000	2.872.859.500	0	0	0	2.872.859.500	(3.177.140.500)
2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	31.200.000	6.337.800.000	0	0	6.369.000.000	31.200.000	5.909.800.000	0	0	5.941.000.000	(428.000.000)
2 22 1.01.2.19.2.22.03.0000 08 1.10 04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.175.104.000	624.896.000	0	0	3.800.000.000	2.297.404.000	624.896.000	0	0	2.922.300.000	(877.700.000)
1 02 1.02.2.22.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.035.261.800	0	0	0	1.035.261.800	535.261.800
2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.035.261.800	0	0	0	1.035.261.800	535.261.800
2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.035.261.800	0	0	0	1.035.261.800	535.261.800
2 22 1.02.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.035.261.800	0	0	0	1.035.261.800	535.261.800

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	328.697.000	0	0	0	328.697.000	109.464.000	0	0	0	109.464.000	(219.233.000)
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	328.697.000	0	0	0	328.697.000	109.464.000	0	0	0	109.464.000	(219.233.000)
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.05	Pengelolaan Taman Budaya	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.05 01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	328.697.000	0	0	0	328.697.000	9.464.000	0	0	0	9.464.000	(319.233.000)
2 22 1.03.1.04.3.29.13.0000 08 1.08 01	Pengembangan Lumbung Mataraman	328.697.000	0	0	0	328.697.000	9.464.000	0	0	0	9.464.000	(319.233.000)
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	0	0	0	0	0	14.367.100	235.500.000	0	0	249.867.100	249.867.100
2 22 1.03.2.10.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	14.367.100	235.500.000	0	0	249.867.100	249.867.100
2 22 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	0	0	0	0	0	14.367.100	235.500.000	0	0	249.867.100	249.867.100
2 22 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	0	0	0	0	0	14.367.100	235.500.000	0	0	249.867.100	249.867.100
1 05 1.05.9.02.1.03.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.857.000.000	1.143.000.000	0	0	8.000.000.000	9.583.667.600	4.451.640.000	0	0	14.035.307.600	6.035.307.600
2 22 1.05.9.02.1.03.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.857.000.000	1.143.000.000	0	0	8.000.000.000	9.583.667.600	4.451.640.000	0	0	14.035.307.600	6.035.307.600
2 22 1.05.9.02.1.03.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.857.000.000	1.143.000.000	0	0	8.000.000.000	9.583.667.600	4.451.640.000	0	0	14.035.307.600	6.035.307.600
2 22 1.05.9.02.1.03.01.0000 08 1.09 17	Pembinaan Jagawarga	6.857.000.000	1.143.000.000	0	0	8.000.000.000	9.583.667.600	4.451.640.000	0	0	14.035.307.600	6.035.307.600
1 05 1.05.9.02.2.22.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	550.000.000	0	0	0	550.000.000	499.305.000	1.712.500.000	0	0	2.211.805.000	1.661.805.000
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	550.000.000	0	0	0	550.000.000	499.305.000	1.712.500.000	0	0	2.211.805.000	1.661.805.000
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	550.000.000	0	0	0	550.000.000	499.305.000	0	0	0	499.305.000	(50.695.000)
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	550.000.000	0	0	0	550.000.000	499.305.000	0	0	0	499.305.000	(50.695.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	0	0	0	0	0	1.712.500.000	0	0	1.712.500.000	1.712.500.000
2 22 1.05.9.02.2.22.04.0000 08 1.09 23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	0	0	0	0	0	1.712.500.000	0	0	1.712.500.000	1.712.500.000
1 06 1.06.2.22.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	5.868.011.000	46.636.000	0	0	5.914.647.000	2.914.647.000
2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	5.868.011.000	46.636.000	0	0	5.914.647.000	2.914.647.000
2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	5.868.011.000	46.636.000	0	0	5.914.647.000	2.914.647.000
2 22 1.06.2.22.0.00.01.0000 08 1.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	5.868.011.000	46.636.000	0	0	5.914.647.000	2.914.647.000
2 08 2.08.2.14.2.22.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	3.674.911.000	164.539.000	0	0	3.839.450.000	2.686.004.000	285.517.000	0	0	2.971.521.000	(867.929.000)
2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.674.911.000	164.539.000	0	0	3.839.450.000	2.686.004.000	285.517.000	0	0	2.971.521.000	(867.929.000)
2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.674.911.000	164.539.000	0	0	3.839.450.000	2.686.004.000	285.517.000	0	0	2.971.521.000	(867.929.000)
2 22 2.08.2.14.2.22.02.0000 08 1.09 20	Pengembangan Ekonomi Perempuan	3.674.911.000	164.539.000	0	0	3.839.450.000	2.686.004.000	285.517.000	0	0	2.971.521.000	(867.929.000)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	862.427.000	3.089.633.000	0	0	3.952.060.000	1.080.601.000	2.599.166.000	0	0	3.679.767.000	(272.293.000)
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	862.427.000	3.089.633.000	0	0	3.952.060.000	1.080.601.000	2.599.166.000	0	0	3.679.767.000	(272.293.000)
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	862.427.000	3.089.633.000	0	0	3.952.060.000	732.365.000	2.572.776.000	0	0	3.305.141.000	(646.919.000)
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.08 02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	862.427.000	3.089.633.000	0	0	3.952.060.000	732.365.000	2.572.776.000	0	0	3.305.141.000	(646.919.000)
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	0	0	0	0	0	348.236.000	26.390.000	0	0	374.626.000	374.626.000
2 22 2.11.3.28.2.22.02.0000 08 1.09 23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	0	0	0	0	0	348.236.000	26.390.000	0	0	374.626.000	374.626.000
2 16 2.16.9.02.2.22.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.830.373.000	2.169.627.000	0	0	16.000.000.000	13.568.964.800	4.765.437.100	0	0	18.334.401.900	2.334.401.900

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.16.9.02.2.22.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	13.830.373.000	2.169.627.000	0	0	16.000.000.000	13.568.964.800	4.765.437.100	0	0	18.334.401.900	2.334.401.900
2 22 2.16.9.02.2.22.01.0000 08 1.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	13.830.373.000	2.169.627.000	0	0	16.000.000.000	13.568.964.800	4.765.437.100	0	0	18.334.401.900	2.334.401.900
2 22 2.16.9.02.2.22.01.0000 08 1.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	13.830.373.000	2.169.627.000	0	0	16.000.000.000	13.568.964.800	4.765.437.100	0	0	18.334.401.900	2.334.401.900
2 17 2.17.2.22.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	9.004.810.750	56.267.189.250	0	0	65.272.000.000	26.273.064.800	5.716.929.641	0	0	31.989.994.441	(33.282.005.559)
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9.004.810.750	56.267.189.250	0	0	65.272.000.000	26.273.064.800	5.716.929.641	0	0	31.989.994.441	(33.282.005.559)
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.332.000.000	55.098.000.000	0	0	57.430.000.000	2.483.814.000	5.266.424.641	0	0	7.750.238.641	(49.679.761.359)
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2.332.000.000	55.098.000.000	0	0	57.430.000.000	2.483.814.000	5.266.424.641	0	0	7.750.238.641	(49.679.761.359)
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.672.810.750	1.169.189.250	0	0	7.842.000.000	23.789.250.800	450.505.000	0	0	24.239.755.800	16.397.755.800
2 22 2.17.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 18	Pengembangan Kewirausahaan Desa	6.672.810.750	1.169.189.250	0	0	7.842.000.000	23.789.250.800	450.505.000	0	0	24.239.755.800	16.397.755.800
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	347.796.555.688	17.870.124.810	0	0	365.666.680.498	309.505.142.387	27.858.607.188	0	0	337.363.749.575	(28.302.930.923)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.522.758.498	819.000	0	0	28.523.577.498	26.876.430.906	0	0	0	26.876.430.906	(1.647.146.592)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.596.000	0	0	0	32.596.000	26.596.000	0	0	0	26.596.000	(6.000.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.825.000	0	0	0	2.825.000	2.825.000	0	0	0	2.825.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.944.000	0	0	0	4.944.000	3.819.000	0	0	0	3.819.000	(1.125.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.944.000	0	0	0	4.944.000	4.194.000	0	0	0	4.194.000	(750.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.944.000	0	0	0	4.944.000	3.819.000	0	0	0	3.819.000	(1.125.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.944.000	0	0	0	4.944.000	4.194.000	0	0	0	4.194.000	(750.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.995.000	0	0	0	4.995.000	3.870.000	0	0	0	3.870.000	(1.125.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.875.000	0	0	0	3.875.000	(1.125.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.776.128.094	0	0	0	20.776.128.094	19.341.511.802	0	0	0	19.341.511.802	(1.434.616.292)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.581.768.094	0	0	0	20.581.768.094	19.150.591.802	0	0	0	19.150.591.802	(1.431.176.292)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.360.000	0	0	0	153.360.000	153.360.000	0	0	0	153.360.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	9.296.000	0	0	0	9.296.000	(704.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	7.716.000	0	0	0	7.716.000	(2.284.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.800.000	0	0	0	2.800.000	(200.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.748.000	0	0	0	3.748.000	(252.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.100.000	0	0	0	56.100.000	56.100.000	0	0	0	56.100.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.100.000	0	0	0	56.100.000	56.100.000	0	0	0	56.100.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.809.600	819.000	0	0	376.628.600	343.389.000	0	0	0	343.389.000	(33.239.600)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.009.000	0	0	0	50.009.000	50.009.000	0	0	0	50.009.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.969.100	819.000	0	0	41.788.100	39.651.500	0	0	0	39.651.500	(2.136.600)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.676.750	0	0	0	52.676.750	50.630.750	0	0	0	50.630.750	(2.046.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	50.014.750	0	0	0	50.014.750	45.797.750	0	0	0	45.797.750	(4.217.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.360.000	0	0	0	88.360.000	76.611.000	0	0	0	76.611.000	(11.749.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.435.000	0	0	0	69.435.000	66.360.000	0	0	0	66.360.000	(3.075.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.345.000	0	0	0	24.345.000	14.329.000	0	0	0	14.329.000	(10.016.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.749.935.804	0	0	0	6.749.935.804	6.608.427.104	0	0	0	6.608.427.104	(141.508.700)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	0	0	0	7.250.000	7.250.000	0	0	0	7.250.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.507.169.400	0	0	0	2.507.169.400	2.370.554.700	0	0	0	2.370.554.700	(136.614.700)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.235.516.404	0	0	0	4.235.516.404	4.230.622.404	0	0	0	4.230.622.404	(4.894.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.189.000	0	0	0	532.189.000	500.407.000	0	0	0	500.407.000	(31.782.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.311.000	0	0	0	23.311.000	23.311.000	0	0	0	23.311.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.788.000	0	0	0	312.788.000	281.919.000	0	0	0	281.919.000	(30.869.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.295.000	0	0	0	80.295.000	79.382.000	0	0	0	79.382.000	(913.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.795.000	0	0	0	115.795.000	115.795.000	0	0	0	115.795.000	0
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	319.273.797.190	17.869.305.810	0	0	337.143.103.000	282.628.711.481	27.858.607.188	0	0	310.487.318.669	(26.655.784.331)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	23.028.244.000	2.771.756.000	0	0	25.800.000.000	19.742.207.341	10.652.124.000	0	0	30.394.331.341	4.594.331.341
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	3.484.000.000	0	0	0	3.484.000.000	(1.516.000.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.992.740.000	7.260.000	0	0	8.000.000.000	7.210.860.000	3.630.000	0	0	7.214.490.000	(785.510.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.01 03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	10.035.504.000	2.764.496.000	0	0	12.800.000.000	9.047.347.341	10.648.494.000	0	0	19.695.841.341	6.895.841.341
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	20.662.822.000	8.337.178.000	0	0	29.000.000.000	16.409.971.987	10.484.650.378	0	0	26.894.622.365	(2.105.377.635)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	5.046.849.800	173.811.000	0	0	5.220.660.800	220.660.800
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.03 02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	15.662.822.000	8.337.178.000	0	0	24.000.000.000	11.363.122.187	10.310.839.378	0	0	21.673.961.565	(2.326.038.435)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	54.925.000.000	120.000.000	0	0	55.045.000.000	14.595.110.763	97.000.000	0	0	14.692.110.763	(40.352.889.237)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	3.357.122.000	7.000.000	0	0	3.364.122.000	(1.635.878.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	45.425.000.000	120.000.000	0	0	45.545.000.000	6.788.360.763	90.000.000	0	0	6.878.360.763	(38.666.639.237)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	4.500.000.000	0	0	0	4.500.000.000	4.449.628.000	0	0	0	4.449.628.000	(50.372.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05	Pengelolaan Taman Budaya	11.431.666.190	568.333.810	0	0	12.000.000.000	9.550.522.190	568.333.810	0	0	10.118.856.000	(1.881.144.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.05 01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	11.431.666.190	568.333.810	0	0	12.000.000.000	9.550.522.190	568.333.810	0	0	10.118.856.000	(1.881.144.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	10.235.462.000	6.064.538.000	0	0	16.300.000.000	13.935.629.400	6.045.999.000	0	0	19.981.628.400	3.681.628.400
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	935.462.000	6.064.538.000	0	0	7.000.000.000	2.722.806.000	6.045.999.000	0	0	8.768.805.000	1.768.805.000
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.06 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	9.300.000.000	0	0	0	9.300.000.000	11.212.823.400	0	0	0	11.212.823.400	1.912.823.400
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	5.350.000.000	0	0	0	5.350.000.000	4.816.563.500	0	0	0	4.816.563.500	(533.436.500)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	750.000.000	0	0	0	750.000.000	744.376.500	0	0	0	744.376.500	(5.623.500)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	600.000.000	0	0	0	600.000.000	556.079.000	0	0	0	556.079.000	(43.921.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.07 03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	3.516.108.000	0	0	0	3.516.108.000	(483.892.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	193.640.603.000	7.500.000	0	0	193.648.103.000	203.578.706.300	10.500.000	0	0	203.589.206.300	9.941.103.300
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	20.364.400.000	0	0	0	20.364.400.000	15.894.478.600	0	0	0	15.894.478.600	(4.469.921.400)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000	8.341.700.000	0	0	0	8.341.700.000	(1.658.300.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 04	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	7.500.000.000	0	0	0	7.500.000.000	3.441.846.400	0	0	0	3.441.846.400	(4.058.153.600)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	1.760.148.000	0	0	0	1.760.148.000	(239.852.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	3.500.000.000	0	0	0	3.500.000.000	2.750.366.000	0	0	0	2.750.366.000	(749.634.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 07	Gelar Budaya Yogyakarta	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	4.506.309.000	0	0	0	4.506.309.000	(493.691.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.252.303.000	0	0	0	5.252.303.000	5.946.857.800	0	0	0	5.946.857.800	694.554.800
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	1.751.243.000	0	0	0	1.751.243.000	(1.248.757.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	8.500.000.000	0	0	0	8.500.000.000	5.955.454.500	0	0	0	5.955.454.500	(2.544.545.500)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 11	Selendang Sutera	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	1.362.078.000	0	0	0	1.362.078.000	(637.922.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 12	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	5.431.400.000	0	0	0	5.431.400.000	3.947.220.000	0	0	0	3.947.220.000	(1.484.180.000)
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 15	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	117.500.000.000	0	0	0	117.500.000.000	146.601.200.000	0	0	0	146.601.200.000	29.101.200.000
2 22 2.22.9.02.0.00.01.0000 08 1.09 16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3.592.500.000	7.500.000	0	0	3.600.000.000	1.319.805.000	10.500.000	0	0	1.330.305.000	(2.269.695.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.226.809.000	19.173.191.000	0	0	21.400.000.000	1.559.025.600	19.028.798.000	0	0	20.587.823.600	(812.176.400)
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.226.809.000	19.173.191.000	0	0	21.400.000.000	1.559.025.600	19.028.798.000	0	0	20.587.823.600	(812.176.400)
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	2.226.809.000	19.173.191.000	0	0	21.400.000.000	1.559.025.600	19.028.798.000	0	0	20.587.823.600	(812.176.400)
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	942.575.000	19.057.425.000	0	0	20.000.000.000	836.199.000	18.922.373.000	0	0	19.758.572.000	(241.428.000)
2 22 2.23.2.24.2.22.02.0000 08 1.02 03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.284.234.000	115.766.000	0	0	1.400.000.000	722.826.600	106.425.000	0	0	829.251.600	(570.748.400)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.107.025.000	45.000.000.000	0	0	51.107.025.000	4.846.682.500	25.606.191.000	0	0	30.452.873.500	(20.654.151.500)
2 22 3.25.2.22.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.107.025.000	45.000.000.000	0	0	51.107.025.000	4.846.682.500	25.606.191.000	0	0	30.452.873.500	(20.654.151.500)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 3.25.2.22.0.00.01.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	6.107.025.000	45.000.000.000	0	0	51.107.025.000	4.846.682.500	25.606.191.000	0	0	30.452.873.500	(20.654.151.500)
2 22 3.25.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 05	Pengembangan Budaya Bahari	6.107.025.000	45.000.000.000	0	0	51.107.025.000	4.846.682.500	25.606.191.000	0	0	30.452.873.500	(20.654.151.500)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	23.025.000.000	0	0	0	23.025.000.000	20.417.595.500	832.355.000	0	0	21.249.950.500	(1.775.049.500)
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	23.025.000.000	0	0	0	23.025.000.000	20.417.595.500	832.355.000	0	0	21.249.950.500	(1.775.049.500)
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.876.810.000	500.000.000	0	0	2.376.810.000	1.876.810.000
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1.876.810.000	500.000.000	0	0	2.376.810.000	1.876.810.000
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	20.525.000.000	0	0	0	20.525.000.000	10.063.378.000	150.000.000	0	0	10.213.378.000	(10.311.622.000)
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.08 02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	20.525.000.000	0	0	0	20.525.000.000	10.063.378.000	150.000.000	0	0	10.213.378.000	(10.311.622.000)
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	8.477.407.500	182.355.000	0	0	8.659.762.500	6.659.762.500
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000 08 1.09 19	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	8.477.407.500	182.355.000	0	0	8.659.762.500	6.659.762.500
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4.438.243.000	0	0	0	4.438.243.000	3.385.191.063	0	0	0	3.385.191.063	(1.053.051.937)
2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.438.243.000	0	0	0	4.438.243.000	3.385.191.063	0	0	0	3.385.191.063	(1.053.051.937)
2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	4.438.243.000	0	0	0	4.438.243.000	3.385.191.063	0	0	0	3.385.191.063	(1.053.051.937)
2 22 3.27.2.09.2.22.02.0000 08 1.08 01	Pengembangan Lumbung Mataraman	4.438.243.000	0	0	0	4.438.243.000	3.385.191.063	0	0	0	3.385.191.063	(1.053.051.937)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.632.000.000	2.368.000.000	0	0	18.000.000.000	13.091.647.400	2.057.044.025	0	0	15.148.691.425	(2.851.308.575)
2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.632.000.000	2.368.000.000	0	0	18.000.000.000	13.091.647.400	2.057.044.025	0	0	15.148.691.425	(2.851.308.575)
2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	15.632.000.000	2.368.000.000	0	0	18.000.000.000	13.091.647.400	2.057.044.025	0	0	15.148.691.425	(2.851.308.575)
2 22 3.31.3.30.2.22.02.0000 08 1.08 03	Pengembangan Industri Kreatif	15.632.000.000	2.368.000.000	0	0	18.000.000.000	13.091.647.400	2.057.044.025	0	0	15.148.691.425	(2.851.308.575)
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.854.413.000	211.187.000	0	0	5.065.600.000	4.896.408.800	211.187.000	0	0	5.107.595.800	41.995.800

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.854.413.000	211.187.000	0	0	5.065.600.000	4.896.408.800	211.187.000	0	0	5.107.595.800	41.995.800
2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4.854.413.000	211.187.000	0	0	5.065.600.000	4.896.408.800	211.187.000	0	0	5.107.595.800	41.995.800
2 22 3.32.2.07.2.22.02.0000 08 1.09 23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	4.854.413.000	211.187.000	0	0	5.065.600.000	4.896.408.800	211.187.000	0	0	5.107.595.800	41.995.800
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	864.000.000	0	0	0	864.000.000	1.178.408.750	0	0	0	1.178.408.750	314.408.750
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	864.000.000	0	0	0	864.000.000	1.178.408.750	0	0	0	1.178.408.750	314.408.750
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	500.000.000	0	0	0	500.000.000	534.818.250	0	0	0	534.818.250	34.818.250
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.04 03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	500.000.000	0	0	0	500.000.000	534.818.250	0	0	0	534.818.250	34.818.250
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0	0	0	0	0	364.827.500	0	0	0	364.827.500	364.827.500
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.06 03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	0	0	0	0	0	364.827.500	0	0	0	364.827.500	364.827.500
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	364.000.000	0	0	0	364.000.000	278.763.000	0	0	0	278.763.000	(85.237.000)
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.09 01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	0	0	0	0	0	53.710.000	0	0	0	53.710.000	53.710.000
2 22 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.09 18	Pengembangan Kewirausahaan Desa	364.000.000	0	0	0	364.000.000	225.053.000	0	0	0	225.053.000	(138.947.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	2.100.000.000	0	0	0	2.100.000.000	2.112.928.000	133.372.000	0	0	2.246.300.000	146.300.000
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.100.000.000	0	0	0	2.100.000.000	2.112.928.000	133.372.000	0	0	2.246.300.000	146.300.000
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000 08 1.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	200.000.000	0	0	0	200.000.000	440.000.000	0	0	0	440.000.000	240.000.000
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000 08 1.06 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	200.000.000	0	0	0	200.000.000	440.000.000	0	0	0	440.000.000	240.000.000
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.900.000.000	0	0	0	1.900.000.000	1.672.928.000	133.372.000	0	0	1.806.300.000	(93.700.000)
2 22 5.06.9.02.2.22.01.0000 08 1.09 13	Gelar Seni Budaya Daerah	1.900.000.000	0	0	0	1.900.000.000	1.672.928.000	133.372.000	0	0	1.806.300.000	(93.700.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.250.400.000	0	0	0	2.250.400.000	1.231.191.000	0	0	0	1.231.191.000	(1.019.209.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22 8.01.9.02.2.22.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.250.400.000	0	0	0	2.250.400.000	1.231.191.000	0	0	0	1.231.191.000	(1.019.209.000)
2 22 8.01.9.02.2.22.01.0000 08 1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.250.400.000	0	0	0	2.250.400.000	1.231.191.000	0	0	0	1.231.191.000	(1.019.209.000)
2 22 8.01.9.02.2.22.01.0000 08 1.09 23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.250.400.000	0	0	0	2.250.400.000	1.231.191.000	0	0	0	1.231.191.000	(1.019.209.000)
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	32.416.593.868	6.527.270.000	0	0	38.943.863.868	30.897.667.431	5.723.452.000	0	0	36.621.119.431	(2.322.744.437)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	32.416.593.868	6.527.270.000	0	0	38.943.863.868	30.897.667.431	5.723.452.000	0	0	36.621.119.431	(2.322.744.437)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.358.817.618	6.114.635.500	0	0	32.473.453.118	24.960.418.931	5.312.007.500	0	0	30.272.426.431	(2.201.026.687)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.381.000	0	0	0	172.381.000	147.976.000	0	0	0	147.976.000	(24.405.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.537.000	0	0	0	62.537.000	62.537.000	0	0	0	62.537.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.393.000	0	0	0	35.393.000	35.393.000	0	0	0	35.393.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.136.000	0	0	0	32.136.000	22.641.000	0	0	0	22.641.000	(9.495.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.410.000	0	0	0	17.410.000	17.410.000	0	0	0	17.410.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.905.000	0	0	0	24.905.000	9.995.000	0	0	0	9.995.000	(14.910.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.881.983.218	0	0	0	14.881.983.218	14.405.369.731	0	0	0	14.405.369.731	(476.613.487)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.765.169.718	0	0	0	14.765.169.718	14.334.818.231	0	0	0	14.334.818.231	(430.351.487)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.021.000	0	0	0	99.021.000	52.759.000	0	0	0	52.759.000	(46.262.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.648.000	0	0	0	7.648.000	7.648.000	0	0	0	7.648.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.862.000	0	0	0	4.862.000	4.862.000	0	0	0	4.862.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.282.500	0	0	0	5.282.500	5.282.500	0	0	0	5.282.500	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.005.000	0	0	0	43.005.000	21.555.000	0	0	0	21.555.000	(21.450.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.005.000	0	0	0	43.005.000	21.555.000	0	0	0	21.555.000	(21.450.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.271.000	0	0	0	1.111.271.000	500.801.000	0	0	0	500.801.000	(610.470.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.970.000	0	0	0	59.970.000	59.970.000	0	0	0	59.970.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.556.000	0	0	0	49.556.000	49.556.000	0	0	0	49.556.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.184.000	0	0	0	29.184.000	24.152.000	0	0	0	24.152.000	(5.032.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.632.000	0	0	0	34.632.000	34.632.000	0	0	0	34.632.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.856.000	0	0	0	2.856.000	2.856.000	0	0	0	2.856.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	935.073.000	0	0	0	935.073.000	329.635.000	0	0	0	329.635.000	(605.438.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.114.635.500	0	0	6.114.635.500	0	5.312.007.500	0	0	5.312.007.500	(802.628.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	6.114.635.500	0	0	6.114.635.500	0	5.312.007.500	0	0	5.312.007.500	(802.628.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.505.876.000	0	0	0	6.505.876.000	6.491.466.000	0	0	0	6.491.466.000	(14.410.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	0	0	0	7.320.000	7.880.000	0	0	0	7.880.000	560.000
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.498.556.000	0	0	0	6.498.556.000	6.483.586.000	0	0	0	6.483.586.000	(14.970.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.644.301.400	0	0	0	3.644.301.400	3.393.251.200	0	0	0	3.393.251.200	(251.050.200)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	546.245.600	0	0	0	546.245.600	417.081.600	0	0	0	417.081.600	(129.164.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	13.250.000	0	0	0	13.250.000	13.250.000	0	0	0	13.250.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.592.018.000	0	0	0	2.592.018.000	2.521.404.000	0	0	0	2.521.404.000	(70.614.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	492.787.800	0	0	0	492.787.800	441.515.600	0	0	0	441.515.600	(51.272.200)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.634.272.500	411.444.500	0	0	6.045.717.000	5.530.024.750	411.444.500	0	0	5.941.469.250	(104.247.750)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.234.412.500	411.444.500	0	0	4.645.857.000	4.061.076.750	411.444.500	0	0	4.472.521.250	(173.335.750)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	134.611.000	300.000.000	0	0	434.611.000	107.821.000	300.000.000	0	0	407.821.000	(26.790.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	263.530.500	0	0	0	263.530.500	195.229.500	0	0	0	195.229.500	(68.301.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	56.579.500	1.850.000	0	0	58.429.500	33.104.750	1.850.000	0	0	34.954.750	(23.474.750)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.401.061.000	0	0	0	3.401.061.000	3.347.191.000	0	0	0	3.347.191.000	(53.870.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	6.525.000	0	0	0	6.525.000	5.625.000	0	0	0	5.625.000	(900.000)
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	372.105.500	109.594.500	0	0	481.700.000	372.105.500	109.594.500	0	0	481.700.000	0
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1.399.860.000	0	0	0	1.399.860.000	1.468.948.000	0	0	0	1.468.948.000	69.088.000
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1.352.628.000	0	0	0	1.352.628.000	1.468.948.000	0	0	0	1.468.948.000	116.320.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	47.232.000	0	0	0	47.232.000	0	0	0	0	(47.232.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	423.503.750	1.190.000	0	0	424.693.750	407.223.750	0	0	407.223.750	(17.470.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	21.710.000	1.190.000	0	0	22.900.000	14.710.000	0	0	14.710.000	(8.190.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	21.710.000	1.190.000	0	0	22.900.000	14.710.000	0	0	14.710.000	(8.190.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	69.600.000	0	0	0	69.600.000	61.100.000	0	0	61.100.000	(8.500.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	33.600.000	0	0	0	33.600.000	25.100.000	0	0	25.100.000	(8.500.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	0	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	223.493.750	0	0	0	223.493.750	223.493.750	0	0	223.493.750	0	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	32.260.000	0	0	0	32.260.000	32.260.000	0	0	32.260.000	0	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	191.233.750	0	0	0	191.233.750	191.233.750	0	0	191.233.750	0	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	108.700.000	0	0	0	108.700.000	107.920.000	0	0	107.920.000	(780.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000 03 1.04 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	108.700.000	0	0	0	108.700.000	107.920.000	0	0	107.920.000	(780.000)	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	675.249.100	6.860.000	0	682.109.100	(151.289.000)	
2 23 2.23.2.24.2.22.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	675.249.100	6.860.000	0	682.109.100	(151.289.000)	
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	675.249.100	6.860.000	0	682.109.100	(151.289.000)	
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	333.957.000	0	0	0	333.957.000	315.307.000	0	0	315.307.000	(18.650.000)	

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.000.000	0	0	0	135.000.000	118.600.000	0	0	0	118.600.000	(16.400.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	198.957.000	0	0	0	198.957.000	196.707.000	0	0	0	196.707.000	(2.250.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	242.581.100	6.860.000	0	0	249.441.100	183.346.100	6.860.000	0	0	190.206.100	(59.235.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	242.581.100	6.860.000	0	0	249.441.100	183.346.100	6.860.000	0	0	190.206.100	(59.235.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	250.000.000	0	0	0	250.000.000	176.596.000	0	0	0	176.596.000	(73.404.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	200.000.000	0	0	0	200.000.000	146.455.000	0	0	0	146.455.000	(53.545.000)
2 24 2.23.2.24.2.22.02.0000 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	50.000.000	0	0	0	50.000.000	30.141.000	0	0	0	30.141.000	(19.859.000)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	194.847.438.260	5.807.422.000	0	0	200.654.860.260	180.350.752.826	5.221.153.900	0	0	185.571.906.726	(15.082.953.534)
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.135.950.109	3.836.172.100	0	0	39.972.122.209	32.818.206.562	3.292.478.000	0	0	36.110.684.562	(3.861.437.647)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.135.950.109	3.836.172.100	0	0	39.972.122.209	32.818.206.562	3.292.478.000	0	0	36.110.684.562	(3.861.437.647)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.795.070.109	1.374.467.000	0	0	23.169.537.109	20.410.957.562	830.773.000	0	0	21.241.730.562	(1.927.806.547)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.434.500	0	0	0	137.434.500	124.084.500	0	0	0	124.084.500	(13.350.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.594.500	0	0	0	86.594.500	76.244.500	0	0	0	76.244.500	(10.350.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.840.000	0	0	0	50.840.000	47.840.000	0	0	0	47.840.000	(3.000.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.011.131.699	0	0	0	16.011.131.699	15.245.574.152	0	0	0	15.245.574.152	(765.557.547)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.828.831.699	0	0	0	15.828.831.699	15.063.274.152	0	0	0	15.063.274.152	(765.557.547)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.300.000	0	0	0	150.300.000	150.300.000	0	0	0	150.300.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.286.698.800	0	0	0	1.286.698.800	701.262.800	0	0	0	701.262.800	(585.436.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.609.800	0	0	0	25.609.800	25.609.800	0	0	0	25.609.800	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.080.000	0	0	0	76.080.000	79.080.000	0	0	0	79.080.000	3.000.000
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.462.000	0	0	0	82.462.000	82.462.000	0	0	0	82.462.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.260.000	0	0	0	16.260.000	16.260.000	0	0	0	16.260.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.086.287.000	0	0	0	1.086.287.000	497.851.000	0	0	0	497.851.000	(588.436.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.600.000	273.228.000	0	0	275.828.000	2.600.000	279.828.000	0	0	282.428.000	6.600.000
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	258.828.000	0	0	258.828.000	0	265.428.000	0	0	265.428.000	6.600.000
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.600.000	14.400.000	0	0	17.000.000	2.600.000	14.400.000	0	0	17.000.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.227.320.510	0	0	0	3.227.320.510	3.176.570.510	0	0	0	3.176.570.510	(50.750.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.131.000	0	0	0	100.131.000	100.131.000	0	0	0	100.131.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.135.190.110	0	0	0	1.135.190.110	1.084.440.110	0	0	0	1.084.440.110	(50.750.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.991.999.400	0	0	0	1.991.999.400	1.991.999.400	0	0	0	1.991.999.400	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.129.884.600	1.101.239.000	0	0	2.231.123.600	1.160.865.600	550.945.000	0	0	1.711.810.600	(519.313.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	636.916.700	0	0	0	636.916.700	618.850.700	0	0	0	618.850.700	(18.066.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.330.000	0	0	0	64.330.000	64.330.000	0	0	0	64.330.000	0
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.652.900	1.101.239.000	0	0	1.401.891.900	349.699.900	550.945.000	0	0	900.644.900	(501.247.000)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.985.000	0	0	0	87.985.000	87.985.000	0	0	0	87.985.000	0
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.138.205.500	0	0	0	1.138.205.500	1.218.353.500	0	0	0	1.218.353.500	80.148.000
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.138.205.500	0	0	0	1.138.205.500	1.218.353.500	0	0	0	1.218.353.500	80.148.000
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	243.907.500	0	0	0	243.907.500	242.307.500	0	0	0	242.307.500	(1.600.000)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	710.060.000	0	0	0	710.060.000	859.585.000	0	0	0	859.585.000	149.525.000
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	184.238.000	0	0	0	184.238.000	116.461.000	0	0	0	116.461.000	(67.777.000)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.059.405.500	1.756.902.100	0	0	3.816.307.600	1.702.767.500	1.756.902.000	0	0	3.459.669.500	(356.638.100)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	488.308.500	0	0	0	488.308.500	349.246.500	0	0	0	349.246.500	(139.062.000)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	120.609.500	0	0	0	120.609.500	110.929.500	0	0	0	110.929.500	(9.680.000)
3	25	3.25.2.22.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	367.699.000	0	0	0	367.699.000	238.317.000	0	0	0	238.317.000	(129.382.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.232.661.000	0	0	0	1.232.661.000	1.073.193.000	0	0	0	1.073.193.000	(159.468.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.232.661.000	0	0	0	1.232.661.000	1.073.193.000	0	0	0	1.073.193.000	(159.468.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	0	0	0	60.972.000	48.684.000	0	0	0	48.684.000	(12.288.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	60.972.000	0	0	0	60.972.000	48.684.000	0	0	0	48.684.000	(12.288.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	175.969.000	1.756.902.100	0	0	1.932.871.100	167.299.000	1.756.902.000	0	0	1.924.201.000	(8.670.100)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	5.430.000	1.756.902.100	0	0	1.762.332.100	5.430.000	1.756.902.000	0	0	1.762.332.000	(100)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	170.539.000	0	0	0	170.539.000	161.869.000	0	0	0	161.869.000	(8.670.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	0	0	0	101.495.000	64.345.000	0	0	0	64.345.000	(37.150.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 03 1.09 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.495.000	0	0	0	101.495.000	64.345.000	0	0	0	64.345.000	(37.150.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.005.948.000	692.205.000	0	0	8.698.153.000	7.081.739.000	692.205.000	0	0	7.773.944.000	(924.209.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	8.005.948.000	692.205.000	0	0	8.698.153.000	7.081.739.000	692.205.000	0	0	7.773.944.000	(924.209.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	182.000.000	528.000.000	0	0	710.000.000	32.000.000	528.000.000	0	0	560.000.000	(150.000.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.233.636.000	135.004.000	0	0	3.368.640.000	3.383.636.000	135.004.000	0	0	3.518.640.000	150.000.000
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.546.000	29.201.000	0	0	278.747.000	249.546.000	29.201.000	0	0	278.747.000	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.626.566.000	0	0	0	3.626.566.000	3.022.450.000	0	0	0	3.022.450.000	(604.116.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 04 1.05 09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	714.200.000	0	0	0	714.200.000	394.107.000	0	0	0	394.107.000	(320.093.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	390.910.000	0	0	0	390.910.000	265.614.000	0	0	0	265.614.000	(125.296.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	117.469.500	0	0	0	117.469.500	117.469.500	0	0	0	117.469.500	0
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	117.469.500	0	0	0	117.469.500	117.469.500	0	0	0	117.469.500	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05 1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	273.440.500	0	0	0	273.440.500	148.144.500	0	0	0	148.144.500	(125.296.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	246.289.000	0	0	0	246.289.000	125.918.000	0	0	0	125.918.000	(120.371.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.151.500	0	0	0	27.151.500	22.226.500	0	0	0	22.226.500	(4.925.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.746.411.000	12.598.000	0	0	2.759.009.000	2.138.775.000	12.598.000	0	0	2.151.373.000	(607.636.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	882.838.000	2.430.000	0	0	885.268.000	724.240.000	2.430.000	0	0	726.670.000	(158.598.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	882.838.000	2.430.000	0	0	885.268.000	724.240.000	2.430.000	0	0	726.670.000	(158.598.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.398.537.000	10.168.000	0	0	1.408.705.000	1.227.177.000	10.168.000	0	0	1.237.345.000	(171.360.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	656.082.000	10.168.000	0	0	666.250.000	494.318.000	10.168.000	0	0	504.486.000	(161.764.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	742.455.000	0	0	0	742.455.000	732.859.000	0	0	0	732.859.000	(9.596.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	0	0	0	465.036.000	187.358.000	0	0	0	187.358.000	(277.678.000)
3 25 3.25.2.22.0.00.01.0000 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	465.036.000	0	0	0	465.036.000	187.358.000	0	0	0	187.358.000	(277.678.000)
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.349.325.179	81.929.000	0	0	19.431.254.179	16.007.881.632	81.929.000	0	0	16.089.810.632	(3.341.443.547)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	19.349.325.179	81.929.000	0	0	19.431.254.179	16.007.881.632	81.929.000	0	0	16.089.810.632	(3.341.443.547)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.388.678.679	81.929.000	0	0	10.470.607.679	9.184.283.632	81.929.000	0	0	9.266.212.632	(1.204.395.047)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.340.000	0	0	0	134.340.000	103.565.000	0	0	0	103.565.000	(30.775.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.340.000	0	0	0	79.340.000	76.140.000	0	0	0	76.140.000	(3.200.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	0	0	0	55.000.000	27.425.000	0	0	0	27.425.000	(27.575.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.253.130.029	0	0	0	8.253.130.029	7.682.138.882	0	0	0	7.682.138.882	(570.991.147)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.188.410.029	0	0	0	8.188.410.029	7.617.418.882	0	0	0	7.617.418.882	(570.991.147)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.720.000	0	0	0	54.720.000	54.720.000	0	0	0	54.720.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.216.000	0	0	0	866.216.000	386.590.000	0	0	0	386.590.000	(479.626.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	0	0	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.743.000	0	0	0	6.743.000	6.743.000	0	0	0	6.743.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.800.000	0	0	0	31.800.000	31.800.000	0	0	0	31.800.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000	0	0	0	4.380.000	4.380.000	0	0	0	4.380.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	707.328.000	0	0	0	707.328.000	227.702.000	0	0	0	227.702.000	(479.626.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.265.000	0	0	0	35.265.000	35.265.000	0	0	0	35.265.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.200.000	0	0	0	71.200.000	71.200.000	0	0	0	71.200.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	81.929.000	0	0	81.929.000	0	81.929.000	0	0	81.929.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	81.929.000	0	0	81.929.000	0	81.929.000	0	0	81.929.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.799.950	0	0	0	545.799.950	484.867.050	0	0	0	484.867.050	(60.932.900)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.800.000	0	0	0	54.800.000	51.200.000	0	0	0	51.200.000	(3.600.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.999.950	0	0	0	181.999.950	124.667.050	0	0	0	124.667.050	(57.332.900)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.000.000	0	0	0	309.000.000	309.000.000	0	0	0	309.000.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.192.700	0	0	0	589.192.700	527.122.700	0	0	0	527.122.700	(62.070.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.380.000	0	0	0	27.380.000	27.380.000	0	0	0	27.380.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.372.700	0	0	0	154.372.700	142.302.700	0	0	0	142.302.700	(12.070.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	9.400.000	0	0	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0	9.400.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.040.000	0	0	0	103.040.000	103.040.000	0	0	0	103.040.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.000.000	0	0	0	295.000.000	245.000.000	0	0	0	245.000.000	(50.000.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.947.825.000	0	0	0	3.947.825.000	2.664.845.000	0	0	0	2.664.845.000	(1.282.980.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.212.225.000	0	0	0	1.212.225.000	186.000.000	0	0	0	186.000.000	(1.026.225.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.212.225.000	0	0	0	1.212.225.000	186.000.000	0	0	0	186.000.000	(1.026.225.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.963.200.000	0	0	0	1.963.200.000	1.799.445.000	0	0	0	1.799.445.000	(163.755.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.885.290.000	0	0	0	1.885.290.000	1.785.775.000	0	0	0	1.785.775.000	(99.515.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	77.910.000	0	0	0	77.910.000	13.670.000	0	0	0	13.670.000	(64.240.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	772.400.000	0	0	0	772.400.000	679.400.000	0	0	0	679.400.000	(93.000.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	443.810.000	0	0	0	443.810.000	350.810.000	0	0	0	350.810.000	(93.000.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 02 1.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	328.590.000	0	0	0	328.590.000	328.590.000	0	0	0	328.590.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.140.301.000	0	0	0	2.140.301.000	1.674.843.000	0	0	0	1.674.843.000	(465.458.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.140.301.000	0	0	0	2.140.301.000	1.674.843.000	0	0	0	1.674.843.000	(465.458.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	601.400.000	0	0	0	601.400.000	507.600.000	0	0	0	507.600.000	(93.800.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	491.100.000	0	0	0	491.100.000	347.742.000	0	0	0	347.742.000	(143.358.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	925.141.000	0	0	0	925.141.000	696.841.000	0	0	0	696.841.000	(228.300.000)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	122.660.000	0	0	0	122.660.000	122.660.000	0	0	0	122.660.000	0
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.872.520.500	0	0	0	2.872.520.500	2.483.910.000	0	0	0	2.483.910.000	(388.610.500)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.872.520.500	0	0	0	2.872.520.500	2.483.910.000	0	0	0	2.483.910.000	(388.610.500)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.362.005.000	0	0	0	1.362.005.000	920.584.500	0	0	0	920.584.500	(441.420.500)
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	783.500.000	0	0	0	783.500.000	827.080.000	0	0	0	827.080.000	43.580.000
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000 05 1.01 04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	727.015.500	0	0	0	727.015.500	736.245.500	0	0	0	736.245.500	9.230.000
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	86.124.684.163	1.377.767.900	0	0	87.502.452.063	81.971.831.654	1.352.443.900	0	0	83.324.275.554	(4.178.176.509)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	86.124.684.163	1.377.767.900	0	0	87.502.452.063	81.971.831.654	1.352.443.900	0	0	83.324.275.554	(4.178.176.509)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.753.937.863	159.314.000	0	0	50.913.251.863	49.078.806.104	174.806.000	0	0	49.253.612.104	(1.659.639.759)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.527.500	0	0	0	122.527.500	111.739.000	0	0	0	111.739.000	(10.788.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.218.500	0	0	0	92.218.500	89.230.000	0	0	0	89.230.000	(2.988.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.309.000	0	0	0	30.309.000	22.509.000	0	0	0	22.509.000	(7.800.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.575.701.138	0	0	0	45.575.701.138	44.623.774.054	0	0	0	44.623.774.054	(951.927.084)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.377.761.138	0	0	0	45.377.761.138	44.425.834.054	0	0	0	44.425.834.054	(951.927.084)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.940.000	0	0	0	185.940.000	185.940.000	0	0	0	185.940.000	0
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.200.000	0	0	0	30.200.000	16.454.500	0	0	0	16.454.500	(13.745.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.200.000	0	0	0	30.200.000	16.454.500	0	0	0	16.454.500	(13.745.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.284.500	0	0	0	757.284.500	257.249.500	26.400.000	0	0	283.649.500	(473.635.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.659.000	0	0	0	18.659.000	18.134.000	0	0	0	18.134.000	(525.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.426.500	0	0	0	12.426.500	18.301.500	26.400.000	0	0	44.701.500	32.275.000
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.223.500	0	0	0	57.223.500	53.948.500	0	0	0	53.948.500	(3.275.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.776.000	0	0	0	19.776.000	17.832.000	0	0	0	17.832.000	(1.944.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.390.000	0	0	0	633.390.000	134.349.000	0	0	0	134.349.000	(499.041.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.809.500	0	0	0	15.809.500	14.684.500	0	0	0	14.684.500	(1.125.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.845.000	109.314.000	0	0	127.159.000	17.845.000	98.406.000	0	0	116.251.000	(10.908.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.845.000	51.958.000	0	0	69.803.000	17.845.000	63.518.000	0	0	81.363.000	11.560.000
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	57.356.000	0	0	57.356.000	0	34.888.000	0	0	34.888.000	(22.468.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.034.009.925	0	0	0	3.034.009.925	2.927.329.250	0	0	0	2.927.329.250	(106.680.675)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.268.000	0	0	0	85.268.000	81.668.000	0	0	0	81.668.000	(3.600.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.103.298.125	0	0	0	1.103.298.125	1.000.217.450	0	0	0	1.000.217.450	(103.080.675)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.443.800	0	0	0	1.845.443.800	1.845.443.800	0	0	0	1.845.443.800	0
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.216.369.800	50.000.000	0	0	1.266.369.800	1.124.414.800	50.000.000	0	0	1.174.414.800	(91.955.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.046.000	0	0	0	34.046.000	28.898.000	0	0	0	28.898.000	(5.148.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	761.779.400	0	0	0	761.779.400	722.197.400	0	0	0	722.197.400	(39.582.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.660.000	0	0	0	22.660.000	19.260.000	0	0	0	19.260.000	(3.400.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	338.638.800	50.000.000	0	0	388.638.800	301.638.800	50.000.000	0	0	351.638.800	(37.000.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.245.600	0	0	0	59.245.600	52.420.600	0	0	0	52.420.600	(6.825.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.147.906.000	212.950.000	0	0	22.360.856.000	21.454.390.000	176.750.000	0	0	21.631.140.000	(729.716.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.066.075.000	0	0	0	4.066.075.000	3.688.545.000	0	0	0	3.688.545.000	(377.530.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.066.075.000	0	0	0	4.066.075.000	3.688.545.000	0	0	0	3.688.545.000	(377.530.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.563.547.000	98.895.000	0	0	1.662.442.000	1.495.028.000	82.695.000	0	0	1.577.723.000	(84.719.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	120.620.000	0	0	0	120.620.000	102.121.000	3.800.000	0	0	105.921.000	(14.699.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	527.734.000	90.996.000	0	0	618.730.000	519.334.000	70.996.000	0	0	590.330.000	(28.400.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	789.964.000	0	0	0	789.964.000	754.829.000	0	0	0	754.829.000	(35.135.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	125.229.000	7.899.000	0	0	133.128.000	118.744.000	7.899.000	0	0	126.643.000	(6.485.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.518.284.000	114.055.000	0	0	16.632.339.000	16.270.817.000	94.055.000	0	0	16.364.872.000	(267.467.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	13.063.488.000	0	0	0	13.063.488.000	12.848.288.000	0	0	0	12.848.288.000	(215.200.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.454.796.000	114.055.000	0	0	3.568.851.000	3.422.529.000	94.055.000	0	0	3.516.584.000	(52.267.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.733.024.000	0	0	0	7.733.024.000	6.461.338.750	0	0	0	6.461.338.750	(1.271.685.250)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	7.733.024.000	0	0	0	7.733.024.000	6.461.338.750	0	0	0	6.461.338.750	(1.271.685.250)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.071.000.000	0	0	0	1.071.000.000	1.004.110.000	0	0	0	1.004.110.000	(66.890.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.776.367.000	0	0	0	3.776.367.000	2.987.548.750	0	0	0	2.987.548.750	(788.818.250)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.896.750.000	0	0	0	1.896.750.000	1.632.150.000	0	0	0	1.632.150.000	(264.600.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	988.907.000	0	0	0	988.907.000	837.530.000	0	0	0	837.530.000	(151.377.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.563.595.000	302.616.000	0	0	1.866.211.000	1.462.307.000	298.000.000	0	0	1.760.307.000	(105.904.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	333.088.500	0	0	0	333.088.500	278.688.500	0	0	0	278.688.500	(54.400.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	333.088.500	0	0	0	333.088.500	278.688.500	0	0	0	278.688.500	(54.400.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	576.035.000	0	0	0	576.035.000	545.311.000	0	0	0	545.311.000	(30.724.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	32.140.000	0	0	0	32.140.000	3.216.000	0	0	0	3.216.000	(28.924.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.02 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	543.895.000	0	0	0	543.895.000	542.095.000	0	0	0	542.095.000	(1.800.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	611.244.000	302.616.000	0	0	913.860.000	618.744.000	298.000.000	0	0	916.744.000	2.884.000
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	611.244.000	302.616.000	0	0	913.860.000	618.744.000	298.000.000	0	0	916.744.000	2.884.000
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	43.227.500	0	0	0	43.227.500	19.563.500	0	0	0	19.563.500	(23.664.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	43.227.500	0	0	0	43.227.500	19.563.500	0	0	0	19.563.500	(23.664.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	729.699.000	14.729.000	0	0	744.428.000	681.299.000	14.729.000	0	0	696.028.000	(48.400.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	729.699.000	14.729.000	0	0	744.428.000	681.299.000	14.729.000	0	0	696.028.000	(48.400.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	729.699.000	14.729.000	0	0	744.428.000	681.299.000	14.729.000	0	0	696.028.000	(48.400.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.196.522.300	688.158.900	0	0	3.884.681.200	2.833.690.800	688.158.900	0	0	3.521.849.700	(362.831.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	402.940.000	0	0	0	402.940.000	102.713.500	0	0	0	102.713.500	(300.226.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	402.940.000	0	0	0	402.940.000	102.713.500	0	0	0	102.713.500	(300.226.500)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.793.582.300	688.158.900	0	0	3.481.741.200	2.730.977.300	688.158.900	0	0	3.419.136.200	(62.605.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.509.044.300	688.158.900	0	0	3.197.203.200	2.492.009.300	688.158.900	0	0	3.180.168.200	(17.035.000)
3 27 3.27.2.09.2.22.02.0000 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	284.538.000	0	0	0	284.538.000	238.968.000	0	0	0	238.968.000	(45.570.000)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	15.057.117.050	372.729.000	0	0	15.429.846.050	12.896.928.300	363.192.000	0	0	13.260.120.300	(2.169.725.750)
2 11 2.11.3.28.2.22.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	15.057.117.050	372.729.000	0	0	15.429.846.050	12.896.928.300	363.192.000	0	0	13.260.120.300	(2.169.725.750)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.351.909.300	361.185.000	0	0	11.713.094.300	9.325.159.300	363.192.000	0	0	9.688.351.300	(2.024.743.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	845.523.500	16.992.000	0	0	862.515.500	762.323.500	16.992.000	0	0	779.315.500	(83.200.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	845.523.500	16.992.000	0	0	862.515.500	762.323.500	16.992.000	0	0	779.315.500	(83.200.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.718.642.250	0	0	0	1.718.642.250	708.619.000	77.200.000	0	0	785.819.000	(932.823.250)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0	0	0	445.368.000	0	0	0	445.368.000	445.368.000
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.718.642.250	0	0	0	1.718.642.250	0	0	0	0	0	(1.718.642.250)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0	0	0	0	263.251.000	77.200.000	0	0	340.451.000	340.451.000
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	677.123.500	75.993.000	0	0	753.116.500	666.395.500	78.000.000	0	0	744.395.500	(8.721.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	565.616.500	0	0	0	565.616.500	560.771.500	0	0	0	560.771.500	(4.845.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	111.507.000	75.993.000	0	0	187.500.000	105.624.000	78.000.000	0	0	183.624.000	(3.876.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7.137.915.800	191.000.000	0	0	7.328.915.800	6.523.960.050	191.000.000	0	0	6.714.960.050	(613.955.750)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	3.968.531.500	191.000.000	0	0	4.159.531.500	3.964.982.500	191.000.000	0	0	4.155.982.500	(3.549.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3.169.384.300	0	0	0	3.169.384.300	2.558.977.550	0	0	0	2.558.977.550	(610.406.750)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	237.380.000	0	0	0	237.380.000	209.838.000	0	0	0	209.838.000	(27.542.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	237.380.000	0	0	0	237.380.000	209.838.000	0	0	0	209.838.000	(27.542.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	735.324.250	77.200.000	0	0	812.524.250	454.023.250	0	0	0	454.023.250	(358.501.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 02	Sertifikasi Sumber Benih	279.861.000	77.200.000	0	0	357.061.000	14.410.000	0	0	0	14.410.000	(342.651.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 04	Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	0	0	0	6.831.000	6.831.000	0	0	0	6.831.000	0
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 03 1.09 05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	448.632.250	0	0	0	448.632.250	432.782.250	0	0	0	432.782.250	(15.850.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	420.480.000	0	0	0	420.480.000	367.615.000	0	0	0	367.615.000	(52.865.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	420.480.000	0	0	0	420.480.000	367.615.000	0	0	0	367.615.000	(52.865.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	258.717.000	0	0	0	258.717.000	223.017.000	0	0	0	223.017.000	(35.700.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 04 1.01 06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	161.763.000	0	0	0	161.763.000	144.598.000	0	0	0	144.598.000	(17.165.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.284.727.750	11.544.000	0	0	3.296.271.750	3.204.154.000	0	0	0	3.204.154.000	(92.117.750)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.284.727.750	11.544.000	0	0	3.296.271.750	3.204.154.000	0	0	0	3.204.154.000	(92.117.750)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30.520.000	0	0	0	30.520.000	15.710.000	0	0	0	15.710.000	(14.810.000)
3 28 2.11.3.28.2.22.02.0000 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.254.207.750	11.544.000	0	0	3.265.751.750	3.188.444.000	0	0	0	3.188.444.000	(77.307.750)
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.679.422.000	0	0	0	7.679.422.000	7.192.516.000	0	0	0	7.192.516.000	(486.906.000)
1 03 1.03.1.04.3.29.13.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	7.679.422.000	0	0	0	7.679.422.000	7.192.516.000	0	0	0	7.192.516.000	(486.906.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.508.112.000	0	0	0	1.508.112.000	1.364.019.000	0	0	0	1.364.019.000	(144.093.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	538.112.000	0	0	0	538.112.000	516.264.000	0	0	0	516.264.000	(21.848.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	538.112.000	0	0	0	538.112.000	516.264.000	0	0	0	516.264.000	(21.848.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	970.000.000	0	0	0	970.000.000	847.755.000	0	0	0	847.755.000	(122.245.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	970.000.000	0	0	0	970.000.000	847.755.000	0	0	0	847.755.000	(122.245.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.747.200.000	0	0	0	1.747.200.000	1.552.777.000	0	0	0	1.552.777.000	(194.423.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1.747.200.000	0	0	0	1.747.200.000	1.552.777.000	0	0	0	1.552.777.000	(194.423.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	994.200.000	0	0	0	994.200.000	970.970.000	0	0	0	970.970.000	(23.230.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	753.000.000	0	0	0	753.000.000	581.807.000	0	0	0	581.807.000	(171.193.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	627.105.000	0	0	0	627.105.000	627.105.000	0	0	0	627.105.000	0
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	627.105.000	0	0	0	627.105.000	627.105.000	0	0	0	627.105.000	0
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	627.105.000	0	0	0	627.105.000	627.105.000	0	0	0	627.105.000	0
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.797.005.000	0	0	0	3.797.005.000	3.648.615.000	0	0	0	3.648.615.000	(148.390.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	439.000.000	0	0	0	439.000.000	290.610.000	0	0	0	290.610.000	(148.390.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000	0	0	0	50.000.000	39.360.000	0	0	0	39.360.000	(10.640.000)
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	389.000.000	0	0	0	389.000.000	251.250.000	0	0	0	251.250.000	(137.750.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	0	0	0	3.358.005.000	3.358.005.000	0	0	0	3.358.005.000	0
3 29 1.03.1.04.3.29.13.0000 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	0	0	0	3.358.005.000	3.358.005.000	0	0	0	3.358.005.000	0
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.287.856.750	0	0	0	2.287.856.750	2.023.937.750	0	0	0	2.023.937.750	(263.919.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.287.856.750	0	0	0	2.287.856.750	2.023.937.750	0	0	0	2.023.937.750	(263.919.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	24.429.000	0	0	0	24.429.000	124.259.000	0	0	0	124.259.000	99.830.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	24.429.000	0	0	0	24.429.000	124.259.000	0	0	0	124.259.000	99.830.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 02 1.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	24.429.000	0	0	0	24.429.000	124.259.000	0	0	0	124.259.000	99.830.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	127.848.000	0	0	0	127.848.000	120.538.000	0	0	0	120.538.000	(7.310.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	127.848.000	0	0	0	127.848.000	120.538.000	0	0	0	120.538.000	(7.310.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	63.894.000	0	0	0	63.894.000	63.894.000	0	0	0	63.894.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.954.000	0	0	0	63.954.000	56.644.000	0	0	0	56.644.000	(7.310.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	678.217.500	0	0	0	678.217.500	658.091.500	0	0	0	658.091.500	(20.126.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	678.217.500	0	0	0	678.217.500	658.091.500	0	0	0	658.091.500	(20.126.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	572.282.000	0	0	0	572.282.000	462.383.000	0	0	0	462.383.000	(109.899.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20.941.000	0	0	0	20.941.000	0	0	0	0	0	(20.941.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	84.994.500	0	0	0	84.994.500	195.708.500	0	0	0	195.708.500	110.714.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	177.476.000	0	0	0	177.476.000	249.776.000	0	0	0	249.776.000	72.300.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	170.672.000	0	0	0	170.672.000	242.972.000	0	0	0	242.972.000	72.300.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	170.672.000	0	0	0	170.672.000	242.972.000	0	0	0	242.972.000	72.300.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	6.804.000	0	0	0	6.804.000	6.804.000	0	0	0	6.804.000	0
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	6.804.000	0	0	0	6.804.000	6.804.000	0	0	0	6.804.000	0
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.279.886.250	0	0	0	1.279.886.250	871.273.250	0	0	0	871.273.250	(408.613.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.226.886.250	0	0	0	1.226.886.250	747.123.250	0	0	0	747.123.250	(479.763.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.226.886.250	0	0	0	1.226.886.250	747.123.250	0	0	0	747.123.250	(479.763.000)
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	53.000.000	0	0	0	53.000.000	124.150.000	0	0	0	124.150.000	71.150.000
3 30 3.31.3.30.2.22.02.0000 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	53.000.000	0	0	0	53.000.000	124.150.000	0	0	0	124.150.000	71.150.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	27.480.451.009	138.824.000	0	0	27.619.275.009	26.994.219.928	131.111.000	0	0	27.125.330.928	(493.944.081)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.480.451.009	138.824.000	0	0	27.619.275.009	26.994.219.928	131.111.000	0	0	27.125.330.928	(493.944.081)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.266.217.934	138.594.000	0	0	18.404.811.934	18.262.581.853	130.881.000	0	0	18.393.462.853	(11.349.081)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.484.000	0	0	0	340.484.000	370.354.000	0	0	0	370.354.000	29.870.000
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.984.000	0	0	0	309.984.000	347.554.000	0	0	0	347.554.000	37.570.000
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	0	0	0	5.500.000	4.750.000	0	0	0	4.750.000	(750.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	18.050.000	0	0	0	18.050.000	(6.950.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.132.754.034	0	0	0	15.132.754.034	14.522.905.953	0	0	0	14.522.905.953	(609.848.081)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.012.574.034	0	0	0	15.012.574.034	14.402.725.953	0	0	0	14.402.725.953	(609.848.081)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.280.000	0	0	0	110.280.000	110.280.000	0	0	0	110.280.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.900.000	0	0	0	9.900.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.722.600	400.000	0	0	860.122.600	486.861.600	400.000	0	0	487.261.600	(372.861.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.520.600	0	0	0	5.520.600	5.520.600	0	0	0	5.520.600	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.470.000	0	0	0	5.470.000	5.470.000	0	0	0	5.470.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.579.000	400.000	0	0	52.979.000	52.579.000	400.000	0	0	52.979.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.068.000	0	0	0	68.068.000	68.068.000	0	0	0	68.068.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.980.000	0	0	0	13.980.000	13.980.000	0	0	0	13.980.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.038.000	0	0	0	632.038.000	259.177.000	0	0	0	259.177.000	(372.861.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.067.000	0	0	0	82.067.000	82.067.000	0	0	0	82.067.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	130.796.000	0	0	130.796.000	0	123.083.000	0	0	123.083.000	(7.713.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	99.349.000	0	0	99.349.000	0	99.349.000	0	0	99.349.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	18.947.000	0	0	18.947.000	0	11.234.000	0	0	11.234.000	(7.713.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.485.058.750	0	0	0	1.485.058.750	2.455.808.750	0	0	0	2.455.808.750	970.750.000
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.685.000	0	0	0	64.685.000	64.685.000	0	0	0	64.685.000	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.600.000	0	0	0	429.600.000	1.400.350.000	0	0	0	1.400.350.000	970.750.000
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.773.750	0	0	0	990.773.750	990.773.750	0	0	0	990.773.750	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.198.550	7.398.000	0	0	455.596.550	426.651.550	7.398.000	0	0	434.049.550	(21.547.000)
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.523.500	0	0	0	17.523.500	17.523.500	0	0	0	17.523.500	0
3 31 3.31.3.30.2.22.02.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.468.050	0	0	0	226.468.050	224.076.050	0	0	0	224.076.050	(2.392.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
											Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.250.000	7.398.000	0	0	44.648.000	34.595.000	7.398.000	0	0	41.993.000	(2.655.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.960.000	0	0	0	114.960.000	98.460.000	0	0	0	98.460.000	(16.500.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.197.000	0	0	0	50.197.000	50.197.000	0	0	0	50.197.000	0				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.027.819.075	230.000	0	0	9.028.049.075	8.551.289.075	230.000	0	0	8.551.519.075	(476.530.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9.027.819.075	230.000	0	0	9.028.049.075	8.551.289.075	230.000	0	0	8.551.519.075	(476.530.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7.694.583.325	0	0	0	7.694.583.325	7.360.016.325	0	0	0	7.360.016.325	(334.567.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	310.184.750	230.000	0	0	310.414.750	666.684.750	230.000	0	0	666.914.750	356.500.000				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.023.051.000	0	0	0	1.023.051.000	524.588.000	0	0	0	524.588.000	(498.463.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	186.414.000	0	0	0	186.414.000	180.349.000	0	0	0	180.349.000	(6.065.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	186.414.000	0	0	0	186.414.000	180.349.000	0	0	0	180.349.000	(6.065.000)				
3	31	3.31.3.30.2.22.02.0000	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	186.414.000	0	0	0	186.414.000	180.349.000	0	0	0	180.349.000	(6.065.000)				
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)				

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)
3 32 3.32.2.07.2.22.02.0000 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	279.524.652.770	5.486.358.000	0	0	285.011.010.770	250.619.347.476	6.649.405.918	0	0	257.268.753.394	(27.742.257.376)
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	151.358.475.973	5.398.286.000	0	0	156.756.761.973	137.365.119.655	6.373.195.918	0	0	143.738.315.573	(13.018.446.400)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	127.959.526.053	2.905.170.500	0	0	130.864.696.553	115.715.305.679	3.320.190.298	0	0	119.035.495.977	(11.829.200.576)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.011.579.653	2.900.054.500	0	0	83.911.634.153	75.065.011.879	3.037.184.298	0	0	78.102.196.177	(5.809.437.976)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.191.250	0	0	0	311.191.250	496.546.750	0	0	0	496.546.750	185.355.500
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	218.274.750	0	0	0	218.274.750	197.614.750	0	0	0	197.614.750	(20.660.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.553.000	0	0	0	2.553.000	209.806.000	0	0	0	209.806.000	207.253.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.922.000	0	0	0	1.922.000	677.000	0	0	0	677.000	(1.245.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.292.000	0	0	0	4.292.000	2.507.000	0	0	0	2.507.000	(1.785.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.585.500	0	0	0	6.585.500	4.908.000	0	0	0	4.908.000	(1.677.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	0	0	0	8.400.000	21.905.000	0	0	0	21.905.000	13.505.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.164.000	0	0	0	69.164.000	59.129.000	0	0	0	59.129.000	(10.035.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.075.508.110	0	0	0	56.075.508.110	53.948.661.736	0	0	0	53.948.661.736	(2.126.846.374)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.721.000.860	0	0	0	55.721.000.860	53.603.049.486	0	0	0	53.603.049.486	(2.117.951.374)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.401.250	0	0	0	269.401.250	269.401.250	0	0	0	269.401.250	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.978.000	0	0	0	11.978.000	11.093.000	0	0	0	11.093.000	(885.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.062.000	0	0	0	64.062.000	56.352.000	0	0	0	56.352.000	(7.710.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.066.000	0	0	0	9.066.000	8.766.000	0	0	0	8.766.000	(300.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	960.000	0	0	0	960.000	960.000	0	0	0	960.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	192.000	0	0	0	192.000	192.000	0	0	0	192.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	768.000	0	0	0	768.000	768.000	0	0	0	768.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	576.398.000	0	0	0	576.398.000	576.398.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	409.846.000	0	0	0	409.846.000	409.846.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	166.552.000	0	0	0	166.552.000	166.552.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.984.892.100	33.120.000	0	0	9.018.012.100	4.968.518.100	33.120.000	0	0	5.001.638.100	(4.016.374.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.135.600	0	0	0	57.135.600	57.079.600	0	0	0	57.079.600	(56.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.167.000	29.470.000	0	0	264.637.000	238.279.000	29.470.000	0	0	267.749.000	3.112.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.859.000	0	0	0	44.859.000	51.879.000	0	0	0	51.879.000	7.020.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	511.669.000	0	0	0	511.669.000	511.669.000	0	0	0	511.669.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.760.000	3.650.000	0	0	69.410.000	64.980.000	3.650.000	0	0	68.630.000	(780.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.818.480.000	0	0	0	1.818.480.000	1.334.463.000	0	0	0	1.334.463.000	(484.017.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.010.731.500	0	0	0	6.010.731.500	2.469.978.500	0	0	0	2.469.978.500	(3.540.753.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	154.740.000	0	0	0	154.740.000	153.840.000	0	0	0	153.840.000	(900.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	86.350.000	0	0	0	86.350.000	86.350.000	0	0	0	86.350.000	0
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.644.000	2.451.445.000	0	0	2.454.089.000	2.644.000	2.588.574.798	0	0	2.591.218.798	137.129.798
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1.650.000.000	0	0	1.650.000.000	0	1.650.000.000	0	0	1.650.000.000	0
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.320.000	245.346.000	0	0	246.666.000	1.320.000	280.010.000	0	0	281.330.000	34.664.000
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.324.000	301.556.000	0	0	302.880.000	1.324.000	380.578.000	0	0	381.902.000	79.022.000
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	250.543.000	0	0	250.543.000	0	273.986.798	0	0	273.986.798	23.443.798
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.097.151.100	129.045.500	0	0	5.226.196.600	5.176.870.100	129.045.500	0	0	5.305.915.600	79.719.000
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.045.000	0	0	0	63.045.000	152.115.000	0	0	0	152.115.000	89.070.000
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.493.600.000	0	0	0	2.493.600.000	2.493.600.000	0	0	0	2.493.600.000	0
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.073.000	129.045.500	0	0	275.118.500	142.122.000	129.045.500	0	0	271.167.500	(3.951.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.394.433.100	0	0	0	2.394.433.100	2.389.033.100	0	0	0	2.389.033.100	(5.400.000)
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.770.738.300	284.944.000	0	0	4.055.682.300	3.720.171.400	284.944.000	0	0	4.005.115.400	(50.566.900)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	682.204.400	0	0	0	682.204.400	661.483.900	0	0	0	661.483.900	(20.720.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.306.645.200	0	0	0	1.306.645.200	1.277.105.200	0	0	0	1.277.105.200	(29.540.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	13.050.000	0	0	0	13.050.000	13.050.000	0	0	0	13.050.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.270.000	0	0	0	139.270.000	130.670.000	0	0	0	130.670.000	(8.600.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	67.365.000	0	0	0	67.365.000	56.505.000	0	0	0	56.505.000	(10.860.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.039.518.000	284.944.000	0	0	1.324.462.000	1.039.518.000	284.944.000	0	0	1.324.462.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.735.000	0	0	0	224.735.000	234.498.600	0	0	0	234.498.600	9.763.600
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.950.700	0	0	0	297.950.700	307.340.700	0	0	0	307.340.700	9.390.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.017.020.793	0	0	0	3.017.020.793	3.003.020.793	0	0	0	3.003.020.793	(14.000.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	243.020.793	0	0	0	243.020.793	243.020.793	0	0	0	243.020.793	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.774.000.000	0	0	0	2.774.000.000	2.760.000.000	0	0	0	2.760.000.000	(14.000.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	464.027.000	0	0	0	464.027.000	441.452.000	0	0	0	441.452.000	(22.575.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	247.605.000	0	0	0	247.605.000	225.030.000	0	0	0	225.030.000	(22.575.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	191.910.000	0	0	0	191.910.000	191.910.000	0	0	0	191.910.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	24.512.000	0	0	0	24.512.000	24.512.000	0	0	0	24.512.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
										Belanja					Belanja					
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.115.787.000	1.500.000	0	0	1.117.287.000	1.220.090.000	1.500.000	0	0	1.221.590.000	104.303.000				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	291.770.000	0	0	0	291.770.000	241.155.000	0	0	0	241.155.000	(50.615.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.13	03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	824.017.000	1.500.000	0	0	825.517.000	978.935.000	1.500.000	0	0	980.435.000	154.918.000				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.171.660.000	0	0	0	2.171.660.000	1.509.679.000	0	0	0	1.509.679.000	(661.981.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.764.560.000	0	0	0	1.764.560.000	1.210.579.000	0	0	0	1.210.579.000	(553.981.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	01	1.14	03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	407.100.000	0	0	0	407.100.000	299.100.000	0	0	0	299.100.000	(108.000.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.204.999.000	0	0	0	1.204.999.000	799.739.000	0	0	0	799.739.000	(405.260.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.204.999.000	0	0	0	1.204.999.000	799.739.000	0	0	0	799.739.000	(405.260.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	149.035.000	0	0	0	149.035.000	90.029.000	0	0	0	90.029.000	(59.006.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	57.524.000	0	0	0	57.524.000	29.999.000	0	0	0	29.999.000	(27.525.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	586.056.000	0	0	0	586.056.000	509.891.000	0	0	0	509.891.000	(76.165.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	02	1.02	05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	412.384.000	0	0	0	412.384.000	169.820.000	0	0	0	169.820.000	(242.564.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.090.852.500	0	0	0	2.090.852.500	1.810.168.500	0	0	0	1.810.168.500	(280.684.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	173.594.000	0	0	0	173.594.000	151.444.000	0	0	0	151.444.000	(22.150.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.01	03 Fasilitasi Penataan Wilayah	173.594.000	0	0	0	173.594.000	151.444.000	0	0	0	151.444.000	(22.150.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	809.568.500	0	0	0	809.568.500	560.664.500	0	0	0	560.664.500	(248.904.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	320.217.000	0	0	0	320.217.000	166.895.000	0	0	0	166.895.000	(153.322.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.02	03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	489.351.500	0	0	0	489.351.500	393.769.500	0	0	0	393.769.500	(95.582.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.107.690.000	0	0	0	1.107.690.000	1.098.060.000	0	0	0	1.098.060.000	(9.630.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.107.000.000	0	0	0	1.107.000.000	1.098.060.000	0	0	0	1.098.060.000	(8.940.000)				
4	01	4.01.2.10.1.03.01.0000	03	1.03	02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	690.000	0	0	0	690.000	0	0	0	0	0	(690.000)				

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	27.902.112.000	5.116.000	0	0	27.907.228.000	21.103.390.500	5.116.000	0	0	21.108.506.500	(6.798.721.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	22.970.511.000	0	0	0	22.970.511.000	17.098.466.000	0	0	0	17.098.466.000	(5.872.045.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	22.970.511.000	0	0	0	22.970.511.000	17.098.466.000	0	0	0	17.098.466.000	(5.872.045.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.559.411.500	5.116.000	0	0	4.564.527.500	3.864.159.000	5.116.000	0	0	3.869.275.000	(695.252.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	148.522.500	0	0	0	148.522.500	88.478.000	0	0	0	88.478.000	(60.044.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	468.698.000	5.116.000	0	0	473.814.000	344.594.000	5.116.000	0	0	349.710.000	(124.104.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3.942.191.000	0	0	0	3.942.191.000	3.431.087.000	0	0	0	3.431.087.000	(511.104.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	372.189.500	0	0	0	372.189.500	140.765.500	0	0	0	140.765.500	(231.424.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	372.189.500	0	0	0	372.189.500	140.765.500	0	0	0	140.765.500	(231.424.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.885.858.400	0	0	0	3.885.858.400	3.677.603.400	0	0	0	3.677.603.400	(208.255.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.516.867.600	0	0	0	1.516.867.600	1.322.512.600	0	0	0	1.322.512.600	(194.355.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	474.645.000	0	0	0	474.645.000	361.740.000	0	0	0	361.740.000	(112.905.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	130.806.000	0	0	0	130.806.000	113.076.000	0	0	0	113.076.000	(17.730.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	548.216.600	0	0	0	548.216.600	498.491.600	0	0	0	498.491.600	(49.725.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	363.200.000	0	0	0	363.200.000	349.205.000	0	0	0	349.205.000	(13.995.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.368.990.800	0	0	0	2.368.990.800	2.355.090.800	0	0	0	2.355.090.800	(13.900.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	494.225.000	0	0	0	494.225.000	487.625.000	0	0	0	487.625.000	(6.600.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.874.765.800	0	0	0	1.874.765.800	1.867.465.800	0	0	0	1.867.465.800	(7.300.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.216.775.000	0	0	0	3.216.775.000	3.131.425.000	0	0	0	3.131.425.000	(85.350.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.790.338.000	0	0	0	1.790.338.000	1.691.238.000	0	0	0	1.691.238.000	(99.100.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.546.947.500	0	0	0	1.546.947.500	1.454.247.500	0	0	0	1.454.247.500	(92.700.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	243.390.500	0	0	0	243.390.500	236.990.500	0	0	0	236.990.500	(6.400.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.018.000.000	0	0	0	1.018.000.000	1.070.430.000	0	0	0	1.070.430.000	52.430.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.018.000.000	0	0	0	1.018.000.000	1.070.430.000	0	0	0	1.070.430.000	52.430.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.437.000	0	0	0	408.437.000	369.757.000	0	0	0	369.757.000	(38.680.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	408.437.000	0	0	0	408.437.000	369.757.000	0	0	0	369.757.000	(38.680.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	536.380.000	0	0	0	536.380.000	346.179.500	0	0	0	346.179.500	(190.200.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	347.840.000	0	0	0	347.840.000	174.254.000	0	0	0	174.254.000	(173.586.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	329.764.000	0	0	0	329.764.000	168.478.000	0	0	0	168.478.000	(161.286.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	18.076.000	0	0	0	18.076.000	5.776.000	0	0	0	5.776.000	(12.300.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	93.862.000	0	0	0	93.862.000	92.662.000	0	0	0	92.662.000	(1.200.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	8.862.000	0	0	0	8.862.000	7.662.000	0	0	0	7.662.000	(1.200.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	94.678.000	0	0	0	94.678.000	79.263.500	0	0	0	79.263.500	(15.414.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	59.350.000	0	0	0	59.350.000	59.350.000	0	0	0	59.350.000	0
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	35.328.000	0	0	0	35.328.000	19.913.500	0	0	0	19.913.500	(15.414.500)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.299.692.500	0	0	0	2.299.692.500	1.795.452.500	0	0	0	1.795.452.500	(504.240.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.187.101.000	0	0	0	1.187.101.000	781.930.000	0	0	0	781.930.000	(405.171.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1.187.101.000	0	0	0	1.187.101.000	781.930.000	0	0	0	781.930.000	(405.171.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.112.591.500	0	0	0	1.112.591.500	1.013.522.500	0	0	0	1.013.522.500	(99.069.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.112.591.500	0	0	0	1.112.591.500	1.013.522.500	0	0	0	1.013.522.500	(99.069.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	5.811.277.000	0	0	0	5.811.277.000	7.986.335.400	277.890.000	0	0	8.264.225.400	2.452.948.400
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 1.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan	4.861.277.000	0	0	0	4.861.277.000	7.483.731.400	21.000.000	0	0	7.504.731.400	2.643.454.400
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 1.01 01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	540.499.000	0	0	0	540.499.000	(559.501.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 1.01 09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0	0	500.000.000	102.250.000	0	0	0	102.250.000	(397.750.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000 10 1.01 10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	750.000.000	0	0	0	750.000.000	4.671.406.000	21.000.000	0	0	4.692.406.000	3.942.406.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.01 11	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	760.133.400	0	0	0	760.133.400	(239.866.600)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.01 12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	540.277.000	0	0	0	540.277.000	465.767.000	0	0	0	465.767.000	(74.510.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.01 13	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	971.000.000	0	0	0	971.000.000	943.676.000	0	0	0	943.676.000	(27.324.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	950.000.000	0	0	0	950.000.000	336.789.000	0	0	0	336.789.000	(613.211.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.02 01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	950.000.000	0	0	0	950.000.000	336.789.000	0	0	0	336.789.000	(613.211.000)
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	0	0	0	165.815.000	256.890.000	0	0	422.705.000	422.705.000
4 01 4.01.2.10.1.03.01.0000	10 1.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	0	0	0	165.815.000	256.890.000	0	0	422.705.000	422.705.000
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	573.840.000	0	0	0	573.840.000	158.976.000	171.100.000	0	0	330.076.000	(243.764.000)
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	573.840.000	0	0	0	573.840.000	158.976.000	171.100.000	0	0	330.076.000	(243.764.000)
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	10 1.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	573.840.000	0	0	0	573.840.000	158.976.000	0	0	0	158.976.000	(414.864.000)
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	10 1.02 07	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	573.840.000	0	0	0	573.840.000	158.976.000	0	0	0	158.976.000	(414.864.000)
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	10 1.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	0	0	0	0	171.100.000	0	0	171.100.000	171.100.000
4 01 5.03.4.01.0.00.01.0000	10 1.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	0	0	0	0	171.100.000	0	0	171.100.000	171.100.000
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.594.863.000	0	0	0	1.594.863.000	1.214.560.000	381.751.220	0	0	1.596.311.220	1.448.220

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.594.863.000	0	0	0	1.594.863.000	1.214.560.000	381.751.220	0	0	1.596.311.220	1.448.220
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	0	0	0	185.669.000	381.751.220	0	0	567.420.220	567.420.220
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	0	0	0	185.669.000	381.751.220	0	0	567.420.220	567.420.220
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	1.594.863.000	0	0	0	1.594.863.000	1.028.891.000	0	0	0	1.028.891.000	(565.972.000)
4 01 5.04.4.01.0.00.01.0000 10 1.09 01	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur	1.594.863.000	0	0	0	1.594.863.000	1.028.891.000	0	0	0	1.028.891.000	(565.972.000)
9 02 9.02.4.01.1.03.01.0000	PANIRADYA KAISTIMEWAN	21.230.246.920	2.493.115.500	0	0	23.723.362.420	20.276.277.976	2.500.154.400	0	0	22.776.432.376	(946.930.044)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.953.769.920	188.961.000	0	0	7.142.730.920	6.572.667.976	188.961.000	0	0	6.761.628.976	(381.101.944)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	0	0	0	17.200.000	17.200.000	0	0	0	17.200.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	0	0	0	11.700.000	11.700.000	0	0	0	11.700.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.502.005.420	0	0	0	6.502.005.420	6.164.913.476	0	0	0	6.164.913.476	(337.091.944)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.445.305.420	0	0	0	6.445.305.420	6.108.213.476	0	0	0	6.108.213.476	(337.091.944)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.600.000	0	0	0	52.600.000	52.600.000	0	0	0	52.600.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.884.000	600.000	0	0	233.484.000	188.874.000	600.000	0	0	189.474.000	(44.010.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.000	0	0	0	1.028.000	1.028.000	0	0	0	1.028.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.146.000	0	0	0	3.146.000	3.146.000	0	0	0	3.146.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.948.000	0	0	0	16.948.000	16.948.000	0	0	0	16.948.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.682.000	600.000	0	0	9.282.000	8.682.000	600.000	0	0	9.282.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.080.000	0	0	0	203.080.000	159.070.000	0	0	0	159.070.000	(44.010.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	188.361.000	0	0	188.361.000	0	188.361.000	0	0	188.361.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	188.361.000	0	0	188.361.000	0	188.361.000	0	0	188.361.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.000	0	0	0	12.562.000	12.562.000	0	0	0	12.562.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.562.000	0	0	0	12.562.000	12.562.000	0	0	0	12.562.000	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.118.500	0	0	0	189.118.500	189.118.500	0	0	0	189.118.500	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.918.500	0	0	0	175.918.500	175.918.500	0	0	0	175.918.500	0
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	14.276.477.000	2.304.154.500	0	0	16.580.631.500	13.703.610.000	2.311.193.400	0	0	16.014.803.400	(565.828.100)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	543.627.000	0	0	0	543.627.000	421.811.000	0	0	0	421.811.000	(121.816.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	326.381.000	0	0	0	326.381.000	300.158.000	0	0	0	300.158.000	(26.223.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.03 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	217.246.000	0	0	0	217.246.000	121.653.000	0	0	0	121.653.000	(95.593.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	772.565.000	0	0	0	772.565.000	920.787.500	0	0	0	920.787.500	148.222.500
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	462.000.000	0	0	0	462.000.000	746.008.500	0	0	0	746.008.500	284.008.500
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.04 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	310.565.000	0	0	0	310.565.000	174.779.000	0	0	0	174.779.000	(135.786.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	1.502.245.000	0	0	0	1.502.245.000	825.366.000	0	0	0	825.366.000	(676.879.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	845.771.000	0	0	0	845.771.000	634.135.000	0	0	0	634.135.000	(211.636.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.05 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	656.474.000	0	0	0	656.474.000	191.231.000	0	0	0	191.231.000	(465.243.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	4.388.843.000	0	0	0	4.388.843.000	3.850.079.000	0	0	0	3.850.079.000	(538.764.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.540.299.000	0	0	0	2.540.299.000	2.017.083.000	0	0	0	2.017.083.000	(523.216.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.06 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.848.544.000	0	0	0	1.848.544.000	1.832.996.000	0	0	0	1.832.996.000	(15.548.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	2.245.501.500	0	0	2.245.501.500	35.000.000	2.206.972.400	0	0	2.241.972.400	(3.529.100)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.07 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	2.245.501.500	0	0	2.245.501.500	35.000.000	2.206.972.400	0	0	2.241.972.400	(3.529.100)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.526.000.000	0	0	0	1.526.000.000	900.213.000	0	0	0	900.213.000	(625.787.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.08 01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.526.000.000	0	0	0	1.526.000.000	900.213.000	0	0	0	900.213.000	(625.787.000)
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	5.543.197.000	58.653.000	0	0	5.601.850.000	6.750.353.500	104.221.000	0	0	6.854.574.500	1.252.724.500
4 01 9.02.4.01.1.03.01.0000 10 1.09 02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	5.543.197.000	58.653.000	0	0	5.601.850.000	6.750.353.500	104.221.000	0	0	6.854.574.500	1.252.724.500
4 02	SEKRETARIAT DPRD	128.166.176.797	88.072.000	0	0	128.254.248.797	113.254.227.821	276.210.000	0	0	113.530.437.821	(14.723.810.976)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	128.166.176.797	88.072.000	0	0	128.254.248.797	113.254.227.821	276.210.000	0	0	113.530.437.821	(14.723.810.976)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.211.570.797	88.072.000	0	0	65.299.642.797	63.073.758.821	276.210.000	0	0	63.349.968.821	(1.949.673.976)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.325.000	0	0	0	124.325.000	111.640.000	0	0	0	111.640.000	(12.685.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.116.000	0	0	0	68.116.000	65.116.000	0	0	0	65.116.000	(3.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.209.000	0	0	0	56.209.000	46.524.000	0	0	0	46.524.000	(9.685.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.123.389.157	0	0	0	10.123.389.157	9.476.532.181	0	0	0	9.476.532.181	(646.856.976)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.984.299.407	0	0	0	9.984.299.407	9.337.442.431	0	0	0	9.337.442.431	(646.856.976)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000	0	0	0	79.320.000	79.320.000	0	0	0	79.320.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.400.000	0	0	0	25.400.000	25.400.000	0	0	0	25.400.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.369.750	0	0	0	34.369.750	34.369.750	0	0	0	34.369.750	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.991.924.000	10.500.000	0	0	3.002.424.000	3.112.540.000	10.500.000	0	0	3.123.040.000	120.616.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.619.000	0	0	0	17.619.000	42.469.000	0	0	0	42.469.000	24.850.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.552.000	10.500.000	0	0	307.052.000	478.012.000	10.500.000	0	0	488.512.000	181.460.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	498.486.000	0	0	0	498.486.000	498.486.000	0	0	0	498.486.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.179.267.000	0	0	0	2.179.267.000	2.093.573.000	0	0	0	2.093.573.000	(85.694.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000	38.788.000	0	0	1.538.788.000	500.000	265.710.000	0	0	266.210.000	(1.272.578.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	38.788.000	0	0	38.788.000	500.000	265.710.000	0	0	266.210.000	227.422.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	0	(1.500.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.814.000	0	0	0	1.063.814.000	961.400.000	0	0	0	961.400.000	(102.414.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.063.814.000	0	0	0	1.063.814.000	961.400.000	0	0	0	961.400.000	(102.414.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.360.014.200	38.784.000	0	0	4.398.798.200	4.454.302.200	0	0	0	4.454.302.200	55.504.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	356.355.600	0	0	0	356.355.600	351.773.600	0	0	0	351.773.600	(4.582.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	967.932.600	0	0	0	967.932.600	876.802.600	0	0	0	876.802.600	(91.130.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.950.000	38.784.000	0	0	329.734.000	290.950.000	0	0	0	290.950.000	(38.784.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.744.776.000	0	0	0	2.744.776.000	2.934.776.000	0	0	0	2.934.776.000	190.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.827.023.440	0	0	0	41.827.023.440	41.769.023.440	0	0	0	41.769.023.440	(58.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.895.548.440	0	0	0	40.895.548.440	40.895.548.440	0	0	0	40.895.548.440	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	688.475.000	0	0	0	688.475.000	630.475.000	0	0	0	630.475.000	(58.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	243.000.000	0	0	0	243.000.000	243.000.000	0	0	0	243.000.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	3.221.081.000	0	0	0	3.221.081.000	3.187.821.000	0	0	0	3.187.821.000	(33.260.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.666.942.000	0	0	0	1.666.942.000	1.666.942.000	0	0	0	1.666.942.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.554.139.000	0	0	0	1.554.139.000	1.520.879.000	0	0	0	1.520.879.000	(33.260.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.954.606.000	0	0	0	62.954.606.000	50.180.469.000	0	0	0	50.180.469.000	(12.774.137.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	15.074.563.000	0	0	0	15.074.563.000	13.632.230.000	0	0	0	13.632.230.000	(1.442.333.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.255.314.000	0	0	0	3.255.314.000	2.514.652.000	0	0	0	2.514.652.000	(740.662.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	7.294.035.000	0	0	0	7.294.035.000	7.080.019.000	0	0	0	7.080.019.000	(214.016.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	852.388.000	0	0	0	852.388.000	821.063.000	0	0	0	821.063.000	(31.325.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3.672.826.000	0	0	0	3.672.826.000	3.216.496.000	0	0	0	3.216.496.000	(456.330.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.321.771.000	0	0	0	3.321.771.000	2.180.098.000	0	0	0	2.180.098.000	(1.141.673.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	511.752.000	0	0	0	511.752.000	333.668.000	0	0	0	333.668.000	(178.084.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.444.000	0	0	0	121.444.000	121.444.000	0	0	0	121.444.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 03	Pembahasan APBD	766.736.000	0	0	0	766.736.000	458.367.000	0	0	0	458.367.000	(308.369.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	525.654.000	0	0	0	525.654.000	343.260.000	0	0	0	343.260.000	(182.394.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 05	Pembahasan Laporan Semester	744.429.000	0	0	0	744.429.000	521.407.000	0	0	0	521.407.000	(223.022.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	651.756.000	0	0	0	651.756.000	401.952.000	0	0	0	401.952.000	(249.804.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.099.112.000	0	0	0	3.099.112.000	3.108.948.000	0	0	0	3.108.948.000	9.836.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	751.612.000	0	0	0	751.612.000	716.018.000	0	0	0	716.018.000	(35.594.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	782.500.000	0	0	0	782.500.000	780.350.000	0	0	0	780.350.000	(2.150.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	782.500.000	0	0	0	782.500.000	928.948.000	0	0	0	928.948.000	146.448.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	782.500.000	0	0	0	782.500.000	683.632.000	0	0	0	683.632.000	(98.868.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.780.609.000	0	0	0	15.780.609.000	17.542.710.000	0	0	0	17.542.710.000	1.762.101.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	2.654.156.000	0	0	0	2.654.156.000	3.562.108.000	0	0	0	3.562.108.000	907.952.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.224.363.000	0	0	0	4.224.363.000	5.968.643.000	0	0	0	5.968.643.000	1.744.280.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.446.300.000	0	0	0	1.446.300.000	1.374.300.000	0	0	0	1.374.300.000	(72.000.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	648.315.000	0	0	0	648.315.000	648.315.000	0	0	0	648.315.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.805.654.000	0	0	0	4.805.654.000	4.593.314.000	0	0	0	4.593.314.000	(212.340.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.001.821.000	0	0	0	2.001.821.000	1.396.030.000	0	0	0	1.396.030.000	(605.791.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.896.239.000	0	0	0	3.896.239.000	4.211.839.000	0	0	0	4.211.839.000	315.600.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	244.942.000	0	0	0	244.942.000	244.942.000	0	0	0	244.942.000	0
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	3.651.297.000	0	0	0	3.651.297.000	3.966.897.000	0	0	0	3.966.897.000	315.600.000
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	591.281.000	0	0	0	591.281.000	457.131.000	0	0	0	457.131.000	(134.150.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	591.281.000	0	0	0	591.281.000	457.131.000	0	0	0	457.131.000	(134.150.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	21.191.031.000	0	0	0	21.191.031.000	9.047.513.000	0	0	0	9.047.513.000	(12.143.518.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17.036.774.000	0	0	0	17.036.774.000	4.926.563.000	0	0	0	4.926.563.000	(12.110.211.000)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	29.591.000	0	0	0	29.591.000	29.591.000	0	0	0	29.591.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.124.666.000	0	0	0	4.124.666.000	4.091.359.000	0	0	0	4.091.359.000	(33.307.000)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	288.274.373.020	5.025.950.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.606.263.828.038	246.496.444.549	4.161.719.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.590.767.604.312	(15.496.223.726)
5 01	PERENCANAAN	21.305.313.573	201.340.000	0	0	21.506.653.573	19.818.401.309	201.340.000	0	0	20.019.741.309	(1.486.912.264)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.305.313.573	201.340.000	0	0	21.506.653.573	19.818.401.309	201.340.000	0	0	20.019.741.309	(1.486.912.264)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.623.074.273	201.340.000	0	0	15.824.414.273	14.848.989.109	201.340.000	0	0	15.050.329.109	(774.085.164)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.777.000	0	0	0	229.777.000	147.984.500	0	0	0	147.984.500	(81.792.500)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.380.000	0	0	0	205.380.000	123.587.500	0	0	0	123.587.500	(81.792.500)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.365.000	0	0	0	12.365.000	12.365.000	0	0	0	12.365.000	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.032.000	0	0	0	12.032.000	12.032.000	0	0	0	12.032.000	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.649.048.573	0	0	0	13.649.048.573	13.494.839.259	0	0	0	13.494.839.259	(154.209.314)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.574.758.573	0	0	0	13.574.758.573	13.422.844.259	0	0	0	13.422.844.259	(151.914.314)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.990.000	0	0	0	46.990.000	44.695.000	0	0	0	44.695.000	(2.295.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.300.000	0	0	0	27.300.000	27.300.000	0	0	0	27.300.000	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.470.250	201.340.000	0	0	1.045.810.250	354.987.250	201.340.000	0	0	556.327.250	(489.483.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	201.340.000	0	0	201.340.000	0	201.340.000	0	0	201.340.000	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.470.250	0	0	0	844.470.250	354.987.250	0	0	0	354.987.250	(489.483.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.984.450	0	0	0	533.984.450	491.294.100	0	0	0	491.294.100	(42.690.350)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.984.450	0	0	0	533.984.450	491.294.100	0	0	0	491.294.100	(42.690.350)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.794.000	0	0	0	365.794.000	359.884.000	0	0	0	359.884.000	(5.910.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.711.000	0	0	0	210.711.000	154.735.000	0	0	0	154.735.000	(55.976.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.195.000	0	0	0	85.195.000	85.195.000	0	0	0	85.195.000	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.888.000	0	0	0	69.888.000	119.954.000	0	0	0	119.954.000	50.066.000
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.404.240.350	0	0	0	4.404.240.350	3.813.840.500	0	0	0	3.813.840.500	(590.399.850)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.387.235.000	0	0	0	2.387.235.000	2.076.820.000	0	0	0	2.076.820.000	(310.415.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	133.606.000	0	0	0	133.606.000	121.156.000	0	0	0	121.156.000	(12.450.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.253.629.000	0	0	0	2.253.629.000	1.955.664.000	0	0	0	1.955.664.000	(297.965.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.017.005.350	0	0	0	2.017.005.350	1.737.020.500	0	0	0	1.737.020.500	(279.984.850)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	73.390.000	0	0	0	73.390.000	44.672.000	0	0	0	44.672.000	(28.718.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.857.265.350	0	0	0	1.857.265.350	1.615.823.500	0	0	0	1.615.823.500	(241.441.850)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	86.350.000	0	0	0	86.350.000	76.525.000	0	0	0	76.525.000	(9.825.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.277.998.950	0	0	0	1.277.998.950	1.155.571.700	0	0	0	1.155.571.700	(122.427.250)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	794.103.950	0	0	0	794.103.950	756.572.700	0	0	0	756.572.700	(37.531.250)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	184.564.500	0	0	0	184.564.500	184.564.500	0	0	0	184.564.500	0
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	65.613.500	0	0	0	65.613.500	52.262.250	0	0	0	52.262.250	(13.351.250)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	158.535.000	0	0	0	158.535.000	143.385.000	0	0	0	143.385.000	(15.150.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	385.390.950	0	0	0	385.390.950	376.360.950	0	0	0	376.360.950	(9.030.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	345.575.000	0	0	0	345.575.000	290.987.000	0	0	0	290.987.000	(54.588.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.984.000	0	0	0	279.984.000	242.572.000	0	0	0	242.572.000	(37.412.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	65.591.000	0	0	0	65.591.000	48.415.000	0	0	0	48.415.000	(17.176.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	138.320.000	0	0	0	138.320.000	108.012.000	0	0	0	108.012.000	(30.308.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.607.000	0	0	0	51.607.000	42.663.000	0	0	0	42.663.000	(8.944.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.193.000	0	0	0	20.193.000	14.169.000	0	0	0	14.169.000	(6.024.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.327.000	0	0	0	54.327.000	42.587.000	0	0	0	42.587.000	(11.740.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.193.000	0	0	0	12.193.000	8.593.000	0	0	0	8.593.000	(3.600.000)
5 02	KEUANGAN	207.422.176.043	3.577.431.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.523.963.112.061	169.452.512.330	2.680.144.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	207.422.176.043	3.577.431.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.523.963.112.061	169.452.512.330	2.680.144.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	190.268.716.111	2.314.658.000	0	0	192.583.374.111	153.005.521.648	1.414.658.000	0	0	154.420.179.648	(38.163.194.463)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.173.000	0	0	0	118.173.000	102.843.000	0	0	0	102.843.000	(15.330.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.406.000	0	0	0	46.406.000	40.076.000	0	0	0	40.076.000	(6.330.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.758.000	0	0	0	20.758.000	18.358.000	0	0	0	18.358.000	(2.400.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.747.000	0	0	0	21.747.000	19.947.000	0	0	0	19.947.000	(1.800.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.262.000	0	0	0	29.262.000	24.462.000	0	0	0	24.462.000	(4.800.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.887.853.183	0	0	0	169.887.853.183	136.678.880.770	0	0	0	136.678.880.770	(33.208.972.413)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	169.472.863.183	0	0	0	169.472.863.183	136.280.690.770	0	0	0	136.280.690.770	(33.192.172.413)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.620.000	0	0	0	337.620.000	320.820.000	0	0	0	320.820.000	(16.800.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.490.000	0	0	0	53.490.000	53.490.000	0	0	0	53.490.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.477.000	0	0	0	14.477.000	14.477.000	0	0	0	14.477.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.780.000	0	0	0	6.780.000	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.623.000	0	0	0	2.623.000	2.623.000	0	0	0	2.623.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.257.462.500	200.000.000	0	0	4.457.462.500	3.089.242.500	0	0	0	3.089.242.500	(1.368.220.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.142.462.500	200.000.000	0	0	4.342.462.500	2.974.242.500	0	0	0	2.974.242.500	(1.368.220.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.000.000	0	0	0	115.000.000	115.000.000	0	0	0	115.000.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.868.047.700	6.975.000	0	0	1.875.022.700	1.277.619.700	6.975.000	0	0	1.284.594.700	(590.428.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.414.450	2.400.000	0	0	99.814.450	97.414.450	2.400.000	0	0	99.814.450	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.605.000	0	0	0	46.605.000	46.605.000	0	0	0	46.605.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	247.868.000	0	0	0	247.868.000	247.868.000	0	0	0	247.868.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.565.000	4.000.000	0	0	33.565.000	28.365.000	4.000.000	0	0	32.365.000	(1.200.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	398.154.250	0	0	0	398.154.250	389.254.250	0	0	0	389.254.250	(8.900.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.493.000	575.000	0	0	47.068.000	46.493.000	575.000	0	0	47.068.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000	0	0	0	39.960.000	39.960.000	0	0	0	39.960.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	941.058.000	0	0	0	941.058.000	360.730.000	0	0	0	360.730.000	(580.328.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.930.000	0	0	0	20.930.000	20.930.000	0	0	0	20.930.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.889.267.000	1.322.847.000	0	0	3.212.114.000	43.307.000	1.322.847.000	0	0	1.366.154.000	(1.845.960.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0	86.100.000	0	0	86.100.000	0	86.100.000	0	0	86.100.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.200.000	771.752.000	0	0	790.952.000	19.200.000	771.752.000	0	0	790.952.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.848.747.000	60.000.000	0	0	1.908.747.000	2.787.000	60.000.000	0	0	62.787.000	(1.845.960.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.320.000	404.995.000	0	0	426.315.000	21.320.000	404.995.000	0	0	426.315.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.939.983.800	1.236.000	0	0	8.941.219.800	8.602.244.750	1.236.000	0	0	8.603.480.750	(337.739.050)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	535.174.300	1.236.000	0	0	536.410.300	535.174.300	1.236.000	0	0	536.410.300	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.486.355.100	0	0	0	3.486.355.100	3.148.616.050	0	0	0	3.148.616.050	(337.739.050)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.100.000	0	0	0	762.100.000	762.100.000	0	0	0	762.100.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.156.354.400	0	0	0	4.156.354.400	4.156.354.400	0	0	0	4.156.354.400	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.307.928.928	783.600.000	0	0	4.091.528.928	3.211.383.928	83.600.000	0	0	3.294.983.928	(796.545.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.824.300	0	0	0	31.824.300	28.908.300	0	0	0	28.908.300	(2.916.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	753.797.600	0	0	0	753.797.600	686.366.600	0	0	0	686.366.600	(67.431.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	14.320.000	0	0	0	14.320.000	14.320.000	0	0	0	14.320.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	952.720.000	0	0	0	952.720.000	952.720.000	0	0	0	952.720.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	981.953.028	700.000.000	0	0	1.681.953.028	981.953.028	0	0	0	981.953.028	(700.000.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	573.314.000	83.600.000	0	0	656.914.000	547.116.000	83.600.000	0	0	630.716.000	(26.198.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.445.748.932	3.512.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.318.412.765.950	5.221.259.682	3.512.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.345.334.212.445	26.921.446.495
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.761.257.750	0	0	0	3.761.257.750	3.686.576.750	0	0	0	3.686.576.750	(74.681.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	313.163.000	0	0	0	313.163.000	332.045.000	0	0	0	332.045.000	18.882.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	305.935.000	0	0	0	305.935.000	341.185.000	0	0	0	341.185.000	35.250.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	74.659.000	0	0	0	74.659.000	65.983.000	0	0	0	65.983.000	(8.676.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	641.754.000	0	0	0	641.754.000	669.837.000	0	0	0	669.837.000	28.083.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	914.355.000	0	0	0	914.355.000	874.905.000	0	0	0	874.905.000	(39.450.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.381.018.750	0	0	0	1.381.018.750	1.282.338.750	0	0	0	1.282.338.750	(98.680.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	130.373.000	0	0	0	130.373.000	120.283.000	0	0	0	120.283.000	(10.090.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	404.442.000	0	0	0	404.442.000	366.792.000	0	0	0	366.792.000	(37.650.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	126.916.000	0	0	0	126.916.000	116.341.000	0	0	0	116.341.000	(10.575.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	126.893.000	0	0	0	126.893.000	117.818.000	0	0	0	117.818.000	(9.075.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.761.000	0	0	0	143.761.000	125.761.000	0	0	0	125.761.000	(18.000.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	6.872.000	0	0	0	6.872.000	6.872.000	0	0	0	6.872.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	321.140.000	0	0	0	321.140.000	306.510.000	0	0	0	306.510.000	(14.630.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.250.000	0	0	0	117.250.000	112.750.000	0	0	0	112.750.000	(4.500.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	203.890.000	0	0	0	203.890.000	193.760.000	0	0	0	193.760.000	(10.130.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	958.909.182	3.512.000	0	0	962.421.182	861.380.932	3.512.000	0	0	864.892.932	(97.528.250)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	114.620.000	0	0	0	114.620.000	114.620.000	0	0	0	114.620.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14.752.000	0	0	0	14.752.000	14.752.000	0	0	0	14.752.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	557.944.000	0	0	0	557.944.000	527.965.250	0	0	0	527.965.250	(29.978.750)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.411.000	0	0	0	6.411.000	6.411.000	0	0	0	6.411.000	0
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	143.564.182	3.512.000	0	0	147.076.182	131.190.682	3.512.000	0	0	134.702.682	(12.373.500)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	121.618.000	0	0	0	121.618.000	66.442.000	0	0	0	66.442.000	(55.176.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.312.963.505.018	0	0	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.340.109.440.763	27.145.935.745
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	559.612.866.500	559.612.866.500	0	0	0	551.386.348.058	551.386.348.058	(8.226.518.442)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	69.073.641.335	0	69.073.641.335	0	0	90.251.899.580	0	90.251.899.580	21.178.258.245
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	0	0	0	684.276.997.183	684.276.997.183	0	0	698.471.193.125	698.471.193.125	14.194.195.942	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	788.084.000	928.850.000	0	0	1.716.934.000	806.322.000	956.350.000	0	0	1.762.672.000	45.738.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	788.084.000	928.850.000	0	0	1.716.934.000	806.322.000	956.350.000	0	0	1.762.672.000	45.738.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	235.114.000	50.000.000	0	0	285.114.000	285.114.000	50.000.000	0	0	335.114.000	50.000.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	21.150.000	778.850.000	0	0	800.000.000	21.150.000	806.350.000	0	0	827.500.000	27.500.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	408.190.000	0	0	0	408.190.000	476.428.000	0	0	0	476.428.000	68.238.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	123.630.000	100.000.000	0	0	223.630.000	23.630.000	100.000.000	0	0	123.630.000	(100.000.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.919.627.000	330.411.000	0	0	11.250.038.000	10.419.409.000	305.624.000	0	0	10.725.033.000	(525.005.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.919.627.000	330.411.000	0	0	11.250.038.000	10.419.409.000	305.624.000	0	0	10.725.033.000	(525.005.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.011.283.000	198.000.000	0	0	1.209.283.000	953.016.000	198.000.000	0	0	1.151.016.000	(58.267.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	97.690.000	0	0	0	97.690.000	123.190.000	0	0	0	123.190.000	25.500.000
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.020.783.000	0	0	0	1.020.783.000	944.319.000	0	0	0	944.319.000	(76.464.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.170.495.250	35.471.000	0	0	2.205.966.250	2.043.065.250	35.471.000	0	0	2.078.536.250	(127.430.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6.240.675.750	96.940.000	0	0	6.337.615.750	6.070.918.750	72.153.000	0	0	6.143.071.750	(194.544.000)
5 02 5.02.9.02.0.00.04.0000 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	378.700.000	0	0	0	378.700.000	284.900.000	0	0	0	284.900.000	(93.800.000)
5 03	KEPEGAWAIAN	29.946.019.001	1.116.803.000	0	0	31.062.822.001	29.615.895.479	1.107.919.000	0	0	30.723.814.479	(339.007.522)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	29.946.019.001	1.116.803.000	0	0	31.062.822.001	29.615.895.479	1.107.919.000	0	0	30.723.814.479	(339.007.522)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.039.836.251	868.707.000	0	0	17.908.543.251	18.872.182.229	839.307.000	0	0	19.711.489.229	1.802.945.978
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.091.000	0	0	0	156.091.000	102.774.000	0	0	0	102.774.000	(53.317.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.093.000	0	0	0	121.093.000	73.906.000	0	0	0	73.906.000	(47.187.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.998.000	0	0	0	34.998.000	28.868.000	0	0	0	28.868.000	(6.130.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.363.443.773	0	0	0	11.363.443.773	14.663.464.651	0	0	0	14.663.464.651	3.300.020.878

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.294.488.773	0	0	0	11.294.488.773	14.585.809.651	0	0	0	14.585.809.651	3.291.320.878
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.011.000	0	0	0	49.011.000	57.711.000	0	0	0	57.711.000	8.700.000
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000	0	0	0	3.180.000	3.180.000	0	0	0	3.180.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.764.000	0	0	0	16.764.000	16.764.000	0	0	0	16.764.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.942.884.500	768.707.000	0	0	2.711.591.500	864.199.500	839.307.000	0	0	1.703.506.500	(1.008.085.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.429.000	0	0	0	32.429.000	32.429.000	0	0	0	32.429.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.412.500	768.707.000	0	0	771.119.500	2.295.000	839.307.000	0	0	841.602.000	70.482.500
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.860.000	0	0	0	71.860.000	71.860.000	0	0	0	71.860.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.275.000	0	0	0	101.275.000	101.275.000	0	0	0	101.275.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000	0	0	0	2.820.000	2.820.000	0	0	0	2.820.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	91.776.000	0	0	0	91.776.000	91.776.000	0	0	0	91.776.000	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.640.312.000	0	0	0	1.640.312.000	561.744.500	0	0	0	561.744.500	(1.078.567.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.872.650	0	0	0	397.872.650	397.860.150	0	0	0	397.860.150	(12.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.352.750	0	0	0	41.352.750	41.352.750	0	0	0	41.352.750	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.519.900	0	0	0	356.519.900	356.507.400	0	0	0	356.507.400	(12.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.179.544.328	100.000.000	0	0	3.279.544.328	2.843.883.928	0	0	0	2.843.883.928	(435.660.400)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.908.000	0	0	0	159.908.000	159.908.000	0	0	0	159.908.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.924.500	0	0	0	8.924.500	8.924.500	0	0	0	8.924.500	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	8.160.000	0	0	0	8.160.000	0	0	0	0	0	(8.160.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.769.900	0	0	0	330.769.900	330.769.900	0	0	0	330.769.900	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.872.932.900	100.000.000	0	0	1.972.932.900	1.545.432.500	0	0	0	1.545.432.500	(427.500.400)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	798.849.028	0	0	0	798.849.028	798.849.028	0	0	0	798.849.028	0
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.906.182.750	248.096.000	0	0	13.154.278.750	10.743.713.250	268.612.000	0	0	11.012.325.250	(2.141.953.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.998.789.000	20.950.000	0	0	3.019.739.000	2.539.647.000	190.950.000	0	0	2.730.597.000	(289.142.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	141.623.000	0	0	0	141.623.000	68.146.000	0	0	0	68.146.000	(73.477.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.683.090.000	0	0	0	1.683.090.000	1.435.130.000	0	0	0	1.435.130.000	(247.960.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	395.044.000	0	0	0	395.044.000	312.594.000	0	0	0	312.594.000	(82.450.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	394.000.000	20.950.000	0	0	414.950.000	394.000.000	190.950.000	0	0	584.950.000	170.000.000
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	385.032.000	0	0	0	385.032.000	329.777.000	0	0	0	329.777.000	(55.255.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.350.952.000	0	0	0	1.350.952.000	1.228.225.000	0	0	0	1.228.225.000	(122.727.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	204.904.000	0	0	0	204.904.000	200.279.000	0	0	0	200.279.000	(4.625.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	281.092.000	0	0	0	281.092.000	211.910.000	0	0	0	211.910.000	(69.182.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	864.956.000	0	0	0	864.956.000	816.036.000	0	0	0	816.036.000	(48.920.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	7.391.328.750	227.146.000	0	0	7.618.474.750	6.679.403.250	77.662.000	0	0	6.757.065.250	(861.409.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	829.007.000	227.146.000	0	0	1.056.153.000	954.942.000	77.662.000	0	0	1.032.604.000	(23.549.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	183.943.000	0	0	0	183.943.000	181.813.000	0	0	0	181.813.000	(2.130.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.892.955.000	0	0	0	3.892.955.000	3.511.080.000	0	0	0	3.511.080.000	(381.875.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.210.087.750	0	0	0	2.210.087.750	1.818.062.250	0	0	0	1.818.062.250	(392.025.500)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	112.036.000	0	0	0	112.036.000	87.706.000	0	0	0	87.706.000	(24.330.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	163.300.000	0	0	0	163.300.000	125.800.000	0	0	0	125.800.000	(37.500.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.165.113.000	0	0	0	1.165.113.000	296.438.000	0	0	0	296.438.000	(868.675.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	261.012.000	0	0	0	261.012.000	149.742.000	0	0	0	149.742.000	(111.270.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	734.185.000	0	0	0	734.185.000	0	0	0	0	0	(734.185.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	13.872.000	0	0	0	13.872.000	6.622.000	0	0	0	6.622.000	(7.250.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	146.965.000	0	0	0	146.965.000	132.795.000	0	0	0	132.795.000	(14.170.000)
5 03 5.03.4.01.0.00.01.0000 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.079.000	0	0	0	9.079.000	7.279.000	0	0	0	7.279.000	(1.800.000)
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21.779.850.068	105.376.000	0	0	21.885.226.068	20.717.070.414	147.316.000	0	0	20.864.386.414	(1.020.839.654)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21.779.850.068	105.376.000	0	0	21.885.226.068	20.717.070.414	147.316.000	0	0	20.864.386.414	(1.020.839.654)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.440.102.068	105.376.000	0	0	13.545.478.068	12.713.339.414	147.316.000	0	0	12.860.655.414	(684.822.654)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.630.000	0	0	0	119.630.000	102.360.000	0	0	0	102.360.000	(17.270.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.630.000	0	0	0	84.630.000	78.705.000	0	0	0	78.705.000	(5.925.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	0	0	0	35.000.000	23.655.000	0	0	0	23.655.000	(11.345.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.762.723.118	0	0	0	9.762.723.118	9.225.236.814	0	0	0	9.225.236.814	(537.486.304)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.739.723.118	0	0	0	9.739.723.118	9.204.125.314	0	0	0	9.204.125.314	(535.597.804)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.973.600	0	0	0	6.973.600	6.407.000	0	0	0	6.407.000	(566.600)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.843.200	0	0	0	10.843.200	9.936.000	0	0	0	9.936.000	(907.200)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.183.200	0	0	0	5.183.200	4.768.500	0	0	0	4.768.500	(414.700)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.389.350	105.376.000	0	0	1.105.765.350	616.505.350	147.316.000	0	0	763.821.350	(341.944.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.582.400	0	0	0	38.582.400	38.440.400	0	0	0	38.440.400	(142.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.090.000	105.376.000	0	0	150.466.000	45.090.000	147.316.000	0	0	192.406.000	41.940.000
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.906.000	0	0	0	13.906.000	13.906.000	0	0	0	13.906.000	0
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.020.000	0	0	0	31.020.000	31.020.000	0	0	0	31.020.000	0
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.790.950	0	0	0	871.790.950	488.048.950	0	0	0	488.048.950	(383.742.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.696.459.600	0	0	0	1.696.459.600	1.581.087.250	0	0	0	1.581.087.250	(115.372.350)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.280.000	0	0	0	9.280.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(2.180.000)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	603.999.600	0	0	0	603.999.600	490.207.250	0	0	0	490.207.250	(113.792.350)
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.180.000	0	0	0	1.083.180.000	1.083.780.000	0	0	0	1.083.780.000	600.000
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.900.000	0	0	0	860.900.000	1.188.150.000	0	0	0	1.188.150.000	327.250.000
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.990.000	0	0	0	149.990.000	149.990.000	0	0	0	149.990.000	0
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	533.910.000	0	0	0	533.910.000	867.160.000	0	0	0	867.160.000	333.250.000
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.000.000	0	0	0	177.000.000	171.000.000	0	0	0	171.000.000	(6.000.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.339.748.000	0	0	0	8.339.748.000	8.003.731.000	0	0	0	8.003.731.000	(336.017.000)
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	485.424.000	0	0	0	485.424.000	357.576.000	0	0	0	357.576.000	(127.848.000)
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	145.100.000	0	0	0	145.100.000	145.100.000	0	0	0	145.100.000	0
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	340.324.000	0	0	0	340.324.000	212.476.000	0	0	0	212.476.000	(127.848.000)
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.854.324.000	0	0	0	7.854.324.000	7.646.155.000	0	0	0	7.646.155.000	(208.169.000)
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	553.660.000	0	0	0	553.660.000	539.955.000	0	0	0	539.955.000	(13.705.000)
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	51.912.000	0	0	0	51.912.000	51.912.000	0	0	0	51.912.000	0
5	04	5.04.4.01.0.00.01.0000	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	93.686.000	0	0	0	93.686.000	88.274.000	0	0	0	88.274.000	(5.412.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 04 5.04.4.01.0.00.01.0000 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.155.066.000	0	0	0	7.155.066.000	6.966.014.000	0	0	0	6.966.014.000	(189.052.000)
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	422.621.770	0	0	0	422.621.770	328.509.770	0	0	0	328.509.770	(94.112.000)
5 01 5.01.2.20.5.05.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	422.621.770	0	0	0	422.621.770	328.509.770	0	0	0	328.509.770	(94.112.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	422.621.770	0	0	0	422.621.770	328.509.770	0	0	0	328.509.770	(94.112.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.900.000	0	0	0	103.900.000	103.900.000	0	0	0	103.900.000	0
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	103.900.000	0	0	0	103.900.000	103.900.000	0	0	0	103.900.000	0
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	97.049.000	0	0	0	97.049.000	88.649.000	0	0	0	88.649.000	(8.400.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	47.819.000	0	0	0	47.819.000	43.619.000	0	0	0	43.619.000	(4.200.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	49.230.000	0	0	0	49.230.000	45.030.000	0	0	0	45.030.000	(4.200.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	221.672.770	0	0	0	221.672.770	135.960.770	0	0	0	135.960.770	(85.712.000)
5 05 5.01.2.20.5.05.01.0000 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	221.672.770	0	0	0	221.672.770	135.960.770	0	0	0	135.960.770	(85.712.000)
5 06	PENGLOLAAN PERBATASAN	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247	(121.512.318)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247	(121.512.318)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247	(121.512.318)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.500.000	0	0	0	18.500.000	13.847.000	0	0	0	13.847.000	(4.653.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.212.000	0	0	0	8.212.000	7.366.000	0	0	0	7.366.000	(846.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.236.000	0	0	0	1.236.000	766.000	0	0	0	766.000	(470.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.236.000	0	0	0	1.236.000	766.000	0	0	0	766.000	(470.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.236.000	0	0	0	1.236.000	1.236.000	0	0	0	1.236.000	0
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.236.000	0	0	0	1.236.000	766.000	0	0	0	766.000	(470.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.344.000	0	0	0	5.344.000	2.947.000	0	0	0	2.947.000	(2.397.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.888.813.565	0	0	0	4.888.813.565	4.779.785.747	0	0	0	4.779.785.747	(109.027.818)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.885.387.565	0	0	0	4.885.387.565	4.777.628.747	0	0	0	4.777.628.747	(107.758.818)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.142.000	0	0	0	1.142.000	719.000	0	0	0	719.000	(423.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.142.000	0	0	0	1.142.000	719.000	0	0	0	719.000	(423.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.142.000	0	0	0	1.142.000	719.000	0	0	0	719.000	(423.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.080.000	0	0	0	348.080.000	246.209.000	0	0	0	246.209.000	(101.871.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.698.000	0	0	0	3.698.000	3.698.000	0	0	0	3.698.000	0
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.021.000	0	0	0	5.021.000	5.021.000	0	0	0	5.021.000	0
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.305.000	0	0	0	5.305.000	9.305.000	0	0	0	9.305.000	4.000.000
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.256.000	0	0	0	2.256.000	2.256.000	0	0	0	2.256.000	0
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.800.000	0	0	0	331.800.000	225.929.000	0	0	0	225.929.000	(105.871.000)
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0
5 06 5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.739.000	0	0	0	718.739.000	668.114.700	0	0	0	668.114.700	(50.624.300)
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.000.000
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.605.000	0	0	0	335.605.000	269.277.700	0	0	0	269.277.700	(66.327.300)
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.890.000	0	0	0	5.890.000	20.353.000	0	0	0	20.353.000	14.463.000
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.244.000	0	0	0	367.244.000	367.484.000	0	0	0	367.484.000	240.000
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.355.000	0	0	0	310.355.000	455.018.800	0	0	0	455.018.800	144.663.800
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.816.000	0	0	0	103.816.000	103.816.000	0	0	0	103.816.000	0
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.419.000	0	0	0	198.419.000	343.082.800	0	0	0	343.082.800	144.663.800
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.120.000	0	0	0	8.120.000	8.120.000	0	0	0	8.120.000	0
5 07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	401.080.000	0	0	0	401.080.000	(712.825.000)
5 06	5.06.9.02.2.22.01.0000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	401.080.000	0	0	0	401.080.000	(712.825.000)
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	401.080.000	0	0	0	401.080.000	(712.825.000)
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	401.080.000	0	0	0	401.080.000	(712.825.000)
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	119.471.000	0	0	0	119.471.000	139.786.000	0	0	0	139.786.000	20.315.000
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	142.550.000	0	0	0	142.550.000	57.160.000	0	0	0	57.160.000	(85.390.000)
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17.800.000	0	0	0	17.800.000	17.800.000	0	0	0	17.800.000	0
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	805.334.000	0	0	0	805.334.000	157.584.000	0	0	0	157.584.000	(647.750.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5 07	5.06.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	28.750.000	0	0	0	28.750.000	28.750.000	0	0	0	28.750.000	0
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	(1.271.457.495)
6 01		INSPEKTORAT DAERAH	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	(1.271.457.495)
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	(1.271.457.495)
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.075.359.964	19.478.930.000	0	0	34.554.289.964	14.537.516.969	19.478.930.000	0	0	34.016.446.969	(537.842.995)
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.894.000	0	0	0	17.894.000	17.894.000	0	0	0	17.894.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.328.000	0	0	0	4.328.000	4.328.000	0	0	0	4.328.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.086.000	0	0	0	1.086.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.111.000	0	0	0	1.111.000	1.111.000	0	0	0	1.111.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.808.000	0	0	0	1.808.000	1.808.000	0	0	0	1.808.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.838.000	0	0	0	1.838.000	1.838.000	0	0	0	1.838.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.000	0	0	0	3.293.000	3.293.000	0	0	0	3.293.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.430.000	0	0	0	4.430.000	4.430.000	0	0	0	4.430.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.882.297.189	0	0	0	12.882.297.189	12.676.294.294	0	0	0	12.676.294.294	(206.002.895)
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.876.961.189	0	0	0	12.876.961.189	12.670.958.294	0	0	0	12.670.958.294	(206.002.895)
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.107.000	0	0	0	1.107.000	1.107.000	0	0	0	1.107.000	0
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.782.000	0	0	0	3.782.000	3.782.000	0	0	0	3.782.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	447.000	0	0	0	447.000	447.000	0	0	0	447.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	345.257.000	0	0	0	345.257.000	313.185.000	0	0	0	313.185.000	(32.072.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	288.694.000	0	0	0	288.694.000	256.622.000	0	0	0	256.622.000	(32.072.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.563.000	0	0	0	56.563.000	56.563.000	0	0	0	56.563.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.119.000	0	0	0	630.119.000	389.711.000	0	0	0	389.711.000	(240.408.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.711.000	0	0	0	2.711.000	2.711.000	0	0	0	2.711.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.000	0	0	0	1.575.000	1.575.000	0	0	0	1.575.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.920.000	0	0	0	19.920.000	19.920.000	0	0	0	19.920.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	11.285.000	0	0	0	11.285.000	11.285.000	0	0	0	11.285.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.458.000	0	0	0	387.458.000	222.050.000	0	0	0	222.050.000	(165.408.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.170.000	0	0	0	22.170.000	22.170.000	0	0	0	22.170.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.000.000	0	0	0	160.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	(75.000.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	19.478.930.000	0	0	19.478.930.000	0	19.478.930.000	0	0	19.478.930.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	10.266.000	0	0	10.266.000	0	10.266.000	0	0	10.266.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	19.468.664.000	0	0	19.468.664.000	0	19.468.664.000	0	0	19.468.664.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	813.253.275	0	0	0	813.253.275	799.085.175	0	0	0	799.085.175	(14.168.100)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	0	0	0	5.310.000	4.710.000	0	0	0	4.710.000	(600.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.390.100	0	0	0	65.390.100	53.532.000	0	0	0	53.532.000	(11.858.100)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.553.175	0	0	0	742.553.175	740.843.175	0	0	0	740.843.175	(1.710.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.539.500	0	0	0	386.539.500	341.347.500	0	0	0	341.347.500	(45.192.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.743.500	0	0	0	330.743.500	285.551.500	0	0	0	285.551.500	(45.192.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.796.000	0	0	0	55.796.000	55.796.000	0	0	0	55.796.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.957.169.500	0	0	0	5.957.169.500	5.450.729.000	0	0	0	5.450.729.000	(506.440.500)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.202.941.500	0	0	0	5.202.941.500	4.457.161.500	0	0	0	4.457.161.500	(745.780.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	636.223.000	0	0	0	636.223.000	427.623.000	0	0	0	427.623.000	(208.600.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.905.277.500	0	0	0	2.905.277.500	2.576.697.500	0	0	0	2.576.697.500	(328.580.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	853.771.000	0	0	0	853.771.000	645.171.000	0	0	0	645.171.000	(208.600.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	427.404.000	0	0	0	427.404.000	427.404.000	0	0	0	427.404.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	359.193.000	0	0	0	359.193.000	359.193.000	0	0	0	359.193.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	5.827.000	0	0	0	5.827.000	5.827.000	0	0	0	5.827.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.246.000	0	0	0	15.246.000	15.246.000	0	0	0	15.246.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	754.228.000	0	0	0	754.228.000	993.567.500	0	0	0	993.567.500	239.339.500
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.954.000	0	0	0	34.954.000	34.954.000	0	0	0	34.954.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	719.274.000	0	0	0	719.274.000	958.613.500	0	0	0	958.613.500	239.339.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	494.363.000	0	0	0	494.363.000	267.189.000	0	0	0	267.189.000	(227.174.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	115.576.000	0	0	0	115.576.000	57.044.000	0	0	0	57.044.000	(58.532.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.386.000	0	0	0	40.386.000	6.180.000	0	0	0	6.180.000	(34.206.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	75.190.000	0	0	0	75.190.000	50.864.000	0	0	0	50.864.000	(24.326.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	378.787.000	0	0	0	378.787.000	210.145.000	0	0	0	210.145.000	(168.642.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.657.000	0	0	0	6.657.000	6.657.000	0	0	0	6.657.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26.866.000	0	0	0	26.866.000	11.210.000	0	0	0	11.210.000	(15.656.000)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	192.278.000	0	0	0	192.278.000	192.278.000	0	0	0	192.278.000	0
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	152.986.000	0	0	0	152.986.000	0	0	0	0	0	(152.986.000)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.204.637.460	0	0	0	18.204.637.460	16.929.219.392	0	0	0	16.929.219.392	(1.275.418.068)
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.204.637.460	0	0	0	18.204.637.460	16.929.219.392	0	0	0	16.929.219.392	(1.275.418.068)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.204.637.460	0	0	0	18.204.637.460	16.929.219.392	0	0	0	16.929.219.392	(1.275.418.068)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.882.915.960	0	0	0	7.882.915.960	7.713.327.392	0	0	0	7.713.327.392	(169.588.568)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.200.000	0	0	0	147.200.000	147.200.000	0	0	0	147.200.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.772.000	0	0	0	34.772.000	34.772.000	0	0	0	34.772.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62.428.000	0	0	0	62.428.000	62.428.000	0	0	0	62.428.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.292.582.510	0	0	0	6.292.582.510	6.218.691.942	0	0	0	6.218.691.942	(73.890.568)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.133.312.510	0	0	0	6.133.312.510	6.059.421.942	0	0	0	6.059.421.942	(73.890.568)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000	0	0	0	116.550.000	116.550.000	0	0	0	116.550.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.471.000	0	0	0	14.471.000	14.471.000	0	0	0	14.471.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.706.000	0	0	0	13.706.000	13.706.000	0	0	0	13.706.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.543.000	0	0	0	14.543.000	14.543.000	0	0	0	14.543.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.993.150	0	0	0	321.993.150	226.295.150	0	0	0	226.295.150	(95.698.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.231.400	0	0	0	5.231.400	5.231.400	0	0	0	5.231.400	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.254.000	0	0	0	17.254.000	17.254.000	0	0	0	17.254.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.968.000	0	0	0	42.968.000	42.968.000	0	0	0	42.968.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.227.750	0	0	0	7.227.750	7.227.750	0	0	0	7.227.750	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.808.000	0	0	0	11.808.000	11.808.000	0	0	0	11.808.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.504.000	0	0	0	237.504.000	141.806.000	0	0	0	141.806.000	(95.698.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.732.300	0	0	0	621.732.300	621.732.300	0	0	0	621.732.300	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.212.300	0	0	0	179.212.300	179.212.300	0	0	0	179.212.300	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.520.000	0	0	0	442.520.000	442.520.000	0	0	0	442.520.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.408.000	0	0	0	499.408.000	499.408.000	0	0	0	499.408.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.833.000	0	0	0	209.833.000	209.833.000	0	0	0	209.833.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.900.000	0	0	0	174.900.000	174.900.000	0	0	0	174.900.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.050.000	0	0	0	65.050.000	65.050.000	0	0	0	65.050.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.625.000	0	0	0	49.625.000	49.625.000	0	0	0	49.625.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.628.685.500	0	0	0	2.628.685.500	2.491.005.500	0	0	0	2.491.005.500	(137.680.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.628.685.500	0	0	0	2.628.685.500	2.491.005.500	0	0	0	2.491.005.500	(137.680.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.342.634.000	0	0	0	2.342.634.000	2.286.024.000	0	0	0	2.286.024.000	(56.610.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	286.051.500	0	0	0	286.051.500	204.981.500	0	0	0	204.981.500	(81.070.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.968.750.000	0	0	0	2.968.750.000	2.846.450.000	0	0	0	2.846.450.000	(122.300.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.968.750.000	0	0	0	2.968.750.000	2.846.450.000	0	0	0	2.846.450.000	(122.300.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.840.630.000	0	0	0	2.840.630.000	2.729.830.000	0	0	0	2.729.830.000	(110.800.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	128.120.000	0	0	0	128.120.000	116.620.000	0	0	0	116.620.000	(11.500.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	339.250.000	0	0	0	339.250.000	313.695.000	0	0	0	313.695.000	(25.555.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	339.250.000	0	0	0	339.250.000	313.695.000	0	0	0	313.695.000	(25.555.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	339.250.000	0	0	0	339.250.000	313.695.000	0	0	0	313.695.000	(25.555.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.539.808.000	0	0	0	1.539.808.000	798.938.500	0	0	0	798.938.500	(740.869.500)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.539.808.000	0	0	0	1.539.808.000	798.938.500	0	0	0	798.938.500	(740.869.500)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	318.902.500	0	0	0	318.902.500	226.048.000	0	0	0	226.048.000	(92.854.500)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	992.802.000	0	0	0	992.802.000	406.542.500	0	0	0	406.542.500	(586.259.500)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	228.103.500	0	0	0	228.103.500	166.348.000	0	0	0	166.348.000	(61.755.500)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.845.228.000	0	0	0	2.845.228.000	2.765.803.000	0	0	0	2.765.803.000	(79.425.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.845.228.000	0	0	0	2.845.228.000	2.765.803.000	0	0	0	2.765.803.000	(79.425.000)
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.308.039.000	0	0	0	2.308.039.000	2.308.039.000	0	0	0	2.308.039.000	0
8 01 8.01.9.02.2.22.01.0000 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.189.000	0	0	0	537.189.000	457.764.000	0	0	0	457.764.000	(79.425.000)
TOTAL		4.006.005.048.373	772.603.879.305	69.073.641.335	1.243.889.863.683	6.091.572.432.696	3.962.489.407.780	723.326.438.796	90.251.899.580	1.249.857.541.183	6.025.925.287.339	(65.647.145.357)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN V

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

**PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01	PELAYANAN UMUM											
01 01	Pendidikan	968.942.349.817	2.573.137.750	0	0	971.515.487.567	960.060.093.334	2.454.253.750	0	0	962.514.347.084	(9.001.140.483)
01 02	Kesehatan	119.938.390.777	1.824.472.000	0	0	121.762.862.777	145.348.949.878	4.558.727.750	0	0	149.907.677.628	28.144.814.851
01 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.245.586.529	957.572.773	0	0	69.203.159.302	62.338.001.232	943.322.773	0	0	63.281.324.005	(5.921.835.297)
01 04	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.832.521.677	2.342.785.600	0	0	30.175.307.277	26.943.437.578	2.355.735.600	0	0	29.299.173.178	(876.134.099)
01 05	Sosial	55.093.186.392	4.495.090.517	0	0	59.588.276.909	51.999.048.100	4.305.019.517	0	0	56.304.067.617	(3.284.209.292)
01 06	Tenaga Kerja	32.259.615.351	1.207.910.000	0	0	33.467.525.351	30.220.105.369	1.238.386.000	0	0	31.458.491.369	(2.009.033.982)
01 07	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.477.137.769	0	0	0	8.477.137.769	8.284.010.849	0	0	0	8.284.010.849	(193.126.920)
01 08	Lingkungan Hidup	45.566.406.741	536.751.000	0	0	46.103.157.741	42.234.264.283	559.735.000	0	0	42.793.999.283	(3.309.158.458)
01 09	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.653.191.000	64.074.000	0	0	1.717.265.000	598.721.000	0	0	0	598.721.000	(1.118.544.000)
01 10	Perhubungan	21.366.282.557	465.401.000	0	0	21.831.683.557	19.630.551.728	465.401.000	0	0	20.095.952.728	(1.735.730.829)
01 11	Komunikasi dan Informatika	10.859.114.205	93.428.000	0	0	10.952.542.205	9.856.705.376	69.131.000	0	0	9.925.836.376	(1.026.705.829)
01 12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.725.402.031	866.389.000	0	0	9.591.791.031	7.881.638.759	842.889.000	0	0	8.724.527.759	(867.263.272)
01 13	Penanaman Modal	9.451.910.883	246.456.600	0	0	9.698.367.483	8.744.565.955	246.456.600	0	0	8.991.022.555	(707.344.928)
01 14	Kepemudaan dan Olahraga	9.150.957.130	118.856.000	0	0	9.269.813.130	9.064.469.575	79.709.000	0	0	9.144.178.575	(125.634.555)
01 15	Statistik	2.284.275.997	113.121.000	0	0	2.397.396.997	2.058.186.591	96.657.000	0	0	2.154.843.591	(242.553.406)
01 16	Kebudayaan	28.522.758.498	819.000	0	0	28.523.577.498	26.876.430.906	0	0	0	26.876.430.906	(1.647.146.592)
01 17	Perpustakaan	26.358.817.618	6.114.635.500	0	0	32.473.453.118	24.960.418.931	5.312.007.500	0	0	30.272.426.431	(2.201.026.687)
01 18	Kearsipan	826.538.100	6.860.000	0	0	833.398.100	675.249.100	6.860.000	0	0	682.109.100	(151.289.000)
01 19	Kelautan dan Perikanan	21.795.070.109	1.374.467.000	0	0	23.169.537.109	20.410.957.562	830.773.000	0	0	21.241.730.562	(1.927.806.547)
01 20	Pariwisata	10.388.678.679	81.929.000	0	0	10.470.607.679	9.184.283.632	81.929.000	0	0	9.266.212.632	(1.204.395.047)
01 21	Pertanian	50.753.937.863	159.314.000	0	0	50.913.251.863	49.078.806.104	174.806.000	0	0	49.253.612.104	(1.659.639.759)
01 22	Perindustrian	18.266.217.934	138.594.000	0	0	18.404.811.934	18.262.581.853	130.881.000	0	0	18.393.462.853	(11.349.081)
01 23	Sekretariat Daerah	147.472.617.573	5.398.286.000	0	0	152.870.903.573	133.687.516.255	6.373.195.918	0	0	140.060.712.173	(12.810.191.400)
01 24	Sekretariat DPRD	128.166.176.797	88.072.000	0	0	128.254.248.797	113.254.227.821	276.210.000	0	0	113.530.437.821	(14.723.810.976)
01 25	Perencanaan	21.305.313.573	201.340.000	0	0	21.506.653.573	19.818.401.309	201.340.000	0	0	20.019.741.309	(1.486.912.264)
01 26	Keuangan	207.422.176.043	3.577.431.000	69.073.641.335	1.243.889.863.683	1.523.963.112.061	169.452.512.330	2.680.144.000	90.251.899.580	1.249.857.541.183	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)
01 27	Kepegawaian	29.946.019.001	1.116.803.000	0	0	31.062.822.001	29.615.895.479	1.107.919.000	0	0	30.723.814.479	(339.007.522)
01 28	Pendidikan dan Pelatihan	21.779.850.068	105.376.000	0	0	21.885.226.068	20.717.070.414	147.316.000	0	0	20.864.386.414	(1.020.839.654)
01 29	Penelitian dan Pengembangan	422.621.770	0	0	0	422.621.770	328.509.770	0	0	0	328.509.770	(94.112.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01 30 5 06	Pengelolaan Perbatasan Daerah	6.284.487.565	25.000.000	0	0	6.309.487.565	6.162.975.247	25.000.000	0	0	6.187.975.247	(121.512.318)
01 31 5 07	Penghubung	1.113.905.000	0	0	0	1.113.905.000	401.080.000	0	0	0	401.080.000	(712.825.000)
01 32 6 01	Inspektorat	21.526.892.464	19.478.930.000	0	0	41.005.822.464	20.255.434.969	19.478.930.000	0	0	39.734.364.969	(1.271.457.495)
01 33 8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	18.204.637.460	0	0	0	18.204.637.460	16.929.219.392	0	0	0	16.929.219.392	(1.275.418.068)
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN											
03 01 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.444.990.300	4.691.754.649	0	0	24.136.744.949	26.544.012.050	1.400.171.000	0	0	27.944.183.050	3.807.438.101
03 02 1 06	Sosial	2.517.799.000	4.786.000	0	0	2.522.585.000	1.867.038.000	0	0	0	1.867.038.000	(655.547.000)
03 03 4 01	Sekretariat Daerah	3.885.858.400	0	0	0	3.885.858.400	3.677.603.400	0	0	0	3.677.603.400	(208.255.000)
04	EKONOMI											
04 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.186.590.650	146.055.193.266	0	0	215.241.783.916	57.783.471.900	117.388.901.232	0	0	175.172.373.132	(40.069.410.784)
04 02 2 07	Tenaga Kerja	16.556.308.000	10.000.000	0	0	16.566.308.000	14.214.793.500	10.000.000	0	0	14.224.793.500	(2.341.514.500)
04 03 2 09	Pangan	2.017.196.000	0	0	0	2.017.196.000	1.671.134.250	0	0	0	1.671.134.250	(346.061.750)
04 04 2 15	Perhubungan	88.846.863.260	3.399.589.000	0	0	92.246.452.260	88.292.403.260	3.356.314.000	0	0	91.648.717.260	(597.735.000)
04 05 2 16	Komunikasi dan Informatika	4.717.259.000	268.614.000	0	0	4.985.873.000	4.491.153.000	268.614.000	0	0	4.759.767.000	(226.106.000)
04 06 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.716.986.700	90.980.000	0	0	16.807.966.700	16.588.548.200	76.235.000	0	0	16.664.783.200	(143.183.500)
04 07 2 18	Penanaman Modal	2.762.904.000	0	0	0	2.762.904.000	2.750.627.000	0	0	0	2.750.627.000	(12.277.000)
04 08 2 21	Persandian	1.023.135.000	824.360.000	0	0	1.847.495.000	905.882.000	824.360.000	0	0	1.730.242.000	(117.253.000)
04 09 3 25	Kelautan dan Perikanan	14.340.880.000	2.461.705.100	0	0	16.802.585.100	12.407.249.000	2.461.705.000	0	0	14.868.954.000	(1.933.631.100)
04 10 3 27	Pertanian	35.370.746.300	1.218.453.900	0	0	36.589.200.200	32.893.025.550	1.177.637.900	0	0	34.070.663.450	(2.518.536.750)
04 11 3 28	Kehutanan	14.636.637.050	372.729.000	0	0	15.009.366.050	12.529.313.300	363.192.000	0	0	12.892.505.300	(2.116.860.750)
04 12 3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.882.417.000	0	0	0	3.882.417.000	3.543.901.000	0	0	0	3.543.901.000	(338.516.000)
04 13 3 30	Perdagangan	2.287.856.750	0	0	0	2.287.856.750	2.023.937.750	0	0	0	2.023.937.750	(263.919.000)
04 14 3 31	Perindustrian	9.214.233.075	230.000	0	0	9.214.463.075	8.731.638.075	230.000	0	0	8.731.868.075	(482.595.000)
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP											
05 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.106.533.360	245.788.617.000	0	0	271.895.150.360	26.417.806.776	266.012.523.392	0	0	292.430.330.168	20.535.179.808
05 02 2 10	Pertanahan	6.944.425.000	75.526.000	0	0	7.019.951.000	5.479.778.466	75.526.000	0	0	5.555.304.466	(1.464.646.534)
05 03 2 11	Lingkungan Hidup	15.052.381.097	8.984.958.500	0	0	24.037.339.597	14.078.136.597	8.870.807.000	0	0	22.948.943.597	(1.088.396.000)
05 04 3 28	Kehutanan	420.480.000	0	0	0	420.480.000	367.615.000	0	0	0	367.615.000	(52.865.000)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM											
06 01 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.415.000.000	2.700.000.000	0	0	10.115.000.000	1.469.770.000	2.699.500.000	0	0	4.169.270.000	(5.945.730.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer					
06	02	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75.755.000.000	0	0	0	75.755.000.000	74.356.185.000	0	0	0	74.356.185.000	(1.398.815.000)
06	03	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.797.005.000	0	0	0	3.797.005.000	3.648.615.000	0	0	0	3.648.615.000	(148.390.000)
07				KESEHATAN											
07	01	1	02	Kesehatan	63.568.910.893	17.626.583.540	0	0	81.195.494.433	169.933.165.943	21.605.642.540	0	0	191.538.808.483	110.343.314.050
07	02	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	846.817.000	0	0	0	846.817.000	621.677.500	0	0	0	621.677.500	(225.139.500)
08				PARIWISATA											
08	01	3	26	Pariwisata	8.960.646.500	0	0	0	8.960.646.500	6.823.598.000	0	0	0	6.823.598.000	(2.137.048.500)
10				PENDIDIKAN											
10	01	1	01	Pendidikan	820.440.940.677	129.374.745.050	0	0	949.815.685.727	798.704.848.713	139.154.573.870	0	0	937.859.422.583	(11.956.263.144)
10	02	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	46.281.762.750	0	0	0	46.281.762.750	53.949.750.000	0	0	0	53.949.750.000	7.667.987.250
10	03	2	22	Kebudayaan	428.636.209.940	154.418.368.060	0	0	583.054.578.000	401.267.964.694	102.075.575.954	0	0	503.343.540.648	(79.711.037.352)
10	04	2	23	Perpustakaan	6.057.776.250	412.634.500	0	0	6.470.410.750	5.937.248.500	411.444.500	0	0	6.348.693.000	(121.717.750)
11				PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06	Sosial	33.146.245.700	50.750.000	0	0	33.196.995.700	38.948.704.925	50.750.000	0	0	38.999.454.925	5.802.459.225
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.030.576.750	0	0	0	4.030.576.750	3.789.259.750	0	0	0	3.789.259.750	(241.317.000)
11	03	3	32	Transmigrasi	732.632.000	0	0	0	732.632.000	445.231.000	0	0	0	445.231.000	(287.401.000)
TOTAL					4.006.005.048.373	772.603.879.305	69.073.641.335	1.243.889.863.683	6.091.572.432.696	3.962.489.407.780	723.326.438.796	90.251.899.580	1.249.857.541.183	6.025.925.287.339	(65.647.145.357)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
A SPM Bidang Pendidikan						
Pendidikan Menengah						
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	137.517.000	137.517.000
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	853.012.000	853.012.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	0	1.017.573.000	1.017.573.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	1.532.932.000	1.532.932.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	519.359.000	519.359.000
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	0	1.254.532.000	1.254.532.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	903.827.000	903.827.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.990.182.000	404.648.000	(12.585.534.000)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	1.337.503.000	1.337.503.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	1.738.564.000	1.738.564.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	460.124.000	460.124.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	0	142.654.000	142.654.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	141.607.000	141.607.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	376.693.000	376.693.000
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.854.637.000	1.854.637.000
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	315.000.000	315.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.205.000.000	2.205.000.000	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	42.538.940.000	43.507.310.000	968.370.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.609.647.463	33.678.981.058	(6.930.666.405)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	364.129.000	303.788.000	(60.341.000)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	61.598.000	40.130.000	(21.468.000)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	733.108.500	519.939.500	(213.169.000)
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	524.787.000.000	520.361.572.310	(4.425.427.690)
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.699.700	20.769.700	(9.930.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	624.320.304.663	613.627.672.568	(10.692.632.095)
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
			Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	15.149.480.000	15.149.480.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	632.440.000	632.440.000
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	1.272.219.000	1.272.219.000
			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	0	324.000.000	324.000.000
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0	234.084.000	234.084.000
			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	93.413.000	93.413.000
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.020.580.000	564.944.000	(19.455.636.000)
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	1.750.000.000	1.750.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48.043.044.000	48.043.044.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.230.248.014	56.582.588.764	(13.647.659.250)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	346.043.750	222.404.750	(123.639.000)
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	145.742.400.000	150.558.437.162	4.816.037.162
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	48.439.500	33.229.500	(15.210.000)
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	284.430.755.264	275.460.284.176	(8.970.471.088)
			Jumlah Pendidikan Menengah	908.751.059.927	889.087.956.744	(19.663.103.183)
	Pendidikan Khusus					
		Pengelolaan Pendidikan Khusus				
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.201.820.000	0	(2.201.820.000)
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	1.281.088.000	1.281.088.000
			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	460.366.000	460.366.000
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	460.366.000	460.366.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.998.243.000	4.993.243.000	(5.000.000)
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.686.731.300	6.830.430.000	(1.856.301.300)
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.159.761.000	1.015.299.000	(144.462.000)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	9.059.774.000	8.993.174.000	(66.600.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	667.867.500	719.267.500	51.400.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.706.000.000	22.360.122.339	9.654.122.339
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.177.000	8.897.000	(5.280.000)
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus	39.494.373.800	47.122.252.839	7.627.879.039
			Jumlah Pendidikan Khusus	39.494.373.800	47.122.252.839	7.627.879.039
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	948.245.433.727	936.210.209.583	(12.035.224.144)
B SPM Bidang Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.084.850.000	68.994.137.200	67.909.287.200
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.084.850.000	68.994.137.200	67.909.287.200
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.084.850.000	68.994.137.200	67.909.287.200
Pelayanan Kesehatan Balita						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	66.694.000	1.263.197.000	1.196.503.000
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	1.151.544.000	70.257.334.200	69.105.790.200
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.200.000.000	1.219.770.000	19.770.000
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5.965.000.000	0	(5.965.000.000)
			Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	0
			Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.700.000.000	2.699.500.000	(500.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	10.115.000.000	4.169.270.000	(5.945.730.000)
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	10.115.000.000	4.169.270.000	(5.945.730.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250.000.000	250.000.000	0
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.835.438.460	6.834.260.460	(1.178.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.085.438.460	7.084.260.460	(1.178.000)
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	7.085.438.460	7.084.260.460	(1.178.000)
			Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	17.200.438.460	11.253.530.460	(5.946.908.000)
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi						
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)
			Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	300.000.000	201.185.000	(98.815.000)
Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000
			Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	21.115.000.000	21.315.000.000	200.000.000
			Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21.415.000.000	21.516.185.000	101.185.000
E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi						
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.993.695.000	4.311.183.000	2.317.488.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	39.820.000	39.820.000	0
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.928.250	51.028.250	(5.900.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	753.711.800	311.205.800	(442.506.000)
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.750.000	168.750.000	0
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.012.905.050	4.881.987.050	1.869.082.000
Jumlah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				3.012.905.050	4.881.987.050	1.869.082.000
Jumlah SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.012.905.050	4.881.987.050	1.869.082.000
F SPM Bidang Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Pant						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant				
			Penyediaan Permakanan	2.085.330.000	2.085.330.000	0
			Penyediaan Sandang	244.610.000	244.610.000	0
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	259.063.000	259.063.000	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	287.917.500	287.917.500	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	919.512.200	902.914.200	(16.598.000)
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	37.200.000	1.200.000	(36.000.000)
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.915.000	37.315.000	(3.600.000)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.000.000	33.000.000	0
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.200.000	1.200.000	0
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant				3.908.747.700	3.852.549.700	(56.198.000)
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Pant				3.908.747.700	3.852.549.700	(56.198.000)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Pant						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant				
			Pengasuhan	270.030.000	270.030.000	0
			Penyediaan Makanan	1.555.878.000	1.555.878.000	0
			Penyediaan Sandang	345.688.500	345.478.500	(210.000)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	254.633.100	253.793.100	(840.000)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	284.332.000	238.157.000	(46.175.000)
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	391.093.000	391.093.000	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.985.000	1.515.000	(20.470.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72.280.000	44.572.000	(27.708.000)
			Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	10.900.000	10.900.000	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.206.819.600	3.111.416.600	(95.403.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.206.819.600	3.111.416.600	(95.403.000)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	3.772.000.000	3.772.000.000	0
			Penyediaan Sandang	201.850.000	201.850.000	0
			Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	172.906.500	172.906.500	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	552.067.000	546.747.000	(5.320.000)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	677.357.500	677.357.500	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.780.000	27.780.000	0
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.240.000	7.840.000	(8.400.000)
			Pemulasaraan	67.970.000	67.970.000	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.488.171.000	5.474.451.000	(13.720.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	5.488.171.000	5.474.451.000	(13.720.000)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	2.826.540.000	2.826.540.000	0
			Penyediaan Sandang	1.053.199.000	1.053.199.000	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.369.500	9.369.500	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	327.905.000	297.885.000	(30.020.000)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	267.120.000	267.120.000	0
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	414.757.500	414.757.500	0
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	132.150.000	112.150.000	(20.000.000)

PROVINSI DI YOGYAKARTA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemulangan ke Daerah Asal	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				5.054.441.000	4.998.421.000	(56.020.000)
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti				5.054.441.000	4.998.421.000	(56.020.000)
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi						
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				
			Penyediaan Permakanaan	131.250.000	131.250.000	0
			Penyediaan Sandang	32.250.000	32.250.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	56.760.000	56.760.000	0
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	442.620.000	442.620.000	0
			Pelayanan Dukungan Psikososial	1.859.705.000	1.204.158.000	(655.547.000)
Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				2.522.585.000	1.867.038.000	(655.547.000)
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				2.522.585.000	1.867.038.000	(655.547.000)
Jumlah SPM Bidang Sosial				20.180.764.300	19.303.876.300	(876.888.000)

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.016.805.000.073	2.915.935.633.917	3.005.643.654.853	89.708.020.936	3 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.804.433.427.000	1.921.331.173.294	1.900.373.769.667	(20.957.403.627)	1 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	971.515.487.567	962.514.347.084	(9.001.140.483)	1 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.793.450.907.000	948.245.433.727	936.210.209.583	(12.035.224.144)	1 %
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	9.875.568.000	1.217.160.000	1.337.090.000	119.930.000	10 %
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.106.952.000	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)	12 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	36.638.493.000	202.958.357.210	341.446.486.111	138.488.128.901	68 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	121.762.862.777	149.907.677.628	28.144.814.851	23 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.243.078.000	78.759.327.749	187.793.709.299	109.034.381.550	138 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.742.188.000	2.426.519.684	3.741.347.184	1.314.827.500	54 %
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2.653.227.000	9.647.000	3.752.000	(5.895.000)	61 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.654.408.967.878	566.271.193.578	535.053.297.305	(31.217.896.273)	6 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	69.203.159.302	63.281.324.005	(5.921.835.297)	9 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	298.560.405.000	66.081.016.000	58.459.816.500	(7.621.199.500)	12 %
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	210.000.000.000	10.115.000.000	4.169.270.000	(5.945.730.000)	59 %
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	63.816.000.000	37.026.100.000	14.448.265.000	(22.577.835.000)	61 %
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	24.816.000.000	7.085.438.460	7.084.260.460	(1.178.000)	0 %
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.933.000.000	1.600.000.000	951.598.500	(648.401.500)	41 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	494.755.248.717	145.666.575.118	114.500.797.334	(31.165.777.784)	21 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	20.320.641.456	1.894.192.798	1.260.160.798	(634.032.000)	33 %
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.300.000.000	2.588.318.900	2.779.013.900	190.695.000	7 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.531.907.672.705	225.011.393.000	268.118.790.808	43.107.397.808	19 %
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	404.685.000.000	75.755.000.000	74.356.185.000	(1.398.815.000)	2 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	290.685.000.000	21.415.000.000	21.516.185.000	101.185.000	0 %
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	114.000.000.000	54.340.000.000	52.840.000.000	(1.500.000.000)	3 %
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.690.071.695	54.312.052.226	57.243.356.228	2.931.304.002	5 %
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	30.175.307.277	29.299.173.178	(876.134.099)	3 %
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.421.404.250	3.972.032.550	5.282.938.050	1.310.905.500	33 %
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	33.268.667.445	20.164.712.399	22.661.245.000	2.496.532.601	12 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	71.949.040.500	95.307.857.609	97.170.560.542	1.862.702.933	2 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	59.588.276.909	56.304.067.617	(3.284.209.292)	6 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	12.650.259.000	4.566.053.200	4.010.043.200	(556.010.000)	12 %
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.706.864.000	2.911.000	2.911.000	0	0 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.353.432.000	24.712.379.500	24.169.414.725	(542.964.775)	2 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.434.307.000	3.549.202.000	10.435.636.000	6.886.434.000	194 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.286.000.000	2.522.585.000	1.867.038.000	(655.547.000)	26 %
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	10.518.178.500	366.450.000	381.450.000	15.000.000	4 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.583.641.440.863	1.023.765.493.537	930.009.783.693	(93.755.709.844)	9 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.572.811.996	50.033.833.351	45.683.284.869	(4.350.548.482)	9 %
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	33.467.525.351	31.458.491.369	(2.009.033.982)	6 %
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	4.504.993.998	348.830.000	506.447.000	157.617.000	45 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.184.803.000	9.334.304.000	7.868.780.000	(1.465.524.000)	16 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.504.993.998	4.857.019.000	3.940.041.000	(916.978.000)	19 %
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.567.203.000	680.300.000	693.048.000	12.748.000	2 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.810.818.000	1.345.855.000	1.216.477.500	(129.377.500)	10 %
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.255.730.500	12.507.714.519	12.073.270.599	(434.443.920)	3 %
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	8.477.137.769	8.284.010.849	(193.126.920)	2 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.159.089.500	1.458.643.000	1.394.005.500	(64.637.500)	4 %
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.743.414.000	1.176.324.000	1.057.724.000	(118.600.000)	10 %
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.450.723.500	821.391.250	819.493.750	(1.897.500)	0 %
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.159.089.500	247.942.500	154.198.500	(93.744.000)	38 %
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.743.414.000	326.276.000	296.048.000	(30.228.000)	9 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	0	67.790.000	67.790.000	100 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.200.000.000	2.017.196.000	1.671.134.250	(346.061.750)	17 %
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4.200.000.000	340.000.000	309.615.500	(30.384.500)	9 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.600.000.000	1.014.669.000	726.138.000	(288.531.000)	28 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.800.000.000	506.483.000	497.747.500	(8.735.500)	2 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.600.000.000	156.044.000	137.633.250	(18.410.750)	12 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	108.900.000.000	7.019.951.000	5.555.304.466	(1.464.646.534)	21 %
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.800.000.000	34.400.000	34.400.000	0	0 %
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	47.100.000.000	6.985.551.000	5.520.904.466	(1.464.646.534)	21 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	82.078.610.709	70.111.827.088	65.742.942.880	(4.368.884.208)	6 %
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	46.103.157.741	42.793.999.283	(3.309.158.458)	7 %
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4.500.000.000	447.699.250	411.944.250	(35.755.000)	8 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11.999.999.997	3.334.415.750	3.228.935.000	(105.480.750)	3 %
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	19.828.610.712	1.831.691.500	1.737.031.500	(94.660.000)	5 %
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	4.500.000.000	319.846.000	196.818.000	(123.028.000)	38 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	8.250.000.000	465.558.000	420.279.000	(45.279.000)	10 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	33.000.000.000	17.609.458.847	16.953.935.847	(655.523.000)	4 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.880.370.000	1.717.265.000	598.721.000	(1.118.544.000)	65 %
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	626.790.000	52.950.000	49.518.000	(3.432.000)	6 %
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	626.790.000	192.738.000	139.142.000	(53.596.000)	28 %
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	626.790.000	1.291.577.000	236.161.000	(1.055.416.000)	82 %
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	180.000.000	173.900.000	(6.100.000)	3 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.064.658.500	846.817.000	621.677.500	(225.139.500)	27 %
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	306.967.500	123.928.250	112.269.750	(11.658.500)	9 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	306.967.500	194.988.250	77.213.250	(117.775.000)	60 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.450.723.500	527.900.500	432.194.500	(95.706.000)	18 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	486.600.000.000	113.565.959.817	111.744.669.988	(1.821.289.829)	2 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	21.326.199.557	20.095.952.728	(1.230.246.829)	6 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	471.600.000.000	92.225.660.260	91.640.517.260	(585.143.000)	1 %
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	15.000.000.000	14.100.000	8.200.000	(5.900.000)	42 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.650.623.500	15.938.415.205	14.685.603.376	(1.252.811.829)	8 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.952.542.205	9.925.836.376	(1.026.705.829)	9 %
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.991.375.000	3.832.446.000	3.661.725.000	(170.721.000)	4 %
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	30.659.248.500	1.153.427.000	1.098.042.000	(55.385.000)	5 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	35.749.999.998	26.399.757.731	25.389.310.959	(1.010.446.772)	4 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.591.791.031	8.724.527.759	(867.263.272)	9 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.400.000.000	267.000.000	624.880.000	357.880.000	134 %
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	4.800.000.000	19.182.000	19.182.000	0	0 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.599.999.999	1.721.195.000	3.723.300.000	2.002.105.000	116 %
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.424.999.999	1.051.390.000	854.119.000	(197.271.000)	19 %
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.225.000.000	4.151.888.900	3.137.558.400	(1.014.330.500)	24 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.300.000.000	9.597.310.800	8.305.743.800	(1.291.567.000)	13 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	21.183.000.000	12.461.271.483	11.741.649.555	(719.621.928)	6 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.698.367.483	8.991.022.555	(707.344.928)	7 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.325.000.000	472.863.000	472.863.000	0	0 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.265.000.000	776.680.000	758.573.000	(18.107.000)	2 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	6.300.000.000	784.655.000	697.365.000	(87.290.000)	11 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	3.993.000.000	500.021.000	500.021.000	0	0 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	6.300.000.000	228.685.000	321.805.000	93.120.000	41 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	27.743.631.000	55.551.575.880	63.093.928.575	7.542.352.695	14 %
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.269.813.130	9.144.178.575	(125.634.555)	1 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.945.361.000	5.015.672.750	4.638.992.000	(376.680.750)	8 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	15.798.270.000	41.266.090.000	49.310.758.000	8.044.668.000	19 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.038.181.727	2.397.396.997	2.154.843.591	(242.553.406)	10 %
2	20	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	1.949.734.997	1.712.461.591	(237.273.406)	12 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.038.181.727	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)	1 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.382.625.000	1.847.495.000	1.730.242.000	(117.253.000)	6 %
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.382.625.000	1.847.495.000	1.730.242.000	(117.253.000)	6 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.716.978.860.295	611.578.155.498	530.219.971.554	(81.358.183.944)	13 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	28.523.577.498	26.876.430.906	(1.647.146.592)	6 %
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.716.978.860.295	583.054.578.000	503.343.540.648	(79.711.037.352)	14 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.040.257.860	38.937.463.868	36.621.119.431	(2.316.344.437)	6 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	32.473.453.118	30.272.426.431	(2.201.026.687)	7 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.122.937.965	6.039.317.000	5.941.469.250	(97.847.750)	2 %
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.917.319.895	424.693.750	407.223.750	(17.470.000)	4 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.642.894.778	833.398.100	682.109.100	(151.289.000)	18 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.642.894.778	833.398.100	682.109.100	(151.289.000)	18 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.106.308.981.998	200.624.725.260	185.571.906.726	(15.052.818.534)	8 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	54.150.000.000	39.972.122.209	36.110.684.562	(3.861.437.647)	10 %
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	23.169.537.109	21.241.730.562	(1.927.806.547)	8 %
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.400.000.000	1.138.205.500	1.218.353.500	80.148.000	7 %
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.350.000.000	3.816.307.600	3.459.669.500	(356.638.100)	9 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	20.400.000.000	8.698.153.000	7.773.944.000	(924.209.000)	11 %
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.400.000.000	390.910.000	265.614.000	(125.296.000)	32 %
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	6.600.000.000	2.759.009.000	2.151.373.000	(607.636.000)	22 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	63.000.000.000	19.424.854.179	16.089.810.632	(3.335.043.547)	17 %
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.470.607.679	9.266.212.632	(1.204.395.047)	12 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	45.000.000.000	3.947.825.000	2.664.845.000	(1.282.980.000)	32 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	10.500.000.000	2.140.301.000	1.674.843.000	(465.458.000)	22 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7.500.000.000	2.866.120.500	2.483.910.000	(382.210.500)	13 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	73.147.500.000	87.502.452.063	83.324.275.554	(4.178.176.509)	5 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	50.913.251.863	49.253.612.104	(1.659.639.759)	3 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	34.965.000.000	22.360.856.000	21.631.140.000	(729.716.000)	3 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	21.424.500.000	7.733.024.000	6.461.338.750	(1.271.685.250)	16 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	11.898.000.000	1.866.211.000	1.760.307.000	(105.904.000)	6 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.560.000.000	744.428.000	696.028.000	(48.400.000)	7 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.300.000.000	3.884.681.200	3.521.849.700	(362.831.500)	9 %
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	31.500.000.000	15.413.311.050	13.260.120.300	(2.153.190.750)	14 %
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.000.000.000	11.713.094.300	9.688.351.300	(2.024.743.000)	17 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.850.000.000	405.945.000	367.615.000	(38.330.000)	9 %
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.650.000.000	3.294.271.750	3.204.154.000	(90.117.750)	3 %
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	74.506.488.000	7.672.222.000	7.192.516.000	(479.706.000)	6 %
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	17.249.760.000	1.500.912.000	1.364.019.000	(136.893.000)	9 %
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	9.190.200.000	1.747.200.000	1.552.777.000	(194.423.000)	11 %
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	6.783.264.000	627.105.000	627.105.000	0	0 %
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	41.283.264.000	3.797.005.000	3.648.615.000	(148.390.000)	4 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	774.000.000.000	2.287.856.750	2.023.937.750	(263.919.000)	12 %
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.000.000.000	24.429.000	124.259.000	99.830.000	409 %
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.000.000.000	127.848.000	120.538.000	(7.310.000)	6 %
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	9.000.000.000	678.217.500	658.091.500	(20.126.000)	3 %
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.000.000.000	177.476.000	249.776.000	72.300.000	41 %
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	750.000.000.000	1.279.886.250	871.273.250	(408.613.000)	32 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	31.500.000.000	27.619.275.009	27.125.330.928	(493.944.081)	2 %
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	18.404.811.934	18.393.462.853	(11.349.081)	0 %
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.500.000.000	9.028.049.075	8.551.519.075	(476.530.000)	5 %
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10.500.000.000	186.414.000	180.349.000	(6.065.000)	3 %
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.504.993.998	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	39 %
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.504.993.998	732.632.000	445.231.000	(287.401.000)	39 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	181.778.684.250	284.780.370.770	257.268.753.394	(27.511.617.376)	10 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	61.676.684.250	156.526.121.973	143.738.315.573	(12.787.806.400)	8 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	91.054.365.073	84.863.825.153	(6.190.539.920)	7 %
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.231.030.000	0	0	0	0 %
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	6.231.030.000	1.204.999.000	799.739.000	(405.260.000)	34 %
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.682.687.500	2.090.852.500	1.810.168.500	(280.684.000)	13 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.471.518.000	27.907.228.000	21.108.506.500	(6.798.721.500)	24 %
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	10.221.285.750	3.885.858.400	3.677.603.400	(208.255.000)	5 %
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.138.000.000	3.216.775.000	3.131.425.000	(85.350.000)	3 %
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9.300.000.000	536.380.000	346.179.500	(190.200.500)	35 %
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12.032.163.000	2.069.052.500	1.795.452.500	(273.600.000)	13 %
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.600.000.000	24.560.611.500	26.205.416.020	1.644.804.520	7 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	120.102.000.000	128.254.248.797	113.530.437.821	(14.723.810.976)	11 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	65.299.642.797	63.349.968.821	(1.949.673.976)	3 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	120.102.000.000	62.954.606.000	50.180.469.000	(12.774.137.000)	20 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.980.733.774.259	1.606.187.963.038	1.590.767.604.312	(15.420.358.726)	1 %
5	01		PERENCANAAN	38.541.706.530	21.504.653.573	20.019.741.309	(1.484.912.264)	7 %
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	15.824.414.273	15.050.329.109	(774.085.164)	5 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	15.450.000.000	4.402.240.350	3.813.840.500	(588.399.850)	13 %
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.091.706.530	1.277.998.950	1.155.571.700	(122.427.250)	10 %
5	02		KEUANGAN	46.125.420.000	1.523.945.112.061	1.512.242.097.093	(11.703.014.968)	1 %
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	192.583.374.111	154.420.179.648	(38.163.194.463)	20 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	24.633.510.000	1.318.394.765.950	1.345.334.212.445	26.939.446.495	2 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.335.410.000	1.716.934.000	1.762.672.000	45.738.000	3 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.156.500.000	11.250.038.000	10.725.033.000	(525.005.000)	5 %
5	03		KEPEGAWAIAN	2.862.258.657.000	31.007.097.001	30.723.814.479	(283.282.522)	1 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.908.543.251	19.711.489.229	1.802.945.978	10 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.862.258.657.000	13.098.553.750	11.012.325.250	(2.086.228.500)	16 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	26.456.627.079	21.885.226.068	20.864.386.414	(1.020.839.654)	5 %
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	13.545.478.068	12.860.655.414	(684.822.654)	5 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.456.627.079	8.339.748.000	8.003.731.000	(336.017.000)	4 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.568.363.650	422.481.770	328.509.770	(93.972.000)	22 %

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.568.363.650	422.481.770	328.509.770	(93.972.000)	22 %
5	06		PENGLOLAAN PERBATASAN	0	6.309.487.565	6.187.975.247	(121.512.318)	2 %
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.309.487.565	6.187.975.247	(121.512.318)	2 %
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	3.783.000.000	1.113.905.000	401.080.000	(712.825.000)	64 %
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.783.000.000	1.113.905.000	401.080.000	(712.825.000)	64 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	82.577.294.265	40.993.616.464	39.734.364.969	(1.259.251.495)	3 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	82.577.294.265	40.993.616.464	39.734.364.969	(1.259.251.495)	3 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	34.554.289.964	34.016.446.969	(537.842.995)	2 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	64.682.117.265	5.957.169.500	5.450.729.000	(506.440.500)	9 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	17.895.177.000	482.157.000	267.189.000	(214.968.000)	45 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	24.612.679.110	18.204.637.460	16.929.219.392	(1.275.418.068)	7 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.612.679.110	18.204.637.460	16.929.219.392	(1.275.418.068)	7 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.882.915.960	7.713.327.392	(169.588.568)	2 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.160.516.125	2.628.685.500	2.491.005.500	(137.680.000)	5 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.620.425.930	2.968.750.000	2.846.450.000	(122.300.000)	4 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.620.425.930	339.250.000	313.695.000	(25.555.000)	8 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.050.795.000	1.539.808.000	798.938.500	(740.869.500)	48 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.160.516.125	2.845.228.000	2.765.803.000	(79.425.000)	3 %

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN VIII

**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN
PERUBAHAN APBD**

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.971.630.614.192	1.971.630.614.192	1.975.203.857.742
1.01.2.19.2.22.03.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.904.739.918.711	1.904.739.918.711	1.900.373.769.667
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.904.739.918.711	1.904.739.918.711	1.900.373.769.667
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	966.766.697.278	966.877.831.478	962.514.347.084
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.509.042.700	1.509.042.700	1.509.042.700
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	594.675.900	594.675.900	594.675.900
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	914.366.800	914.366.800	914.366.800
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	942.276.240.789	942.276.240.789	938.003.116.195
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	941.642.633.789	941.642.633.789	937.369.509.195
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	318.173.000	318.173.000	318.173.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	218.595.000	218.595.000	218.595.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.344.000	88.344.000	88.344.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.495.000	8.495.000	8.495.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.444.619.950	2.444.619.950	2.438.619.950
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.629.000	56.629.000	56.629.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.685.584.000	1.685.584.000	1.685.584.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.593.200	50.593.200	50.593.200
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	276.379.750	276.379.750	276.379.750

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.320.000	32.320.000	32.320.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.114.000	343.114.000	337.114.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.890.713.652	12.001.847.852	11.917.488.052
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.125.000	15.125.000	13.845.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.187.763.752	8.298.897.952	8.223.898.152
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.687.824.900	3.687.824.900	3.679.744.900
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.219.223.277	3.219.223.277	3.219.223.277
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.769.200	444.769.200	444.769.200
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.288.069.077	2.288.069.077	2.288.069.077
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	486.385.000	486.385.000	486.385.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.426.856.910	5.426.856.910	5.426.856.910
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.426.856.910	5.426.856.910	5.426.856.910
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	936.524.008.433	936.412.874.233	936.210.209.583
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	614.271.189.568	614.214.519.368	613.627.672.568
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	137.517.000	137.517.000	137.517.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	853.012.000	853.012.000	853.012.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.017.573.000	1.017.573.000	1.017.573.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1.532.932.000	1.532.932.000	1.532.932.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	519.359.000	519.359.000	519.359.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	1.254.532.000	1.254.532.000	1.254.532.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	903.827.000	903.827.000	903.827.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	404.648.000	404.648.000	404.648.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.337.503.000	1.337.503.000	1.337.503.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.738.564.000	1.738.564.000	1.738.564.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	460.124.000	460.124.000	460.124.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	142.654.000	142.654.000	142.654.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	141.607.000	141.607.000	141.607.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	376.693.000	376.693.000	376.693.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.854.637.000	1.854.637.000	1.854.637.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	315.000.000	315.000.000	315.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.205.000.000	2.205.000.000	2.205.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	43.440.140.000	43.407.310.000	43.507.310.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	33.748.753.058	33.724.912.858	33.678.981.058
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	303.788.000	303.788.000	303.788.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.130.000	40.130.000	40.130.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	519.939.500	519.939.500	519.939.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	521.002.487.310	521.002.487.310	520.361.572.310
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	20.769.700	20.769.700	20.769.700
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	275.713.382.026	275.583.018.026	275.460.284.176
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	15.149.480.000	15.149.480.000	15.149.480.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	632.440.000	632.440.000	632.440.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.272.219.000	1.272.219.000	1.272.219.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	324.000.000	324.000.000	324.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	234.084.000	234.084.000	234.084.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	93.413.000	93.413.000	93.413.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	564.944.000	564.944.000	564.944.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48.043.044.000	48.043.044.000	48.043.044.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	56.903.085.614	56.772.721.614	56.582.588.764
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	222.404.750	222.404.750	222.404.750
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	150.491.038.162	150.491.038.162	150.558.437.162
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	33.229.500	33.229.500	33.229.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	46.539.436.839	46.615.336.839	47.122.252.839
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.281.088.000	1.281.088.000	1.281.088.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	460.366.000	460.366.000	460.366.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	460.366.000	460.366.000	460.366.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.993.243.000	4.993.243.000	4.993.243.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6.830.430.000	6.830.430.000	6.830.430.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.015.299.000	1.015.299.000	1.015.299.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	9.059.774.000	9.059.774.000	8.993.174.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	643.367.500	719.267.500	719.267.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	21.786.606.339	21.786.606.339	22.360.122.339
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.897.000	8.897.000	8.897.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.137.090.000	1.137.090.000	1.337.090.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	03	1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.137.090.000	1.137.090.000	1.337.090.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	03	1.01	01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	374.350.000	374.350.000	374.350.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	03	1.01	04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	762.740.000	762.740.000	962.740.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	312.123.000	312.123.000	312.123.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	04	1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	312.123.000	312.123.000	312.123.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	1	01	04	1.01	01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	312.123.000	312.123.000	312.123.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.890.695.481	66.890.695.481	74.830.088.075
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	54.598.553.981	54.598.553.981	63.093.928.575
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.871.053.981	8.871.053.981	9.144.178.575
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.420.688.331	2.420.688.331	2.693.812.925
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.420.688.331	2.420.688.331	2.693.812.925
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.345.100	276.345.100	276.345.100
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.000	29.962.000	29.962.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.383.300	119.383.300	119.383.300
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.137.000	40.137.000	40.137.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.108.800	26.108.800	26.108.800
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.948.000	3.948.000	3.948.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.806.000	56.806.000	56.806.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.931.561.050	4.931.561.050	4.931.561.050
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.000	430.000	430.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635.862.450	635.862.450	635.862.450
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.295.268.600	4.295.268.600	4.295.268.600
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.459.500	1.242.459.500	1.242.459.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.606.000	49.606.000	49.606.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.024.361.000	1.024.361.000	1.024.361.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.492.500	168.492.500	168.492.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.516.742.000	4.516.742.000	4.638.992.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.266.742.000	3.266.742.000	3.388.992.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.836.472.000	1.836.472.000	1.958.722.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.430.270.000	1.430.270.000	1.430.270.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.210.758.000	41.210.758.000	49.310.758.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.210.758.000	5.210.758.000	12.310.758.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5.210.758.000	5.210.758.000	12.310.758.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	36.000.000.000	36.000.000.000	37.000.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36.000.000.000	36.000.000.000	37.000.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.292.141.500	12.292.141.500	11.736.159.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	12.292.141.500	12.292.141.500	11.736.159.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22	08	1.10	Pendidikan Berbasis Budaya	12.292.141.500	12.292.141.500	11.736.159.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22	08	1.10	01 Pembinaan Muatan Lokal	2.872.859.500	2.872.859.500	2.872.859.500
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22	08	1.10	02 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	6.369.000.000	6.369.000.000	5.941.000.000
1.01.2.19.2.22.03.0000	2	22	08	1.10	04 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.050.282.000	3.050.282.000	2.922.300.000
1.02.2.22.0.00.01.0000					DINAS KESEHATAN	342.323.247.911	342.323.247.911	342.481.747.911
1.02.2.22.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	341.287.986.111	341.287.986.111	341.446.486.111
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	341.287.986.111	341.287.986.111	341.446.486.111
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.908.777.628	149.908.777.628	149.907.677.628
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.650.000	78.650.000	78.050.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.261.000	72.261.000	72.261.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.389.000	6.389.000	5.789.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.963.577.561	84.963.577.561	84.963.577.561
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.958.385.561	84.958.385.561	84.958.385.561
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.192.000	5.192.000	5.192.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.03	Administrasi Umum	0	0	0
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	32.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.000.000	32.000.000	32.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.524.000	198.745.000	198.245.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.224.000	2.224.000	2.224.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.473.000	68.473.000	68.473.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.525.000	7.525.000	7.525.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.787.000	9.787.000	9.787.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.474.000	11.474.000	11.474.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.056.000	4.056.000	4.056.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.985.000	95.206.000	94.706.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.598.187.771	1.633.441.771	1.633.441.771
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	488.317.090	523.571.090	523.571.090
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.108.170.681	1.108.170.681	1.108.170.681
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.783.000	494.308.000	494.308.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.198.000	241.198.000	241.198.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.585.000	95.110.000	95.110.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.000.000	158.000.000	158.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	62.506.055.296	62.506.055.296	62.506.055.296
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	01	1.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	62.506.055.296	62.506.055.296	62.506.055.296

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	187.634.109.299	187.634.109.299	187.793.709.299	
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	15.067.622.800	15.067.622.800	15.067.622.800	
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.479.383.800	1.479.383.800	1.479.383.800
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	5.247.330.000	5.247.330.000	5.247.330.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	7.224.155.000	7.224.155.000	7.224.155.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	0
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	960.000.000	960.000.000	960.000.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	156.754.000	156.754.000	156.754.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	172.407.733.999	172.407.733.999	172.567.333.999
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	70.141.040.200	68.924.537.200	68.994.137.200
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	46.694.000	1.263.197.000	1.263.197.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	272.871.000	272.871.000	272.871.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	450.000	450.000	450.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	11.160.000	11.160.000	11.160.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.484.434.000	2.484.434.000	2.484.434.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.800.000	2.800.000	2.800.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.310.000	38.310.000	38.310.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	801.828.000	801.828.000	801.828.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	0	0
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.041.869.809	9.041.869.809	9.041.869.809

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.348.572.250	76.348.572.250	76.348.572.250
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	190.071.000	190.071.000	190.071.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	127.296.000	127.296.000	217.296.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.594.967.740	12.594.967.740	12.594.967.740
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	305.370.000	305.370.000	305.370.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	79.920.000	79.920.000	79.920.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	75.420.000	75.420.000	75.420.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	78.832.500	78.832.500	78.832.500
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	78.832.500	78.832.500	78.832.500
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.741.347.184	3.741.347.184	3.741.347.184
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.662.500.000	1.662.500.000	1.662.500.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.662.500.000	1.662.500.000	1.662.500.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.078.847.184	2.078.847.184	2.078.847.184
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.839.238.184	1.839.238.184	1.839.238.184
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	239.609.000	239.609.000	239.609.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3.752.000	3.752.000	3.752.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	3.752.000	3.752.000	3.752.000
1.02.2.22.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3.752.000	3.752.000	3.752.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.2.22.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.035.261.800	1.035.261.800	1.035.261.800
1.02.2.22.0.00.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.035.261.800	1.035.261.800	1.035.261.800
1.02.2.22.0.00.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.035.261.800	1.035.261.800	1.035.261.800
1.02.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.035.261.800	1.035.261.800	1.035.261.800
1.02.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08	04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.035.261.800	1.035.261.800	1.035.261.800
1.03.1.04.3.29.13.0000					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	550.565.416.177	550.565.416.177	585.538.092.429
1.03.1.04.3.29.13.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	543.244.331.177	543.262.435.177	578.236.112.429
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	469.088.146.177	469.106.250.177	503.879.927.429
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.969.891.185	53.908.196.185	53.775.096.260
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	472.378.000	466.378.000	454.378.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	429.378.000	423.378.000	411.378.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	13.000.000	13.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.503.894.140	40.503.894.140	40.503.894.140
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.421.882.450	37.421.882.450	37.421.882.450
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.965.611.690	2.965.611.690	2.965.611.690
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	116.400.000	116.400.000	116.400.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.264.500	629.264.500	629.264.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.019.500	201.019.500	201.019.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.245.000	428.245.000	428.245.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.480.745.772	9.480.745.772	9.359.645.847
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.480.745.772	9.480.745.772	9.359.645.847
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.883.608.773	2.827.913.773	2.827.913.773
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.128.699.000	1.073.004.000	1.073.004.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.990.000	354.990.000	354.990.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.399.919.773	1.399.919.773	1.399.919.773
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	57.655.436.500	57.631.506.500	58.459.816.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.951.402.500	12.942.772.500	13.325.577.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000	200.000.000	292.990.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	8.325.000.000	8.325.000.000	8.325.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2.201.521.500	2.201.521.500	2.401.146.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.502.224.500	1.502.044.500	1.494.904.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.01	61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	632.656.500	624.206.500	721.536.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	44.704.034.000	44.688.734.000	45.134.239.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.02	08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.989.493.000	11.974.193.000	12.035.988.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.02	14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18.163.988.000	18.163.988.000	18.163.988.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	02	1.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	14.550.553.000	14.550.553.000	14.934.263.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.225.491.000	4.169.270.000	4.169.270.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.225.491.000	4.169.270.000	4.169.270.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03	1.01 04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.275.991.000	1.219.770.000	1.219.770.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03	1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03	1.01 10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	03	1.01 11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.699.500.000	2.699.500.000	2.699.500.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	19.548.265.000	19.548.265.000	14.448.265.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	04	1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	19.548.265.000	19.548.265.000	14.448.265.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	04	1.01 06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	19.548.265.000	19.548.265.000	14.448.265.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.084.260.460	7.084.260.460	7.084.260.460
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	05	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.084.260.460	7.084.260.460	7.084.260.460
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	05	1.01 05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	05	1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.834.260.460	6.834.260.460	6.834.260.460
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	869.088.500	869.088.500	951.598.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	06	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	869.088.500	869.088.500	951.598.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	06	1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	869.088.500	869.088.500	951.598.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	113.428.618.584	113.588.568.584	114.500.797.334
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	113.428.618.584	113.588.568.584	114.500.797.334
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.010.000.000	1.010.000.000	887.350.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	34.281.179.500	34.441.129.500	35.323.820.750
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	08 Rekonstruksi Jalan	35.456.552.000	35.456.552.000	35.456.552.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	17.882.187.000	17.882.187.000	18.082.187.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	16 Penggantian Jembatan	23.241.070.534	23.241.070.534	23.193.258.034
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	10	1.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.557.629.550	1.557.629.550	1.557.629.550
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.260.160.798	1.260.160.798	1.260.160.798
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.061.481.798	1.061.481.798	1.061.481.798
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.01	04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	80.669.500	80.669.500	80.669.500
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.01	07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	980.812.298	980.812.298	980.812.298
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	198.679.000	198.679.000	198.679.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.02	01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	23.682.000	23.682.000	23.682.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	11	1.02	05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	174.997.000	174.997.000	174.997.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	211.046.934.150	211.046.934.150	249.230.662.577
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.01	03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	210.896.934.150	210.896.934.150	248.980.662.577
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.431.098.880	1.431.098.880	1.373.098.880
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2.115.577.500	2.115.577.500	2.815.577.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	86.607.860.000	86.607.860.000	86.802.860.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	467.700.610	467.700.610	467.700.610
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	13.933.043.000	13.933.043.000	13.933.043.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	635.089.160	635.089.160	635.089.160
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	250.000.000	250.000.000	305.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.02	13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	105.456.565.000	105.456.565.000	142.648.293.427
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0	100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	03	13	1.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	0	0	100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	74.156.185.000	74.156.185.000	74.356.185.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.316.185.000	21.316.185.000	21.516.185.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	201.185.000	201.185.000	201.185.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	201.185.000	201.185.000	201.185.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.115.000.000	21.315.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.115.000.000	21.115.000.000	21.315.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	52.840.000.000	52.840.000.000	52.840.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	52.840.000.000	52.840.000.000	52.840.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	52.840.000.000	52.840.000.000	52.840.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	109.464.000	109.464.000	109.464.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	109.464.000	109.464.000	109.464.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	109.464.000	109.464.000	109.464.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22	08	1.05	Pengelolaan Taman Budaya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22	08	1.05	01 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22	08	1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9.464.000	9.464.000	9.464.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	2	22	08	1.08	01 Pengembangan Lumbung Mataraman	9.464.000	9.464.000	9.464.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.211.621.000	7.193.517.000	7.192.516.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.211.621.000	7.193.517.000	7.192.516.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.363.224.000	1.358.049.000	1.364.019.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	02	1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	516.264.000	516.264.000	516.264.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	02	1.01	03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	516.264.000	516.264.000	516.264.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	02	1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	846.960.000	841.785.000	847.755.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	02	1.02	03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	846.960.000	841.785.000	847.755.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.548.267.000	1.547.238.000	1.552.777.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	03	1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1.548.267.000	1.547.238.000	1.552.777.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	962.800.000	962.800.000	970.970.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	585.467.000	584.438.000	581.807.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	627.105.000	627.105.000	627.105.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	627.105.000	627.105.000	627.105.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	627.105.000	627.105.000	627.105.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.673.025.000	3.661.125.000	3.648.615.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	315.020.000	303.120.000	290.610.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	44.760.000	39.360.000	39.360.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	270.260.000	263.760.000	251.250.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	3.358.005.000	3.358.005.000
1.03.1.04.3.29.13.0000	3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	3.358.005.000	3.358.005.000
1.03.2.10.0.00.01.0000						DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	23.400.601.019	23.400.601.019	23.138.596.469
1.03.2.10.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.968.641.453	17.968.641.453	17.686.586.903
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.968.641.453	17.968.641.453	17.686.586.903

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.530.427.745	9.530.427.745	9.506.227.745
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.372.500	59.372.500	59.372.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.072.500	35.072.500	35.072.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.300.000	12.300.000	12.300.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.783.435.295	7.783.435.295	7.783.435.295
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.698.943.295	7.698.943.295	7.698.943.295
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.792.000	60.792.000	60.792.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.148.000	3.148.000	3.148.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.552.000	20.552.000	20.552.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.216.500	284.216.500	260.016.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.775.000	15.775.000	15.775.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.094.500	38.094.500	38.094.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.035.000	9.035.000	9.035.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.160.000	36.160.000	36.160.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.800.000	25.800.000	25.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.352.000	159.352.000	135.152.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.697.000	246.697.000	246.697.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.697.000	246.697.000	246.697.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.190.900	432.190.900	432.190.900

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000	12.200.000	12.200.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.060.400	203.060.400	203.060.400
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.930.500	216.930.500	216.930.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.515.550	724.515.550	724.515.550
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.351.300	209.351.300	209.351.300
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.580.000	110.580.000	110.580.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.584.250	404.584.250	404.584.250
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.261.913.900	2.261.913.900	2.779.013.900
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	0	0	0
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	0
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.764.388.400	1.764.388.400	1.864.388.400
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.664.388.400	1.664.388.400	1.764.388.400
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	494.825.500	494.825.500	911.925.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	420.934.500	420.934.500	838.034.500
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	73.891.000	73.891.000	73.891.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	6.176.299.808	6.176.299.808	5.401.345.258
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	4.774.160.000	4.774.160.000	4.048.787.950
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	03 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	788.800.000	788.800.000	666.359.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3.909.560.000	3.909.560.000	3.306.628.950
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	06 Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	75.800.000	75.800.000	75.800.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	1.402.139.808	1.402.139.808	1.352.557.308
1.03.2.10.0.00.01.0000	1	03	13	1.03	01 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.402.139.808	1.402.139.808	1.352.557.308
1.03.2.10.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.431.959.566	5.431.959.566	5.452.009.566
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5.182.092.466	5.182.092.466	5.202.142.466
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	34.400.000	34.400.000	34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	03	1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	34.400.000	34.400.000	34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	03	1.01	01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	34.400.000	34.400.000	34.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	5.147.692.466	5.147.692.466	5.167.742.466
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.147.692.466	5.147.692.466	5.167.742.466
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	979.871.000	979.871.000	967.841.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	02 Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	514.039.000	514.039.000	514.039.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	03 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	300.000.000	300.000.000	300.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	04 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	304.300.000	304.300.000	304.300.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	212.486.000	212.486.000	212.486.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	204.933.000	204.933.000	204.933.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	07	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	891.208.466	891.208.466	928.288.466
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.090.436.000	1.090.436.000	1.085.436.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	570.419.000	570.419.000	570.419.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	10	11	1.01	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	249.867.100	249.867.100	249.867.100
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	249.867.100	249.867.100	249.867.100
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	22	08	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	249.867.100	249.867.100	249.867.100
1.03.2.10.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	249.867.100	249.867.100	249.867.100
1.05.9.02.1.03.01.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.012.217.299	33.012.217.299	35.410.478.299
1.05.9.02.1.03.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21.348.209.699	21.348.209.699	21.375.170.699
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.348.209.699	21.348.209.699	21.375.170.699
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.092.251.649	16.092.251.649	16.092.232.649
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.013.500	264.013.500	264.013.500
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.293.500	235.293.500	235.293.500
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.720.000	28.720.000	28.720.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.579.638.849	12.579.638.849	12.579.638.849
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.566.138.849	12.566.138.849	12.566.138.849
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	13.500.000	13.500.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	670.060.000	670.060.000	670.060.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	670.060.000	670.060.000	670.060.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.917.150	139.917.150	139.898.150
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	1.950.000	1.950.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.636.000	14.636.000	14.636.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.623.150	15.623.150	15.623.150
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	2.580.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.128.000	105.128.000	105.109.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.015.000	146.015.000	146.015.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.07 05	Pengadaan Mebel	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.015.000	140.015.000	140.015.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.403.350	576.403.350	576.403.350
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	760.000	760.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.725.000	142.725.000	142.725.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.918.350	432.918.350	432.918.350
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.716.203.800	1.716.203.800	1.716.203.800
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	611.125.200	611.125.200	611.125.200
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.905.000	27.905.000	27.905.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.173.600	1.077.173.600	1.077.173.600
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.255.958.050	5.255.958.050	5.282.938.050

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.919.356.050	4.919.356.050	4.946.336.050
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.311.183.000	4.311.183.000	4.311.183.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	39.820.000	39.820.000	39.820.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.028.250	51.028.250	51.028.250
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	327.695.800	327.695.800	311.205.800
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20.879.000	20.879.000	64.349.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.01	07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168.750.000	168.750.000	168.750.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	336.602.000	336.602.000	336.602.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.02	01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.945.000	42.945.000	42.945.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	1	05	02	1.02	03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	293.657.000	293.657.000	293.657.000
1.05.9.02.1.03.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.664.007.600	11.664.007.600	14.035.307.600
1.05.9.02.1.03.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.664.007.600	11.664.007.600	14.035.307.600
1.05.9.02.1.03.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	11.664.007.600	11.664.007.600	14.035.307.600
1.05.9.02.1.03.01.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	11.664.007.600	11.664.007.600	14.035.307.600
1.05.9.02.1.03.01.0000	2	22	08	1.09	17 Pembinaan Jagawarga	11.664.007.600	11.664.007.600	14.035.307.600
1.05.9.02.2.22.04.0000					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	38.133.504.529	38.133.504.529	38.079.990.529

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.9.02.2.22.04.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.921.699.529	35.921.699.529	35.868.185.529
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.921.699.529	35.921.699.529	35.868.185.529
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.208.954.529	13.208.954.529	13.206.940.529
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.045.000	74.045.000	80.729.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.500.000	47.500.000	54.184.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.545.000	26.545.000	26.545.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.363.173.901	8.363.173.901	8.363.173.901
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.294.953.901	8.294.953.901	8.294.953.901
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.220.000	53.220.000	53.220.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.108.000	924.108.000	901.388.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.321.000	11.321.000	11.321.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.055.000	58.055.000	88.055.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.936.000	41.936.000	41.936.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.160.000	8.160.000	8.160.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.636.000	804.636.000	751.916.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.083.379.000	1.083.379.000	1.097.401.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.083.379.000	1.083.379.000	1.097.401.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.510.328	1.484.510.328	1.484.510.328
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.604.600	574.604.600	574.604.600
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.905.728	900.905.728	900.905.728
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.738.300	1.279.738.300	1.279.738.300
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.590.300	499.590.300	499.590.300
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.330.000	5.330.000	5.330.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.998.000	381.998.000	381.998.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.820.000	392.820.000	392.820.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	22.712.745.000	22.712.745.000	22.661.245.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.780.702.000	1.780.702.000	1.890.702.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	355.000.000	355.000.000	355.000.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.425.702.000	1.425.702.000	1.535.702.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	11.621.777.100	11.621.777.100	11.460.277.100
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	308.280.000	308.280.000	308.280.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.103.604.000	1.103.604.000	1.103.604.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	669.474.000	669.474.000	669.474.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.147.180.350	2.147.180.350	1.985.680.350
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.988.897.500	5.988.897.500	5.988.897.500
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	1.337.031.250	1.337.031.250	1.337.031.250

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	67.310.000	67.310.000	67.310.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	9.063.022.900	9.063.022.900	9.063.022.900
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	3.327.832.000	3.327.832.000	3.327.832.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.735.190.900	5.735.190.900	5.735.190.900
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	247.243.000	247.243.000	247.243.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	59.128.000	59.128.000	59.128.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	87.915.000	87.915.000	87.915.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100.200.000	100.200.000	100.200.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.211.805.000	2.211.805.000	2.211.805.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.211.805.000	2.211.805.000	2.211.805.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.211.805.000	2.211.805.000	2.211.805.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22	08	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	499.305.000	499.305.000	499.305.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22	08	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	499.305.000	499.305.000	499.305.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22	08	1.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.712.500.000	1.712.500.000	1.712.500.000
1.05.9.02.2.22.04.0000	2	22	08	1.09	23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.712.500.000	1.712.500.000	1.712.500.000
1.06.2.22.0.00.01.0000						DINAS SOSIAL	99.935.170.542	99.935.170.542	103.085.207.542
1.06.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.896.673.542	96.896.673.542	97.170.560.542
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	96.896.673.542	96.896.673.542	97.170.560.542
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.302.540.617	56.287.540.617	56.304.067.617
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.950.000	101.450.000	97.050.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	64.680.000	53.180.000	49.780.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.620.000	19.620.000	19.620.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.650.000	28.650.000	27.650.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.081.704.259	38.086.858.009	38.086.858.009
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.062.073.759	38.062.073.759	38.062.073.759
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.643.500	4.643.500	4.643.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.987.000	20.140.750	20.140.750
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03		Administrasi Umum	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.132.000	54.132.000	54.132.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.400.000	19.400.000	19.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.732.000	34.732.000	34.732.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.418.980.740	2.418.980.740	2.400.197.740
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163.972.500	163.972.500	163.972.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.204.008.990	1.204.008.990	1.204.008.990
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	139.793.500	139.793.500	139.793.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	430.542.500	430.542.500	421.542.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.432.250	140.432.250	140.432.250
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.124.000	28.124.000	27.919.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2.350.000	2.350.000	2.350.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.757.000	309.757.000	300.179.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.298.640	609.298.640	609.298.640
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	609.298.640	609.298.640	609.298.640
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.700.223.242	7.670.223.242	7.709.933.242
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.910.000	8.910.000	8.910.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.242.880.300	1.212.880.300	1.223.680.300
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.029.395.000	2.029.395.000	2.029.395.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.419.037.942	4.419.037.942	4.447.947.942
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.325.251.736	7.346.597.986	7.346.597.986
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	921.396.400	901.396.400	901.396.400
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.858.796.336	5.858.796.336	5.858.796.336
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	524.219.000	565.565.250	565.565.250
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.840.000	20.840.000	20.840.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.739.263.200	3.739.263.200	4.010.043.200
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.739.263.200	3.739.263.200	4.010.043.200
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.769.405.200	1.769.405.200	2.020.655.200
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.332.240.000	1.332.240.000	1.351.770.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	637.618.000	637.618.000	637.618.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.911.000	2.911.000	2.911.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	2.911.000	2.911.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.911.000	2.911.000	2.911.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.180.834.725	24.180.834.725	24.169.414.725
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.860.949.700	3.860.949.700	3.852.549.700
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	2.085.330.000	2.085.330.000	2.085.330.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	244.610.000	244.610.000	244.610.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	259.063.000	259.063.000	259.063.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	287.917.500	287.917.500	287.917.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	911.314.200	911.314.200	902.914.200
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	37.315.000	37.315.000	37.315.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	33.000.000	33.000.000	33.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.114.436.600	3.114.436.600	3.111.416.600
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	270.030.000	270.030.000	270.030.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	1.555.878.000	1.555.878.000	1.555.878.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	345.478.500	345.478.500	345.478.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	253.793.100	253.793.100	253.793.100
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	238.157.000	238.157.000	238.157.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	391.093.000	391.093.000	391.093.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.515.000	1.515.000	1.515.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47.592.000	47.592.000	44.572.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	10.900.000	10.900.000	10.900.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.474.451.000	5.474.451.000	5.474.451.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 01	Penyediaan Permakanan	3.772.000.000	3.772.000.000	3.772.000.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 02	Penyediaan Sandang	201.850.000	201.850.000	201.850.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 04	Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	172.906.500	172.906.500	172.906.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	546.747.000	546.747.000	546.747.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	677.357.500	677.357.500	677.357.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.780.000	27.780.000	27.780.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.840.000	7.840.000	7.840.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.03 12	Pemulasaraan	67.970.000	67.970.000	67.970.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.998.421.000	4.998.421.000	4.998.421.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 01	Penyediaan Permakanan	2.826.540.000	2.826.540.000	2.826.540.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 02	Penyediaan Sandang	1.053.199.000	1.053.199.000	1.053.199.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.369.500	9.369.500	9.369.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	297.885.000	297.885.000	297.885.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	267.120.000	267.120.000	267.120.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	414.757.500	414.757.500	414.757.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	112.150.000	112.150.000	112.150.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	17.400.000	17.400.000	17.400.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	6.732.576.425	6.732.576.425	6.732.576.425

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	01 Penyediaan Permakanan	2.748.371.225	2.748.371.225	2.748.371.225
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	02 Penyediaan Sandang	543.130.900	543.130.900	543.130.900
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	26.698.500	26.698.500	26.698.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	527.514.500	527.514.500	527.514.500
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	0	0	0
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.175.838.000	1.175.838.000	1.175.838.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	584.072.000	584.072.000	584.072.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	954.182.050	954.182.050	954.182.050
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.290.000	14.290.000	14.290.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	10 Pemulangan ke Daerah Asal	148.779.250	148.779.250	148.779.250
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	04	1.05	11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	5.200.000	5.200.000	5.200.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.437.636.000	10.437.636.000	10.435.636.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	201.472.000	201.472.000	201.472.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	01 Pengangkatan Anak antar WNI	184.456.000	184.456.000	184.456.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.01	02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.016.000	17.016.000	17.016.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10.236.164.000	10.236.164.000	10.234.164.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.495.356.000	7.495.356.000	7.495.356.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	05	1.02	02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.740.808.000	2.740.808.000	2.738.808.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.867.038.000	1.867.038.000	1.867.038.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.867.038.000	1.867.038.000	1.867.038.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01 01	Penyediaan Permakanan	131.250.000	131.250.000	131.250.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01 02	Penyediaan Sandang	32.250.000	32.250.000	32.250.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	56.760.000	56.760.000	56.760.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	442.620.000	442.620.000	442.620.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	06	1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.204.158.000	1.204.158.000	1.204.158.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	366.450.000	381.450.000	381.450.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	07	1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	381.450.000	381.450.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	1	06	07	1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	366.450.000	381.450.000	381.450.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.038.497.000	3.038.497.000	5.914.647.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.038.497.000	3.038.497.000	5.914.647.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.038.497.000	3.038.497.000	5.914.647.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.038.497.000	3.038.497.000	5.914.647.000
1.06.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajahan	3.038.497.000	3.038.497.000	5.914.647.000
2.08.2.14.2.22.02.0000					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	15.214.929.099	15.214.929.099	15.666.469.099
2.08.2.14.2.22.02.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.214.929.099	15.214.929.099	15.666.469.099
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.425.355.599	11.425.355.599	12.073.270.599
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.284.010.849	8.284.010.849	8.284.010.849
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.475.000	56.475.000	56.475.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.100.000	42.100.000	42.100.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.375.000	14.375.000	14.375.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.229.119.149	6.229.119.149	6.229.119.149
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.205.676.149	6.205.676.149	6.205.676.149
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.443.000	23.443.000	23.443.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	Administrasi Umum	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.990.500	124.990.500	124.990.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.780.000	10.780.000	10.780.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.446.000	17.446.000	17.446.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.151.500	26.151.500	26.151.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	6.600.000	6.600.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.013.000	64.013.000	64.013.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.302.447.200	1.302.447.200	1.302.447.200
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	242.568.000	242.568.000	242.568.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.430.700	277.430.700	277.430.700
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.448.500	782.448.500	782.448.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.979.000	570.979.000	570.979.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.025.000	248.025.000	248.025.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.250.000	27.250.000	27.250.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.000.000	191.000.000	191.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.704.000	104.704.000	104.704.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.169.005.500	1.169.005.500	1.394.005.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	128.674.000	128.674.000	278.674.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	116.472.000	116.472.000	266.472.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	12.202.000	12.202.000	12.202.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	838.667.500	838.667.500	913.667.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	466.734.000	466.734.000	541.734.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	371.933.500	371.933.500	371.933.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	201.664.000	201.664.000	201.664.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	152.014.000	152.014.000	152.014.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	49.650.000	49.650.000	49.650.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.057.724.000	1.057.724.000	1.057.724.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	91.435.000	91.435.000	91.435.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	28.735.000	28.735.000	28.735.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	62.700.000	62.700.000	62.700.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	822.227.000	822.227.000	822.227.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	643.300.000	643.300.000	643.300.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	178.927.000	178.927.000	178.927.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	144.062.000	144.062.000	144.062.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	03	1.03	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.062.000	144.062.000	144.062.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	486.578.750	486.578.750	819.493.750
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	293.710.500	293.710.500	626.625.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	16.182.500	16.182.500	16.182.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	277.528.000	277.528.000	610.443.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	192.868.250	192.868.250
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192.868.250	192.868.250	192.868.250
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	154.198.500	154.198.500	154.198.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	154.198.500	154.198.500	154.198.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	60.150.000	60.150.000	60.150.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	94.048.500	94.048.500	94.048.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	206.048.000	206.048.000	296.048.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	60.353.000	60.353.000	60.353.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	20.250.000	20.250.000	20.250.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	40.103.000	40.103.000	40.103.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	145.695.000	145.695.000	235.695.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	43.085.000	43.085.000	43.085.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	73.955.000	73.955.000	163.955.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	06	1.02	04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	28.655.000	28.655.000	28.655.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	67.790.000	67.790.000	67.790.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	07	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.495.000	23.495.000	23.495.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	07	1.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	23.495.000	23.495.000	23.495.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	07	1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	44.295.000	44.295.000	44.295.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	08	07	1.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	44.295.000	44.295.000	44.295.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	621.677.500	621.677.500	621.677.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	112.269.750	112.269.750	112.269.750
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	02	1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	112.269.750	112.269.750	112.269.750
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	02	1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	6.319.750	6.319.750	6.319.750
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	105.950.000	105.950.000	105.950.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	77.213.250	77.213.250	77.213.250
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77.213.250	77.213.250	77.213.250
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	77.213.250	77.213.250	77.213.250
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03	1.01	05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	0
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	432.194.500	432.194.500	432.194.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	432.194.500	432.194.500	432.194.500
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	217.182.750	217.182.750	217.182.750
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	98.000.000	98.000.000	98.000.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	66.725.000	66.725.000	66.725.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	50.286.750	50.286.750	50.286.750

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.167.896.000	3.167.896.000	2.971.521.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.167.896.000	3.167.896.000	2.971.521.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.167.896.000	3.167.896.000	2.971.521.000
2.08.2.14.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	20 Pengembangan Ekonomi Perempuan	3.167.896.000	3.167.896.000	2.971.521.000
2.11.3.28.2.22.02.0000					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	85.229.906.513	85.229.906.513	82.682.830.180
2.11.3.28.2.22.02.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	72.458.026.213	72.458.026.213	69.422.709.880
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	65.692.280.213	65.692.280.213	65.742.942.880
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.831.916.616	42.831.916.616	42.793.999.283
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.141.000	282.141.000	274.691.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.543.000	137.543.000	135.593.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.598.000	144.598.000	139.098.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.536.062.391	38.536.062.391	38.536.062.391
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.644.884.391	37.644.884.391	37.644.884.391
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	862.118.000	862.118.000	862.118.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.000	2.090.000	2.090.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.970.000	26.970.000	26.970.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.641.000	432.641.000	419.669.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.254.000	30.254.000	30.254.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.920.000	97.920.000	97.920.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.673.000	20.673.000	20.673.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.070.000	92.070.000	92.070.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.224.000	184.224.000	171.252.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	559.735.000	559.735.000	559.735.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	559.735.000	559.735.000	559.735.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.257.025	889.257.025	871.761.692
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.320.000	7.320.000	7.320.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	686.497.025	686.497.025	669.001.692
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.440.000	195.440.000	195.440.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.132.080.200	2.132.080.200	2.132.080.200
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.239.000	17.239.000	17.239.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	774.138.200	774.138.200	774.138.200
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.510.000	182.510.000	182.510.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.158.193.000	1.158.193.000	1.158.193.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	424.024.250	424.024.250	411.944.250
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	424.024.250	424.024.250	411.944.250
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	424.024.250	424.024.250	411.944.250
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.232.535.000	3.232.535.000	3.228.935.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.568.866.000	2.568.866.000	2.565.266.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	155.466.000	155.466.000	151.866.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	2.413.400.000	2.413.400.000	2.413.400.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	663.669.000	663.669.000	663.669.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	663.669.000	663.669.000	663.669.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.631.331.500	1.631.331.500	1.737.031.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	1.631.331.500	1.631.331.500	1.737.031.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	261.175.000	261.175.000	261.175.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.370.156.500	1.370.156.500	1.475.856.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	0	0	0
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	198.258.000	198.258.000	196.818.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	198.258.000	198.258.000	196.818.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	105.728.000	105.728.000	104.288.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65.750.000	65.750.000	65.750.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	26.780.000	26.780.000	26.780.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	420.279.000	420.279.000	420.279.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	09	1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	420.279.000	420.279.000	420.279.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	09	1.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	420.279.000	420.279.000	420.279.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.953.935.847	16.953.935.847	16.953.935.847
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	16.953.935.847	16.953.935.847	16.953.935.847
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	11	1.01	01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	327.253.000	327.253.000	327.253.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	11	1.01	03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	10.359.482.847	10.359.482.847	10.359.482.847
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	11	11	1.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.267.200.000	6.267.200.000	6.267.200.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.765.746.000	6.765.746.000	3.679.767.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.765.746.000	6.765.746.000	3.679.767.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22	08	1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	3.429.303.000	3.429.303.000	3.305.141.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22	08	1.08	02 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	3.429.303.000	3.429.303.000	3.305.141.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.336.443.000	3.336.443.000	374.626.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.336.443.000	3.336.443.000	374.626.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.771.880.300	12.771.880.300	13.260.120.300
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	12.771.880.300	12.771.880.300	13.260.120.300
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.688.351.300	9.688.351.300	9.688.351.300
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	779.315.500	779.315.500	779.315.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.03	01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	779.315.500	779.315.500	779.315.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	785.819.000	785.819.000	785.819.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.04	02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	445.368.000	445.368.000	445.368.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	0	0
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	340.451.000	340.451.000	340.451.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	744.395.500	744.395.500	744.395.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	560.771.500	560.771.500	560.771.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	183.624.000	183.624.000	183.624.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	6.714.960.050	6.714.960.050	6.714.960.050
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	4.155.982.500	4.155.982.500	4.155.982.500
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.558.977.550	2.558.977.550	2.558.977.550
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	209.838.000	209.838.000	209.838.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	209.838.000	209.838.000	209.838.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	454.023.250	454.023.250	454.023.250
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	14.410.000	14.410.000	14.410.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	6.831.000	6.831.000	6.831.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	432.782.250	432.782.250	432.782.250
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	367.615.000	367.615.000	367.615.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	367.615.000	367.615.000	367.615.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	223.017.000	223.017.000	223.017.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	144.598.000	144.598.000	144.598.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.715.914.000	2.715.914.000	3.204.154.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.715.914.000	2.715.914.000	3.204.154.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	05	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	15.710.000	15.710.000	15.710.000
2.11.3.28.2.22.02.0000	3	28	05	1.01	02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.700.204.000	2.700.204.000	3.188.444.000
2.15.1.03.0.00.01.0000					DINAS PERHUBUNGAN	114.402.061.996	114.402.061.996	114.672.916.996
2.15.1.03.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.824.361.008	2.824.361.008	2.928.247.008
2.15.1.03.0.00.01.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.824.361.008	2.824.361.008	2.928.247.008
2.15.1.03.0.00.01.0000	1	03	13		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.824.361.008	2.824.361.008	2.928.247.008
2.15.1.03.0.00.01.0000	1	03	13	1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.824.361.008	2.824.361.008	2.928.247.008
2.15.1.03.0.00.01.0000	1	03	13	1.02	01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.824.361.008	2.824.361.008	2.928.247.008
2.15.1.03.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.577.700.988	111.577.700.988	111.744.669.988
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	111.577.700.988	111.577.700.988	111.744.669.988
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.261.233.728	20.191.663.728	20.095.952.728
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.111.300	192.111.300	192.111.300
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.110.300	134.110.300	134.110.300
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.845.000	3.845.000	3.845.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.880.000	8.880.000	8.880.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.776.000	34.776.000	34.776.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.545.833.328	15.545.833.328	15.545.833.328
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.941.546.328	12.941.546.328	12.941.546.328
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.542.938.000	2.542.938.000	2.542.938.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.734.000	16.734.000	16.734.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.615.000	44.615.000	44.615.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	765.283.000	695.713.000	693.949.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.616.000	42.616.000	42.616.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	122.274.000	122.274.000	122.274.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.557.000	96.557.000	96.557.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	37.836.000	37.836.000	37.836.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.976.000	206.406.000	204.642.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160.024.000	160.024.000	160.024.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	679.486.000	679.486.000	679.486.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	679.486.000	679.486.000	679.486.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.706.333.000	1.706.333.000	1.612.386.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.545.000	11.545.000	11.545.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	711.971.000	711.971.000	618.024.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.817.000	982.817.000	982.817.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.372.187.100	1.372.187.100	1.372.187.100

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.975.100	490.975.100	490.975.100
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.102.000	369.102.000	369.102.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	512.110.000	512.110.000	512.110.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	91.308.267.260	91.377.837.260	91.640.517.260
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	355.000.000	355.000.000	355.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	355.000.000	355.000.000	355.000.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.144.855.000	9.144.855.000	9.207.555.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.926.154.000	6.926.154.000	6.988.854.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	420.964.000	420.964.000	420.964.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.797.737.000	1.797.737.000	1.797.737.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	836.712.000	836.712.000	836.712.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	205.472.000	205.472.000	205.472.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	186.949.000	186.949.000	186.949.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	444.291.000	444.291.000	444.291.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.660.804.000	3.730.374.000	3.930.354.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.098.559.000	1.168.129.000	1.168.129.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.605.423.000	1.605.423.000	1.805.403.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	550.972.000	550.972.000	550.972.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	389.328.000	389.328.000	389.328.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	16.522.000	16.522.000	16.522.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	99.378.000	99.378.000	99.378.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	99.378.000	99.378.000	99.378.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	518.544.250	518.544.250	518.544.250
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	389.626.000	389.626.000	389.626.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106.192.750	106.192.750	106.192.750
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	22.725.500	22.725.500	22.725.500
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76.253.977.010	76.253.977.010	76.253.977.010
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.479.154.010	74.479.154.010	74.479.154.010
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.774.823.000	1.774.823.000	1.774.823.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	438.997.000	438.997.000	438.997.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	438.997.000	438.997.000	438.997.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	8.200.000	8.200.000	8.200.000
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	8.200.000	8.200.000	8.200.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.1.03.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	8.200.000	8.200.000	8.200.000
2.16.9.02.2.22.01.0000						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.232.404.276	32.232.404.276	34.750.247.276
2.16.9.02.2.22.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.232.404.276	32.232.404.276	34.750.247.276
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.626.688.376	14.626.688.376	14.685.603.376
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.945.721.376	9.945.721.376	9.925.836.376
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.003.000	79.003.000	77.903.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.303.000	59.303.000	59.303.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.700.000	19.700.000	18.600.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.347.627.876	8.347.627.876	8.347.627.876
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.193.980.876	8.193.980.876	8.193.980.876
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.981.000	123.981.000	123.981.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.680.000	6.680.000	6.680.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.493.000	11.493.000	11.493.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.493.000	11.493.000	11.493.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.099.000	246.099.000	246.099.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.015.000	6.015.000	6.015.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.038.000	29.038.000	29.038.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.571.000	6.571.000	6.571.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.104.000	24.104.000	24.104.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.371.000	180.371.000	180.371.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.131.000	69.131.000	69.131.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.981.000	30.981.000	30.981.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.150.000	38.150.000	38.150.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.815.500	836.815.500	836.815.500
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.310.000	5.310.000	5.310.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.286.000	314.286.000	314.286.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.219.500	517.219.500	517.219.500
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.045.000	367.045.000	348.260.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.130.000	182.130.000	163.345.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.220.000	119.220.000	119.220.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.695.000	65.695.000	65.695.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.582.925.000	3.582.925.000	3.661.725.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.582.925.000	3.582.925.000	3.661.725.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	59.236.250	59.236.250	59.236.250
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	500.945.000	500.945.000	500.945.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72.770.000	72.770.000	72.770.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	06 Pelayanan Informasi Publik	219.034.750	219.034.750	219.034.750
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.471.265.000	1.471.265.000	1.471.265.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.239.640.000	1.239.640.000	1.318.440.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	20.034.000	20.034.000	20.034.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.098.042.000	1.098.042.000	1.098.042.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	549.945.000	549.945.000	549.945.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	549.945.000	549.945.000	549.945.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	548.097.000	548.097.000	548.097.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	77.334.000	77.334.000	77.334.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	99.975.000	99.975.000	99.975.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	61.969.000	61.969.000	61.969.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	308.819.000	308.819.000	308.819.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.751.852.000	1.751.852.000	1.730.242.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.751.852.000	1.751.852.000	1.730.242.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	707.381.000	707.381.000	699.241.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	39.523.000	39.523.000	39.523.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	267.955.000	267.955.000	265.315.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.550.000	7.550.000	7.550.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	392.353.000	392.353.000	386.853.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1.044.471.000	1.044.471.000	1.031.001.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.044.471.000	1.044.471.000	1.031.001.000
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.853.863.900	15.853.863.900	18.334.401.900
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.853.863.900	15.853.863.900	18.334.401.900
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	15.853.863.900	15.853.863.900	18.334.401.900
2.16.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.06	02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	15.853.863.900	15.853.863.900	18.334.401.900
2.17.2.22.0.00.01.0000						DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	47.294.253.859	47.294.253.859	57.379.305.400
2.17.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.294.253.859	47.294.253.859	57.379.305.400
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	24.430.357.059	24.430.357.059	25.389.310.959
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.664.538.259	8.664.538.259	8.724.527.759
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.795.000	185.795.000	343.835.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.390.000	158.390.000	317.030.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.405.000	22.405.000	21.805.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.263.619.603	6.263.619.603	6.262.089.603
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.199.499.603	6.199.499.603	6.199.499.603
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.220.000	53.220.000	53.220.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.900.000	10.900.000	9.370.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.576.500	274.576.500	208.541.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.400.500	43.400.500	32.097.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.994.000	8.994.000	8.994.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.582.000	157.582.000	102.850.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.600.000	21.600.000	21.600.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	573.448.000	573.448.000	574.448.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	200.071.000	200.071.000	200.071.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.459.000	175.459.000	175.459.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.918.000	197.918.000	198.918.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.655.981	791.655.981	760.170.981
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.412.000	44.412.000	44.412.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.999.981	214.999.981	183.514.981
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.244.000	532.244.000	532.244.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.443.175	575.443.175	575.443.175
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.800	36.999.800	36.999.800
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.085.000	144.085.000	144.085.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.560.000	21.560.000	21.560.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.813.375	343.813.375	343.813.375
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.985.000	28.985.000	28.985.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	301.000.000	301.000.000	624.880.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	301.000.000	301.000.000	624.880.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	301.000.000	301.000.000	624.880.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	19.182.000	19.182.000	19.182.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.182.000	19.182.000	19.182.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	19.182.000	19.182.000	19.182.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.723.300.000	3.723.300.000	3.723.300.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.721.195.000	1.721.195.000	1.721.195.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.721.195.000	1.721.195.000	1.721.195.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.002.105.000	2.002.105.000	2.002.105.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	2.002.105.000	2.002.105.000	2.002.105.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	768.029.000	768.029.000	854.119.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	768.029.000	768.029.000	854.119.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	768.029.000	768.029.000	854.119.000
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.865.678.400	2.865.678.400	3.137.558.400
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.865.678.400	2.865.678.400	3.137.558.400
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.865.678.400	2.865.678.400	3.137.558.400
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.088.629.400	8.088.629.400	8.305.743.800
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8.088.629.400	8.088.629.400	8.305.743.800
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	8.088.629.400	8.088.629.400	8.305.743.800
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	22.863.896.800	22.863.896.800	31.989.994.441
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	22.863.896.800	22.863.896.800	31.989.994.441
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	8.176.139.000	8.176.139.000	7.750.238.641
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	03 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	8.176.139.000	8.176.139.000	7.750.238.641
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	14.687.757.800	14.687.757.800	24.239.755.800
2.17.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	18 Pengembangan Kewirausahaan Desa	14.687.757.800	14.687.757.800	24.239.755.800
2.18.0.00.0.00.01.0000					DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	11.644.167.555	11.644.167.555	11.741.649.555
2.18.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.644.167.555	11.644.167.555	11.741.649.555

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11.644.167.555	11.644.167.555	11.741.649.555
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.054.790.555	9.054.790.555	8.991.022.555
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.448.000	46.448.000	46.448.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.168.000	40.168.000	40.168.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.280.000	6.280.000	6.280.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.282.752.055	7.282.752.055	7.282.752.055
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.213.898.055	7.213.898.055	7.213.898.055
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.854.000	48.854.000	48.854.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.188.000	589.188.000	525.420.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.131.000	14.131.000	14.131.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.416.000	39.416.000	39.416.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.640.000	90.640.000	90.640.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.168.000	12.168.000	12.168.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.180.000	331.180.000	267.412.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.384.000	36.384.000	36.384.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	62.769.000	62.769.000	62.769.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.265.600	134.265.600	134.265.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.265.600	134.265.600	134.265.600

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.434.000	656.434.000	656.434.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.632.000	75.632.000	75.632.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.460.000	101.460.000	101.460.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.342.000	479.342.000	479.342.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.702.900	345.702.900	345.702.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.691.500	23.691.500	23.691.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.010.400	126.010.400	126.010.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.401.000	31.401.000	31.401.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.100.000	5.100.000	5.100.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	472.863.000	472.863.000	472.863.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	472.863.000	472.863.000	472.863.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	472.863.000	472.863.000	472.863.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	696.323.000	696.323.000	758.573.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	696.323.000	696.323.000	758.573.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	696.323.000	696.323.000	758.573.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	697.365.000	697.365.000	697.365.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	160.000.000	160.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	537.365.000	537.365.000	537.365.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	159.999.000	159.999.000	159.999.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	377.366.000	377.366.000	377.366.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	500.021.000	500.021.000	500.021.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	500.021.000	500.021.000	500.021.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	46.024.000	46.024.000	46.024.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	408.646.000	408.646.000	408.646.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.351.000	45.351.000	45.351.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	222.805.000	222.805.000	321.805.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	222.805.000	222.805.000	321.805.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	222.805.000	222.805.000	321.805.000
2.22.9.02.0.00.01.0000						DINAS KEBUDAYAAN	340.956.796.446	340.956.796.446	337.363.749.575

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	340.956.796.446	340.956.796.446	337.363.749.575
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	340.956.796.446	340.956.796.446	337.363.749.575
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.877.730.506	26.877.730.506	26.876.430.906
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.596.000	26.596.000	26.596.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.825.000	2.825.000	2.825.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.819.000	3.819.000	3.819.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.194.000	4.194.000	4.194.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.819.000	3.819.000	3.819.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.194.000	4.194.000	4.194.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.870.000	3.870.000	3.870.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.875.000	3.875.000	3.875.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.342.811.402	19.342.811.402	19.341.511.802
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.151.891.402	19.151.891.402	19.150.591.802
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.360.000	153.360.000	153.360.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.296.000	9.296.000	9.296.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.716.000	7.716.000	7.716.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.748.000	3.748.000	3.748.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.100.000	56.100.000	56.100.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03		Administrasi Umum	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.100.000	56.100.000	56.100.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.389.000	343.389.000	343.389.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.009.000	50.009.000	50.009.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.651.500	39.651.500	39.651.500
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.630.750	50.630.750	50.630.750
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	45.797.750	45.797.750	45.797.750
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.611.000	76.611.000	76.611.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	66.360.000	66.360.000	66.360.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.329.000	14.329.000	14.329.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.608.427.104	6.608.427.104	6.608.427.104
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	7.250.000	7.250.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.370.554.700	2.370.554.700	2.370.554.700
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.230.622.404	4.230.622.404	4.230.622.404
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.407.000	500.407.000	500.407.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.311.000	23.311.000	23.311.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.919.000	281.919.000	281.919.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.382.000	79.382.000	79.382.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.795.000	115.795.000	115.795.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	314.079.065.940	314.079.065.940	310.487.318.669
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	23.756.031.341	23.756.031.341	30.394.331.341
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	4.200.500.000	4.200.500.000	3.484.000.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	7.214.490.000	7.214.490.000	7.214.490.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	12.341.041.341	12.341.041.341	19.695.841.341
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.01	04	Pengembangan Bahasa Sastra	0	0	0
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.03		Penguatan Museum Sonobudoyo	23.308.653.262	23.308.653.262	26.894.622.365
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.03	01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.031.071.300	5.031.071.300	5.220.660.800
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.03	02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	18.277.581.962	18.277.581.962	21.673.961.565
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	19.741.270.537	19.741.270.537	14.692.110.763
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4.242.114.500	4.242.114.500	3.364.122.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	10.818.556.037	10.818.556.037	6.878.360.763
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	4.680.600.000	4.680.600.000	4.449.628.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.05		Pengelolaan Taman Budaya	11.451.816.000	11.451.816.000	10.118.856.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.05	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	11.451.816.000	11.451.816.000	10.118.856.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	18.967.250.000	18.967.250.000	19.981.628.400
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.06	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	8.728.250.000	8.728.250.000	8.768.805.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.06	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	10.239.000.000	10.239.000.000	11.212.823.400
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	4.860.484.500	4.860.484.500	4.816.563.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.07	01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	744.376.500	744.376.500	744.376.500
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.07	02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	600.000.000	600.000.000	556.079.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.07	03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	3.516.108.000	3.516.108.000	3.516.108.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	211.993.560.300	211.993.560.300	203.589.206.300
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	18.994.396.600	18.994.396.600	15.894.478.600
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	8.902.354.000	8.902.354.000	8.341.700.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	04	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	3.103.784.400	3.103.784.400	3.441.846.400
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	1.814.408.000	1.814.408.000	1.760.148.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	3.500.000.000	3.500.000.000	2.750.366.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	07	Gelar Budaya Yogyakarta	5.082.594.000	5.082.594.000	4.506.309.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.918.007.800	5.918.007.800	5.946.857.800
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.261.054.000	2.261.054.000	1.751.243.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	8.678.022.500	8.678.022.500	5.955.454.500
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	11	Selendang Sutera	1.546.948.000	1.546.948.000	1.362.078.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	12	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	5.731.400.000	5.731.400.000	3.947.220.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	15	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	143.101.200.000	143.101.200.000	146.601.200.000
2.22.9.02.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3.359.391.000	3.359.391.000	1.330.305.000
2.23.2.24.2.22.02.0000						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	57.844.159.131	57.844.159.131	57.891.052.131
2.23.2.24.2.22.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	57.844.159.131	57.844.159.131	57.891.052.131
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	20.797.339.600	20.797.339.600	20.587.823.600
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.797.339.600	20.797.339.600	20.587.823.600
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	22	08	1.02		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	20.797.339.600	20.797.339.600	20.587.823.600

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	22	08	1.02	02	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	19.758.572.000	19.758.572.000	19.758.572.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	22	08	1.02	03	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.038.767.600	1.038.767.600	829.251.600
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	36.364.710.431	36.364.710.431	36.621.119.431
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.296.017.431	30.296.017.431	30.272.426.431
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.976.000	147.976.000	147.976.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.537.000	62.537.000	62.537.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.393.000	35.393.000	35.393.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.641.000	22.641.000	22.641.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.410.000	17.410.000	17.410.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.995.000	9.995.000	9.995.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.405.369.731	14.405.369.731	14.405.369.731
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.334.818.231	14.334.818.231	14.334.818.231
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.759.000	52.759.000	52.759.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.648.000	7.648.000	7.648.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.862.000	4.862.000	4.862.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.282.500	5.282.500	5.282.500
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.03		Administrasi Umum	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.555.000	21.555.000	21.555.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.555.000	21.555.000	21.555.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.776.000	501.776.000	500.801.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.970.000	59.970.000	59.970.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.556.000	49.556.000	49.556.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.152.000	24.152.000	24.152.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.632.000	34.632.000	34.632.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.856.000	2.856.000	2.856.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.610.000	330.610.000	329.635.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.312.007.500	5.312.007.500	5.312.007.500
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.312.007.500	5.312.007.500	5.312.007.500
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.496.156.000	6.496.156.000	6.491.466.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.880.000	8.880.000	7.880.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.487.276.000	6.487.276.000	6.483.586.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.411.177.200	3.411.177.200	3.393.251.200
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.007.600	435.007.600	417.081.600
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	13.250.000	13.250.000	13.250.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.521.404.000	2.521.404.000	2.521.404.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.515.600	441.515.600	441.515.600
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.661.469.250	5.661.469.250	5.941.469.250
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.472.521.250	4.472.521.250	4.472.521.250
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	407.821.000	407.821.000	407.821.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	195.229.500	195.229.500	195.229.500
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	34.954.750	34.954.750	34.954.750
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.347.191.000	3.347.191.000	3.347.191.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	5.625.000	5.625.000	5.625.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	481.700.000	481.700.000	481.700.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1.188.948.000	1.188.948.000	1.468.948.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1.188.948.000	1.188.948.000	1.468.948.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0	0	0
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	407.223.750	407.223.750	407.223.750
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	14.710.000	14.710.000	14.710.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	14.710.000	14.710.000	14.710.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	61.100.000	61.100.000	61.100.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.100.000	25.100.000	25.100.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	223.493.750	223.493.750	223.493.750
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	32.260.000	32.260.000	32.260.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	191.233.750	191.233.750	191.233.750
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	107.920.000	107.920.000	107.920.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	107.920.000	107.920.000	107.920.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	682.109.100	682.109.100	682.109.100
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	682.109.100	682.109.100	682.109.100
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	315.307.000	315.307.000	315.307.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	118.600.000	118.600.000	118.600.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	196.707.000	196.707.000	196.707.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	190.206.100	190.206.100	190.206.100
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	190.206.100	190.206.100	190.206.100
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	176.596.000	176.596.000	176.596.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	146.455.000	146.455.000	146.455.000
2.23.2.24.2.22.02.0000	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	30.141.000	30.141.000	30.141.000
3.25.2.22.0.00.01.0000						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	68.005.714.562	71.524.354.562	70.280.990.562
3.25.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	210.000.000	210.000.000	198.792.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.000.000	210.000.000	198.792.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	210.000.000	210.000.000	198.792.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	210.000.000	210.000.000	198.792.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	1	03	13	1.01	01 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	210.000.000	210.000.000	198.792.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.916.797.000	31.916.797.000	30.452.873.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	31.916.797.000	31.916.797.000	30.452.873.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	31.916.797.000	31.916.797.000	30.452.873.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	31.916.797.000	31.916.797.000	30.452.873.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08	05 Pengembangan Budaya Bahari	31.916.797.000	31.916.797.000	30.452.873.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35.878.917.562	39.397.557.562	39.629.324.562
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.878.917.562	39.397.557.562	39.629.324.562
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.257.101.562	21.297.101.562	21.241.730.562
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.084.500	124.084.500	124.084.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.244.500	76.244.500	76.244.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.840.000	47.840.000	47.840.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.245.574.152	15.245.574.152	15.245.574.152
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.063.274.152	15.063.274.152	15.063.274.152
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.300.000	150.300.000	150.300.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.000.000	32.000.000	32.000.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	Administrasi Umum	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.462.800	705.462.800	701.262.800
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.609.800	25.609.800	25.609.800
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.080.000	79.080.000	79.080.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.462.000	82.462.000	82.462.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.260.000	16.260.000	16.260.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.051.000	502.051.000	497.851.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.428.000	282.428.000	282.428.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.428.000	265.428.000	265.428.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	17.000.000	17.000.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.227.320.510	3.227.741.510	3.176.570.510
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.131.000	100.552.000	100.131.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.135.190.110	1.135.190.110	1.084.440.110
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.991.999.400	1.991.999.400	1.991.999.400

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.688.231.600	1.711.810.600	1.711.810.600
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	618.850.700	618.850.700	618.850.700
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.330.000	64.330.000	64.330.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	877.065.900	900.644.900	900.644.900
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.985.000	87.985.000	87.985.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.021.153.500	1.021.153.500	1.218.353.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.021.153.500	1.021.153.500	1.218.353.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	242.307.500	242.307.500	242.307.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	661.585.000	661.585.000	859.585.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	117.261.000	117.261.000	116.461.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.459.669.500	3.459.669.500	3.459.669.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	349.246.500	349.246.500	349.246.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	110.929.500	110.929.500	110.929.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	238.317.000	238.317.000	238.317.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.073.193.000	1.073.193.000	1.073.193.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.02	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.073.193.000	1.073.193.000	1.073.193.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	48.684.000	48.684.000	48.684.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.03	02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	48.684.000	48.684.000	48.684.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.924.201.000	1.924.201.000	1.924.201.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.762.332.000	1.762.332.000	1.762.332.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	161.869.000	161.869.000	161.869.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	64.345.000	64.345.000	64.345.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	64.345.000	64.345.000	64.345.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.701.444.000	11.180.084.000	11.292.584.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7.701.444.000	11.180.084.000	11.292.584.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	560.000.000	560.000.000	560.000.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.518.640.000	7.037.280.000	7.037.280.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	278.747.000	278.747.000	278.747.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	08 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.937.450.000	2.897.450.000	3.022.450.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	406.607.000	406.607.000	394.107.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	267.839.000	267.839.000	265.614.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	117.469.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	117.469.500	117.469.500	117.469.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.369.500	150.369.500	148.144.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	126.418.000	126.418.000	125.918.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.951.500	23.951.500	22.226.500
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.171.710.000	2.171.710.000	2.151.373.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	726.670.000	726.670.000	726.670.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	726.670.000	726.670.000	726.670.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.247.958.000	1.247.958.000	1.237.345.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	515.099.000	515.099.000	504.486.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	732.859.000	732.859.000	732.859.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.082.000	197.082.000	187.358.000
3.25.2.22.0.00.01.0000	3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	197.082.000	197.082.000	187.358.000
3.26.2.22.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA	31.659.564.332	31.659.564.332	37.339.761.132
3.26.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.694.972.000	15.694.972.000	21.249.950.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.694.972.000	15.694.972.000	21.249.950.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.694.972.000	15.694.972.000	21.249.950.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.127.810.000	1.127.810.000	2.376.810.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.127.810.000	1.127.810.000	2.376.810.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	11.197.329.500	11.197.329.500	10.213.378.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.08	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	11.197.329.500	11.197.329.500	10.213.378.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.369.832.500	3.369.832.500	8.659.762.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	08	1.09	19	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	3.369.832.500	3.369.832.500	8.659.762.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.964.592.332	15.964.592.332	16.089.810.632
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.964.592.332	15.964.592.332	16.089.810.632
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.389.393.832	9.389.393.832	9.266.212.632
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.340.000	134.340.000	103.565.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.340.000	79.340.000	76.140.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	55.000.000	27.425.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.138.882	7.682.138.882	7.682.138.882

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.617.418.882	7.617.418.882	7.617.418.882
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.720.000	54.720.000	54.720.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.664.000	419.664.000	386.590.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.500.000	9.500.000	9.500.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.743.000	6.743.000	6.743.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.800.000	31.800.000	31.800.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000	4.380.000	4.380.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.776.000	260.776.000	227.702.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.265.000	35.265.000	35.265.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.200.000	71.200.000	71.200.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.929.000	81.929.000	81.929.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.929.000	81.929.000	81.929.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.199.250	494.199.250	484.867.050
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.200.000	51.200.000	51.200.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.999.250	133.999.250	124.667.050
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.000.000	309.000.000	309.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.122.700	577.122.700	527.122.700
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.380.000	27.380.000	27.380.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.302.700	142.302.700	142.302.700

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	9.400.000	9.400.000	9.400.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.040.000	103.040.000	103.040.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.000.000	295.000.000	245.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.587.635.000	2.587.635.000	2.664.845.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	92.000.000	92.000.000	186.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	92.000.000	92.000.000	186.000.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.816.235.000	1.816.235.000	1.799.445.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.785.775.000	1.785.775.000	1.785.775.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	30.460.000	30.460.000	13.670.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	679.400.000	679.400.000	679.400.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	350.810.000	350.810.000	350.810.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	328.590.000	328.590.000	328.590.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.536.601.000	1.536.601.000	1.674.843.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.536.601.000	1.536.601.000	1.674.843.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	507.600.000	507.600.000	507.600.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	405.500.000	405.500.000	347.742.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	500.841.000	500.841.000	696.841.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	122.660.000	122.660.000	122.660.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.450.962.500	2.450.962.500	2.483.910.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.450.962.500	2.450.962.500	2.483.910.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	896.867.000	896.867.000	920.584.500
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	827.080.000	827.080.000	827.080.000
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	727.015.500	727.015.500	736.245.500
3.27.2.09.2.22.02.0000					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	88.810.873.817	88.810.873.817	88.380.600.867
3.27.2.09.2.22.02.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.349.873.763	5.349.873.763	5.056.325.313
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.693.970.000	1.693.970.000	1.671.134.250
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	309.615.500	309.615.500	309.615.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	02	1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	309.615.500	309.615.500	309.615.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	02	1.01	05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	309.615.500	309.615.500	309.615.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	731.063.000	731.063.000	726.138.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	404.641.000	404.641.000	399.716.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	191.645.000	191.645.000	189.220.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	103.699.000	103.699.000	101.649.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.01	05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	109.297.000	109.297.000	108.847.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.02	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	326.422.000	326.422.000	326.422.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	03	1.04	01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	326.422.000	326.422.000	326.422.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	498.247.500	498.247.500	497.747.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	04	1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	77.737.500	77.737.500	77.737.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	04	1.01	01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	77.737.500	77.737.500	77.737.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	04	1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	420.510.000	420.510.000	420.010.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	04	1.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	420.510.000	420.510.000	420.010.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	155.044.000	155.044.000	137.633.250
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	05	1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	155.044.000	155.044.000	137.633.250
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	05	1.01	01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	35.940.000	35.940.000	35.940.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	05	1.01	02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77.585.250	77.585.250	67.955.250
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	09	05	1.01	04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	41.518.750	41.518.750	33.738.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.655.903.763	3.655.903.763	3.385.191.063
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.655.903.763	3.655.903.763	3.385.191.063
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	22	08	1.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	3.655.903.763	3.655.903.763	3.385.191.063
3.27.2.09.2.22.02.0000	2	22	08	1.08	01 Pengembangan Lumbung Mataraman	3.655.903.763	3.655.903.763	3.385.191.063

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	83.461.000.054	83.461.000.054	83.324.275.554
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	83.461.000.054	83.461.000.054	83.324.275.554
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.293.416.604	49.293.416.604	49.253.612.104
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.464.000	114.464.000	111.739.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.980.000	89.980.000	89.230.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.484.000	24.484.000	22.509.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.623.774.054	44.623.774.054	44.623.774.054
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.425.834.054	44.425.834.054	44.425.834.054
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	185.940.000	185.940.000	185.940.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.545.000	22.545.000	16.454.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.545.000	22.545.000	16.454.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.670.500	293.670.500	283.649.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.659.000	18.659.000	18.134.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.701.500	44.701.500	44.701.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.948.500	53.948.500	53.948.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.776.000	19.776.000	17.832.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.901.000	141.901.000	134.349.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.684.500	14.684.500	14.684.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.251.000	116.251.000	116.251.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.363.000	81.363.000	81.363.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.888.000	34.888.000	34.888.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.927.329.250	2.927.329.250	2.927.329.250
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.668.000	81.668.000	81.668.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.217.450	1.000.217.450	1.000.217.450
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.845.443.800	1.845.443.800	1.845.443.800
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.195.382.800	1.195.382.800	1.174.414.800
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.046.000	34.046.000	28.898.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	728.617.400	728.617.400	722.197.400
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.410.000	22.410.000	19.260.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	351.638.800	351.638.800	351.638.800
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.670.600	58.670.600	52.420.600
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	21.638.340.000	21.638.340.000	21.631.140.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.688.545.000	3.688.545.000	3.688.545.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.688.545.000	3.688.545.000	3.688.545.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.577.723.000	1.577.723.000	1.577.723.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	105.921.000	105.921.000	105.921.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	590.330.000	590.330.000	590.330.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	754.829.000	754.829.000	754.829.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	126.643.000	126.643.000	126.643.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16.372.072.000	16.372.072.000	16.364.872.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.855.488.000	12.855.488.000	12.848.288.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.516.584.000	3.516.584.000	3.516.584.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.524.258.750	6.524.258.750	6.461.338.750
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	6.524.258.750	6.524.258.750	6.461.338.750
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.004.110.000	1.004.110.000	1.004.110.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3.050.468.750	3.050.468.750	2.987.548.750
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.632.150.000	1.632.150.000	1.632.150.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	837.530.000	837.530.000	837.530.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.760.307.000	1.760.307.000	1.760.307.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	278.688.500	278.688.500	278.688.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.01	01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	278.688.500	278.688.500	278.688.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	545.311.000	545.311.000	545.311.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.02	01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3.216.000	3.216.000	3.216.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.02	03 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	542.095.000	542.095.000	542.095.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	916.744.000	916.744.000	916.744.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.03	03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	916.744.000	916.744.000	916.744.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.05	Kesejahteraan Hewan	19.563.500	19.563.500	19.563.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	04	1.05	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	19.563.500	19.563.500	19.563.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	722.828.000	722.828.000	696.028.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	722.828.000	722.828.000	696.028.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	05	1.01	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	722.828.000	722.828.000	696.028.000
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.521.849.700	3.521.849.700	3.521.849.700
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07	1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	102.713.500	102.713.500	102.713.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07	1.01	01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	102.713.500	102.713.500	102.713.500
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.419.136.200	3.419.136.200	3.419.136.200

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.180.168.200	3.180.168.200	3.180.168.200
3.27.2.09.2.22.02.0000	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	238.968.000	238.968.000	238.968.000
3.31.3.30.2.22.02.0000						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43.697.478.678	43.697.478.678	44.297.960.103
3.31.3.30.2.22.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.453.835.000	15.453.835.000	15.148.691.425
3.31.3.30.2.22.02.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.453.835.000	15.453.835.000	15.148.691.425
3.31.3.30.2.22.02.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.453.835.000	15.453.835.000	15.148.691.425
3.31.3.30.2.22.02.0000	2	22	08	1.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	15.453.835.000	15.453.835.000	15.148.691.425
3.31.3.30.2.22.02.0000	2	22	08	1.08	03	Pengembangan Industri Kreatif	15.453.835.000	15.453.835.000	15.148.691.425
3.31.3.30.2.22.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.243.643.678	28.243.643.678	29.149.268.678
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.509.687.750	1.509.687.750	2.023.937.750
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	22.829.000	22.829.000	124.259.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	22.829.000	22.829.000	124.259.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	22.829.000	22.829.000	124.259.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	120.538.000	120.538.000	120.538.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	120.538.000	120.538.000	120.538.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	63.894.000	63.894.000	63.894.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56.644.000	56.644.000	56.644.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	390.171.500	390.171.500	658.091.500
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	05	1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	390.171.500	390.171.500	658.091.500
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	05	1.01	01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	310.383.000	310.383.000	462.383.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	05	1.01	03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0	0	0
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	05	1.01	05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	79.788.500	79.788.500	195.708.500
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	177.326.000	177.326.000	249.776.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	06	1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	170.522.000	170.522.000	242.972.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	06	1.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	170.522.000	170.522.000	242.972.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	06	1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	6.804.000	6.804.000	6.804.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	06	1.03	01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	6.804.000	6.804.000	6.804.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	798.823.250	798.823.250	871.273.250
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	07	1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	747.123.250	747.123.250	747.123.250
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	07	1.02	01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	747.123.250	747.123.250	747.123.250
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	07	1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	51.700.000	51.700.000	124.150.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	30	07	1.03	03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	51.700.000	51.700.000	124.150.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.733.955.928	26.733.955.928	27.125.330.928
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.349.992.853	18.349.992.853	18.393.462.853

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.884.000	326.884.000	370.354.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	304.084.000	304.084.000	347.554.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.750.000	4.750.000	4.750.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.050.000	18.050.000	18.050.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.522.905.953	14.522.905.953	14.522.905.953
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.402.725.953	14.402.725.953	14.402.725.953
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.280.000	110.280.000	110.280.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.900.000	9.900.000	9.900.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.261.600	487.261.600	487.261.600
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.520.600	5.520.600	5.520.600
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.470.000	5.470.000	5.470.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.979.000	52.979.000	52.979.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.068.000	68.068.000	68.068.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.980.000	13.980.000	13.980.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.177.000	259.177.000	259.177.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.067.000	82.067.000	82.067.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.083.000	123.083.000	123.083.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	12.500.000	12.500.000	12.500.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.349.000	99.349.000	99.349.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.234.000	11.234.000	11.234.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.455.808.750	2.455.808.750	2.455.808.750
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.685.000	64.685.000	64.685.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.400.350.000	1.400.350.000	1.400.350.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.773.750	990.773.750	990.773.750
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.049.550	434.049.550	434.049.550
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.523.500	17.523.500	17.523.500
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.076.050	224.076.050	224.076.050
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.993.000	41.993.000	41.993.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.460.000	98.460.000	98.460.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.197.000	50.197.000	50.197.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.247.229.075	8.247.229.075	8.551.519.075
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8.247.229.075	8.247.229.075	8.551.519.075
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7.258.586.325	7.258.586.325	7.360.016.325
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	522.014.750	522.014.750	666.914.750
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	466.628.000	466.628.000	524.588.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	136.734.000	136.734.000	180.349.000
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	136.734.000	136.734.000	180.349.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.2.22.02.0000	3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	136.734.000	136.734.000	180.349.000
3.32.2.07.2.22.02.0000						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.276.497.769	51.276.497.769	51.236.111.669
3.32.2.07.2.22.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.820.822.769	50.820.822.769	50.790.880.669
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	45.349.826.969	45.349.826.969	45.683.284.869
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.560.805.469	31.560.805.469	31.458.491.369
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.555.000	195.555.000	156.161.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.055.000	117.055.000	88.555.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.500.000	78.500.000	67.606.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.034.684.619	25.034.684.619	25.031.787.519
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.871.709.619	24.871.709.619	24.869.937.519
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.940.000	134.940.000	134.940.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.035.000	28.035.000	26.910.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.256.000	14.256.000	14.256.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.256.000	14.256.000	14.256.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.557.575.400	1.557.575.400	1.533.420.400
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.735.900	44.735.900	44.735.900
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.140.361.000	1.140.361.000	1.140.361.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.785.000	24.785.000	24.785.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.236.500	47.236.500	47.236.500
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.753.000	27.753.000	27.753.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.897.000	213.897.000	189.742.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.807.000	58.807.000	58.807.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.693.000	75.693.000	75.693.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.693.000	75.693.000	75.693.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.273.653.550	3.273.653.550	3.267.785.550
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.132.000	67.132.000	67.132.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	705.116.550	705.116.550	705.116.550
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.501.405.000	2.501.405.000	2.495.537.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.409.387.900	1.409.387.900	1.379.387.900
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.111.000	27.111.000	27.111.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	755.854.900	755.854.900	725.854.900
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	33.850.000	33.850.000	33.850.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.740.000	187.740.000	187.740.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.950.000	323.950.000	323.950.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.442.000	18.442.000	18.442.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.440.000	62.440.000	62.440.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	315.507.000	315.507.000	506.447.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	02	1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	315.507.000	315.507.000	506.447.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	02	1.01	01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	315.507.000	315.507.000	506.447.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.902.880.000	7.902.880.000	7.868.780.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	03	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.871.250.000	7.871.250.000	7.837.150.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.871.250.000	7.871.250.000	7.837.150.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	31.630.000	31.630.000	31.630.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	31.630.000	31.630.000	31.630.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.946.333.000	3.946.333.000	3.940.041.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.694.640.000	3.694.640.000	3.694.640.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	3.694.640.000	3.694.640.000	3.694.640.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.055.000	34.055.000	28.663.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	34.055.000	34.055.000	28.663.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.238.000	167.238.000	166.338.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	91.468.000	91.468.000	91.468.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	75.770.000	75.770.000	74.870.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	50.400.000	50.400.000	50.400.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.400.000	50.400.000	50.400.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	580.546.000	580.546.000	693.048.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	331.932.000	331.932.000	391.614.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	231.215.000	231.215.000	294.665.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	100.717.000	100.717.000	96.949.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	248.614.000	248.614.000	301.434.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.03	01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	154.518.000	154.518.000	154.518.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	05	1.03	05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	94.096.000	94.096.000	146.916.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.043.755.500	1.043.755.500	1.216.477.500
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	06	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.043.755.500	1.043.755.500	1.216.477.500
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	06	1.01	01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	568.845.000	568.845.000	625.187.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	07	06	1.01	03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	474.910.500	474.910.500	591.290.500
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.470.995.800	5.470.995.800	5.107.595.800
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.470.995.800	5.470.995.800	5.107.595.800
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5.470.995.800	5.470.995.800	5.107.595.800
3.32.2.07.2.22.02.0000	2	22	08	1.09	23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	5.470.995.800	5.470.995.800	5.107.595.800
3.32.2.07.2.22.02.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	455.675.000	455.675.000	445.231.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	455.675.000	455.675.000	445.231.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	455.675.000	455.675.000	445.231.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	3	32	03	1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	455.675.000	455.675.000	445.231.000
3.32.2.07.2.22.02.0000	3	32	03	1.01	04 Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	455.675.000	455.675.000	445.231.000
4.01.2.10.1.03.01.0000					SEKRETARIAT DAERAH	137.180.473.932	137.180.473.932	131.405.531.192
4.01.2.10.1.03.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.796.128.705	11.796.128.705	10.239.743.465
4.01.2.10.1.03.01.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.796.128.705	11.796.128.705	10.239.743.465

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	1	03	13		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	11.796.128.705	11.796.128.705	10.239.743.465
4.01.2.10.1.03.01.0000	1	03	13	1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	11.796.128.705	11.796.128.705	10.239.743.465
4.01.2.10.1.03.01.0000	1	03	13	1.02	01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	11.796.128.705	11.796.128.705	10.239.743.465
4.01.2.10.1.03.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.235.916.750	2.235.916.750	2.130.291.750
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	369.362.000	369.362.000	353.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	10	11		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	369.362.000	369.362.000	353.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	10	11	1.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	369.362.000	369.362.000	353.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	10	11	1.01	09 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	369.362.000	369.362.000	353.162.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	553.421.000	553.421.000	598.721.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	49.518.000	49.518.000	49.518.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	02	1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	49.518.000	49.518.000	49.518.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	02	1.01	02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.868.000	24.868.000	24.868.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	02	1.01	04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	24.650.000	24.650.000	24.650.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	139.142.000	139.142.000	139.142.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	03	1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	139.142.000	139.142.000	139.142.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	03	1.01	04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	139.142.000	139.142.000	139.142.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	190.861.000	190.861.000	236.161.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	182.336.000	182.336.000	227.636.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.02	02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118.590.000	118.590.000	163.890.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.02	05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.754.000	14.754.000	14.754.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.992.000	48.992.000	48.992.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	8.525.000	8.525.000	8.525.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.525.000	8.525.000	8.525.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	173.900.000	173.900.000	173.900.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	173.900.000	173.900.000	173.900.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	115.550.000	115.550.000	115.550.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	58.350.000	58.350.000	58.350.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.313.133.750	1.313.133.750	1.178.408.750
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.313.133.750	1.313.133.750	1.178.408.750
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	487.556.250	487.556.250	534.818.250
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	487.556.250	487.556.250	534.818.250
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	364.827.500	364.827.500	364.827.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.06	03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	364.827.500	364.827.500	364.827.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	460.750.000	460.750.000	278.763.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.09	01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	96.750.000	96.750.000	53.710.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	2	22	08	1.09	18	Pengembangan Kewirausahaan Desa	364.000.000	364.000.000	225.053.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	123.148.428.477	123.148.428.477	119.035.495.977
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	123.148.428.477	123.148.428.477	119.035.495.977
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.304.510.677	79.273.914.677	78.102.196.177

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	523.144.250	523.144.250	496.546.750
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.024.750	210.024.750	197.614.750
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	211.051.000	211.051.000	209.806.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.922.000	1.922.000	677.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.292.000	4.292.000	2.507.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.585.500	6.585.500	4.908.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.905.000	21.905.000	21.905.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.364.000	67.364.000	59.129.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.952.291.736	53.952.291.736	53.948.661.736
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.603.049.486	53.603.049.486	53.603.049.486
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.401.250	269.401.250	269.401.250
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.978.000	11.978.000	11.093.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.797.000	58.797.000	56.352.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.066.000	9.066.000	8.766.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	960.000	960.000	960.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.03	Administrasi Umum	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	192.000	192.000	192.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	768.000	768.000	768.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.03	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	576.398.000	576.398.000	576.398.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	409.846.000	409.846.000	409.846.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	166.552.000	166.552.000	166.552.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.959.832.100	5.929.236.100	5.001.638.100
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.079.600	57.079.600	57.079.600
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.899.000	270.899.000	267.749.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.879.000	51.879.000	51.879.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	511.669.000	511.669.000	511.669.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.630.000	68.630.000	68.630.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.430.143.000	1.430.143.000	1.334.463.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.329.342.500	3.298.746.500	2.469.978.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	153.840.000	153.840.000	153.840.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	86.350.000	86.350.000	86.350.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.577.196.798	2.577.196.798	2.591.218.798
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.330.000	281.330.000	281.330.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	367.880.000	367.880.000	381.902.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.986.798	273.986.798	273.986.798
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.305.915.600	5.305.915.600	5.305.915.600
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.115.000	152.115.000	152.115.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.493.600.000	2.493.600.000	2.493.600.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.167.500	271.167.500	271.167.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.389.033.100	2.389.033.100	2.389.033.100
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.053.415.400	4.053.415.400	4.005.115.400
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	676.423.900	676.423.900	661.483.900
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.304.465.200	1.304.465.200	1.277.105.200
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	13.050.000	13.050.000	13.050.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.670.000	130.670.000	130.670.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.505.000	62.505.000	56.505.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.324.462.000	1.324.462.000	1.324.462.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	234.498.600	234.498.600	234.498.600
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	307.340.700	307.340.700	307.340.700
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.025.020.793	3.025.020.793	3.003.020.793
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	243.020.793	243.020.793	243.020.793
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.782.000.000	2.782.000.000	2.760.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	441.452.000	441.452.000	441.452.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	225.030.000	225.030.000	225.030.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	191.910.000	191.910.000	191.910.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	24.512.000	24.512.000	24.512.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.106.580.000	1.106.580.000	1.221.590.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	253.610.000	253.610.000	241.155.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	852.970.000	852.970.000	980.435.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	1.782.304.000	1.782.304.000	1.509.679.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.411.704.000	1.411.704.000	1.210.579.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	370.600.000	370.600.000	299.100.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	855.130.500	855.130.500	799.739.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	855.130.500	855.130.500	799.739.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	112.640.000	112.640.000	90.029.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	40.994.000	40.994.000	29.999.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	509.891.000	509.891.000	509.891.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02	05	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	191.605.500	191.605.500	169.820.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.826.008.500	1.826.008.500	1.810.168.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	151.444.000	151.444.000	151.444.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	151.444.000	151.444.000	151.444.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	576.504.500	576.504.500	560.664.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	166.895.000	166.895.000	166.895.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	409.609.500	409.609.500	393.769.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.098.060.000	1.098.060.000	1.098.060.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.098.060.000	1.098.060.000	1.098.060.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	0	0	0
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.890.380.500	23.920.976.500	21.108.506.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	20.004.748.000	20.035.344.000	17.098.466.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	20.004.748.000	20.035.344.000	17.098.466.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	3.744.867.000	3.744.867.000	3.869.275.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.02	01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	63.478.000	63.478.000	88.478.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.02	02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	299.710.000	299.710.000	349.710.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.02	03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3.381.679.000	3.381.679.000	3.431.087.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	140.765.500	140.765.500	140.765.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	04	1.03	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	140.765.500	140.765.500	140.765.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.759.518.400	3.759.518.400	3.677.603.400
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.397.827.600	1.397.827.600	1.322.512.600
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.01	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	430.395.000	430.395.000	361.740.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.01	02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	120.681.000	120.681.000	113.076.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.01	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	483.551.600	483.551.600	498.491.600
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.01	04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	363.200.000	363.200.000	349.205.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.361.690.800	2.361.690.800	2.355.090.800
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.02	01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	494.225.000	494.225.000	487.625.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	05	1.02	02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.867.465.800	1.867.465.800	1.867.465.800
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.095.500.000	3.095.500.000	3.131.425.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.641.238.000	1.641.238.000	1.691.238.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.01	01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.404.247.500	1.404.247.500	1.454.247.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.01	02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	236.990.500	236.990.500	236.990.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.084.505.000	1.084.505.000	1.070.430.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.02	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.084.505.000	1.084.505.000	1.070.430.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	369.757.000	369.757.000	369.757.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	06	1.03	01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	369.757.000	369.757.000	369.757.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	353.338.000	353.338.000	346.179.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	179.504.000	179.504.000	174.254.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.01	02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	173.728.000	173.728.000	168.478.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.01	03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.776.000	5.776.000	5.776.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	92.662.000	92.662.000	92.662.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.02	01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	7.662.000	7.662.000	7.662.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.02	02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.000.000	85.000.000	85.000.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	81.172.000	81.172.000	79.263.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.03	02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	59.350.000	59.350.000	59.350.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	07	1.03	03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	21.822.000	21.822.000	19.913.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.817.147.500	1.817.147.500	1.795.452.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	08	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	790.705.000	790.705.000	781.930.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	08	1.01	03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	790.705.000	790.705.000	781.930.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	08	1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.026.442.500	1.026.442.500	1.013.522.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.026.442.500	1.026.442.500	1.013.522.500
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	8.246.894.400	8.246.894.400	8.264.225.400
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan	7.792.671.400	7.792.671.400	7.504.731.400
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	608.758.000	608.758.000	540.499.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	161.746.000	161.746.000	102.250.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	4.692.406.000	4.692.406.000	4.692.406.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	11	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	792.468.400	792.468.400	760.133.400
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	540.277.000	540.277.000	465.767.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.01	13	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	997.016.000	997.016.000	943.676.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	454.223.000	454.223.000	336.789.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	454.223.000	454.223.000	336.789.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	422.705.000
4.01.2.10.1.03.01.0000	4	01	10	1.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	422.705.000
4.02.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DPRD	109.709.403.821	109.709.403.821	113.530.437.821
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.709.403.821	109.709.403.821	113.530.437.821
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	109.709.403.821	109.709.403.821	113.530.437.821
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.099.748.821	63.099.748.821	63.349.968.821
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.640.000	111.640.000	111.640.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.116.000	65.116.000	65.116.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.524.000	46.524.000	46.524.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.476.532.181	9.476.532.181	9.476.532.181
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.337.442.431	9.337.442.431	9.337.442.431
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000	79.320.000	79.320.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.400.000	25.400.000	25.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.369.750	34.369.750	34.369.750
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.025.344.000	3.025.344.000	3.123.040.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.469.000	42.469.000	42.469.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	383.452.000	383.452.000	488.512.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	498.486.000	498.486.000	498.486.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.100.937.000	2.100.937.000	2.093.573.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.686.000	113.686.000	266.210.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.686.000	113.686.000	266.210.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.400.000	961.400.000	961.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	961.400.000	961.400.000	961.400.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.454.302.200	4.454.302.200	4.454.302.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351.773.600	351.773.600	351.773.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	876.802.600	876.802.600	876.802.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.950.000	290.950.000	290.950.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.934.776.000	2.934.776.000	2.934.776.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.769.023.440	41.769.023.440	41.769.023.440
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.895.548.440	40.895.548.440	40.895.548.440
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	630.475.000	630.475.000	630.475.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	243.000.000	243.000.000	243.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD	3.187.821.000	3.187.821.000	3.187.821.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.666.942.000	1.666.942.000	1.666.942.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.520.879.000	1.520.879.000	1.520.879.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.609.655.000	46.609.655.000	50.180.469.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	13.597.877.000	13.597.877.000	13.632.230.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.471.048.000	2.471.048.000	2.514.652.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	7.057.945.000	7.057.945.000	7.080.019.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	852.388.000	852.388.000	821.063.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3.216.496.000	3.216.496.000	3.216.496.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.473.261.000	2.473.261.000	2.180.098.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	333.668.000	333.668.000	333.668.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.444.000	121.444.000	121.444.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	626.776.000	626.776.000	458.367.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	468.014.000	468.014.000	343.260.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	521.407.000	521.407.000	521.407.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	401.952.000	401.952.000	401.952.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.917.662.000	1.917.662.000	3.108.948.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	471.662.000	471.662.000	716.018.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	531.534.000	531.534.000	780.350.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	467.662.000	467.662.000	928.948.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	446.804.000	446.804.000	683.632.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	16.066.167.000	16.066.167.000	17.542.710.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	3.485.108.000	3.485.108.000	3.562.108.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.120.993.000	4.120.993.000	5.968.643.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.374.300.000	1.374.300.000	1.374.300.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	648.315.000	648.315.000	648.315.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.778.190.000	4.778.190.000	4.593.314.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.659.261.000	1.659.261.000	1.396.030.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.211.839.000	4.211.839.000	4.211.839.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	244.942.000	244.942.000	244.942.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	3.966.897.000	3.966.897.000	3.966.897.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	421.031.000	421.031.000	457.131.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	421.031.000	421.031.000	457.131.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	7.921.818.000	7.921.818.000	9.047.513.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.035.961.000	4.035.961.000	4.926.563.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	29.591.000	29.591.000	29.591.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.856.266.000	3.856.266.000	4.091.359.000
5.01.2.20.5.05.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.563.682.670	22.563.682.670	22.503.094.670
5.01.2.20.5.05.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.154.843.591	2.154.843.591	2.154.843.591
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.154.843.591	2.154.843.591	2.154.843.591
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.712.461.591	1.712.461.591	1.712.461.591
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.390.389.591	1.390.389.591	1.390.389.591
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.364.591	1.371.364.591	1.371.364.591
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.025.000	19.025.000	19.025.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.162.000	168.162.000	168.162.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.936.000	96.936.000	96.936.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.226.000	71.226.000	71.226.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.480.000	96.480.000	96.480.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.480.000	96.480.000	96.480.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.430.000	57.430.000	57.430.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.155.000	22.155.000	22.155.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.275.000	15.275.000	15.275.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	442.382.000	442.382.000	442.382.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	02	1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	442.382.000	442.382.000	442.382.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	2	20	02	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	442.382.000	442.382.000	442.382.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	20.408.839.079	20.408.839.079	20.348.251.079
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01			PERENCANAAN	20.031.277.309	20.031.277.309	20.019.741.309
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.061.865.109	15.061.865.109	15.050.329.109
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.984.500	147.984.500	147.984.500
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.587.500	123.587.500	123.587.500
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.365.000	12.365.000	12.365.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.032.000	12.032.000	12.032.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.494.839.259	13.494.839.259	13.494.839.259
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.422.844.259	13.422.844.259	13.422.844.259
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.695.000	44.695.000	44.695.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.300.000	27.300.000	27.300.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.863.250	567.863.250	556.327.250
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.340.000	201.340.000	201.340.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.523.250	366.523.250	354.987.250
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.294.100	491.294.100	491.294.100
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.294.100	491.294.100	491.294.100
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.884.000	359.884.000	359.884.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.735.000	154.735.000	154.735.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.195.000	85.195.000	85.195.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.954.000	119.954.000	119.954.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.813.840.500	3.813.840.500	3.813.840.500
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.076.820.000	2.076.820.000	2.076.820.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	121.156.000	121.156.000	121.156.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.01	06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.955.664.000	1.955.664.000	1.955.664.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.737.020.500	1.737.020.500	1.737.020.500
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	44.672.000	44.672.000	44.672.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.615.823.500	1.615.823.500	1.615.823.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	76.525.000	76.525.000	76.525.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.155.571.700	1.155.571.700	1.155.571.700
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	756.572.700	756.572.700	756.572.700
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	184.564.500	184.564.500	184.564.500
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	52.262.250	52.262.250	52.262.250
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.385.000	143.385.000	143.385.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	376.360.950	376.360.950	376.360.950
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	290.987.000	290.987.000	290.987.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	242.572.000	242.572.000	242.572.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.415.000	48.415.000	48.415.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	108.012.000	108.012.000	108.012.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.663.000	42.663.000	42.663.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.169.000	14.169.000	14.169.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.587.000	42.587.000	42.587.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.593.000	8.593.000	8.593.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	377.561.770	377.561.770	328.509.770
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	377.561.770	377.561.770	328.509.770
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.900.000	103.900.000	103.900.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	103.900.000	103.900.000	103.900.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	88.649.000	88.649.000	88.649.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	43.619.000	43.619.000	43.619.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	45.030.000	45.030.000	45.030.000
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	185.012.770	185.012.770	135.960.770
5.01.2.20.5.05.01.0000	5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	185.012.770	185.012.770	135.960.770
5.02.9.02.0.00.04.0000						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.578.849.098.673	1.578.849.098.673	1.512.242.097.093
5.02.9.02.0.00.04.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.578.849.098.673	1.578.849.098.673	1.512.242.097.093
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	1.578.849.098.673	1.578.849.098.673	1.512.242.097.093
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	155.674.082.698	155.524.082.698	154.420.179.648
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.743.000	109.743.000	102.843.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.876.000	41.876.000	40.076.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.758.000	20.758.000	18.358.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.747.000	21.747.000	19.947.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.362.000	25.362.000	24.462.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.437.520.770	137.437.520.770	136.678.880.770
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	137.039.330.770	137.039.330.770	136.280.690.770
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.820.000	320.820.000	320.820.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.490.000	53.490.000	53.490.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.477.000	14.477.000	14.477.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.780.000	6.780.000	6.780.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.623.000	2.623.000	2.623.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.239.242.500	3.089.242.500	3.089.242.500
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.124.242.500	2.974.242.500	2.974.242.500
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.000.000	115.000.000	115.000.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.292.094.700	1.292.094.700	1.284.594.700
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.814.450	99.814.450	99.814.450
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.605.000	46.605.000	46.605.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	247.868.000	247.868.000	247.868.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.365.000	32.365.000	32.365.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	393.154.250	393.154.250	389.254.250
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.068.000	47.068.000	47.068.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000	39.960.000	39.960.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.330.000	364.330.000	360.730.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.930.000	20.930.000	20.930.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.366.154.000	1.366.154.000	1.366.154.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	86.100.000	86.100.000	86.100.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	790.952.000	790.952.000	790.952.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.787.000	62.787.000	62.787.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.315.000	426.315.000	426.315.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.898.699.800	8.898.699.800	8.603.480.750
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	536.410.300	536.410.300	536.410.300
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.443.835.100	3.443.835.100	3.148.616.050
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.100.000	762.100.000	762.100.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.156.354.400	4.156.354.400	4.156.354.400
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.330.627.928	3.330.627.928	3.294.983.928
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.908.300	28.908.300	28.908.300
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	706.262.600	706.262.600	686.366.600
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	14.320.000	14.320.000	14.320.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	952.720.000	952.720.000	952.720.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	981.953.028	981.953.028	981.953.028
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.464.000	646.464.000	630.716.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.410.991.508.975	1.410.991.508.975	1.345.334.212.445
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.740.370.750	3.740.370.750	3.686.576.750

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	332.045.000	332.045.000	332.045.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	341.185.000	341.185.000	341.185.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	65.983.000	65.983.000	65.983.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	669.837.000	669.837.000	669.837.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	906.939.000	906.939.000	874.905.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.287.558.750	1.287.558.750	1.282.338.750
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	136.823.000	136.823.000	120.283.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	386.442.000	386.442.000	366.792.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	126.916.000	126.916.000	116.341.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	126.893.000	126.893.000	117.818.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	125.761.000	125.761.000	125.761.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	6.872.000	6.872.000	6.872.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	306.510.000	306.510.000	306.510.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	112.750.000	112.750.000	112.750.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	193.760.000	193.760.000	193.760.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	874.792.932	874.792.932	864.892.932
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	114.620.000	114.620.000	114.620.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14.752.000	14.752.000	14.752.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	537.865.250	537.865.250	527.965.250
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.411.000	6.411.000	6.411.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	134.702.682	134.702.682	134.702.682
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	66.442.000	66.442.000	66.442.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.405.683.393.293	1.405.683.393.293	1.340.109.440.763
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	598.105.644.402	598.105.644.402	551.386.348.058
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	101.520.155.766	101.520.155.766	90.251.899.580
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	706.057.593.125	706.057.593.125	698.471.193.125
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.665.439.000	1.770.739.000	1.762.672.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.665.439.000	1.770.739.000	1.762.672.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	335.114.000	335.114.000	335.114.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	827.500.000	827.500.000	827.500.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	379.195.000	484.495.000	476.428.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	123.630.000	123.630.000	123.630.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.518.068.000	10.562.768.000	10.725.033.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.518.068.000	10.562.768.000	10.725.033.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.158.691.000	1.158.691.000	1.151.016.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	92.110.000	92.110.000	123.190.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	899.619.000	944.319.000	944.319.000
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.166.056.250	2.166.056.250	2.078.536.250
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.916.691.750	5.916.691.750	6.143.071.750
5.02.9.02.0.00.04.0000	5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	284.900.000	284.900.000	284.900.000
5.03.4.01.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	31.709.737.479	31.709.737.479	31.053.890.479
5.03.4.01.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	573.840.000	573.840.000	330.076.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	573.840.000	573.840.000	330.076.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	573.840.000	573.840.000	330.076.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	573.840.000	573.840.000	158.976.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.02	07	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	573.840.000	573.840.000	158.976.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	171.100.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	171.100.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	31.135.897.479	31.135.897.479	30.723.814.479

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03			KEPEGAWAIAN	31.135.897.479	31.135.897.479	30.723.814.479
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.752.923.229	19.752.923.229	19.711.489.229
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.774.000	102.774.000	102.774.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.906.000	73.906.000	73.906.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.868.000	28.868.000	28.868.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.663.464.651	14.663.464.651	14.663.464.651
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.585.809.651	14.585.809.651	14.585.809.651
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.711.000	57.711.000	57.711.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000	3.180.000	3.180.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.764.000	16.764.000	16.764.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.744.940.500	1.744.940.500	1.703.506.500
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.429.000	32.429.000	32.429.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.602.000	841.602.000	841.602.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.860.000	71.860.000	71.860.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.275.000	101.275.000	101.275.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	07 Penyediaan Bahan/Material	91.776.000	91.776.000	91.776.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	603.178.500	603.178.500	561.744.500
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.860.150	397.860.150	397.860.150
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.352.750	41.352.750	41.352.750
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.507.400	356.507.400	356.507.400

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.843.883.928	2.843.883.928	2.843.883.928
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.908.000	159.908.000	159.908.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.924.500	8.924.500	8.924.500
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	0	0	0
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.769.900	330.769.900	330.769.900
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.545.432.500	1.545.432.500	1.545.432.500
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	798.849.028	798.849.028	798.849.028
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	11.382.974.250	11.382.974.250	11.012.325.250
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.753.427.000	2.753.427.000	2.730.597.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	68.146.000	68.146.000	68.146.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.435.130.000	1.435.130.000	1.435.130.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	335.424.000	335.424.000	312.594.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	584.950.000	584.950.000	584.950.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.01	11 Pengelolaan Data Kepegawaian	329.777.000	329.777.000	329.777.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.229.125.000	1.229.125.000	1.228.225.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	01 Pengelolaan Mutasi ASN	200.279.000	200.279.000	200.279.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	212.810.000	212.810.000	211.910.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.02	03 Pengelolaan Promosi ASN	816.036.000	816.036.000	816.036.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	7.103.984.250	7.103.984.250	6.757.065.250
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	02 Pengelolaan Assessment Center	1.254.583.000	1.254.583.000	1.032.604.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	181.813.000	181.813.000	181.813.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.521.080.000	3.521.080.000	3.511.080.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.908.672.250	1.908.672.250	1.818.062.250
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	112.036.000	112.036.000	87.706.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	125.800.000	125.800.000	125.800.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	296.438.000	296.438.000	296.438.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	149.742.000	149.742.000	149.742.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	0	0
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	6.622.000	6.622.000	6.622.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	132.795.000	132.795.000	132.795.000
5.03.4.01.0.00.01.0000	5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.279.000	7.279.000	7.279.000
5.04.4.01.0.00.01.0000						BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	22.316.871.414	22.316.871.414	22.460.697.634
5.04.4.01.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.396.644.000	1.396.644.000	1.596.311.220
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	1.396.644.000	1.396.644.000	1.596.311.220
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.396.644.000	1.396.644.000	1.596.311.220
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	0	0	567.420.220
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	0	0	567.420.220
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	1.396.644.000	1.396.644.000	1.028.891.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	4	01	10	1.09	01	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur	1.396.644.000	1.396.644.000	1.028.891.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	20.920.227.414	20.920.227.414	20.864.386.414
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.920.227.414	20.920.227.414	20.864.386.414
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.916.496.414	12.916.496.414	12.860.655.414
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.285.000	108.285.000	102.360.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.630.000	84.630.000	78.705.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.655.000	23.655.000	23.655.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.225.236.814	9.225.236.814	9.225.236.814

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.204.125.314	9.204.125.314	9.204.125.314
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.407.000	6.407.000	6.407.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.936.000	9.936.000	9.936.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.768.500	4.768.500	4.768.500
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	813.737.350	813.737.350	763.821.350
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.440.400	38.440.400	38.440.400
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.322.000	242.322.000	192.406.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.906.000	13.906.000	13.906.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.020.000	31.020.000	31.020.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.048.950	488.048.950	488.048.950
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.581.087.250	1.581.087.250	1.581.087.250
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.100.000	7.100.000	7.100.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.207.250	490.207.250	490.207.250
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.780.000	1.083.780.000	1.083.780.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.150.000	1.188.150.000	1.188.150.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.990.000	149.990.000	149.990.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	867.160.000	867.160.000	867.160.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.000.000	171.000.000	171.000.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.003.731.000	8.003.731.000	8.003.731.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	357.576.000	357.576.000	357.576.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	145.100.000	145.100.000	145.100.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	212.476.000	212.476.000	212.476.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.646.155.000	7.646.155.000	7.646.155.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	539.955.000	539.955.000	539.955.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	51.912.000	51.912.000	51.912.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	88.274.000	88.274.000	88.274.000
5.04.4.01.0.00.01.0000	5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.966.014.000	6.966.014.000	6.966.014.000
5.06.9.02.2.22.01.0000						BADAN PENGHUBUNG DAERAH	8.835.355.247	8.835.355.247	8.835.355.247
5.06.9.02.2.22.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.246.300.000	2.246.300.000	2.246.300.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.246.300.000	2.246.300.000	2.246.300.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.246.300.000	2.246.300.000	2.246.300.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	440.000.000	440.000.000	440.000.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.06	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	440.000.000	440.000.000	440.000.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.806.300.000	1.806.300.000	1.806.300.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.09	13	Gelar Seni Budaya Daerah	1.806.300.000	1.806.300.000	1.806.300.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.06.9.02.2.22.01.0000	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.589.055.247	6.589.055.247	6.589.055.247
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06			PENGELOLAAN PERBATASAN	6.187.975.247	6.187.975.247	6.187.975.247
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.187.975.247	6.187.975.247	6.187.975.247
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.847.000	13.847.000	13.847.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.366.000	7.366.000	7.366.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	766.000	766.000	766.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	766.000	766.000	766.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.236.000	1.236.000	1.236.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	766.000	766.000	766.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.947.000	2.947.000	2.947.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.779.785.747	4.779.785.747	4.779.785.747
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.777.628.747	4.777.628.747	4.777.628.747
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	719.000	719.000	719.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	719.000	719.000	719.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	719.000	719.000	719.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.102.000	251.102.000	251.102.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.698.000	3.698.000	3.698.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.021.000	5.021.000	5.021.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.305.000	9.305.000	9.305.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.256.000	2.256.000	2.256.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.822.000	230.822.000	230.822.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.435.500	689.435.500	689.435.500
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.598.500	290.598.500	290.598.500
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.353.000	20.353.000	20.353.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.484.000	367.484.000	367.484.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.805.000	428.805.000	428.805.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.266.000	122.266.000	122.266.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298.419.000	298.419.000	298.419.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	06	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.120.000	8.120.000	8.120.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07			PENGLOLAAN PENGHUBUNG	401.080.000	401.080.000	401.080.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	401.080.000	401.080.000	401.080.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	401.080.000	401.080.000	401.080.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	139.786.000	139.786.000	139.786.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	57.160.000	57.160.000	57.160.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17.800.000	17.800.000	17.800.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	157.584.000	157.584.000	157.584.000
5.06.9.02.2.22.01.0000	5	07	02	1.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	28.750.000	28.750.000	28.750.000
6.01.0.00.0.00.01.0000					INSPEKTORAT	40.016.812.469	40.016.812.469	39.734.364.969

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	40.016.812.469	40.016.812.469	39.734.364.969
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01			INSPEKTORAT DAERAH	40.016.812.469	40.016.812.469	39.734.364.969
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.033.246.969	34.033.246.969	34.016.446.969
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.894.000	17.894.000	17.894.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.328.000	4.328.000	4.328.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.111.000	1.111.000	1.111.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.808.000	1.808.000	1.808.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.838.000	1.838.000	1.838.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.000	3.293.000	3.293.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.430.000	4.430.000	4.430.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.676.294.294	12.676.294.294	12.676.294.294
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.670.958.294	12.670.958.294	12.670.958.294
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.107.000	1.107.000	1.107.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.782.000	3.782.000	3.782.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	447.000	447.000	447.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03	Administrasi Umum	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.03	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	313.185.000	313.185.000	313.185.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	256.622.000	256.622.000	256.622.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.563.000	56.563.000	56.563.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.711.000	389.711.000	389.711.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.711.000	2.711.000	2.711.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.000	1.575.000	1.575.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.920.000	19.920.000	19.920.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	11.285.000	11.285.000	11.285.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.050.000	222.050.000	222.050.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.170.000	22.170.000	22.170.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85.000.000	85.000.000	85.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.478.930.000	19.478.930.000	19.478.930.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.266.000	10.266.000	10.266.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.468.664.000	19.468.664.000	19.468.664.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.085.175	799.085.175	799.085.175
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.710.000	4.710.000	4.710.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.532.000	53.532.000	53.532.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.843.175	740.843.175	740.843.175
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.147.500	358.147.500	341.347.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.351.500	302.351.500	285.551.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.796.000	55.796.000	55.796.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.710.766.500	5.710.766.500	5.450.729.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.874.361.500	4.695.596.500	4.457.161.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	636.223.000	636.223.000	427.623.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.576.697.500	2.576.697.500	2.576.697.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	853.771.000	675.006.000	645.171.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	427.404.000	427.404.000	427.404.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	359.193.000	359.193.000	359.193.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	5.827.000	5.827.000	5.827.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.246.000	15.246.000	15.246.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	836.405.000	1.015.170.000	993.567.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	34.954.000	34.954.000	34.954.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	801.451.000	980.216.000	958.613.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	272.799.000	272.799.000	267.189.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	62.654.000	62.654.000	57.044.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.180.000	6.180.000	6.180.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	56.474.000	56.474.000	50.864.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	210.145.000	210.145.000	210.145.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.657.000	6.657.000	6.657.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	11.210.000	11.210.000	11.210.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	192.278.000	192.278.000	192.278.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	0

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.9.02.2.22.01.0000					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.576.279.392	18.576.279.392	18.160.410.392
8.01.9.02.2.22.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.203.980.000	2.203.980.000	1.231.191.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.203.980.000	2.203.980.000	1.231.191.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	2	22	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.203.980.000	2.203.980.000	1.231.191.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.203.980.000	2.203.980.000	1.231.191.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	2	22	08	1.09	23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.203.980.000	2.203.980.000	1.231.191.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.372.299.392	16.372.299.392	16.929.219.392
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.372.299.392	16.372.299.392	16.929.219.392
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.713.327.392	7.713.327.392	7.713.327.392
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.200.000	147.200.000	147.200.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.772.000	34.772.000	34.772.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62.428.000	62.428.000	62.428.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.218.691.942	6.218.691.942	6.218.691.942
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.059.421.942	6.059.421.942	6.059.421.942
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.550.000	116.550.000	116.550.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.471.000	14.471.000	14.471.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.706.000	13.706.000	13.706.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.543.000	14.543.000	14.543.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.295.150	226.295.150	226.295.150
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.231.400	5.231.400	5.231.400
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.254.000	17.254.000	17.254.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.968.000	42.968.000	42.968.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.227.750	7.227.750	7.227.750
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.808.000	11.808.000	11.808.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.806.000	141.806.000	141.806.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.732.300	621.732.300	621.732.300
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.212.300	179.212.300	179.212.300
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.520.000	442.520.000	442.520.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.408.000	499.408.000	499.408.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.833.000	209.833.000	209.833.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.900.000	174.900.000	174.900.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.050.000	65.050.000	65.050.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.625.000	49.625.000	49.625.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.934.085.500	1.934.085.500	2.491.005.500
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.934.085.500	1.934.085.500	2.491.005.500
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.729.104.000	1.729.104.000	2.286.024.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	204.981.500	204.981.500	204.981.500
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.846.450.000	2.846.450.000	2.846.450.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.846.450.000	2.846.450.000	2.846.450.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.729.830.000	2.729.830.000	2.729.830.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	116.620.000	116.620.000	116.620.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	313.695.000	313.695.000	313.695.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	313.695.000	313.695.000	313.695.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	313.695.000	313.695.000	313.695.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	798.938.500	798.938.500	798.938.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	05	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	798.938.500	798.938.500	798.938.500
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	05	1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	225.040.000	226.048.000	226.048.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	05	1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	407.550.500	406.542.500	406.542.500
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	05	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	166.348.000	166.348.000	166.348.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.765.803.000	2.765.803.000	2.765.803.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.765.803.000	2.765.803.000	2.765.803.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	06	1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.308.039.000	2.308.039.000	2.308.039.000
8.01.9.02.2.22.01.0000	8	01	06	1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	457.764.000	457.764.000	457.764.000
9.02.4.01.1.03.01.0000					PANIRADYA KAISTIMEWAN	23.358.058.484	23.358.058.484	22.896.432.376

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.400.000	125.400.000	120.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.400.000	125.400.000	120.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03	13		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	125.400.000	125.400.000	120.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03	13	1.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	0	0
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03	13	1.01	05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	0	0	0
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03	13	1.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	125.400.000	125.400.000	120.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	1	03	13	1.02	01 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	125.400.000	125.400.000	120.000.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	23.232.658.484	23.232.658.484	22.776.432.376
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01			SEKRETARIAT DAERAH	23.232.658.484	23.232.658.484	22.776.432.376
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.761.628.976	6.761.628.976	6.761.628.976
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	17.200.000	17.200.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000	5.500.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	11.700.000	11.700.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.164.913.476	6.164.913.476	6.164.913.476
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.108.213.476	6.108.213.476	6.108.213.476
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.600.000	52.600.000	52.600.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.474.000	189.474.000	189.474.000

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.000	1.028.000	1.028.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.146.000	3.146.000	3.146.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.948.000	16.948.000	16.948.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.282.000	9.282.000	9.282.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.070.000	159.070.000	159.070.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.361.000	188.361.000	188.361.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.361.000	188.361.000	188.361.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.000	12.562.000	12.562.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.562.000	12.562.000	12.562.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.118.500	189.118.500	189.118.500
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.918.500	175.918.500	175.918.500
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.200.000	13.200.000	13.200.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	16.471.029.508	16.471.029.508	16.014.803.400
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	636.298.000	636.298.000	421.811.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.03	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	461.173.000	461.173.000	300.158.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.03	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	175.125.000	175.125.000	121.653.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	898.680.500	898.680.500	920.787.500
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.04	01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	619.259.500	619.259.500	746.008.500

PROVINSI DI YOGYAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.04	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	279.421.000	279.421.000	174.779.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	1.065.438.000	1.065.438.000	825.366.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.05	01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	760.817.000	760.817.000	634.135.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.05	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	304.621.000	304.621.000	191.231.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.958.679.000	3.958.679.000	3.850.079.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	2.125.683.000	2.125.683.000	2.017.083.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.832.996.000	1.832.996.000	1.832.996.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	2.245.501.500	2.245.501.500	2.241.972.400
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	2.245.501.500	2.245.501.500	2.241.972.400
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.08		Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.065.716.000	1.065.716.000	900.213.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.08	01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.065.716.000	1.065.716.000	900.213.000
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	6.600.716.508	6.600.716.508	6.854.574.500
9.02.4.01.1.03.01.0000	4	01	10	1.09	02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	6.600.716.508	6.600.716.508	6.854.574.500

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IX

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Lampiran IX : Peraturan Daerah DI Yogyakarta

Nomor : 7 Tahun 2021

Tanggal : 12 Oktober 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	CPNS	
Golongan IV/e	1	-	-	-	2	-	-	3
Golongan IV/d	-	7	-	-	8	2	-	17
Golongan IV/c	-	21	-	-	52	-	-	73
Golongan IV/b	-	6	126	-	209	2	-	343
Golongan IV/a	-	-	65	136	2.198	32	-	2.431
JUMLAH GOLONGAN IV	1	34	191	136	2.469	36	-	2.867
Golongan III/d	-	-	31	389	1.068	350	-	1.838
Golongan III/c	-	-	-	77	1.292	346	-	1.715
Golongan III/b	-	-	-	45	878	814	-	1.737
Golongan III/a	-	-	-	1	150	830	363	1.344
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	31	512	3.388	2.340	363	6.634
Golongan II/d	-	-	-	-	26	412	-	438
Golongan II/c	-	-	-	-	18	148	370	536
Golongan II/b	-	-	-	-	-	188	-	188
Golongan II/a	-	-	-	-	-	50	-	50
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	44	798	370	1.212
Golongan I/d	-	-	-	-	-	59	-	59
Golongan I/c	-	-	-	-	-	34	-	34
Golongan I/b	-	-	-	-	-	4	-	4
Golongan I/a	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	98	-	98
TOTAL	1	34	222	648	5.901	3.272	733	10.811

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN X

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH**

1) Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	53.385.879.506,78	100,96
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.799.932.971.064,54	1.876.706.829.354,71	76.773.858.290,17	104,27
4.1.1.	Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	49.679.331.870,00	103,11
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	3.546.405.387,71	110,75
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	8,97	100,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.593.050.174,05	92.141.171.197,54	23.548.121.023,49	134,33
4.2.	Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	(24.203.978.296,00)	98,99
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	119.851.434.669,00	114.277.342.675,00	(5.574.091.994,00)	95,35
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.234.516.326.000,00	1.227.647.676.000,00	(6.868.650.000,00)	99,44
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	(11.761.236.302,00)	98,87
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.363.759.740.924,00	815.999.512,61	100,06
4.3.1.	Pendapatan Hibah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	815.999.513,00	110,83
4.3.2.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00	(0,39)	100,00
4.3.3.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah L	780.019.190,00	780.019.190,00	0,00	100,00
	JUMLAH	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	53.385.879.506,78	100,96
5.	BELANJA	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	(432.424.264.732,68)	92,63
5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.884.017.560.770,72	3.626.221.964.680,02	(257.795.596.090,70)	93,36
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	(52.790.624.193,61)	96,55
5.1.2.	Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	(20.511,00)	100,00
5.1.3.	Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	(74.671.542.400,00)	90,06
5.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	(1.000.000.000,00)	59,87
5.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	0,00	100,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan I	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	(12.486.111.493,37)	96,91
5.1.7.	Belanja Tidak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	(116.847.297.492,72)	72,34
5.2.	Belanja Langsung	1.981.587.403.317,63	1.806.958.734.675,65	(174.628.668.641,98)	91,19
5.2.1.	Belanja Pegawai	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	(15.006.949.819,15)	84,77
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	(122.207.322.214,70)	86,50
5.2.3.	Belanja Modal	978.048.321.539,77	940.633.924.931,64	(37.414.396.608,13)	96,17
	JUMLAH	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	(432.424.264.732,68)	92,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(307.479.919.295,42)	178.330.224.944,04	485.810.144.239,46	(58,00)
6.	PEMBIAYAAN	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,56
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,68
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	0,00	100,00
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00	(1.356.931.100,00)	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,68
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	0,00	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	484.453.213.139,46	484.453.213.139,46	0,00

2) Neraca

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

U r a i a n	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	484.453.213.139,46	433.555.460.454,42
Kas di Kas Daerah	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36
Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00	54.694.388,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00	7.145.501.321,00
Kas di BLUD	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06
Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	
Kas Lainnya	88.015,00	12.987.501.459,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.339.277.997,85	8.814.302.709,12
Piutang Lainnya	1.635.674.799,30	1.285.830.187,20
Penyisihan Piutang	(1.343.159.110,48)	(1.378.698.788,81)
Beban Dibayar Dimuka	815.983.222,54	680.855.777,20
Persediaan	181.099.569.022,41	122.078.638.114,94
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	672.000.559.071,08	565.036.388.454,07
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Investasi Nonpermanen Lainnya-Dana Berg	18.885.178.364,00	18.030.207.564,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.196.182.503,90)	(3.629.958.920,82)
Jumlah Investasi Non Permanen	14.688.995.860,10	14.400.248.643,18
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal	1.640.658.177.122,57	1.339.175.471.692,26
Jumlah Investasi Permanen	1.640.658.177.122,57	1.339.175.471.692,26
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.655.347.172.982,67	1.353.575.720.335,44
ASET TETAP		
Tanah	4.238.954.451.307,00	3.563.143.798.663,00
Peralatan dan Mesin	1.512.711.423.026,27	1.257.965.724.234,31
Gedung dan Bangunan	2.854.877.023.082,53	2.853.277.179.121,12
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.159.549.339.267,57	3.056.004.711.149,57
Aset Tetap Lainnya	241.819.072.793,33	296.525.642.342,22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.397.801.549,65	89.827.616.353,40
Akumulasi Penyusutan	(3.601.196.628.480,27)	(3.244.299.445.623,34)
Jumlah Aset Tetap	8.479.112.482.546,08	7.872.445.226.240,28
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Sewa Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	257.752.887.426,96	325.881.130.128,87
Aset Tidak Berwujud	82.178.412.601,00	74.340.011.191,00
Aset Lain-lain	170.052.579.232,24	177.654.783.122,10
Aset Non Lancar Lainnya	19.091.982.540,94	15.648.328.066,94
Jumlah Aset Lainnya	529.075.861.801,14	593.524.252.508,91
JUMLAH ASET	11.335.536.076.401,00	10.384.581.587.538,70
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.091.982.540,94	15.648.328.066,94
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.623.129.778,68	4.493.192.975,67
Utang Belanja	2.413.635.867,00	3.117.387.223,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.721.050.942,00	17.960.356.402,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	44.849.799.128,62	41.219.264.667,61

2) Neraca

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

U r a i a n	2020	2019
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	44.849.799.128,62	41.219.264.667,61
EKUITAS		
Ekuitas	11.290.686.277.272,40	10.343.362.322.871,10
JUMLAH EKUITAS	11.290.686.277.272,40	10.343.362.322.871,10
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.335.536.076.401,00	10.384.581.587.538,70

3) Laporan Arus Kas

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.773.940.604.572,00
Penerimaan Retribusi Daerah	36.546.077.142,71	42.420.048.683,08
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	85.960.824.196,14
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.959.267.630,54	177.120.836.332,28
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	114.252.471.928,00	56.035.674.200,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.870.747,00	24.907.600,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.227.647.676.000,00	1.351.102.020.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.029.119.335.346,00	978.540.310.453,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.286.576.228.221,00	1.162.772.688.443,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	58.831.799.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	780.019.190,00	706.035.310,00
Penerimaan Hibah	8.349.499.513,00	8.548.463.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	1.562.236.884.707,39	1.553.763.754.881,00
Pembayaran Barang	707.629.279.470,01	1.072.449.264.575,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	78.044.846.317,00	76.067.609.352,00
Pembayaran Hibah	744.149.764.252,00	735.398.604.386,46
Pembayaran Bantuan Sosial	9.009.947.911,00	51.143.429.903,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	391.944.778.392,63	285.437.323.921,00
Pembayaran Tidak Terduga	305.639.352.770,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	693.891.920.604,00	735.341.757.826,71
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	4.492.546.774.424,03	4.509.601.744.845,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.117.782.246.308,68	1.186.402.466.944,33
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	525.929.467,00	809.386.651,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	61.302.989,00	2.115.355.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	585.730.111,00	250.179.000,00
Penjualan Aset Lainnya	8.941.000,00	178.100.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.145.029.200,00	2.663.910.016,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00	6.016.930.667,00
Arus Keluar Kas:		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan atas Tanah	696.800.024.901,00	469.142.424.222,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	137.484.204.942,00	159.857.330.876,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	52.613.388.365,00	138.986.381.949,17
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.021.109.346,64	242.118.840.886,68
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	15.382.208.041,00	23.907.706.051,00
Perolehan atas Aset Lainnya	332.989.336,00	1.190.501.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.590.000.000,00	198.597.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.058.223.924.931,64	1.243.800.185.484,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.053.896.992.164,64)	(1.237.783.254.817,85)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas:		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00

3) Laporan Arus Kas

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	2020	2019
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukar	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
Pengembalian UP/TUP/GU	74.140.737.793,37	42.781.245.870,37
Pengesahan SPJ UP/TU/GU	1.460.627.772.698,63	5.707.365.457.874,31
Sisa uang persediaan	0,00	6.516.806.832,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68
Arus Keluar Kas:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
Penerbitan SP2D UP/TU/GU	1.534.768.510.492,00	5.756.663.510.576,68
Jumlah Arus Keluar Kas	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	63.885.254.144,04	(51.380.787.873,52)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	420.567.958.995,42	471.794.246.868,94
Saldo akhir kas di BUD	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36
Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	6.518.460,00	7.145.501.321,00
Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	52.675.210,00	54.694.388,00
Saldo akhir kas di BLUD	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya di Rekening Sumbangan	88.015,00	0,00
Saldo Akhir Kas - SILPA	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
Kas Lainnya	0,00	12.987.501.459,00
Saldo Akhir Kas - Neraca	484.453.213.139,46	433.555.460.454,42

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat

4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.



Gambar 0-1. Peta Administrasi DIY

Sumber: Bappeda DIY

DIY posisinya terletak diantara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial
 - n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - w. Komunikasi dan Informatika
 - x. Perpustakaan
2. Urusan pilihan meliputi:
- a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
3. Urusan Keistimewaan meliputi:
- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2019 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2019 sebanyak 116 akuntansi terdiri dari 33 Pengguna Anggaran dan 83 Kuasa Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 0-1. Entitas Akuntansi di DIY

1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
2.	Dinas Kesehatan dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
13.	Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
17.	Dinas Kebudayaan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
20.	Dinas Pariwisata
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
23.	Gubernur dan Wakil Gubernur
24.	Sekretariat Daerah dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
25.	Badan Penghubung Daerah
26.	DPRD

27.	Sekretariat DPRD
28.	Inspektorat
29.	Paniradya Kaistimewan
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
32.	PPKD
33.	Badan Kepegawaian Daerah
34.	Badan Pendidikan dan Pelatihan

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolidasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
- 2.3. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
- 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Surplus Defisit
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional

- 5.4.1. Pendapatan-LO
- 5.4.2. Beban
- 5.4.3. Surplus Defisit Kegiatan Operasional
- 5.4.4. Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional
- 5.4.5. Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.6. Surplus Defisit LO
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
- Bab 6. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab 7. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET EKONOMI APBD

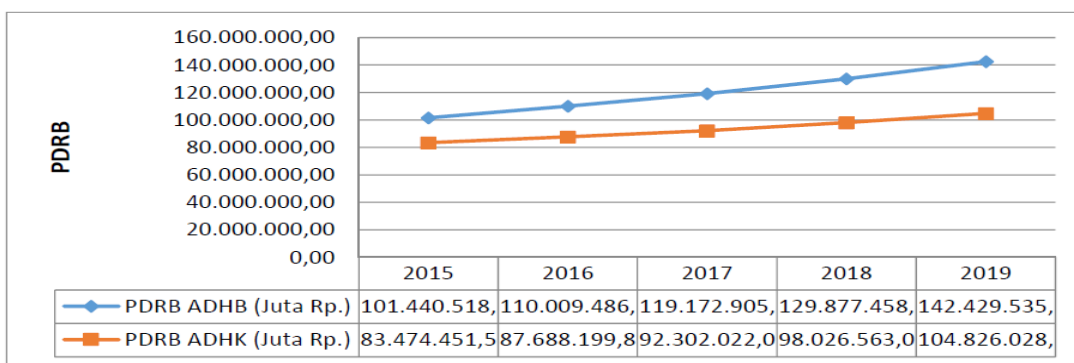
2.1 Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. World Health Organization (WHO) bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

A. PDRB dan Struktur Ekonomi

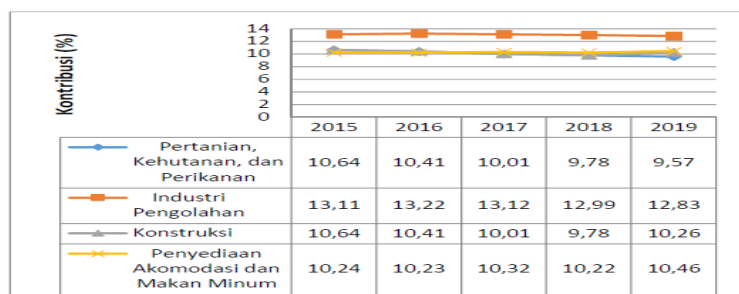
Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,48 triliun rupiah meningkat menjadi 142,43 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan PDRB ADHK meningkat sebesar 21,35 triliun rupiah selama tahun 2015 – 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan
 Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.1. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

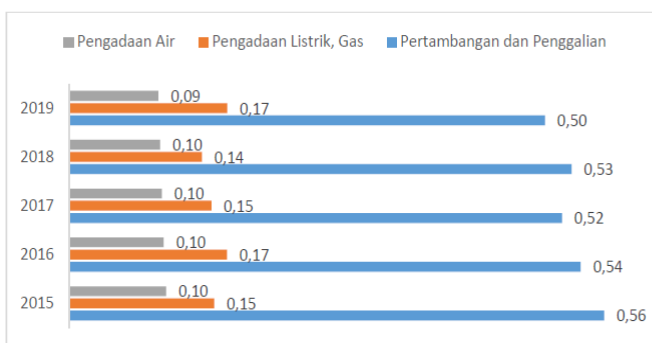
Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 12,83%. Sementara itu, sector penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,46%, sector konstruksi 10,26% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,57%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
 Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.2. Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.

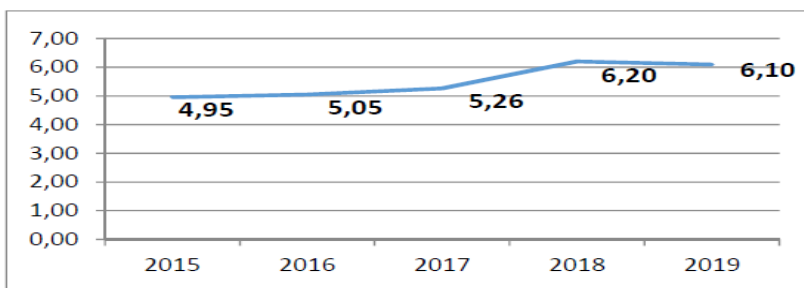


Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.3. Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

B. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan turun menjadi sekitar 5,99% seiring selesainya beberapa proyeksi infrastruktur besar dan pertumbuhan sektor-sektor lain yang tidak terlalu berubah dengan pola pertumbuhan di tahun 2019. Pertumbuhan 5,99% menyebabkan output daerah meningkat menjadi Rp110,234,865 juta.

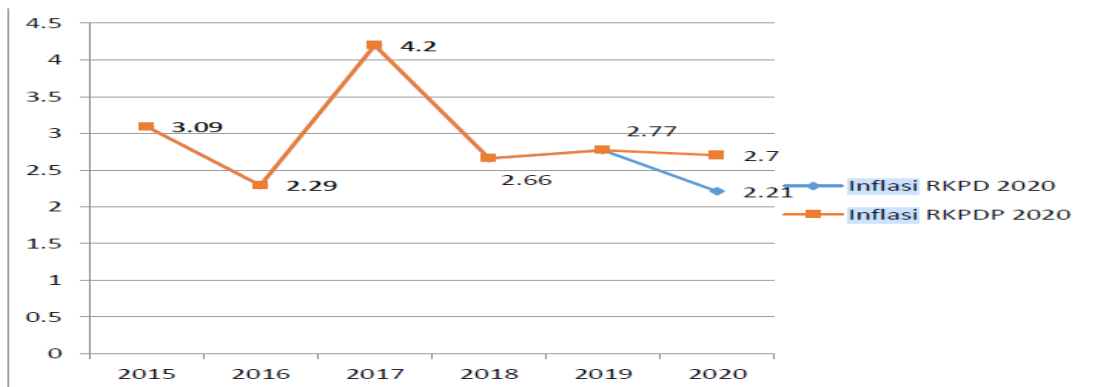
Kinerja pembangunan daerah pada semester 1, 2020 secara umum terdampak pandemi COVID-19 yang mulai ditemukan kasusnya pada awal Maret 2020. Hal tersebut secara makro dapat digambarkan dengan capaian Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi 6,74 (minus 6,74, TW II) lebih rendah dari rerata Pulau Jawa atau mengalami kontraksi sebesar 6,69 (BPS DIY, 2020). Indeks Gini DIY tertinggi se Indonesia sebesar 0,434 (naik sebesar 0,006 dibanding September 2019, TW I), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,38 (meningkat 0,52 dibanding TPT Februari 2019; BPS DIY Februari 2020) dan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 12,28 (naik 0,84 dibanding September 2019; TW I).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada Triwulan III 2020 ekonomi DIY menunjukkan pemulihan. Realisasi pertumbuhan PDRB DIY naik 9,24% (qtq), setelah dua triwulan berturut turut mengalami kontraksi. Namun demikian bila dilihat secara tahunan, ekonomi DIY triwulan III masih mencatatkan kontraksi 2,84% (yoy). Kinerja perekonomian DIY ini, lebih baik jika dibandingkan Nasional dan Jawa, masing-masing kontraksi 3,49 (yoy) dan 4,00% (yoy).

C. Inflasi

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2012-2016, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.29%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,57% dan diproyeksikan turun menjadi 2,21% di tahun 2020. Penurunan tersebut didukung oleh efektifnya pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi Covid-19.

Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat maupun menurunnya kemampuan fiskal pemerintah yang akan berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2%.



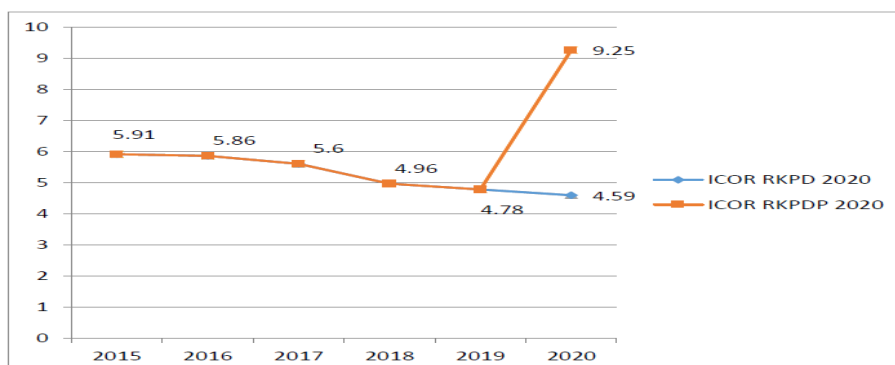
Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.5. Laju Inflasi DIY (%), 2015-2019

D. ICOR

Pada periode 2015-2019, nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan meningkat efisiensinya. Nilai ICOR turun dari 5.92 di tahun 2015 menjadi 4,78 di akhir periode. Pada awal tahun 2020, ICOR diproyeksikan menurun menjadi 4,59 yang didorong oleh kelancaran transportasi karena pengembangan infrastruktur jalan.

Peningkatan inefisiensi proses produksi di DIY terdampak COVID-19 dipengaruhi antara lain oleh menurunnya kinerja sektor transportasi dengan masalah suplai bahan baku. Proyeksi ICOR tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi sekitar 9,25.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.6. Perkembangan ICOR 2015-2019 dan Proyeksi ICOR Tahun 2020 dalam Persen

E. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Indikator Ketenagakerjaan DIY

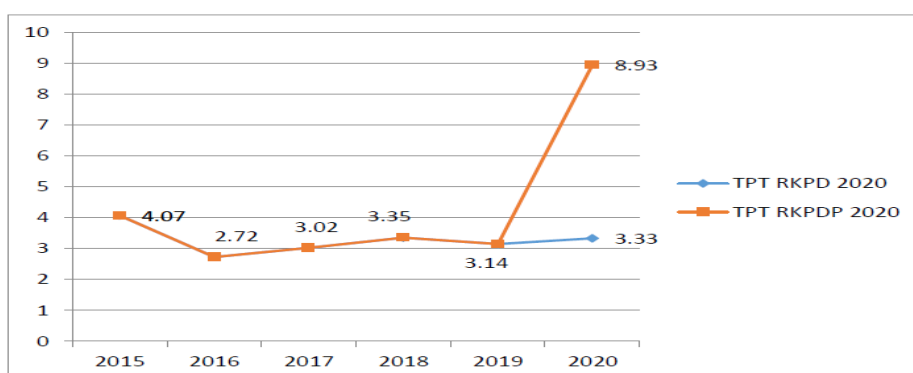
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.117.190	2.191.740	2.252.361
Pengangguran Terbuka	48.664	57.036	64.020	73.350	75.229
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,43	2,71	3,02	3,35	3,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.252.361 orang dan meningkat sebanyak 60.620 orang dari 2.191.740 orang dari tahu sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 75.229 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,56% dari tahun 2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY kurang berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi DIY cenderung meningkat namun pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan.

Pada awal Tahun 2020 tingkat Pengangguran terbuka diperkirakan meningkat menjadi 3,33% mengingat pertumbuhan ekonomi DIY menurun dibandingkan tahun 2019 antara lain didorong oleh menurunnya pertumbuhan sektor konstruksi. Setelah terjadinya Pandemi COVID-19 maka diperkirakan tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2020 diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak pandemi COVID-19. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar separuh dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Tingkat pengangguran terbuka akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 8,93%.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.7. Perkembangan TPT 2015-2019 dan Proyeksi TPT Tahun 2020 dalam Persen

F. Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 120,98 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 2.2. Indikator Ketenagakerjaan DIY

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	429.25
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.26

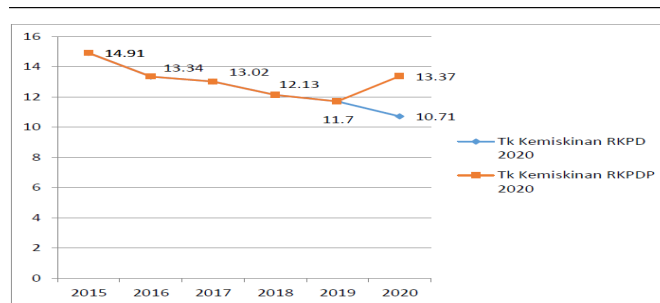
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

Pada awal tahun 2020, proyeksi tingkat kemiskinan akan menurun sekitar 0,45 poin. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6% selama dua tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kemiskinan juga didukung oleh konsistennya intervensi pemerintah baik dari pemerintah pusat, Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan program dan kegiatan yang menasar kelompok warga miskin. Keefektifan intervensi tersebut juga didukung oleh semangat untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran baik dalam bentuk inclusion maupun exclusion error. Kondisi-kondisi tersebut mendorong penurunan kemiskinan menjadi sekitar 10,71% di tahun 2020.

Setelah terjadinya Pandemi Covid-19 maka proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 diperkirakan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh potensi penurunan pendapatan per kapita masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 13,37%.

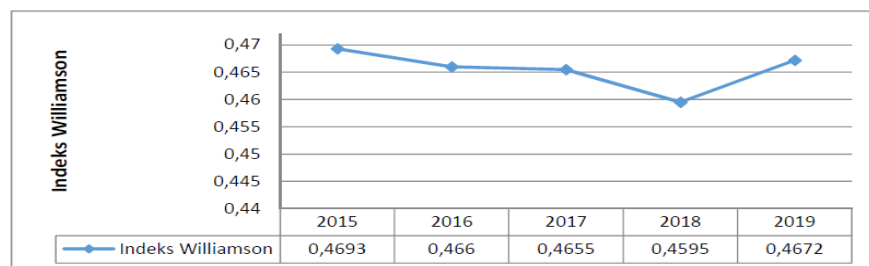


Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.8. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2015-2019 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dalam Persen

G. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan angka IW-nya masih di bawah 0,6. Pada tahun 2015, nilai IW adalah 0,4693 yang menurun sampai tahun 2018 menjadi 0,4595. Angka IW selanjutnya meningkat di tahun 2019.



Sumber: Bappeda DIY, 2018

Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

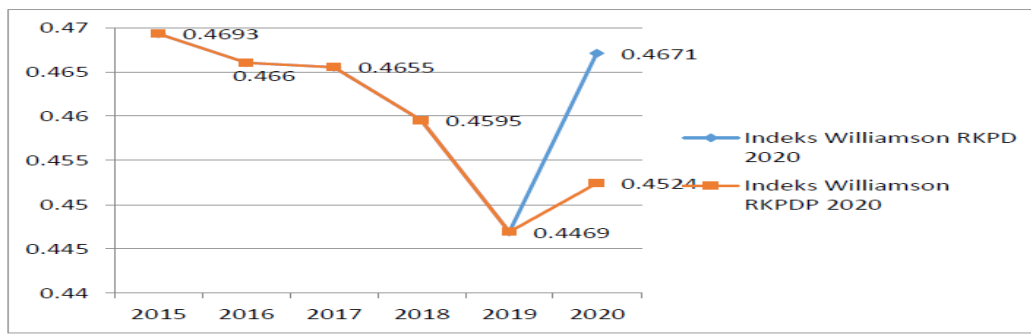
Gambar 2.9. Indeks Williamsson DIY, Tahun 2015-2019

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan

naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671, meningkat dari 0,4469 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ketimpangan wilayah didorong oleh masih dominannya dinamika perekonomian di daerah yang relatif lebih maju meskipun juga terdapat peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang relatif belum maju. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kulon Progo yang mengalami pertumbuhan tinggi akibat pembangunan fisik terutama Bandara YIA.

Secara tren, Indeks Williamson akan cenderung menurun berkaitan dengan PDRB kabupaten/kota. Dalam masa pandemi COVID-19, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang paling terdampak karena basis sektornya adalah jasa pariwisata, sedangkan yang paling kuat adalah Kabupaten Sleman karena memiliki perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa banyak dan dapat mengungkit sektor-sektor lain ketika kegiatan perkuliahan dimulai. Daerah yang maju tersebut akan mengalami perlambatan aktivitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah se-DIY dan diperkirakan Indeks Williamson turun menjadi 0,4524.

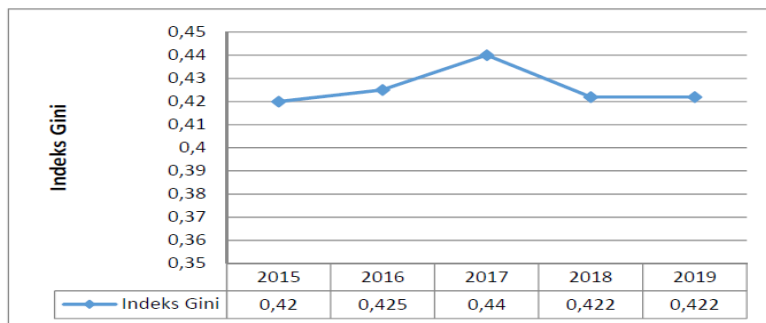


Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Williamson 2015-2019 dan Proyeksi Indeks Wiliamson Tahun 2020

H. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.



Sumber : Bappeda 2018

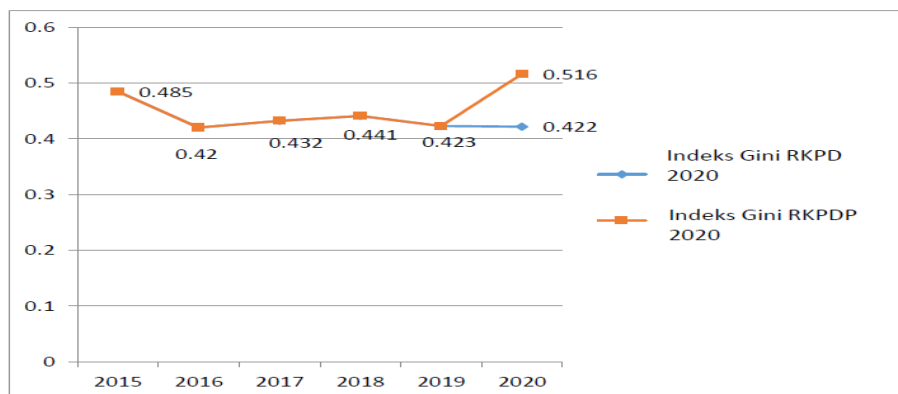
Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.11. Perkembangan Rasio Gini Tahun 2015-2019

Awal Tahun 2020 diproyeksikan ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY belum berubah signifikan selama dua tahun terakhir yaitu berkisar 0,422 yang turun sebesar 0,001 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh tetap lebih cepatnya peningkatan pendapatan kelompok

masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Selanjutnya dengan kondisi perekonomian terdampak pandemi COVID-19 maka ketimpangan pendapatan diperkirakan meningkat. Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 0,516. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah terutama yang selama ini bekerja sebagai buruh, karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi COVID-19 seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Gini Tahun 2015-2019 dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2020

I. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makroekonomi DIY yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam RKPDP DIY Tahun 2020 dengan memperhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 menggunakan asumsi:

Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2020;

Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;

Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli dan praktek social/physical distancing, sedangkan penurunan ekspor terjadi karena melemahnya daya beli internasional. Di samping itu, pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktifitas sektor pendidikan dan pariwisata.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2020 pasca pandemi Covid-19 yang dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi yang tertuang dalam RKPDP DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPDF 2020

Indikator	Proyeksi	
	RKPD 2020	RKPD-P 2020
LPE	5,99 %	0,50 %
PDRB ADHK	Rp110.234.865 juta	Rp104.524.992 juta
Inflasi	2,21 %	2,70 %
ICOR	4,59	9,25
TPT	3,33 %	8,93 %
Tk. Kemiskinan	10,71 %	13,37 %
Indeks Gini	0,422	0,516
Indeks Williamson	0,4671	0,4524

Sumber: Bappeda DIY 2019 dan 2020

2.2 Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1 Visi dan Misi Jangka Panjang

Visi Jangka Panjang

Cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yang memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY sebagai pusat budaya terkemuka, dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cita-cita menjadi daerah tujuan wisata terkemuka dapat dimaknai sebagai daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjurur baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (people-centered development) melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Filosofi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dasar Filosofi

"Renaissance Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Di bawah payung paradigma "Renaissance Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Konsep "Renaissance Yogyakarta" atau "Jogja Renaissance" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaissance Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaissance Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) Bawana Yogyakarta tidak Hayu lagi baik dalam dimensi Bawana Alit-Bawana Ageng maupun Bawana Lahir-Bawana Batin; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai sangkan paraning dumadi-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudera Hindia tentunya berada di wilayah selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di wilayah selatan DIY ini melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian selatan khususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam "Lima Kemuliaan" atau "Panca Mulia" yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan. Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Pembangunan fasilitas-Fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect and forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi. Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.

Implementasi dalam RPJMD DIY			
	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)

Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"
------	---	--	---

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas tema visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui peningkatan, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

1. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah DIY.
2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
3. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidakmenzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa

permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).

3. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
6. Provinsi dengan nasional; dan
7. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

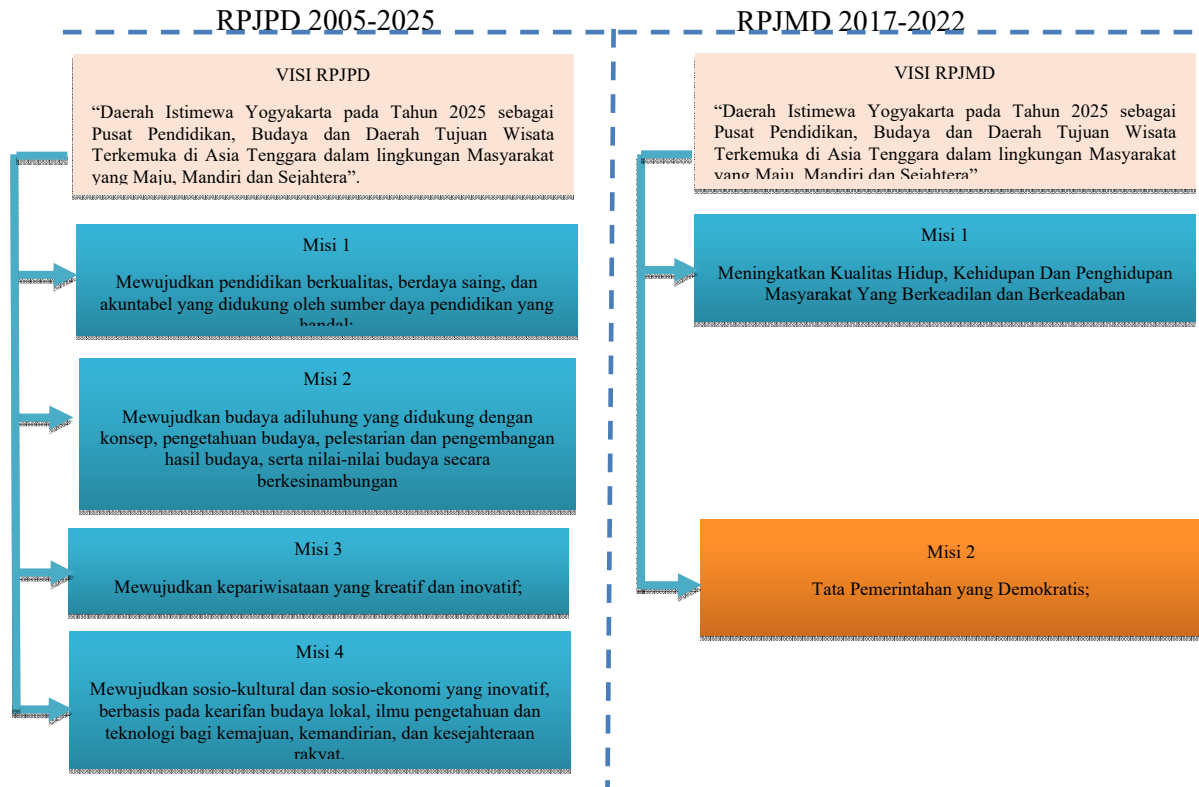
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya misi kedua menjadi sebuah "initial condition" untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".



Gambar 2.13. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 2.9. Tujuan yang hendak dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 2.5. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Gini Persentase Angka Kemiskinan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	mengembangkan budaya Yogyakarta	4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 1. Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

2.2.3 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2018-2022

Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar strategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut:

A. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

VISI Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja		
MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
	3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum
	4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
	5. Meningkatnya aktivitas	Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi

	perekonomian yang berkelanjutan	berkelanjutan dan ekonomi kreatif Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta
	6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik
	2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa
	3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017 terkait 9 kawasan prioritas antara lain:

1. Penataan Kawasan Kraton,
2. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi,
3. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh
4. Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis,
5. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY,
6. Penataan Kawasan Puro Pakualaman
7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta
8. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

Serta 6 Infrastruktur prioritas antara lain:

1. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur
2. Pembangunan Underpass Kentungan,
3. Pembangunan Underpass Gejayan
4. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo,
5. Sistim Kartamantul
6. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

B. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasikan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan dibawah ini:

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan di DIY. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.	Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin Peningkatan penduduk berakses air bersih layak Peningkatan penduduk berakses energi Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum	Perencanaan dan penganggaran responsif gender Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya

<p>5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</p>	<p>Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta</p>	<p>Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana secara komprehensif. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya Melakukan capacity building terkait pembiayaan non APBD dengan intensif</p>
<p>6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</p>	<p>Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</p>	<p>Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pengembangan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi</p>

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
<p>1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik</p>	<p>Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah Menyusun regulasi pengelolaan keuangan Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.</p>
<p>2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan</p>	<p>Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa</p>	<p>Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa Internalisasi budaya pemerintahan pada pemda dan kabupaten/kota</p>
<p>3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa</p>	<p>Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</p>	<p>Melakukan fasilitasi penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa</p>

C. Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Harapan Lama Sekolah	
	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	
	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	
	Total Fertility Rate	
	Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	
	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	
SASARAN Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	
	Pengeluaran per kapita masyarakat	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	
SASARAN Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	
PROGRAM	Indeks Kualitas Air	Sekretaris Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Udara	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
	Indeks Resiko Bencana	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah		
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat 3 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan keuangan daerah	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuanRp)	
	Nilai eksternal pelayanan publik	
	Nilai internal integritas organisasi	
	Nilai eksternal persepsi korupsi	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa		
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	

D. Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	

			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI				
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	
	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	N/A	200	
	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	N/A	2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	
	Total Fertility Rate	N/A	2,1	
	Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	24	36	
	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	N/A	12,59	
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini	0,4400	0,3917	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Persentase angka kemiskinan	12,36	11,23	
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	484.947	
	Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	10,98	11,46	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	11,22%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	12,99	
SASARAN Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi.	5,21	5,24	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	58,58	
	3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	76,5	
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	21,11	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78	
	Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	
	Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A	A	
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan keuangan daerah	Sedang	Sedang	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424.672.744	
	Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	
	Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	
	Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	N/A	N/A	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN Meningkatnya fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

Adapun Sasaran Pembangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (%)	81,08
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,12
2.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks GINI	0,3776
		Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,11%
3.	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	11,72%
4.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.	5,29
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	62,44
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5%
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69%
5.	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4524
6.	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	A
7.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	73,91%
8.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419

Dalam upaya penanganan Covid-19, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY adalah :

1. Tercegahnya penyebaran COVID-19 dengan cepat dan tepat;
2. Pasien COVID-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
3. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi COVID-19;
4. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan COVID-19.

2.3 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020

Penyusunan tema pembangunan RKPDIY 2020 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD

DIY Tahun 2017- 2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY 2020 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudra Hindia dalam visi misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2020 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen ini sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut.

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan menjadi pendorong pengurangan ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Selain itu, fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY mendorong fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya." Prioritas penyelesaian infrastruktur antara lain terkait Yogyakarta International Airport (YIA), JJLS, JATP dan infrastruktur pendukung terkait. Percepatan pembangunan infrastruktur dimaknai secara luas tidak hanya terkait dengan sarana prasarana tetapi juga aspek non sarana prasarana fisik. Diharapkan kata kunci tema ini dapat berkontribusi dalam rangka pencapaian target sasaran Meningkatkan Aktivitas

Perekonomian yang Berkelanjutan yang akan diukur dengan indikator :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
3. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kata kunci tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2020 prioritas Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yang berhubungan dengan prioritas RKP/ nasional dalam rangka Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup dan prioritas Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.

2. Peningkatan SDM

Pada tahun 2018, perekonomian tumbuh melampaui target namun belum optimal mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan angka kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi DIY belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Indeks gini masih mencapai 0,441 dan Angka Kemiskinan 11,81% sementara itu IPM DIY melampaui rata-rata nasional. Ketimpangan juga terjadi pada capaian IPM yang masih timpang antar Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut memerlukan terobosan baru agar pembangunan daerah tidak hanya tumbuh, tetap memperhatikan dimensi pemerataan dan meningkatkan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sesuai misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022.

Keyword tema tersebut Peningkatan SDM sekurangnya dapat mendukung pencapaian 3 Sasaran RPJMD DIY pada tahun 2020 :

- 1) Meningkatnya Derajat kualitas SDM dengan indikator sasaran:
 - a. IPM dan
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Gini

b. Angka Kemiskinan

- 3) Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan dengan indicator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.

Berdasarkan kata kunci tema dan penjelasan tersebut dirumuskan prioritas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan yang sinergis dengan prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

3. Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi di DIY yang dicapai 6,20 (2018, BPS) belum merata apabila melihat capaian Indeks Williamson 0,4599 yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,4559 (tercapai 99,12%). Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori low growth - pro poor (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori high growthless pro poor (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori low growth - less pro poor (kuadran I). Apabila didasarkan pada analisis Shift Share yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sectoral dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota dengan pertumbuhan pesat (kuadran III). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV) (Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan:

1. Perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
2. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan;
3. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Sesuai arahan Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendorong terjadinya pertumbuhan berkualitas yakni pertumbuhan yang inklusif dimana hasil pembangunan adalah pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (Bank Dunia). Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY “Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks williamson” diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan pada tahun 2020 yang dirumuskan terkait kata kunci ini ialah prioritas Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah yang berhubungan dengan prioritas RKP/ nasional Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.

Ketiga Kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2020 dan diselaraskan dengan tema RKP 2020 dan Prioritas Nasional. Ketiga kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain:

- 1) Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator sasaran
 - a. Opini BPK
 - b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah
- 2) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan dengan Indikator Persentase capaian program urusan keistimewaan
- 3) Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan, Kadipaten dan tanah desa dengan indikator Bidang tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Setelah terjadinya Pandemi COVID-19, Pemda DIY melakukan penyesuaian tema pembangunan Tahun 2020 dari “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas” menjadi “Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19”. Penyesuaian tema pembangunan tersebut juga berdampak pada penyesuaian prioritas pembangunan Tahun 2020.

2.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Berdasarkan tema RKPD DIY 2020 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

Tabel: Rumusan Prioritas Daerah

No.	Kata Kunci Tema RKPD DIY 2020	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1.	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat
			1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan
2.	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (**Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan
4.	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan mempedomani prioritas nasional sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

(Rancangan RKP Tahun 2020), beserta indikator dapat disampaikan penyesuaian dengan Tema dan Prioritas RKPD DIY beserta Sasaran-Indikator Sasaran dan Program Pemda DIY sebagai berikut :

Tabel : Tema dan Prioritas pembangunan DIY

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY			
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
				1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
				1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	
			1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
2. Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
3. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (**Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
					1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
				1.1.4.4. Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	

4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja				1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase Capaian program Urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang Tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

RKPD DIY Tahun 2020 juga memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2020 berkenaan dengan sasaran utama pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 antara lain,

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan;
3. Memperluas kesempatan kerja; dan
4. Meningkatkan pembangunan manusia

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 di daerah, maka penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai upaya sinkronisasi terhadap prioritas nasional tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah di DIY disesuaikan agar sasaran pemerintah daerah guna penanganan Covid-19 dapat tercapai.

Prioritas Pembangunan DIY pada Tahun 2020 menjadi :

1. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net antara lain melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19;
3. Penangan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan APBD Perubahan Tahun 2020 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
3. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
4. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;

5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,
6. dan lain sebagainya.

2.3.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

1. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
 - 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)
 - 2) Sebagai alat pengatur (Regulatory)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak

Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
 - 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
 - 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan berkisar 33% dan Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus berkisar 36,68% pada tahun perencanaan 2020 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu

ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak.

Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku;
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berkaitan dengan terjadinya Pandemi COVID-19 terdapat perubahan kebijakan pendapatan karena terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Perubahan kebijakan pendapatan tersebut berdampak pada penyesuaian target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020.

2.3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta); dan 4) Pembiayaan Pembangunan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan focus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak menganggarkan belanja bunga.
3. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. DIY menganggarkan belanja subsidi untuk membantu biaya operasi Trans Joga yang merupakan transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat.
4. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
6. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupten/ Kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DIY menganggarkan belanja bagi hasil yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah DIY yang besarnya proporsional dengan penerimaan pendapatan sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan fiskal bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
8. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar output dan outcome kegiatan tercapai. Penyusunan output dan outcome pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

1) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur public dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran yang diarahkan pada penanganan Covid-19 sesuai dengan prioritas penanganan yakni: Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Penguatan Ekonomi. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui:

1. Rasionalisasi belanja pegawai
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa
3. Rasionalisasi belanja modal

Hasil rasionalisasi belanja-belanja tersebut dialihkan pada Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2020. Prioritas penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA untuk tahun 2020 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Total penyertaan modal pada tahun 2020, sebesar Rp238.540.000.000. Penyertaan modal pada BUMD di tahun 2020 bukan hanya untuk menambah penyertaan modal pada BUMD yang sudah ada, yaitu PT Bank BPD DIY tapi juga untuk penyertaan modal pada BUMD baru yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PD Air Bersih) serta BUKP.

Penambahan setoran modal pada PT Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Pemda DIY berkewajiban melakukan penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,00 bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Pada tahun 2020, Pemda DIY akan menambahkan penyertaan modal pada BPD DIY sebesar Rp.222.040.000.000.

Berkaitan dengan PD Air Bersih, pada Tahun 2019 diharapkan telah berdiri. Sebelumnya, telah dilaksanakan kajian analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pada tahun anggaran 2018. Triwulan I tahun anggaran 2019, PD Air Bersih (PDAB) tersebut direncanakan untuk dimintakan penilaian Menteri Dalam Negeri. Setelah selesai penilaian oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Pendirian BUMD PD Air Bersih. Kemudian dilakukan penyusunan kajian investasi dan naskah akademik untuk Perda Penyertaan Modal BUMD PDAB. Pada tahun 2020 Pemda DIY mempunyai kewajiban melakukan penyertaan modal sebesar Rp12.500.000.000. Besaran penyertaan modal tersebut berdasarkan asumsi modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 maka 25% dari modal dasar tersebut harus disetorkan pada saat pendirian yakni sebesar Rp12.500.000.000,00 (pasal 33 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT).

Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BUKP) yang didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUKP yang berada dimasing-masing Kecamatan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu tolok ukur keberhasilan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah Kecamatan dalam meningkatkan usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Untuk itu dalam mewujudkan usaha Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menggunakan LKM BUKP terutama

untuk menabung dan meminjamkan untuk usaha-usaha yang produktif. Pada tahun 2020, Pemda DIY mengalokasikan penyertaan modal BUKP sebesar Rp4.000.000.0000.

Dalam APBD Perubahan Tahun 2020 Pengeluaran direncanakan turun menjadi Rp117,59 Miliar dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2020.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp5.611.510.924.299,71 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71, Anggaran Dana Perimbangan sebesar Rp2.371.044.354.021,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.363.759.740.924,00. Untuk Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp5.433.180.699.355,67 dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.626.221.964.680,02 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.806.958.734.675,65. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp423.712.988.195,42 dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00.

Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek social ekonomi yang luas di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* bahkan telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY melakukan refocusing dan realokasi APBD TA 2020 untuk prioritas penanganan Covid-19 melalui Belanja Tidak Terduga dengan strategi:

1. Percepatan Perubahan Penjabaran APBD DIY 2020 dengan melakukan pencermatan dan indentifikasi terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang :
 - a. Tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Dapat ditunda pelaksanaannya;
 - c. Dapat di redesign TUK dan outputnya;
 - d. Dapat diakselerasi pelaksanaannya.
2. Menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang belum tanda tangan kontrak per 3 April 2020 kecuali untuk:
 - a. Pengadaan barang/jasa yang bersumber pada Dana Keistimewaan;
 - b. Pengadaan barang/jasa untuk Operasional OPD yang Wajib Mengikat;
 - c. Pengadaan barang/jasa untuk Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Dasar/Publik;
 - d. Kebijakan Pemda DIY dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya-upaya penanganan melalui Belanja Tidak Terduga yang diprioritaskan pada :
 - e. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
 - 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan;
 - 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
 - 3) Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - 4) Penyemprotan disinfektan;
 - 5) Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
 - 6) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 - 7) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
 - 8) Penanganan jenazah;
 - 9) Penanganan kesehatan lainnya.

3. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
 - a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
4. Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial antara lain: pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

Berdasarkan dinamika tersebut maka dalam APBD Perubahan TA 2020 dilakukan perubahan kebijakan pendapatan yaitu:

- a. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Dana Insentif Daerah sebagai akibat adanya perubahan-perubahan asumsi ekonomi makro;
- b. Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua sejak Bulan April hingga Bulan Desember 2020;
- c. Menambah titik layanan Pembayaran PKB agar tidak terjadi penumpukkan massa di salah satu titik pembayaran;
- d. Penambahan fasilitas layanan publik, khususnya yang terkait dengan PAD diprioritaskan untuk operasional, pemeliharaan dan penataan baru untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Tindak lanjut dari perubahan kebijakan pendapatan tersebut dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dalam APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93 turun sebesar Rp155.799.22.709,78 dibandingkan dalam APBD TA 2019 sebesar Rp5.713.924.265.502,71, dengan rincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.799.932.971.064,54, Dana Perimbangan sebesar Rp2.395.248.332.317,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.362.943.741.411,39.

Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan prioritas untuk:
 - a. Penanganan kesehatan
 - b. Penanganan dampak ekonomi
 - c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial
2. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk menambah belanja barang/jasa dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;
3. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji Bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tidak dijadikan penghitung besaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
4. Penyesuaian Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dengan memperhitungkan kekurangan pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota atas kelebihan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35, naik sebesar Rp915.954.579.764,90 dibandingkan Anggaran Belanja TA 2019 sebesar Rp4.949.650.384.323,45.

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah melakukan penyesuaian anggaran penyertaan modal yang semula ditetapkan sebesar Rp178.630.000.000,00 menjadi sebesar Rp117.590.000.000,00. Penyesuaian tersebut digunakan untuk menambah alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan Penyertaan Modal untuk Perusda Tirta Tama sebesar Rp12.500.000.000,00.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93, dapat direalisasikan sebesar Rp5.611.510.924.299,71 atau 100,96% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% dari target setelah perubahan, realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp2.371.044.354.021,00 atau 98,99% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.363.759.740.924,00 atau 100,06% dari target setelah perubahan.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dapat direalisasikan sebesar Rp5.433.180.699.355,67 atau 92,63% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.626.221.964.680,02 atau 93,36% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.806.958.734.675,65 atau 91,19% dari target belanja setelah perubahan.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp425.069.919.295,42 dan realisasi sebesar Rp423.712.988.195,42 atau 99,68% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp420.567.958.995,42 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp3.145.029.200,00 atau 69,86%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp101.000.000.000,00, Penyertaan Modal Ke ASKRIDA sebesar Rp90.000.000,00, Penyertaan Modal ke PD Air Bersih sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Fasilitasi Dana Bergulir sebesar Rp4.000.000.000,00 melalui BUKP.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada TA 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp484.453.213.139,46 dan secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang)	
			(Rp)	(%)
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PENDIDIKAN				
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
PENDAPATAN DISDIKPOR	2.179.535.102,00	2.526.873.617,00	347.338.515,00	115,93 %
Pendapatan Asli Daerah	2.179.535.102,00	2.526.873.617,00	347.338.515,00	115,93 %
Hasil Retribusi Daerah	924.243.500,00	1.064.513.500,00	140.270.000,00	115,17 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	207.068.515,00	116,49 %
BELANJA DISDIKPOR	1.227.433.266.212,00	1.177.846.859.137,00	(49.586.407.075,00)	95,96 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	(26.197.849.196,00)	96,73 %
Belanja Pegawai	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	(26.197.849.196,00)	96,73 %
BELANJA LANGSUNG	426.231.486.561,00	402.842.928.682,00	(23.388.557.879,00)	94,51 %
Program Administrasi Perkantoran	12.976.946.840,00	11.779.692.741,00	(1.197.254.099,00)	90,77 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.316.410.344,00	5.467.153.924,00	(849.256.420,00)	86,55 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	890.203.000,00	838.124.550,00	(52.078.450,00)	94,14 %
Program Pendidikan Menengah	363.820.627.321,00	348.069.609.789,00	(15.751.017.532,00)	95,67 %
Program Layanan Pendidikan Khusus	13.544.213.861,00	12.257.993.364,00	(1.286.220.497,00)	90,50 %
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	2.533.765.100,00	2.240.114.490,00	(293.650.610,00)	88,41 %
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.542.215.400,00	10.222.060.050,00	(320.155.350,00)	96,96 %
Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.203.677.000,00	1.168.611.800,00	(35.065.200,00)	97,08 %

Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	7.191.664.145,00	4.608.054.880,00	(2.583.609.265,00)	64,07 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	336.947.000,00	334.211.250,00	(2.735.750,00)	99,18 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	277.016.000,00	223.751.000,00	(53.265.000,00)	80,77 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	947.955.500,00	871.419.182,00	(76.536.318,00)	91,92 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul	310.297.850,00	282.467.350,00	(27.830.500,00)	91,03 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	519.474.900,00	484.579.100,00	(34.895.800,00)	93,28 %
Program Pembinaan Kepemudaan	507.557.600,00	487.082.884,00	(20.474.716,00)	95,96 %
Program Pembinaan Olahraga	1.491.226.200,00	1.343.939.710,00	(147.286.490,00)	90,12 %
Program Pendidikan Berbasis Budaya	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	(657.225.882,00)	76,70 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KESEHATAN				
DINAS KESEHATAN				
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68 %
Pendapatan Asli Daerah	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68 %
BELANJA DINAS KESEHATAN	175.707.757.161,29	129.617.621.649,00	(46.090.135.512,29)	73,76 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	(1.795.264.636,00)	96,12 %
Belanja Pegawai	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	(1.795.264.636,00)	96,12 %
BELANJA LANGSUNG	129.337.084.875,29	85.042.213.999,00	(44.294.870.876,29)	65,75 %
Program Administrasi Perkantoran	2.070.226.700,00	1.859.576.597,00	(210.650.103,00)	89,82 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	441.375.533,00	399.399.590,00	(41.975.943,00)	90,48 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.515.500,00	31.336.800,00	(14.178.700,00)	68,84 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	77.615.280,23	76.536.450,00	(1.078.830,23)	98,61 %
Program Kesehatan Masyarakat	9.591.229.440,00	7.773.502.378,00	(1.817.727.062,00)	81,04 %
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.674.609.700,00	3.343.421.963,00	(331.187.737,00)	90,98 %
Program Pelayanan Kesehatan	143.615.900,00	142.465.100,00	(1.150.800,00)	99,19 %
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	377.886.000,00	366.275.657,00	(11.610.343,00)	96,92 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BALABKES	19.657.514.281,62	13.832.490.045,00	(5.825.024.236,62)	70,36 %
Program Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES	6.510.349.078,00	2.755.095.778,00	(3.755.253.300,00)	42,31 %
Program Pelayanan Pada BLUD BAPELJAMKESSOS	32.033.924.065,29	18.821.347.512,00	(13.212.576.553,29)	58,75 %
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ GRHASIA	28.266.091.329,15	19.107.901.787,00	(9.158.189.542,15)	67,60 %
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS PARU RESPIRA	26.447.132.068,00	16.532.864.342,00	(9.914.267.726,00)	62,51 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	6.262.617.000,00	8.135.160.962,00	1.872.543.962,00	29,90 %
Pendapatan Asli Daerah	6.262.617.000,00	8.135.160.962,00	1.872.543.962,00	129,90 %
Hasil Retribusi Daerah	6.257.013.000,00	8.129.568.962,00	1.872.555.962,00	129,93 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.604.000,00	5.592.000,00	(12.000,00)	99,79 %
BELANJA DINAS PUP-ESDM	573.146.992.580,00	544.625.128.917,01	(28.521.863.662,99)	95,02 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	(2.556.003.483,00)	89,85 %
Belanja Pegawai	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	(2.556.003.483,00)	89,85 %
BELANJA LANGSUNG	547.954.310.770,00	521.988.450.590,01	(25.965.860.179,99)	95,26 %
Program Administrasi Perkantoran	12.954.793.856,00	11.618.073.481,00	(1.336.720.375,00)	89,68 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.635.283.100,00	3.365.102.086,01	(270.181.013,99)	92,56 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	809.742.000,00	798.234.750,00	(11.507.250,00)	98,57 %
Program Penyelenggaraan Jalan	33.459.590.000,00	27.287.682.040,00	(6.171.907.960,00)	81,55 %
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	21.929.530.536,00	19.035.548.415,00	(2.893.982.121,00)	87,80 %
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.777.383.000,00	8.197.444.088,00	(2.579.938.912,00)	76,06 %
Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	2.878.572.400,00	2.806.772.678,00	(71.799.722,00)	97,50 %
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	14.646.124.100,00	11.013.827.944,00	(3.632.296.156,00)	75,19 %
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	953.210.400,00	918.304.380,00	(34.906.020,00)	96,33 %
Program Penyelenggaraan Perumahan	8.559.229.380,00	8.206.345.723,00	(352.883.657,00)	95,87 %
Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	1.440.701.520,00	1.184.519.250,00	(256.182.270,00)	82,21 %
Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan	3.937.255.000,00	2.756.363.350,00	(1.180.891.650,00)	70,00 %
Program Pengelolaan Air Tanah	12.994.160.500,00	11.237.138.850,00	(1.757.021.650,00)	86,47 %
Program Pengelolaan Pertambangan	900.015.000,00	823.306.100,00	(76.708.900,00)	91,47 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	183.994.000,00	183.994.000,00	0,00	100,00 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	417.529.745.428,00	412.190.812.905,00	(5.338.932.523,00)	98,72 %
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	364.980.550,00	364.980.550,00	0,00	100,00 %
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
BELANJA DINAS PERTARU	47.515.576.065,0	41.518.983.074,00	(5.996.592.991,00)	87,37 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84 %
Belanja Pegawai	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84 %
BELANJA LANGSUNG	43.707.832.640,00	38.059.832.852,00	(5.647.999.788,00)	87,07 %
Program Administrasi Perkantoran	1.015.610.600,00	764.394.767,00	(251.215.833,00)	75,26 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.939.200,00	420.912.379,00	(100.026.821,00)	80,79 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	93.475.500,00	76.061.750,00	(17.413.750,00)	81,37 %
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	283.045.000,00	282.100.500,00	(944.500,00)	99,66 %
Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	261.382.000,00	242.564.376,00	(18.817.624,00)	92,80 %
Program Tertib Administrasi Pertanahan	28.766.000,00	28.766.000,00	-	00,00 %
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	(3.859.991.949,00)	89,36 %
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.302.063.000,00	1.967.437.637,00	(334.625.363,00)	85,46 %
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	860.827.800,00	477.436.000,00	(383.391.800,00)	55,46 %
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.090.543.000,00	960.633.280,00	(129.909.720,00)	88,08 %
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	504.196.788,00	412.534.360,00	(91.662.428,00)	81,82 %
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	- %

URUSAN KONKUREN WAJIB				
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
BELANJA BAKESBANGPOL	8.665.849.353,00	7.718.268.374,00	(947.580.979,00)	89,06 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.255.106.853,00	3.025.119.183,00	(229.987.670,00)	92,93 %
Belanja Pegawai	3.255.106.853,00	3.025.119.183,00	(229.987.670,00)	92,93 %
BELANJA LANGSUNG	5.410.742.500,00	4.693.149.191,00	(717.593.309,00)	86,73 %
Program Administrasi Perkantoran	1.015.246.000,00	913.773.562,00	(101.472.438,00)	90,00 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.657.000,00	758.175.929,00	(84.481.071,00)	89,97 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	174.468.000,00	142.990.000,00	(31.478.000,00)	81,95 %
Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	2.006.779.500,00	1.774.193.000,00	(232.586.500,00)	88,40 %
Program Pendidikan Politik Masyarakat	391.593.000,00	364.810.200,00	(26.782.800,00)	93,16 %
Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	115.122.500,00	112.722.500,00	(2.400.000,00)	97,91 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	864.876.500,00	626.484.000,00	(238.392.500,00)	72,43 %
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
PENDAPATAN SATPOL PP	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04 %
Pendapatan Asli Daerah	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04 %
BELANJA SATPOL PP	14.263.558.338,00	13.650.721.472,00	(612.836.866,00)	95,70 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	(440.669.145,00)	93,97 %
Belanja Pegawai	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	(440.669.145,00)	93,97 %
BELANJA LANGSUNG	6.945.297.100,00	6.773.129.379,00	(172.167.721,00)	97,52 %
Program Administrasi Perkantoran	692.288.850,00	647.054.070,00	(45.234.780,00)	93,46 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484.379.000,00	481.677.699,00	(2.701.301,00)	99,44 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	74.433.000,00	74.356.050,00	(76.950,00)	99,89 %
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.394.700.000,00	1.317.639.627,00	(77.060.373,00)	94,47 %
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	240.912.750,00	236.192.750,00	(4.720.000,00)	98,04 %
Program Pembinaan dan Pelaksanaan Penegakkan Perda dan Perkada	292.873.500,00	284.980.500,00	(7.893.000,00)	97,30 %
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3.765.710.000,00	3.731.228.683,00	(34.481.317,00)	99,08 %
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
PENDAPATAN BPBD	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	- %
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	- %
Pendapatan Hibah	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	- %
BELANJA BPBD	24.576.619.707,00	22.624.374.634,64	(1.952.245.072,36)	92,06 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92 %
Belanja Pegawai	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92 %
BELANJA LANGSUNG	19.511.752.000,00	17.867.147.533,64	(1.644.604.466,36)	91,57 %
Program Administrasi Perkantoran	1.937.493.000,00	1.692.183.820,00	(245.309.180,00)	87,33 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.429.000,00	691.725.675,00	(78.703.325,00)	89,78 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	89.802.000,00	87.436.000,00	(2.366.000,00)	97,36 %
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.544.905.000,00	1.522.344.001,00	(22.560.999,00)	98,53 %
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	4.282.062.000,00	5.263.425.363,00	981.363.363,00	122,92 %
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.883.086.000,00	8.606.057.674,64	(2.277.028.325,36)	79,18 %
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
SOSIAL				
DINAS SOSIAL				
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00 %
Pendapatan Asli Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00 %
Hasil Retribusi Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00 %
BELANJA DINAS SOSIAL	68.446.611.129,11	62.312.687.145,00	(6.133.923.984,11)	91,03 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44 %
Belanja Pegawai	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44 %
BELANJA LANGSUNG	45.457.655.707,11	41.520.180.876,00	(3.937.474.831,11)	91,33 %
Program Administrasi Perkantoran	17.140.435.573,11	15.706.390.712,00	(1.434.044.861,11)	91,63 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.240.555.859,00	4.983.825.471,00	(256.730.388,00)	95,10 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	26.112.000,00	26.112.000,00	0,00	100,00 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	82.160.000,00	63.480.000,00	(18.680.000,00)	77,26 %
Program Rehabilitasi Sosial	4.610.432.995,00	4.323.336.716,00	(287.096.279,00)	93,77 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.038.962.600,00	2.868.120.370,00	(170.842.230,00)	94,37 %
Program Penanganan Fakir Miskin	2.071.606.500,00	1.610.950.200,00	(460.656.300,00)	77,76 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1.904.038.925,00	1.849.478.045,00	(54.560.880,00)	97,13 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	1.054.814.000,00	1.034.313.325,00	(20.500.675,00)	98,05 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	2.059.705.745,00	2.014.615.953,00	(45.089.792,00)	97,81 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	1.258.850.000,00	1.138.201.550,00	(120.648.450,00)	90,41 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	1.295.803.500,00	1.159.612.764,00	(136.190.736,00)	89,48 %
Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	991.233.650,00	975.752.000,00	(15.481.650,00)	98,43 %
Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	2.258.844.360,00	1.683.146.500,00	(575.697.860,00)	74,51 %
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	(341.254.730,00)	85,92 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
TENAGA KERJA				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
PENDAPATAN DISNAKERTRANS	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61 %
Pendapatan Asli Daerah	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61 %
Hasil Retribusi Daerah	1.284.756.000,00	1.778.155.000,00	493.399.000,00	138,40 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	- %
BELANJA DISNAKERTRANS	23.835.181.547,00	22.120.340.823,00	(1.714.840.724,00)	92,80 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52 %
Belanja Pegawai	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52 %
BELANJA LANGSUNG	10.621.771.970,00	9.498.489.700,00	(1.123.282.270,00)	89,42 %
Program Administrasi Perkantoran	3.847.805.620,00	3.313.058.657,00	(534.746.963,00)	86,10 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.819.517.350,00	2.524.334.676,00	(295.182.674,00)	89,53 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	282.185.000,00	279.715.000,00	(2.470.000,00)	99,12 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	284.085.000,00	256.017.500,00	(28.067.500,00)	90,12 %
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	114.268.000,00	93.821.200,00	(20.446.800,00)	82,10 %
Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi dan Pemagangan	208.880.500,00	208.426.500,00	(454.000,00)	99,78 %
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	321.611.000,00	320.834.630,00	(776.370,00)	99,75 %
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	335.833.000,00	317.017.000,00	(18.816.000,00)	94,39 %
Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	656.778.500,00	575.845.537,00	(80.932.963,00)	87,67 %
Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	1.750.808.000,0	1.609.419.000,00	(141.389.000,00)	91,92 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK				
BELANJA DINAS P3AP2	7.717.460.323,00	7.199.857.614,00	(517.602.709,00)	93,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74 %
Belanja Pegawai	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74 %
BELANJA LANGSUNG	4.854.608.640,00	4.487.337.923,00	(367.270.717,00)	92,43 %
Program Administrasi Perkantoran	1.454.479.420,00	1.314.135.585,00	(140.343.835,00)	90,35 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	722.077.720,00	712.783.939,00	(9.293.781,00)	98,71 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	123.414.000,00	114.889.000,00	(8.525.000,00)	93,09 %
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	640.821.000,00	628.684.000,00	(12.137.000,00)	98,10 %
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	513.882.000,00	488.692.125,00	(25.189.875,00)	95,09 %
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	230.538.500,00	221.895.274,00	(8.643.226,00)	96,25 %
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	371.520.500,00	291.560.500,00	(79.960.000,00)	78,47 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	797.875.500,00	714.697.500,00	(83.178.000,00)	89,57 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
LINGKUNGAN HIDUP				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
PENDAPATAN DLHK	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31 %
Pendapatan Asli Daerah	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31 %
Hasil Retribusi Daerah	16.323.353.000,00	16.208.007.263,71	(115.345.736,29)	99,29 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	409.761.125,00	409.761.125,00	0,00	- %
BELANJA DLHK	48.030.733.178,00	44.389.681.878,00	(3.641.051.300,00)	92,41 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41 %
Belanja Pegawai	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41 %
BELANJA LANGSUNG	24.769.087.409,00	22.427.104.515,00	(2.341.982.894,00)	90,54 %
Program Administrasi Perkantoran	2.848.775.250,00	2.502.797.803,00	(345.977.447,00)	87,85 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.964.425.242,00	1.775.591.083,00	(188.834.159,00)	90,38 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	192.907.000,00	187.425.200,00	(5.481.800,00)	97,15 %
Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	322.201.500,00	307.816.500,00	(14.385.000,00)	95,53 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	288.536.900,00	235.841.900,00	(52.695.000,00)	81,73 %
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1.219.946.520,00	1.132.912.100,00	(87.034.420,00)	92,86 %
Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	973.039.900,00	816.515.800,00	(156.524.100,00)	83,91 %
Program Pengelolaan Persampahan Regional	8.824.492.517,00	8.171.625.905,00	(652.866.612,00)	92,60 %
Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	279.156.000,00	273.779.200,00	(5.376.800,00)	98,07 %
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.973.650.580,00	6.159.702.574,00	(813.948.006,00)	88,32 %
Program Pengelolaan Hutan Konservasi	263.364.500,00	260.546.500,00	(2.818.000,00)	98,93 %
Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	401.931.500,00	393.089.550,00	(8.841.950,00)	97,80 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	182.000.000,00	175.140.400,00	(6.859.600,00)	96,23 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	34.660.000,00	34.320.000,00	(340.000,00)	99,01 %
URUSAN KONKUREN WAJIB PERHUBUNGAN				
DINAS PERHUBUNGAN				
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20 %
Pendapatan Asli Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20 %
Hasil Retribusi Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20 %
BELANJA DINAS PERHUBUNGAN	26.967.535.763,00	24.304.688.951,00	(2.662.846.812,00)	90,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47 %
Belanja Pegawai	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47 %
BELANJA LANGSUNG	19.164.834.614,00	17.089.336.755,00	(2.075.497.859,00)	89,17 %
Program Admnistrasi Perkantoran	4.751.376.000,00	4.185.885.129,00	(565.490.871,00)	88,09 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.414.931.916,00	1.370.469.416,00	(44.462.500,00)	96,85 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	460.401.000,00	443.867.500,00	(16.533.500,00)	96,40 %
Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	5.735.572.000,00	4.666.141.909,00	(1.069.430.091,00)	81,35 %
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.292.134.600,00	1.252.387.560,00	(39.747.040,00)	96,92 %
Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.089.511.888,00	1.022.777.450,00	(66.734.438,00)	93,87 %
Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	1.099.548.000,00	902.529.189,00	(197.018.811,00)	82,08 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	(76.080.608,00)	97,70 %
URUSAN KONKUREN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PENDAPATAN DINAS KOMINFO	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00 %
Pendapatan Asli Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00 %
Hasil Retribusi Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00 %

BELANJA DINAS KOMINFO	48.050.515.863,00	46.230.575.777,00	(1.819.940.086,00)	96,21 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76 %
Belanja Pegawai	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76 %
BELANJA LANGSUNG	43.571.479.950,00	42.209.764.691,00	(1.361.715.259,00)	96,87 %
Program Administrasi Perkantoran	1.158.919.000,00	996.291.108,00	(162.627.892,00)	85,96 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.677.000,00	303.982.693,00	(54.694.307,00)	84,75 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	73.211.000,00	66.797.000,00	(6.414.000,00)	91,23 %
Program Informasi dan Komunikasi Publik	810.756.000,00	783.926.000,00	(26.830.000,00)	96,69 %
Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	1.345.205.000,00	1.162.776.467,00	(182.428.533,00)	86,43 %
Program Layanan Teknologi Informasi	917.997.000,00	895.180.300,00	(22.816.700,00)	97,51 %
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	(905.903.827,00)	97,67 %
URUSAN KONKUREN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
PENDAPATAN DINAS KOPERASI DAN UKM	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98 %
Pendapatan Asli Daerah	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98 %
Hasil Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.700.000,00	200.000,00	104,44 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	593.349.473,00	593.349.473,00	- %
BELANJA DINAS KOPERASI DAN UKM	23.212.159.028,00	21.036.500.408,00	(2.175.658.620,00)	90,63 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05 %
Belanja Pegawai	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05 %
BELANJA LANGSUNG	19.797.065.578,00	17.756.019.111,00	(2.041.046.467,00)	89,69 %
Program Administrasi Perkantoran	1.031.519.500,00	838.315.099,00	(193.204.401,00)	81,26 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.207.482.800,00	668.401.550,00	(539.081.250,00)	55,35 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	87.036.500,00	78.036.500,00	(9.000.000,00)	89,65 %
Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	1.212.823.500,00	1.175.907.500,00	(36.916.000,00)	96,95 %
Program Pengembangan Perkoperasian	1.752.761.000,00	1.693.913.059,00	(58.847.941,00)	96,64 %
Program Pengembangan UKM	10.372.657.028,00	9.410.739.403,00	(961.917.625,00)	90,73 %
Program Peningkatan Akses Pembiayaan	50.820.000,00	48.480.000,00	(2.340.000,00)	95,39 %
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	275.000.000,00	272.120.000,00	(2.880.000,00)	98,95 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.806.965.250,00	3.570.106.000,00	(236.859.250,00)	93,77 %
URUSAN KONKUREN WAJIB PENANAMAN MODAL				
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL				
PENDAPATAN DPPM	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81 %
Pendapatan Asli Daerah	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81 %
Hasil Retribusi Daerah	392.320.000,00	510.015.000,00	117.695.000,00	129,99 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00 %
BELANJA DPPM	5.992.188.224,00	5.601.799.349,00	(390.388.875,00)	93,48 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86 %
Belanja Pegawai	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86 %
BELANJA LANGSUNG	2.412.234.549,00	2.134.138.001,00	(278.096.548,00)	88,47 %
Program Administrasi Perkantoran	1.395.053.880,00	1.051.492.719,00	(266.841.780,00)	79,75 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.283.300,00	473.013.532,00	(7.269.768,00)	98,48 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	68.951.500,00	68.951.500,00	0,00	100,00 %
Program Promosi Investasi	112.114.750,00	110.799.750,00	(1.315.000,00)	98,82 %
Program Peningkatan Iklim Investasi	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	100,00 %
Program Pelayanan Perijinan	279.878.000,00	279.068.000,00	(810.000,00)	99,71 %
Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan	130.152.500,00	128.292.500,00	(1.860.000,00)	98,57 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KEBUDAYAAN				
DINAS KEBUDAYAAN				
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74 %
Pendapatan Asli Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74 %
Hasil Retribusi Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74 %
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	314.966.111.077,00	296.976.785.408,00	(17.989.325.669,00)	94,28 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93 %
Belanja Pegawai	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93 %
BELANJA LANGSUNG	302.684.347.308,00	285.070.906.852,00	(17.613.440.456,00)	94,18 %
Program Administrasi Perkantoran	6.695.551.100,00	5.445.628.648,00	(1.249.922.452,00)	81,33 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.733.100,00	520.510.096,00	(79.223.004,00)	88,08 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	52.795.500,00	48.430.000,00	(4.365.500,00)	91,73 %
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	41.087.112.920,00	36.193.421.112,00	(4.893.691.808,00)	90,66 %
Program Penguatan Museum Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	(900.354.612,00)	92,77 %
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	184.024.201.850,00	183.161.315.760,00	(862.886.090,00)	99,53 %
Program Pengelolaan Taman Budaya	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	(231.692.660,00)	96,17 %
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	5.653.688.000,00	5.047.919.345,00	(605.768.655,00)	89,28 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	2.772.669.522,00	1.992.745.467,00	(779.924.055,00)	71,87 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	43.276.832.650,00	35.271.221.030,00	(8.005.611.620,00)	81,50 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PERPUSTAKAAN				
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
PENDAPATAN DPAD	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32 %
Pendapatan Asli Daerah	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32 %
Hasil Retribusi Daerah	123.000.000,00	152.794.300,00	29.794.300,00	124,22 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	120.000,00	120.000,00	- %
BELANJA DPAD	22.202.840.172,00	21.156.889.048,00	(1.045.951.124,00)	95,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11 %
Belanja pegawai	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11 %
BELANJA LANGSUNG	14.546.517.089,00	13.951.348.087,00	(595.169.002,00)	95,91 %
Program Administrasi Perkantoran	5.419.484.103,00	5.117.796.641,00	(301.687.462,00)	94,43 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.241.106.600,00	1.237.516.600,00	(3.590.000,00)	99,71 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	100,00 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	123.383.000,00	119.840.500,00	(3.542.500,00)	97,12 %
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	1.254.728.000,00	1.197.050.400,00	(57.677.600,00)	95,40 %
Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	602.919.722,00	565.094.700,00	(37.825.022,00)	93,72 %
Program Layanan Perpustakaan	2.070.795.764,00	2.029.817.226,00	(40.978.538,00)	98,02 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	205.538.000,00	198.575.500,00	(6.962.500,00)	96,61 %
Program Pelestarian dan Layanan Arsip	362.291.900,00	357.326.600,00	(4.965.300,00)	98,63 %
Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	(137.940.080,00)	95,77 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PENDAPATAN DISKANLA	822.700.000,00	836.388.400,00	13.688.400,00	101,66 %
Pendapatan Asli Daerah	822.700.000,00	836.388.400,00	13.688.400,00	101,66 %
Hasil Retrebusi Daerah	820.200.000,00	826.343.400,00	6.143.400,00	100,74 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.500.000,00	10.045.000,00	7.545.000,00	401,80 %
BELANJA DISKANLA	22.002.627.957,00	20.908.475.789,00	(1.094.152.168,00)	95,02 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	(367.277.308,00)	95,66 %
Belanja Pegawai	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	(367.277.308,00)	95,66 %
BELANJA LANGSUNG	13.529.536.110,00	12.802.661.250,00	(726.874.860,00)	94,62 %
Program Administrasi Perkantoran	3.714.919.060,00	3.447.989.280,00	(266.929.780,00)	92,81 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.249.005.000,00	1.247.080.300,00	(1.924.700,00)	99,84 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	97.737.000,00	97.722.000,00	(15.000,00)	99,39 %
Program Pengelolaan Pelabuhan	91.118.750,00	91.118.750,00	0,00	100,00 %
Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	421.563.350,00	402.854.850,00	(18.708.500,00)	95,56 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	407.147.520,00	255.245.000,00	(151.902.520,00)	62,69 %
Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.799.393.800,00	1.608.590.300,00	(190.803.500,00)	89,39 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.973.043.120,00	1.930.865.620,00	(42.177.500,00)	97,86 %
Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	1.992.061.510,00	1.991.452.850,00	(608.660,00)	99,96 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.783.547.000,00	1.729.742.300,00	(53.804.700,00)	96,98 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN PARIWISATA				
DINAS PARIWISATA				
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23 %
Pendapatan Asli Daerah	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23 %
Hasil Retribusi Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.250.000,00	31.720.994,00	(3.529.006,00)	89,98 %
BELANJA DINAS PARIWISATA	22.270.777.488,00	16.562.042.923,00	(5.708.734.565,00)	74,36 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95 %
Belanja Pegawai	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95 %
BELANJA LANGSUNG	17.721.268.250,00	12.242.248.830,00	(5.479.019.420,00)	69,08 %
Program Administrasi Perkantoran	1.312.379.000,00	819.507.170,00	(492.871.830,00)	62,44 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	507.714.000,00	462.190.420,00	(45.523.580,00)	91,03 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	278.905.500,00	258.715.000,00	(20.190.500,00)	92,76 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.989.000.000,00	1.008.594.500,00	(980.405.500,00)	50,70 %
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	362.387.250,00	212.562.000,00	(149.825.250,00)	58,65 %
Program Pengembangan Industri Pariwisata	281.545.000,00	240.463.000,00	(41.082.000,00)	85,40 %
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.061.512.000,00	4.199.137.550,00	(1.862.374.450,00)	69,27 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.146.873.000,00	3.398.551.690,00	(1.748.321.310,00)	66,03 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.780.952.500,00	1.642.527.500,00	(138.425.000,00)	92,22 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN PERTANIAN				
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
PENDAPATAN DPKP	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69 %
Pendapatan Asli Daerah	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69 %
Hasil Retribusi Daerah	1.483.463.180,00	2.093.646.820,00	610.183.640,00	141,13 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.751.000,00	124.998.600,00	20.247.600,00	119,32 %
BELANJA DPKP	44.304.152.668,23	42.084.829.468,00	(2.219.323.200,23)	94,99 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02 %
Belanja Pegawai	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02 %
BELANJA LANGSUNG	19.082.402.673,23	17.865.633.130,00	(1.216.769.543,23)	93,62 %
Program Administrasi Perkantoran	4.202.082.803,22	3.413.910.209,00	(788.172.594,22)	81,24 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.863.727.259,77	2.779.836.200,00	(83.891.059,77)	97,07 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15.200.000,00	15.133.000,00	(67.000,00)	99,55 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	64.704.000,00	64.570.250,00	(133.750,00)	99,79 %
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	129.266.480,00	125.996.480,00	(3.270.000,00)	97,47 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.052.579.775,24	2.859.627.293,00	(192.952.482,24)	93,67 %
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	182.234.580,00	182.054.450,00	(180.130,00)	99,90 %
Program Peningkatan Populasi Peternakan	582.397.000,00	575.723.500,00	(6.673.500,00)	98,85 %
Program Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	3.418.724.000,00	3.406.512.000,00	(12.212.000,00)	99,64 %
Program Perlindungan Tanaman Pertanian	244.731.000,00	244.353.500,00	(377.500,00)	99,84 %
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	256.210.250,00	249.938.750,00	(6.271.500,00)	97,55 %
Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	1.532.137.925,00	1.475.547.148,00	(56.590.777,00)	96,30 %
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	19.858.800,00	18.955.250,00	(903.550,00)	95,45 %
Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	1.057.962.500,00	1.016.403.750,00	(41.558.750,00)	96,07 %
Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	101.693.500,00	91.966.000,00	(9.727.500,00)	90,43 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	(13.787.450,00)	98,98 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN PERDAGANGAN				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
PENDAPATAN	182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62 %
Pendapatan Asli Daerah	182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62 %
Hasil Retrebusi Daerah	182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62 %

BELANJA	18.297.649.150,00	16.787.984.617,00	(1.509.664.533,00)	91,74 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14 %
Belanja Pegawai	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14 %
BELANJA LANGSUNG	9.907.069.030,00	8.972.702.948,00	(934.366.082,00)	90,56 %
Program Administrasi Perkantoran	1.883.027.250,00	1.677.572.513,00	(205.454.737,00)	89,08 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	521.504.750,00	515.092.450,00	(6.412.300,00)	98,77 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	359.187.000,00	348.106.500,00	(11.080.500,00)	96,91 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	273.151.500,00	271.495.500,00	(1.656.000,00)	99,39 %
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	157.893.000,00	157.863.000,00	(30.000,00)	99,98 %
Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	415.145.500,00	390.773.500,00	(24.372.000,00)	94,12 %
Program Peningkatan Teknologi Industri	291.601.280,00	281.668.381,00	(9.932.899,00)	96,59 %
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.572.463.250,00	1.304.731.850,00	(267.731.400,00)	82,97 %
Program Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	356.469.000,00	329.334.904,00	(27.134.096,00)	92,38 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	4.076.626.500,00	3.696.064.350,00	(380.562.150,00)	90,66 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM				
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35 %
Belanja Pegawai	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35 %
SEKRETARIAT DAERAH				
PENDAPATAN	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00 %
Pendapatan Asli Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00 %
Hasil Retribusi Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00 %
BELANJA SETDA	62.454.018.536,00	53.821.946.480,00	(8.632.072.056,00)	86,17 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38 %
Belanja Pegawai	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38 %
BELANJA LANGSUNG	35.912.023.893,00	28.769.092.751,00	(7.142.931.142,00)	80,10 %
Program Administrasi Perkantoran	10.517.848.700,00	7.490.711.624,00	(3.027.137.076,00)	71,21 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.776.383.500,00	7.544.653.666,00	(231.729.834,00)	97,02 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	468.833.500,00	434.198.725,00	(34.634.775,00)	92,61 %
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	116.808.000,00	99.058.000,00	(17.750.000,00)	84,80 %
Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	95.987.000,00	88.598.500,00	(7.388.500,00)	92,30 %
Program Dokumentasi Hukum	355.329.000,00	316.687.500,00	(38.641.500,00)	89,12 %
Program Bantuan dan Layanan Hukum	2.266.893.000,00	2.187.398.178,00	(79.494.822,00)	96,49 %
Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	100.448.500,00	80.503.000,00	(19.945.500,00)	80,14 %
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	589.241.500,00	524.524.750,00	(64.716.750,00)	89,01 %
Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	451.561.000,00	373.503.950,00	(78.057.050,00)	82,71 %
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	406.859.000,00	321.376.000,00	(85.483.000,00)	78,98 %

Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	119.326.000,00	95.088.000,00	(24.238.000,00)	79,68 %
Program Pelayanan Kerumahtangaan	1.160.498.000,00	1.083.934.000,00	(76.564.000,00)	93,40 %
Program Pelayanan Keprotokolan	1.209.984.500,00	774.219.500,00	(435.765.000,00)	63,98 %
Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	961.925.000,00	940.540.300,00	(21.384.700,00)	97,77 %
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	360.184.000,00	303.574.700,00	(56.609.300,00)	84,28 %
Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	132.058.250,00	110.858.250,00	(21.200.000,00)	83,94 %
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	49.830.000,00	48.030.000,00	(1.800.000,00)	96,38 %
Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	73.164.000,00	66.814.000,00	(6.350.000,00)	91,32 %
Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	341.754.340,00	307.196.000,00	(34.558.340,00)	89,88 %
Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	90.347.000,00	67.569.000,00	(22.778.000,00)	74,78 %
Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	83.242.500,00	81.370.000,00	(1.872.500,00)	97,75 %
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah Perekonomian	37.105.000,00	37.105.000,00	0,00	100,00 %
Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	70.294.000,00	69.789.000,00	(505.000,00)	99,28 %
Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	3.118.221.900,00	909.575.500,00	(2.208.646.400,00)	29,16 %
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	176.716.500,00	139.619.700,00	(37.096.800,00)	79,00 %
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	276.081.500,00	245.075.100,00	(31.006.400,00)	88,76 %
Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	964.981.000,00	802.421.358,00	(162.559.642,00)	83,15 %
Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	137.592.500,00	136.372.000,00	(1.220.500,00)	99,11 %
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.363.149.250,00	1.114.977.120,00	(248.172.130,00)	81,79 %
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	351.457.500,00	322.653.480,00	(28.804.020,00)	91,80 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	224.676.000,00	213.216.000,00	(11.460.000,00)	94,89 %
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	264.197.500,00	243.687.000,00	(20.510.500,00)	92,23 %
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	383.313.000,00	359.413.057,00	(23.899.943,00)	93,76 %
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten	75.942.500,00	75.942.500,00	0,00	100,00 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten	441.839.953,00	440.110.793,00	(1.729.160,00)	99,60 %
BADAN PENGHUBUNG DAERAH				
PENDAPATAN BAHUBDA	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08 %
Pendapatan Asli Daerah	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08 %
Hasil Retribusi Daerah	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08 %
BELANJA	4.687.741.856,00	4.484.543.051,00	(203.198.805,00)	95,66 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	(760.877,00)	99,97 %
Belanja Pegawai	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	(760.877,00)	99,97 %
BELANJA LANGSUNG	2.072.660.000,00	1.870.222.072,00	(202.437.928,00)	90,23 %
Program Administrasi Perkantoran	921.275.000,00	788.668.958,00	(132.606.042,00)	85,60 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.677.000,00	64.652.226,00	(14.024.774,00)	82,17 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	17.495.000,00	13.565.000,00	(3.930.000,00)	77,53 %
Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	122.171.000,00	114.218.000,00	(7.953.000,00)	93,49 %
Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	75.347.000,00	56.045.000,00	(19.302.000,00)	74,38 %
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	857.695.000,00	833.072.888,00	(24.622.112,00)	97,12 %
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
BELANJA DPRD	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66 %
Belanja Pegawai	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66 %
SEKRETARIAT DPRD				
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	73.062.817.844,00	55.650.672.651,00	(17.412.145.193,00)	76,16 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88 %
Belanja Pegawai	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88 %
BELANJA LANGSUNG	67.441.096.111,00	50.429.012.838,00	(17.012.083.273,00)	74,77 %
Program Administrasi Perkantoran	8.213.865.000,00	5.838.128.686,00	(2.375.736.314,00)	71,07 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.796.388.000,00	3.456.270.873,00	(340.117.127,00)	91,04 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75.770.000,00	75.377.500,00	(392.500,00)	99,48 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	157.383.000,00	156.514.000,00	(869.000,00)	99,44 %
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30.053.668.111,00	20.661.163.726,00	(9.392.504.385,00)	68,74 %
Program Pengembangan Regulasi Daerah	9.254.377.000,00	7.600.302.290,00	(1.654.074.710,00)	82,12 %
Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	15.889.645.000,00	12.641.255.763,00	(3.248.389.237,00)	79,55 %
INSPEKTORAT				
BELANJA INSPEKTORAT	14.522.464.795,00	13.899.300.234,00	(623.164.561,00)	95,70 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07 %
Belanja Pegawai	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07 %
BELANJA LANGSUNG	8.370.160.000,00	7.865.534.808,00	(504.625.192,00)	93,97 %
Program Administrasi Perkantoran	968.962.000,00	842.753.611,00	(126.208.389,00)	86,97 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.539.594.000,00	1.448.341.822,00	(91.252.178,00)	94,07 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.072.000,00	42.364.000,00	(97.708.000,00)	30,24 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.484.000,00	83.938.000,00	(1.546.000,00)	98,19 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	5.636.048.000,00	5.448.137.375,00	(187.910.625,00)	96,66 %
PANIRADYA KAISTIMEWAN				
BELANJA PANIRADYA KAISTIMEWAN	11.301.857.737,0	10.488.626.016,00	(813.231.721,00)	92,80 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69 %
Belanja Pegawai	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69 %
BELANJA LANGSUNG	8.330.823.850,00	7.556.430.325,00	(774.393.525,00)	90,70 %

Program Administrasi Perkantoran	297.468.000,00	239.235.150,00	(58.232.850,00)	80,42 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	254.584.000,00	237.328.500,00	(17.255.500,00)	93,22 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	23.540.000,00	22.231.000,00	(1.309.000,00)	94,43 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2.734.486.500,00	2.330.913.675,00	(403.572.825,00)	85,24 %
Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	920.469.000,00	903.718.200,00	(16.750.800,00)	98,18 %
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan	1.336.649.200,00	1.208.757.000,00	(127.892.200,00)	90,43 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	157.223.000,00	139.202.300,00	(18.020.700,00)	88,53 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	251.732.000,00	223.805.900,00	(27.926.100,00)	88,90 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	335.751.250,00	297.280.600,00	(38.470.650,00)	88,54 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	2.018.920.900,00	1.953.958.000,00	(64.962.900,00)	96,78 %
PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
BELANJA	15.865.276.197,00	14.217.000.389,00	(1.648.275.808,00)	89,61 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82 %
Belanja Pegawai	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82 %
BELANJA LANGSUNG	8.244.498.170,00	6.838.414.056,00	(1.406.084.114,00)	82,94 %
Program Administrasi Perkantoran	1.859.778.370,00	1.020.992.067,00	(838.786.303,00)	54,89 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	904.752.000,00	811.702.139,00	(93.049.861,00)	89,71 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	285.361.000,00	265.178.000,00	(20.183.000,00)	92,92 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.778.058.000,00	1.578.759.750,00	(199.298.250,00)	88,79 %
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	151.087.000,00	144.957.000,00	(6.130.000,00)	95,94 %
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	452.003.000,00	416.873.000,00	(35.130.000,00)	92,22 %
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	78.133.000,00	77.995.950,00	(137.050,00)	99,82 %
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	207.458.000,00	202.961.500,00	(4.496.500,00)	97,83 %
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1.539.534.500,00	1.355.435.500,00	(184.099.000,00)	88,04 %
Program Pengembangan Statistik Daerah	881.292.500,00	872.497.800,00	(8.794.700,00)	99,00 %
Program Penelitian dan Pengembangan	107.040.800,00	91.061.350,00	(15.979.450,00)	85,07 %
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH				
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
PENDAPATAN BPKA	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00 %
Pendapatan Asli Daerah	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00 %
Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	49.679.331.870,00	103,11 %
Hasil Retribusi Daerah	698.044.875,00	736.782.032,00	38.737.157,00	105,54 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	8,97	100,00 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.279.769.970,05	51.982.661.290,54	19.702.891.320,49	161,03 %
BELANJA BPKA	221.476.886.478,00	210.870.555.950,39	(10.606.330.527,61)	95,21 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80 %
Belanja Pegawai	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80 %

BELANJA LANGSUNG	106.783.652.150,00	104.433.926.321,00	(2.349.725.829,00)	97,79 %
Pogram Administrasi Perkantoran	10.321.487.840,00	9.578.649.105,00	(742.838.735,00)	92,80 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.224.268.100,00	10.768.874.565,00	(455.393.535,00)	95,94 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.187.400,00	84.767.400,00	(420.000,00)	99,50 %
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	910.057.500,00	793.908.500,00	(116.149.000,00)	87,23 %
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	449.997.500,00	364.268.500,00	(85.729.000,00)	80,94 %
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	798.106.000,00	764.844.000,00	(33.262.000,00)	95,83 %
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.160.523.000,00	2.040.040.900,00	(120.482.100,00)	94,42 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	6.938.366.310,00	6.582.854.659,00	(355.511.651,00)	94,87 %
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	3.459.527.000,00	3.215.718.000,00	(243.809.000,00)	92,95 %
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.734.387.500,00	2.541.673.892,00	(192.713.608,00)	92,95 %
Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	122.944.000,00	122.944.000,00	0,00	100,00 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	(3.417.200,00)	99,99 %
PPKD/BUD				
PENDAPATAN	3.758.192.073.728,39	3.733.661.811.232,00	(24.530.262.496,39)	99,34 %
Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	(23.955.405.496,00)	98,99 %
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.362.368.884.411,00	(574.857.000,39)	99,95 %
BELANJA	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29 %
Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	(20.511,00)	99,99 %
Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.721.135.000,00	(74.422.969.600,00)	90,09 %
Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	(1.000.000.000,00)	59,87 %
Belanja Bagi Hasil kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	0,00	100,00 %
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pemdes	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	(12.486.111.493,37)	96,91 %
Belanja Tak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	(116.847.297.492,72)	72,34 %
Pembiayaan Netto	307.479.919.295,42	0,00	307.479.919.295,42	- %
Penerimaan Pembiayaan	425.069.919.295,42	0,00	425.069.919.295,42	- %
Pengeluaran Pembiayaan	117.590.000.000,00	0,00	117.590.000.000,00	- %
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
PENDAPATAN	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49 %
Pendapatan Asli Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49 %
Hasil Retribusi Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49 %
BELANJA	287.791.363.357,00	285.883.725.042,00	(1.907.638.315,00)	99,34 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91 %
Belanja Pegawai	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91 %
BELANJA LANGSUNG	10.709.896.466,00	9.028.416.934,00	(1.681.479.532,00)	84,30 %
Program Administrasi Perkantoran	2.198.899.966,00	1.662.370.108,00	(536.529.858,00)	75,60 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.168.834.000,00	1.166.516.200,00	(2.317.800,00)	99,80 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	56.750.000,00	56.693.000,00	(57.000,00)	99,89 %
Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1.411.584.500,00	841.733.700,00	(569.850.800,00)	59,63 %

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai	4.242.222.000,00	3.863.605.486,00	(378.616.514,00)	91,08 %
Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	143.433.000,00	119.260.100,00	(24.172.900,00)	83,14 %
Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah	419.336.000,00	388.970.000,00	(30.366.000,00)	92,75 %
Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai	873.289.000,00	735.582.840,00	(137.706.160,00)	84,23 %
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	195.548.000,00	193.685.500,00	(1.862.500,00)	99,04 %
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
PENDAPATAN BANDIKLAT	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30 %
Pendapatan Asli Daerah	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30 %
Hasil Retribusi Daerah	1.985.280.000,00	1.986.759.000,00	1.479.000,00	100,07 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	- %
BELANJA	11.349.194.417,00	9.467.309.873,00	(1.881.884.544,00)	83,41 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82 %
Belanja Pegawai	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82 %
BELANJA LANGSUNG	6.504.207.354,00	4.872.959.675,00	(1.631.247.679,00)	74,92 %
Program Administrasi Perkantoran	2.237.582.654,00	1.668.959.250,00	(568.623.404,00)	74,58 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.517.592.000,00	1.376.813.625,00	(140.778.375,00)	90,72 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	98.014.000,00	96.614.000,00	(1.400.000,00)	98,57 %
Program Pendidikan Penjurangan	1.699.759.300,00	1.022.133.500,00	(677.625.800,00)	60,13 %
Program Pendidikan Teknis Fungsional	474.663.900,00	247.083.100,00	(227.580.800,00)	52,05 %
Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	48.521.500,00	44.184.500,00	(4.337.000,00)	91,06 %
Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	228.074.000,00	222.591.700,00	(5.482.300,00)	97,59 %
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.000.000,00	194.580.000,00	(5.420.000,00)	97,29 %

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015. Perubahan tersebut antara lain penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Terjadinya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 merupakan kejadian luar biasa yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemda DIY menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 427/KEP/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan. Adapun secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
 - e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.
 - e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
 - 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
 - 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas.**

h. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening KasDaerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

i. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.

- c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
 - 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
 - 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
 - 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 - 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
 - 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 - 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau

	<ul style="list-style-type: none"> c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
--	--

b) **Kualitas Piutang Retribusi:**

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

c) **Kualitas Piutang Lainnya:**

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

d) **Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:**

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

e) **Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.**

j. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja

- f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
- g) Belanja Barang Dana BOS
- h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
- j) Belanja Hibah Barang/Jasa
- k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa

Dalam Penyajian Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga terdapat penyesuaian klasifikasi atas saldo awal persediaan.

1. Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
3. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
4. Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
5. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
6. Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan, perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

k. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat

menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a. Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b. Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat

direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

- 16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

- 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

I. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/

nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya persiapan tempat.
- b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.

- c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah
 - 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
 - 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
 - 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
 - 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

m. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
 - h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
 - i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara

memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

n. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

o. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
 - d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
 - e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjam-pakaikan.
 - f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
 - g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

p. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tersebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan franchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi software, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
 - b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
 - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
 - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
 - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- d) Software diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- e) Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- 7) Pengukuran Aset Tak Berwujud
- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB

tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.
- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas**
- Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.
- b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas**
- ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami

penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

q. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan

atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
 - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga

disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

s. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

t. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

u. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian,

pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

v. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:

- a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
- a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.

- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU.
- 2) Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- 3) Pengungkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat
- 4) Bencana Covid-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penganggaran, penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa atas Realisasi Belanja Tidak Terduga

- 1) Pengakuan Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang di dalamnya terdapat kejadian luar biasa.
- 2) Pengukuran Beban Luar biasa sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir out put Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan aset tetap/aset lainnya.
- 3) Persediaan dan aset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas COVID-19

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Luar Biasa-LO
- 2) Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD.
- 3) Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD
- 4) Pendapatan dan Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional BPBD
- 5) Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD.

d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD.
- 2) Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan aset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh.
- 3) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD.
- 4) Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	2020	2019
5.1.1 Pendapatan-LRA	Rp5.611.510.924.299,71	Rp5.699.357.232.440,50

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93 realisasi sebesar Rp5.611.510.924.299,71 atau 100,96%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp87.846.308.140,79 atau 1,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.699.357.232.440,50. Penurunan tersebut merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp1.876.706.829.354,71	Rp2.082.795.334.434,50
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.799.932.971.064,54 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206.088.505.079,79 atau 9,89% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.082.795.334.434,50 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pajak Daerah	Rp1.646.559.198.863,00	Rp1.773.940.604.572,00
------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.596.879.866.993,00 dan realisasi sebesar Rp1.646.559.198.863,00 atau 103,11%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp127.381.405.709,00 atau 7,18% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.773.940.604.572,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	796.300.000.000,00	846.892.566.900,00	106,35	814.539.876.400,00
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	317.500.000.000,00	333.512.489.000,00	105,04	491.573.238.800,00
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	222.968.971.700,00	225.462.302.459,00	101,12	276.358.776.194,00
d	Pajak Air Permukaan	1.166.079.000,00	1.328.837.075,00	113,96	1.212.766.300,00
e	Pajak Rokok	258.944.816.293,00	239.363.003.429,00	92,44	190.255.946.878,00
	Jumlah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	103,11	1.773.940.604.572,00

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 103,11%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp239.363.003.429,00 atau 92,44%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat sebesar 37,5% dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.

B. Retribusi Daerah	Rp36.546.077.142,71	Rp42.420.048.683,08
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp32.999.671.755,00 dan realisasi sebesar Rp36.546.077.142,71 atau 110,75%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.873.971.540,37 atau 13,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp42.420.048.683,08. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
2	Retribusi Daerah				
a	Retribusi Jasa Umum	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08
b	Retribusi Jasa Usaha	24.643.670.755,00	27.371.265.258,00	111,07	30.816.533.938,00
c	Retribusi Perijinan Tertentu	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00
	Jumlah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	110,75	42.420.048.683,08

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp7.963.681.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.664.796.884,71 atau 108,80% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Retribusi Jasa Umum				
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	64.766.000,00	72.875.000,00	112,52	-
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	4.997.280.884,71	113,86	4.726.190.745,08
3)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	839.782.000,00	100,55	-
4)	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.674.775.000,00	2.754.859.000,00	102,99	6.652.434.000,00
	Jumlah	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp64.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.875.000,00 atau 112,52% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.388.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.997.280.884,71 atau 113,86% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp271.090.139,63 atau 5,42% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.726.190.745,08.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp2.674.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.754.859.000,00 atau 102,99%. Retribusi Pelayanan Pendidikan mencapai target, namun realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.897.575.000,00 atau 58,59% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp6.652.434.000,00 yang disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan sebesar Rp1.776.305.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp120.700.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp120.700.000,00;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp657.680.000,00 atau 113,57% dari anggaran sebesar Rp579.075.000,00;
- 3) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.976.479.000,00 atau 110,07% dari anggaran sebesar Rp1.975.000.000,00.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp24.643.670.755,00 dan realisasi sebesar Rp27.371.265.258,00 atau 111,07% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
b	Retribusi Jasa Usaha				
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.574.964.755,00	5.447.360.848,00	119,07	15.418.152.858,00
2)	Retribusi Terminal	375.827.000,00	445.917.000,00	118,65	-
3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	285.615.000,00	372.127.000,00	130,29	238.167.000,00
4)	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	194.165.000,00	191.675.000,00	98,72	739.835.000,00
5)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	79.355.000,00	81.191.500,00	102,31	47.652.500,00
6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	75.517.000,00	100.645.500,00	133,28	320.135.500,00
7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.058.227.000,00	20.732.348.410,00	108,78	14.052.591.080,00
	Jumlah	24.643.670.755,00	27.371.265.258,00	111,07	30.816.533.938,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.574.964.755,00 dan realisasi sebesar Rp5.447.360.848,00 atau 119,07%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.970.792.010,00 atau 64,67% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp15.418.152.858,00. Rincian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.447.360.848,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.033.823.500,00 atau 119,94% dari anggaran sebesar Rp861.983.500,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp309.105.000,00 atau 135,09% dari anggaran sebesar Rp228.813.000,00;
- 3) Dinas Sosial sebesar Rp532.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp532.200.000,00;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.580.040.000,00 atau 144,62% dari anggaran sebesar Rp1.092.525.000,00;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp118.748.500,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp122.591.000,00;
- 6) Dinas Perhubungan sebesar Rp153.851.200,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp153.851.200,00;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.350.000,00 atau 150% dari anggaran sebesar Rp900.000,00;
- 8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.700.000,00 atau 104,44% dari anggaran sebesar Rp4.500.000,00;
- 9) Dinas Kebudayaan sebesar Rp326.000.000,00 atau 106,54% dari anggaran sebesar Rp306.000.000,00;
- 10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp152.794.300,00 atau 124,22% dari anggaran sebesar Rp123.000.000,00;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.690.000,00 atau 71,73% dari anggaran sebesar Rp26.055.000,00;
- 12) Dinas Pariwisata sebesar Rp26.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp26.000.000,00;
- 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp175.254.820,00 atau 122,28% dari anggaran sebesar Rp143.321.180,00;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp168.441.496,00 atau 118,45% dari anggaran sebesar Rp142.200.000,00;
- 15) Sekretariat Daerah sebesar Rp41.700.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp41.700.000,00;
- 16) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp54.000.000,00 atau 94,08% dari anggaran sebesar Rp57.400.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Daerah tidak mencapai target karena penggunaan pendopo sebagian besar merupakan kegiatan internal Pemda DIY sehingga tidak dipungut retribusi;
- 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp736.782.032,00 atau 105,55% dari anggaran sebesar Rp698.044.875,00;
- 18) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp3.600.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00;
- 19) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.280.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.280.000,00.

Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp375.827.000,00 dan realisasi sebesar Rp445.917.000,00 atau 118,65% merupakan penerimaan dari pengelolaan terminal pada Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp285.615.000,00 dan realisasi sebesar Rp372.127.000,00 atau 130,29%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp133.960.000,00 atau 56,25% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp238.167.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp194.165.000,00 dan realisasi sebesar Rp191.675.000,00 atau 98,72%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp548.160.000,00 atau 74,09% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp739.835.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp191.675.000,00 dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp30.690.000,00 atau 49,29% dari anggaran sebesar Rp62.260.000,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp16.350.000,00 atau 90,83% dari anggaran sebesar Rp18.000.000,00;
- 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.540.000,00 atau 67,11% dari anggaran sebesar Rp6.765.000,00;
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.200.000,00 atau 70,00% dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00;
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.420.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.420.000,00;
- 6) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp133.475.000,00 atau 135,21% dari anggaran sebesar Rp98.720.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp79.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.191.500,00 atau 102,31% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai). Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp33.539.000,00 atau 70,38% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp47.652.500,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp75.517.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.645.500,00 atau 133,28%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp219.490.000,00 atau 68,35% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp320.135.500,00. Rincian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.541.000,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp15.107.000,00;
- 2) Dinas Kebudayaan (Museum Negeri Sonobudoyo) sebesar Rp87.104.500,00 atau 144,19% dari anggaran sebesar Rp60.410.000,00.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp19.058.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.732.348.410,00 atau 108,78% terdiri dari:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp6.964.331.962,00 atau 134,58% dari anggaran sebesar Rp5.175.000.000,00;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.074.236.879,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp11.790.715.000,00;
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp724.041.900,00 atau 101,64% dari anggaran sebesar Rp712.370.000,00;
- 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.918.392.000,00 atau 143,15% dari anggaran sebesar Rp1.340.142.000,00;
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp51.345.669,00 atau 128,36% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp392.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp510.015.000,00 atau 130,00% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
c	Retribusi Perijinan Tertentu				
1)	Retribusi Izin Trayek	72.220.000,00	77.580.000,00	107,42	55.530.000,00
2)	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00	825.000,00	91,67	1.250.000,00
3)	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	319.200.000,00	431.610.000,00	135,22	168.110.000,00
	Jumlah	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp72.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.580.000,00 atau 107,42%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.050.000,00 atau sebesar 39,71% dibanding tahun 2019 sebesar Rp55.530.000,00.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp900.000,00 dan realisasi sebesar Rp825.000,00 atau sebesar 91,67%. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp825.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp425.000,00 atau 34% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak mencapai target karena Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY nomor 13 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 untuk Kapal dengan berat 11 - 30 GT untuk SIUP, SIPI, SIKPI berlaku 1 Tahun dan karena Izin Usaha Budidaya ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah yang Lintas Kabupaten Kota sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada yang mengajukan Izin.
- 3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp319.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp431.610.000,00 atau 135,22%. Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA Tahun 2020 sebesar Rp431.610.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp263.500.000,00 atau 156,74% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp168.110.000,00. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan Tenaga Kerja Asing tidak bisa keluar dari Indonesia.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp101.460.382.151,46** **Rp85.960.824.196,14**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.460.382.142,49 dan realisasi sebesar Rp101.460.382.151,46 atau 100,00% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.499.557.955,32 atau 18,03% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp85.097.737.606,37. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
a	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	101.361.064.131,49	101.361.064.140,46	100,00	85.712.083.865,14
-	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	6.025.001.568,23	6.025.001.568,20	100,00	5.303.393.448,55
b	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	99.318.011,00	99.318.011,00	100,00	248.740.331,00
	Jumlah	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	100,00	85.960.824.196,14

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.361.064.131,49 dan realisasi sebesar Rp101.361.064.131,49 atau 100,00%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dianggarkan sebesar Rp95.336.062.563,26 dan terealisasi sebesar Rp95.336.062.572,26 atau 100,00% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	148.697.623,00	148.697.632,00	100,00	925.083.150,00
b	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	94.001.713.614,26	94.001.713.614,26	100,00	78.265.128.516,59
c	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT AMI)	1.185.651.326,00	1.185.651.326,00	100,00	1.218.478.750,00
	Jumlah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp14.927.372.155,67 atau 18,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp80.408.690.416,59.

- 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp6.025.001.568,23 dan terealisasi sebesar Rp6.025.001.568,23 atau 100,00% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp6.025.001.568,23 mengalami kenaikan sebesar Rp721.608.119,65 atau 13,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.303.393.448,55.
- 3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp99.318.011,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah **Rp92.141.171.197,54** **Rp180.473.856.983,28**

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp68.593.050.174,05 dan realisasi sebesar Rp92.141.171.197,54 atau 134,33%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.332.685.785,74 atau 48,94% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp180.473.856.983,28. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
a	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	429.751.000,00	1.007.048.156,00	234,33	3.174.920.651,00
b	Hasil Penjualan Aset Lainnya	8.953.000,00	8.941.000,00	99,87	178.100.000,00
c	Penerimaan Jasa Giro	7.378.215.717,50	21.541.249.683,40	291,96	9.006.551.720,00
d	Pendapatan Bunga	2.893.678.761,62	4.401.193.283,62	152,10	39.722.801.016,36
e	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	9.475.000,00	10.475.000,00	110,55	16.000.000,00
f	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	243.262.260,00	452.947.912,00	186,20	642.117.279,00
g	Pendapatan Denda Pajak	15.922.682.700,00	15.922.682.700,00	100,00	65.004.005.050,00
h	Pendapatan Denda Retribusi	1.638.230,00	5.355.130,00	326,89	4.781.310,00
i	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	13.508.000,00	34.978.000,00	258,94	7.396.500,00
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	68.000.000,00	-	-
k	Pendapatan dari Pengembalian	340.173.744,00	552.597.840,00	162,45	405.626.222,00
l	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.682.691.125,00	3.145.862.119,00	117,27	3.007.830.893,00
m	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	35.743.006.079,00	38.945.105.715,00	108,96	42.977.401.298,22
n	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.926.014.556,93	6.044.734.658,52	206,59	16.326.325.043,70
	Jumlah	68.593.050.174,05	92.141.171.197,54	134,33	180.473.856.983,28

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp429.751.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.007.048.156,00 atau 234,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	525.929.467,00	350,62
b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	61.302.989,00	35,03
c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	104.751.000,00	419.815.700,00	400,77
	Jumlah	429.751.000,00	1.007.048.156,00	234,33

Penjelasan:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp525.929.467,00 atau 350,62% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.302.989,00 atau 35,03% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp104.751.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.815.700,00 atau 400,77% merupakan hasil lelang penjualan hasil pertanian dan hasil kehutanan.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.953.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.941.000,00 atau 99,87% merupakan hasil penjualan drum bekas sebesar Rp5.592.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan penjualan penebangan pohon sebesar Rp3.349.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp7.378.215.717,50 dan realisasinya sebesar Rp21.541.249.683,40 atau 291,96% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp6.827.680.736,50 dan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp550.534.981,00.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp2.893.678.761,62 realisasi sebesar Rp4.401.193.283,62 atau 152,10% meliputi Pendapatan bunga deposito sebesar Rp4.301.268.283,62 dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp99.925.000,00. Rincian Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp4.401.193.283,62 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank BPD sebesar Rp1.925.000.000,00
- 2) Bank BNI sebesar Rp438.684.931,00
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp307.397.260,28
- 4) Bank BTN sebesar Rp850.684.931,50
- 5) Bank BRI sebesar Rp718.082.140,00
- 6) Bank Mandiri Syariah sebesar Rp61.419.020,84
- 7) Dana Bergulir sebesar Rp99.925.000,00

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp9.475.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp10.475.000,00 atau 110,55% merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp243.262.260,00 dan direalisasikan sebesar Rp452.947.912,00 atau 186,20%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp15.922.682.700,00 dan realisasi sebesar Rp15.922.682.700,00 atau 100,00%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.053.479.700,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp869.203.000,00. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.081.322.350,00 atau 75,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp65.004.005.050,00 karena adanya kebijakan Pemda DIY untuk membebaskan denda pajak sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.638.230,00 dan realisasi sebesar Rp5.355.130,00 atau 326,89%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada BPKA. Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp573.820,00 atau 12,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.781.310,00.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Pendapatan Denda atas pelanggaran Perda Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp13.508.000,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp34.978.000,00 terdiri dari Denda atas Pelanggaran Perda sebesar Rp15.317.000,00, Denda Dana Bergulir sebesar Rp5.500.000,00 dan Denda Pembayaran Kontribusi Tetap dari PT. YIS sebesar Rp14.161.000,00.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak dianggarkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp68.000.000,00 berupa setoran jaminan pelaksanaan dari CV. Wahana karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp340.173.744,00 dan direalisasikan sebesar Rp552.597.840,00 atau 162,45%. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebesar Rp295.877.638,00;
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp19.294.718,00;
- 3) Pengembalian dari Pengembalian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp56.598.100,00;
- 4) Pengembalian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp180.827.384,00.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.682.691.125,00 dan realisasi sebesar Rp3.145.862.119,00 atau 117,27%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian:

Tabel 5.10

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Sewa Tanah dan Bangunan	649.430.000,00	841.680.000,00	129,60
2	Sewa Lahan	788.100.000,00	1.031.584.630,00	130,90
3	Sewa Tempat/Ruangan	-	136.364,00	-
4	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	403.917.625,00	403.917.625,00	100,00
5	Sewa Bangunan untuk Kantin	-	7.450.000,00	-
6	Sewa Bangunan untuk Foto Copy	2.400.000,00	2.600.000,00	108,33
7	Jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja	-	15.150.000,00	-
8	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	1.580.750,00	1.580.750,00	100,00
9	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	4.262.750,00	4.262.750,00	100,00
10	Pengelolaan PT. YIS	833.000.000,00	833.000.000,00	100,00
11	Sewa komputer	-	4.500.000,00	-
Jumlah		2.682.691.125,00	3.145.862.119,00	117,27

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp35.743.006.079,00 dan realisasi sebesar Rp38.945.105.715,00 atau 108,96%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.032.295.583,22 atau 9,38% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2019 yaitu sebesar 42.977.401.298,22. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	RS Jiw a Grhasia	17.846.160.000,00	18.656.156.571,00	104,54
2	RS Paru Respira	10.400.000.000,00	11.755.363.058,00	113,03
3	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	4.258.398.892,00	5.499.852.228,00	129,15
4	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	37.800.000,00	48.217.638,00	127,56
5	Balai Pelatihan Kesehatan	1.945.355.585,00	1.523.156.103,00	78,30
6	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50
Jumlah		35.743.006.079,00	38.945.105.715,00	108,96

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.945.355.585,00 dan realisasi sebesar Rp1.523.156.103,00 atau sebesar 78,30% dari anggaran, tidak mencapai target karena penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.926.014.556,93 dan direalisasikan sebesar Rp6.001.203.367,52 atau 205,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	2.926.014.556,93	5.451.385.185,52	186,31
2	Sewa Ruang di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)	-	549.818.182,00	-
3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Galeri Pasar Kota Gede YIA	-	43.531.291,00	-
Jumlah		2.926.014.556,93	6.044.734.658,52	206,59

Penjelasan:

- 1) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.926.014.556,93 dan direalisasikan sebesar Rp5.451.385.185,52 atau 186,31% merupakan penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	552.551.676,93	552.551.676,86	100,00
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan	2.335.962.880,00	4.201.795.416,66	179,87
3	Surat Keterangan Asal Ikan	2.500.000,00	2.845.000,00	113,80
4	Pembuatan STNK Baru	35.000.000,00	32.459.000,00	92,74
5	Lain-Lain	-	661.734.185,52	-
Jumlah		2.926.014.556,93	5.451.385.279,04	186,31

Realisasi penerimaan “Lain-lain” pada Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp661.734.092,00 berasal dari penerimaan yang tidak bisa masuk ke dalam salah satu kategori rekening pendapatan yang ada.

- 2) Sewa Ruang di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) sebesar Rp549.818.182,00 merupakan penerimaan pemanfaatan Galeri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Pasar Kotagede Yogyakarta Internasional Airport (YIA) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119/03010 dan 0195/8811/2020. Pengelolaan Galeri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Pasar Kotagede Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
- 3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Galeri Pasar Kota Gede YIA sebesar Rp43.531.291,00 merupakan setoran sisa omset di Galeri Pasar Kota Gede YIA.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp3.726.454.595.432,00 Rp3.608.013.435.006,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.750.658.573.728,39,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.726.454.595.432,00 atau 99,35%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.726.703.168.232,00 mengalami kenaikan sebesar Rp118.441.160.426,00 atau sebesar 3,28% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp3.608.013.435.006,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
a	Bagi Hasil Pajak	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00
c	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.234.516.326.000,00	1.227.647.676.000,00	99,44	1.351.102.020.000,00
d	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	98,87	978.540.310.453,00
	Jumlah	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	98,99	2.385.702.912.253,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
a	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
b	Dana Keistimewaan	1.286.576.228.221,39	1.286.576.228.221,00	100,00	1.162.772.688.443,00
c	Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	68.053.994.000,00	100,00	58.831.799.000,00
	Jumlah	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00	100,00	1.221.604.487.443,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Atau Daerah - Lainnya				
a	Bantuan Keuangan	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	3.750.658.573.728,39	3.726.454.595.432,00	99,35	3.608.013.435.006,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp119.819.807.501,00 dan realisasi sebesar Rp114.252.471.928,00 atau 95,35%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp58.216.797.728,00 atau 103,89% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 yaitu sebesar Rp56.035.674.200,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	113.213.216.271,00	108.979.914.503,00	96,26	49.099.528.200,00
b	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.895.404.028,00	3.591.562.731,00	92,20	5.210.616.000,00
c	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.711.187.202,00	1.680.994.694,00	62,00	1.725.530.000,00
	Jumlah	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp31.627.168,00 dan realisasi sebesar Rp24.870.747,00 atau 78,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	28.446.925,00	14.301.407,00	50,27	3.564.600,00
b	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	3.180.243,00	8.991.100,00	282,72	21.343.000,00
c	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	1.576.150,00	-	-
d	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	2.090,00	-	-
	Jumlah	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan dianggarkan sebesar Rp28.446.925,00 dan realisasi sebesar Rp14.301.407,00 atau 50,27%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp3.180.243,00 dan realisasi sebesar Rp21.343.000,00 atau sebesar 70,00% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.234.516.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.227.647.676.000,00 atau 99,44%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp123.454.344.000,00 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.351.102.020.000,00.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp1.040.880.571.648,00 dan realisasi Rp1.029.119.335.346,00 atau 98,87%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 mengalami

kenaikan sebesar Rp50.579.024.893,00 atau 5,17% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 yaitu sebesar Rp978.540.310.453,00. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Nonfisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan alokasi sebesar Rp129.630.558.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dengan alokasi sebesar Rp911.250.013.648,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp121.052.748.710,00 atau 90,94%. Realisasi penyaluran adalah sebesar nilai kontrak yang dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik				
a	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	-	32.602.401.800,00
b	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	5.764.880.000,00	2.652.397.000,00	46,01	3.191.700.000,00
c	DAK Bidang Kehutanan	-	-	-	1.839.973.253,00
d	DAK Bidang Kesehatan	7.527.698.000,00	5.860.796.287,00	77,86	13.851.677.824,00
e	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	627.342.000,00	547.052.500,00	87,20	1.862.375.634,00
f	DAK Bidang Pertanian	1.887.696.000,00	1.887.696.000,00	100,00	6.816.793.248,00
g	DAK Bidang Pendidikan	108.592.110.000,00	106.068.897.873,00	97,68	43.877.738.533,00
h	DAK Bidang Pariwisata	5.230.832.000,00	4.035.909.050,00	77,16	5.088.876.000,00
	Jumlah	129.630.558.000,00	121.052.748.710,00	93,38	109.131.536.292,00
2	DAK Non Fisik				
a	Bantuan Operasional Sekolah	658.475.159.396,00	651.878.420.000,00	99,00	613.489.389.988,00
b	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	-	-	-	3.499.929.176,00
c	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	-	-	-	1.187.151.950,00
d	Dana Tunjangan Profesi Guru	242.470.349.000,00	242.470.349.000,00	100,00	249.106.974.852,00
e	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.697.170.290,00	10.031.153.339,00	149,78	2.125.328.195,00
f	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.570.646.297,00	3.570.646.297,00	100,00	-
g	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	36.688.665,00	116.018.000,00	316,22	-
	Jumlah	911.250.013.648,00	908.066.586.636,00	99,65	869.408.774.161,00
	Jumlah	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	98,87	978.540.310.453,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan sebesar Rp911.250.013.648,00 dan realisasi sebesar Rp908.315.159.436,00 atau 99,68% antara lain Bantuan Operasional dengan anggaran sebesar Rp652.126.992.800,00 dan realisasi sebesar Rp651.878.420.000,00 atau 99%. Realisasi Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar Rp651.878.420.000,00 diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer BOS yang disampaikan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi BOS (Rp)
1	PROVINSI DIY	
	SMA Negeri	60.550.800.000,00
	SMK Negeri	75.337.920.000,00
	SLB Negeri	2.747.800.000,00

	Jumlah Negeri	138.636.520.000,00
	SMA Swasta	25.553.400.000,00
	SMK Swasta	66.475.200.000,00
	SLB Swasta	9.575.200.000,00
	Jumlah Swasta	101.603.800.000,00
	Jumlah	240.240.320.000,00
2	KOTA YOGYAKARTA	
	SD Negeri	17.973.360.000,00
	SMP Negeri	11.257.180.000,00
	SD Swasta	18.607.050.000,00
	SMP Swasta	11.078.370.000,00
	Jumlah	58.915.960.000,00
3	KABUPATEN BANTUL	
	SD Negeri	49.297.020.000,00
	SMP Negeri	27.114.340.000,00
	SD Swasta	17.425.080.000,00
	SMP Swasta	8.142.320.000,00
	Jumlah	101.978.760.000,00
4	KABUPATEN KULON PROGO	
	SD Negeri	26.989.410.000,00
	SMP Negeri	14.450.940.000,00
	SD Swasta	6.404.280.000,00
	SMP Swasta	3.294.110.000,00
	Jumlah	51.138.740.000,00
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	SD Negeri	42.257.760.000,00
	SMP Negeri	21.946.640.000,00
	SD Swasta	5.915.130.000,00
	SMP Swasta	6.075.470.000,00
	Jumlah	76.195.000.000,00
6	KABUPATEN SLEMAN	
	SD Negeri	53.891.100.000,00
	SMP Negeri	26.443.550.000,00
	SD Swasta	26.758.050.000,00
	SMP Swasta	16.316.940.000,00
	Jumlah	123.409.640.000,00
	Jumlah Total	651.878.420.000,00

Dana Keistimewaan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61 sehingga menjadi sebesar Rp1.286.576.228.221,39. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.286.576.228.221,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp68.053.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.053.994.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.222.195.000,00 atau 15,68% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2019 yaitu sebesar Rp58.831.799.000,00.

Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah

Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp780.019.190,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp91.448.260,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp105.140.870,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp583.430.060,00 (100%).

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp8.349.499.513,00 Rp8.548.463.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri serta Hibah dari Kelompok. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.533.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.349.499.513,00 atau 110,83%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp198.963.487,00 atau 2,33% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.548.463.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Hibah				
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
a	Rupiah Murni	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri				
a	Dealer Otomotif	3.584.000.000,00	3.006.443.000,00	83,89	4.667.663.000,00
b	Main Dealer	25.500.000,00	28.200.000,00	110,59	28.800.000,00
c	PT. Jasa Raharja	3.924.000.000,00	3.924.000.000,00	100,00	3.852.000.000,00
	Jumlah	7.533.500.000,00	6.958.643.000,00	92,37	8.548.463.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				
a	Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	110,83	8.548.463.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.349.499.513,00 merupakan penerimaan hibah dari Dealer Otomotif sebesar Rp3.006.443.000,00, Main Dealer sebesar Rp28.200.000,00, PT. Jasa Raharja sebesar Rp3.924.000.000,00 dan Sumbangan Kelompok

No.	Nama Penyumbang	Jumlah (Rp)
1	PT Bank Negara Indonesia	500.000.000,00
2	PT bank Rakyat Indonesia	350.000.000,00
3	PT Sari Husada	300.000.000,00
4	BUMD & BUKP DIY	200.000.000,00
5	Barahmus DIY	10.000.000,00
6	PT Bank Pembangunan Daerah	7.500.000,00
7	PT Bank Mandiri	3.096.000,00
8	PT Bank Syariah Mandiri	4.000.000,00
9	Pendaki	1.410.000,00
10	Perorangan	14.850.513,00
	Jumlah	1.390.856.513,00

Masyarakat/Perorangan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1.390.856.513,00. Rincian Sumbangan Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

5.1.2 Belanja **Rp4.347.344.000.359,04** **Rp4.523.871.348.582,31**

APBD DIY Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah untuk percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2020.

Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp4.767.282.153.598,35. Sampai dengan akhir Tahun 2020, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp4.347.344.000.359,04 atau 91,19%. Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp4.347.344.000.359,04 mengalami penurunan sebesar Rp176.527.348.223,27 atau 3,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.347.344.000.359,04. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun rincian anggaran dan belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi **Rp3.101.070.722.657,40** **Rp3.488.668.163.097,46**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.366.747.181.795,86 dan realisasi sebesar Rp3.101.070.722.657,40 atau 92,11%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp3.101.070.722.657,40 mengalami penurunan sebesar Rp387.597.440.440,06 atau 11,11% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.488.668.163.097,46. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai **Rp1.562.236.884.707,39** **Rp1.553.763.754.881,00**

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.630.034.458.720,15 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp98.507.330.130,15. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.562.236.884.707,39 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.478.736.504.396,39 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp83.500.380.311,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.473.129.826,39 atau 0,55% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.553.763.754.881,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.478.736.504.396,39 atau 96,55% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
I	Gaji dan Tunjangan				
a	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	727.915.094.758,00	694.268.754.825,00	33.646.339.933,00	95,38
b	Tunjangan Keluarga	56.891.691.953,00	52.885.141.977,00	4.006.549.976,00	92,96
c	Tunjangan Jabatan	12.730.808.404,00	12.008.289.000,00	722.519.404,00	94,32
d	Tunjangan Fungsional	35.974.646.250,00	34.630.413.000,00	1.344.233.250,00	96,26
e	Tunjangan Fungsional Umum	10.714.948.072,00	9.655.165.000,00	1.059.783.072,00	90,11
f	Tunjangan Beras	27.730.971.102,00	25.576.426.500,00	2.154.544.602,00	92,23
g	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.262.192.924,00	2.225.192.733,00	1.037.000.191,00	68,21
h	Pembulatan Gaji	18.769.966,00	7.484.577,00	11.285.389,00	39,88
i	Uang Paket	149.940.000,00	148.815.000,00	1.125.000,00	99,25
j	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	45.805.500,00	1.957.500,00	95,90
k	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	94.873.500,00	652.500,00	99,32
l	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00	51.156.000,00	261.000,00	99,49
m	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	9.722.250,00	1.500.750,00	86,63
n	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	94.090.500,00	47.654.250,00	46.436.250,00	50,65
o	Tunjangan Perumahan	13.761.600.000,00	13.658.600.000,00	103.000.000,00	99,25
p	Uang Jasa Pengabdian	33.300.000,00	2.250.000,00	31.050.000,00	6,76
q	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00
r	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	28.449.000,00	28.449.000,00	-	100,00
s	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	6.430.563.632,00	5.114.048.973,39	1.316.514.658,61	79,53
t	Tunjangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	48.583.966.441,00	42.402.641.465,00	6.181.324.976,00	87,28
u	Tunjangan Bahaya Radiasi	138.000.000,00	124.200.000,00	13.800.000,00	90,00
v	Tunjangan Reses	2.475.000.000,00	2.445.000.000,00	30.000.000,00	98,79
w	Tunjangan Transportasi	8.586.360.000,00	8.516.210.000,00	70.150.000,00	99,18
	Jumlah	956.086.322.002,00	904.306.293.550,39	51.780.028.451,61	94,58
II	Tambahan Penghasilan PNS				
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00	949.000.000,00	555.677.000,00	63,07
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	248.546.028.175,00	248.520.088.325,00	25.939.850,00	99,99
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	271.081.859.740,00	271.081.859.740,00	-	100,00
d	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	627.120.000,00	64.080.000,00	90,73
	Jumlah	521.823.764.915,00	521.178.068.065,00	645.696.850,00	99,88
III	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH				
a	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.825.000.000,00	75.000.000,00	99,24
b	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.589.000.000,00	2.589.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	12.489.000.000,00	12.414.000.000,00	75.000.000,00	99,40
IV	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
a	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
	Jumlah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
V	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
a	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	254.731.196,00	233.283.854,00	21.447.342,00	91,58
b	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	723.489.356,00	490.020.776,00	233.468.580,00	67,73
c	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	11.769.600,00	11.769.000,00	600,00	99,99
	Jumlah	989.990.152,00	735.073.630,00	254.916.522,00	74,25
	Jumlah	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	52.790.624.193,61	96,55

Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dan realisasi sebesar Rp1.478.739.504.396,39 atau 96,55%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp1.478.739.504.396,39,00 mengalami kenaikan sebesar Rp183.034.574.104,39 atau 14,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.295.701.930.292,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	26.197.849.196,00	96,73
2	Dinas Kesehatan	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	1.795.264.636,00	96,13
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	2.556.003.483,00	89,85
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	348.593.203,00	90,85
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.255.106.853,00	3.025.119.183,00	229.987.670,00	92,93
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	440.669.145,00	93,98
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	307.640.606,00	93,93
8	Dinas Sosial	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	2.196.449.153,00	90,45
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	591.558.454,00	95,52
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	150.331.992,00	94,75
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	1.299.068.406,00	94,42
12	Dinas Perhubungan	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	587.348.953,00	92,47
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	458.224.827,00	89,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	134.612.153,00	96,06
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	112.292.327,00	96,86
16	Dinas Kebudayaan	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	375.885.213,00	96,94
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	450.782.122,00	94,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	367.277.308,00	95,67
19	Dinas Pariwisata	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	229.715.145,00	94,95
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	1.002.553.657,00	96,03
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	575.298.451,00	93,14
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	17.995.851,00	99,36
23	Sekretariat Daerah	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	1.489.140.914,00	94,39
24	Badan Penghubung Daerah	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	760.877,00	99,97
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	1.342.288.926,00	96,66
26	Sekretariat DPRD	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	400.061.920,00	92,88
27	Inspektorat	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	118.539.369,00	98,07
28	Paniradya Kaistimewan	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	38.838.196,00	98,69
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	242.191.694,00	96,82
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	8.256.604.698,61	92,80
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	226.158.783,00	99,92
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	250.636.865,00	94,83
Jumlah		1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	52.790.624.193,61	96,55

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per OPD

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2020 sebesar Rp83.500.380.311,00 mengalami penurunan sebesar Rp174.561.444.278,00 atau 67,64% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2019 yaitu sebesar Rp258.061.824.589,00.

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.500.380.311,00 atau 84,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
a	Uang Lembur	-	-	-	-
b	Honorarium PNS	20.329.227.000,00	19.596.115.725,00	733.111.275,00	96,39
c	Honorarium Non PNS	56.612.132.140,00	53.211.130.868,00	3.401.001.272,00	93,99
d	Belanja Pegawai BLUD	20.441.866.990,15	9.678.748.718,00	10.763.118.272,15	47,35
e	Belanja Pegawai BOS	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	109.719.000,00	90,24
Jumlah		98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	15.006.949.819,15	84,77

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.091.488.880,00	13.635.073.140,00	456.415.740,00	96,76
2	Dinas Kesehatan	19.749.821.110,15	9.105.268.578,00	10.644.552.532,15	46,10
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	15.458.220.000,00	15.359.850.750,00	98.369.250,00	99,36
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	400.420.000,00	250.823.250,00	149.596.750,00	62,64
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.565.860.000,00	1.503.590.000,00	62.270.000,00	96,02
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.452.855.000,00	3.426.040.152,00	26.814.848,00	99,22
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	256.950.000,00	254.510.000,00	2.440.000,00	99,05
8	Dinas Sosial	4.578.090.000,00	4.298.050.000,00	280.040.000,00	93,88
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	578.930.000,00	493.870.000,00	85.060.000,00	85,31
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	120.010.000,00	113.195.000,00	6.815.000,00	94,32
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.517.546.700,00	4.369.265.546,00	148.281.154,00	96,72
12	Dinas Perhubungan	355.550.000,00	348.555.000,00	6.995.000,00	98,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	486.080.000,00	476.235.000,00	9.845.000,00	97,97
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	536.960.000,00	515.670.000,00	21.290.000,00	96,04
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	50.280.000,00	46.030.000,00	4.250.000,00	91,55
16	Dinas Kebudayaan	8.812.810.440,00	6.788.377.500,00	2.024.432.940,00	77,03
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	118.800.000,00	96.489.000,00	22.311.000,00	81,22
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	522.940.000,00	512.105.000,00	10.835.000,00	97,93
19	Dinas Pariwisata	153.420.000,00	134.394.400,00	19.025.600,00	87,60
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.721.025.000,00	3.583.428.750,00	137.596.250,00	96,30
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	463.580.000,00	458.475.000,00	5.105.000,00	98,90
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	3.117.930.000,00	2.895.035.000,00	222.895.000,00	92,85
24	Badan Penghubung Daerah	57.560.000,00	49.115.000,00	8.445.000,00	85,33
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	75.210.000,00	70.360.000,00	4.850.000,00	93,55
27	Inspektorat	5.192.948.000,00	5.089.459.475,00	103.488.525,00	98,01
28	Paniradya Kaistimewan	2.561.130.000,00	2.381.155.000,00	179.975.000,00	92,97
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.416.100.000,00	1.351.256.000,00	64.844.000,00	95,42
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.253.320.000,00	5.085.708.020,00	167.611.980,00	96,81
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	780.315.000,00	751.065.000,00	29.250.000,00	96,25
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	61.180.000,00	57.930.750,00	3.249.250,00	94,69
	Jumlah	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	15.006.949.819,15	84,77

B. Belanja Barang dan Jasa Rp707.629.279.470,01 Rp1.072.294.764.575,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp707.629.279.470,01 merupakan konversi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp782.824.429.433,01 dikurangi dengan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp67.677.202.052,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp7.517.947.911,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	86,50	1.219.154.114.509,46
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Masyarakat/Pihak Ketiga	(79.588.886.880,00)	(75.195.149.963,00)	94,48	(146.859.349.934,46)
a	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada	(70.689.402.000,00)	(67.677.202.052,00)	95,74	(96.417.920.031,46)
b	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada	(8.899.484.880,00)	(7.517.947.911,00)	84,48	(50.441.429.903,00)
	Jumlah	825.442.864.767,71	707.629.279.470,01	85,73	1.072.294.764.575,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp905.031.751.647,71 dan realisasi sebesar Rp782.830.947.893,01 atau 86,50%. Realisasi Belanja

Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp436.323.166.616,45 atau 35,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.219.154.114.509,46. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.677.843,00	19.488.864.840,00	1.135.813.003,00	94,49
2	Belanja Bahan/Material	72.181.497.829,18	63.498.920.943,00	8.682.576.886,18	87,97
3	Belanja Jasa Kantor	235.752.941.524,39	211.118.527.592,00	24.634.413.932,39	89,55
4	Belanja Premi Asuransi	1.303.627.200,00	1.232.049.442,00	71.577.758,00	94,51
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.638.956.415,00	15.641.565.381,00	1.997.391.034,00	88,68
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.955.961.330,23	20.294.260.476,00	1.661.700.854,23	92,43
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.668.683.887,00	5.218.149.047,00	1.450.534.840,00	78,25
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.541.710.500,00	2.625.071.300,00	1.916.639.200,00	57,80
9	Belanja Sewa Alat Berat	815.970.000,00	686.500.800,00	129.469.200,00	84,13
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.791.152.000,00	7.971.790.911,00	2.819.361.089,00	73,87
11	Belanja Makanan dan Minuman	37.767.103.700,00	32.863.848.500,00	4.903.255.200,00	87,02
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	719.305.000,00	689.710.000,00	29.595.000,00	95,89
13	Belanja Pakaian Kerja	2.811.342.000,00	2.596.892.750,00	214.449.250,00	92,37
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.217.612.250,00	3.059.712.850,00	157.899.400,00	95,09
15	Belanja Perjalanan Dinas	52.307.382.734,00	31.013.363.323,00	21.294.019.411,00	59,29
16	Belanja Pemeliharaan	47.069.947.711,00	44.570.085.445,01	2.499.862.265,99	94,69
17	Belanja Jasa Konsultansi	35.665.630.551,00	33.655.752.775,00	2.009.877.776,00	94,36
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.066.580.000,00	1.984.630.000,00	81.950.000,00	96,03
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.205.052.000,00	1.014.977.352,00	190.074.648,00	84,23
20	Honorarium PNS (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber)	26.070.264.500,00	21.570.564.500,00	4.499.700.000,00	82,74
21	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.040.084.160,00	4.266.200.000,00	773.884.160,00	84,65
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.799.307.573,91	59.250.219.679,00	28.549.087.894,91	67,48
23	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	3.012.199.948,00	95,74
24	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	1.381.536.969,00	84,48
25	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.433.024.059,00	99.582.403.024,00	7.850.621.035,00	92,69
26	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.650.000.000,00	1.536.600.000,00	113.400.000,00	93,13
27	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.224.700.000,00	22.092.740.000,00	131.960.000,00	99,41
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	120.350.000,00	112.397.000,00	7.953.000,00	93,39
Jumlah		905.031.751.647,71	782.830.947.893,01	122.200.803.754,70	86,50

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	290.117.633.766,00	272.592.462.076,00	17.525.171.690,00	93,96
2	Dinas Kesehatan	100.075.138.465,14	69.368.057.160,00	30.707.081.305,14	69,32
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	80.088.758.444,00	68.781.562.892,01	11.307.195.551,99	85,88
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.484.708.888,00	5.318.058.638,00	1.166.650.250,00	82,01
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.550.320.500,00	2.917.434.105,00	632.886.395,00	82,17
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.334.352.100,00	3.190.101.227,00	144.250.873,00	95,67
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.444.206.387,00	9.078.990.859,00	(634.784.472,00)	107,52
8	Dinas Sosial	38.099.473.181,11	34.553.596.455,00	3.545.876.726,11	90,69
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.339.242.970,00	8.357.634.018,00	981.608.952,00	89,49
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4.382.922.940,00	4.027.191.903,00	355.731.037,00	91,88
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.455.633.217,00	17.303.537.869,00	2.152.095.348,00	88,94
12	Dinas Perhubungan	14.870.529.614,00	13.442.927.470,00	1.427.602.144,00	90,40
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.941.536.500,00	14.989.858.968,00	951.677.532,00	94,03
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.355.670.778,00	12.134.854.261,00	1.220.816.517,00	90,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.049.245.249,00	1.779.067.001,00	270.178.248,00	86,82
16	Dinas Kebudayaan	86.165.755.182,00	74.513.722.438,00	11.652.032.744,00	86,48
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.919.556.819,00	13.357.879.087,00	561.677.732,00	95,96
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.450.520.110,00	11.735.919.250,00	714.600.860,00	94,26
19	Dinas Pariwisata	12.114.016.250,00	7.849.267.490,00	4.264.748.760,00	64,79
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.237.800.413,46	12.188.514.615,00	1.049.285.798,46	92,07
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.338.654.280,00	8.411.818.198,00	926.836.082,00	90,08
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	27.631.443.893,00	20.799.895.806,00	6.831.548.087,00	75,28
24	Badan Penghubung Daerah	1.936.149.000,00	1.750.551.072,00	185.597.928,00	90,41
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	65.359.551.111,00	48.374.713.497,00	16.984.837.614,00	74,01
27	Inspektorat	1.980.028.000,00	1.669.950.981,00	310.077.019,00	84,34
28	Paniradya Kaistimewan	4.349.329.650,00	3.884.458.825,00	464.870.825,00	89,31
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.469.396.170,00	5.136.855.056,00	1.332.541.114,00	79,40
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	25.283.830.950,00	23.352.493.357,00	1.931.337.593,00	92,36
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	9.417.601.466,00	7.766.095.934,00	1.651.505.532,00	82,46
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5.788.745.354,00	4.196.958.925,00	1.591.786.429,00	72,50
	Jumlah	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	122.207.322.214,70	86,50

C. Belanja Bunga

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

D. Belanja Subsidi

Rp78.044.846.317,00

Rp76.067.609.352,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp78.044.866.828,00 dan realisasi sebesar Rp78.044.846.317,00 atau sebesar 100%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat (1) Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

E. Belanja Hibah**Rp744.149.764.252,00****Rp735.398.604.386,46**

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 sebesar Rp744.398.337.052,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp676.472.562.200,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp67.677.202.052,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp8.751.159.865,54 atau 1,19% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp735.398.604.386,46.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD sebesar Rp751.144.104.600,00 dan realisasi sebesar Rp676.472.562.200,00 atau 90,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Hibah Urusan Pendidikan	619.021.710.000,00	559.513.725.000,00	59.507.985.000,00	90,39
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
3	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00	417.500.000,00	-	100,00
4	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	968.800.000,00	968.800.000,00	-	100,00
5	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00
6	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00	2.185.000.000,00	-	100,00
7	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	805.866.000,00	557.508.600,00	248.357.400,00	69,18
8	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	259.000.000,00	-	100,00
9	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	1.000.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	40,00
10	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	40,00
11	Hibah Untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.315.200.000,00	-	5.315.200.000,00	-
12	Hibah Urusan Keistimewaan	102.460.490.600,00	102.460.490.600,00	-	100,00
13	Hibah kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	-	100,00
Jumlah		751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	74.671.542.400,00	90,06

Penjelasan Belanja Hibah (Uang) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp619.021.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp559.762.297.800,00 atau 90,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	BOSNAS DIKDAS/SM	527.270.960.000,00	513.241.900.000,00	14.029.060.000,00	97,34
2	BOSDA SM SWASTA (Sekolah)	43.325.590.000,00	27.666.825.000,00	15.658.765.000,00	63,86
3	BOSDA SLB (Sekolah)	5.760.160.000,00	5.143.000.000,00	617.160.000,00	89,29
Kelembagaan:					
4	Lembaga Orang Tua Asuh	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5	Kwarda DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
6	KONI DIY	29.000.000.000,00	8.997.000.000,00	20.003.000.000,00	31,02
7	NPC DIY	12.500.000.000,00	3.400.000.000,00	9.100.000.000,00	27,20
8	Dewan Pendidikan DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
9	PGRI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
10	KNPI DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
Jumlah		618.921.710.000,00	559.513.725.000,00	59.407.985.000,00	90,40

Penjelasan:

Hibah Urusan Pendidikan BOSNAS DIKDAS/SM merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta serta Satuan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp527.270.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp513.241.900.000,00 atau 97,34% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi BOS (Rp)
1	PROVINSI DIY	
	SMA Swasta	25.553.400.000,00
	SMK Swasta	66.475.200.000,00
	SLB Swasta	9.575.200.000,00
	Jumlah	101.603.800.000,00
2	KOTA YOGYAKARTA	
	SD Negeri	17.973.360.000,00
	SMP Negeri	11.257.180.000,00
	SD Swasta	18.607.050.000,00
	SMP Swasta	11.078.370.000,00
	Jumlah	58.915.960.000,00
3	KABUPATEN BANTUL	
	SD Negeri	49.297.020.000,00
	SMP Negeri	27.114.340.000,00
	SD Swasta	17.425.080.000,00
	SMP Swasta	8.142.320.000,00
	Jumlah	101.978.760.000,00
4	KABUPATEN KULON PROGO	
	SD Negeri	26.989.410.000,00
	SMP Negeri	14.450.940.000,00
	SD Swasta	6.404.280.000,00
	SMP Swasta	3.294.110.000,00
	Jumlah	51.138.740.000,00
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	SD Negeri	42.257.760.000,00
	SMP Negeri	21.946.640.000,00
	SD Swasta	5.915.130.000,00
	SMP Swasta	6.075.470.000,00
	Jumlah	76.195.000.000,00
6	KABUPATEN SLEMAN	
	SD Negeri	53.891.100.000,00
	SMP Negeri	26.443.550.000,00
	SD Swasta	26.758.050.000,00
	SMP Swasta	16.316.940.000,00
	Jumlah	123.409.640.000,00
	Jumlah Total	513.241.900.000,00

Hibah Urusan Pendidikan berupa BOSDA SM Swasta merupakan hibah BOSDA yang bersumber dari APBD DIY yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dengan anggaran sebesar Rp43.325.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.666.825.000,00 atau 63,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Hibah BOSDA

No.	Uraian	Gelombang 1 (Rp)	Gelombang 2 (Rp)	Gelombang 3 (Rp)
1	Kota Yogyakarta	2.723.000.000,00	1.231.475.000,00	3.954.475.000,00
2	Kabupaten Bantul	3.661.500.000,00	2.166.050.000,00	5.827.550.000,00
3	Kabupaten Kulon Progo	3.133.300.000,00	349.000.000,00	3.482.300.000,00
4	Kabupaten Gunungkidul	5.510.475.000,00	1.813.750.000,00	7.324.225.000,00
5	Kabupaten Sleman	4.397.550.000,00	2.680.725.000,00	7.078.275.000,00
Jumlah		19.425.825.000,00	8.241.000.000,00	27.666.825.000,00

Hibah BOS SLB dianggarkan sebesar Rp5.760.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.143.000.000,00 atau 89,29% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan, Pembinaan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga dianggarkan direalisasikan untuk Lembaga Orang Tua Asuh, Kwarda DIY, KONI DIY, NPC DIY, Dewan Pendidikan DIY, PGRI DIY dan KNPI DIY. Hibah untuk KONI dan NPC DIY terdapat sisa hibah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dikarenakan kegiatan tidak jadi dilaksanakan pada Tahun 2020 sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19.

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Palang Merah Indonesia (PMI) DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
2	Komisi Penanggulangan AIDS DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
Jumlah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00

3) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp417.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp417.500.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Penerima Hibah Urusan Sosial

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
I	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial				
a	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
b	Rumah Singgah HAFARA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
c	Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
d	Yayasan Anak Mandiri	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
e	Yayasan Rumah Impian Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
f	PA Rumah Anak Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
g	LKS Indria-Nati	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
h	Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
i	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	92.500.000,00	92.500.000,00	-	100,00
II	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin				
a	KOMDA LU DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
III	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
a	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial "BK3S" DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
b	Karang Taruna DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
c	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	417.500.000,00	417.500.000,00	-	100,00

4) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp968.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp968.800.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
I	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
a	Sejahtera Jaya, Kricak Tegalrejo Yogyakarta	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
b	Prima jati, Jatimulyo Dlingo Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
c	Wilis Makmur, Hargowilis Kokap Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
d	Gading Mas, Srigading Sanden Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
e	Srikandi Mataram, Margodadi Seyegan Sleman	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
f	Putri Mandiri, Terbah Patuk Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
g	Lancar Berkah, Srikayangan Sentolo Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
h	Perjius, Planjan Saptosari Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
i	Panggung Makmur, Panggunharjo Sewon Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
j	Gilang Lestari, Gilangharjo Pandak Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
k	Dullor Subur, Sabdodadi Bantul Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
l	Ngudi Mukti, Karangtengah Imogiri Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
m	Berkah Indah, Glagah Temon Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
n	Wanita Tama, Getas Playen Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
o	Berkah Jaya,	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	375.000.000,00	375.000.000,00	-	100,00
II	Perlindungan Perempuan dan Anak				
a	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Integrasi P2TPAKK "RUD"DIY	593.800.000,00	593.800.000,00	-	100,00
	Jumlah	593.800.000,00	593.800.000,00	-	100,00
	Jumlah Total	968.800.000,00	968.800.000,00	-	100,00

5) Hibah Urusan Pangan

Hibah Urusan Pangan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp230.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Pangan

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	KWT Anugrah Guwosari, Guwosari Pajangan Bantu	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
2	KWT Sarwodadi, Hargotirto Kokap Kulon Progo	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
3	KT. Margo Dadi, Girikerto Panggang Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
4	KWT. Srikandi, Trimurti Srandakan Bantul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	KT. Berkah Rejeki, Kalirejo Kokap Kulon Progo	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono Sentotlo Kulon Progo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
7	Gapoktan Wono Makmur, Wonokerto Turi Sleman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
Jumlah Total		230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00

6) Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Hibah dianggarkan sebesar Rp2.185.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.185.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	LPMK Bumijo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
2	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
3	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
4	LPMD Argomulyo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
5	LPMK Ngampilan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
6	LPMD Tamanmartani	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
7	LPMD Mulo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
8	LPMD Hargorejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
9	LPMD Purwosari	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
10	LPMD Sumberagung	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
11	TP PKK DIY	960.000.000,00	960.000.000,00	-	100,00
Jumlah Total		1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	-	100,00

7) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Hibah dianggarkan sebesar Rp805.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp557.508.600,00 atau 69,18% diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.

8) Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hibah dianggarkan sebesar Rp259.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.000.000,00 atau 100% diberikan kepada Koperasi PPDI DIY.

9) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual dan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau 40%. Realisasi Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar Rp400.000.000,00 diberikan kepada MUI DIY sebesar Rp200.000.000,00 dan BAZNAS DIY sebesar Rp200.000.000,00.

10) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 40%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No.	Penerima	Kabupaten/Kota	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	Kalurahan Ponjong	Gunungkidul	Pengembangan Sustainable Farming	1.000.000.000,00
2	Kalurahan Bleberan	Gunungkidul	Pengembangan Usaha Jamur Tiram, Green House dan Program Air Bersih	750.000.000,00
3	Pemdes Purwobinangun	Sleman	Pembangunan Akses Wisata di Destinasi Wisata Turgo	1.000.000.000,00
4	Kalurahan Pagerharjo	Kulon Progo	Penyempurnaan Camp, Rest Area Segitik, dan Pembangunan Toilet Wisata	750.000.000,00
5	Kalurahan Hargotirto	Kulon Progo	Pemb. Akses jalan Desa Wisata Segajih Hargotirto	250.000.000,00
6	Kalurahan Kenteng	Gunungkidul	Pemb. Jalan trap, hand railing, talud, dan gazebo di kawasan Goa Gilap	250.000.000,00
7	Kalurahan Pacarejo	Gunungkidul	Pemb. Gazebo dan Jogging Track	500.000.000,00
8	Kalurahan Katongan	Gunungkidul	Pembangunan Toilet dan Penataan Landscape	250.000.000,00
9	Kalurahan Umbulrejo	Gunungkidul	Aspal jalan dan rabat beton obyek wisata Goa Cokro	250.000.000,00
10	Kalurahan Purwosari	Kulon Progo	Pemb toilet 10 homestay, Akse wisata di Ayunan Langit Watu Jaran, Tempat ibadah, Gazebo	500.000.000,00
11	Kalurahan Sumbergiri	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00
12	Kalurahan Karangasem	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00
Jumlah				6.000.000.000,00

11) Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi

Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp5.315.200.000,00 dan tidak direalisasikan karena tidak terjadi erupsi merapi yang butuh penanganan pasca erupsi. Alokasi anggaran hibah untuk penanganan pasca erupsi Merapi berasal dari sisa sumbangan masyarakat ketika terjadi erupsi merapi.

12) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp102.460.490.600,00 dan realisasi Rp102.460.490.600,00 atau 100% diberikan kepada:

Tabel 5.36
Rincian Hibah Urusan Keistimewaan

No.	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kraton Yogyakarta	Urusan Kebudayaan	76.817.250.000,00
		Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	120.000.000,00
2	Puro Pakualaman	Urusan Kebudayaan	24.000.000.000,00
		Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	120.000.000,00
3	Kwarda DIY	Urusan Kebudayaan	1.403.240.600,00
Jumlah			102.460.490.600,00

13) Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik dianggarkan sebagai Belanja Hibah. Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.480.538.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Hibah Kepada Partai Politik

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00	253.759.200,00	100,00
2	Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00	161.514.000,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00	283.305.600,00	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00	785.576.400,00	100,00
5	Partai Golongan Karya	227.136.000,00	227.136.000,00	100,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00	269.019.600,00	100,00
7	Partai Demokrat	94.432.800,00	94.432.800,00	100,00
8	Partai Amanat Nasional	279.979.200,00	279.979.200,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00	74.612.400,00	100,00
10	Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00	51.202.800,00	100,00
Jumlah Total		2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	100,00

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada OPD sebesar Rp70.689.402.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.677.202.052,00 atau 95,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Belanja Hibah Barang

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	47.055.520.000,00	45.593.029.252,00	1.462.490.748,00	96,89
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral	7.363.503.000,00	6.299.362.850,00	1.064.140.150,00	85,55
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	740.550.000,00	655.900.000,00	84.650.000,00	88,57
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	185.000.000,00	182.655.000,00	2.345.000,00	98,73
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	185.000.000,00	183.225.000,00	1.775.000,00	99,04
6	Dinas Kebudayaan	11.112.027.400,00	10.944.683.700,00	167.343.700,00	98,49
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.244.112.000,00	2.163.136.500,00	80.975.500,00	96,39
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.278.309.600,00	1.251.531.750,00	26.777.850,00	97,91
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	525.380.000,00	403.678.000,00	121.702.000,00	76,84
Jumlah Total		70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	3.012.199.948,00	95,74

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.39
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	2.843.418.000,00	2.840.711.500,00	Hibah barang berupa Rehab Ruang Kelas, Laboratorium, Toilet, Peralatan Pendidikan TIK, Media Pendidikan dan Sarana Olahraga pada SMA Swasta
2	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	43.990.000.000,00	42.530.215.752,00	Hibah barang berupa Ruang Praktek Siswa beserta perabotnya, Alat Praktek Utama/Praktek Produksi, Alat Praktek Otomotif Ringan, Alat Praktek Tata Boga, Alat Multi Media, Alat Praktek Tata Busana, Alat Praktek Perhotelan dan Alat Praktek Permesinan pada SMK Swasta
3	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	222.102.000,00	222.102.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Tunas Bhakti Pieret dan SLB Marsudi Putra III Bantul
Jumlah Total		47.055.520.000,00	45.593.029.252,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral

Tabel 5.40
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pendayagunaan Air Tanah	7.363.503.000,00	6.299.362.850,00	Belanja pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Sleman (6 unit sumur bor dan 120 unit sumur resapan), pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Bantul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan), dan pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Gunungkidul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan)
Jumlah Total		7.363.503.000,00	6.299.362.850,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5.41

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pembentukan Kesempatan Kerja	740.550.000,00	655.900.000,00	Bantuan Peralatan Usaha TKM berupa Kolam Terpal Bulat Ukuran 1,5 m x 1 m dengan rangka dan Instalasi Aquaponik Ukuran 2m x 1 m (pipa pralon 2,5 inc tanpa atap) untuk 16 Kelompok
Jumlah Total		740.550.000,00	655.900.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp182.655.000,00 merupakan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Perempuan dengan hibah barang berupa Peralatan Sarana Usaha kepada 5 kelompok pada Desa Mandiri Budaya yaitu:

1. Kelompok Sejahtera, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
2. Kelompok Lestari, Sendangmulyo, Minggir, Sleman.
3. Kelompok Dullor Subur, Sabdodadi, Bantul.
4. Kelompok Sejahtera Abadi, Pagerharjo,, Samigaluh, Kulon Progo.
5. Kelompok Gumregah, Putat, Pathuk, Gunungkidul.

Rincian Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 5.42

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	185.000.000,00	183.225.000,00	Pengembangan kewirausahaan desa tahap 2 (pengembangan) berupa pemberian bantuan alat pada 5 Kelompok Olahan: 1. Kelompok Olahan Okra Desa Sabdodadi, Bantul, Bantul 2. Kelompok Olahan Daging Sapi Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 3. Kelompok Olahan Coklat Desa Putat, Patuk, Gunungkidul 4. Kelompok Olahan Mpon-mpon Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 5. Kelompok Olahan Salak Desa Bangunkerto, Turi, Sleman)
Jumlah Total		185.000.000,00	183.225.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Tabel 5.43

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	627.342.000,00	547.052.500,00	Belanja rahabilitasi UPI untuk 5 kelompok dan Belanja pembuatan Desain Gambar UPI untuk 5 kelompok
2	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	505.152.000,00	505.152.000,00	Belanja bahan percontohan Ikan Lele untuk 24 Kelompok, Belanja bahan percontohan Ikan Hias untuk 2 Kelompok, Belanja bahan percontohan benih Ikan Lele 1 Kelompok, Belanja bahan percontohan benih Ikan Nila untuk 5 Kelompok
3	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	1.077.618.000,00	1.077.618.000,00	Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Lele untuk 24 Kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Nila untuk 10 Kelompok, dan Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Gurami untuk 9 Kelompok
4	Pengembangan Budaya Bahari	34.000.000,00	33.314.000,00	Belanja dalam rangka Pelatihan SIBUDIDIKUCIR (Kincir Air) untuk 3 KPI
Jumlah Total		2.244.112.000,00	2.163.136.500,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 5.44

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Industri Kreatif	525.380.000,00	403.678.000,00	Belanja Pengadaan Bantuan Peralatan sebanyak 9 Paket untuk 9 Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Jumlah Total		525.380.000,00	403.678.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan

Tabel 5.45

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	198.000.000,00	196.020.000,00	Belanja alat perlengkapan protokol kesehatan untuk 36 Museum
2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.025.627.400,00	2.948.000.000,00	Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-nDalem Notoprajan (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Bangunan Pekapalan (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Masjid Wijirejo (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Kawasan Masjid GiriLoyo (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Pura Pakualaman-Penataan Interior Bisokop Permana, Rehabilitasi WBCB Aset Masyarakat-Gereja Santo Antonius Kotabaru (Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY)
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.194.960.000,00	2.121.763.700,00	Belanja Pengadaan Gamelan Kuningan Laras Pelog Slendro untuk 5 Penerima (1. Kelompok "Karangbudoyo" Karanggenen, Purwobinangun, Pakem, Sleman 2. Kelompok Karawitan margo Laras Karangduwet paliyan Gunung Kidul 3. Sanggar Madyo Laras, Nanggulan, Maguwoharjo, depok sleman 4. SMK Hamong Putera Pakem Pekem Sleman 5. Desa Bumirejo Lendah Kulonprogo), Belanja Pengadaan Alat Musik Gamelan Besi Laras Pelog Slendro 1. SLB Sekar Handayani JL Panggang Wonosari KM 6,5 Girisekar, Panggang GK 2. Paguyuban Mulyo Laras Puluhdadi Senturan, Caturtunggal depok sleman 3. Paguyuban Seni Karawitan Laras Madumurti Kembaran RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul 4. Kelompok Karawitan Langen Cahyo Laras Balai Dusun Brongkol Purwodadi Tepus GK 5. SMP pembangunan Daraman, Srimartani, PiyunganBantul 6. Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budaya Karangwuluh Temon KP 7. Paguyuban Seni Budaya Marsudi Budoyo Pusalang Wukirsari Cangkringan Sleman 8. Paguyuban seni tradisional ketoprak mataram, kemuning manunggal budaya cangkriangan No 56 RW 29 Sukoharjo ngaglik sleman, dan Gamelan Perunggu (kejati DIY jalan Sukonnandi No 4

4	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	5.693.440.000,00	5.678.900.000,00	Pengadaan Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro 13 Penerima (1. Desa Budaya Glagah, Temon, Kulon Progo 2. Desa Budaya Tuksono, Sentolo, Kulon Progo 3. Desa Budaya Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, 4. Desa Budaya Bugel, Panjatan, Kulon Progo 5. Desa Budaya Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul 6. Desa Budaya Katongan, Nglipar, Gunungkidul 7. Desa Budaya Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul 8. Desa Budaya Semin, Semin, Gunungkidul 9. Kalurahan Budaya Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta 10. Desa Budaya Pandowoharjo, Sleman, Sleman 11. Desa Budaya Margodadi, Seyegan, Sleman 12. Desa Budaya Sendangagung, Minggir, Sleman 13. Desa Budaya Margoagung, Seyegan, Sleman), Pengadaan Pakaian Pengrawit untuk Desa Budaya (1. Kalurahan Budaya Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta 2. Kalurahan Budaya Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 3. Desa Budaya Panggungharjo, Sewon, Bantul 4. Desa Budaya Selopamiro, Imogiri, Bantul 5. Desa Budaya Srigading, Sanden, Bantul 6. Desa Budaya Sabdodai, Bantul, Bantul 7. Desa Budaya Sitimulyo, Piyungan, Bantul 8. Desa Budaya Dlingo, Dlingo, Bantul 9. Desa Budaya Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul 10. Desa Budaya Seloharjo, Pundong, Bantul 11. Desa Budaya Gilangharjo, Pandak, Bantul 12. Desa Budaya Trimurti, Srandakan, Bantul 13. Desa Budaya Triwidadi,
Jumlah Total		11.112.027.400,00	10.944.683.700,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 5.46

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Budidaya Tanaman Pangan	716.201.000,00	689.476.000,00	Belanja Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (untuk 1 P3A, 4 Kelompok Tani, dan 3 Gapoktan), Belanja Jalan Usaha Tani (untuk 5 Kelompok Tani), Belanja Pupuk NPK untuk pendampingan ubi kayu (untuk 4 Kelompok Tani), Belanja Power Thresher Multiguna (untuk 2 Kelompok Tani), Belanja Hand Sprayer (untuk 8 Kelompok Tani), Belanja Hand Traktor (untuk 7 Kelompok Tani), Belanja Pompa Air (untuk 101 Kelompok Tani dan P3A)
2	Budidaya Tanaman Hortikultura	81.124.300,00	81.071.450,00	Belanja sarana dan prasarana budidaya hortikultura di lahan pekarangan untuk 5 KWT, belanja sarana dan prasarana budidaya tanaman biofarmaka untuk 2 Kelompok Tani, belanja Sarana Irigasi untuk Mendukung Pertanaman Hortikultura untuk 3 Kelompok Tani, dan belanja sarana dan prasarana tanaman stroberi untuk 2 Kelompok Tani
3	Pengembangan Lumbung Mataraman	480.984.300,00	480.984.300,00	Belanja demplot Lumbung Mataraman Tahap Penumbuhan (8) untuk 11 KWT, belanja sarana prasarana alat Kelompok Lumbung Mataram Paska Tahap untuk 11 KWT, belanja sarana dan prasarana produksi budidaya di lahan surjan 11 Kelompok Tani, dan belanja sarana dan prasarana produksi budidaya sistem sabuk gunung untuk 3 Kelompok Tani dan 3 Gapoktan
Jumlah Total		1.278.309.600,00	1.251.531.750,00	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah.

Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah Uang dan Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 digabung menjadi:

Tabel 5.47

Konversi Belanja Hibah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja hibah Uang	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	90,06	638.980.684.355,00
2	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	95,74	96.417.920.031,46
Jumlah		821.833.506.600,00	744.149.764.252,00	90,55	735.398.604.386,46

F. Belanja Bantuan Sosial**Rp9.009.947.911,00****Rp51.143.429.903,00**

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp11.391.484.880,00 dengan rincian anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp2.492.000.000,00 dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebesar Rp8.899.484.880,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.009.947.911,00 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp1.492.000.000,00 dan realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sebesar Rp7.517.947.911,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan di PPKD sebesar Rp2.492.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp1.492.000.000,00 dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp1.492.000.000,00 telah direalisasikan 100% untuk program Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial sebesar Rp292.000.000,00 dengan penerima sebanyak 32 penerima dan untuk program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan penerima sebanyak 15 penerima.

Untuk Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 namun tidak direalisasikan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada OPD sebesar Rp8.899.484.880,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.517.947.911,00 atau 84,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48**Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang**

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral	8.729.484.880,00	7.347.982.023,00	1.381.502.857,00	84,17
2	Badan Penghubung Daerah	170.000.000,00	169.965.888,00	34.112,00	99,98
Jumlah		8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	1.381.536.969,00	84,48

Penjelasan:

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp8.729.484.880,00 dan realisasi sebesar Rp7.347.982.023,00 atau 84,17% merupakan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan pengadaan instalasi dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.965.888,00 atau 99,98% merupakan bantuan untuk pemberdayaan UMKM Yogyakarta di Jakarta berkarakter Yogyakarta.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 digabung menjadi:

Tabel 5.49
Konversi Belanja Bantuan Sosial Uang

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	59,87	638.980.684.355,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	84,48	50.441.429.903,00
Jumlah		11.391.484.880,00	9.009.947.911,00	79,09	689.422.114.258,00

5.1.2.2 Belanja Modal Rp940.633.924.931,64 Rp1.035.203.185.484,85

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp940.633.924.931,64 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp978.048.321.539,77. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp94.569.260.553,21 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.035.203.185.484,85.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Modal Tanah Rp696.800.024.901,00 Rp469.142.424.222,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp705.576.303.389,00 dan realisasi sebesar Rp696.800.024.901,00 atau 98,76% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.692.100.000,00	1.246.621.500,00	445.478.500,00	73,67
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	402.759.645.637,00	400.312.938.560,00	2.446.707.077,00	99,39
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	32.972.983.752,00	30.317.701.921,00	2.655.281.831,00	91,95
4	Dinas Kebudayaan	195.423.874.000,00	192.407.321.080,00	3.016.552.920,00	98,46
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	72.727.700.000,00	72.515.441.840,00	212.258.160,00	99,71
Jumlah		705.576.303.389,00	696.800.024.901,00	8.776.278.488,00	98,76

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp705.576.303.389,00 dan realisasi sebesar Rp696.800.024.901,00 atau 98,76%. Belanja Modal Tanah direalisasikan pada beberapa OPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp1.692.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.621.500,00 atau sebesar 73,67% merupakan Pengadaan Tanah SMK Negeri 1 Samigaluh Kulonprogo.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp402.759.645.637,00 dan realisasi sebesar Rp400.312.938.560,00 atau sebesar 99,39% terdiri dari Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Ngremang - Congot (Garongan) sebesar Rp285.802.677.000,00 dan Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Tepus - Jerukwudel sebesar Rp114.510.261.560,00.
- 3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp32.972.983.752,00 dan realisasi sebesar Rp30.317.701.921,00 atau sebesar 91,95% merupakan Pengadaan Tanah di Pojok Beteng Lor Wetan.
- 4) Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp195.423.874.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.407.321.080,00 atau 98,46% terdiri dari pengadaan tanah untuk lahan pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret dan Batikan sebesar Rp22.193.379.720,00, pengadaan tanah dan bangunan Mutiara I dan II sebesar Rp170.211.464.000,00 dan sertifikasi Lahan Situs Kalasan dan Situs Pleret sebesar Rp2.477.360,00.
- 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset menganggarkan Rp72.727.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.515.441.840,00 merupakan pembelian tanah dan bangunan HOS Cokroaminoto sebesar

Rp67.575.382.800,00 dan Pengadaan Tanah di Baleharjo dan karangrejek 5.036 m2 Gunungkidul sebesar Rp4.940.059.040,00.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp137.484.204.942,00 Rp159.857.330.876,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp148.322.892.546,00 dan realisasi sebesar Rp137.484.204.942,00 atau 92,69%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.373.125.934,00 atau 14,00% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 yaitu sebesar Rp159.857.330.876,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	3.011.232.000,00	2.817.757.910,00	193.474.090,00	93,57
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.731.904.140,00	6.144.704.140,00	587.200.000,00	91,28
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	276.223.600,00	246.095.150,00	30.128.450,00	89,09
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.321.521.700,00	1.796.768.500,00	524.753.200,00	77,40
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	36.444.000,00	33.439.000,00	3.005.000,00	91,75
7	Pengadaan Alat Ukur	1.314.495.550,00	1.144.606.750,00	169.888.800,00	87,08
8	Pengadaan Alat Pengolahan	594.116.500,00	578.210.000,00	15.906.500,00	97,32
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.870.000,00	25.445.000,00	425.000,00	98,36
10	Pengadaan Alat Kantor	15.844.280.120,00	10.253.912.632,00	5.590.367.488,00	64,72
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.331.346.440,00	13.317.988.416,00	1.013.358.024,00	92,93
12	Pengadaan Komputer	41.220.689.422,00	40.478.070.069,00	742.619.353,00	98,20
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.532.000,00	56.951.000,00	2.581.000,00	95,66
14	Pengadaan Alat Studio	3.839.251.200,00	3.625.963.278,00	213.287.922,00	94,44
15	Pengadaan Alat Komunikasi	357.030.500,00	354.722.000,00	2.308.500,00	99,35
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	186.511.000,00	174.151.000,00	12.360.000,00	93,37
17	Pengadaan Alat Kedokteran	273.926.950,00	264.677.450,00	9.249.500,00	96,62
18	Pengadaan Alat Kesehatan	170.840.000,00	150.465.000,00	20.375.000,00	88,07
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.399.301.684,00	2.354.555.554,00	44.746.130,00	98,14
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	32.249.280.200,00	31.189.767.948,00	1.059.512.252,00	96,71
21	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	90.550.000,00	87.202.000,00	3.348.000,00	96,30
22	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	1.370.588.000,00	1.035.459.432,00	335.128.568,00	75,55
23	Peralatan dan Mesin BOS	21.592.957.540,00	21.328.292.713,00	264.664.827,00	98,77
	Jumlah	148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	75.270.327.375,00	70.776.144.829,00	4.494.182.546,00	94,03
2	Dinas Kesehatan	9.512.125.300,00	6.568.888.261,00	2.943.237.039,00	69,06
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.652.968.750,00	5.180.890.338,00	472.078.412,00	91,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	535.720.000,00	63.959.161,00	471.760.839,00	11,94
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	294.562.000,00	272.125.086,00	22.436.914,00	92,38
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.384.200,00	403.280.000,00	2.104.200,00	99,48
8	Dinas Sosial	2.269.684.500,00	2.181.335.841,00	88.348.659,00	96,11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	702.699.000,00	646.096.346,00	56.602.654,00	91,94
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	351.675.700,00	346.951.020,00	4.724.680,00	98,66
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	693.221.017,00	653.061.000,00	40.160.017,00	94,21
12	Dinas Perhubungan	958.222.000,00	773.623.189,00	184.598.811,00	80,74
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.053.863.450,00	25.865.757.286,00	188.106.164,00	99,28
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.899.078.800,00	1.261.157.500,00	637.921.300,00	66,41
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	75.298.000,00	73.598.000,00	1.700.000,00	97,74
16	Dinas Kebudayaan	7.476.370.684,00	6.680.624.813,00	795.745.871,00	89,36
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	325.635.270,00	316.057.000,00	9.578.270,00	97,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	447.196.000,00	446.306.000,00	890.000,00	99,80
19	Dinas Pariwisata	223.000.000,00	222.947.890,00	52.110,00	99,98
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.997.413.800,00	1.986.575.140,00	10.838.660,00	99,46
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	101.900.000,00	99.500.000,00	2.400.000,00	97,64
22	Sekretariat Daerah	5.021.514.000,00	4.934.406.945,00	87.107.055,00	98,27
23	Badan Penghubung Daerah	21.296.000,00	14.096.000,00	7.200.000,00	66,19
24	Sekretariat DPRD	1.931.630.000,00	1.911.752.041,00	19.877.959,00	98,97
25	Inspektorat	1.192.485.000,00	1.101.430.852,00	91.054.148,00	92,36
26	Paniradya Kaistimewan	1.418.364.200,00	1.288.914.500,00	129.449.700,00	90,87
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	323.827.000,00	316.152.000,00	7.675.000,00	97,63
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.615.043.500,00	2.579.495.904,00	35.547.596,00	98,64
29	Badan Kepegawaian Daerah	146.292.000,00	145.568.000,00	724.000,00	99,51
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	406.095.000,00	373.510.000,00	32.585.000,00	91,98
Jumlah		148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp52.613.388.365,00 Rp138.986.381.949,17

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp56.794.002.047,77 dan realisasi sebesar Rp52.613.388.365,00 atau 92,64%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp86.372.993.584,17 atau 62,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp138.986.381.949,17. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.53

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.456.322.000,00	1.439.452.028,00	98,84
2	Pengadaan Bangunan Bersejarah	3.314.000.000,00	2.109.289.882,00	63,65
3	Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	87.500.000,00	87.062.000,00	99,50
4	Pengadaan Rambu-Rambu	183.257.000,00	169.119.051,00	92,29
5	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	52.705.000,00	50.200.000,00	95,25
6	Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.860.276.000,00	2.418.110.045,00	84,54
7	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	48.839.942.047,77	46.357.964.359,00	94,92
Jumlah		56.794.002.047,77	52.631.197.365,00	92,67

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30.450.054.995,00	30.262.063.179,00	187.991.816,00	99,38
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	6.276.590.000,00	5.244.260.940,00	1.032.329.060,00	83,55
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.314.000.000,00	2.109.289.882,00	1.204.710.118,00	63,65
4	Satuan Polisi Pamong Praja	158.090.000,00	156.988.000,00	1.102.000,00	99,30
5	Dinas Sosial	473.508.026,00	450.367.580,00	23.140.446,00	95,11
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.686.475,00	101.240.100,00	1.446.375,00	98,59
7	Dinas Perhubungan	2.980.533.000,00	2.524.231.096,00	456.301.904,00	84,69
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	787.943.437,00	212.056.563,00	78,79
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.755.356.000,00	3.727.957.950,00	27.398.050,00	99,27
10	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	237.411.300,00	235.443.000,00	1.968.300,00	99,17
11	Dinas Kebudayaan	3.186.646.342,00	3.107.728.626,00	78.917.716,00	97,52
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	60.000.000,00	59.125.000,00	875.000,00	98,54
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	108.880.000,00	108.331.000,00	549.000,00	99,50
14	Dinas Pariwisata	3.903.032.000,00	2.977.677.000,00	925.355.000,00	76,29
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	125.855.459,77	107.114.625,00	18.740.834,77	85,11
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.934.750,00	2.909.750,00	25.000,00	99,15
17	Sekretariat Daerah	132.500.000,00	131.155.000,00	1.345.000,00	98,98
18	Sekretariat DPRD	52.705.000,00	50.200.000,00	2.505.000,00	95,25
19	Inspektorat	4.699.000,00	4.693.500,00	5.500,00	99,88
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.250.000,00	33.026.000,00	224.000,00	99,33
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	187.082.700,00	187.082.700,00	-	100,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	248.187.000,00	244.560.000,00	3.627.000,00	98,54
	Jumlah	56.794.002.047,77	52.613.388.365,00	4.180.613.682,77	92,64

D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp38.021.109.346,64 Rp242.118.840.886,68

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp51.326.954.352,00 dan realisasi sebesar Rp38.021.109.346,64 atau 74,08%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp204.097.731.540,04 atau 84,30% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp242.118.840.886,68. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengadaan Jalan	35.326.911.352,00	26.489.134.280,00	74,98
2	Pengadaan Jembatan	17.181.000,00	-	-
3	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	228.720.000,00	215.506.700,00	94,22
4	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
5	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
6	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	988.980.000,00	820.683.450,00	82,98
7	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	197.159.000,00	194.915.000,00	98,86
8	Pengadaan Instalasi Pengaman	459.000.000,00	457.693.500,00	99,72
9	Pengadaan Jaringan Listrik	90.868.000,00	88.714.000,00	97,63
10	Pengadaan Jaringan Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
11	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.987.335.000,00	9.834.112.592,00	70,31
	Jumlah	51.326.954.352,00	38.131.559.522,00	74,29

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88.550.000,00	81.014.862,00	7.535.138,00	91,49
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	37.718.127.939,00	27.209.575.560,00	10.508.552.379,00	72,14
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.211.413,00	8.140.188.400,00	2.265.023.013,00	78,23
4	Dinas Sosial	31.000.000,00	30.931.000,00	69.000,00	99,78
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	89.970.000,00	30.000,00	99,97
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	250.000.000,00	116.379.400,00	133.620.600,00	46,55
7	Dinas Kebudayaan	581.569.000,00	572.595.250,00	8.973.750,00	98,46
8	Dinas Pariwisata	1.327.800.000,00	1.057.962.050,00	269.837.950,00	79,68
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	308.000,00	-	308.000,00	-
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	468.700.000,00	467.255.000,00	1.445.000,00	99,69
11	Badan Kepegawaian Daerah	365.688.000,00	365.688.000,00	-	100,00
Jumlah		51.326.954.352,00	38.131.559.522,00	13.195.394.830,00	74,29

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp15.382.208.041,00 Rp23.907.706.051,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp15.693.894.205,00 dan realisasi sebesar Rp15.382.208.041,00 atau 98,01%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.525.498.010,00 atau 35,66% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp23.907.706.051,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengadaan Buku	119.842.460,00	118.894.300,00	99,21
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	301.770.000,00	294.298.000,00	97,52
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.566.298.000,00	1.517.238.945,00	96,87
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.699.503.745,00	13.445.296.796,00	98,14
Jumlah		15.693.894.205,00	15.382.208.041,00	98,01

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	271.632.449,00	98,12
2	Dinas Sosial	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00
3	Dinas Kebudayaan	1.037.321.660,00	1.000.537.145,00	36.784.515,00	96,45
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	122.525.000,00	121.798.000,00	727.000,00	99,41
5	Sekretariat Daerah	8.636.000,00	8.600.000,00	36.000,00	99,58
6	Badan Penghubung Daerah	57.655.000,00	56.460.000,00	1.195.000,00	97,93
7	Sekretariat DPRD	22.000.000,00	21.987.300,00	12.700,00	99,94
8	Paniradya Kaistimewan	2.000.000,00	1.902.000,00	98.000,00	95,10
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.925.000,00	1.125.000,00	800.000,00	58,44
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.850.000,00	4.449.500,00	400.500,00	91,74
Jumlah		15.693.894.205,00	15.382.208.041,00	311.686.164,00	98,01

a. Belanja Modal Aset Lainnya Rp332.989.336,00 Rp1.190.501.500,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp334.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp332.989.336,00 atau 99,62%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp857.512.164,00 atau 72,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.190.501.500,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	90.250.000,00	90.100.000,00	150.000,00	99,83
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	900.000,00	889.336,00	10.664,00	98,82
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	243.125.000,00	242.000.000,00	1.125.000,00	99,54
Jumlah		334.275.000,00	332.989.336,00	1.285.664,00	99,62

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp305.639.352.770,00

Rp0,00

Anggaran Belanja Tak Terduga sebelum ada kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi adalah sebesar Rp14.849.303.517,40. Selanjutnya dalam APBD Perubahan 2020 Belanja Tak Terduga ditetapkan sebesar Rp422.486.650.262,72 dengan realisasi sebesar Rp305.639.352.770,00 atau 72,34%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 digunakan untuk penanganan pandemic Covid-19 melalui Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 78/KEP/2020. Selanjutnya mekanisme kerja Gugus Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 20 Maret - 29 Mei 2020.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 30 Mei - 30 Juni 2020.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 – 30 Juli 2020.
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Agustus 2020.
- 5) Keputusan Gubernur Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 30 September 2020.
- 6) Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Oktober 2020.

- 7) Keputusan Gubernur Nomor 318/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 30 November 2020.
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 358/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Desember 2020.

Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* membuat Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.
- 2) Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Operasi, yang berisi rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan *COVID-19* oleh masing-masing bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19*.
- 3) Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan anggaran sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- 4) Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran kepada PPKD setelah dilakukan verifikasi.
- 5) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP TU/LS untuk pencairan SP2D TU/LS Belanja Tidak Terduga.
- 6) BUD menerbitkan SP2D TU/LS dan memindahbukukan dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 7) Bendahara Pengeluaran BPBD melakukan penatausahaan secara terpisah atas semua pengeluaran Belanja Tidak Terduga.
- 8) Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran ke Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* sesuai yang diajukan.
- 9) Tugas *COVID-19* menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Gugus Tugas dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- 10) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.

Realisasi SP2D dan realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga

Fase	No./Tanggal SP2D		SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Tahap 1	00904/LS/4.05.02.	27-Mar-20	9.295.231.300,00	9.165.945.500,00	129.285.800,00	98,61
	01143/TU/4.05.02	14-Apr-20	458.979.592,00	448.139.590,00	10.840.002,00	97,64
Tahap 2 Phase 1	01548/TU/4.05.02	30-Apr-20	51.641.912.300,00	41.775.598.987,00	9.866.313.313,00	80,89
Tahap 2 Phase 2	01718/TU/4.05.02	14-May-20	67.792.910.000,00	67.783.970.000,00	8.940.000,00	99,99
Tahap 2 Phase 3	02012/TU/4.05.02	20-May-20	726.000.000,00	726.000.000,00	0,00	100,00
Tahap 2 Phase 4	02072/TU/4.05.02	27-May-20	202.776.800,00	190.049.530,00	12.727.270,00	93,72
Tahap 2 Phase 5	02525/TU/4.05.02	22-Jun-20	42.705.170.125,00	37.484.325.946,00	5.220.844.179,00	87,77
	02524/TU/4.05.02	22-Jun-20	101.114.400.000,00	87.184.400.000,00	13.930.000.000,00	86,22
	02604/TU/4.05.02	26-Jun-20	10.800.000,00	8.890.200,00	1.909.800,00	82,32
Tahap 2 Phase 6	03092/TU/4.05.02	05-Jul-20	4.877.400.000,00	4.086.979.800,00	790.420.200,00	83,79

Tahap 2 Phase 7	03309/TU/4.05.02	24-Jul-20	6.820.102.711,00	6.164.363.712,00	655.738.999,00	90,39
Tahap 2 Phase 8	03926/TU/4.05.02	27-Aug-20	8.719.276.569,00	7.883.062.614,00	836.213.955,00	90,41
Tahap 2 Phase 9	04501/TU/4.05.02	25-Sep-20	7.440.534.800,00	5.989.794.379,00	1.450.740.421,00	80,50
Tahap 2 Phase 10	04867/TU/4.05.02	16-Oct-20	9.809.972.800,00	8.804.874.374,00	1.005.098.426,00	89,75
Tahap 2 Phase 11	05981/TU/4.05.02	01-Dec-20	29.473.297.645,00	26.507.181.284,00	2.966.116.361,00	89,94
Tahap 2 Phase 12	06329/TU/4.05.02	10-Dec-20	1.424.113.800,00	1.390.949.354,00	33.164.446,00	97,67
Tahap 2 Phase 13	06622/TU/4.05.02	17-Dec-20	112.305.000,00	44.827.500,00	67.477.500,00	39,92
Jumlah			342.625.183.442,00	305.639.352.770,00	36.985.830.672,00	89,21

Adapun rincian SP2D dan realisasi Belanja Tak Terduga per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61

Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Kegiatan

NO.	URAIAN		SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7 = (5/4)*100
A. PENANGANAN KESEHATAN						
1		Penyediaan APD untuk Petugas Pengubur Jenazah (6 petugas/kabupaten-kota dengan estimasi 10 kejadian)	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00
2		Penyediaan Virkon (Bahan Desinfektan) untuk 438 Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
3		Penyediaan Kantong Jenazah (Estimasi 10 Kejadian)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
4		Desinfektasi sekolah untuk SMA (Negeri/Swasta)	399.740.000,00	393.606.000,00	6.134.000,00	98,47
5		Penyediaan APD dan sarana Kebersihan Sekretariat Posko Terpadu	2.650.235.500,00	2.627.467.454,00	22.768.046,00	99,14
6		Penyemprotan/Sterilisasi sekolah	799.480.000,00	705.525.000,00	93.955.000,00	88,25
7		Fasilitasi Peginapan bagi tenaga medis yang menangani Covid 19 di PPSDM Kemendagri Regional Yogya	1.103.400.800,00	164.890.990,00	938.509.810,00	14,94
8		Penanganan Pasien di RS Rujukan	5.642.915.800,00	5.640.802.500,00	2.113.300,00	99,96
9		Komunikasi dan Informasi	733.760.000,00	720.615.000,00	13.145.000,00	98,21
10		Penyediaan BMHP dan Peralatan / Perlengkapan untuk ODP di seluruh Kab/ Kota	870.167.992,00	781.041.217,00	89.126.775,00	89,76
11		Pemenuhan APD untuk RS Rujukan	21.519.375.000,00	19.655.518.818,00	1.863.856.182,00	91,34
12		Penyediaan Alat Kesehatan	2.990.524.025,00	2.669.645.092,00	320.878.933,00	89,27
13		Penyediaan BMHP dan Peralatan / Perlengkapan	35.234.006.545,00	30.989.754.636,00	4.244.251.909,00	87,95
14		Penyediaan Dukungan Manajemen Posko Terpadu	3.474.452.562,00	3.317.057.037,00	157.395.525,00	95,47
15		Dekontaminasi dan Karantina Petugas	529.216.800,00	525.322.000,00	3.894.800,00	99,26
16		Penyediaan Peralatan Kerja Petugas dan Relawan	337.483.500,00	334.016.000,00	3.467.500,00	98,97
17		Pengadaan Alat Perlengkapan Diri Penanganan Covid-19	1.060.380.000,00	1.016.021.000,00	44.359.000,00	95,82
18		Penyediaan dukungan Pos Kesehatan	128.933.000,00	120.559.364,00	8.373.636,00	93,51
19		Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pengamanan Personil dan Kesekretariatan	67.600.000,00	67.093.000,00	507.000,00	99,25
20		Cadangan Tempat Pemakaman Jenazah COVID-19	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	-
21		Penggandaan Panduan DeskataVID (Desa/Kampung Tangguh COVID-19)	271.000.000,00	125.000.000,00	146.000.000,00	46,13
22		Shelter/Naungan Sementara Bagi WNA di Wisma Bandiklat DIY	60.398.000,00	60.398.000,00	0,00	100,00
23		Operasional Media Center - Press Conference	18.662.000,00	18.662.000,00	0,00	100,00
24		Langganan Peta untuk Dashboard	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
25		Aplikasi Pengumpulan Data Terintegrasi untuk mendukung Gugus Tugas Covid-19	242.600.000,00	240.200.000,00	2.400.000,00	99,01
26		Aplikasi untuk mendukung DSS Internal Pemda DIY	207.400.000,00	199.800.000,00	7.600.000,00	96,34
27		Publikasi media luar ruang berupa billboard di 50 titik termasuk desain dan pemasangan	130.000.000,00	128.000.000,00	2.000.000,00	98,46
28		Tenaga Ahli Content Creator Media Sosial	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
	sebanyak 2 Orang selama 2 Bulan				
29	Publikasi melalui dialog interaktif televisi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
30	Pengelola Data CMS (Corona Monitoring System)	983.460.000,00	589.842.500,00	393.617.500,00	59,98
31	Publikasi Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19	741.749.000,00	680.226.273,00	61.522.727,00	91,71
32	Penyediaan Sistem Verifikasi berkas PPDB secara daring/online	125.180.000,00	68.343.000,00	56.837.000,00	54,60
33	Operasi Pengawasan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Pencegahan Covid 19	6.420.109.800,00	6.352.947.995,00	67.161.805,00	98,95
34	Pengumpulan Data dan Informasi/Intelijen	389.508.400,00	388.053.100,00	1.455.300,00	99,63
35	Posko Induk Dishub DIY	99.123.000,00	61.863.800,00	37.259.200,00	62,41
36	Pemeriksaan Pemudik di 3 wilayah perbatasan DIY - Jateng	1.687.232.000,00	1.447.170.200,00	240.061.800,00	85,77
37	Tim Terpadu Penanganan Covid-19 di Terminal	923.516.000,00	736.968.000,00	186.548.000,00	79,80
38	Pengumpulan Data Informasi Keberadaan Orang Asing	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	100,00
39	Pengumpulan Data Mahasiswa Luar Daerah	38.624.500,00	38.471.500,00	153.000,00	99,60
40	Fasilitasi pengambilan logistik bantuan Pusat	145.880.000,00	32.328.383,00	113.551.617,00	22,16
41	APD untuk petugas di level desa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
42	Penyediaan dukungan Rapid test Lapangan	140.000.000,00	127.272.730,00	12.727.270,00	90,91
43	Fasilitasi Narasumber The New Normal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
44	Fasilitasi Pemulangan WNA	16.726.800,00	14.817.000,00	1.909.800,00	88,58
45	Penyediaan Kebutuhan Sarana Kebersihan di TPI	7.252.000,00	7.252.000,00	0,00	100,00
46	Penguatan Kapasitas Komunikasi dan Koordinasi Satgas Deskatavid menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	77.830.000,00	72.250.000,00	5.580.000,00	92,83
47	Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kab/Kota dengan Pusdalops se-DIY	2.240.000,00	2.100.000,00	140.000,00	93,75
48	Narasumber pada video dokumentasi tentang Covid-19 di DIY	27.000.000,00	25.200.000,00	1.800.000,00	93,33
49	Penambahan kapasitas komunikasi Respon Darurat Covid-19	15.000.000,00	12.907.000,00	2.093.000,00	86,05
50	Dekontaminasi, Desinfektanisasi dan Ruang Karantina	1.406.817.200,00	1.229.229.091,00	177.588.109,00	87,38
51	Pengelolaan Limbah B3 Infeksius	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	-
52	Penyusunan JITUPASNA Covid-19	98.000.000,00	97.240.000,00	760.000,00	99,22
53	Dukungan Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 - KOMINFO	58.770.000,00	53.030.000,00	5.740.000,00	90,23
54	Publikasi dan Diseminasi Informasi Publik Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19	2.364.022.000,00	2.268.751.490,82	95.270.509,18	95,97
55	Pengawasan dan Pengendalian Penerapan Protokol Kesehatan di Stasiun Tugu dan Bandara YIA	290.404.000,00	271.489.000,00	18.915.000,00	93,49
56	Pelatihan Swab untuk ATLM, Tenaga Puskesmas dan Labkesda	27.478.000,00	26.878.000,00	600.000,00	97,82
57	Pengelolaan Limbah Medis PSC 119 DIY	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-
58	Penyediaan BMHP dan Peralatan/ Perlengkapan Skrining	37.805.186.769,00	33.824.235.364,00	3.980.951.405,00	89,47
59	Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	100,00
60	Pengadaan APD untuk Sekolah dalam rangka Pelaksanaan di Era Pendidikan New Normal	826.200.000,00	615.271.140,00	210.928.860,00	74,47
61	Pendampingan Tim Pengawas dan Pengendalian Operasi	58.520.000,00	56.070.000,00	2.450.000,00	95,81
62	Pemeriksaan Kendaraan di Perbatasan DIY- Jawa Tengah	821.007.000,00	783.079.000,00	37.928.000,00	95,38
63	Koordinasi Penanganan Karantina dan Isolasi dengan satgas penanganan Covid-19 di kab/kota dan Desa/Kelurahan	270.580.000,00	238.733.000,00	31.847.000,00	88,23
64	Penambahan Fitur Penanganan Covid-19 pada Aplikasi Disaster Management Information System (DMIS) di PUSDALOPS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
65	Penambahan Fasilitas Ambulance bantuan PT Angkasa Pura I	297.866.020,00	269.609.091,91	28.256.928,09	90,51

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
66	Dukungan Data untuk Pemetaan Pergerakan Orang	137.500.000,00	136.455.000,00	1.045.000,00	99,24
67	Relawan Surveillance Data	574.620.000,00	451.888.500,00	122.731.500,00	78,64
68	Dukungan Ke-humas-an	29.000.000,00	28.772.000,00	228.000,00	99,21
69	Pengadaan Alat Kesehatan Ambulans Gawat Darurat PSC 119 DIY	257.102.000,00	224.545.455,00	32.556.545,00	87,34
70	Peningkatan Kapasitas dalam Disinfeksi Lingkungan dan Ambulans Transport Covid 19 pada Rumah Sakit di DIY	38.951.000,00	35.779.000,00	3.172.000,00	91,86
71	Tim Pengawas dan Pemeriksa Penerapan Protokol Kesehatan Kendaraan Umum/Pariwisata di Kawasan Obyek Wisata	183.970.000,00	182.914.000,00	1.056.000,00	99,43
72	Logistik untuk PEMDA DIY beserta unit layanan	1.512.150.000,00	1.358.772.727,27	153.377.272,73	89,86
73	Monitoring Evaluasi peningkatan kapasitas dalam desinfeksi lingkungan dan ambulans transport Covid-19 pada Rumah Sakit	20.800.000,00	20.722.400,00	77.600,00	99,63
74	Bahan Desinfektan & Pembersih	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	-
75	Dukungan Petugas Dekontaminasi/ Pengantaran Jenazah	6.735.652.500,00	6.075.791.910,00	659.860.590,00	90,20
76	Relawan Surveillance Data untuk 6 Dinas Kesehatan, 1 Diskominfo DIY	275.900.000,00	251.080.000,00	24.820.000,00	91,00
77	Penyemprotan desinfektan	43.200.000,00	34.200.000,00	9.000.000,00	79,17
78	Pembelian Multivitamin	776.210.000,00	700.736.365,00	75.473.635,00	90,28
79	Dukungan Logistik Protokol Kesehatan Pemda	304.500.000,00	277.509.091,00	26.990.909,00	91,14
80	Extra Fooding	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
81	Kelengkapan BSL 2 BALAI LABKES dan KALIBRASI	238.399.600,00	216.725.000,00	21.674.600,00	90,91
82	Pekerjaan Sekat BSL 2 BALAI LABKES dan KALIBRASI	40.420.000,00	36.420.000,00	4.000.000,00	90,10
83	Monitoring Evaluasi Penanganan Darurat Covid-19	146.525.000,00	129.125.000,00	17.400.000,00	88,12
84	Pengadaan Virus Transport Media (VTM)	874.500.000,00	794.200.000,00	80.300.000,00	90,82
85	Pengadaan Reagen Ekstaksi	703.915.000,00	398.800.000,00	305.115.000,00	56,65
86	Fasilitasi untuk mendukung Protokol Kesehatan pada Sarana Olah Raga dan kegiatan Kepemudaan	231.995.000,00	188.148.751,00	43.846.249,00	81,10
87	Perlengkapan shelter Isolasi ASN Pemda DIY	139.529.000,00	0,00	139.529.000,00	-
88	Logistik untuk dukungan Operasional Lapangan oleh TRC BPBD DIY	96.420.000,00	96.420.000,00	0,00	100,00
89	Logistik untuk dukungan Operasional Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan satgas desa	1.311.500.000,00	1.181.706.182,00	129.793.818,00	90,10
90	Dukungan Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan Kantor Gubernur	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
91	Pemenuhan Kebutuhan Lab BSL2 (Tambah Daya Listrik)	77.000.000,00	70.000.000,00	7.000.000,00	90,91
92	Dukungan Protokol Kesehatan Bagi Sekolah	1.203.800.000,00	871.134.500,00	332.665.500,00	72,37
93	Penyusunan Pedoman Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid 19	64.350.000,00	59.554.546,00	4.795.454,00	92,55
94	Perlengkapan Shelter Isolasi	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00	-
95	Sosialisasi Shelter	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	-
96	Dukungan Logistik PB DIY	557.305.000,00	417.327.501,00	139.977.499,00	74,88
	Sub Total	151.750.776.113,00	135.384.191.695,00	16.366.584.418,00	89,21
B.	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI				
1	Pemberian kerja darurat istimewa (PKDI)	1.022.400.000,00	1.020.258.000,00	2.142.000,00	99,79
2	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	106.000.000,00	45.985.000,00	60.015.000,00	43,38
3	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 6.000 buah	520.200.000,00	515.345.300,00	4.854.700,00	99,07
4	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 6.000 buah	298.200.000,00	189.237.000,00	108.963.000,00	63,46
5	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY	69.000.000,00	7.298.000,00	61.702.000,00	10,58
6	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Faceshield APD sebanyak 5.000 buah	375.000.000,00	245.653.000,00	129.347.000,00	65,51

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
7	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan masker kain 2 lapis sebanyak 10.200 buah	106.500.000,00	96.336.100,00	10.163.900,00	90,46
8	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Kantong Mayat sebanyak 100 buah	35.500.000,00	34.995.400,00	504.600,00	98,58
9	Pemberdayaan peternak sapi perah.	310.090.600,00	288.698.600,00	21.392.000,00	93,10
10	Pendistribusian bahan makanan	6.400.000,00	6.208.000,00	192.000,00	97,00
11	Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian	7.191.000,00	4.900.000,00	2.291.000,00	68,14
12	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan masker	316.368.000,00	197.448.000,00	118.920.000,00	62,41
13	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan wastafel gerabah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
14	Identifikasi dan inventarisasi kredit macet dan pembiayaan UMKM	76.325.000,00	24.078.000,00	52.247.000,00	31,55
15	Kemitraan UKM, Marketplace dan Jasa Pengiriman dalam distribusi produk KUMKM	750.928.000,00	460.283.225,00	290.644.775,00	61,30
16	Pemberdayaan Pelaku wisata di Destinasi Wisata dan Desa/Kampung Wisata	637.902.000,00	628.126.027,00	9.775.973,00	98,47
17	Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik	185.198.000,00	171.987.900,00	13.210.100,00	92,87
18	Media Campaign promosi digital	215.320.000,00	215.320.000,00	0,00	100,00
19	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Hygienitas Destinasi Wisata	240.600.000,00	234.600.000,00	6.000.000,00	97,51
20	Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (Brand Awareness) Masa Pemulihan	339.215.000,00	194.985.000,00	144.230.000,00	57,48
21	Pendampingan Simulasi dan Evaluasi SOP Hotel dan Restoran/Rumah Makan "New Normal" Di DIY	83.450.000,00	78.050.000,00	5.400.000,00	93,53
22	Koordinasi penyusunan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	34.750.000,00	25.000.000,00	9.750.000,00	71,94
23	Pemeliharaan Aset Daerah Terdampak	265.414.219,00	130.266.910,00	135.147.309,00	49,08
24	Pendampingan SOP New Normal Destinasi	83.650.000,00	83.650.000,00	0,00	100,00
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Cuci Tangan (wastafel) di Destinasi Wisata Strategis	30.897.510,00	22.594.000,00	8.303.510,00	73,13
26	Padat Karya Mandiri Destinasi Wisata	74.365.000,00	74.365.000,00	0,00	100,00
27	Pengadaan Sarana Kebersihan Desa Wisata	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
28	Persiapan Pembukaan TKM	58.708.500,00	42.328.500,00	16.380.000,00	72,10
29	Padat Karya Mandiri Desa/ Kampung Wisata	117.820.000,00	117.820.000,00	0,00	100,00
30	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	45.066.000,00	36.716.000,00	8.350.000,00	81,47
31	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	63.332.000,00	63.332.000,00	0,00	100,00
32	Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan	141.781.000,00	132.005.864,00	9.775.136,00	93,11
33	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	188.062.000,00	175.562.000,00	12.500.000,00	93,35
34	Peningkatan Kapasitas bagi UMKM	21.845.500,00	21.109.000,00	736.500,00	96,63
35	Media Campaign Pemulihan Ekonomi KUKM	185.925.000,00	185.565.000,00	360.000,00	99,81
36	Pendampingan Sertifikasi IUMK	148.552.000,00	145.880.000,00	2.672.000,00	98,20
37	Pendampingan Sertifikasi PIRT	148.573.000,00	145.907.000,00	2.666.000,00	98,21
38	Sosialisasi dan Pendampingan SOP di Desa/Kampung Wisata	131.514.000,00	130.954.000,00	560.000,00	99,57
39	Sosialisasi Pranatan Anyar di Sektor Perdagangan	93.701.000,00	93.601.000,00	100.000,00	99,89
40	Pelatihan Alih Teknologi Informasi (ATI)	155.195.000,00	154.295.000,00	900.000,00	99,42
41	Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	131.102.000,00	130.802.000,00	300.000,00	99,77
42	Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	135.438.000,00	135.398.000,00	40.000,00	99,97
43	Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura	235.022.000,00	199.284.364,00	35.737.636,00	84,79
44	Penumbuhan Wira Usaha Baru	172.530.000,00	171.366.000,00	1.164.000,00	99,33
45	Fasilitasi menuju Izin Edar Produk UMKM	68.920.000,00	67.240.500,00	1.679.500,00	97,56
46	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pranatan Anyar Plesiran Jogja pada Usaha Jasa Pariwisata	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00
47	Budi daya ilan di lahan sempeti (BUDILAMPIT)	225.575.000,00	210.005.908,00	15.569.092,00	93,10

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
48	Registrasi Kebun	38.475.000,00	38.445.000,00	30.000,00	99,92
49	Pemberdayaan Peternak Kambing Perah	94.150.000,00	92.850.000,00	1.300.000,00	98,62
50	Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Tenaga Kerja Dampak Covid-19	80.360.000,00	65.637.000,00	14.723.000,00	81,68
51	Promosi Pranatan Anyar Potensi Daerah untuk Pemulihan Ekonomi	189.700.000,00	172.322.727,00	17.377.273,00	90,84
	Sub Total	9.203.321.329,00	7.865.205.325,00	1.338.116.004,00	85,46
C.	PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL				
1	Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial terdampak Covid 19	174.378.000.000,00	159.658.400.000,00	14.719.600.000,00	91,56
2	Penyelenggaraan Dapur Umum	3.292.002.000,00	327.474.000,00	2.964.528.000,00	9,95
3	Pemberian bantuan sosial untuk penyandang disabilitas terdampak Covid 19	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	-
4	Pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar berupa sembako,tambahan gizi dalam rangka percepatan penanganan dampak covid 19	450.000.000,00	444.675.000,00	5.325.000,00	98,82
5	Jaminan Hidup ODP	107.530.000,00	0,00	107.530.000,00	-
6	Pengerahan anggota Tagana	1.849.820.000,00	838.670.000,00	1.011.150.000,00	45,34
7	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri	225.000.000,00	110.617.700,00	114.382.300,00	49,16
8	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri dan Penyandang disabilitas	230.700.000,00	227.887.500,00	2.812.500,00	98,78
9	Pendampingan Penyaluran Bantuan	26.460.000,00	2.797.500,00	23.662.500,00	10,57
10	Monev Tim	53.000.000,00	10.800.000,00	42.200.000,00	20,38
11	Biaya Pengiriman Bantuan	24.509.800,00	4.036.500,00	20.473.300,00	16,47
12	Operasional kesekretariatan	54.493.700,00	47.569.550,00	6.924.150,00	87,29
13	Bantuan Sosial untuk mahasiswa	280.556.500,00	263.083.200,00	17.473.300,00	93,77
14	Layanan Dukungan Psikososial	466.910.000,00	385.255.000,00	81.655.000,00	82,51
15	Fasilitasi Distribusi dan Bongkar Muat Logistik	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
16	Bantuan Sosial untuk bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan terdampak Covid-19	67.800.000,00	67.189.800,00	610.200,00	99,10
17	Penyelenggaraan Dapur Umum untuk Isolasi ASN Pemda DIY	48.804.000,00	0,00	48.804.000,00	-
	Sub Total	181.671.086.000,00	162.389.955.750,00	19.281.130.250,00	89,39
	Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.770,00	36.985.830.672,00	89,21

Belanja Tak Terduga dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang terdiri dari Sekretariat dan Bidang-bidang untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62

Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Satuan Gugus Tugas

No.	Uraian	SP2D	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat	16.691.216.601,00	14.942.235.794,45	1.748.980.806,55	89,52
2	Bidang Kesehatan	108.133.907.531,00	96.115.149.484,00	12.018.758.047,00	88,89
3	Bidang Sosial Kemasyarakatan	183.270.928.000,00	163.754.494.933,00	19.516.433.067,00	89,35
4	Bidang Ekonomi	8.725.211.110,00	7.545.202.515,27	1.180.008.594,73	86,48
5	Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	10.862.784.700,00	10.276.901.595,00	585.883.105,00	94,61
6	Bidang Pendidikan	3.586.395.000,00	2.842.028.391,00	744.366.609,00	79,24
7	Bidang Logistik	10.620.980.500,00	9.442.725.056,73	1.178.255.443,27	88,91
8	Bidang Komunikasi dan Informasi	733.760.000,00	720.615.000,00	13.145.000,00	98,21
	Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.769,46	36.985.830.672,55	89,21

5.1.2.4 Belanja Dana Keistimewaan **Rp1.279.572.655.079,63** **Rp1.166.576.228.221,39**

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dan realisasi sebesar Rp5.433.564.049.791,03, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp1.286.576.228.221,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten/Kota untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp1.279.572.655.079,63 atau 96,94% sesuai dengan Berita Acara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Capaian
I	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	14.554.390.500,00	13.266.845.421,00	1.287.545.079,00	91,15
1	Kota Yogyakarta	174.296.500,00	157.614.750,00	16.681.750,00	90,43
2	Kabupaten Bantul	1.270.319.000,00	1.185.032.400,00	85.286.600,00	93,29
3	Kabupaten Kulon Progo	1.289.277.500,00	1.247.489.300,00	41.788.200,00	96,76
4	Kabupaten Gunungkidul	1.213.190.900,00	1.065.057.521,00	148.133.379,00	87,79
5	Kabupaten Sleman	741.920.000,00	728.119.675,00	13.800.325,00	98,14
6	Biro Tata Pemerintahan	238.854.000,00	212.495.000,00	26.359.000,00	88,96
7	Biro Hukum Setda	325.000.000,00	302.111.200,00	22.888.800,00	92,96
8	Biro Organisasi	1.150.752.750,00	923.024.400,00	227.728.350,00	80,21
9	Paniradya Kaistimewaan	7.755.231.850,00	7.057.635.675,00	697.596.175,00	91,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	195.548.000,00	193.685.500,00	1.862.500,00	99,05
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	194.580.000,00	5.420.000,00	97,29
II	KEBUDAYAAN	744.003.521.915,00	714.035.144.010,84	29.968.377.904,16	95,97
1	Kota Yogyakarta	11.986.349.265,00	11.627.809.886,84	358.539.378,16	97,01
2	Kabupaten Bantul	13.747.762.590,00	12.839.672.482,00	908.090.108,00	93,39
3	Kabupaten Kulon Progo	93.604.771.950,00	91.586.440.552,00	2.018.331.398,00	97,84
4	Kabupaten Gunungkidul	81.273.171.500,00	80.080.153.950,00	1.193.017.550,00	98,53
5	Kabupaten Sleman	40.789.854.150,00	40.420.852.720,00	369.001.430,00	99,10
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	657.225.882,00	76,70
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	183.994.000,00	183.994.000,00	-	100,00
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	3.859.991.949,00	89,36
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	864.876.500,00	626.484.000,00	238.392.500,00	72,44
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00
11	Dinas Sosial	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	341.254.730,00	85,92
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	797.875.500,00	714.697.500,00	83.178.000,00	89,58
13	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	102.000.000,00	175.140.400,00	6.859.600,00	96,23
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	905.903.827,00	97,67
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.081.965.250,00	3.842.226.000,00	239.739.250,00	94,13
16	Dinas Kebudayaan	276.814.504.942,00	261.666.622.714,00	15.147.882.228,00	94,53
17	Museum Negeri Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	900.354.612,00	92,78
18	Taman Budaya Yogyakarta	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	231.692.660,00	96,17
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	137.940.080,00	95,77
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.783.547.000,00	1.729.742.300,00	53.804.700,00	96,98
21	Dinas Pariwisata	6.927.825.500,00	5.041.079.190,00	1.886.746.310,00	72,77
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	13.787.450,00	98,99
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.076.626.500,00	3.696.064.350,00	380.562.150,00	90,66
24	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	224.676.000,00	213.216.000,00	11.460.000,00	94,90
25	Badan Penghubung Daerah	857.695.000,00	833.072.888,00	24.622.112,00	97,13
26	PPKD/ BUD	102.220.490.600,00	102.220.490.600,00	-	100,00
III	PERTANAHAN	19.469.545.187,00	16.644.881.594,21	2.824.663.592,79	85,49
1	Kota Yogyakarta	1.239.550.000,00	1.194.422.250,00	45.127.750,00	96,36
2	Kabupaten Bantul	3.857.701.400,00	3.409.016.075,00	448.685.325,00	88,37
3	Kabupaten Kulon Progo	3.170.804.000,00	2.813.892.448,00	356.911.552,00	88,74
4	Kabupaten Gunungkidul	4.789.091.637,00	3.812.290.277,21	976.801.359,79	79,60
5	Kabupaten Sleman	2.361.996.850,00	2.127.286.850,00	234.710.000,00	90,06
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.162.890.800,00	2.444.873.637,00	718.017.163,00	77,30
7	Biro Tata Pemerintahan	264.197.500,00	243.687.000,00	20.510.500,00	92,24
8	Biro Hukum	383.313.000,00	359.413.057,00	23.899.943,00	93,76
9	PPKD/ BUD	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00
IV	TATA RUANG	541.972.542.398,00	535.625.784.053,58	6.346.758.344,42	98,83
1	Kota Yogyakarta	40.312.165.019,00	40.133.491.630,58	178.673.388,42	99,56
2	Kabupaten Bantul	832.710.500,00	826.980.600,00	5.729.900,00	99,31
3	Kabupaten Kulon Progo	4.387.908.950,00	4.384.205.250,00	3.703.700,00	99,92
4	Kabupaten Gunungkidul	634.322.500,00	621.524.100,00	12.798.400,00	97,98
5	Kabupaten Sleman	637.658.000,00	628.358.000,00	9.300.000,00	98,54
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	417.894.725.978,00	412.555.793.455,00	5.338.932.523,00	98,72
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.054.739.788,00	1.373.167.640,00	681.572.148,00	66,83
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.765.710.000,00	3.731.228.683,00	34.481.317,00	99,08
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.660.000,00	34.320.000,00	340.000,00	99,02
10	Dinas Perhubungan	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	76.080.608,00	97,71
11	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	114.942.500,00	114.742.500,00	200.000,00	99,83
12	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	402.839.953,00	401.310.793,00	1.529.160,00	99,62
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	3.417.200,00	99,99
	Jumlah	1.320.000.000,00	1.279.572.655.079,63	40.427.344.920,37	96,94

5.1.3 Transfer **Rp1.085.836.698.996,63** **Rp1.020.779.081.747,71**

Transfer Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.098.322.810.490,00 dan realisasi sebesar Rp1.085.836.698.996,63 atau 98,86%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan **Rp693.891.920.604,00** **Rp735.341.757.826,71**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp693.891.920.604,00 dan realisasi sebesar Rp693.891.920.604,00 atau 100%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp41.449.837.222,71 atau 5,64% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp735.341.757.826,71. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	120.965.338.876,00	120.965.338.876,00	100,00	133.393.876.281,00
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	159.398.655.115,00	159.398.655.115,00	100,00	164.965.839.463,00
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	88.092.018.037,00	88.092.018.037,00	100,00	91.295.702.627,99
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	102.149.130.231,00	102.149.130.231,00	100,00	102.025.720.182,72
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	223.286.778.345,00	223.286.778.345,00	100,00	243.660.619.272,00
Jumlah		693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	100,00	735.341.757.826,71

Untuk Bagi Hasil Pajak atas kelebihan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020, Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kota Yogyakarta	1.602.395.078,00
2	Kabupaten Bantul	5.230.278.485,00
3	Kabupaten Kulon Progo	2.693.378.622,00
4	Kabupaten Gunungkidul	3.783.042.594,00
5	Kabupaten Sleman	8.411.956.163,00
Jumlah		21.721.050.942,00

Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 telah dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan **Rp391.944.778.392,63** **Rp285.437.323.921,00**

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp404.430.889.886,00 dan realisasi sebesar Rp391.944.778.392,63 atau 96,91%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp106.507.454.471,63 atau 37,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp285.437.323.921,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp390.599.778.392,63 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp1.345.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya **Rp390.599.778.392,63** **Rp281.452.614.421,00**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp403.085.889.886,00 dan realisasi sebesar Rp390.599.778.392,63 atau 96,90%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar

Rp109.147.163.971,63 atau 38,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp281.452.614.421,00 hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 ini untuk Pemerintah Kabupaten/Kota telah menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus untuk Dana Keistimewaan. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	98,53	1.236.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	89,99	4.356.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	174.812.830.075,00	170.547.095.225,00	97,56	100.162.270.517,00
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunungkidul	94.793.776.537,00	91.005.025.848,21	96,00	173.379.343.904,00
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
Jumlah		403.085.889.886,00	390.599.778.392,63	96,90	281.452.614.421,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (20 penerima)	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (50 orang)	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
4	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur	286.000.000,00	286.000.000,00	-	100,00
5	Urusan Keistimewaan	53.712.360.784,00	53.113.338.517,42	599.022.266,58	98,88
Jumlah		54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	797.022.266,58	98,53

Tabel 5.67
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (350 penerima)	1.050.000.000,00	642.000.000,00	408.000.000,00	61,14
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 KPM)	57.000.000,00	-	57.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (215 orang)	645.000.000,00	-	645.000.000,00	-
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
5	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (29 penerima)	4.147.000.000,00	4.147.000.000,00	-	100,00
6	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
7	Urusan Keistimewaan	19.708.493.490,00	18.260.701.557,00	1.447.791.933,00	92,65
Jumlah		30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	3.007.791.933,00	89,99

Tabel 5.68

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (374 penerima)	748.000.000,00	748.000.000,00	-	100,00
2	BKK RSUD Wates	63.688.067.675,00	63.688.067.675,00	-	100,00
3	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkar - Pantai Congot	780.000.000,00	-	780.000.000,00	-
4	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroyo, Kec, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	-	100,00
5	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 KPM)	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
6	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (180 orang)	540.000.000,00	-	540.000.000,00	-
7	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
8	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (3 penerima)	429.000.000,00	429.000.000,00	-	100,00
9	Urusan Keistimewaan	102.452.762.400,00	100.032.027.550,00	2.420.734.850,00	97,64
Jumlah		174.812.830.075,00	170.547.095.225,00	4.265.734.850,00	97,56

Tabel 5.69

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (200 penerima)	600.000.000,00	354.000.000,00	246.000.000,00	59,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 KPM)	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (230 orang)	690.000.000,00	-	690.000.000,00	-
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
5	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (4 penerima)	572.000.000,00	572.000.000,00	-	100,00
6	Bantuan Keuangan Pemilikada 2020	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	100,00
7	Urusan Keistimewaan	87.909.776.537,00	85.579.025.848,21	2.330.750.688,79	97,35
Jumlah		94.793.776.537,00	91.005.025.848,21	3.788.750.688,79	96,00

Tabel 5.70

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (200 penerima)	800.000.000,00	800.000.000,00	-	100,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (150 orang)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (12 penerima)	1.716.000.000,00	1.716.000.000,00	-	100,00
5	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00
6	Urusan Keistimewaan	44.531.429.000,00	43.904.617.245,00	626.811.755,00	98,59
Jumlah		49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	626.811.755,00	98,72

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp1.345.000.000,00 Rp1.560.062.700,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.345.000.000,00 atau 100%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp215.062.700,00 atau sebesar 13,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.560.062.700,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71

Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Penguatan tebing pemukiman huntap Plosokerep	995.000.000,00	995.000.000,00	-	100,00
2	Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
3	Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
Jumlah		1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	-	100,00

5.1.3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp0,00 Rp2.424.646.800,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun 2019 merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sesuai dengan perubahan regulasi terkait dengan Bantuan Partai Politik, Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah kepada Partai Politik, sehingga realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.1.4 Surplus (Defisit) Rp178.330.224.944,04 Rp154.706.802.110,48

Surplus sebesar Rp178.330.224.944,04 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020. Surplus Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.623.422.833,56 atau 15,27% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2019 yaitu sebesar Rp154.706.802.110,48. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.72
Surplus/Defisit

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	100,96	5.699.357.232.440,50
2	Belanja dan Transfer	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	92,63	5.544.650.430.330,02
3	Surplus/Defisit	(307.479.919.295,42)	178.330.224.944,04	(58,00)	154.706.802.110,48

5.1.5 Pembiayaan Netto Rp306.122.988.195,42 Rp265.861.156.884,94

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp306.122.988.195,42, yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp423.712.988.195,42 Rp474.458.156.884,94

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp423.712.988.195,42. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp50.745.168.689,52 atau 10,70% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp474.458.156.884,94. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp423.712.988.195,42 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	100,00	471.794.246.868,94
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00	69,86	2.663.910.016,00
Jumlah		425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	99,68	474.458.156.884,94

- Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp420.567.958.995,42 merupakan SiLPA Tahun 2019 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2020.
- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp4.501.960.300,00 dan realisasi sebesar Rp3.145.029.200,00 terdiri dari penerimaan pembayaran dana bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp55.000.000,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.090.029.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	55.000.000,00	(55.000.000,00)	-
	Program DPM LDPM	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
	Program DPM LUPEP	-	52.000.000,00	(52.000.000,00)	-
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.501.960.300,00	3.090.029.200,00	1.411.931.100,00	44,43
	Program Ketahanan Pangan 14 Kecamatan (Koperasi)	-	600.000,00	(600.000,00)	-
	Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	-	1.088.429.200,00	(1.088.429.200,00)	-
	Dana Bergulir dari Dana BUKP	4.501.960.300,00	2.000.000.000,00	2.501.960.300,00	44,43
	Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Erupsi)	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
Jumlah		4.501.960.300,00	3.145.029.200,00	1.356.931.100,00	44,43

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan**Rp117.590.000.000,00****Rp208.597.000.000,00**

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp117.590.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.007.000.000,00 atau 43,63% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp208.597.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp117.590.000.000,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada:
- 1) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp101.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.000.000.000,00 atau 100%;
 - 2) PT. ASKRIDA dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 100%; dan
 - 3) Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Air Bersih Tirtatama dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100%.

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Air Bersih Tirtatama yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Penyertaan Modal Pemda DIY pada Perusda Air Bersih Tirtatama dilakukan berdasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang senilai Rp179.222.362.679,00.

- 4) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% melalui BUKP.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**Rp484.453.213.139,46****Rp420.567.958.995,42**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp484.453.213.139,46, mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.75**Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	100,96	-
2	Belanja dan Transfer	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	92,63	-
3	Surplus/Defisit	(307.479.919.295,42)	178.330.224.944,04	(58,00)	-
4	Pembiayaan Netto	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	99,56	265.861.156.884,94
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	484.453.213.139,46	-	265.861.156.884,94

SILPA sebesar Rp484.453.213.139,46 tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	441.671.236.637,40
	Giro BPD	441.542.977.462,04
	Setoran Pengembalian dari Pihak Ketiga	128.259.175,36
2	Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00
	Bendahara Penerima DPUPESDM	1.334.000,00
	Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	4.127.000,00
	Bendahara Penerima DLHK	3.682.919,00
	Bendaharan Penerima Dinas Koperasi dan UKM	43.531.291,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00
	Bendahara Pengeluaran BKD	4.405.460,00
	Bendahara Pengeluaran di DPAD	2.113.000,00
4	Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00
5	Kas di BLUD	32.677.963.006,06
	SILPA di BLUD RS Jiwa Ghrasia	9.362.753.244,15
	SILPA di BLUD BLPT	2.657.212.910,00
	SILPA di BLUD BAPELJAMKESOS	2.108.285.943,29
	SILPA di BLUD Balai Latihan Kesehatan	3.246.671.492,00
	SILPA di BLUD RS Paru Respira	10.677.399.119,00
	SILPA di Balai Laboratorium Kesehatan	4.625.640.297,62
6	Kas Lainnya	88.015,00
	Kas di Bendahara Sumbangan Penanganan Covid-19	88.015,00
Jumlah		484.453.213.139,46

Penjelasan:

1. SILPA di BUD sebesar Rp441.671.236.637,40 terdiri dari Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059 sebesar Rp441.542.977.462,04 dan Setoran Pengembalian atas kelebihan pembayaran pada Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.143.919,00 meliputi Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.334.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp4.127.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.682.919,00, dan Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp43.531.291,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.518.460,00 merupakan setoran pengembalian belanja yang sumber dananya dari SP2D UP/GU pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.405.460,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.113.000,00.
4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang diterima langsung oleh Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri.
5. Kas di BLUD sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan kas yang ada di rekening BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Jiwa Ghrasia	
	SILPA 31 Desember 2019	8.052.144.460,15
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	18.656.156.571,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	17.345.547.787,00
	SILPA 31 Desember 2020	9.362.753.244,15
2	Balai Latihan Pendidikan Teknik	
	SILPA 31 Desember 2019	2.653.578.243,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	1.462.360.117,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	1.458.725.450,00
	SILPA 31 Desember 2020	2.657.212.910,00
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	
	SILPA 31 Desember 2019	2.060.068.305,29
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	48.217.638,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	-
	SILPA 31 Desember 2020	2.108.285.943,29
4	Balai Pelatihan Kesehatan	
	SILPA 31 Desember 2019	3.066.421.643,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	1.523.156.103,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	1.342.906.254,00
	SILPA 31 Desember 2020	3.246.671.492,00
5	RS Paru Respira	
	SILPA 31 Desember 2019	8.512.709.497,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	11.755.363.058,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	9.590.673.436,00
	SILPA 31 Desember 2019	10.677.399.119,00
6	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	
	SILPA 31 Desember 2019	3.369.247.849,62
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	5.499.852.228,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	4.243.459.780,00
	SILPA 31 Desember 2020	4.625.640.297,62
Jumlah SILPA BLUD		32.677.963.006,06

6. Kas Lainnya sebesar Rp88.015,00 merupakan penerimaan bunga rekening Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Covid-19 pada BPBD yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

5.2. RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp420.567.958.995,42 Rp471.794.246.868,94

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp420.567.958.995,42 mengalami penurunan sebesar Rp51.226.287.873,52 atau 10,86% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp471.794.246.868,94. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2020.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 berasal dari:

Tabel 5.77

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	5.611.510.924.299,71
2	Belanja dan Transfer	5.433.180.699.355,67
	Surplus (Defisit)	178.330.224.944,04
3	Penerimaan Pembiayaan	423.712.988.195,42
4	Pengeluaran Pembiayaan	(117.590.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	306.122.988.195,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	484.453.213.139,46

5.2.3. Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan.

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA

5.3.1 Aset	Rp11.335.536.076.401,00	Rp10.384.581.587.538,70
5.3.1.1 Aset Lancar	Rp672.000.559.071,08	Rp565.036.388.454,07
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	Rp 484.453.213.139,46	Rp433.555.460.454,42

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 484.453.213.139,46 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp441.671.236.637,40	Rp385.653.593.288,36
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp441.671.236.637,40 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp439.850.345.019,04, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.692.632,443,00 dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.671.236.637,40 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.017.643.349,04 atau 14,53% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp385.653.593.288,36.

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	441.542.977.462,04	385.582.061.588,36
2.	Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga	128.259.175,36	71.531.700,00
	Jumlah	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp52.675.210,00	Rp54.694.388,00
--	------------------------	------------------------

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.019.178,00 atau 3,69% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.694.388,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan berikut nomor STS dan tanggal penyetoran ke Kasda adalah sebagai berikut:

OPD	No. STS	Tanggal	Jumlah
Dinas Perhubungan	33037/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	230.000,00
	33038/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	712.000,00
	33039/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	564.000,00
	33040/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	216.000,00
	33041/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	246.000,00
	33042/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	1.046.000,00
	33043/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	703.000,00
	33044/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	410.000,00
Dinas PUPESDM	00001/STS/BALAIPIALAM/01/2021	4 Januari 2021	1.334.000,00
Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	391/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	3.634.919,00
	390/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	48.000,00

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	00004/STS/2.17.01/A01/04/2020	1 April 2021	43.531.291,00
Jumlah			52.675.210,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp6.518.460,00 Rp7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2010. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.138.982.861,00 atau 99,91% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.145.501.321,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	6.921.089.344,00
	a. Setor Kas Daerah	0,00	142.500.000,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2019)	0,00	474.194.489,00
	c. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2020)	0,00	6.304.394.855,00
2.	Dinas Kebudayaan (Taman Budaya)	0,00	12.000.000,00
3.	PPKD	0,00	212.411.977,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.113.000,00	0,00
5.	Badan Kepegawaian Daerah	4.405.460,00	0,00
	Jumlah	6.518.460,00	7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.921.089.344,00 di dalamnya termasuk Saldo Kas BOS di sekolah sebesar Rp6.778.589.344,00. Dalam Neraca per 31 Desember 2020, sisa Kas BOS disajikan dalam akun Kas di Bendahara BOS. Penyajian didasarkan pada Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dimana salah satunya mengatur bahwa untuk pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Bendahara BOS. Untuk Tahun 2020 Bendahara BOS telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KEP/2020 tentang Penunjukkan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD Rp32.677.963.006,06 Rp27.714.169.998,06

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 mengalami peningkatan sebesar Rp4.963.793.008,00 atau 17,91% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27.714.169.998,06. Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	RS Ghrasia	9.362.753.244,15	8.052.144.460,15
2	RS Paru Respira	10.677.399.119,00	8.512.709.497,00
3	Balai Pelayanan Jamkessos	2.108.285.943,29	2.060.068.305,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	3.246.671.492,00	3.066.421.643,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	4.625.640.297,62	3.369.247.849,62
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.657.212.910,00	2.653.578.243,00

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
	Jumlah	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06

Penjelasan:

- Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp9.362.753.244,15 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY No. 041.111.000043 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp9.360.340.315,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp2.412.929,00.
- Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp 10.677.399.119,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp10.661.454.406,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp15.944.713,00.
- Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesmas sebesar Rp2.108.285.943,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.104.778.230,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp3.507.713,00.
- Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.246.671.492,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.00005 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp3.239.035.266,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp7.636.226,00.
- Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp4.625.640.297,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp4.619.400.751,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp6.239.546,00.
- Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.657.212.910,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.653.005.348,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp4.207.562,00 .

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS Rp10.044.731.811,00 Rp0,00

Kas di Bendahara BOS merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp10.044.731.811,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp614.183.396,00 dengan rincian sesuai dengan Tabel 5.81 dan Sisa Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp9.430.548.415,00 sesuai dengan rincian Tabel 5.82.

Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan karena pada Neraca per 31 Desember 2019, sisa Kas BOS disajikan menjadi satu dalam Akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Hal tersebut disebabkan belum ada penunjukkan Bendahara BOS secara formal. Penyajian sisa Kas BOS per 31 Desember 2020 pada Akun Kas di Bendahara BOS berdasarkan pada Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dimana salah satunya mengatur bahwa untuk pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Bendahara BOS. Untuk Tahun 2020 Bendahara BOS telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KEP/2020 tentang Penunjukkan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.81

Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	-	10.050.575,00	10.050.575,00	10.050.575,00	-
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	-	62.952.701,00	62.952.701,00	62.952.701,00	-
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	-	3.471.978,00	3.471.978,00	3.471.978,00	-
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	-	20.961.535,00	20.961.535,00	20.961.535,00	-
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	-	7.548.001,00	7.548.001,00	-	7.548.001,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	-	2.763.063,00	2.763.063,00	2.760.800,00	2.263,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	-	74.856.991,00	74.856.991,00	74.856.991,00	-
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	-	11.084.320,00	11.084.320,00	11.084.320,00	-
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	-	40.793.094,00	40.793.094,00	40.793.094,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	-	924.000,00	924.000,00	924.000,00	-
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	-	95.821.000,00	95.821.000,00	95.821.000,00	-
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	-	356.000,00	356.000,00	356.000,00	-
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	91,00	5.847.492,00	5.847.583,00	5.847.583,00	-
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	-	1.100.144,00	1.100.144,00	1.100.144,00	-
15	SMA Negeri 1 Bantul	-	1.636.080,00	1.636.080,00	1.636.080,00	-
16	SMA Negeri 2 Bantul	80,00	-	80,00	-	80,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	-	2.163.400,00	2.163.400,00	63.400,00	2.100.000,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	-	-	-	-	-
19	SMA Negeri 1 Imogiri	-	930.300,00	930.300,00	930.300,00	-
20	SMA Negeri 1 Jetis	-	348.706,00	348.706,00	348.706,00	-
21	SMA Negeri 1 Kasihan	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
22	SMA Negeri 1 Kretek	-	425.000,00	425.000,00	-	425.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	-	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
24	SMA Negeri 1 Piyungan	-	37.181.320,00	37.181.320,00	37.181.320,00	-
25	SMA Negeri 1 Pleret	-	5.975.400,00	5.975.400,00	5.975.400,00	-
26	SMA Negeri 1 Pundong	-	-	-	-	-
27	SMA Negeri 1 Sanden	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
28	SMA Negeri 1 Sedayu	-	-	-	-	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	100.000,00	3.574.625,00	3.674.625,00	3.674.625,00	-
30	SMA Negeri 1 Srandakan	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
31	SMA Negeri 1 Galur	-	467.300,00	467.300,00	467.300,00	-
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	-	4.666.997,00	4.666.997,00	4.666.997,00	-
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	-	6.128.446,00	6.128.446,00	6.128.446,00	-
34	SMA Negeri 1 Kokap	-	2.264.175,00	2.264.175,00	2.264.175,00	-
35	SMA Negeri 1 Lendah	-	-	-	-	-
36	SMA Negeri 1 Pengasih	-	1.540.550	1.540.550,00	1.540.550	-
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	-	-	-	-	-
38	SMA Negeri 1 Sentolo	-	34.567.700	34.567.700,00	34.365.860	201.840,00
39	SMA Negeri 1 Temon	-	23.086.600	23.086.600,00	23.086.600	-
40	SMA Negeri 1 Wates	-	51.066.273	51.066.273,00	51.066.273	-
41	SMA Negeri 2 Wates	-	-	-	-	-
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	-	24.852.211,00	24.852.211,00	24.852.200,00	11,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	-	21.739.125,00	21.739.125,00	21.739.125,00	-
44	SMA Negeri 1 Patuk	-	-	-	-	-
45	SMA Negeri 1 Playen	-	45.900.700,00	45.900.700,00	44.700.700,00	1.200.000,00
46	SMA Negeri 2 Playen	-	47.008.040,00	47.008.040,00	47.008.040,00	-
47	SMA Negeri 1 Rongkop	-	3.200.000,00	3.200.000,00	2.160.000,00	1.040.000,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	-	3.209.080,00	3.209.080,00	-	3.209.080,00
49	SMA Negeri 1 Semin	-	7.772.000,00	7.772.000,00	7.772.000,00	-
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	-	-	-	-	-
51	SMA Negeri 1 Wonosari	-	40.394.802,00	40.394.802,00	40.394.802,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
52	SMA Negeri 2 Wonosari	-	2.334.500,00	2.334.500,00	2.334.500,00	-
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	-	-	-	-	-
54	SMA Negeri 1 Depok	-	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	-
55	SMA Negeri 1 Gamping	-	-	-	-	-
56	SMA Negeri 1 Godean	-	-	-	-	-
57	SMA Negeri 1 Kalasan	-	162.400,00	162.400,00	162.400,00	-
58	SMA Negeri 1 Minggir	-	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-
59	SMA Negeri 1 Mlati	-	-	-	-	-
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	-	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	-
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	-	4.968.869,00	4.968.869,00	4.968.869,00	-
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	-	64.995.600,00	64.995.600,00	64.995.600,00	-
63	SMA Negeri 1 Pakem	42,00	4.788.950,00	4.788.992,00	4.788.600,00	392,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	-	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-
65	SMA Negeri 1 Seyegan	-	-	-	-	-
66	SMA Negeri 1 Sleman	-	-	-	-	-
67	SMA Negeri 2 Sleman	-	-	-	-	-
68	SMA Negeri 1 Tempel	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
69	SMA Negeri 1 Turi	-	132.696.800,00	132.696.800,00	132.696.800,00	-
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	1.275.850,00	530.456.796,00	711.732.646,00	707.756.485,00	3.976.161,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	-	1.338.387.182,00	1.338.387.182,00	860.856.000,00	477.531.182,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	-	6.087.758,00	6.087.758,00	6.087.758,00	-
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	-	244.028.500,00	244.028.500,00	244.028.500,00	-
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	-	122.159.350,00	122.159.350,00	122.159.350,00	-
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	-	-	-	-	-
77	SMK Negeri 1 Bantul	-	383.798.271,00	383.798.271,00	383.798.271,00	-
78	SMK Negeri 1 Dlingo	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	-	158.471.350,00	158.471.350,00	158.403.300,00	68.050,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	.044.135,00	44.347.570,00	96.391.705,00	96.391.705,00	-
81	SMK Negeri 3 Kasihan	-	57.347.806,00	57.347.806,00	57.347.806,00	-
82	SMK Negeri 1 Pajangan	-	7.733.370,00	7.733.370,00	7.733.370,00	-
83	SMK Negeri 1 Pandak	-	94.599.100,00	94.599.100,00	94.599.100,00	-
84	SMK Negeri 1 Pleret	-	78.050.554,00	78.050.554,00	78.050.554,00	-
85	SMK Negeri 1 Pundong	-	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-
86	SMK Negeri 1 Sanden	4.059.938,00	70.404.938,00	284.464.876,00	237.220.886,00	47.243.990,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	-	106.782.950,00	106.782.950,00	106.782.950,00	-
88	SMK Negeri 1 Sewon	-	381.678.000,00	381.678.000,00	366.578.000,00	15.100.000,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	-	76.467.500,00	76.467.500,00	76.467.500,00	-
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	-	-	-	-	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	-	-	-	-	-
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	6.557.643,00	199.828.170,00	226.385.813,00	224.948.506,00	1.437.307,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	-	1.965.826,00	1.965.826,00	1.965.826,00	-
94	SMK Negeri 1 Pengasih	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
95	SMK Negeri 2 Pengasih	-	27.412.441,00	27.412.441,00	27.412.441,00	-
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	-	43.993.250,00	43.993.250,00	43.993.250,00	-
97	SMK Negeri 1 Temon	50,00	430.812.825,00	430.812.875,00	430.812.875,00	-
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	-	27.835.550,00	27.835.550,00	26.950.000,00	885.550,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	-	12.504.400,00	12.504.400,00	12.503.755,00	645,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
100	SMK Negeri 1 Girisubo	-	132.064.820,00	132.064.820,00	82.064.820,00	50.000.000,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	-	67.651.414,00	67.651.414,00	67.651.414,00	-
102	SMK Negeri 1 Nglipar	-	28.139.539,00	28.139.539,00	28.139.530,00	9,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	-	49.851.425,00	49.851.425,00	48.861.000,00	990.425,00
104	SMK Negeri 1 Purwosari	-	39.231.325,00	39.231.325,00	39.061.000,00	170.325,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	-	-	-	-	-
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	-	4.137.215,00	4.137.215,00	4.137.215,00	-
107	SMK Negeri 1 Tepus	-	85.016.500,00	85.016.500,00	85.016.500,00	-
108	SMK Negeri 1 Wonosari	-	80.200,00	80.200,00	80.200,00	-
109	SMK Negeri 2 Wonosari	-	67.409.821,00	67.409.821,00	67.409.821,00	-
110	SMK Negeri 3 Wonosari	-	-	-	-	-
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	-	43.298.109,00	43.298.109,00	43.298.109,00	-
112	SMK Negeri 1 Depok	-	33.018.800,00	33.018.800,00	33.018.800,00	-
113	SMK Negeri 2 Depok	-	36.466.864,00	36.466.864,00	36.466.000,00	864,00
114	SMK Negeri 1 Godean	-	43.641.612,00	43.641.612,00	43.641.612,00	-
115	SMK Negeri 2 Godean	-	40.913.860,00	40.913.860,00	40.913.860,00	-
116	SMK Negeri 1 Kalasan	-	19.421.920,00	19.421.920,00	19.421.920,00	-
117	SMK Negeri 1 Seyegan	156.660,00	34.299.540,00	34.456.200,00	34.456.180,00	20,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	-	70.442.900,00	70.442.900,00	70.442.900,00	-
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	-	912.500,00	912.500,00	912.500,00	-
121	SLB/C N Pembina	-	12.685.240,00	12.685.240,00	12.685.240,00	-
122	SLB N 1 Bantul	-	60.070.201,00	60.070.201,00	59.570.000,00	500.201,00
123	SLB N 2 Bantul	-	342.000,00	342.000,00	-	342.000,00
124	SLB N 1 Sleman	-	-	-	-	-
125	SLB N 1 Gunungkidul	-	29.605.350,00	29.605.350,00	29.605.350,00	-
126	SLB N 2 Gunungkidul	-	-	-	-	-
127	SLB N 1 Kulon Progo	-	1.629.400,00	1.629.400,00	1.629.400,00	-
	Jumlah	74.194.489,00	6.304.394.855,00	6.778.589.344,00	6.164.405.948,00	614.183.396,00

Tabel 5.82

Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.360.350.000,00	1.151.600.395,00	208.749.605,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.351.350.000,00	1.256.560.643,00	94.789.357,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.055.550.000,00	1.026.968.341,00	28.581.659,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.190.250.000,00	894.902.211,00	295.347.789,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.220.550.000,00	1.193.446.447,00	27.103.553,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.209.300.000,00	1.180.577.019,00	28.722.981,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.191.300.000,00	1.115.755.254,00	75.544.746,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.221.000.000,00	1.185.700.940,00	35.299.060,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	979.050.000,00	801.828.699,00	177.221.301,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	850.950.000,00	837.000.000,00	13.950.000,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.336.650.000,00	1.315.500.000,00	21.150.000,00
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	896.700.000,00	869.516.734,00	27.183.266,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	1.034.400.000,00	1.024.500.000,00	9.900.000,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	1.047.900.000,00	1.042.418.616,00	5.481.384,00
15	SMA Negeri 1 Bantul	1.332.000.000,00	1.313.994.841,00	18.005.159,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
16	SMA Negeri 2 Bantul	1.225.350.000,00	1.200.250.040,00	25.099.960,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	935.250.000,00	927.562.400,00	7.687.600,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	632.550.000,00	632.548.800,00	1.200,00
19	SMA Negeri 1 Imogiri	892.650.000,00	877.622.950,00	15.027.050,00
20	SMA Negeri 1 Jetis	1.213.650.000,00	1.191.553.967,00	22.096.033,00
21	SMA Negeri 1 Kasihan	1.208.400.000,00	1.142.623.956,00	65.776.044,00
22	SMA Negeri 1 Kretek	628.050.000,00	606.000.000,00	22.050.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	775.350.000,00	760.500.000,00	14.850.000,00
24	SMA Negeri 1 Piyungan	806.850.000,00	801.000.000,00	5.850.000,00
25	SMA Negeri 1 Pleret	734.700.000,00	726.164.500,00	8.535.500,00
26	SMA Negeri 1 Pundong	884.250.000,00	881.980.000,00	2.270.000,00
27	SMA Negeri 1 Sanden	896.850.000,00	886.500.000,00	10.350.000,00
28	SMA Negeri 1 Sedayu	1.322.100.000,00	1.322.100.000,00	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	1.575.300.000,00	1.549.846.600,00	25.453.400,00
30	SMA Negeri 1 Srandakan	548.400.000,00	529.176.413,00	19.223.587,00
31	SMA Negeri 1 Galur	487.500.000,00	476.476.798,00	11.023.202,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	432.000.000,00	431.668.600,00	331.400,00
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	567.150.000,00	533.103.423,00	34.046.577,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	254.550.000,00	254.241.000,00	309.000,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	866.250.000	863.239.010	3.010.990,00
36	SMA Negeri 1 Pengasih	922.050.000	912.624.290	9.425.710,00
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	264.450.000	259.500.000	4.950.000,00
38	SMA Negeri 1 Sentolo	793.050.000	781.360.225	11.689.775,00
39	SMA Negeri 1 Temon	559.350.000	547.250.188	12.099.812,00
40	SMA Negeri 1 Wates	1.062.000.000	1.040.792.213	21.207.787,00
41	SMA Negeri 2 Wates	754.200.000	740.517.000	13.683.000,00
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	1.019.400.000,00	953.522.101,00	65.877.899,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	645.450.000,00	606.389.081,00	39.060.919,00
44	SMA Negeri 1 Patuk	666.900.000,00	649.210.028,00	17.689.972,00
45	SMA Negeri 1 Playen	528.750.000,00	500.153.522,00	28.596.478,00
46	SMA Negeri 2 Playen	957.300.000,00	911.814.231,00	45.485.769,00
47	SMA Negeri 1 Rongkop	514.350.000,00	481.855.029,00	32.494.971,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	380.550.000,00	346.198.541,00	34.351.459,00
49	SMA Negeri 1 Semin	965.700.000,00	953.997.699,00	11.702.301,00
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	673.500.000,00	593.419.300,00	80.080.700,00
51	SMA Negeri 1 Wonosari	1.052.550.000,00	984.326.670,00	68.223.330,00
52	SMA Negeri 2 Wonosari	972.900.000,00	908.397.453,00	64.502.547,00
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	595.500.000,00	587.295.950,00	8.204.050,00
54	SMA Negeri 1 Depok	899.550.000,00	890.899.356,00	8.650.644,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	584.400.000,00	562.800.000,00	21.600.000,00
56	SMA Negeri 1 Godean	899.850.000,00	889.496.559,00	10.353.441,00
57	SMA Negeri 1 Kalasan	1.116.150.000,00	1.098.123.282,00	18.026.718,00
58	SMA Negeri 1 Minggir	580.050.000,00	566.459.842,00	13.590.158,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	588.900.000,00	579.000.000,00	9.900.000,00
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	956.850.000,00	881.348.704,00	75.501.296,00
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	1.101.000.000,00	1.092.000.000,00	9.000.000,00
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	589.800.000,00	581.815.602,00	7.984.398,00
63	SMA Negeri 1 Pakem	738.450.000,00	728.882.444,00	9.567.556,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	1.073.700.000,00	1.048.439.970,00	25.260.030,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
65	SMA Negeri 1 Seyegan	1.200.900.000,00	1.159.500.000,00	41.400.000,00
66	SMA Negeri 1 Sleman	1.021.500.000,00	999.000.000,00	22.500.000,00
67	SMA Negeri 2 Sleman	591.600.000,00	575.865.125,00	15.734.875,00
68	SMA Negeri 1 Tempel	544.650.000,00	541.500.000,00	3.150.000,00
69	SMA Negeri 1 Turi	571.050.000,00	492.376.355,00	78.673.645,00
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	937.440.000,00	880.631.733,00	56.808.267,00
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	3.501.600.000,00	3.296.972.741,00	204.627.259,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.890.720.000,00	1.827.371.938,00	1.063.348.062,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.753.600.000,00	2.522.026.795,00	231.573.205,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.073.120.000,00	1.917.748.819,00	155.371.181,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.027.200.000,00	1.619.809.074,00	407.390.926,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.572.000.000,00	1.497.618.338,00	74.381.662,00
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.554.880.000,00	2.075.275.243,00	479.604.757,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	661.760.000,00	658.453.000,00	3.307.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	1.189.440.000,00	1.138.963.302,00	50.476.698,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	755.040.000,00	618.543.220,00	136.496.780,00
81	SMK Negeri 3 Kasihan	1.648.800.000,00	1.588.185.220,00	60.614.780,00
82	SMK Negeri 1 Pajangan	703.680.000,00	679.226.018,00	24.453.982,00
83	SMK Negeri 1 Pandak	1.350.240.000,00	1.180.273.400,00	169.966.600,00
84	SMK Negeri 1 Pleret	1.180.800.000,00	1.132.029.196,00	48.770.804,00
85	SMK Negeri 1 Pundong	1.255.360.000,00	1.243.950.020,00	11.409.980,00
86	SMK Negeri 1 Sanden	705.920.000,00	660.355.969,00	45.564.031,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	2.003.040.000,00	1.579.871.172,00	423.168.828,00
88	SMK Negeri 1 Sewon	3.257.440.000,00	3.133.224.904,00	124.215.096,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	1.102.080.000,00	924.768.585,00	177.311.415,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	413.920.000,00	413.920.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	615.360.000,00	599.891.500,00	15.468.500,00
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	1.333.920.000,00	1.279.556.937,00	54.363.063,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	1.102.880.000,00	1.090.612.686,00	12.267.314,00
94	SMK Negeri 1 Pengasih	1.611.040.000,00	1.589.815.250,00	21.224.750,00
95	SMK Negeri 2 Pengasih	2.768.320.000,00	2.667.906.478,00	100.413.522,00
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	687.200.000,00	643.259.450,00	43.940.550,00
97	SMK Negeri 1 Temon	654.400.000,00	532.579.267,00	121.820.733,00
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	781.600.000,00	721.148.570,00	60.451.430,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	1.100.320.000,00	1.018.502.722,00	81.817.278,00
100	SMK Negeri 1 Girisubo	800.960.000,00	752.968.421,00	47.991.579,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	1.773.600.000,00	1.579.842.394,00	193.757.606,00
102	SMK Negeri 1 Nglipar	1.235.520.000,00	1.232.237.545,00	3.282.455,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	1.059.200.000,00	1.041.114.505,00	18.085.495,00
104	SMK Negeri 1 Purwosari	813.120.000,00	773.938.073,00	39.181.927,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	1.795.200.000,00	1.771.200.000,00	24.000.000,00
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	460.800.000,00	446.285.139,00	14.514.861,00
107	SMK Negeri 1 Tepus	742.720.000,00	598.456.627,00	144.263.373,00
108	SMK Negeri 1 Wonosari	2.084.640.000,00	2.051.126.336,00	33.513.664,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	2.368.320.000,00	2.317.069.294,00	51.250.706,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	1.743.680.000,00	1.702.400.000,00	41.280.000,00
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.506.720.000,00	1.328.846.419,00	177.873.581,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.426.560.000,00	1.352.638.750,00	73.921.250,00
113	SMK Negeri 2 Depok	3.869.280.000,00	2.991.002.447,00	878.277.553,00

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
114	SMK Negeri 1 Godean	1.600.320.000,00	1.413.432.043,00	186.887.957,00
115	SMK Negeri 2 Godean	1.222.400.000,00	1.119.903.727,00	102.496.273,00
116	SMK Negeri 1 Kalasan	1.853.120.000,00	1.807.373.632,00	45.746.368,00
117	SMK Negeri 1 Seyegan	2.224.000.000,00	2.118.828.806,00	105.171.194,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	1.564.640.000,00	1.514.320.661,00	50.319.339,00
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	185.800.000,00	177.792.115,00	8.007.885,00
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	192.600.000,00	189.395.491,00	3.204.509,00
121	SLB/C N Pembina	474.800.000,00	438.618.940,00	36.181.060,00
122	SLB N 1 Bantul	634.000.000,00	356.668.926,00	277.331.074,00
123	SLB N 2 Bantul	193.400.000,00	176.692.925,00	16.707.075,00
124	SLB N 1 Sleman	235.400.000,00	231.512.200,00	3.887.800,00
125	SLB N 1 Gunungkidul	319.000.000,00	239.347.400,00	79.652.600,00
126	SLB N 2 Gunungkidul	135.200.000,00	134.000.000,00	1.200.000,00
127	SLB N 1 Kulon Progo	377.600.000,00	365.907.865,00	11.692.135,00
	Jumlah	138.636.520.000,00	129.205.971.585,00	9.430.548.415,00

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp88.015,00

Rp12.987.501.459,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.015,00 merupakan penerimaan bunga pada Rekening Sumbangan Masyarakat Untuk Penanganan *Covid-19* pada BPBD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Saldo Kas Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.987.501.459,00 yang merupakan Kas di Rekening SMA/SMK dari serah terima P3D sebesar Rp1.967.403.459,00 telah disetor ke Kas Daerah, sedangkan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri sebesar Rp8.399.331.000,00 dan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Swasta sebesar Rp2.620.767.000,00 telah disalurkan ke siswa yang berhak.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp5.339.277.997,85

Rp8.814.302.709,12

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.339.277.997,85 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Rp171.173.000,00

Rp222.791.500,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.173.000,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp122.067.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp49.106.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Akhir 31/12/2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2020
1	Piutang PKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	31.964.000,00	-	1.027.500,00	30.936.500,00
	KPPD di Kab. Bantul	33.936.200,00	-	6.720.100,00	27.216.100,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	8.266.800,00	123.791.900,00	113.752.200,00	18.306.500,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	16.629.000,00	-	11.070.000,00	5.559.000,00
	KPPD di Kab. Sleman	82.334.500,00	-	42.285.600,00	40.048.900,00
	Jumlah	173.130.500,00	123.791.900,00	174.855.400,00	122.067.000,00
2	Piutang BBNKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	9.558.000,00	-	5.381.000,00	4.177.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	950.000,00	62.616.000,00	54.783.000,00	8.783.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	-	-	-	-
	KPPD di Kab. Sleman	37.098.000,00	-	3.007.000,00	34.091.000,00
	Jumlah	49.661.000,00	62.616.000,00	63.171.000,00	49.106.000,00
	Jumlah Total	222.791.500,00	186.407.900,00	238.026.400,00	171.173.000,00

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	15.330.500,00	8.783.000,00	24.113.500,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	12.898.500,00	-	12.898.500,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	43.695.500,00	29.300.000,00	72.995.500,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	50.142.500,00	11.023.000,00	61.165.500,00
	Jumlah	122.067.000,00	49.106.000,00	171.173.000,00

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp55.490.355.500,00 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

No	Unit Kerja	Jumlah Kendaraan (Unit)	Nilai Tagihan (Rp)
1.	KPPD di Kota Yogyakarta	33.715	11.110.654.800,00
2.	KPPD di Kabupaten Bantul	44.225	15.129.800.500,00
3.	KPPD di Kabupaten Kulon Progo	13.692	3.518.953.600,00
4.	KPPD di Kabupaten Gunungkidul	21.907	4.986.239.300,00
5.	KPPD di Kabupaten Sleman	60.533	20.744.707.300,00
	Jumlah	174.072	55.490.355.500,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi**Rp1.847.960.188,00****Rp442.993.902,66**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.847.960.188,00 merupakan:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp489.293.338,00 dalam kondisi lancar.
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
- Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai PIALAM DPU ESDM sebesar Rp1.353.416.850,00 dalam kondisi lancar sebesar Rp944.224.875,00, kurang lancar sebesar Rp296.063.775,00 dan diragukan sebesar Rp113.128.200,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**Rp3.320.144.809,85****Rp8.148.517.306,46**

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.320.144.809,85 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00, Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30, dan Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86**Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**

No	OPD	Saldo Awal 31-12-2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2020
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	229.568.281,55	-	12.570.000,00	216.998.281,55
	Jumlah	229.568.281,55			216.998.281,55
2.	BPKA				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	73.619.050,00	15.062.500,00	47.603.100,00	41.078.450,00
	Jumlah	75.669.050,00			43.128.450,00
3.	RS Ghrasia				
	Piutang BLUD	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00
	Jumlah	3.792.697.805,00			1.606.046.629,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	82.080.359,00	50.702.500,00	-	132.782.859,00
	Jumlah	82.080.359,00			132.782.859,00
5.	RS RESPIRA				
	Piutang BLUD	2.341.292.219,00	3.553.447.452,00	4.656.214.480,00	1.238.525.191,00
	Jumlah	2.341.292.219,00			1.238.525.191,00
6.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.627.209.591,91	-	1.627.209.591,91	-
	Piutang Denda Retribusi	-	82.663.399,30	-	82.663.399,30
	Jumlah	1.627.209.591,91			82.663.399,30
	Jumlah Total	8.148.517.306,46			3.320.144.809,85

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020 dengan kondisi macet.

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

c. Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00

Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.606.046.629,00, Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp132.782.859,00, dan Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.238.525.191,00.

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.606.046.629,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp671.145.722,00, Piutang Diklat sebesar Rp16.535.000,00 dan Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp918.365.907,00, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia

Uraian	Saldo 31-12-2019	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2020
Piutang Pasien Umum	656.335.376,00	14.810.346,00	-	671.145.722,00
Piutang Diklat	65.345.000,00	16.535.000,00	65.345.000,00	16.535.000,00
Piutang Jamkes	3.071.017.429,00	13.807.450.546,00	15.960.102.068,00	918.365.907,00
Jumlah	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00

Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	106.004.959,00
Kurang Lancar	801.172.800,00
Diragukan	8.114.520,00
Macet	690.754.350,00
Jumlah	1.606.046.629,00

Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp132.782.859,00 dalam kategori lancar sebesar Rp50.702.500,00 dan kategori macet sebesar Rp82.080.359,00.

Piutang Rumah Sakit Paru Respira sebesar Rp1.238.525.191,00 dalam kategori lancar.

e. Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30

Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan air curah pada DPUP ESDM (Balai PIALAM).

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya Rp1.635.674.799,30 Rp1.285.830.187,20

Saldo Piutang Lain-Lain Pemda DIY per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.635.674.799,30 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2020, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BULOG dan TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada BULOG dan TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebanyak 31.875,00 kg dan 243.166,70 kg. Tanggal 31 Desember 2020 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5.88

Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	243.166,70	61.000,00	182.166,70
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	275.041,70	92.875,00	182.166,70

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2020, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2020 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.635.674.799,30 (182.166,70 kg x Rp8.979,00).

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang **Rp(1.343.159.110,48)** **Rp(1.378.698.788,81)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.343.159.110,48) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(99.073.667,50), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(98.588.068,57), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.145.497.374,41) dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah **Rp(99.073.667,50)** **Rp(100.536.319,50)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(99.073.667,50) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(73.356.752,50) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(25.716.915,00).

Tabel 5.89

Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang		Total
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	
0 – 1 Tahun	Lancar	76.652,50	43.915,00	120.567,50
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	1.289.850,00	-	1.289.850,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	21.847.750,00	14.650.000,00	36.497.750,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	50.142.500,00	11.023.000,00	61.165.500,00
	Jumlah	73.356.752,50	25.716.915,00	99.073.667,50

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi **Rp(98.588.068,57)** **Rp(7.438.719,51)**

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp(98.588.068,57) terdiri dari :

Tabel 5.90

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Dinas Pariwisata	5.250.000,00	Macet	5.250.000,00
2	DLHK	489.293.338,00	Lancar	2.446.466,69
3	DPUP ESDM (Balai PIALAM)	944.224.875,00	Lancar	4.721.124,38
		296.063.775,00	Kurang Lancar	29.606.377,50
		113.128.200,00	Diragukan	56.564.100,00
	Total	1.847.960.188,00		98.588.068,57

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain **Rp(1.145.497.374,41)** **Rp(1.270.723.749,80)**

PAD Yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.145.497.374,41) terdiri dari:

Tabel 5.91

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
a.	PPKD	216.998.281,55	Macet	216.998.281,55
	Jumlah	216.998.281,55		216.998.281,55
b.	RS Ghrasia	106.004.959,00	Lancar	530.024,80
		801.172.800,00	Kurang Lancar	80.117.280,00
		8.114.520,00	Diragukan	4.057.260,00
		690.754.350,00	Macet	690.754.350,00
	Jumlah	1.606.046.629,00		775.458.914,80
c.	BLPT	50.702.500,00	Lancar	253.512,50
		82.080.359,00	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	132.782.859,00		82.333.871,50
d.	RESPIRA	1.238.525.191,00	Lancar	6.192.625,96
	Jumlah	1.238.525.191,00		6.192.625,96
e.	BPKA			
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	1.216.600,00	Lancar	6.083,00
		4.381.900,00	Kurang Lancar	438.190,00
		11.307.700,00	Diragukan	5.653.850,00
		24.172.250,00	Macet	24.172.250,00
	Jumlah	43.128.450,00		32.320.373,00
f.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)			
	Piutang Denda Retribusi	6.497.289,00	Lancar	32.486,45
		14.805.585,00	Kurang Lancar	1.480.558,50
		61.360.525,30	Diragukan	30.680.262,65
	Jumlah	82.663.399,30		32.193.307,60
	Total	3.320.144.809,85		1.145.497.374,41

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Rp815.983.222,54

Rp680.855.777,20

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp815.983.222,54 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp679.839.158,65 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp136.144.063,89 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka

Rp679.839.158,65

Rp598.825.183,60

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.228.422.242,11 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp548.583.083,46.

Premi Asuransi Tahun 2020 sebesar Rp1.228.422.242,11 merupakan:

1. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp584.237.923,11 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.
2. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk Yogyakarta sebesar Rp644.184.319,00 dengan masa pertanggungan 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.

Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 adalah sebagai berikut:

1. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp323.331.672,52 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas kepada PT. Asuransi Bintang Tbk, Yogyakarta sebesar Rp356.507.486,13 dengan masa manfaat 1 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.

5.3.1.1.5.1 Beban Sewa Dibayar Dimuka Rp136.144.063,89 Rp82.030.593,60

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.310.730,59 merupakan Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp96.683.333,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26 merupakan pembayaran sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp986.301,37 dan KPPD Bantul sebesar Rp14.641.095,89, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.92
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo	01/04/2020 s.d 31/03/2021	4.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/03/2021	986.301,37
Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul	01/12/2020 s.d 30/11/2021	16.000.000,00	1/1/2021 s/d 30/11/2021	14.641.095,89
	Jumlah	20.000.000,00		15.627.397,26

2. Dinas Kesehatan

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp96.683.333,33 terdiri dari:

- Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 - 31 Desember 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.000.000,00.
- Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Ghrasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71,683,333,33.

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.833.333,30 merupakan pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.833.333,30.

5.3.1.1.6 Persediaan Rp181.099.569.022,41 Rp122.078.638.114,94

Saldo Persediaan sebesar Rp181.099.569.022,41 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Persediaan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	41.416.162.167,94	32.365.101.939,14
2	Dinas Kesehatan	16.060.932.781,58	9.314.778.141,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	30.792.336.772,00	49.845.387.752,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.777.150,00	165.996.600,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.079.500,00	21.536.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	34.359.050,00	4.095.975,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.572.452.946,78	223.759.000,00
8	Dinas Sosial	590.896.470,50	324.504.439,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	552.319.111,05	298.723.250,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	36.391.450,00	19.695.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.226.294.680,32	1.674.035.300,00
12	Dinas Perhubungan	1.191.236.775,00	381.944.875,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.921.032,00	77.707.300,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27.720.700,00	62.863.700,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	28.971.480,00	24.550.960,00
16	Dinas Kebudayaan	14.923.239.122,00	15.493.340.879,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	159.688.633,00	177.191.371,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.419.953.153,86	892.218.292,00
19	Dinas Pariwisata	24.851.000,00	50.654.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.892.692.843,11	5.671.190.146,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.102.513.734,00	857.207.743,00
22	Sekretariat Daerah	669.479.220,00	306.388.260,00
23	Badan Penghubung Daerah	367.298.245,00	322.541.057,00
24	Sekretariat DPRD	347.677.452,50	310.553.436,00
25	Inspektorat	87.301.335,77	27.566.953,00
26	Paniradya Kaistimewan	298.044.860,00	30.165.000,00
27	Badan Perencanaan Daerah	579.738.715,00	555.831.175,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.499.878.481,00	2.482.882.226,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	73.726.310,00	81.306.670,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.633.850,00	14.920.475,00
	Jumlah	181.099.569.022,41	122.078.638.114,94

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, maka penyajian saldo persediaan per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi dalam aturan tersebut. Untuk itu telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Barang Konsumsi	-	22.491.592.386,14
2	Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	-	19.809.717.917,50
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	2.863.983.770,50
4	Pita Cukai dan Leges	-	45.594.000,00
5	Bahan Baku	-	8.455.747.042,00
6	Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	4.692.076.284,00
	Barang Pakai Habis		
7	Bahan	79.114.942.271,86	-
8	Suku Cadang	416.351.282,00	288.808.101,00

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
9	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	49.718.056.159,10	-
10	Obat-Obatan	5.672.993.665,42	-
11	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	43.982.435.758,43	62.084.226.289,00
12	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	901.297.989,60	748.875.824,80
13	Natura dan Pakan	723.592.948,00	-
14	Persediaan Dalam Proses	569.898.948,00	598.016.500,00
	Jumlah	181.099.569.022,41	122.078.638.114,94

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp181.099.569.022,41 termasuk antara lain saldo Persediaan Untuk Strategis yaitu persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00, saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga dan sumbangan untuk penanggulangan *Covid 19* pada BPBD sebesar Rp54.232.202.230,78, serta saldo persediaan Obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp215.874.037,00.

Rincian dari masing-masing persediaan tersebut sebagai berikut :

a. Saldo persediaan untuk strategis (cadangan pangan beras)

Persediaan Untuk Strategis berupa persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00 merupakan persediaan yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 92.875,00 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Tarumartani sebanyak 61.000,00 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875,00 kg dengan nilai sebesar Rp833.924.625,00 .

Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95

Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	243.166,70	61.000,00	182.166,70
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	275.041,70	92.875,00	182.166,70

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2020 sebesar Rp833.924.625,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96

Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	61.000,00	8.979,00	547.719.000,00
2.	BULOG	31.875,00	8.979,00	286.205.625,00
	Jumlah	92.875,00		833.924.625,00

Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

- b. Saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga dan sumbangan untuk penanganan *Covid 19* pada BPBD sebesar Rp60.848.279.810,07, dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.97

Rincian Persediaan Dari Belanja Tidak Terduga dan Hibah

URAIAN	PERSEDIAAN		JUMLAH
	BTT	HIBAH	
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	1.425.103.710,07	7.220.422.461,00	8.645.526.171,07
BPBD	1.409.892.710,07	7.220.422.461,00	8.630.315.171,07
Dinas Komunikasi dan Informasi	15.211.000,00	-	15.211.000,00
BPKA	-	-	-
DINAS KESEHATAN	47.796.513.239,00	4.014.861.750,00	51.811.374.989,00
EKONOMI	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-
Dinas Industri dan Perdagangan	-	-	-
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	-
DINAS PENDIDIKAN	254.144.500,00	-	254.144.500,00
PENGAMANAN DAN GAKKUM	137.234.150,00	-	137.234.150,00
Satpol PP	137.234.150,00	-	137.234.150,00
Dinas Perhubungan	-	-	-
Badan Kesbangpol	-	-	-
Sosial kemasyarakatan	-	-	-
Logistik	-	-	-
TOTAL	49.612.995.599,07	11.235.284.211,00	60.848.279.810,07

- c. Saldo persediaan obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp215.874.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98

Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
1	Acyclovir 200 mg tablet	200	tablet	237	47.400,00
2	Akarbose 50mg tablet	1.700	tab	562	955.400,00
3	Amiodaron 200 mg tablet/Kendaron	480	tab	1.200	576.000,00
4	Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml	42	ampul	8.700	365.400,00
5	Amoksisilin 250 mg kapsul	1.500	tab	211	316.500,00
6	Amoksisilin 500 mg tablet	1.000	tab	249	249.000,00
7	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 ml	100	botol	2.090	209.000,00
8	Amoksisilin sirup kering 250 mg/5 ml	50	botol	3.628	181.400,00

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
9	Antasida DOEN tab kunyah	21.500	tab	75	1.612.500,00
10	Asam Mefenamot 500 mg tablet	3.500	tab	176	616.000,00
11	Asam Ursodeoxycholic kapsul	330	tab	2.268	748.440,00
12	Azithromicin 200mg/5ml sirup kering	135	botol	24.621	3.323.835,00
13	Azithromicin 500 mg infus	32	vial	106.562	3.409.984,00
14	B fluid infus	20	botol	291.500	5.830.000,00
15	Batugin elixir	20	botol	42.500	850.000,00
16	Bisolvon solution 2mg/1ml	66	botol	67.320	4.443.120,00
17	Bricasma 0,5mg injeksi	210	ampul	11.960	2.511.600,00
18	Bromheksin HCl 8mg tablet	9.500	tab	252	2.394.000,00
19	Calcium lactat 500 mg (kalk) tablet	1.500	tab	63	94.500,00
20	Calorex sirup	301	botol	13.640	4.105.640,00
21	Cangkang kapsul ukuran 00	85	sak	71.500	6.077.500,00
22	Captopril 12,5 mg tablet	600	tab	62	37.200,00
23	Cefotaxim 1 g injeksi	400	vial	4.840	1.936.000,00
24	Cetirizin sirup 5mg/5ml	1.020	botol	6.745	6.879.900,00
25	Ciprofloxacin 500 mg tablet	3.200	tab	260	832.000,00
26	Citicolin 125mg injeksi	45	ampul	11.550	519.750,00
27	Clarithromycin 500 mg tablet	1.860	tab	2.974	5.531.640,00
28	Clobazam 10mg tablet	4.600	tab	900	4.140.000,00
29	Codein 20 mg tablet	3.000	tab	571	1.713.000,00
30	Cotrimoxazol suspensi	20	botol	2.340	46.800,00
31	CTM 4 mg tablet	12.000	tab	55	660.000,00
32	Deksametason 0,5 mg tablet	77.100	tab	108	8.326.800,00
33	Deksametason Injeksi 5 mg/ml	240	ampul	2.010	482.400,00
34	Devosix oral drop	100	botol	21.500	2.150.000,00
35	Dextral tablet	4	kotak	47.960	191.840,00
36	Diasepam injeksi 5mg/ml	50	ampul	1.735	86.750,00
37	Digoxin 0,25mg tablet	30	tab	104	3.120,00
38	Digoxin injeksi 0,25 mg/ml	30	ampul	25.300	759.000,00
39	Diltiazem 30 mg tablet	200	tablet	133	26.600,00
40	Dimenhidrinat 50mg tablet	3.700	tablet	104	384.800,00
41	Dobutamin injeksi	20	ampul	11.843	236.860,00
42	Doxycycline kapsul	700	kapsul	239	167.300,00
43	Erythromycin 500mg tablet	1.200	tab	730	876.000,00
44	Esomeprazol injeksi	328	vial	33.389	10.951.592,00
45	Eperison 50mg tab	1.300	tab	1.485	1.930.500,00
46	Flutrop tablet	5.400	tab	1.450	7.830.000,00
47	Gentamicin 40mg/ml injeksi	120	ampul	17.545	2.105.400,00
48	Glibenklamid tablet 5mg	200	tab	119	23.800,00
49	Glimepiride 2 mg tablet	5.150	tab	361	1.859.150,00
50	Gliseril Guaiakolat 100 mg tablet	8.000	tab	88	704.000,00
51	Glukosa infus 10 %	20	botol	8.003	160.060,00
52	Glukosa infus 40% steril	44	ampul	11.418	502.392,00
53	Glukosa infus 5%	140	botol	7.363	1.030.820,00
54	Hepamax kapsul	18	tab	10.296	185.328,00
55	Ibuprofen tab 400mg	600	tab	150	90.000,00
56	Intunal sirup	515	botol	11.347	5.843.705,00
57	Intunal-F tablet	2.800	tab	720	2.016.000,00

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
58	Isosorbid Dinitrat 5mg tablet sublingual	13.000	tab	89	1.157.000,00
59	Jurnista (hidromorfon) 8mg tablet	56	tab	39.000	2.184.000,00
60	Kalium Aspartat 300 mg tablet (Kalipar)	1.200	tab	700	840.000,00
61	KCl injeksi 25mg	38	vial	3.223	122.474,00
62	L bio kapsul	120	kaplet	9.240	1.108.800,00
63	Laktulosa 120ml sirup	24	botol	24.200	580.800,00
64	Laktulosa 60ml sirup	132	botol	22.688	2.994.816,00
65	Loperamide 2mg tablet	100	tab	85	8.500,00
66	Manitol	10	botol	28.276	282.760,00
67	Masneuro tablet	11.800	tab	550	6.490.000,00
68	Metamizole injeksi	500	amp	10.890	5.445.000,00
69	Metilprednisolon injeksi 125mg	108	vial	11.525	1.244.700,00
70	Metoclopramid Drop 2mg/ml	25	botol	3.900	97.500,00
71	Metronidazole 500 mg/100ml infus	131	botol	8.525	1.116.775,00
72	Meylon 84 injeksi	18	amp	6.448	116.064,00
73	MgSO4 40% injeksi	18	vial	3.796	68.328,00
74	Microlax	126	tube	20.900	2.633.400,00
75	Minowel	100	sachset	19.602	1.960.200,00
76	Neprolith kapsul	1.000	tab	910	910.000,00
77	Nifedipin 10mg tablet	12.600	tab	100	1.260.000,00
78	OBH 100 ml sirup	900	btl	5.000	4.500.000,00
79	Ofloxacin 400mg tablet	5.650	tab	650	3.672.500,00
80	Opineuron tablet	3.600	tab	1.375	4.950.000,00
81	Piracetam 200mg injeksi	20	amp	22.000	440.000,00
82	Piracetam 400mg tablet	800	tab	2.710	2.168.000,00
83	Pravastatin 20 mg tablet	500	tab	2.090	1.045.000,00
84	Prednison 5 mg tablet	14.000	tab	94	1.316.000,00
85	Quantidex tablet / Neo protifed	9.200	tab	1.021	9.393.200,00
86	Sanmag sirup	108	botol	27.500	2.970.000,00
87	SNMC injeksi	270	amp	115.500	31.185.000,00
88	Terbutalin 2,5 mg tablet	6.000	tab	89	534.000,00
89	Triheksifenidil 2mg tablet	500	tab	40	20.000,00
90	Triofusin injeksi	30	botol	4.700	141.000,00
91	Valsartan 80mg tablet	960	tab	6.550	6.288.000,00
92	Vistrum sirup	70	botol	31.500	2.205.000,00
93	Vitamin B kompleks tablet	242	kotak	12.502	3.025.484,00
94	Wida D5 1/2 NS infus	40	botol	9.776	391.040,00
95	Wida D5 1/4 NS infus	40	botol	9.724	388.960,00
96	Zinc drop 10mg/ml	10	botol	6.281	62.810,00
97	Zink tablet 20mg	800	tab	524	419.200,00
	Total Harga				215.874.037,00

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp43.982.435.758,43 termasuk didalamnya persediaan hewan ternak yang terdapat pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Dan Diagnostik Kehewan). Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan persediaan hewan ternak antara di aplikasi dengan nilai yang tertera di neraca, hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa pencatatan untuk persediaan yang tumbuh dan berkembang di neraca menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp1.655.347.172.982,67 Rp1.353.575.720.335,44

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.655.347.172.982,67 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Rp18.885.178.364,00 Rp18.030.207.564,00
Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen sebesar Rp18.885.178.364,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2020 dan berasal dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.030.207.564,00 ditambah Dana Bergulir Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00, pengembalian sebesar Rp12.500.100,00 dan dikurangi pelunasan sebesar Rp3.157.529.300,00. Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Perguliran	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2019 (Rp)	Koreksi (Investasi Non Permanen)		Mutasi 2020 (Rp)			Saldo 31/12/2020 (Rp)	Keterangan
					Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Pengembalian		
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				-	-					
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2010	2010	2.630.000.000,00	-				-	-		Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 1 Tahun
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00				-		185.000.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 1 Tahun
-	Gapoktan Tahap Pra Penumbuhan	2011	3.569.417.900,00	-				-			
-	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	2011	3.569.417.900,00	1.465.650.000,00				-	52.000.000,00	1.413.650.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 1 Tahun
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00				-		241.000.000,00	
-	DPM PHP Tahun Anggaran 2013	2013	1.495.000.000,00	-				-		-	
-	LDPM	2013	10.870.000.000,00	147.500.000,00				-	3.000.000,00	144.500.000,00	Suku Bunga 3% ,
	Jumlah			2.039.150.000,00					55.000.000,00	1.984.150.000,00	
2	Dinas Koperasi dan UKM										
-	Kelurahan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	93.022.098,00				-	600.000,00	92.422.098,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca)	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00				-		567.715.775,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 10 Tahun
-	Kelurahan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00				-		64.950.000,00	Suku Bunga 6% ,
-	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00				-		55.000.000,00	Suku Bunga 6% ,
-	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00				-		50.800.000,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00				-		80.000.000,00	Suku Bunga 6% ,
-	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00				-		25.000.000,00	Suku Bunga 6% ,
-	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	168.734.227,00				-		168.734.227,00	Suku Bunga 6% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00				-		55.615.598,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Perkuatan Pemodalalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00				-		150.000.000,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Program Fasilitas Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00				-		168.057.582,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00				-		239.912.400,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	401.736.502,00				-	1.000.000,00	400.736.502,00	Suku Bunga 1% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00				-		184.909.300,00	Suku Bunga 1% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	87.560.178,00				-	1.000.000,00	86.560.178,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00				-		38.652.204,00	Suku Bunga 3% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	867.682.500,00				-	702.041.900,00	178.140.700,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
-	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	558.209.200,00				-	397.887.400,00	160.321.800,00	Suku Bunga 9% , Jangka Waktu 3 Tahun
	Jumlah			3.857.557.564,00					1.102.529.300,00	12.500.100,00	2.767.528.364,00
3	BUKP										
-	Tahun 2018	2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00				-	2.000.000.000,00		
-	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00				-		10.000.000.000,00	
-	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	-			4.000.000.000,00	-		4.000.000.000,00	
	Jumlah			12.000.000.000,00			4.000.000.000,00	2.000.000.000,00		14.000.000.000,00	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan										
-	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00				-		133.500.000,00	Suku Bunga 3% ,
	Jumlah			133.500.000,00						133.500.000,00	
	JUMLAH			18.030.207.564,00			4.000.000.000,00	3.157.529.300,00	12.500.100,00	18.885.178.364,00	

Mutasi tambah sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan penambahan Dana Bergulir melalui BUKP. Mutasi kurang sebesar Rp3.157.529.300,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp55.000.000,00 , Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.102.529.300,00 dan BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.885.178.364,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya menjadi:

Tabel 5.100

Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	14.000.000.000,000
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	377.114.704,000
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	839.185.253,000
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.668.878.407,000
	Jumlah	18.885.178.364,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.196.182.503,90 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp14.688.995.860,10 (Rp18.885.178.364,00– Rp4.196.182.503,90).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

- Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala OPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

5.3.1.2.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp(4.196.182.503,90) Rp(3.629.958.920,82)

Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp(4.196.182.503,90) dikelompokkan berdasarkan umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

Tabel 5.101

Klasifikasi Kualitas Dana Bergulir dan Diragukan Tertagih

No	Kelompok	Nilai Perolehan (Rp)	% Penyisihan	Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	14.000.000.000,000	0,5%	70.000.000,00
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	377.114.704,000	10%	37.711.470,40

3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	839.185.253,000	50%	419.592.626,50
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.668.878.407,000	100%	3.668.878.407,00
	Jumlah	18.885.178.364,00		4.196.182.503,90

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2020 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-10	9 tahun	100%	-
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-11	7 tahun	100%	185.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.413.650.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	10 - 11 tahun	100%	1.413.650.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-12	6 tahun	100%	241.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2013	2013	1.495.000.000,00	-		20-Dec-13			-
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	144.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-13	6 Tahun 11 Hari	100%	144.500.000,00
	Jumlah			1.984.150.000,00					1.984.150.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM								
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		> 11 Tahun	100%	92.422.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	4 Tahun	50%	283.857.887,50
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	64.950.000,00
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	55.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	80.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	25.000.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	168.734.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	168.734.227,00
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	8 tahun	100%	55.615.598,00

	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	150.000.000,00
	Program Fasilitas Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	168.057.582,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	6 Tahun	100%	239.912.400,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	6 Tahun	100%	400.736.502,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	5 Tahun	50%	92.454.650,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	4 Tahun	50%	43.280.089,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00		2019	1 Tahun	10%	3.865.220,40
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	178.140.700,00		2020	1 Tahun	10%	17.814.070,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	160.321.800,00		2020	1 Tahun	10%	16.032.180,00
	Jumlah			2.767.528.364,00					2.008.532.503,90
3	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Dec-13	7 Tahun	100%	133.500.000,00
	Jumlah			133.500.000,00					133.500.000,00
4	BUKP								
	BUKP	2018	2.000.000.000,00				1 Tahun	10%	-
	BUKP	2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,50%	50.000.000,00
	BUKP	2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,50%	20.000.000,00
	Jumlah			14.000.000.000,00					70.000.000,00
	JUMLAH TOTAL			18.885.178.364,00					4.196.182.503,90

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen **Rp1.640.658.177.122,57** **Rp1.339.175.471.692,26**

Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.658.177.122,57 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.339.175.471.692,26 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2019 sebesar Rp(37.311.816.753,01) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2019 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.301.863.654.939,25, ditambah penyertaan modal Tahun 2020 sebesar Rp101.090.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2019 yang disetor ke BUD Tahun 2020 sebesar Rp101.460.382.151,46 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY sebesar Rp147.343.223.644,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2019	Perhitungan Penyertaan Modal 2020			Mutasi Tahun Anggaran 2020					Penyertaan Modal 2020 (Audited)	
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2019 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2019 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2019	Tambahan Modal Disetor Tahun 2020	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2019 yang Disetor ke BUD Tahun 2020	Laba/Rugi BUMD Tahun 2020		Laba/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 4 + 6 - 8 + 10
	METODE EKUITAS											
1	PT. Bank BPD DIY	1.196.262.377.102,21	51,000%	2.279.614.000.000,00	1.162.603.140.000,00	(33.659.237.102,21)	101.000.000.000,00	51,000%	94.001.713.614,26	243.980.043.013,00	124.429.821.936,63	1.294.031.248.322,37
2	PT. Anindya Mitra Internasional	42.797.239.256,02	99,951%	40.276.493.418,00	40.256.757.936,23	(2.540.481.319,80)	-	99,951%	1.185.651.326,00	3.555.003.551,00	3.553.261.599,26	42.624.368.209,49
3	PT. Tarumartani	52.427.479.342,79	99,996%	52.164.149.040,00	52.162.062.474,04	(265.416.868,75)	-	99,996%	148.697.632,00	9.593.905.721,00	9.593.521.964,77	61.606.886.806,81
4	BUKP	47.028.375.991,24	83,140%	55.546.902.248,00	46.181.694.528,99	(846.681.462,25)	-	83,140%	6.025.001.568,20	11.747.195.265,96	9.766.618.144,11914	49.923.311.104,91
5	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY		100,000%	-	-	-	191.722.362.679,00	100,000%	-	-	-	191.722.362.679,00
	METODE HARGA PEROLEHAN											
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	660.000.000,00	0,223%		660.000.000,00		90.000.000,00	0,223%	99.318.011,00			750.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA	1.339.175.471.692,26			1.301.863.654.939,25	(37.311.816.753,01)	101.090.000.000,00		101.460.382.151,46	268.876.147.550,96	147.343.223.644,78	1.640.658.177.122,57

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.294.031.248.322,37 . Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited		Rp	1.196.262.377.102,21
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(33.659.237.102,21)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2020		Rp	1.162.603.140.000,00
Tambahan Modal		Rp	101.000.000.000,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(94.001.713.614,26)
Laba Tahun 2020	Rp243.980.043.013,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	51,00%	Rp	124.429.821.936,63
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	1.294.031.248.322,37

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.624.368.209,49 Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	42.797.239.256,02
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(2.540.481.319,80)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	40.256.757.936,23
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(1.185.651.326,00)
Laba Tahun 2020	Rp 3.555.003.551,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp	3.553.261.599,26
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	42.624.368.209,49

- c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp61.606.886.806,81. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	52.427.479.342,79
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(265.416.868,75)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	52.162.062.474,04
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(148.697.632,00)
Laba Tahun 2020	Rp 9.593.905.721,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	9.593.521.964,77
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	61.606.886.806,81

- d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp49.923.311.104,91. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	47.028.375.991,24
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(846.681.462,25)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	46.181.694.528,99
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(6.025.001.568,20)
Laba Tahun 2020	Rp11.747.195.265,96		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	83,140%	Rp	9.766.618.144,12
Penyertaan Modal Pemda DIY		Rp	49.923.311.104,91

per 31 Desember 2020

- e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp191.722.362.679,00. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	0,00
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	0,00
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	0,00
Tambahan Modal		Rp	191.722.362.679,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	0,00
Laba Tahun 2020	Rp00,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	100,00%	Rp	0,00
Penyertaan Modal Pemda DIY		Rp	191.722.362.679,00

per 31 Desember 2020

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Air Bersih Tirtatama yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Penyertaan Modal Pemda DIY pada Perusda Air Bersih Tirtatama dilakukan berdasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang senilai Rp179.222.362.679,00.

- f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2020 sebesar Rp750.000.000,00. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp90.000.000,00. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,223% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3 Aset Tetap Rp8.479.112.482.546,08 Rp7.872.445.226.240,18

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp12.080.309.111.026,30 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.601.196.628.480,27, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah Rp4.238.954.451.307,00 Rp3.563.143.798.663,00

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.238.954.451.307,00 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Perkampungan	102.852.250.374,00
2	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
3	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
4	Kolam Ikan	-
5	Danau/Rawa	5.298.702.000,00
6	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.409.336.112.217,00
7	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.670.507.796.716,00
	Jumlah	4.238.954.451.307,00

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian Tanah pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	351.397.558.020,00	350.444.085.148,00
2	Dinas Kesehatan	9.944.264.762,00	9.948.249.262,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1.980.505.788.164,00	1.581.587.907.759,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	496.906.383.455,00	413.095.765.280,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.392.000.000,00	1.392.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
8	Dinas Sosial	18.720.829.406,00	18.720.829.406,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.800.680,00	923.281.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	254.810.000,00	254.810.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.501.670.972,00	38.501.670.972,00
12	Dinas Perhubungan	85.346.163.771,00	52.131.377.226,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	84.735.000,00	84.735.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	-
16	Dinas Kebudayaan	378.019.463.295,00	251.680.993.815,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	2.096.500.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.892.166.000,00	13.892.166.000,00
19	Dinas Pariwisata	3.434.065.500,00	3.434.065.500,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	126.780.807.899,00	110.419.407.899,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.194.362.000,00	4.939.772.000,00
22	Sekretariat Daerah	162.234.321.590,00	161.849.196.590,00
23	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
24	Sekretariat DPRD	-	-
25	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Daerah	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	530.676.060.793,00	519.726.285.806,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
	Jumlah	4.238.954.451.307,00	3.563.143.798.663,00

Mutasi Tanah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	3.563.143.798.663,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	696.800.024.901,00
Penyesuaian	2.362.400,00
Reklas dari Aset Lainnya (Kemitraan)	46.914.710.735,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	5.827.962.654,00
Reklas dari extracom	9.000.000,00
Reklas dari belanja barang jasa	992.142.000,00
Hibah	17.231.785.525,00
Mutasi dari Dikpora ke Dikmen Kota	1.647.800,00
Mutasi masuk dari PBD ke Disbud	18.991.498.000,00

Pelimpahan dari BPKA ke DPU Induk	16.945.081.525,00
Mutasi dari BPKA ke BPPMTP-DPKP	16.361.400.000,00
Mutasi dari PBD ke Disperindag	1.254.590.000,00
Mutasi dr Dispertaru ke BPKA	89.042.240,00
	821.421.247.780,00
Pengurangan:	
Reklas ke PM	5.271.378.000,00
Reklas ke Gedung	39.339.370.000,00
Reklas ke JIJ	248.159.000,00
Dihapus utk dihibahkan kepada KemenPUPR	7.541.500.000,00
Dihapus utk dihibahkan kepada Pemkab GK	13.238.093.300,00
Dihapus utk dihibahkan kepada Pemkab KP	760.720.803,00
Reklas ke Aset Lainnya (Kemitraan)	6.774.000.000,00
Mutasi ke BPKA dari DPU	19.330.909.680,00
Mutasi keluar OPD	53.027.569.525,00
Reklas ke aset tetap lainnya	9.861.000,00
Reklas ke Aset Lain-Lain	69.033.828,00
	145.610.595.136,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	4.238.954.451.307,00

5.3.1.3.2 Peralatan Mesin

Rp1.512.711.423.026,27

Rp1.257.965.724.234,31

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.512.711.423.026,27 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Besar Darat	36.709.729.88 6,49
2	Alat-alat Besar Apung	2.365.273,43
3	Alat-alat Bantu	52.149.515.90 4,98
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	156.418.379.0 77,75
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.493.427.354 ,70
6	Alat Angkut Apung Bermotor	1.050.163.500 ,00
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	360.001.666,0 0
8	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,0 0
9	Alat Bengkel Bermesin	72.757.093.90 0,09
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	10.958.074.43 6,04
11	Alat Ukur	11.273.311.30 2,92
12	Alat Pengolahan	11.122.843.73 6,21
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.801.618.929 ,97
14	Alat Kantor	84.233.778.404,15

No	Uraian	Nilai (Rp)
15	Alat Rumah Tangga	264.345.658.778,47
16	Komputer	312.309.720.928,63
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.768.602.494,57
18	Alat Studio	76.914.327.74 4,41
19	Alat Komunikasi	37.023.275.36 1,53
20	Peralatan Pemancar	5.702.159.795 ,00
21	Alat Kedokteran	44.883.383.70 2,56
22	Alat Kesehatan	1.621.367.292,88
23	Unit-Unit Laboratorium	129.035.707.687,59
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	30.070.798.846,52
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	9.344.537.217 ,78
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.273.972.018 ,29
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.677.784.492,00
28	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	7.216.805.121 ,00
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7.826.844.854 ,85
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	2.156.367.909 ,05
31	Senjata Api	5.344.474.000 ,00
32	Persenjataan Non Senjata Api	3.999.555.404 ,52
33	Senjata Sinar	12.000.000,00
34	Alat Keamanan dan Perlindungan	13.200.000,00
35	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.783.659.090 ,16
36	Alat Khusus Kepolisian	1.039.986.798 ,98
37	Alat Eksplorasi Topografi	4.925.000,00
38	Alat Eksplorasi Geofisika	69.815.000,00
39	Sumur	7.000.000,00
40	Pengolahan dan Pemurnian	25.000.000,00
41	Alat SAR	1.941.343.150 ,00
42	Alat Kerja Penerbangan	45.119.000,00
43	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	140.084.502,0 0
44	Unit Peralatan Proses/Produksi	2.067.989.820 ,00
45	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	95.712.203.29 5,04
46	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	3.196.565.200 ,00
47	Peralatan Olahraga	3.658.485.146 ,91

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Jumlah	1.512.711.423.026,27

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	508.085.882.205,63	419.108.648.161,68
2	Dinas Kesehatan	119.498.221.916,78	114.683.147.117,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	63.604.731.940,00	61.987.876.669,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.483.404.722,03	14.916.806.921,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.363.945.241,98	4.216.575.335,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.939.862.238,00	7.933.854.388,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.924.966.563,18	25.437.267.583,00
8	Dinas Sosial	27.472.254.938,08	25.554.632.677,23
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.603.345.887,98	32.563.868.019,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.682.149.502,00	6.481.424.034,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.901.527.431,98	49.180.637.081,98
12	Dinas Perhubungan	130.845.462.108,79	32.469.725.704,75
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.414.400.542,77	44.741.827.091,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.477.447.600,00	4.400.863.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.516.916.574,91	4.571.820.315
16	Dinas Kebudayaan	70.804.553.795,76	67.721.154.042,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	48.627.523.677,90	49.197.055.506,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.721.220.484,98	18.671.866.674,18
19	Dinas Pariwisata	3.540.826.192,01	3.451.656.192,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.135.526.668,83	37.273.756.821
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.066.231.232,00	15.958.938.892,00
22	Sekretariat Daerah	49.901.122.450,78	50.652.983.334,03
23	Badan Penghubung Daerah	7.066.553.007,00	6.460.497.007,00
24	Sekretariat DPRD	24.585.196.643,59	22.572.323.352,59
25	Inspektorat	4.425.161.733,42	3.573.190.733,00
26	Paniradya Kaistimewan	4.859.658.941,96	4.469.067.275,96
27	Badan Perencanaan Daerah	11.993.454.938,00	12.128.241.458,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	88.334.009.491,93	95.576.023.468,93
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.674.434.109,00	13.249.555.830,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9.161.430.245,00	8.760.438.945,00
	Jumlah	1.512.711.423.026,27	1.257.965.724.234,31

Mutasi Peralatan Mesin sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	1.257.965.724.234,31
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	137.484.204.942,00
Koreksi pencatatan Meubelair	2.811.599,75
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	346.162.500,00
reklas dari AT lainnya	1.921.479.621,91
Reklas dari gedung dan bangunan	95.739.812.919,04

Hibah	35.881.338.473,22
Reklas dr JIJ	2.337.773.745,00
Reklas dari Persediaan	751.348.780,00
Penyesuaian Aset	2.653.045.743,64
Reklas dari KDP	1.631.133.693,75
Reklas dari Beban Jasa Konsultansi Penelitian	188.295.800,00
Reklas Extracom dari Gedung Bangunan	100.271.200,00
Reklas Pemetaan dari Gedung Bangunan	780.606.000,00
Mapping Alat Olahraga	2.339.000,00
Reklas Mutasi Kendaraan dari Banhubla	140.000.000,00
Reklas Belanja Barang Jasa ke Aset	6.350.000,00
Reklas Headset dan Mic	1.750.000,00
Peralatan mesin dari dana BTT	6.990.214.113,18
reklas dari barang dan jasa	55.594.000,00
Reklas dari Tanah	5.271.378.000,00
Kapitalisasi alat kedokteran (IR Thermometer)	3.420.000,00
Reklas antar AT	49.850.000,00
Pemetaan Aset	34.545.000,00
Reklas antar rekening AT	14.000.000,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	1.332.350.384,00
	293.720.075.515,49
Pengurangan:	
Penghapusan	2.483.081.445,00
Reklas ke ALL	12.751.109.959,00
Reklas ke persediaan	419.084.932,27
Reklas mini komputer	590.000,00
Ekstrakom	3.611.238.203,38
Hibah ke TNI AU	504.285.000,00
Koreksi	1.870.297.031,02
Pengembalian Belanja Modal LS temuan	16.389.890,00
Reklas Aset Tetap	123.648.094,00
Reklas ke aset tetap lainnya	224.554.000,00
Reklas ke beban	27.393.837,00
Reklas ke Gedung	2.294.166.020,00
Reklas ke JIJ	36.000.000,00
Mutasi Antar OPD	10.822.037.344,86
Koreksi dari jurnal penyesuaian	3.790.500.967,00
	38.974.376.723,53
Saldo akhir per 31 Desember 2020	1.512.711.423.026,27

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.512.711.423.026,27 termasuk di dalamnya Peralatan Mesin yang terdapat di dalam Hotel Mutiara Utara dan Selatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	HOTEL MUTIARA UTARA		HOTEL MUTIARA SELATAN		Jumlah	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	ALAT BESAR DARAT	-	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00
2	ALAT BANTU	6	1.422.195.000,00	8	1.399.450.000,00	14	2.821.645.000,00
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	4.011.000,00	6	5.730.000,00	9	9.741.000,00
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	5.050.000,00	-	-	1	5.050.000,00
5	ALAT KANTOR	1	1.877.000,00	81	58.330.000,00	82	60.207.000,00
6	ALAT RUMAH TANGGA	522	517.593.000,00	613	1.144.858.000,00	1135	1.662.451.000,00

7	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1	3.360.000,00	11	11.169.000,00	12	14.529.000,00
8	ALAT STUDIO	-	-	3	5.338.000,00	3	5.338.000,00
9	ALAT KOMUNIKASI	2	4.747.000,00	-	-	2	4.747.000,00
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	8	22.800.000,00	8	22.800.000,00
11	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	6.052.000,00	-	-	1	6.052.000,00
12	PERALATAN KOMPUTER	1	1.500.000,00	1	1.400.000,00	2	2.900.000,00
13	ALAT EKSPLORESI GEOFISIKA			2	64.815.000,00	2	64.815.000,00
	JUMLAH					1272	4.684.275.000,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp2.854.877.023.082,53

Rp2.853.277.179.121,12

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.854.877.023.082,53 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.727.350.024.595,72
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	105.489.865.092,99
3	Bangunan Menara	721.228.000,00
4	Bangunan Bersejarah	12.227.556.007,98
5	Tugu Peringatan	2.290.980.501,00
6	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.095.594.400,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.701.774.484,84
8	Rambu-Rambu	-
9	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-
	Jumlah	2.854.877.023.082,53

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	948.846.560.411,69	894.132.203.275,15
2	Dinas Kesehatan	112.142.180.134,00	111.181.848.740,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	119.983.958.434,30	128.064.123.684,30
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.399.748.597,00	21.320.160.229,83
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.853.306.893,00	2.853.306.893,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.573.288.429,00	4.470.115.429,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.308.799.350,00	9.388.974.350,00
8	Dinas Sosial	93.487.735.788,65	93.135.907.225,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.823.742.414,00	27.508.938.468,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	20.832.031.220,00	20.769.094.720,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.474.866.728,94	38.392.970.728,94
12	Dinas Perhubungan	39.818.633.478,07	129.898.249.604,25
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.750.625.336,00	4.750.625.336,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.578.499.210,00	12.402.404.100,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.441.903.500,00	2.219.578.000,00
16	Dinas Kebudayaan	138.220.125.755,00	109.019.419.069,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	132.805.459.748,81	132.805.459.748,81
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.641.224.887,98	72.562.143.887,98
19	Dinas Pariwisata	41.712.073.651,00	38.399.222.341,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	106.985.252.441,48	103.339.786.171,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.241.243.075,00	20.149.036.175,00
22	Sekretariat Daerah	34.280.687.308,61	34.086.394.542,61
23	Badan Penghubung Daerah	6.370.571.262,00	6.370.571.262,00
24	Sekretariat DPRD	575.221.451.533,00	575.221.451.533,00
25	Inspektorat	929.006.440,00	929.006.440,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.989.171.200,00	4.956.145.200,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	219.673.484.371,00	218.810.519.082,10
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.656.225.063,00	12.656.225.063,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	23.835.166.421,00	23.483.297.821,00
	Jumlah	2.854.877.023.082,53	2.853.277.179.121,12

Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2019	2.853.277.179.121,12
Penambahan:	
Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2020	52.631.197.365,00
Reklas dari PM	2.423.462.861,00
kapitalisasi dari beban pemeliharaan	1.878.947.760,98
Reklas dari KDP	17.054.159.092,00
Penyesuaian SA	61.812.528,74
Hibah	15.158.164.888,00
Reklas dari AT Lainnya - ATR	7.394.279.000,00
Koreksi	152.165.000,00
Penyesuaian mapping	4.644.081.520,80
Kapitalisasi dari Beban Makan dan Minum	1.540.000,00
Reklas dr Aset Lainnya	54.498.548.600,00
Mutasi dari DPPM ke Biro Umum	50.970.000,00
Mutasi dari BPKA ke Dikpora Induk	31.248.922,00

Mutasi dari Dikpora ke BTKP	150.235.800,00
Reklas dari KDP yg berasal dari mutasi dikpora	12.837.463.509,27
Mutasi dari BPKA ke Disbud	1.254.888.000,00
Mutasi dari Dishub Induk ke Balai Parkir	9.974.216.515,07
Mutasi dari OPD lain ke Diskop	819.423.560,00
Mutasi dari BPTP Karang Sari ke DPKP	3.601.721.270,00
Mutasi dari PBD ke Disperindag	92.206.900,00
Mutasi dari OPD lain ke BPKA	6.976.432.903,00
Reklas dari tanah	32.097.370.000,00
Reklas dari Aset Lainnya _Kemitraan dgn Pihak Ketiga	76.152.543,00
	223.860.688.538,86
Pengurangan:	
Reklas ke beban pemeliharaan gedung	5.983.002.054,00
Reklas ke PM	91.402.941.399,29
Reklas ke KDP	30.852.338.466,00
Reklas ke JIJ	7.599.831.281,00
Ekstracom	72.513.250,00
Penyesuaian	1.454.270.968,99
Reklas ke ALL	64.403.346,00
Rambu Tidak Bersuar	107.058.700,00
Reklas ke Beban Barjas	1.670.000,00
Reklas ke Persediaan	3.808.750,00
Mutasi ke OPD lain pada Distarung	3.374.711.633,00
Mutasi ke BPTPAR dari Dishub Induk	9.996.080.615,07
Mutasi keluar OPD dari BPKA	64.480.911.081,10
Reklas antar AT	14.000.000,00
Hibah ke Pemkab Bantul	3.374.711.633,00
Reklas ke ATR	3.478.591.400,00
	222.260.844.577,45
Saldo akhir per 31 Desember 2020	2.854.877.023.082,53

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp3.159.549.339.267,57

Rp3.056.004.711.149,57

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.159.549.339.267,57 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan	1.943.928.622.776,59
2	Jembatan	339.871.230.667,00
3	Bangunan Air Irigasi	286.085.588.537,56
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.894.008.246,00
5	Bangunan Air Rawa	19.583.000,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.956.522.944,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	35.821.109.505,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	24.055.919.676,42
9	Bangunan Air Kotor	31.500.946.731,00
10	Bangunan Air	84.230.180.327,00

11	Instalasi Air Minum Bersih	7.552.746.132,54
12	Instalasi Air Kotor	61.887.225.028,68
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	1.580.852.185,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	5.718.767.599,68
15	Instalasi Gardu Listrik	1.704.655.306,52
16	Instalasi Pertahanan	233.906.133,34
17	Instalasi Gas	82.236.666,67
18	Instalasi Pengaman	10.347.843.493,00
19	Jaringan Air Minum	194.797.254.966,57
20	Jaringan Listrik	73.275.439.040,44
21	Jaringan Telepon	19.937.333.604,56
22	Jaringan Gas	67.366.700,00
	Jumlah	3.159.549.339.267,57

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.111

Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.594.319.593,74	20.082.439.038,94
2	Dinas Kesehatan	5.174.517.755,00	5.138.517.755,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.637.167.328.707,02	2.597.671.103.323,02
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	51.267.996.616,57	53.093.202.983,47
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.375.000,00	95.375.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	218.887.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.218.950.800,00	6.218.950.800,00
8	Dinas Sosial	1.300.199.007,67	1.215.956.007,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.858.320.200,00	1.702.794.400,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.262.821.863,00	26.981.929.879,00
12	Dinas Perhubungan	9.965.556.986,00	9.965.556.986,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.198.034.932,00	19.198.034.932,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	219.614.400,00	103.235.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	172.868.000,00	172.868.000,00
16	Dinas Kebudayaan	4.012.838.889,00	3.283.278.139,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.337.566.121,00	5.337.566.121,00

18	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.581.995.978,00	115.490.671.978,00
19	Dinas Pariwisata	12.358.079.400,00	11.300.117.350,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.476.486.520,00	7.476.486.520,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
22	Sekretariat Daerah	23.067.915.621,47	23.067.915.621,47
23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
24	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
25	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	193.709.326.935,00	138.958.219.373,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	772.038.404,00	772.038.404,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.387.329.979,00	1.328.595.979,00
	Jumlah	3.159.549.339.267,57	3.056.004.711.149,57

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	3.056.004.711.149,57
Penambahan:	
Belanja Modal JIJ Tahun 2020	38.131.559.522,00
Kapitalisasi dari beban pemeliharaan JIJ	635.953.384,00
Reklas dari PM	470.495.190,00
Reklas dari KDP	163.203.403,00
Hibah	9.469.361.121,00
Reklas dari ATR	75.935.689.612,00
Reklas dari Gedung Bangunan	5.214.541.440,00
Reklas dari ATB	25.500.000,00
Mutasi dari BPKA ke Balai Pialam	117.812.761.349,00
Mutasi dari BPBD ke Dinas Kanla	436.427.000,00
Mutasi dari luar OPD ke BPKA	53.154.739.562,10
Reklas dari tanah	27.159.000,00
Penyesuaian	83.826.409,09
	301.561.216.992,19
Pengurangan:	
Reklas ke PM	604.106.500,00
Reklas ke ATR	8.140.188.400,00
Penyesuaian SA	33.826.409,19
Pelimpahan dari DPU ke PBD-BPKA	186.948.901.084,00
Reklas ke KDP	317.655.600,00
Reklas ke Beban	5.196.000,00
Reklas ke persediaan	40.880.064,00
Hibah ke Pemkab Bantul	1.825.206.367,00
Pengembalian Belanja Modal	100.628.450,00
	198.016.588.874,19
Saldo akhir per 31 Desember 2020	3.159.549.339.267,57

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp241.819.072.793,33

Rp296.525.642.342,22

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.819.072.793,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Buku	119.149.729.945,70
2	Terbitan	227.433.064,94
3	Barang-Barang Perpustakaan	928.147.565,59
4	Barang Bercorak Kebudayaan	34.188.552.105,28
5	Alat Olah Raga Lainnya	-
6	Hewan	1.777.727.889,98
7	Tanaman	1.689.150.951,20
8	Aset Tetap Renovasi	83.858.331.270,64
	Jumlah	241.819.072.793,33

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	122.973.354.208,50	110.571.238.582,01
2	Dinas Kesehatan	430.998.256,00	581.577.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	48.515.874.849,00	72.371.059.065,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	16.195.115.915,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.659.900,00	16.659.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.549.511.674,64	52.819.709.396,00
8	Dinas Sosial	559.025.787,00	592.019.287,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	41.418.900,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.101.417.987,00	1.128.499.187,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	85.835.001,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.765.917.400,00	5.700.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan	5.265.213.088,00	8.102.221.943,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.158.606.976,00	10.128.605.776,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	392.770.500,00	392.770.500,00
19	Dinas Pariwisata	34.774.000,00	34.774.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.895.709.670,18	2.217.865.955,20
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.455.999.950,00	2.217.246.870,00
22	Sekretariat Daerah	11.243.067.448,00	11.247.576.448,00
23	Badan Penghubung Daerah	3.278.395.650,00	3.263.945.650,00
24	Sekretariat DPRD	828.740.552,01	844.874.502,01
25	Inspektorat	37.427.461,00	37.427.461,00

26	Paniradya Kaistimewan	14.267.700,00	12.365.700,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.983.840,00	82.858.840,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	233.903.692,00	2.599.756.390,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	672.628.450,00	723.309.750,00
	Jumlah	241.819.072.793,33	296.525.642.342,22

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	296.525.642.342,22
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	15.382.208.041,00
Reklas dari KDP keATR	8.466.433.388,00
Reklas dari JIJ ke ATR	452.247.400,00
Reklas dari PM	97.658.000,00
reklas dari persediaan	420.203.800,00
Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung	6.450.000,00
Hibah	30.001.200,00
Penyesuaian	67.912.830,05
Reklas dari tanah	9.861.000,00
Mutasi ATR dari BPKA ke DPU	1.261.338.500,00
Reklas dari ATB ke ATR	47.647.000,00
Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR	3.478.591.400,00
	26.241.961.159,05
Pengurangan:	
Reklas ke PM	1.847.610.621,91
Penghapusan	1.547.260.420,00
Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk	1.647.800,00
Reklas asset tetap lainnya krn mapping kode baru	539.053.998,54
Penyesuaian Saldo Awal Aset	831.090.266,70
penyesuaian akhir	270.600.713,06
penyesuaian mapping	304.103.165,35
Reklas ke ALL	537.126.285,00
Reklas ke Extracom	30.850.000,00
Reklas ke KDP	121.798.000,00
Kapitalisasi ATR ke JIJ	25.011.890.716,00
Kapitalisasi ATR ke Gedung Bangunan	152.279.000,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan	0,02
Reklas ATR ke AT	52.858.496.396,00

Hibah ke Pemkab Gunungkidul	345.684.000,00
-----------------------------	----------------

Pengembalian Belanja LS --ATR	27.630.725,36
	84.427.122.107,94
Saldo akhir per 31 Desember 2020	241.819.072.793,33

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.819.072.793,33 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp83.858.331.270,64, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan OPD tetapi milik OPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp23.660.153.284,64 dan aset tetap yang digunakan oleh OPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp60.198.177.986,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	41.925.802.424,00	Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN
			Ruang Rapat Balai PSDA
			Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara
			Garasi Balai PSDA
			Gedung Bina Marga DPUP-ESDM DIY
			Tembing pengaman Jembatan Denggung
			Jalan Ngalang - Nguwot - Gading
			Jembatan Denggung (RJ Gito Gati Sleman)
			Jembatan Tlacap (RJ Gito Gati Sleman)
			Jalan milik Kab Sleman
			Jembatan Tambakrejo (RJ Gito Gati Sleman)
			Jembatan Gondanglegi (RJ Gito Gati Sleman)
			Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	Plumbing Toilet Titik Nol milik DPU DIY
			Landscape tempat relokasi Eks Indra milik DPU DIY
			Jalan Provinsi milik DPU DIY
			Renovasi Pagar milik Biro Umum Setda DIY
			Interior Rg Gadri milik Kraton
			Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016
			Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	355.578.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo
4	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	10.481.187.069,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta
5	Badan Penghubung Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SETNEG
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.470.043.674,64	Jalan Barongan-Bibal
			Jalan Sedayu-Pandak
			Jalan Imogiri-Dodogan
			SLB BINA SIWI

8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.460.782.400,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA
	Jumlah	83.858.331.270,64	

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **Rp72.397.801.549,65** **Rp89.827.616.353,40**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.397.801.549,65 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini:

Tabel 5.115

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.352.908.232,65	4.029.820.833,40
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	77.008.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.628.877.670,00	30.456.449.748,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	20.985.079.930,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	153.367.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-
7	Dinas Sosial	484.557.500,00	138.302.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	130.014.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	2.596.357.100,00
10	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	513.868.450,00
11	Dinas Kebudayaan	1.495.029.592,00	2.234.597.092,00
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	785.658.000,00	49.560.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	86.433.000,00
15	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	15.700.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	-
18	Sekretariat Daerah	81.912.600,00	-
19	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00
20	Inspektorat	13.923.872.500,00	13.919.179.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	416.150.700,00	13.652.913.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00	500.008.700,00
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	243.957.000,00
	Jumlah	72.397.801.549,65	89.827.616.353,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.397.801.549,65 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp58.205.991.886,66 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.191.809.662,99, dengan rincian pada OPD sebagai berikut :

Tabel 5.116

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

NO	NAMA OPD	DED (Rp)	KDP (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	775.501.951,66	577.406.280,99
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.531.332.670,00	97.545.000,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-
7	Dinas Sosial	484.557.500,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	-
10	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	-
11	Dinas Kebudayaan	1.455.113.710,00	39.915.882,00
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	785.658.000,00	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	-
15	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	-
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	-
18	Sekretariat Daerah	81.912.600,00	-
19	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	-
20	Inspektorat	446.930.000,00	13.476.942.500,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	416.150.700,00	-
22	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00	-
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	-
	Jumlah	58.205.991.886,66	14.191.809.662,99

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp577.406.280,99 terdiri dari Pembangunan Gedung SMKN 6 sebesar Rp528.369.900,00, dan Pembangunan Gedung SMKN 4 sebesar Rp49.036.380,99.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan.

c. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah.

d. Inspektorat

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Inspektorat sebesar Rp13.476.942.500,00 merupakan pembangunan gedung kantor.

Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	89.827.616.353,40
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	-
Kapitalisasi dari Jasa Konsultasi	3.336.988.810,00
Reklas dari Gedung Bangunan	62.386.085.779,00
Reklas dari JIJ	69.778.000,00
Reklas dari belanja barang dan jasa	168.963.000,00
Reklas dari Beban Pemeliharaan	11.791.384,00
Hibah	321.994.096,00
Reklas dari Beban Makan dan Minum	28.853.350,00
Penyesuaian saldo awal	507.134.400,00
Reklas dari PM	120.526.000,00
Reklas dari ATB	144.710.840,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	39.157.670,00
	67.135.983.329,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung dan Bangunan	5.771.162.911,00
Mutasi ke dikmen GK	4.040.000.000,00
Mutasi ke dikmen KP	900.000.000,00
Mutasi ke dikmen	22.969.088.888,00
Reklas ke JIJ	19.652.847.434,00
Reklas PM	375.032.431,75
Penyesuaian saldo awal	5.670.637.200,00
Hibah	574.010.358,00
Reklas ke JIJ	10.985.183.170,00
Mutasi ke OPD lain dari Distarung	89.042.240,00
Reklas ke PM dan Gedung dan Bangunan	183.899.000,00
Penghapusan	13.354.894.500,00
	84.565.798.132,75
Saldo akhir per 31 Desember 2020	72.397.801.549,65

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 termasuk di dalamnya saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dan sumbangan/hibah untuk penanganan Covid 19, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117
Rincian Aset Tetap Berasal Dari Belanja Tidak Terduga

URAIAN	NILAI (Rp)		JUMLAH	KETERANGAN
	BTT	HIBAH		
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	2.745.937.491,91	1,00	2.745.937.492,91	
BPBD	1.723.586.091,91	1,00	1.723.586.092,91	Hibah Ambulans 1 unit
Dinas Kominfo	1.018.391.400,00	-	1.018.391.400,00	
BPKA	3.960.000,00	-	3.960.000,00	
DINAS KESEHATAN	3.298.619.548,00	2,00	3.298.619.550,00	Hibah Ventilator 2 unit
EKONOMI	374.011.640,00	-	374.011.640,00	
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	125.261.640,00	-	125.261.640,00	
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4.900.000,00	-	4.900.000,00	
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	
Dinas Koperasi Dan Umkm	157.500.000,00	-	157.500.000,00	

Dinas Pariwisata	-	-	-	
Dinas Industri Dan Perdagangan	-	-	-	
Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal	86.350.000,00	-	86.350.000,00	
DINAS PENDIDIKAN	242.314.251,23	-	242.314.251,23	
PENGAMANAN DAN GAKKUM	243.100.000,00	-	243.100.000,00	
SATPOL PP	92.150.000,00	-	92.150.000,00	
Dinas Perhubungan	150.950.000,00	-	150.950.000,00	
Badan Kesbangpol	-	-	-	
SOSIAL KEMASYARAKATAN	25.500.000,00	-	25.500.000,00	
LOGISTIK	85.763.636,36	-	85.763.636,36	
JUMLAH	7.015.246.567,50	3,00	7.015.246.570,50	

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **Rp(3.601.196.628.480,31)** **Rp(3.244.299.445.623,34)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.601.196.628.480,31) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.001.119.783.276,02)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(836.575.318.509,49)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.759.532.807.703,56)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.968.718.991,20)
	Jumlah	(3.601.196.628.480,27)

5.3.1.4 Dana Cadangan **Rp0,00** **Rp0,00**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya **Rp529.075.861.801,14** **Rp593.524.252.508,91**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp529.075.861.801,14 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya.

Mutasi Aset Lainnya sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	593.524.252.508,91
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	332.989.336,00
Usulan penghapusan	7.314.546.503,11
Penghapusan Akm Penyusutan All	5.336.080.700,56
Penyesuaian Saldo Awal	242.321.795,00
Reklas dari PM ke ATB	39.600.000,00
Reklas hak cipta dari beban jasa sertifikasi	414.478.798,00
Reklas dari KDP dan Peralatan Jaringan ke ATB	142.395.000,00
ATB Lainnya dari BTT	989.303.000,00
Reklas dari AT Lainnya	590.936.285,00
Reklas dari PM	17.058.600,00

Mutasi dari Dikpora (software)	123.511.850,00
Hibah APBN	680.050.000,00
Reklas dari PM	234.189.882,00
Reklas dari KDP (Kajian)	5.670.637.200,00
Penyesuaian SA berkurang Akm ALL	154.383.130,00
Mutasi Akm ALL ke BPKA	575.706.000,00
Asen Non Lancar Lainnya	3.136.672.600,00
Pencatatan bunga rekening jaminan	643.466.997,00
Reklas dari Tanah ke Kemitraan -sewa	6.774.000.000,00
Pinjam pakai dr OPD luar	3.160.312.914,00
Akumulasi Penyusutan Sewa keluar OPD	21.212.233.614,00
Reklas dari Tanah ke Aset Lain-Lain	69.033.828,00
Mencatat kembali Extracom ke Aset Lain-Lain	32.668.214,00
Aset Tak Berwujud	834.407.500,00
	58.720.983.746,67
Pengurangan:	
Akumulasi penyusutan ALL	5.507.649.910,58
Penghapusan ALL	14.095.005.864,09
Reklas dari Kemitraan ke Gedung dan Bangunan	87.743.866.245,00
Penyesuaian Saldo Awal	1.337.420.162,70
Penyesuaian saldo awal Akumulasi Aset lain2	50.528.061,16
Reklas ke beban jasa	889.336,00
Akum penyusutan sewa	157.631.508,00
Mutasi ke Kominfo (Software) dari Disbud	191.210.000,00
Mutasi ke Kominfo (Kajian) dari Disbud	473.247.500,00
Mutasi ALL ke BPKA	575.706.000,00
Koreksi Aset Non Lancar Lainnya (Lebih Catat)	54.797,00
Aset Non Lancar lainnya berkurang karena jaminan dicairkan	336.430.326,00
Reklas ATB ke KDP	559.912.240,00
Reklas ke JIJ	25.500.000,00
Reklas Akm ALL ke Akm.pny Peralatan mesin	184.555.410,00
Sewa mutasi keluar OPD	10.813.404.510,00
Pembebanan Akum Penyusutan Sewa	839.044.015,87
Penghapusan Akum Penyusutan Kemitraan	110.015.701,84
Penyesuaian SA Akum Peny Sewa	2.366.400,00
Akumulasi Penyusutan Sewa	4.311.204,20
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Gedung Bangunan	76.152.543,00
Koreksi BPK	12.012.500,00
Penghapusan ALL	2.335.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.533.219,00
Reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	59.592.000,00
Pengurangan ATB	5.000.000,00
	123.169.374.454,44
Saldo akhir per 31 Desember 2020	529.075.861.801,14

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp257.752.887.426,96 Rp325.881.130.128,87

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp257.752.887.426,96 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp270.777.930.697,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.025.043.270,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama OPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS	Pinjam Pakai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.847.300,00	532.733.106,00	-	-	(355.978.331,19)	526.602.074,81
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	-	-	-	(600.769.926,24)	1.647.713.825,76
3	Dinas Perhubungan	5.823.044.000,00	-	-	-	(22.886.300,00)	5.800.157.700,00
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	-	-	-	-	2.950.084,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	-	-	-	(2.262.018.887,76)	6.631.016.119,24
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	64.341.655.798,00	-	3.518.000.000,00	182.090.607.113,00	(8.850.724.356,81)	241.099.538.554,19
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	-	-	-	(866.665.468,97)	2.044.909.068,96
8	Satpol PP	-	-	-	66.000.000,00	(66.000.000,00)	-
	Jumlah	84.570.590.478,93	532.733.106,00	3.518.000.000,00	182.156.607.113,00	(13.025.043.270,97)	257.752.887.426,96

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

a. Sewa sebesar Rp84.570.590.478,93

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp84.570.590.478,93 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa OPD sebagai berikut :

Tabel 5.120
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	349.847.300,00	Tanah	Talenta Body Repair dan PT. Naragita
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	Bangunan Mess Kaliurang Gedung Wisma Kaliurang	Masyarakat umum
3	Dinas Perhubungan	5.823.044.000,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code	Masyarakat umum
			Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP)	Pegawai dan masyarakat umum

			Rumah Dinas Randubelang	
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum Masyarakat umum
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	64.341.655.798,00	Tanah dan Bangunan	
Jumlah		84.570.590.478,93		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut :

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
BPKA INDUK				
TANAH				
1	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian Tebu	279.542.000,00
2	Tanah	Hargotirto Kokap Kulonprogo	Gapoktan Manunggal	2.100.000.000,00
3	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Bang Rum Din Gol II	51.886.250,00
4	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Tanah Kosong	51.113.750,00
5	Tanah	Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	36.191.000,00
6	Tanah	Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
7	Tanah	Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
8	Tanah	Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
9	Tanah	Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
10	Tanah	Jl. Kusumanegara 169 E, Yogyakarta	Rumah Dinas	525.000.000,00
11	Tanah	Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	14.000.000,00
12	Tanah	Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	192.000.000,00
13	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Anik Suharmini	20.100.000,00
14	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Sri Wahyu	20.100.000,00
15	Tanah	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsari, Yogyakarta	Rumah Dinas	1.000.000,00
16	Tanah	Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta	Rumdin DPRD Golongan 1	101.700.000,00
17	Tanah	JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	2.251.200.000,00
18	Tanah	Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta	Disewa	3.266.000,00
19	Tanah	Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Sleman	Rumah Dinas	325.000.000,00
20	Tanah	Glugo, panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas	449.000.000,00
21	Tanah	Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Rumah Dinas	334.500.000,00
22	Tanah	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Rumah Dinas	9.240.000,00
23	Tanah	Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman	Rumah Dinas	52.020.000,00
24	Tanah	Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY	Rumah Dinas	2.450.000,00
25	Tanah	Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta	Rumah Tinggal a.n Setio Agus Samapto, SH	475.378.040,00
26	Tanah	Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta	Rumah Tinggal	1.115.200.000,00
27	Tanah	Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta	-	51.500.000,00
28	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Gudeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU	4.654.320.000,00

29	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pertokoan, Pasar Kelapa, Gapensi	6.151.340.000,00
30	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Kios desa 9 buah	89.600.000,00
31	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi	505.827.000,00
32	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Kios desa 7 buah	471.417.000,00
33	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Bengkel Mobil	451.526.000,00
34	Tanah	Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo	Tanah Bangunan Bengkel	810.020.000,00
35	Tanah	Gadingsari, Sanden, Bantul	Swasta	1.500.000.000,00
36	Tanah	Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta	STIKES	918.000.000,00
37	Tanah	Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman	-	161.600.000,00
38	Tanah	wates, wates Kulon Progo	Koperasi Sumber Rezeki	45.000.000,00
39	Tanah	Gedungkiwo, mantrijeron, Yogyakarta	KPN makaryo	81.000.000,00
40	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa	3.628.742.000,00
41	Tanah	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini	1.517.952.000,00
42	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar Binangun	2.316.100.000,00
43	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar binangun	619.400.000,00
44	Tanah	Caturtunggal, Depok, Sleman	Yayasan Darmapala	2.107.500.000,00
45	Tanah	Bleberan Playen Gunung Kidul	Obyek Wisata Sri Gethuk	662.100.400,00
46	Tanah	kel. sendang sari, pengasih, kulon progo	Sarang burung walet, EKS sabut kelapa,	1.724.000.000,00
47	Tanah	Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo	Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan	940.000.000,00
48	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	DPD Golkar	1.941.380.000,00
49	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	234.840.000,00
50	Tanah	Beji, Wates	Pertanian	345.565.000,00
51	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	266.090.000,00
52	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	264.860.000,00
53	Tanah	Beji, Wates, Wates, Kulon Progo	Pertanian	258.300.000,00
54	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	342.475.000,00
55	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	1.364.800.000,00
56	Tanah	Driyan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	156.045.000,00
57	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.786.000,00
58	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	192.713.000,00
59	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	138.334.000,00
60	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	60.844.000,00
61	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	240.960.000,00
62	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	183.443.000,00
63	Tanah	Mutihan, wates, Kulon Progo	Pertanian	92.185.000,00
64	Tanah	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	123.000.000,00
65	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	143.170.000,00
66	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	21.424.000,00
67	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.131.000,00

68	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	82.915.000,00
69	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	101.455.000,00
70	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	243.286.000,00
71	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	311.600.000,00
72	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	164.984.000,00
73	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	48.307.000,00
74	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	94.245.000,00
75	Tanah	Bulak Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	132.355.000,00
76	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	66.744.000,00
77	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.817.000,00
78	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	130.707.000,00
79	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	41.200.000,00
80	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.955.000,00
81	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.682.000,00
82	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	184.782.000,00
83	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.224.000,00
84	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	69.372.000,00
85	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	39.114.000,00
86	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	87.241.000,00
87	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.950.000,00
88	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.120.000,00
89	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	703.840.000,00
90	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	85.116.000,00
91	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	56.498.000,00
92	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	208.369.000,00
93	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.190.000,00
94	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	71.012.000,00
95	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon progo	Pertanian	15.662.000,00
96	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.415.000,00
97	Tanah	Beji, Wates, Kulon progo	Pertanian	111.446.000,00
98	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.662.000,00
99	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	9.600.000,00
100	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.744.000,00
101	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	58.813.000,00
102	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
103	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
104	Tanah	Sentolo, Sentolo, Kulon Progo	Base camp	487.755.000,00
105	Tanah	Jalan Kenari 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	Taman Bunga (Selatan Mandala Krida)	6.774.000.000,00
106	Tanah	Srimulyo, Piyungan, Bantul	Tempat Parkir	1.386.325.000,00
				7.222.096.440,00
BANGUNAN				

1	Bangunan	Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY	102.535.755,00
2	Bangunan	Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul	Bangunan gedung	1.033.385.000,00
3	Bangunan	Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta	Gedung Kantor	840.913.920,00
4	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Gudang, Kepsek, Belajar& Adm	56.965.800,00
5	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Perpustakaan	27.542.400,00
6	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan	33.979.600,00
7	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang UKS, Bayi, Balok	18.988.600,00
8	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, Office, TK Kecil	54.967.000,00
9	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	TK Kecil Ruang Kelas	63.961.600,00
10	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik	85.948.400,00
11	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang	29.982.000,00
12	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Tunggu	35.978.400,00
13	Bangunan	Jl AM Sangaji Cokrodingratan No. 45, Jetis, Yogyakarta	Gedung sekolah AM Sangaji	175.733.000,00
14	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
15	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	80.822.641,00
16	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
17	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
18	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
19	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
20	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
21	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	121.500.000,00
22	Bangunan	Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta	Gedung Perumahan	597.790.000,00
23	Bangunan	Komplek Kolombo 58	Gedung Perumahan	52.966.126,00
24	Bangunan	Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman	Gedung Perumahan	90.039.179,00
25	Bangunan	Jl Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	431.752.706,00
26	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas V	202.390.876,00
27	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas III	136.400.000,00
28	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas II	136.400.000,00
29	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas I	136.400.000,00
30	Bangunan	Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta	eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU	97.375.274,00
31	Bangunan	Jl Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta	Eks Rumah Negara Gol II Tipe C	19.500.000,00
32	Bangunan	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Gedung Rumah Dinas	40.932.000,00
33	Bangunan	Jl. Bima No. 25 C, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217	23.344.578,00
34	Bangunan	Jl Bima No. 25 B, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578,00
35	Bangunan	Jl Bima No 25 A, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578,00
36	Bangunan	Jl Bima No. 25, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	40.019.277,00
37	Bangunan	Gemawang, Karangjati , Sinduadi ,Sleman	Rumah Dinas	158.875.200,00
38	Bangunan	Komplek Griya Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Kalasan, Sleman	Eks Parsenibud	112.338.334,00
39	Bangunan	Komplek Colombo No. 59 Yogyakarta	Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial	36.191.000,00
				5.322.107.822,00

JUMLAH				62.544.204.262,00
---------------	--	--	--	--------------------------

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
KPPD BANTUL				
1	Tanah	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Parkir	1.472.393,00
2	Bangunan	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Fotocopi	1.283.517,00
				22.755.910,00
KPPD KULON PROGO				
1	Tanah	Giripeni Wates Kulon Progo	Parkir	161.106.846,00
2	Bangunan	Giripeni Wates Kulon Progo	Kantin, Foto Coppy , BPD dan ATM	194.276.692,00
				355.383.538,00
KPPD KOTA YOGYAKARTA				
1	Tanah	Jl Tentara Pelajar 13 Yogyakarta Kecamatan Gedongtengen	Parkir	6.711.300,00
2	Bangunan	Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta	Kantin, Foto Copy	39.440.000,00
				46.151.300,00
KPPD GUNUNGGIDUL				
1	Tanah	Jl. Pemuda Baleharjo Wonosari Gunung Kidul	Parkir	33.714.182,00
2	Bangunan	Jl. Pemuda, Baleharjo, Wonosari Gunung Kidul	Kantin, Foto Copy	38.356.880,00
				72.071.062,00
KPPD SLEMAN				
1	Tanah	Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman	KPPD Di Kabupaten Sleman	7.943.936,00
		Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman	Parkir kendaraan bermotor	1.274.000.000,00
2	Bangunan	Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman	Kantin dan Fotocopy	19.145.790,00
				1.301.089.726,00
JUMLAH				1.797.451.536,000
TOTAL				64.341.655.798,00

b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp532.733.106,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp532.733.106,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangunan Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.

d. Pinjam Pakai sebesar Rp182.156.607.113,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai sebesar Rp182.156.607.113,00 merupakan aset milik Pemda DIY yang dipinjam oleh pihak lain terdapat pada BPKA sebesar Rp182.090.607.113,00, dan pada Satpol PP sebesar Rp66.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas/no. plat	Alamat / merk	Penggunaan	Nilai Aset (Rp)
BPKA					
TANAH					
1	Tanah	40.790	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	32.713.580.000,00
2	Tanah	1.512	Kasongan, Bangunjiwo, Bantul	Pemkab Bantul	264.600.000,00
3	Tanah	10.040	Kalitirto, berbah, sleman	Pemkab Sleman	502.000.000,00
4	Tanah	2.510	pandowoharjo , sleman	Pemkab Sleman	125.500.000,00
5	Tanah	5.705	pendowoharjo, sleman	Pemkab Sleman	285.250.000,00
6	Tanah	9.510	sumberagung , mayudan, sleman	Pemkab Sleman	475.500.000,00
7	Tanah	6.770	margodadi , sayegan, sleman	Pemkab Sleman	338.500.000,00
8	Tanah	641	Jl Khudori 49, Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	336.525.000,00
9	Tanah	2.885	Jl. Pakuwon beran kidul, tridadi sleman	Pemkab Sleman	288.500.000,00
10	Tanah	558	Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	511.178.000,00
11	Tanah	9.910	Bimomartani ngemplak ,sleman	Pemkab Sleman	495.500.000,00
12	Tanah	104	Gunungketur, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	83.200.000,00
13	Tanah	2.250	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Kanwil BPN Prov. DIY	1.800.000.000,00
14	Tanah	1.000	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Badan Pusat Statistik Kota YK.	800.000.000,00
15	Tanah	1.380	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	BNN DIY	1.104.000.000,00
16	Tanah	10.001	Sumberrejo semin, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	200.020.000,00
17	Tanah	2.145	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	PMI	1.716.000.000,00
18	Tanah	749	Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	1.761.698.000,00
19	Tanah	2.590	Karangsewu galur kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	103.600.000,00
20	Tanah	10.317	Semanu, semanu , Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	206.340.000,00
21	Tanah	1.720	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	473.000.000,00
22	Tanah	5.520	Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	276.000.000,00
23	Tanah	2.755	Argorejo, Sedayu, Bantul	Pemkab Bantul	68.755.000,00
24	Tanah	1.425	Margosari, Pengasih, KP	Pemkab Bantul	213.750.000,00
25	Tanah	1.225	Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Bantul	1.102.500.000,00
26	Tanah	770	Jl. Veteran Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	539.000.000,00
27	Tanah	9.935	Kulwaru, kulwaru, Wates, kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.490.250.000,00
28	Tanah	1.555	Karangsewu Galur kulon progo Dusun XII	Pemkab Kulon Progo	62.200.000,00
29	Tanah	10.219	Putat, putat gunung kidul	Pemkab Gunung Kidul	204.380.000,00
30	Tanah	19.562	Bandung, playen gunung kidul	Pemkab Gunung Kidul	586.860.000,00

31	Tanah	4.824	Murtigading, Sanden, Bantul	Pemkab Bantul	964.800.000,00
32	Tanah	4.204	Murtigading, Sanden, Bantul	Pemkab Bantul	1.261.200.000,00
33	Tanah	3.837	Jalan Jenggotan No.5 Pingit Jetis Yogyakarta	Oditurat Militer	1.055.175.000,00
34	Tanah	4.433	Jl. Parangtritis Timbulharjo sewon bantul	Pemkab Bantul	327.738.200,00
35	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	257.675.000,00
36	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	142.175.000,00
37	Tanah	264	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Detazemen Zeni Bangunan 2/IV Yk	38.188.235,00
38	Tanah	429	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemkab Sleman	62.055.882,00
39	Tanah	1.298	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemerintah Desa Bokoharjo	187.758.824,00
40	Tanah	253	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemkab Sleman	36.597.059,00
41	Tanah	2.142	Jl Faridan M Noto No 11 Kotabaru, Yogyakarta	BSSN	583.000.000,00
42	Tanah	9.685	Harjobinangun, Pakem, Sleman	Pemkab Sleman	1.239.680.000,00
43	Tanah	8.049	Suryodiningratan, MJ Yogyakarta	ISI	2.012.250.000,00
44	Tanah	278	Semin , Gunungkidul	Pemkab Gunung Kidul	69.500.000,00
45	Tanah	2.159	Murtigading, Sanden, bantul	Pemkab Bantul	431.000.000,00
46	Tanah	2.542	Wiyoro Baturetno, Batul Jl. Wonosari KM. 6	Lanal Yogyakarta	2.591.800.000,00
47	Tanah	1.510	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	123.820.000,00
48	Tanah	1.524	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	124.968.000,00
49	Tanah	1.352	Mutihlan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	532.688.000,00
50	Tanah	1.550	Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.777.850.000,00
51	Tanah	1.397	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	339.471.000,00
52	Tanah	1.178	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	286.254.000,00
53	Tanah	2.794	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	2.240.788.000,00
54	Tanah	2.915	Jl. Panjaitan No.49 Suryodiningratan YK	Bawaslu DIY	583.000.000,00
55	Tanah	1.070	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	94.600.000,00
56	Tanah	3.765	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	3.885.480.000,00
57	Tanah	1.663	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	58.205.000,00
58	Tanah	593	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	20.755.000,00
59	Tanah	102	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	3.570.000,00
60	Tanah	65	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	2.275.000,00
61	Tanah	637	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	15.925.000,00

62	Tanah	146	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	3.650.000,00	
63	Tanah	468	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	11.700.000,00	
64	Tanah	22.502	Pantai Krakal, Sidorejo, Tepus, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	675.060.000,00	
65	Tanah	21.151	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	1.057.550.000,00	
66	Tanah	9.696	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	480.810.000,00	
67	Tanah	46.200	Rt.06/ Rw02, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.386.000.000,00	
68	Tanah	62.663	Punukan, Wates, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	5.138.366.000,00	
69	Tanah	30.097	Bangun Harjo, Sewon, Bantul	Pemkab Bantul	90.182.474.400,00	
					169.414.038.600,00	
BANGUNAN						
1	Bangunan	123	Jl. Malioboro, Kepatihan, Yogyakarta	Kartamantul	103.904.250,00	
2	Bangunan	120	jl. Retnodumilah no 23 c, Pilahan Kotagede Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	46.550.000,00	
3	Bangunan	2542	Wiyoro, Baturetno, bantul	Lanal Yogyakarta	6.083.035.300,00	
4	Bangunan	510	Jl. DI Panjaitan 49 YK	Bawaslu DIY	25.000.000,00	
5	Bangunan	650	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	901.546.350,00	
6	Bangunan	3637	Jln. Jenggotan 5-7 Yogyakarta	Oditurat Militer	450.000.000,00	
7	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemkab Bantul	78.702.000,00	
8	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemkab Bantul	78.702.000,00	
9	Bangunan	132	Jl DI Panjaitan 49 Yk	Bawaslu DIY	25.000.000,00	
10	Bangunan	200	Jl. DI Panjaitan 49 YK	Bawaslu DIY	313.405.064,00	
11	Bangunan	278	Semin, Semin, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	240.303.000,00	
12	Bangunan	270	Jl. Brigjen Katamso, Belakang Kanwil BPN Yogyakarta	Gedung Belakang Diklat PMI Brigjend Katamso	375.084.000,00	
13	Bangunan	845	Jl M Faridan M Noto 21 Kotabaru Yogyakarta	BSSN	1.658.571.049,00	
14	Bangunan	65	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	109.500.000,00	
					10.489.303.013,00	
PERALATAN MESIN						
1	Kendaraan	AB 1095 UH	Nissan Terrano	TNI AU	210.000.000,00	
2	Kendaraan	AB 82	Toyota Kijang 7K	KPU	145.000.000,00	
3	Kendaraan	AB 1870 UA	Toyota Innova G	Lanal Yogyakarta	210.250.000,00	
4	Kendaraan	AB 1987 UA	Toyota/ Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00	
5	Kendaraan	AB 1988 UA	Toyota/Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00	
6	Kendaraan	AB 1255 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	KPU	247.139.300,00	
7	Kendaraan	AB 1253 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	Korem 072 PMK	247.139.300,00	
8	Kendaraan	AB 1363 UH	Toyota Rush 1,5 G	KPU	211.035.400,00	
9	Kendaraan	AB 1364 UH	Toyota Avanza 1.3 E	KPU	155.035.400,00	

10	Kendaraan	AB-1726-YX	INNOVA 2.0 GM/T LUXURY	BPN	276.073.000,00
11	Kendaraan	AB 2621 UA	Honda	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
12	Kendaraan	AB 2360 UB	Honda ND125	SEKRETARIAT KPU	8.400.000,00
					2.187.265.500,00
JUMLAH					182.090.607.113,00
SATPOL PP					
PERALATAN MESIN					
1	Kendaraan	AB 1660 UA	Suzuki Station Wagon (APV)	BNNP	66.000.000,00
JUMLAH					66.000.000,00

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Rp82.178.412.601,00 Rp74.340.011.191,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.178.412.601,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hak Cipta	131.849.000,00
2	Software	31.811.047.516,00
3	Kajian	43.238.888.045,00
4	Website	1.270.181.840,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.726.446.200,00
	Jumlah	82.178.412.601,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.936.174.300,00	4.846.123.950,00
2	Dinas Kesehatan	1.576.428.255,00	1.488.267.155,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	17.448.429.735,00	11.892.485.035,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.075.000,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.363.803.000,00	204.550.000,00
8	Dinas Sosial	36.966.000,00	36.966.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.230.000,00	150.230.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	662.762.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00
12	Dinas Perhubungan	2.153.442.308,00	2.153.442.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.320.202.500,00	6.177.807.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	542.494.000,00	533.990.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.385.119.540,00	2.385.119.540,00
16	Dinas Kebudayaan	11.492.705.925,00	11.378.013.425,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.685.524.462,00	2.685.524.462,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	643.113.500,00	668.613.500,00
19	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.793.500,00	556.504.340,00
22	Sekretariat Daerah	2.575.767.910,00	2.404.318.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-
24	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	460.855.200,00	411.201.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.339.114.325,00	9.339.114.325,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.942.232.816,00	5.898.522.816,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	775.416.500,00	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	624.475.750,00	624.475.750,00
	Jumlah	82.178.412.601,00	74.340.011.191,00

Tabel 5.123
Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	5.105.194.450,00	710.818.000,00	-	120.161.850,00
2	Dinas Kesehatan	-	1.142.455.105,00	214.694.050,00	33.618.000,00	185.661.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	-	290.837.660,00	17.157.592.075,00	-	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	162.090.000,00	-	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	51.697.500,00	-	-	97.377.500,00

No	Nama OPD	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	204.925.000,00	-	169.575.000,00	989.303.000,00
8	Dinas Sosial	-	36.966.000,00	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	150.230.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	31.850.000,00	522.412.750,00	108.500.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	651.208.000,00	3.259.629.250,00	36.298.000,00	49.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	-	567.129.808,00	1.586.312.500,00	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	6.320.202.500,00	-	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	444.494.000,00	-	-	98.000.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	341.811.000,00	1.754.179.000,00	289.129.540,00	-
16	Dinas Kebudayaan	-	2.156.486.875,00	6.768.021.800,00	191.477.500,00	2.376.719.750,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	1.280.350.022,00	117.239.440,00	-	1.287.935.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	376.349.500,00	81.299.000,00	132.432.000,00	53.033.000,00
19	Dinas Pariwisata	-	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	109.537.000,00	918.788.780,00	138.900.000,00	39.100.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	333.893.500,00	20.000.000,00	-	57.900.000,00
22	Sekretariat Daerah	131.849.000,00	1.486.561.910,00	917.757.000,00	-	39.600.000,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	412.405.245,00	519.036.200,00	109.851.800,00	79.140.000,00
25	Inspektorat	-	460.855.200,00	-	-	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.991.010.625,00	6.348.103.700,00	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	5.352.077.816,00	381.105.000,00	-	209.050.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	746.166.500,00	-	29.250.000,00	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	399.657.300,00	149.203.450,00	31.150.000,00	44.465.000,00
	Jumlah	131.849.000,00	31.811.047.516,00	43.238.888.045,00	1.270.181.840,00	5.726.446.200,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Rp170.052.579.232,24

Rp177.654.783.122,10

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp170.052.579.232,24 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp184.852.418.057,95 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp14.799.838.825,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124

Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.806.583.402,98	6.494.061.614,20
2	Dinas Kesehatan	686.097.850,00	594.188.858,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	159.003.233.249,67	158.716.242.424,27
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.902.600,00	458.446,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	72.447.758,00	150.644.077,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.616.500,00	74.525.000,00
8	Dinas Sosial	399.072.000,00	350.477.782,34
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.786.579,17	-

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	3.220.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	613.658.647,00	623.894.491,00
12	Dinas Perhubungan	857.974.650,00	857.974.650,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	361.052.621,00	123.107.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	147.500,00	-
16	Dinas Kebudayaan	324.917.989,36	49.749.364,50
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.559.068.468,00	3.529.928.603,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	190.106.762,00	190.106.762,00
19	Dinas Pariwisata	-	34.761.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	757.008.444,65	129.431.678,65
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	6.963.450,00
22	Sekretariat Daerah	234.494.368,97	8.033.341,97
23	Badan Penghubung Daerah	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	-
25	Inspektorat	2.536.571,44	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	562.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	84.711.670,00	5.711.552.079,17
29	Badan Kepegawaian Daerah	161.600,00	4.900.000,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
	Jumlah	170.052.579.232,24	177.654.783.122,10

5.3.1.4.5 Aset Non Lancar Lainnya **Rp19.091.982.540,94** **Rp15.648.328.066,94**

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.091.982.540,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan. Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp793.051.590,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.332.516.237,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp7.966.414.713,18. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125

Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2020

BPD DIY CABANG UTAMA					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	001311007454	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	001311007456	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3	001311007461	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4	001311007463	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
5	001311007475	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
6	001311007481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
7	001311007521	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	5.000.000,00	-	5.000.000,00
8	001311007522	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9	001311007523	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
10	001311007524	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
11	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
12	001311007539	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
13	001311007540	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
14	001311007544	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
15	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
16	001311007581	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
17	001311007606	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	5.000.000,00	-	5.000.000,00
18	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
19	001311007613	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
20	001311007630	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
21	001311007647	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
22	001311007661	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
23	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
24	001311007743	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
25	001311007748	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00

26	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
27	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
28	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
29	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
30	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000,00	-	5.000.000,00
31	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000,00	-	5.000.000,00
32	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
33	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
34	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
35	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
36	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
37	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
38	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
39	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
40	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000,00	-	5.000.000,00
41	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
42	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
43	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
44	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
45	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
46	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
47	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
48	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
49	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
50	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
51	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
52	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
53	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
54	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
55	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
56	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
57	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
58	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
59	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
60	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
61	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
62	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000,00	-	5.000.000,00
63	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
64	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
65	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
66	001311008436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
67	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
68	001311008492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
69	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
70	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
71	001311008501	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
72	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
73	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
74	001311008667	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
75	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00

76	001311008715	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
77	001311008726	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
78	001311008727	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
79	001311008763	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
80	001311008808	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
81	001311008809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
82	001311008871	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
83	001311008910	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
84	001311008913	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
85	001311008925	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
86	001311009018	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
87	001311009051	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
88	001311009064	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
89	001311009065	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GAWI MAJU KARSA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
90	001311009083	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
91	001311009086	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
92	001311009089	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
93	001311009094	DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
94	001311009250	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
95	001311009382	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
96	001311009404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
97	001311009443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
98	001311009472	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
99	001311009495	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
100	001311009510	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
101	001311009572	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
102	001311009582	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
103	001311009600	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
104	001311009611	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
105	001311009632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
106	001311009640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
107	001311009742	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
108	001311009792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
109	001311009799	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
110	001311009809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
111	001311009812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
112	001311009824	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
113	001311009826	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
114	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	4.500.000,00	-	4.500.000,00
115	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	4.500.000,00	-	4.500.000,00
116	001311007571	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	4.076.000,00	-	4.076.000,00
117	001311006205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	3.675.000,00	-	3.675.000,00
118	001311006139	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
119	001311006566	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	3.500.000,00	-	3.500.000,00
120	001311006986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.500.000,00	-	3.500.000,00
121	001311006995	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	3.500.000,00	-	3.500.000,00
122	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	3.350.000,00	-	3.350.000,00
123	001311006985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.250.000,00	-	3.250.000,00
124	001311006517	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	3.200.000,00	-	3.200.000,00
125	001311005880	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	3.132.000,00	-	3.132.000,00

126	001311007104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	2.930.000,00	-	2.930.000,00
127	001311007262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	2.600.000,00	-	2.600.000,00
128	001311005919	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	2.550.000,00	-	2.550.000,00
129	001311007014	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	2.500.000,00	-	2.500.000,00
130	001311007337	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	2.350.000,00	-	2.350.000,00
131	001311006206	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	2.250.000,00	-	2.250.000,00
132	001311007126	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	2.100.000,00	-	2.100.000,00
133	001311006680	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	1.750.000,00	-	1.750.000,00
134	001311007047	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	1.750.000,00	-	1.750.000,00
135	001311006440	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	1.600.000,00	-	1.600.000,00
136	001311006994	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
137	001311006642	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	1.400.000,00	-	1.400.000,00
138	001311006632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	1.000.000,00	-	1.000.000,00
139	001311007364	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	924.000,00	-	924.000,00
140	001311005917	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	700.000,00	-	700.000,00
141	001311005926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
142	001311005927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
143	001311006710	DINAS PUP - ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	700.000,00	-	700.000,00
144	001311006858	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	700.000,00	-	700.000,00
145	001311006969	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
146	001311007007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
147	001311007010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	700.000,00	-	700.000,00
148	001311006406	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	650.000,00	-	650.000,00
149	001311006709	DINAS PUP - ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	650.000,00	-	650.000,00
150	001311007056	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	650.000,00	-	650.000,00
151	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	650.000,00	-	650.000,00
152	001311007210	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
153	001311007211	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
154	001311005962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDR A P	630.000,00	-	630.000,00
155	001311007149	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	600.000,00	-	600.000,00
156	001311005961	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	594.300,00	-	594.300,00
157	001311005952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	550.000,00	-	550.000,00
158	001311005965	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	550.000,00	-	550.000,00
159	1311005890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	500.000,00	-	500.000,00
160	001311005915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	500.000,00	-	500.000,00
161	001311005918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	500.000,00	-	500.000,00
162	001311005920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
163	001311005934	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
164	001311005943	DINAS PUP - ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	500.000,00	-	500.000,00
165	001311005949	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	500.000,00	-	500.000,00
166	001311005953	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	500.000,00	-	500.000,00
167	001311005956	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	500.000,00	-	500.000,00
168	001311005957	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	500.000,00	-	500.000,00
169	001311005975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	500.000,00	-	500.000,00
170	001311005985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	500.000,00	-	500.000,00
171	001311005986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	500.000,00	-	500.000,00
172	001311005988	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	500.000,00	-	500.000,00
173	001311005998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARG A MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
174	001311005999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARG A MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
175	001311006001	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	500.000,00	-	500.000,00

176	001311006003	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	500.000,00	-	500.000,00
177	001311006007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	500.000,00	-	500.000,00
178	001311006009	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
179	001311006010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
180	001311006012	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	500.000,00	-	500.000,00
181	001311006213	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	500.000,00	-	500.000,00
182	001311006264	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	500.000,00	-	500.000,00
183	001311006265	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
184	001311006408	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	500.000,00	-	500.000,00
185	001311006428	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	500.000,00	-	500.000,00
186	001311006593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
187	001311006594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
188	001311006700	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	500.000,00	-	500.000,00
189	001311006827	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSJA RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00
190	001311006862	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	500.000,00	-	500.000,00
191	001311006863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	500.000,00	-	500.000,00
192	001311006899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO	500.000,00	-	500.000,00
193	001311006904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000,00	-	500.000,00
194	001311006915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	500.000,00	-	500.000,00
195	001311006942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000,00	-	500.000,00
196	001311006964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARASENA	500.000,00	-	500.000,00
197	001311007006	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	500.000,00	-	500.000,00
198	001311007029	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	500.000,00	-	500.000,00
199	001311007071	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	500.000,00	-	500.000,00
200	001311007072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	500.000,00	-	500.000,00
201	001311007073	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	500.000,00	-	500.000,00
202	001311007094	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	500.000,00	-	500.000,00
203	001311007114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	500.000,00	-	500.000,00
204	001311007229	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	500.000,00	-	500.000,00
205	001311007234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	500.000,00	-	500.000,00
206	001311007240	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	500.000,00	-	500.000,00
207	001311007241	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	500.000,00	-	500.000,00
208	001311007244	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	500.000,00	-	500.000,00
209	001311007245	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	500.000,00	-	500.000,00
210	001311007372	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
211	001311007379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	500.000,00	-	500.000,00
		Jumlah	674.811.300,00	-	674.811.300,00

1	001221034261	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	-	1.206.969,00	1.206.969,00
2	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	-	1.206.078,00	1.206.078,00
3	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	-	1.085.787,00	1.085.787,00
4	001221033342	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	-	1.071.342,00	1.071.342,00
5	001221034804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	-	1.031.199,00	1.031.199,00
6	001221034260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	-	999.428,00	999.428,00
7	001221035316	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	-	992.440,00	992.440,00
8	001221035451	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	-	967.012,00	967.012,00
9	001221034740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	-	942.974,00	942.974,00
10	001221032926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	-	922.318,00	922.318,00
11	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	-	895.706,00	895.706,00
12	001221035877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	-	852.532,00	852.532,00
13	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	-	849.187,00	849.187,00
14	001221033345	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	-	830.552,00	830.552,00
15	001221036069	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNG GAL	-	796.909,00	796.909,00
16	001221035237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	-	780.926,00	780.926,00
17	001221032837	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	-	756.293,00	756.293,00
18	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	-	754.206,00	754.206,00
19	001221033982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	-	733.605,00	733.605,00
20	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	-	732.002,00	732.002,00
21	001221031890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S	-	725.447,00	725.447,00
22	001221034212	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	-	720.486,00	720.486,00
23	001221033324	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	-	716.595,00	716.595,00
24	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	-	715.525,00	715.525,00
25	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	-	715.525,00	715.525,00
26	001221034140	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	-	715.500,00	715.500,00
27	001221034141	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	-	715.500,00	715.500,00
28	001221032886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	-	705.550,00	705.550,00
29	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	-	697.267,00	697.267,00
30	001221034284	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	-	697.267,00	697.267,00
31	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	-	697.250,00	697.250,00
32	001221033987	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	-	696.856,00	696.856,00
33	001221033971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	-	695.712,00	695.712,00
34	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	-	684.381,00	684.381,00
35	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	-	684.017,00	684.017,00
36	001221034400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	-	683.861,00	683.861,00
37	001221034359	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	-	680.113,00	680.113,00
38	001221034365	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	-	679.035,00	679.035,00
39	001221035740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	-	674.105,00	674.105,00
40	001221031745	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	-	667.786,00	667.786,00
41	001221032357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	-	647.906,00	647.906,00
42	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	-	645.830,00	645.830,00
43	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	-	645.813,00	645.813,00
44	001221034640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	-	645.785,00	645.785,00
45	001221033812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	-	640.872,00	640.872,00
46	001221035514	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	-	637.748,00	637.748,00
47	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	-	629.336,00	629.336,00
48	001221034751	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	-	625.371,00	625.371,00
49	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	-	625.355,00	625.355,00
50	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	-	625.355,00	625.355,00

51	001221032788	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	-	614.375,00	614.375,00
52	001221034927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	-	613.091,00	613.091,00
53	001221037181	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	-	601.851,00	601.851,00
54	001221036978	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO	-	596.994,00	596.994,00
55	001221035238	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGKUL JAYA	-	596.994,00	596.994,00
56	001221033357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	-	596.994,00	596.994,00
57	001221035251	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	-	596.988,00	596.988,00
58	001221033857	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYATI	-	589.429,00	589.429,00
59	001221035397	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALMARIYAN SHOKHEH	-	589.429,00	589.429,00
60	0012210393268	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WILAYATI HAYA K	-	578.726,00	578.726,00
61	001221035694	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PRAROGAAN MURTI	-	578.083,00	578.083,00
62	0012210393701	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAIBINDI SRI INDONESIA	-	573.940,00	573.940,00
63	0012210357460	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDRAN SUHARAJA	-	572.041,00	572.041,00
64	0012210353491	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI PROGO JAYA MUDA	-	572.041,00	572.041,00
65	001221035448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIAWIGI	-	564.860,00	564.860,00
66	001221035575	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	-	564.860,00	564.860,00
67	001221035480	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	-	564.798,00	564.798,00
68	001221035590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	-	564.798,00	564.798,00
69	001221035481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUMARCO	-	564.798,00	564.798,00
70	0012210356735	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	-	559.862,00	559.862,00
71	001221035438	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	-	559.862,00	559.862,00
72	0012210393492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SYAMSULHAQI SEJAHTERA	-	539.890,00	539.890,00
73	0012210393082	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV YAN SAN CITA MERDEKA	-	528.685,00	528.685,00
74	0012210393930	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN GEMILANG	-	527.041,00	527.041,00
75	0012210393932	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BURIA PATRONS ANTARA	-	524.937,00	524.937,00
76	001221031849	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TBKARSA REKA B	-	539.391,00	539.391,00
77	001221039593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASIKUAT	-	473.577,00	473.577,00
78	001221035585	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	-	532.753,00	532.753,00
79	001221039594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	-	473.577,00	473.577,00
80	001221035673	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FITIM DWI SISWANTI	-	527.729,00	527.729,00
81	001221039564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAM	-	441.093,00	441.093,00
82	001221031885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	-	525.220,00	525.220,00
83	001221039590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	-	468.109,00	468.109,00
84	0012210393384	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HRESADI SARINIA	-	515.869,00	515.869,00
85	0012210393869	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAGUNG BARAS C	-	500.604,00	500.604,00
86	0012210393388	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PATMOLING KRINING YANTA	-	498.050,00	498.050,00
87	0012210393890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANJOSO	-	496.784,00	496.784,00
88	001221037310	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	-	469.338,00	469.338,00
89	001221033694	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	-	77.997,00	77.997,00
90	001221036135	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	-	455.616,00	455.616,00
91	001221033179	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KOTASA RANGGA K	-	43.912,00	43.912,00
92	001221036260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	-	441.093,00	441.093,00
93	001221031963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	-	437.479,00	437.479,00
94	001221036248	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	-	434.868,00	434.868,00
95	001221036444	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	-	420.127,00	420.127,00
96	001221036685	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ALAM PURNAMA	-	412.112,00	412.112,00
97	001221036607	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HARTAMA MAKMUR A	40.100.000,00	412.112,00	40.100.000,00
98	001221036507	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S	-	408.850,00	408.850,00
99	001221036508	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT GEO PRIMA PERSADA	-	408.850,00	408.850,00
100	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	-	402.351,00	402.351,00
101	001221036733	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	-	397.717,00	397.717,00
102	001221036756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA	-	397.678,00	397.678,00
103	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	-	384.853,00	384.853,00
104	001221036942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	-	368.808,00	368.808,00
105	001221036899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA	-	362.350,00	362.350,00
106	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	-	356.325,00	356.325,00
107	001221036986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO	-	354.439,00	354.439,00
108	001221036951	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI	-	348.990,00	348.990,00
109	001221036952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA	-	348.990,00	348.990,00
110	001221036974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GERBANG MENOREH	-	347.914,00	347.914,00
111	001221036976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M	-	347.914,00	347.914,00
			Jumlah	68.167.349,00	68.167.349,00
			Jumlah JAMSUNG	674.811.300,00	674.811.300,00
			Jumlah JAMSUNG	68.167.349,00	68.167.349,00
			Jumlah JAMSUNG	434.868,00	434.868,00
BPD WATES					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
86	002310300885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HARTAMA MAKMUR A	40.100.000,00	412.112,00	40.100.000,00
87	002310300876	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S	-	408.850,00	408.850,00
88	001221036508	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT GEO PRIMA PERSADA	40.100.000,00	408.850,00	50.072.941,00
89	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	-	402.351,00	402.351,00
90	001221036733	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	-	397.717,00	397.717,00
91	001221036756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA	714.911.300,00	78.140.290,00	793.051.590,00
92	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	-	384.853,00	384.853,00
93	001221036942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	-	368.808,00	368.808,00
94	001221036899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA	-	362.350,00	362.350,00
95	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	-	356.325,00	356.325,00
96	001221036986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO	-	354.439,00	354.439,00
97	001221036951	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI	-	348.990,00	348.990,00
98	001221036952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA	-	348.990,00	348.990,00
99	001221036974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GERBANG MENOREH	-	347.914,00	347.914,00
100	001221036976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M	-	347.914,00	347.914,00

Tabel 5.126

Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2020

BANK PASAR KULON PROGO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	4900/XI/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	43.700.000,00	-	43.700.000,00
2	5227/V/D/13/118	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	18.690.000,00	-	18.690.000,00
3	6375/IX/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	51.500.000,00	-	51.500.000,00
4	5754/IIII/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	150.700.000,00	-	150.700.000,00
5	6195/VIII/D/14/133	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	51.200.000,00	-	51.200.000,00
6	4822/X/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	44.670.000,00	-	44.670.000,00
7	4912/XII/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	50.040.000,00	-	50.040.000,00
8	9832/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	92.000.000,00	-	92.000.000,00
		Jumlah	502.500.000,00	-	502.500.000,00
1	650601030579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	-	25.282.744,00	25.282.744,00
2	650601031380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	-	19.117.824,00	19.117.824,00
3	650601035425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	-	22.656.812,00	22.656.812,00
4	650601032864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	-	120.380.046,00	120.380.046,00
5	650601035097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	-	23.038.526,00	23.038.526,00
6	650601030367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	-	26.350.455,00	26.350.455,00
7	650601030602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	-	31.078.231,00	31.078.231,00
8	650601029861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	-	22.147.138,00	22.147.138,00
		Jumlah	-	290.051.776,00	290.051.776,00
		JUMLAH JAMREK	502.500.000,00	290.051.776,00	792.551.776,00
BNI TRIKORA					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	1101274754	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA	38.870.085,00	-	38.870.085,00
2	0799697895	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	49.132.760,00	-	49.132.760,00
3	1107392466	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO	110.064.780,00	-	110.064.780,00
4	0898052558	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	26.435.895,00	-	26.435.895,00
5	0899114811	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	26.435.895,00	-	26.435.895,00
6	0899556699	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO	71.843.436,00	-	71.843.436,00
7	0817378837	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARAS SENA	69.289.957,00	-	69.289.957,00
8	0725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	91.749.733,00	-	91.749.733,00
9	1055756851	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO	20.381.843,00	-	20.381.843,00
10	0823310417	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN	49.021.616,00	-	49.021.616,00
11	1101438534	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA	40.279.882,00	-	40.279.882,00
12	0739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	75.427.454,00	-	75.427.454,00
13	0949363770	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	60.639.778,00	-	60.639.778,00
14	0970258820	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	75.753.006,00	-	75.753.006,00
15	1146473327	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	38.500.000,00	-	38.500.000,00
16	0775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	74.213.437,00	-	74.213.437,00
17	1144060446	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA	35.584.421,00	-	35.584.421,00
18	0896340548	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KUSUMA ARGAS MUKTI	66.763.597,00	-	66.763.597,00
19	0860876147	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	76.137.940,00	-	76.137.940,00
20	0768376572	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA	14.971.931,00	-	14.971.931,00

21	0822179696	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	41.927.774,00	-	41.927.774,00
22	0798269848	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI	177.915.064,00	-	177.915.064,00
23	0757512882	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA	130.709.164,00	-	130.709.164,00
24	0723918871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA	44.838.446,00	-	44.838.446,00
25	0765207450	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	62.621.414,00	-	62.621.414,00
26	0919126318	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TUMPUN HARAPAN	38.015.742,00	-	38.015.742,00
27	0864276294	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	24.164.159,00	-	24.164.159,00
28	1146369225	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	20.240.000,00	-	20.240.000,00
29	0986213177	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DAVID OKTA NUGRAHA	72.971.491,00	-	72.971.491,00
30	0860829051	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	33.121.560,00	-	33.121.560,00
31	0828783138	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	24.488.869,00	-	24.488.869,00
32	0860712779	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ERNAWAN FAUZI	45.203.642,00	-	45.203.642,00
33	0916368634	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ HERU ISWADI	57.845.576,00	-	57.845.576,00
34	0833766455	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO	109.160.812,00	-	109.160.812,00
35	0828032272	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO	142.505.408,00	-	142.505.408,00
36	0870553351	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ JUMARI	41.147.870,00	-	41.147.870,00
37	0953620883	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KARYONO	49.328.726,00	-	49.328.726,00
38	0897831863	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KRT JAYANINGRAT	53.597.482,00	-	53.597.482,00
39	0803709162	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID	79.141.528,00	-	79.141.528,00
40	1044124213	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MUJIYONO	69.226.769,00	-	69.226.769,00
41	0975971360	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PRAMUDYA AFGANI	50.860.605,00	-	50.860.605,00
42	0779126960	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	42.448.469,00	-	42.448.469,00
43	0867920545	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	54.863.825,00	-	54.863.825,00
44	0976965968	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	72.788.531,00	-	72.788.531,00
45	1136102503	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	51.174.500,00	-	51.174.500,00
46	0805785619	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA	48.890.923,00	-	48.890.923,00
47	0943838346	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	65.761.382,00	-	65.761.382,00
48	1137096278	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT DEWATA SARI PRIMA	100.831.517,00	-	100.831.517,00
49	0835692649	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	33.046.637,00	-	33.046.637,00
50	0816170512	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA	21.397.583,00	-	21.397.583,00
51	1136094556	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	42.599.812,00	-	42.599.812,00
52	0912125583	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MALEKO	128.007.242,00	-	128.007.242,00
53	1144288281	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MULTINTES	41.197.739,00	-	41.197.739,00
54	1146336028	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	30.500.000,00	-	30.500.000,00
55	0802607128	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	66.329.225,00	-	66.329.225,00
56	0841832227	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAYA	318.002.480,00	-	318.002.480,00
57	0948180144	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	94.032.634,00	-	94.032.634,00
58	0837781786	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA	111.887.803,00	-	111.887.803,00
59	0720074133	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN	82.367.478,00	-	82.367.478,00
60	0795633595	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI	183.949.731,00	-	183.949.731,00
61	0827790894	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	53.680.255,00	-	53.680.255,00
62	0880138593	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ROSLAN	98.609.423,00	-	98.609.423,00
63	1146361431	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUJANMO	42.600.000,00	-	42.600.000,00
64	0733051871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO	57.209.573,00	-	57.209.573,00
65	0839212344	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUSENO	237.946.653,00	-	237.946.653,00
66	0858482385	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SYACHIRUL AFIF	71.450.927,00	-	71.450.927,00
67	0880135309	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRI ASIH DESTARI	54.759.919,00	-	54.759.919,00
68	1114206371	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM	52.468.562,00	-	52.468.562,00
69	0751120551	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA	44.476.951,00	-	44.476.951,00
70	0710409108	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari	87.802.682,00	-	87.802.682,00
71	0717680389	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori	42.782.745,00	-	42.782.745,00
72	0711289528	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	42.035.527,00	-	42.035.527,00
		JUMLAH JAMREK	4.956.430.275,00	-	4.956.430.275,00

BRI CIK DITIRO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	0029.01.015708-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto	53.755.726,00	-	53.755.726,00
2	0029.01.015926-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram	81.659.446,00	-	81.659.446,00
3	0029.01.015977-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya	117.403.561,00	-	117.403.561,00
4	0029.01.015928-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa	85.877.727,00	-	85.877.727,00
5	0029.01.015861-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa	128.917.816,00	-	128.917.816,00
6	0029.01.015757-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya	63.118.938,76	-	63.118.938,76
7	0029.01.015813-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group	112.969.776,00	-	112.969.776,00
8	0029.01.015816-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur	117.330.440,00	-	117.330.440,00
9	0029.01.015815-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia	121.256.273,00	-	121.256.273,00
10	0029.01.015742-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	47.216.885,00	-	47.216.885,00
11	0029.01.015837-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya	158.469.922,00	-	158.469.922,00
12	0029.01.015047-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko	39.819.421,00	-	39.819.421,00
13	0029.01.015993-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukanto	36.947.214,00	-	36.947.214,00
14	0029.01.015202-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin	34.705.780,00	-	34.705.780,00
15	0029.01.015305-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	25.761.948,00	-	25.761.948,00
16	0029.01.015774-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk	165.525.424,00	-	165.525.424,00
17	0029.01.015792-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan	62.124.986,00	-	62.124.986,00
18	0029.01.015990-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri	40.765.148,00	-	40.765.148,00
19	0029.01.015443-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno	64.179.876,00	-	64.179.876,00
20	0029.01.015333-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo	57.261.404,00	-	57.261.404,00
21	0029.01.016036-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi	88.727.366,00	-	88.727.366,00
22	0029.01.015445-40-5	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra Internasional	63.111.194,00	-	63.111.194,00
23	0029.01.015635-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Batu Prima Mandiri	239.231.467,00	-	239.231.467,00
24	0029.01.015843-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill Indonesia	85.875.088,00	-	85.875.088,00
25	0029.01.015747-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara	125.182.686,00	-	125.182.686,00
26	0029.01.015556-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak Indonesia	286.047.159,00	-	286.047.159,00
27	0029.01.015537-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa	50.854.158,00	-	50.854.158,00
28	0029.01.015617-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi	128.970.676,00	-	128.970.676,00
29	0029.01.015833-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	175.255.353,00	-	175.255.353,00
30	0029.01.015805-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana	95.341.327,00	-	95.341.327,00
31	0029.01.015707-40-7	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto	85.828.416,00	-	85.828.416,00
32	0029.01.015802-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto	44.722.844,00	-	44.722.844,00
33	0029.01.015653-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	22.782.965,00	-	22.782.965,00
34	0029.01.016130-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono	47.248.576,00	-	47.248.576,00
35	0029.01.014219.40.3	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi	19.156.607,00	-	19.156.607,00
36	0029.01.014944-40-6	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi	79.036.521,00	-	79.036.521,00
37	0029.01.014357.40.5	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Jaminan Reklamasi	11.699.618,00	-	11.699.618,00
38	0029.01.014411.40.3	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Jaminan Reklamasi	212.753.877,00	-	212.753.877,00
39	0029.01.014607-40.2	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Reklamasi	24.207.735,00	-	24.207.735,00
40	0029.01.015043-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Nurdianto Jaminan Reklamasi	53.205.114,00	-	53.205.114,00
41	0029.01.014649-40-4	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Jaminan Reklamasi	303.626.769,00	-	303.626.769,00
42	0029.01.014824-40-2	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Reklamasi	143.902.060,00	-	143.902.060,00
43	0029.01.014222.40.6	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi	42.886.374,00	-	42.886.374,00
44	0029.01.014234.40.3	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Jaminan Reklamasi	123.646.656,00	-	123.646.656,00
45	0029.01.014982-40-4	Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Reklamasi	166.263.227,00	-	166.263.227,00
46	0029.01.014242.40.6	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Utama Jaminan Reklamasi	144.700.666,00	-	144.700.666,00
47	0029.01.014232.40.1	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi	41.528.268,00	-	41.528.268,00
48	0029.01.014949-40-6	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Reklamasi	33.790.478,00	-	33.790.478,00
49	0029.01.014958-40-5	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Reklamasi	28.883.230,00	-	28.883.230,00
		JUMLAH JAMREK	4.583.534.186,76	-	4.583.534.186,76
		TOTAL JAMINAN REKLAMASI	10.042.464.461,76	290.051.776,00	10.332.516.237,76

Tabel 5.127

Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2020

BRI CABANG CIK DITIRO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	0029.01.017398-40-0	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA	60.103.600,00	-	60.103.600,00
2	0029.01.017352-40-4	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG	69.613.220,00	-	69.613.220,00
3	0029.01.015976-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	219.175.538,00	-	219.175.538,00
4	0029.01.015929-40-9	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	43.533.540,00	-	43.533.540,00
5	0029.01.015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto	45.963.053,00	-	45.963.053,00
6	0029.01.015930-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	44.572.086,00	-	44.572.086,00
7	0029.01.017317-40-4	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	42.309.952,00	-	42.309.952,00
8	0029.01.017316-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	52.053.768,00	-	52.053.768,00
9	0029.01.015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa	10.749.194,00	-	10.749.194,00
10	0029.01.015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya	15.327.054,18	-	15.327.054,18
11	0029.01.015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group	72.384.470,00	-	72.384.470,00
12	0029.01.015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur	73.744.928,00	-	73.744.928,00
13	0029.01.015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia	75.105.105,00	-	75.105.105,00
14	0029.01.015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	40.925.065,00	-	40.925.065,00
15	0029.01.015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya	40.652.386,00	-	40.652.386,00
16	0029.01.015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya	7.085.352,00	-	7.085.352,00
17	0029.01.015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko	71.202.693,00	-	71.202.693,00
18	0029.01.015992-40-2	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukanto	44.082.360,00	-	44.082.360,00
19	0029.01.015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin	98.435.378,00	-	98.435.378,00
20	0029.01.015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	148.734.739,00	-	148.734.739,00
21	0029.01.015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk	147.943.254,00	-	147.943.254,00
22	0029.01.015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan	22.503.372,00	-	22.503.372,00
23	0029.01.015991-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	50.155.156,00	-	50.155.156,00
24	0029.01.015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno	5.231.103,00	-	5.231.103,00
25	0029.01.015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	38.024.371,00	-	38.024.371,00
26	0029.01.016035-40-7	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	55.159.374,00	-	55.159.374,00
27	0029.01.015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional	8.437.420,00	-	8.437.420,00
28	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri	21.475.990,00	-	21.475.990,00
29	0029.01.015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldor Indonesia	7.120.443,00	-	7.120.443,00
30	0029.01.015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara	85.024.830,00	-	85.024.830,00
31	0029.01.015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak Indonesia	112.427.569,00	-	112.427.569,00
32	0029.01.015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa	103.242.574,00	-	103.242.574,00
33	0029.01.015618-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi	116.936.105,00	-	116.936.105,00
34	0029.01.015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera	26.571.244,00	-	26.571.244,00
35	0029.01.015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	13.631.994,00	-	13.631.994,00
36	0029.01.015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana	51.014.670,00	-	51.014.670,00
37	0029.01.015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto	44.269.558,00	-	44.269.558,00
38	0029.01.015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto	62.475.906,00	-	62.475.906,00
39	0029.01.015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	23.691.716,00	-	23.691.716,00
40	0029.01.016129-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	50.364.886,00	-	50.364.886,00

41	0029.01.014220.40.4	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang	67.655.798,00	-	67.655.798,00
42	0029.01.014945-40-2	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang	77.588.527,00	-	77.588.527,00
43	0029.01.014393.40.1	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang	5.849.816,00	-	5.849.816,00
44	0029.01.014413.40.5	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang	14.038.588,00	-	14.038.588,00
45	0029.01.014608-40.8	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang	112.718.894,00	-	112.718.894,00
46	0029.01.015044-40-3	Dinas PUP ESDM QQ Nurdianto Jaminan Pasca Tambang	58.154.661,00	-	58.154.661,00
47	0029.01.014650-40-5	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang	26.243.279,00	-	26.243.279,00
48	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang	7.192.031,00	-	7.192.031,00
49	0029.01.014221.40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang	62.548.214,00	-	62.548.214,00
50	0029.01.014443-40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Pasca Tambang	42.505.454,00	-	42.505.454,00
51	0029.01.014981-40-8	Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang	8.329.181,00	-	8.329.181,00
52	0029.01.014243.40.2	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Utama Pasca Tambang	20.494.579,00	-	20.494.579,00
53	0029.01.014471.40.3	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang	9.119.979,00	-	9.119.979,00
54	0029.01.014950-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang	53.953.997,00	-	53.953.997,00
55	0029.01.014959-40-1	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang	27.141.690,00	-	27.141.690,00
JUMLAH JAMPAS			2.914.989.704,18	-	2.914.989.704,18

BANK PASAR KULON PROGO

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	13591/III/D/20/135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT HARMAK INDONESIA	55.400.000,00	-	55.400.000,00
2	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	7.326.000,00	-	7.326.000,00
3	11543/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE OETOMO	66.850.000,00	-	66.850.000,00
4	11544/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA KAWAN	358.929.675,00	-	358.929.675,00
JUMLAH JAMPAS			488.505.675,00	-	488.505.675,00

BNI TRIKORA

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	1114215456	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM	50.353.706,00	-	50.353.706,00
2	0799698458	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	51.375.775,00	-	51.375.775,00
3	1107395047	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TITO YUNANTO	78.847.870,00	-	78.847.870,00
4	0898048927	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	77.337.957,00	-	77.337.957,00
5	0899115463	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	72.880.137,00	-	72.880.137,00
6	0899557296	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO	37.321.264,00	-	37.321.264,00
7	0817379669	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA	58.723.899,00	-	58.723.899,00
8	0725640437	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	44.183.874,00	-	44.183.874,00
9	1055758928	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG SUPROBO	35.617.777,00	-	35.617.777,00
10	0823309332	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN	34.198.662,00	-	34.198.662,00
11	1101433262	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV ADIA BIMALA	14.097.958,00	-	14.097.958,00
12	0739194814	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA	33.879.809,00	-	33.879.809,00
13	0949364663	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	63.200.582,00	-	63.200.582,00
14	1101269063	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV CAHAYA	31.116.209,00	-	31.116.209,00
15	1146475653	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	31.000.000,00	-	31.000.000,00
16	0970259255	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	21.381.895,00	-	21.381.895,00
17	0775963538	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA	60.641.749,00	-	60.641.749,00
18	1144061621	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA	49.818.190,00	-	49.818.190,00
19	0896340059	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGAS MUKTI	58.366.314,00	-	58.366.314,00
20	0860876760	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	28.538.706,00	-	28.538.706,00
21	0768378955	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA	60.803.315,00	-	60.803.315,00
22	0822183080	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	43.039.496,00	-	43.039.496,00
23	0798267909	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI	177.915.064,00	-	177.915.064,00
24	0757513943	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA	74.389.924,00	-	74.389.924,00
25	0723921135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA	53.893.419,00	-	53.893.419,00

26	0765208307	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	35.629.423,00	-	35.629.423,00
27	0919130324	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TUMPU HARAPAN	82.401.692,00	-	82.401.692,00
28	0864277695	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	77.908.589,00	-	77.908.589,00
29	1146379823	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	43.460.000,00	-	43.460.000,00
30	0986213767	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DAVID OKTA NUGRAHA	87.140.713,00	-	87.140.713,00
31	0828782442	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	136.742.746,00	-	136.742.746,00
32	0860830055	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	82.699.759,00	-	82.699.759,00
33	0860713397	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI	33.121.560,00	-	33.121.560,00
34	0916377069	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ HERU ISWADI	44.694.182,00	-	44.694.182,00
35	0833766068	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO	56.261.070,00	-	56.261.070,00
36	0828031675	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO	99.737.288,00	-	99.737.288,00
37	0870554162	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI	48.733.211,00	-	48.733.211,00
38	0953621231	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KARYONO	47.490.387,00	-	47.490.387,00
39	0897832302	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT	56.085.568,00	-	56.085.568,00
40	0803710098	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID	38.558.858,00	-	38.558.858,00
41	1044125217	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MUJIYONO	38.661.733,00	-	38.661.733,00
42	0975972513	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PRAMUDYA AFGANI	45.277.106,00	-	45.277.106,00
43	0779127294	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	166.489.072,00	-	166.489.072,00
44	0867922859	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	60.994.446,00	-	60.994.446,00
45	0976977724	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	58.169.913,00	-	58.169.913,00
46	1136103903	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	108.248.548,00	-	108.248.548,00
47	0805786395	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA	62.205.454,00	-	62.205.454,00
48	0945839940	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	64.839.495,00	-	64.839.495,00
49	1137097862	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT DEWATA SARI PRIMA	59.135.780,00	-	59.135.780,00
50	0835691816	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	32.415.171,00	-	32.415.171,00
51	0816171469	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA	162.220.517,00	-	162.220.517,00
52	1136093234	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	86.408.400,00	-	86.408.400,00
53	0912126111	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MALEKO	69.866.768,00	-	69.866.768,00
54	1144288860	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MULTINTES	57.636.740,00	-	57.636.740,00
55	1146337328	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	41.500.000,00	-	41.500.000,00
56	0802606645	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	47.423.790,00	-	47.423.790,00
57	0841833048	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAY	23.258.937,00	-	23.258.937,00
58	0948181477	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	104.414.917,00	-	104.414.917,00
59	0838015732	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA	118.127.289,00	-	118.127.289,00
60	0720073468	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN	73.639.795,00	-	73.639.795,00
61	0795634022	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI	55.068.374,00	-	55.068.374,00
62	0827790293	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	32.716.364,00	-	32.716.364,00
63	0880139392	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN	36.368.063,00	-	36.368.063,00
64	1146361941	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUJANMO	61.600.000,00	-	61.600.000,00
65	0733073827	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO	56.883.278,00	-	56.883.278,00
66	0839213585	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO	117.810.024,00	-	117.810.024,00
67	0858482793	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF	69.471.964,00	-	69.471.964,00
68	0880136368	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI	71.177.503,00	-	71.177.503,00
69	0751122219	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA	53.458.910,00	-	53.458.910,00
70	0710408820	Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari	90.546.518,00	-	90.546.518,00
71	0717678733	Dinas PUP ESDM Jampas qq Ghozin asrori	57.773.120,00	-	57.773.120,00
72	0711295270	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	65.522.748,00	-	65.522.748,00
		JUMLAH JAMPAS	4.562.919.334,00	-	4.562.919.334,00
					-
		TOTAL JAMINAN PASCA TAMBANG	7.966.414.713,18	-	7.966.414.713,18
		TOTAL JAMINAN	18.723.790.474,94	368.192.066,00	19.091.982.540,94

5.3.2 Kewajiban

Rp44.849.799.128,62

Rp41.219.264.667,61

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.849.799.128,62 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp44.849.799.128,62

Rp41.219.264.667,61

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.849.799.128,62 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.091.982.540,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.623.129.778,68, Utang Belanja sebesar Rp2.413.635.867,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp21.721.050.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp19.091.982.540,94 Rp15.648.328.066,94

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.091.982.540,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp793.051.590,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.332.516.237,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp7.966.414.713,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.2.1.2 Utang Bunga Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka Rp1.623.129.778,68 Rp4.493.192.975,67

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.623.129.778,68 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.128

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	6.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	48.738.000,00	839.000.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	150.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	12.500.000,00
5	Dinas Pariwisata	15.689.041,10	2.708.333,33
6	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	104.805.686,15	179.972.450,77
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	491.070.485,84	-
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	962.826.565,59	3.452.862.191,57
	Jumlah	1.623.129.778,68	4.493.192.975,67

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp48.738.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	02-05-2020 s.d 01-05-2021	36.000.000,00	01-01-2020 s.d 01-05-2021	12.000.000,00
2	01-06-2020 s.d 31-05-2021	88.171.200,00	01-01-2020 s.d 30-05-2021	36.738.000,00
	Jumlah	124.171.200,00		48.738.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.689.041,10 merupakan

penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-06-2020 s.d 31-05-2023	19.500.000,00	01/01/2021 s.d 31/05/2023	15.689.041,10
	Jumlah	19.500.000,00		15.689.041,10

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp104.805.686,15 merupakan Sewa basement untuk server, namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Sekda DIY

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	09-05-2017 s.d 08-05-2022	275.000.000,00	01-01-2020 s.d 08-05-2022	77.916.666,07
2	28-02-2019 s.d. 08-05-2022	65.541.985,00	28-02-2020 s.d 08-05-2022	26.889.020,08
	Jumlah	340.541.985,00		104.805.686,15

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp491.070.485,84 merupakan penerimaan sewa galeri UKM di Yogyakarta International Airport namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi dan UKM

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	03-11-2020 s.d 22-11-2021	549.818.182,00	01/01/2021 s.d 22/11/2021	491.070.485,84
	Jumlah	549.818.182,00		491.070.485,84

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp962.826.565,59 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.133

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa		Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)	
BPKA INDUK								
1.	Tanah dan Bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2020	s/d	31/08/2021	108.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	71.901.369,86
2.	Bangunan	BPD DIY	01/07/2017	s.d	30/06/2022	602.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-06-2021	-
			01/07/2017	s.d	30/06/2018	120.500.000,00		-
			01/07/2018	s.d	30/06/2019	120.500.000,00		-
			01/07/2019	s.d	30/06/2020	120.500.000,00		-
			01/07/2020	s.d	30/06/2021	120.500.000,00		59.754.794,52
			01/07/2021	s.d	30/06/2022	120.500.000,00		20.500.000,00
3.	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2020	s/d	31/03/2021	108.900.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	26.852.054,79
			01/04/2021	s/d	31/03/2022	108.900.000,00		08.900.000,00
4	Tanah	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2019	s.d	30/06/2020	2.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-06-2021	-
			01/07/2020	s.d	31/06/2021	2.500.000,00		1.239.726,03
5	Tanah dan Bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2019	s.d	31/08/2022	60.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	20.000.000,00		-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	20.000.000,00		13.315.068,49
			01/09/2021	s.d	31/08/2022	20.000.000,00		20.000.000,00
6	Tanah	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman Akta Notaris 26/2008 tgl 28 November 2008	20/11/2017	s.d	19/11/2021	14.000.000,00	01-01-2021 s/d 19-11-2021	-
			20/11/2017	s.d	19/11/2018	3.500.000,00		-
			20/11/2018	s.d	19/11/2019	3.500.000,00		-
			20/11/2019	s.d	19/11/2020	3.500.000,00		-
			20/11/2020	s.d	19/11/2021	3.500.000,00		3.097.260,27
7	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2020	s.d	27/03/2021	15.000.000,00	01-01-2021 s/d 27-03-2021	3.534.246,58
8	Tanah	dr. Soedarman Jalan DI. Panjaitan No 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	03/09/2018	s.d	02/09/2023	175.000.000,00	01-01-2021 s/d 02-09-2021	-
			03/09/2018	s.d	02/09/2019	35.000.000,00		-
			03/09/2019	s.d	02/09/2020	35.000.000,00		-
			03/09/2020	s.d	02/09/2021	35.000.000,00		23.493.150,68
			03/09/2021	s.d	02/09/2022	35.000.000,00		35.000.000,00
			03/09/2022	s.d	02/09/2023	35.000.000,00		35.000.000,00
9	Tanah	Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2019	s.d	20/02/2021	12.400.000,00	01-01-2021 s/d 20-02-2021	-
			21/02/2019	s.d	20/02/2020	6.200.000,00		-
			21/02/2020	s.d	20/02/2021	6.200.000,00		866.301,37
10	Tanah dan Bangunan	Sri Andayani	01/06/2020	s.d	31/05/2021	13.700.000,00	01-01-2021 s/d 31-05-2021	5.667.671,23
11	Tanah	Tirto Manunggal	08/01/2019	s/d	31/7/2024	20.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-07-2021	-
			08/01/2019	s/d	31/7/2020	4.000.000,00		-
			08/01/2020	s/d	31/7/2021	4.000.000,00		2.323.287,67
			08/01/2021	s/d	31/7/2022	4.000.000,00		4.000.000,00
			08/01/2022	s/d	31/7/2023	4.000.000,00		4.000.000,00
			08/01/2023	s/d	31/7/2024	4.000.000,00		4.000.000,00

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa			Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
12	Tanah	Talenta Body Repair	25/03/2020	s.d	24/03/2022	53.600.000,00	01-01-2021 s/d 24-03-2021	-
			25/03/2020	s/d	24/03/2021	26.800.000,00		6.094.246,58
			25/03/2021	s/d	24/03/2022	26.800.000,00		26.800.000,00
13	Tanah	Tien Setiantoro	01/09/2020	s/d	31/08/2021	10.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	6.657.534,25
		Aris Purnomo	01/09/2019	s.d	31/08/2021	5.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	2.500.000,00		-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	2.500.000,00		1.664.383,56
		Sumartiningsih	01/09/2016	s.d	31/08/2021	12.210.200,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	-
			01/09/2016	s.d	31/08/2017	2.442.040,00		-
			01/09/2017	s.d	31/08/2018	2.442.040,00		-
			01/09/2018	s.d	31/08/2019	2.442.040,00		-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	2.442.040,00		-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	2.442.040,00		1.625.796,49
		Roos Ani	01/09/2016	s.d	31/08/2021	9.157.650,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	-
			01/09/2016	s.d	31/08/2017	1.831.530,00		-
			01/09/2017	s.d	31/08/2018	1.831.530,00		-
			01/09/2018	s.d	31/08/2019	1.831.530,00		-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	1.831.530,00		-
01/09/2020	s.d		31/08/2021	1.831.530,00	1.219.347,37			
	Suka Astuti	01/09/2019	s.d	31/08/2021	7.200.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	-	
		01/09/2019	s.d	31/08/2020	3.600.000,00		-	
		01/09/2020	s.d	31/08/2021	3.600.000,00		2.396.712,33	
14	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi Sarjuri	01/09/2020	s/d	31/08/2021	6.400.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	4.260.821,92
15	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017	s.d	31/01/2022	109.891.800,00	01-01-2021 s/d 31-01-2021	1.866.655,23
			01/02/2017	s.d	31/01/2018	21.978.360,00		
			01/02/2018	s.d	31/01/2019	21.978.360,00		
			01/02/2019	s.d	31/01/2020	21.978.360,00		
			01/02/2020	s.d	31/01/2021	21.978.360,00		
			01/02/2021	s.d	31/01/2022	21.978.360,00		
16	Tanah dan Bangunan (Rumah Daerah)	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2019	s/d	31/07/2022	35.000.000,00	1-1-2021 s/d 31-07-2021	-
			01/08/2019	s.d	31/07/2020	17.500.000,00		-
			01/08/2020	s.d	31/07/2021	17.500.000,00		10.164.383,56
			01/08/2021	s.d	31/07/2022			
17	Tanah	Rohadi	01/10/2019	s/d	30/09/2021	3.000.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	-
			01/10/2019	s/d	30/09/2020	1.500.000,00		-
			01/10/2020	s/d	30/09/2021	1.500.000,00		1.121.917,81
18	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	01/04/2016	s.d	31/03/2021	72.500.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	-
			01/04/2016	s.d	31/03/2017	14.500.000,00		-
			01/04/2017	s.d	31/03/2018	14.500.000,00		-
			01/04/2018	s.d	31/03/2019	14.500.000,00		-
			01/04/2019	s.d	31/03/2020	14.500.000,00		-
			01/04/2020	s.d	31/03/2021	14.500.000,00		3.575.342,47
19	Tanah dan Bangunan	CV. Plainthing Group	08/04/2019	s.d	07/04/2021	42.000.000,00	01-01--2021 s/d 07-04-2021	-

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
			08/04/2019 s.d 07/04/2020	21.000.000,00		-
			08/04/2020 s.d 07/04/2021	21.000.000,00		5.580.821,92
20	Tanah dan Bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2018 s.d 31/05/2021	9.075.000,00	01-01-2021 s/d 31-05-2021	-
			01/06/2018 s.d 31/05/2019	3.025.000,00		-
			01/06/2019 s.d 31/05/2020	3.025.000,00		-
			01/06/2020 s.d 31/05/2021	3.025.000,00		1.251.438,36
21	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2 Desaku)	01/02/2019 s.d 31/01/2021	16.500.000,00	01-01-2021 s/d 31-01-2021	-
			01/02/2019 s.d 31/01/2020	8.250.000,00		-
			01/02/2020 s.d 31/01/2021	8.250.000,00		700.684,93
22	Tanah dan Bangunan	Abung Hidayat	10/01/2020 s/d 30/9/2021	7.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	5.609.589,04
		Uep Sumiarsih	10/01/2020 s/d 30/9/2021	3.200.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	2.393.424,66
		Tatang Raharja	10/01/2020 s/d 30/9/2021	4.700.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.515.342,47
		Zuljasrifon	10/01/2020 s/d 30/9/2021	4.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.365.753,42
23	Tanah	Eks TKD Wates	05/07/2020 s/d 04/07/2021	275.202.132,00	01-01-2021 s/d 04-07-2021	39.486.012,11
24	Tanah	SMK Citra Semesta Indonesia	08/01/2020 s/d 31/7/2021	16.875.000,00	01-01-2021 s/d 31-07-2021	9.801.369,86
25	Rumah Dinas	Asmita	01/08/2020 s/d 01/08/2021	2.792.400,00	01-01-2021 s/d 01-8-2021	1.621.887,12
		Umi Hartini	01/10/2020 s/d 31/3/2021	816.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	408.000,00
		Ny. Djaenab Murniati	01/12/2020 s/d 31/3/2021	2.513.600,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	1.885.200,00
		Hasan Khoiri	01/12/2020 s/d 28/2/2021	775.800,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	517.200,00
		Sigit Arianta Wibowo	01/08/2020 s/d 01/08/2021	1.429.200,00	01-01-2021 s/d 01-08-2021	830.110,68
		Sugiyanta	01/08/2020 s/d 28/2/2021	1.269.100,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	362.600,00
		Dra. Sulistyaningsih	01/02/2020 s/d 01/02/2021	3.396.000,00	01-01-2021 s/d 01-02-2021	288.427,40
JUMLAH						810.488.295,04
KPPD KULON PROGO						
1	Bangunan	PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	1.742.465,75
		PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00	01/08/2020 s.d 31/07/2021	1.742.465,75
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44
		CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.323.287,67
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	15.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	9.147.945,21
		Painem (Kantin)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	53.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	10.750.000,00
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	15.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	3.000.000,00
JUMLAH						33.817.397,26
KPPD SLEMAN						
1	Bangunan	PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas)	01/01/2019 s.d 31/12/2023	95.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2023	57.000.000,00
		PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM)	01/04/2019 s.d 31/03/2024	81.775.000,00	01/01/2021 s.d 31/03/2024	53.153.750,00
JUMLAH						110.153.750,00
KPPD BANTUL						
1	Bangunan	Bank BNI Cabang Yogyakarta	16/10/2020 s.d 15/10/2023	9.000.000,00	01/01/2021 s.d 15/10/2023	8.367.123,29
JUMLAH						8.367.123,29
TOTAL						962.826.565,59

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp2.413.635.867,00

Rp3.117.387.223,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.413.635.867,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2020 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp21.534.281,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.249.451.538,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.134

Rincian Utang Belanja per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	708.640.200,00	1.105.937.347,00
2	Dinas Kesehatan	311.362.346,00	199.198.814,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	418.539.915,00	475.433.021,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.443.295,00	12.158.807,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.852.671,00	10.359.252,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.529.645,00	12.407.893,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.084.028,00	32.605.057,00
8	Dinas Sosial	76.409.211,00	80.175.754,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.403.040,00	52.863.388,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	14.156.894,00	22.044.634,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.706.538,00	35.586.000,00
12	Dinas Perhubungan	33.439.209,00	37.364.769,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.562.744,00	19.187.270,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.968.935,00	11.143.274,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.474.276,00	7.142.645,00
16	Dinas Kebudayaan	104.893.218,00	133.321.213,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.399.631,00	122.889.577,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.520.307,00	72.935.773,00
19	Dinas Pariwisata	8.498.829,00	12.859.483,00

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.522.246,00	43.329.360,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.165.005,00	27.356.652,00
22	Sekretariat Daerah	8.744.944,00	193.137.888,00
23	Badan Penghubung Daerah	11.975.551,00	18.418.280,00
24	Sekretariat DPRD	55.554.217,00	68.153.023,00
25	Inspektorat	3.401.867,00	3.839.781,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	491.269,00	721.375,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	259.606.795,00	244.996.426,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	24.896.544,00	30.368.027,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	27.392.497,00	31.452.440,00
	Jumlah	2.413.635.867,00	3.117.387.223,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp21.721.050.942,00 Rp17.960.356.402,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kota Yogyakarta	1.602.395.078,00
2	Kabupaten Bantul	5.230.278.485,00
3	Kabupaten Kulon Progo	2.693.378.622,00
4	Kabupaten Gunungkidul	3.783.042.594,00
5	Kabupaten Sleman	8.411.956.163,00
	Jumlah	21.721.050.942,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas Rp11.290.686.277.272,40 Rp10.343.362.322.871,10

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp11.290.686.277.272,40 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.290.686.277.272,40 mengalami kenaikan sebesar Rp947.323.954.401,27 atau 9,16% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.343.362.322.871,10.

5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan - LO **Rp5.732.499.444.078,61** **Rp5.976.451.390.819,34**

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp5.732.499.444.078,61 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO **Rp1.909.691.645.242,38** **Rp2.138.478.675.001,98**

Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.909.691.645.242,38 meliputi Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO **Rp1.646.507.580.363,00** **Rp1.773.956.439.572,00**

Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.646.507.580.363,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Pajak pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	846.841.503.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	333.511.934.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	225.462.302.459,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.328.837.075,00
5	Pajak Rokok - LO	239.363.003.429,00
	Jumlah	1.646.507.580.363,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO **Rp25.774.480.406,75** **Rp31.824.694.405,91**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp25.774.480.406,75 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Retribusi pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	72.875.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.048.830.320,05
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	839.782.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	2.754.859.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6.247.831.420,70
6	Retribusi Terminal - LO	445.917.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	372.127.000,00
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	191.675.000,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	81.191.500,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	100.645.500,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	9.108.731.666,00
12	Retribusi Izin Trayek - LO	77.580.000,00
13	Retribusi Izin Perikanan - LO	825.000,00
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	431.610.000,00
	Jumlah	25.774.480.406,75

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO **Rp147.442.541.655,78** **Rp152.365.307.047,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebesar Rp147.442.541.655,78 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp147.343.223.644,78 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp99.318.011,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	9.593.521.964,77
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	124.429.821.936,63
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	3.553.261.599,26
4	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	99.318.011,00
5	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	9.766.618.144,12
	Jumlah	147.442.541.655,78

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp9.593.905.721,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.593.521.964,77 (99,996% x Rp9.593.905.721,00). Dengan demikian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 pada PT. Tarumartani adalah sebesar Rp9.593.521.964,77.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp243.980.043.013,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp124.429.821.936,63 ($51\% \times \text{Rp}243.980.043.013,00$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp124.429.821.936,63.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp3.555.003.551,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.553.261.599,26 ($99,951\% \times \text{Rp}3.555.003.551,00$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp3.553.261.599,26.

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp750.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2020, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp99.318.011,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2019.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 BUKP mencatat laba sebesar Rp11.747.195.265,96, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.766.618.144,12 ($83,140\% \times \text{Rp}11.747.195.265,96$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.766.618.144,12.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO **Rp89.967.042.816,85** **Rp180.332.233.977,07**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp89.967.042.816,85 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	120.498.600,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	8.941.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	21.541.249.683,40
4	Pendapatan Bunga - LO	4.401.193.283,62
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	10.475.000,00
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	452.947.912,00
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	15.898.676.800,00
8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	88.018.529,30
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	34.978.000,00
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	68.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LO	552.597.840,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	5.592.948.484,85
12	Pendapatan BLUD - LO	35.712.390.011,00
13	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	5.484.127.672,68
	Jumlah	89.967.042.816,85

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Rp3.726.454.595.432,00 Rp3.608.013.435.006,00

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2020 sebesar Rp3.726.454.595.432,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Rp2.371.044.354.021,00 Rp2.385.702.912.253,0
Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp2.371.044.354.021,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum - LO, dan Dana Alokasi Khusus - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	114.252.471.928,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	24.870.747,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.227.647.676.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	1.029.119.335.346,00
	Jumlah	2.371.044.354.021,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Rp1.354.630.222.221,00 Rp1.221.604.487.443,00
Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.354.630.222.221,00 meliputi:

- a. Dana Keistimewaan - LO sebesar Rp1.286.576.228.221,00
- b. Dana Penyesuaian - LO sebesar Rp68.053.994.000,00 merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Rp780.019.190,00 Rp706.035.310,00
Pemda Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp780.019.190,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan 12/PK/Bt/2020 dan 30/PK.KDH/A/2020 dan 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp91.448.260,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp105.140.870,00 (100%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp583.430.060,00 (100%).

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO **Rp96.353.203.404,23 Rp229.959.280.811,36**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2020 sebesar Rp96.353.203.404,23 merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139

Rincian Pendapatan Hibah - LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	3.006.443.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	28.200.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.924.000.000,00
4	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35.346.337.914,23
5	Hibah Barang pada BPBD	16.645.230.370,00
6	Hibah Barang pada Dinas Sosial	20.700.000,00
7	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
8	Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika	456.058.490,00
9	Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	476.812.123,00
10	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	8.849.478.100,00
11	Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	27.259.648.406,00
12	Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah	50.000.000,00
13	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.600.000,00
14	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	231.695.000,00
15	Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja	1,00
	Jumlah	96.353.203.404,23

Hibah Barang terdapat pada OPD berikut:

- Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp35.346.337.914,23 berasal dari Block Grant, dan Komite Sekolah.
- Hibah Barang pada BPBD sebesar Rp16.645.230.370,00 berasal dari BNPB dan Pihak Lain terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di DIY.
- Hibah Barang pada Dinas Sosial sebesar Rp20.700.000,00 berasal dari Kementerian Sosial.
- Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp50.000.000,00 berupa mushola berasal dari Takmir masjid.
- Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp456.058.490,00 berasal dari Pihak Ketiga.
- Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp476.812.123,00 berasal dari Perpustakaan Nasional.
- Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.849.478.100,00 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Hibah Barang pada BPKA sebesar Rp27.259.648.406,00 berasal dari Kenterian PU, Kab.Bantul, Kab Kulon Progo, Kemenkes, dan Kementerian Pertanian.
- Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari PT. BPD DIY
- Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.600.000,00 berasal dari peserta Diklat PKA dan PKP.

11. Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp231.695.000,00 berasal dari Kementerian Kesehatan.
12. Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1,00 berasal dari sumbangan PT. Borobudur yang tidak ada nilainya.

5.4.2 Beban **Rp4.663.624.192.027,54** **Rp4.871.151.715.959,20**

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.663.624.192.027,54 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi **Rp3.574.026.798.490,91** **Rp3.854.207.914.909,49**

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.574.026.798.490,91 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai **Rp1.558.830.493.941,39** **Rp1.551.059.704.219,00**

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	904.295.719.330,39	795.081.963.553,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	521.178.068.065,00	440.567.196.757,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.414.000.000,00	12.905.294.694,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.103.069.151,00	46.177.496.341,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	735.073.630,00	968.441.119,00
6	Uang Lembur	-	359.856.000,00
7	Beban Honorarium PNS	19.650.131.575,00	82.511.790.075,00
8	Beban Honorarium Non PNS	49.767.059.072,00	155.085.927.362,00
9	Beban Pegawai BLUD	9.672.988.118,00	14.823.529.468,00
10	Beban Pegawai BOS	1.014.385.000,00	2.578.208.850,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.141
Rincian Beban Pegawai per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	788.656.453.595,00	813.657.184.305,00
2	Dinas Kesehatan	53.715.751.478,00	57.757.958.385,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	37.996.529.077,00	41.496.345.368,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.709.973.472,00	14.196.342.575,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.528.709.183,00	5.960.942.350,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.300.671.493,00	12.281.646.101,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.011.737.101,00	7.320.087.724,00
8	Dinas Sosial	25.090.556.269,00	25.224.766.444,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.124.721.123,00	16.853.842.073,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.825.714.691,00	4.713.165.478,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.920.381.113,00	26.830.029.717,00
12	Dinas Perhubungan	7.563.269.251,00	10.384.464.831,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.497.046.086,00	5.099.742.016,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.805.751.297,00	5.447.516.316,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.513.691.348,00	4.073.131.260,00
16	Dinas Kebudayaan	18.694.256.056,00	27.198.683.357,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.302.029.961,00	8.392.682.926,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.617.069.139,00	9.781.735.981,00
19	Dinas Pariwisata	4.450.134.801,00	4.754.888.293,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.747.515.088,00	29.014.562.397,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.273.756.669,00	9.294.403.954,00
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.783.613.656,00	3.248.890.330,00
23	Sekretariat Daerah	27.944.523.081,00	38.356.701.409,00
24	Badan Penghubung Daerah	2.663.435.979,00	2.672.773.422,00
25	Paniradya Kaistimewan	5.313.350.691,00	2.360.113.735,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.852.849.274,00	36.455.579.794,00
27	Sekretariat DPRD	5.291.885.813,00	9.264.487.168,00
28	Inspektorat	11.123.224.901,00	11.814.849.414,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.729.842.333,00	9.613.372.483,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	111.522.337.649,39	107.979.050.852,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	277.606.294.436,00	184.231.004.529,00
32	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.653.417.837,00	5.328.759.232,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp775.568.864.314,21 Rp1.246.156.710.165,83

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp775.568.864.314,21 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	18.081.030.908,00	267.585.682.692,31
2	Beban Persediaan Bahan/Material	174.066.500,00	107.404.127.480,03
3	Beban Jasa Kantor	238.647.869.756,00	233.135.955.648,00
4	Beban Premi Asuransi	1.186.173.293,95	2.592.347.803,39
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.933.185.256,00	13.293.870.131,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	108.515.450,00	35.685.089.829,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir	5.341.064.241,74	17.315.001.542,10
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.478.649.050,00	9.795.109.411,00
9	Beban Sewa Alat Berat	686.500.800,00	283.178.500,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.198.089.911,00	34.910.883.209,00

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
11	Beban Makanan dan Minuman	44.725.856.560,00	101.669.856.297,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	52.500.000,00	919.158.330,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	-	4.047.156.150,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	4.613.839.350,00
15	Beban Perjalanan Dinas	31.713.432.937,00	95.272.402.957,00
16	Beban Pemeliharaan	75.420.050.225,03	85.440.166.287,00
17	Beban Jasa Konsultansi	26.774.820.165,00	49.240.061.136,00
18	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	8.226.300.065,00
19	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	2.211.489.695,00
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.984.630.000,00	25.204.232.000,00
21	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.885.017.115,00	6.060.286.119,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.198.196.041,00	125.834.340.534,00
23	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.266.200.000,00	15.416.175.000,00
24	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.536.600.000,00	-
25	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.092.740.000,00	-
26	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	112.397.000,00	-
27	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	260.961.279.104,49	-
	Jumlah	775.568.864.314,21	1.246.156.710.165,83

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp775.568.864.314,21 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	261.996.564.596,79	307.644.288.346,00
2	Dinas Kesehatan	62.327.823.314,42	79.690.534.290,50
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	84.196.265.879,01	182.386.939.276,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.456.562.606,00	29.964.773.416,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.916.384.224,00	4.582.967.915,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.152.570.656,00	4.122.847.883,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.092.188.242,00	16.642.986.137,00
8	Dinas Sosial	33.810.511.920,52	32.699.867.513,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.521.585.850,95	17.206.631.795,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4.002.607.713,00	6.776.523.151,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.109.272.348,00	21.324.356.737,00
12	Dinas Perhubungan	12.638.149.955,00	15.321.633.394,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.007.020.710,00	11.783.009.045,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.069.042.922,00	8.130.319.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.772.978.112,00	5.314.761.334,00
16	Dinas Kebudayaan	74.558.916.708,00	252.381.208.790,31
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.291.891.879,00	16.311.802.955,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.816.809.321,69	18.133.497.921,00
19	Dinas Pariwisata	7.671.867.108,00	15.271.275.967,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.790.867.601,28	15.227.359.945,53
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.893.211.310,00	11.052.193.450,00
22	Sekretariat Daerah	20.238.446.030,00	50.528.062.453,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.699.351.155,00	2.695.608.675,00
24	Paniradya Kaistimewan	3.726.146.465,00	623.334.857,00
25	Sekretariat DPRD	48.311.424.674,50	53.173.467.718,00
26	Inspektorat	1.560.124.684,36	3.091.805.429,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.112.717.410,00	9.533.115.399,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	23.061.837.416,69	27.489.390.064,49
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.770.868.383,00	14.096.281.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	3.994.855.118,00	12.955.865.209,00
	Jumlah	775.568.864.314,21	1.246.156.710.165,83

5.4.2.1.3 Beban Bunga**Rp0,00****Rp0,00**

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi**Rp78.044.846.317,00****Rp76.067.609.352,00**

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp78.044.846.317,00. Beban Subsidi tersebut merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan.

5.4.2.1.5 Beban Hibah**Rp788.134.032.759,58****Rp638.980.684.355,00**

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp788.134.032.759,58 terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp111.661.470.559,58 dan Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp673.992.024.200,00 serta Beban Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00. Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp673.992.024.200,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144**Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	10.227.178.492,29
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	28.030.027.361,88
3	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	73.404.264.705,41
	Jumlah	111.661.470.559,58

Tabel 5.145**Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat**

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Hibah Urusan Pendidikan	559.513.725.000,00
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00
3	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00
4	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	968.800.000,00
5	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00
6	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00
7	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	557.508.600,00
8	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00
9	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	400.000.000,00
10	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	6.000.000.000,00
11	Hibah Untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	-
12	Hibah Urusan Keistimewaan	102.460.490.600,00
	Jumlah	673.992.024.200,00

Adapun rincian Beban Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.146

Rincian Beban Hibah kepada Partai Politik

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00
2	Beban Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00
3	Beban Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00
4	Beban Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00
5	Beban Hibah Kepada Partai Golongan Karya	227.136.000,00
6	Beban Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00
7	Beban Hibah Kepada Partai Demokrat	94.432.800,00
8	Beban Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	279.979.200,00
9	Beban Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00
10	Beban Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00
	Jumlah	2.480.538.000,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Rp1.492.000.000,00

Rp702.000.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.492.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak bermasalah sosial dan pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp371.321.524.908,85

Rp341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp371.321.524.908,85 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147

Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.507.700.707,48	147.758.261.904,45
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.322.205.800,66	75.065.156.045,80
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.689.846.695,47	114.682.427.493,64
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	800.784.977,17	1.242.994.950,78
5	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.000.986.728,07	2.298.847.960,80
	Jumlah	371.321.524.908,85	341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.148
Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	112.767.318.072,16	88.886.464.917,45
2	Dinas Kesehatan	14.944.361.531,36	15.273.006.006,93
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	101.016.697.439,95	110.379.071.667,59
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.596.138.807,90	3.732.244.202,84
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	552.031.231,35	653.451.700,78
6	Satuan Polisi Pamong Praja	596.567.046,67	734.999.302,80
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.296.753.478,16	2.932.606.438,43
8	Dinas Sosial	3.528.439.928,42	3.816.156.625,21
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.492.800.660,60	3.584.604.149,15
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.101.660.527,87	1.089.283.959,33
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.296.937.442,29	6.912.720.980,56
12	Dinas Perhubungan	13.399.141.637,01	12.886.573.667,07
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.111.013.672,22	8.275.936.508,53
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.379.857.698,11	1.069.025.311,81
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	530.964.590,26	585.907.455,48
16	Dinas Kebudayaan	12.052.733.830,27	13.404.988.787,72
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.865.826.803,32	8.696.155.945,20
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.558.016.574,80	6.967.684.316,35
19	Dinas Pariwisata	2.206.053.407,97	2.772.054.731,18
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.004.867.324,24	7.076.313.933,98
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.408.047.333,41	1.215.422.726,64
22	Sekretariat Daerah	6.023.254.242,35	6.069.814.458,26
23	Badan Penghubung Daerah	620.556.198,44	586.573.263,45
24	Paniradya Kaistimewan	519.991.940,14	672.878.600,75
25	Sekretariat DPRD	10.384.448.648,35	11.619.910.884,20
26	Inspektorat	505.883.122,71	321.317.495,93
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	777.126.377,72	812.867.318,70
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	34.953.386.613,62	16.674.639.568,36
29	Badan Kepegawaian Daerah	1.526.571.583,07	1.606.419.444,72
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.304.077.144,11	1.738.593.986,07
	Jumlah	371.321.524.908,85	341.047.688.355,47

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang Rp68.812.666,80 Rp125.793.687,19

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp68.812.666,80 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp2.442.100,50, Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp33.372.674,20, dan Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp32.997.892,10.

Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp253.512,50 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp33.114.927,02 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp32.193.307,60 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp257.747,18 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp2.442.100,50 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
6. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp551.072,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain Rp566.223.583,08 Rp67.724.775,00

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp566.223.583,08 pada PPKD berupa Bebanj Penyisihan Dana Bergulir..

5.4.2.2 Beban Transfer**Rp1.089.597.393.536,63****Rp1.016.943.801.049,71**

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.089.597.393.536,63 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	697.652.615.144,00	731.506.477.128,71
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	390.599.778.392,63	281.452.614.421,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.345.000.000,00	1.560.062.700,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	2.424.646.800,00
	Jumlah	1.089.597.393.536,63	1.016.943.801.049,71

5.4.3 Surplus/Defisit**Rp1.068.875.252.051.07****Rp1.105.299.674.860,14****Kegiatan Operasional - LO**

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.068.875.252.051.07 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.732.499.444.078,61 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.663.624.192.027,54.

5.4.4 Surplus/Defisit**Rp3.339.152.986,53****Rp5.446.791.027,53****Kegiatan Non Operasional - LO**

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp3.339.152.986,53 merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp6.376.401.624,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp3.037.248.637,47. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp6.376.401.624,00 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:

1. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.367.955.715,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp9.748.035.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp3.380.079.285,00.
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp8.445.909,00 terdiri dari Surplus non operasional Rp4.145.075,00 (penjualan tanaman kedaluwarsa) sebesar Rp4.145.075,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp69.536.500,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp65.391.425,00 serta kenaikan nilai persediaan cadangan beras sebesar Rp4.300.834,00.

Defisit Non Operasional sebesar Rp3.037.248.637,47 berasal dari kerugian:

1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp17.578.000,00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp45.500.000,00 dikurangi harga pokok produksi sebesar Rp63.078.000,00.
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.672.205.540,75 (penjualan hortikultura al. sayur-sayuran, susu, dan semen beku) berasal dari nilai penjualan sebesar Rp1.556.289.000,00 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar Rp3.228.494.540,75.
3. Penjualan asset tetap yang sudah rusak berat dan using pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.257.223.375,02 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp886.549.556,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp2.143.772.931,02.

**5.4.5 Surplus/Defisit sebelum
Pos Luar Biasa - LO****Rp1.072.214.405.037,60****Rp1.110.746.465.887,67**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO sebesar Rp1.072.214.405.037,60 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.068.875.252.051,07 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO sebesar Rp3.339.152.986,53.

5.4.5.1 Pos Luar Biasa **Rp(237.777.858.847,04)** **Rp0,00**

Pos Luar Biasa Tahun 2020 digunakan untuk menyajikan semua penerimaan dan beban yang digunakan untuk penanganan pandemic Covid-19 baik yang berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga maupun sumber lain di luar Pemda DIY. Penyajian Pos Luar Biasa mengacu pada PSAP 12 Laporan Operasional yang mengatur adanya Kejadian Luar Biasa.

Pos Luar Biasa sebesar Rp(237.777.858.847,04) berasal dari Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp27.978.674.916,00 dikurangi dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp265.756.533.763,04.

Pendapatan Luar Biasa-LO berasal dari sumbangan masyarakat untuk penanganan Pandemi Covid-19 dalam bentuk uang sebesar Rp1.390.856.513,00 dan dalam bentuk barang sebesar Rp26.587.818.403,00. Beban Luar Biasa terdiri realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp183.061.717.739,64 dan penggunaan barang dari penerimaan hibah sebesar Rp82.694.816.023,40.

5.4.6 Surplus/Defisit - LO **Rp834.436.546.190,56** **Rp1.110.746.465.887,67**

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp834.436.546.190,56 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan - LO baik Operasional, Non Operasional dan Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp5.766.130.939.327,61 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional dan Beban Luar Biasa sebesar Rp4.821.389.575.921,03.

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Ekuitas Awal **Rp10.343.362.322.871,10** **Rp9.095.978.154**

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp10.343.362.322.871,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.247.384.168.552,96 atau 13,71% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.095.978.154.318,13. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp10.343.362.322.871,10 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.557.422.076.509,61
2	Dinas Kesehatan	179.762.825.687,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3.058.195.690.829,72
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	524.083.361.686,34
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.556.243.731,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.699.320.323,73
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.009.703.135,58
8	Dinas Sosial	94.565.366.637,84
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.839.783.963,66

No	Uraian	Ekuitas Awal
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.950.667.358,84
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.853.960.307,36
12	Dinas Perhubungan	161.692.715.906,93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.749.482.969,38
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.178.711.916,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.531.290.946,07
16	Dinas Kebudayaan	415.657.130.631,09
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	157.641.801.722,99
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	172.375.226.982,68
19	Dinas Pariwisata	52.052.629.791,66
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	229.930.924.085,77
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.894.325.491,44
22	Sekretariat Daerah	227.893.463.423,09
23	Badan Penghubung Daerah	25.674.229.162,28
24	Sekretariat DPRD	136.873.720.942,12
25	Inspektorat	16.917.483.561,61
26	Paniradya Kaistimewan	2.285.113.979,73
27	Badan Perencanaan Daerah	15.757.924.905,40
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.196.011.323.389,32
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.721.481.369.198,80
30	Badan Kepegawaian Daerah	13.129.987.658,22
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.694.466.034,11
	Jumlah	10.343.362.322.871,10

5.5.2 Surplus/Defisit

Rp834.436.546.190,56

Rp1.110.746.465.887,67

Surplus/Defisit LO Tahun 2020 sebesar Rp834.436.546.190,56 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan LO	Beban	Surplus/Defisit
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.577.576.117,00	1.163.420.589.776,45	(1.160.879.949.726,05)
2	Dinas Kesehatan	34.199.327.394,00	130.987.936.323,78	(96.788.608.929,78)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	7.944.031.617,30	223.274.800.630,58	(215.328.080.700,78)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	14.762.674.885,90	(14.783.788.305,90)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7.997.124.638,35	(7.997.124.638,35)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.317.000,00	14.049.809.195,67	(14.034.691.245,67)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.978.674.916,00	282.157.212.584,20	(254.348.487.668,20)
8	Dinas Sosial	532.200.000,00	62.429.508.117,94	(61.897.308.117,94)

No	Uraian	Pendapatan LO	Beban	Surplus/Defisit
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.793.755.000,00	24.139.107.634,55	(22.747.323.738,99)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	7.929.982.931,87	(7.929.982.931,87)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.289.238.539,05	47.326.848.650,47	(34.037.610.111,42)
12	Dinas Perhubungan	1.762.157.200,00	33.600.560.843,01	(31.839.547.958,03)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	27.615.080.468,22	(27.614.157.968,22)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	106.978.987,16	17.254.651.917,11	(17.188.554.669,95)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	512.415.000,00	5.817.634.050,26	(5.305.219.050,26)
16	Dinas Kebudayaan	413.104.500,00	105.305.906.594,27	(104.892.802.094,27)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	165.414.300,00	28.459.748.643,32	(28.296.447.343,32)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	836.388.400,00	27.991.895.035,49	(27.155.506.635,49)
19	Dinas Pariwisata	42.031.952,90	14.328.055.316,97	(14.286.023.364,07)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	601.265.829,00	48.305.697.275,97	(47.704.431.446,97)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	174.287.165,00	17.592.593.312,41	(17.418.306.147,41)
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	2.783.613.656,00	(2.783.613.656,00)
23	Sekretariat Daerah	116.866.764,62	54.206.223.353,35	(54.089.356.588,73)
24	Badan Penghubung Daerah	187.475.000,00	4.983.343.332,44	(4.795.868.332,44)
25	Sekretariat DPRD	-	63.987.759.135,85	(63.987.759.135,85)
26	DPRD	-	38.852.849.274,00	(38.852.849.274,00)
27	Inspektorat	-	13.189.232.708,07	(13.189.232.708,07)
28	Paniradya Kaistimewan	-	9.559.489.096,14	(9.559.489.096,14)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	14.619.686.120,72	(14.619.686.120,72)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.848.144.177.100,35	170.797.778.227,22	1.677.346.398.873,13
31	PPKD/BUD	3.822.807.798.836,23	1.957.834.496.196,29	1.975.954.723.199,52
32	Badan Kepegawaian Daerah	661.280.000,00	286.903.734.402,07	(286.246.859.862,07)
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.991.259.000,00	9.952.350.099,11	(7.961.091.099,11)
	Jumlah	5.766.854.520.618,61	4.932.417.974.428,05	834.436.546.190,56

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Rp112.887.408.210,70

Rp136.637.702.665,29

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2020 sebesar Rp112.887.408.210,70 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151**Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyerahan Hibah	(1.001.010.358,00)
2	Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi	(171.025.323.887,67)
3	Penghapusan	(11.272.848.235,90)
4	Ekstrakomtabel	(3.761.174.745,34)
5	Akumulasi penyusutan Aset ke OPD Lain	12.610.171.187,22
6	Pencatatan persediaan dari hasil produksi	2.036.310.000,00
7	Koreksi Penyertaan Modal secara metode Ekuitas	8.670.342.751,31
8	Penyertaan Modal Berupa Barang ke BUMD	179.222.362.679,00
9	Koreksi jurnal penyesuaian	97.408.578.820,08
	Jumlah	112.887.408.210,70

Tabel 5.152**Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar pada OPD**

No	Uraian	Dampak Kumulatif
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.316.785.535,24
2	Dinas Kesehatan	672.546.151,96
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	(19.021.874.272,18)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	46.416.882.795,47
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.107.085,99)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(78.929.069,01)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	270.025.507.818,00
8	Dinas Sosial	(82.398.133,63)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.223.393.326,24
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(3.820.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.198.179.429,01
12	Dinas Perhubungan	2.647.028.755,13
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.565.270.321,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.097.280.081,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	6.174.300,00
16	Dinas Kebudayaan	(45.444.670.346,46)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.226.199.311,16
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.748.328.610,49
19	Dinas Pariwisata	(33.552.666,67)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.064.270.533,55
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.098.083.195,85
22	Sekretariat Daerah	(1.284.687.260,81)
23	Badan Penghubung Daerah	842.200.000,00

24	Sekretariat DPRD	(900.000,00)
25	Inspektorat	(25.431.851,88)
26	Paniradya Kaistimewan	(487.996.329,55)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(562.500,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(123.318.043.499,88)
29	PPKD/BUD	(95.270.542.796,34)
30	Badan Kepegawaian Daerah	436.462.359,00
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(21.391.000,00)
	Jumlah	112.887.408.210,70

5.5.4 Ekuitas Akhir Rp 11.290.686.277.272,30 Rp10.343.362.322.871,10

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.290.686.277.272,30 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.153
Rincian Ekuitas Akhir per OPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.595.485.611.039,40
2	Dinas Kesehatan	180.741.797.301,30
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3.360.334.349.499,27
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	597.256.552.669,91
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.276.280.381,39
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.221.303.531,05
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	106.468.913.907,02
8	Dinas Sosial	94.366.147.531,27
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.044.410.478,35
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.216.722.040,97
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	112.790.126.033,24
12	Dinas Perhubungan	155.838.261.770,05
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.930.398.599,16
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.610.301.293,91
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.321.630.544,81
16	Dinas Kebudayaan	561.883.339.098,36
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	152.579.754.438,83
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	176.040.136.346,68
19	Dinas Pariwisata	54.237.375.689,92
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	245.058.488.170,35
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.142.299.991,88

22	Sekretariat Daerah	226.299.666.053,55
23	Badan Penghubung Daerah	26.017.628.880,84
24	Sekretariat DPRD	128.535.734.457,27
25	Inspektorat	17.602.119.235,66
26	Paniradya Kaistimewan	2.726.254.570,04
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.354.676.673,68
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.160.171.298.390,96
29	PPKD/BUD	2.075.297.358.678,07
30	Badan Kepegawaian Daerah	12.550.846.117,15
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.188.034.808,00
	Jumlah	11.290.686.277.272,30

5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, dan Hibah dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas Rp5.610.329.020.732,71 Rp5.696.004.211.789,50

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.610.329.020.732,71 berasal dari:

Tabel 5.154

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.773.940.604.572,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	36.546.077.142,71	42.420.048.683,08
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	85.960.824.196,14
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.959.267.630,54	177.120.836.332,28
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	114.252.471.928,00	56.035.674.200,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.870.747,00	24.907.600,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.227.647.676.000,00	1.351.102.020.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.029.119.335.346,00	978.540.310.453,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.286.576.228.221,00	1.162.772.688.443,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	58.831.799.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	780.019.190,00	706.035.310,00

13	Penerimaan Hibah	8.349.499.513,00	8.548.463.000,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50

5.6.1.2 Arus Kas Keluar Rp4.492.546.774.424,03 Rp4.509.447.244.845,17

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.492.546.774.424,03 dipergunakan untuk:

Tabel 5.155
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.562.236.884.707,39	1.553.763.754.881,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	707.629.279.470,01	1.072.294.764.575,00
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	78.044.846.317,00	76.067.609.352,00
5	Pembayaran Hibah	744.149.764.252,00	735.398.604.386,46
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.009.947.911,00	51.143.429.903,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	391.944.778.392,63	285.437.323.921,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	305.639.352.770,00	-
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	693.891.920.604,00	735.341.757.826,71
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.492.546.774.424,03	4.509.447.244.845,17

5.6.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp1.117.782.246.308,6 Rp1.186.556.966.944,33

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.117.782.246.308,68 berasal dari:

Tabel 5.156
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50
2	Arus Keluar Kas	(4.492.546.774.424,03)	(4.509.447.244.845,17)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	1.117.782.246.308,68	1.186.556.966.944,33

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1 Arus Masuk Kas **Rp4.326.932.767,00** **Rp6.016.930.667,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.326.932.767,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penjualan atas Tanah	-	-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	525.929.467,00	809.386.651,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	61.302.989,00	2.115.355.000,00
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	585.730.111,00	250.179.000,00
6	Penjualan atas Aset Lainnya	8.941.000,00	178.100.000,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
8	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.145.029.200,00	2.663.910.016,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00	6.016.930.667,00

Penjelasan:

1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp525.929.467,00 merupakan Arus Kas Masuk Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai sebesar Rp87.500.000,00, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp276.929.148,00 dan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp161.500.319,00 . Aset yang dijual tersebut merupakan aset yang akan dihapuskan karena telah usang dan rusak berat.
2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.302.989,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp585.730.111,00 merupakan Penjualan Hasil Pertanian sebesar Rp120.498.600,00, Penjualan Hasil Peternakan sebesar Rp299.317.100,00 dan Penjualan Air Curah sebesar Rp165.914.411,00.
4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp8.941.000,00 merupakan penjualan drum bekas sebesar Rp5.592.000,00, dan Penjualan Hasil Penebangan Pohon sebesar Rp3.349.000,00.
5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp3.145.029.200,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	DPM LDPM	3.000.000,00
	DPM LUEP	52.000.000,00
	Jumlah	55.000.000,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan (Koperasi)	600.000,00
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	1.088.429.200,00
	Dana BUKP	2.000.000.000,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Erupsi)	1.000.000,00
	Jumlah	3.090.029.200,00
	Total	3.145.029.200,00

5.6.2.2 Arus Keluar KAs Rp1.058.223.924.931,64 Rp1.243.800.185.484,85

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.058.223.924.931,64 dipergunakan untuk:

Tabel 5.159
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	696.800.024.901,00	469.142.424.222,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	137.484.204.942,00	159.857.330.876,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	52.613.388.365,00	138.986.381.949,17
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.021.109.346,64	242.118.840.886,68
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	15.382.208.041,00	23.907.706.051,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	332.989.336,00	1.190.501.500,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.590.000.000,00	198.597.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.058.223.924.931,64	1.243.800.185.484,85

Penjelasan:

1. Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp113.590.000.000,00 merupakan penyertaan modal PT. Bank BPD DIY sebesar Rp101.000.000.000,00, PT. Askrida sebesar Rp90.000.000,00, dan Perusda Air Bersih Tirtatama sebesar Rp12.500.000.000,00.
2. Arus Kas Keluar Pengeluaran Investasi Non Permanen sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan penambahan investasi non permanen dana bergulir melalui BUKP.

5.6.2.3 Arus Keluar Kas Bersih-Aktivitas Investasi Rp (1.053.896.992.164,64) (Rp1.237.783.254.817,85)

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(1.053.896.992.164,64) berasal dari:

Tabel 5.160

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00	6.016.930.667,00
2	Arus Keluar Kas	(1.058.223.924.931,64)	1.243.800.185.484,85)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	(1.053.896.992.164,64)	(1.237.783.254.817,85)

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1 Arus Masuk Kas Rp0,00 Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2 Arus Keluar Kas Rp0,00 Rp0,00

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.6.3.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Rp00,00 Rp0,00

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1 Arus Masuk KAs Rp1.651.525.349.291,00 Rp6.013.143.620.114,68

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	74.140.737.793,37	42.781.245.870,37
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	1.460.627.772.698,63	5.707.365.457.874,31
4	Sisa Uang Persediaan	-	6.516.806.832,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp116.756.838.799,00, Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp116.756.838.799,00 terdiri dari:

Tabel 5.162
Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	52.059.250.128,00
2	PPH Pasal 21	6.040.736.691,00
3	Taperum	757.914.000,00
4	PPn	48.511.365.674,00
5	PPH Pasal 22	3.361.831.321,00
6	PPH Pasal 23	3.511.854.702,00
7	PPH Pasal 4 (2)	2.513.886.283,00
	Jumlah	116.756.838.799,00

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163
Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	106.246.927.970,00	97.229.763.307,00	9.017.164.663,00	-
2	Dinas Kesehatan	26.529.736.670,00	25.783.408.822,00	746.327.848,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	432.273.781.776,00	430.292.544.268,00	1.981.237.508,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.163.669.967,00	35.722.495.888,00	441.174.079,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.654.910.541,00	4.224.455.262,00	430.455.279,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.224.231.531,00	5.185.263.892,00	38.967.639,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.527.053.928,00	4.121.736.079,00	405.317.849,00	-
8	Dinas Sosial	19.146.438.559,00	18.331.939.884,00	814.498.675,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.375.869.565,00	4.967.860.278,00	408.009.287,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.986.734.841,00	1.870.222.620,00	116.512.221,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.106.067.894,00	10.852.883.596,00	253.184.298,00	-
12	Dinas Perhubungan	3.708.792.993,00	3.479.842.790,00	228.950.203,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.755.857.726,00	2.584.761.109,00	171.096.617,00	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.848.498.643,00	7.536.686.377,00	311.812.266,00	-
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.169.946.482,00	1.159.144.801,00	10.801.681,00	-
16	Dinas Kebudayaan	243.438.508.466,00	241.197.763.271,00	2.240.745.195,00	-
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.161.692.044,00	4.876.104.913,00	285.587.131,00	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.296.861.506,00	4.931.078.390,00	365.783.116,00	-
19	Dinas Pariwisata	7.521.325.696,00	6.862.318.470,00	659.007.226,00	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.008.502.705,00	8.706.147.409,00	302.355.296,00	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.342.436.587,00	5.291.609.897,00	50.826.690,00	-
22	Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	22.734.730.240,00	19.248.030.300,00	3.486.699.940,00	-
24	Paniradya Kaistimewan	5.330.603.050,00	5.139.267.325,00	191.335.725,00	-
25	Badan Penghubung Daerah	1.477.739.785,00	1.448.710.184,00	29.029.601,00	-
26	DPRD	-	-	-	-

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
27	Sekretariat DPRD	44.712.079.203,00	37.676.087.249,00	7.035.991.954,00	-
28	Inspektorat	6.289.179.861,00	6.150.711.268,00	138.468.593,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.881.831.743,00	4.592.524.256,00	289.307.487,00	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	89.518.848.900,00	88.846.458.250,00	672.390.650,00	-
31	PPKD	405.057.698.575,00	363.136.272.300,63	41.921.426.274,37	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	7.944.588.587,00	6.945.968.198,00	998.620.389,00	-
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.333.364.458,00	2.235.712.045,00	97.652.413,00	-
	JUMLAH	1.534.768.510.492,00	1.460.627.772.698,63	74.140.737.793,37	-

5.6.4.2 Arus Kas Keluar Kas Rp1.651.525.349.291,00 Rp6.013.143.620.114,68

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.164
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	1.534.768.510.492,00	5.756.663.510.576,68
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68

5.6.4.3 Arus Kas Bersih Rp0,00 Rp0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68
2	Arus Kas Keluar	(1.651.525.349.291,00)	(6.013.143.620.114,68)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan Kas) Rp63.706.945.217,68 Rp(51.226.287.873,52)

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.706.945.217,68 berasal dari:

Tabel 5.166
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	1.117.732.196.557,68	1.186.556.966.944,33
2	Aktivitas Investasi	(1.053.896.992.164,64)	(1.237.783.254.817,85)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	63.885.254.144,04	(51.226.287.873,52)

5.6.6 Saldo Akhir Kas **Rp484.453.213.139,46** **Rp433.555.460.454,42**

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp433.555.460.454,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167
Rincian Kas Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di BUD	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00	7.145.501.321,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00	54.694.388,00
4	Kas di BLUD	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06
5	Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	-
6	Kas Lainnya di Rekening Sumbangan	88.015,00	-
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
1	Kas Lainnya	-	12.987.501.459,00
	Jumlah Kas (Neraca)	484.453.213.139,46	433.555.460.454,42

Penjelasan:

Kas di Kasda sebesar Rp441.671.236.637,40 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp439.850.345.019,04, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.692.632.443,00 dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp52.675.210,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah pada :

- a. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.127.000,00.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.682.919,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.334.000,00.
- d. Dinas Koperasi sebesar Rp43.531.291,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, pada :

- a. Dinas Perpustakaan Arsip Daerah sebesar Rp2.113.000,00
- b. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.405.460,00

Kas di BLUD sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkesos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Grhasia, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp9.360.340.315,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp2.412.929,00	9.362.753.244,15
2	RS Paru Respira, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp10.661.454.406,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp15.944.713,00	10.677.399.119,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.104.778.230,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp3.507.713,00	2.108.285.943,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp3.239.035.266,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp7.636.226,00	3.246.671.492,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp4.619.400.751,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp6.239.546,00	4.625.640.297,62
6.	BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.653.005.348,00, dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp4.207.562,00	2.657.212.910,00
	Jumlah	32.677.963.006,06

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa dana BOS tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp614.183.396,00 dan sisa dana BOS tahun 2020 sebesar Rp9.430.548.415,00.

Kas Lainnya di Rekening Sumbangan sebesar Rp88.015,00 merupakan jasa giro di Rekening Sumbangan Covid 19 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

6.1 Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan efektifitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 meliputi pembentukan perangkat daerah, jabatan pada perangkat daerah, dan *Parampara Praja*.

Perangkat daerah yang ditetapkan terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, meliputi:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
 - 1) Biro Tata Pemerintahan
 - 2) Biro Hukum
 - 3) Biro Organisasi
 - 4) Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
 - c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
 - 1) Biro Bina Mental Spiritual
 - 2) Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
2. *Paniradya Kaistimewan*
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas Daerah
 - a. Dinas Pariwisata
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - l. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - p. Dinas Sosial
 - q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
 - r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - c. Badan Kepegawaian Daerah

- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Penghubung Daerah

6.2 Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan pengaturan keistimewaan DIY berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 mengacu pada berbagai perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan hal-hal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penugasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi *trigger mechanism* adalah mendorong pembinaan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan

pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirimkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan Surat terakhir KPK dengan **Nomor B/1663/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020** mengenai permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut:

**PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Nama Aset Satuan/Luas Nilai	Nama Pihak Swasta/Perorangan	Permasalahan	Progress
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 15.000 m ² Rp226.525.000	Murdiyanto Lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul	Berdasarkan hasil pengukuran, saudara Murdiyanto selaku lurah Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul tidak mau menandatangani Gambar Ukur karena hasil ukur 20.000 m ² sudah melebihi dari permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul seluas 15.000 m ² ; meskipun sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 1980 akan tetapi tanah tersebut juga masih tercatat dalam buku inventaris di Desa Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan mantan Carik bahwa Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Kedung Keris seluas 2 Ha, tanah tersebut pada tahun 1980/81/82 dibeli oleh Bappeda Provinsi DIY untuk Proyek Bangun Desa, adapun tanah pengganti sudah bersertifikat atas nama Pemeritah Desa Kedungkeris sejumlah 5 bidang tanah yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - SHP Nomor 00001 seluas 3.739 m²; - SHP Nomor 00002 seluas 4,713 m²; - SHP Nomor 00007 seluas 3,817 m²; - SHP Nomor 00008 seluas 1,658 m²; - SHP Nomor 00038 Seluas 4,228 m². 	Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Kedung Keris; dan mengirim surat dari Sekda DIY yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3977 tanggal 4 Maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan hukum
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 10.327 m ² Rp379.750.000,00	Pemerintah Desa Sumber Agung	Satu obyek tanah, SHP Pemda DIY dan Pemerintah Desa juga mempunyai sertifikat tanah tetapi sudah dibatalkan BPN/Kementerian ATR, sehingga yang berlaku hanya 1 sertifikat yaitu atas nama Pemerintah Daerah DIY; saat ini masih dikuasai Pemerintah Desa Sumber Agung dan disewakan kepada pihak ketiga untuk kios dan gudang.	Pemda DIY sudah berkoordinasi dengan Pemdes Sumber Agung, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kantor Pertanahan Sleman. Saat ini Kepala Desa masih PJ, dimana PJ Kepala Desa tidak berani membuat kebijakan menunggu definitif Kepala desa melalui PILKADES pada bulan Desember 2020

3.	Tanah dan Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 701 m ² Rp475.378.040,00	Setio Agus Samapto, SH	Tanah dan bangunan yang disewa sdr. Setio Agus Samapto, SH telah berakhir pada tanggal 30 November 2018, yang bersangkutan masih menghuni meskipun sudah ada surat peringatan ke-1,2, dan 3; Pihak penghuni rumah dinas tersebut mengajukan gugatan perdata ke PN Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 tentang sewa menyewa dan pengajuan Hak untuk tanah negara golongan III	Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3826 tanggal 2 maret 2020 untuk dilakukan Permohonan Pendampingan Pengosongan; Penghuni mengajukan PK ke Mahkamah Agung, saat ini Pemda DIY menunggu keputusan MA
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan 5.104 m ² Rp1.000.000,00	Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan	Perolehan tanah berasal dari P3D Kanwil Kesehatan, diatas Tanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak Sudirman dan di sekitarnya terdapat banyak pemukiman warga. Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai Kanwil Kementerian Kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di eks prambusia tersebut untuk disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan.	Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang berada dilingkungan tersebut; Telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; sudah dilakukan proses penilaian oleh appraisal untuk nantinya dilakukan pemanfaatansewa tanah ; Dengan Adanya Covid -19 maka action pelaksanaannya tertunda karena belum berani mengadakan rapat tatap muka dengan warga secara langsung

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi *Covid-19* sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jarring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic *Covid-19*. Laporan Keuangan Tahun 2020 selain disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 39 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 40 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN XI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah	Dasar hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah pembayaran Tahun ini		Jumlah sisa pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah											

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006